

**RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	2
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	3
1.3.1. Rancangan Awal RKPD dengan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026	4
1.3.2. Rancangan Awal RKPD dengan Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	6
1.3.3. Rancangan Awal RKPD dengan Rancangan RKP Tahun 2023	6
1.3.4. Rancangan Awal RKPD dengan Rancangan Awal Renja OPD Tahun 2023	6
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4.1. Maksud	6
1.4.2. Tujuan	6
1.5. SISTEMATIKA RANWAL RKPD TAHUN 2023	7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	9
2.1. Aspek Geografi Dan Demografi	10
2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif	10
2.1.2. Topografi dan Jenis Tanah	13
2.1.3. Geologi	14
2.1.4. Hidrologi	15
2.1.5. Klimatologi	17
2.1.6. Penggunaan Lahan	18
2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah	20
2.1.8. Wilayah Rawan Bencana	26
2.1.9. Aspek Demografi	28
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	32
2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi	32
2.2.2. Struktur Ekonomi	33
2.2.3. Inflasi	38
2.2.4. PDRB per Kapita	40
2.2.5. Indeks Gini	41
2.2.6. Kemiskinan	41
2.2.7. Angka Rasio Penduduk yang Bekerja	48
2.2.8. Angka Kriminalitas yang Ditangani	49

2.2.9.	Indeks Pembangunan Manusia	49
2.2.10.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	51
2.2.11.	Harapan Lama Sekolah	52
2.2.12.	Usia Harapan Hidup	52
2.2.13.	Pengeluaran Per Kapita	53
2.2.14.	Angka Partisipasi Kasar	54
2.2.15.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	55
2.2.16.	Angka Partisipasi Murni (APM)	56
2.2.17.	Angka Kematian Bayi (AKB)	56
2.2.18.	Angka Kematian Balita (AKABA)	57
2.2.19.	Angka Kematian Ibu (AKI)	58
2.2.20.	Angka Kesakitan	59
2.2.21.	Prevalensi Balita Stunting	60
2.2.22.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	60
2.2.23.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61
2.2.24.	Kebudayaan	61
2.2.25.	Pemuda dan Olahraga	62
2.3.	Aspek Pelayanan Umum	63
2.3.1.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	63
2.3.2.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	94
2.3.3.	Urusan Pemerintahan Pilihan	136
2.3.4.	Unsur Penunjang	146
2.3.5.	Unsur Pendukung	151
2.3.6.	Unsur Pengawasan	156
2.3.7.	Unsur Pemerintahan Umum	157
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah	159
2.4.1.	Kemampuan Ekonomi Daerah	159
2.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah	160
2.4.3.	Fokus Iklim Investasi	164
2.4.4.	Fokus Sumber Daya Manusia	166
2.4.5.	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	167
2.5.	Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Sampai Dengan Tahun 2020	173
2.5.1.	Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Sampai Dengan Tahun 2020	173
2.5.2.	Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama Sampai Dengan Tahun 2020	180
2.5.3.	Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020	219
2.5.4.	Hasil Evaluasi <i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's) Tahun 2020	225
2.6.	Permasalahan Pembangunan Daerah	250

2.6.1.	Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	250
2.7.	Isu Strategis	251
2.7.1.	Tata Kelola Pemerintahan	252
2.7.2.	Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup	253
2.7.3.	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman	255
2.7.4.	Peningkatan Derajat Kesehatan (Masa Pandemi COVID-19)	257
2.7.5.	Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran	258
2.7.6.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	259
2.7.7.	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal	260
2.7.8.	Pelestarian Budaya Lokal	262
2.7.9.	Kondusivitas Wilayah	262
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	263
3.1.	ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH	263
3.1.1.	Kondisi Ekonomi Daerah	264
3.1.2.	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah	268
3.2.	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	272
3.2.1.	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	273
3.2.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	274
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	281
4.1.	TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN	281
4.1.1.	Gambaran Kota Pekalongan dalam visi tahun 2021-2026	281
4.1.2.	Misi	285
4.1.3.	Tujuan Dan Sasaran	289
4.2.	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023	299
4.2.1.	Prioritas Pembangunan Nasional	300
4.2.2.	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	308
4.2.3.	Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan	312
4.2.4.	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023	326
4.2.5.	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	327
4.2.6.	Inovasi Kebijakan Pembangunan	327
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	335
5.1.	PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2023	335
5.1.1.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	335

5.1.2.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	339
5.1.3.	Urusan Pemerintahan Pilihan	346
5.1.4.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	349
5.1.5.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	349
5.1.6.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	351
5.1.7.	Unsur Kewilayahan	352
5.1.8.	Unsur Pemerintahan Umum	352
5.1.9.	Non Urusan	353
5.2	KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023	796
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	797
6.1	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH TAHUN 2023	797
6.2	INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	798
BAB VII	PENUTUP	807
DAFTAR PUSTAKA		809

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hubungan Rancangan Awal RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 dengan RPJMD Tahun 2021-2026.....	5
Tabel 2.1	Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan	12
Tabel 2.2	Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Pekalongan Tahun 2020	17
Tabel 2.3	Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	18
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	29
Tabel 2.5	Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Tahun 2016-2020	30
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa).....	31
Tabel 2.7	Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (persen).....	33
Tabel 2.8	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	38
Tabel 2.9	Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020.....	40
Tabel 2.10	Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2016 – 2020.....	40
Tabel 2.11	Indeks Gini Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2020	41
Tabel 2.12	Garis Kemiskinan (GK) Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021	42
Tabel 2.13	Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	49
Tabel 2.14	Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2017-2021	51
Tabel 2.15	Angka Partisipasi Kasar Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020.....	54
Tabel 2.16	Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenis Sekolah Berbasis Gender di Kota Pekalongan Tahun 2020	55
Tabel 2.17	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2019	55
Tabel 2.18	Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020	56
Tabel 2.19	Angka Partisipasi Murni di Kota Pekalongan Berbasis Gender Tahun 2020	56
Tabel 2.20	Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020	57

Tabel 2.21	Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	59
Tabel 2.22	Angka Kesakitan di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021	59
Tabel 2.23	Prevalensi Balita Stunting Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	60
Tabel 2.24	Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian dan Gedung Kesenian Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020	62
Tabel 2.25	Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020	62
Tabel 2.26	Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020	63
Tabel 2.27	Perkembangan Fasilitas dan Kegiatan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020	63
Tabel 2.28	Jenjang Pendidikan PAUD/TK di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020	64
Tabel 2.29	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020	64
Tabel 2.30	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang TK-SMP di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020	65
Tabel 2.31	Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020	65
Tabel 2.32	Rasio Ketersediaan Sekolah Untuk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020	66
Tabel 2.33	Rasio Guru dan Murid di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020	66
Tabel 2.34	Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020	67
Tabel 2.35	Rasio Guru dan Murid Jenjang SD/MI di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020	67
Tabel 2.36	Rasio Guru dan Murid Jenjang SMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020	67
Tabel 2.37	Kondisi Bangunan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Dalam Kondisi Baik Tahun 2016 - 2020	68
Tabel 2.38	Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan 2016 - 2020	68
Tabel 2.39	Angka Kelulusan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	69
Tabel 2.40	Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020	69
Tabel 2.41	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kota Pekalongan tahun 2016 - 2020	70
Tabel 2.42	Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	70
Tabel 2.43	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020	70
Tabel 2.44	Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2020	71
Tabel 2.45	Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per 1.000 Balita di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020	71

Tabel 2.46	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Rumah Sakit per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020.....	72
Tabel 2.47	Persentase Rumah Sakit Rujukan yang Terakreditasi Tahun 2016 - 2020	72
Tabel 2.48	Rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	73
Tabel 2.49	Rasio Tenaga Paramedis di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020	73
Tabel 2.50	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Surat Ijin Praktek Tahun 2019 - 2020.....	74
Tabel 2.51	Persentase Sarana Farmasi yang Memenuhi Standar Tahun 2016 - 2020	75
Tabel 2.52	Persentase Balita Usia <6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020.....	75
Tabel 2.53	Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	76
Tabel 2.54	Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020.....	76
Tabel 2.55	Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran Tahun 2016 - 2020	78
Tabel 2.56	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat Tahun 2016 - 2020	78
Tabel 2.57	Penduduk Miskin yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020.....	79
Tabel 2.58	Cakupan Rumah Tangga Sehat di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020	80
Tabel 2.59	Kondisi Jaringan Jalan Negara di Kota Pekalongan Tahun 2016–2020	81
Tabel 2.60	Kondisi Jaringan Jalan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	81
Tabel 2.61	Rasio Jaringan Irigasi di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020.....	82
Tabel 2.62	Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020.....	82
Tabel 2.63	Kondisi Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	82
Tabel 2.64	Data Saluran Drainase di Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2020	83
Tabel 2.65	Genangan Banjir dan Rob di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	83
Tabel 2.66	Pembangunan Revetment di Kota Pekalongan Tahun 2015-2020	84
Tabel 2.67	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	85
Tabel 2.68	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW.....	86
Tabel 2.69	Perkembangan Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Layak Huni di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	87

Tabel 2.70	Data Kebutuhan Rumah (Backlog) di Kota Pekalongan Tahun 2020	87
Tabel 2.71	Persentase Pelayanan Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	87
Tabel 2.72	Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	88
Tabel 2.73	Penduduk Bersanitasi di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	88
Tabel 2.74	Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pekalongan sampai dengan Tahun 2020.....	89
Tabel 2.75	Rasio Jumlah Polisi PP (PNS) dan Jumlah Polisi PP (Banpol Non PNS) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan 2016 – 2020	90
Tabel 2.76	Penyelesaian Pelanggaran Perda di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	91
Tabel 2.77	Rasio Jumlah Linmas (Ton Inti) dan Linmas (Kecamatan dan Kelurahan) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	91
Tabel 2.78	Jumlah Panti Asuhan dan Anak yang Diasuh di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	92
Tabel 2.79	Kategori dan Jumlah PMKS di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	93
Tabel 2.80	Jumlah PSKS di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	93
Tabel 2.81	Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan DTKS di Kota Pekalongan Tahun 2019-2020	94
Tabel 2.82	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekalongan Tahun 2017 – Agustus 2021	95
Tabel 2.83	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020.....	96
Tabel 2.84	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2016 – 2020	96
Tabel 2.85	Persentase Perusahaan Menerapkan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	97
Tabel 2.86	Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	98
Tabel 2.87	Rasio Ketersediaan Pangan Utama Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	101
Tabel 2.88	Skor PPH Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020.....	101
Tabel 2.89	Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020.....	102
Tabel 2.90	Konsumsi Energi Per Kapita/tahun di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	102
Tabel 2.91	Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	103
Tabel 2.92	Persentase Tertib Hukum Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020.....	105
Tabel 2.93	Perkembangan Pemanfaatan IPAL Komunal di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020	105
Tabel 2.94	Penanganan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020	106

Tabel 2.95	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2017-2020	107
Tabel 2.96	Persentase Penduduk ber-NIK di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020	109
Tabel 2.97	Penerbitan Akta Kematian di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020	110
Tabel 2.98	Penerbitan Akta Nikah di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020	110
Tabel 2.99	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020.....	111
Tabel 2.100	PKK Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	111
Tabel 2.101	Posyandu Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	112
Tabel 2.102	Rasio Akseptor KB per 100 Pasangan Usia Subur di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	112
Tabel 2.103	Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020.....	113
Tabel 2.104	Kategori Tingkat Pelayanan Jalan.....	114
Tabel 2.105	Kinerja Ruas Jalan di Kota Pekalongan yang Diukur Dari Tingkat Pelayanan	115
Tabel 2.106	Perkembangan Rasio Izin Trayek di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	117
Tabel 2.107	Faktor Muat (Load Factor) Angkutan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020.....	118
Tabel 2.108	Persentase Angkutan Darat AKAP dan AKDP Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	119
Tabel 2.109	Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020.....	119
Tabel 2.110	Lama Pengujian Kelayakan Kendaraan Umum (KIR) di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	120
Tabel 2.111	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Pekalongan 2016 – 2020.....	120
Tabel 2.112	Persentase Penyelenggaraan Parkir Berizin di Kota Pekalongan 2016 – 2020.....	121
Tabel 2.113	Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020.....	121
Tabel 2.114	Banyaknya Penumpang Yang Naik Kereta Api Melalui Stasiun KA Pekalongan Tahun 2016 – 2020	122
Tabel 2.115	Jalur Perlintasan Kereta Api di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	123
Tabel 2.116	Total Kecelakaan Rerata per km untuk 1 tahun di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	123
Tabel 2.117	Angka Kematian akibat kecelakaan per 100.000 penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020.....	123
Tabel 2.118	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Kota Pekalongan di Tahun 2020.....	124
Tabel 2.119	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Tahun 2016 - 2020.....	125

Tabel 2.120	Rasio Jumlah Jaringan Komunikasi di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	125
Tabel 2.121	Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal yang Masuk ke Daerah Tahun 2016-2020.....	126
Tabel 2.122	Jumlah Penyiaran Radio dan Televisi di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020.....	126
Tabel 2.123	Persentase Rumah Tangga Pelanggan Telepon Tetap di Kota Pekalongan 2016-2020.....	126
Tabel 2.124	Persentase Koperasi Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	128
Tabel 2.125	Jumlah UMKM di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020.....	129
Tabel 2.126	Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	129
Tabel 2.127	Realisasi PMDN di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	130
Tabel 2.128	Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	130
Tabel 2.129	Perkembangan Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	130
Tabel 2.130	Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020	132
Tabel 2.131	Penyelenggaraan Festival/ Pentas Seni/ Event di Kota Pekalongan Tahun 2020.....	132
Tabel 2.132	Seni Budaya Kota Pekalongan Tahun 2018-2020.....	133
Tabel 2.133	Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	133
Tabel 2.134	Perkembangan Perpustakaan di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020	134
Tabel 2.135	Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	134
Tabel 2.136	Pemanfaatan Arsip Statis Tahun 2017-2020	135
Tabel 2.137	Sertifikasi Kompetensi Kearsipan Tahun 2017-2020.....	136
Tabel 2.138	Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Pekalongan Tahun 2016- 2020 (kg).....	136
Tabel 2.139	Konsumsi Ikan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (kg/kapita/tahun)	137
Tabel 2.140	Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	137
Tabel 2.141	Produksi Ikan Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (ton).....	138
Tabel 2.142	Jumlah Hotel, Restoran dan Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	138
Tabel 2.143	Tingkat Okupansi Hotel di Kota Pekalongan Tahun 2018-2019.....	139
Tabel 2.144	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	139
Tabel 2.145	Jumlah Kunjungan Wisata dan Pendapatan Daerah dari Obyek Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020.....	140
Tabel 2.146	Produksi Padi di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	140

Tabel 2.147	Cakupan Bina Kelompok Petani Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	141
Tabel 2.148	Jenis Pasar dan Toko di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	141
Tabel 2.149	Jumlah Pedagang/Usaha Informal di Kota Pekalongan Tahun 2020	142
Tabel 2.150	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	143
Tabel 2.151	Klasifikasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	144
Tabel 2.152	Nilai Investasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020	144
Tabel 2.153	Jumlah IKM Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	144
Tabel 2.154	Jumlah Tenaga Kerja Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020.....	145
Tabel 2.155	Nilai Investasi (Rp. Juta) IKM Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	145
Tabel 2.156	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	146
Tabel 2.157	Jumlah Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	146
Tabel 2.158	Nilai SAKIP Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020.....	147
Tabel 2.159	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di Kota Pekalongan Tahun 2020	148
Tabel 2.160	Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2018-2019	150
Tabel 2.161	Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2020.....	150
Tabel 2.162	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2020	153
Tabel 2.163	Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2020.....	153
Tabel 2.164	Jumlah Diklat Aparatur di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	155
Tabel 2.165	Jumlah Aparatur yang Melakukan General Check-up dan Mengikuti Diklat Purna Tugas di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020.....	155
Tabel 2.166	Tingkat Kematangan SPIP Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	157
Tabel 2.167	Banyaknya Kasus Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020	157
Tabel 2.168	Jumlah Kasus Konflik Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020	157
Tabel 2.169	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	158
Tabel 2.170	Tingkat Partisipasi Politik di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	158
Tabel 2.171	Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Tahun 2016 – 2020.....	159

Tabel 2.172	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	160
Tabel 2.173	Penggunaan Air Tanah Untuk Kebutuhan Sambungan Rumah (SR) di Kota Pekalongan Tahun 2019-2020	162
Tabel 2.174	Persentase RT yang menggunakan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020.....	163
Tabel 2.175	Jumlah dan Tipe Akomodasi Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	164
Tabel 2.176	Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha	164
Tabel 2.177	Inovasi Daerah Lainnya	171
Tabel 2.178	Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan	172
Tabel 2.179	Pusat Inovasi yang Dimiliki Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan	173
Tabel 2.180	Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Pekalongan Tahun 2020	174
Tabel 2.181	Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2020	180
Tabel 2.182	Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2020	184
Tabel 2.183	Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2020	189
Tabel 2.184	Capaian Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2020	190
Tabel 2.185	Capaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas Kota Pekalongan Tahun 2020	191
Tabel 2.186	Capaian Indikator Urusan Sosial Kota Pekalongan Tahun 2020	192
Tabel 2.187	Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2020	192
Tabel 2.188	Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2020	194
Tabel 2.189	Capaian Indikator Urusan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2020	194
Tabel 2.190	Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kota Pekalongan Tahun 2020	195
Tabel 2.191	Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2020	195
Tabel 2.192	Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2020.....	197
Tabel 2.193	Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pekalongan Tahun 2020.....	198
Tabel 2.194	Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2020.....	198
Tabel 2.195	Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2020	199
Tabel 2.196	Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2020.....	200

Tabel 2.197	Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2020.....	201
Tabel 2.198	Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kota Pekalongan Tahun 2020	202
Tabel 2.199	Capaian Indikator Urusan Kebudayaan Kota Pekalongan Tahun 2020	202
Tabel 2.200	Capaian Indikator Urusan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun 2020	203
Tabel 2.201	Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kota Pekalongan Tahun 2020	204
Tabel 2.202	Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2020.....	204
Tabel 2.203	Capaian Indikator Urusan Statistik Kota Pekalongan Tahun 2020	205
Tabel 2.204	Capaian Indikator Urusan Persandian Kota Pekalongan Tahun 2020	206
Tabel 2.205	Capaian Indikator Urusan Perikanan dan Kelautan Kota Pekalongan Tahun 2020.....	206
Tabel 2.206	Capaian Indikator Urusan Pariwisata Kota Pekalongan Tahun 2020	207
Tabel 2.207	Capaian Indikator Urusan Pertanian Kota Pekalongan Tahun 2020	208
Tabel 2.208	Capaian Indikator Urusan Perindustrian Kota Pekalongan Tahun 2020	209
Tabel 2.209	Capaian Indikator Urusan Perdagangan Kota Pekalongan Tahun 2020	209
Tabel 2.210	Capaian Indikator Urusan Perencanaan Kota Pekalongan Tahun 2020	210
Tabel 2.211	Capaian Indikator Urusan Keuangan Kota Pekalongan Tahun 2020	211
Tabel 2.212	Capaian Indikator Urusan Kepegawaian dan Diklat Kota Pekalongan Tahun 2020.....	212
Tabel 2.213	Capaian Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan Tahun 2020.....	213
Tabel 2.214	Capaian Indikator Urusan Fungsi Lain Kota Pekalongan Tahun 2020	214
Tabel 2.215	Capaian Indikator Urusan Rutin Kota Pekalongan Tahun 2020	217
Tabel 2.216	Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kota Pekalongan Tahun 2020	219
Tabel 2.217	Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kota Pekalongan Tahun 2020	220
Tabel 2.218	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Pekalongan Tahun 2020	222
Tabel 2.219	Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kota Pekalongan Tahun 2020	223
Tabel 2.220	Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Pekalongan Tahun 2020.....	223
Tabel 2.221	Capaian SPM Bidang Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2020	225

Tabel 2.222	Capaian SDG's Pilar Pembangunan Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2020	226
Tabel 2.223	Capaian SDG's Pilar Pembangunan Ekonomi di Kota Pekalongan Tahun 2020.....	235
Tabel 2.224	Capaian SDG's Pilar Pembangunan Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2020.....	241
Tabel 2.225	Capaian SDG's Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola di Kota Pekalongan Tahun 2020	247
Tabel 2.226	Permasalahan Pembangunan Daerah	250
Tabel 2.228	Isu Strategis	251
Tabel 3.1	Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (persen).....	265
Tabel 3.2	Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2016 – 2020.....	266
Tabel 3.3	Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020.....	267
Tabel 3.4	Realisasi, Target dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan	270
Tabel 3.5	Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan.....	271
Tabel 3.6	Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan.....	271
Tabel 3.7	Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan di Kota Pekalongan	271
Tabel 3.8	Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pekalongan	271
Tabel 3.9	Realisasi, Target dan Proyeksi Inflasi di Kota Pekalongan	272
Tabel 3.10	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2024.....	276
Tabel 3.11	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2024.....	278
Tabel 3.12	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2024.....	279
Tabel 4.1	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021– 2026 Visi : “Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”	291
Tabel 4.2	Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026	295
Tabel 4.3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.....	298
Tabel 4.4	Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis Dan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2023	314
Tabel 4.5	Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023.....	316
Tabel 4.6	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional.....	326

Tabel 5.1	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023.....	354
Tabel 5.1	Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Kota Pekalongan Tahun 2023	796
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023.....	797
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023.....	798

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	4
Gambar 2.1	Peta Orientasi Kota Pekalongan	11
Gambar 2.2	Peta Administratif Kota Pekalongan.....	12
Gambar 2.3	Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan	13
Gambar 2.4	Peta Geologi Wilayah Kota Pekalongan	15
Gambar 2.5	Wilayah Sungai Pemali-Comal.....	15
Gambar 2.6	Peta Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan.....	19
Gambar 2.7	Peta Rencana Struktur Ruang	21
Gambar 2.8	Peta Rencana Pola Ruang.....	22
Gambar 2.9	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	29
Gambar 2.10	Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	30
Gambar 2.11	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	31
Gambar 2.12	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020.....	32
Gambar 2.13	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2016 – 2020	33
Gambar 2.14	Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016 – 2020	39
Gambar 2.15	Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Daerah Setara Tahun 2016 – 2020.....	39
Gambar 2.16	Perbandingan Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021.....	42
Gambar 2.17	Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 (000 jiwa)	43
Gambar 2.18	Perbandingan Rasio Penduduk Miskin Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021	44
Gambar 2.19	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021	45
Gambar 2.20	Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021.....	45
Gambar 2.21	Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021	46
Gambar 2.22	Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021.....	47
Gambar 2.23	Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021	47

Gambar 2.24	Rasio TPAK dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	48
Gambar 2.25	Rasio TKK dan TPT di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020.....	49
Gambar 2.26	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2017-2021	50
Gambar 2.27	Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021.....	51
Gambar 2.28	Harapan Lama Sekolah di Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021	52
Gambar 2.29	Perbandingan Umur Harapan Hidup di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021	53
Gambar 2.30	Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jateng Tahun 2017-2021	54
Gambar 2.31	Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Pekalongan dan Jawa Tengah Tahun 2016-2020	58
Gambar 2.32	Perbandingan IPG di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020	60
Gambar 2.33	Perkembangan IDG Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020	61
Gambar 2.34	Persentase Kunjungan di RSUD Benda Kota Pekalongan Periode Tahun 2016 - 2020.....	74
Gambar 2.35	Perkembangan Persebaran COVID-19 di Kota Pekalongan Bulan Maret-Desember 2020	77
Gambar 2.36	Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021.....	95
Gambar 2.37	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2017- Agustus 2021	97
Gambar 2.38	Jumlah Perempuan Dalam Jabatan ASN di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	99
Gambar 2.39	Perkembangan Rasio KDRT di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020.....	99
Gambar 2.40	Perkembangan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	100
Gambar 2.41	Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	104
Gambar 2.42	Cakupan Pengawasan Pelaksanaan UKL-UPL Tahun 2016 – 2020	104
Gambar 2.43	Cakupan Layanan Persampahan Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020.....	106
Gambar 2.44	Persentase Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	107
Gambar 2.45	Rasio Kepemilikan KTP di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	108
Gambar 2.46	Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	109
Gambar 2.47	Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	113

Gambar 2.48	Peta Tingkat Pelayanan Jalan di Kota Pekalongan.....	115
Gambar 2.49	Indeks SPBE Kota Pekalongan Tahun 2019	128
Gambar 2.50	Jumlah Arsip yang Dipelihara dan Diselamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	135
Gambar 2.51	Realisasi Nilai Ekspor dan Impor di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020.....	143
Gambar 2.52	Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jateng Tahun 2017-2021	159
Gambar 2.53	Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	160
Gambar 2.54	Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	161
Gambar 2.55	Persentase Rumah Tangga (RT) Pengguna Air Bersih di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020.....	162
Gambar 2.56	Ketersediaan Listrik di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020	163
Gambar 2.57	Perkembangan Nilai Investasi di Kota Pekalongan Tahun 2017-2020.....	165
Gambar 2.58	Rasio Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016-2020.....	166
Gambar 2.59	Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020.....	166
Gambar 3.1	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020.....	264
Gambar 3.2	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2016 – 2020	265
Gambar 3.3	Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016 – 2020	267
Gambar 4.1	Ilustrasi Visi dan Misi	288
Gambar 4.2	SIM Filariasis	328
Gambar 4.3	SIM Cascading	330
Gambar 4.4	Rekam Medis Elektronik (RME)	331
Gambar 4.5	Aplikasi Manajemen Go Online (Megono)	331
Gambar 4.6	Aplikasi Manajemen Karyawan Online (Makaryo).....	332
Gambar 4.7	WhatsApp Auto.....	333

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran perencanaan pembangunan tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 merupakan rencana pembangunan tahun kedua dari RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Penyusunan RKPD Tahun 2023 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2023, dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana, sebagaimana tertuang dalam Pasal 74 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Awal RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, RKP Tahun 2023, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD Tahun 2023. Selain itu, juga memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan triwulan II tahun 2021, permasalahan pandemi *COVID-19*, banjir, rob, dan upaya pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*).

Dokumen RKPD Tahun 2023 mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu :

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 meliputi :

- 1) Persiapan penyusunan;
- 2) Penyusunan Rancangan Awal;
- 3) Penyusunan Rancangan;

- 4) Pelaksanaan Musrenbang;
- 5) Perumusan Rancangan Akhir; dan
- 6) Penetapan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan dengan Kabupaten Dati II Pekalongan, dan Kabupaten Dati II Batang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
26. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;
28. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
29. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

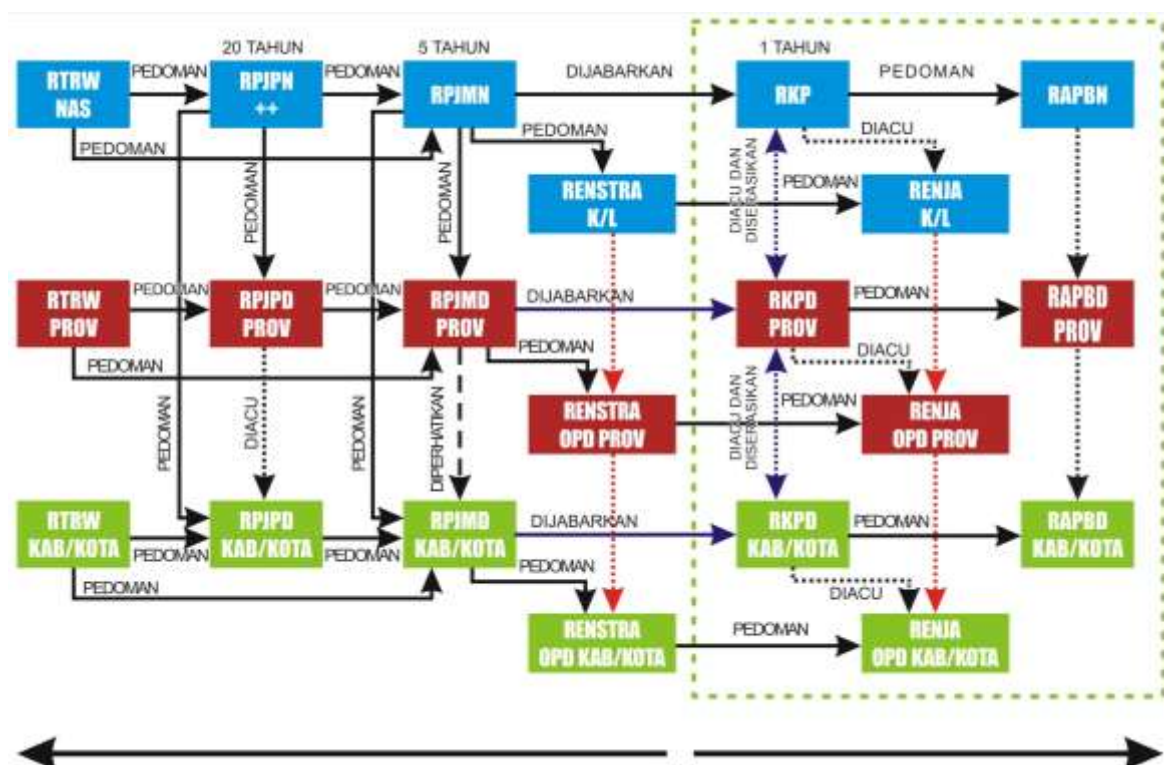
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Kebijakan pembangunan daerah Kota Pekalongan yang dituangkan dalam Rancangan Awal RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 terkait dan sejalan dengan arah

pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan dokumen perencanaan Kota Pekalongan. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur penyusunan dokumen perencanaan.

Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan Nasional dan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, maka Rancangan Awal RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 disesuaikan dan berpedoman pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, serta memperhatikan Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

Selengkapnya disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2021

1.3.1. Rancangan Awal RKPD dengan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan menjabarkan rencana tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rancangan Awal RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 merupakan penjabaran atas rencana pembangunan tahun kedua RPJMD Tahun 2021-2026. Arah kebijakan pembangunan Kota Pekalongan tahun 2023 yang dituangkan di dalam Rancangan Awal RKPD tahun 2023 berpedoman pada arah kebijakan tahun 2023 pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Tabel 1.1 Hubungan Rancangan Awal RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 dengan RPJMD Tahun 2021-2026

No.	Arah Kebijakan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026	No.	Arah Kebijakan Rancangan Awal RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023
<i>Tema</i>	<i>Penguatan SDM Yang Sejalan Dengan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Disertai Pengembangan Pemasaran Produk Barang Dan Jasa Unggulan</i>	<i>Tema</i>	<i>Penguatan SDM Yang Sejalan Dengan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Disertai Pengembangan Pemasaran Produk Barang Dan Jasa Unggulan</i>
1	Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit	1	Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit
2	Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha	2	Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha
3	Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas	3	Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas
4	Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha	4	Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha
5	Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	5	Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
6	Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	6	Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
7	Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup	7	Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
8	Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih,	8	Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih,

No.	Arah Kebijakan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026	No.	Arah Kebijakan Rancangan Awal RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023
	persampahan dan transportasi perkotaan		persampahan dan transportasi perkotaan
9	Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing	9	Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing
10	Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya	10	Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya
11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
12	Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik	12	Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik

Sumber : RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, 2021

1.3.2. Rancangan Awal RKPD dengan Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Sinergitas Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 juga dilakukan dengan Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 melalui penyelarasan sasaran dan prioritas, program dan kegiatan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran dan prioritas, program dan kegiatan pembangunan Daerah Provinsi.

1.3.3. Rancangan Awal RKPD dengan Rancangan RKP Tahun 2023

Sebagaimana sinergitas pembangunan Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa tengah, sinergitas pembangunan dengan Pusat juga dilakukan. RKPD berpedoman pada RKP, dilakukan dengan penyelarasan prioritas pembangunan Kota Pekalongan dan Nasional.

1.3.4. Rancangan Awal RKPD dengan Rancangan Awal Renja OPD Tahun 2023

Penyusunan Rancangan Awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Awal RKPD dibahas dalam forum konsultasi publik dan disempurnakan berdasarkan berita acara hasil forum konsultasi publik. Rancangan Awal RKPD yang disempurnakan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk :

- Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023;
- Menjadi acuan dalam penyusunan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023.

1.4.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 adalah :

- a. Menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah; dan
- b. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

1.5. SISTEMATIKA RANWAL RKPD TAHUN 2023

Sistematika Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan Rancangan Awal RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan dokumen Rancangan Awal RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Awal RKPD, serta sistematika dokumen.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisi gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi RPJMD sampai dengan tahun 2020, hasil evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2020, hasil evaluasi SDG's tahun 2020, dan permasalahan pembangunan daerah.

1. Kondisi Umum Daerah menjelaskan tentang kondisi daerah mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
2. Evaluasi pelaksanaan RPJMD sampai dengan tahun 2020 yang mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang pemerintahan daerah, realisasi target kinerja, dan Perangkat Daerah penanggung jawab.
3. Permasalahan pembangunan daerah berisi rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi pelaksanaan program, SPM dan SDG's tahun 2020 dan mengerucut menjadi isu strategis.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi sampai tahun 2020 dan perkiraan tahun 2023, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah tahun 2023, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan uraian sampai dengan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan Kota Pekalongan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Pekalongan, pokok-pokok pikiran DPRD serta keterkaitan arah kebijakan pada tiap tingkatan pemerintahan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program pembangunan daerah tahun 2023 yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2023, dengan

mempertimbangkan prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Tengah dan dokumen rencana pembangunan lainnya yang relevan.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Berisi Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Daerah Kota Pekalongan yang ditargetkan di tahun 2023.

BAB VII PENUTUP

Berisi penegasan arah kebijakan, prioritas dan fokus RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 yang telah sinkron dengan kebijakan Pusat maupun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah (terdapat 35 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 6 kota dan 29 kabupaten). Luas wilayah Kota Pekalongan hanya 0,14 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa karena Kota Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Jarak Kota Pekalongan ke Jakarta adalah 384 Km dan jarak Kota Pekalongan ke Kota Surabaya adalah 409 Km. Kota Pekalongan dapat dicapai melalui transportasi darat jalan raya serta jalur kereta api. Aksesibilitas Kota Pekalongan semakin meningkat dengan telah terbangunnya jalur rel ganda kereta api dan diharapkan akan terus meningkat dengan dibangunnya *interchange* jalan tol ke Jl. Dr. Sutomo (jalur regional/jalan arteri primer PANTURA) Kota Pekalongan pada tahun 2018.

Secara historis-morfologis, Kota Pekalongan yang berbentuk linier dengan kecenderungan ke arah Barat dan Timur menandakan kuatnya jalur transportasi regional pantai Utara Pulau Jawa. Dalam perkembangannya bentuk linier kota juga berkembang ke arah Selatan, yang menunjukkan keterkaitan erat Kota Pekalongan dengan kawasan sekitarnya, terutama dengan Kabupaten Pekalongan. Kondisi ini tentunya menjadi keunggulan dan daya tarik yang bersifat geografis alami.

Kota Pekalongan, sebagaimana wilayah di Pantura Jawa lainnya, sekarang ini terus mengalami bencana sebagai akibat dari pasang naik air laut atau rob. Genangan ini terus meluas dan dirasakan hampir di seluruh wilayah bagian Utara Kota Pekalongan, bahkan sudah meluas sampai ke wilayah bagian Barat dan Timur Kota Pekalongan. Namun demikian, kondisi ini diharapkan akan berkurang secara signifikan, sejalan dengan akan selesainya pembangunan tanggul rob oleh Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana. Di samping itu, Pemerintah Pusat juga telah menetapkan Program Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi, dimana Kota Pekalongan menjadi salah satu sasaran program tersebut khususnya dalam hal penanganan masalah banjir rob.

Perkembangan terakhir, pandemi **COVID-19** (*Corona Virus Disease 2019*) yang melanda dunia telah berdampak terhadap tatanan ekonomi, sosial-budaya dan politik sebagian besar dunia, termasuk Indonesia, Provinsi Jawa Tengah maupun Kota Pekalongan. Dampak pandemi pun telah berimplikasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah pada tahun 2020 ini dan tentunya masih akan berdampak pada tahun-tahun berikutnya.

Secara umum, gambaran umum kondisi Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut.

2.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai utara Pulau Jawa, dengan ketinggian kurang lebih 1 meter di atas permukaan laut dengan posisi geografis antara 6 50' 42" s.d. 6 55' 44" Lintang Selatan dan 109 37' 55" s.d. 109 42' 19" Bujur Timur serta dengan koordinat fiktif 510.00 – 518.00 Km membujur dan 517.75 – 526.75 Km melintang. Batas wilayah secara administratif adalah :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kab. Batang
- Sebelah Selatan : Kab. Pekalongan dan Kab. Batang
- Sebelah Barat : Kab. Pekalongan

Berdasarkan Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 luas wilayah Kota Pekalongan adalah 45,25 Km². Berdasarkan revisi RTRW Kota Pekalongan yang telah disahkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.642 Ha atau 46,42 km². Perubahan ini dikarenakan adanya :

- a. Pemutakhiran garis pantai sesuai Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
- b. Pemutakhiran segmen batas wilayah administrasi
- c. Perbaikan atas hasil kajian teknis dari pusat pemetaan batas wilayah pada Badan Informasi Geospasial terhadap perhitungan luas wilayah.

Dengan demikian maka luas wilayah Kota Pekalongan bertambah 1,16 Ha yang sebagian besar disebabkan oleh pemutakhiran garis pantai.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menetapkan Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sebagai PKW maka diharapkan Kota Pekalongan dapat berperan menjadi pusat pengembangan bagi wilayah di sekitarnya, yang meliputi Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan Kota Pekalongan sebagai bagian dan simpul utama dari Kawasan Petanglong (Kawasan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Kawasan Petanglong adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulannya adalah pertanian, pariwisata, industri dan perikanan. Potensi ekonomi yang menjadi andalan Kawasan Petanglong meliputi : sektor primer adalah perikanan; sektor sekunder adalah tekstil, batik, dan pengolahan ikan; serta sektor tersier adalah jasa dan perdagangan. Kondisi ini tentunya menjadikan Kota Pekalongan memiliki posisi yang sangat strategis.

Sebagai daerah yang telah berkembang, perekonomian Kota Pekalongan tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan sebesar 5,50 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,69 persen. Distribusi PDRB tertinggi terhadap struktur perekonomian di Kota Pekalongan disumbang oleh sektor perdagangan yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,79 persen, penyumbang terbesar kedua adalah sektor Industri Pengolahan yaitu sebesar 20,88 persen dan di urutan ketiga adalah sektor Konstruksi sebesar 14,63 persen. Didukung dengan posisi strategis Kota Pekalongan di

jalur Pantai Utara Jawa, maka Kota Pekalongan memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dibandingkan daerah lainnya. Keunggulan ini diharapkan dapat menjadi lokomotif bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



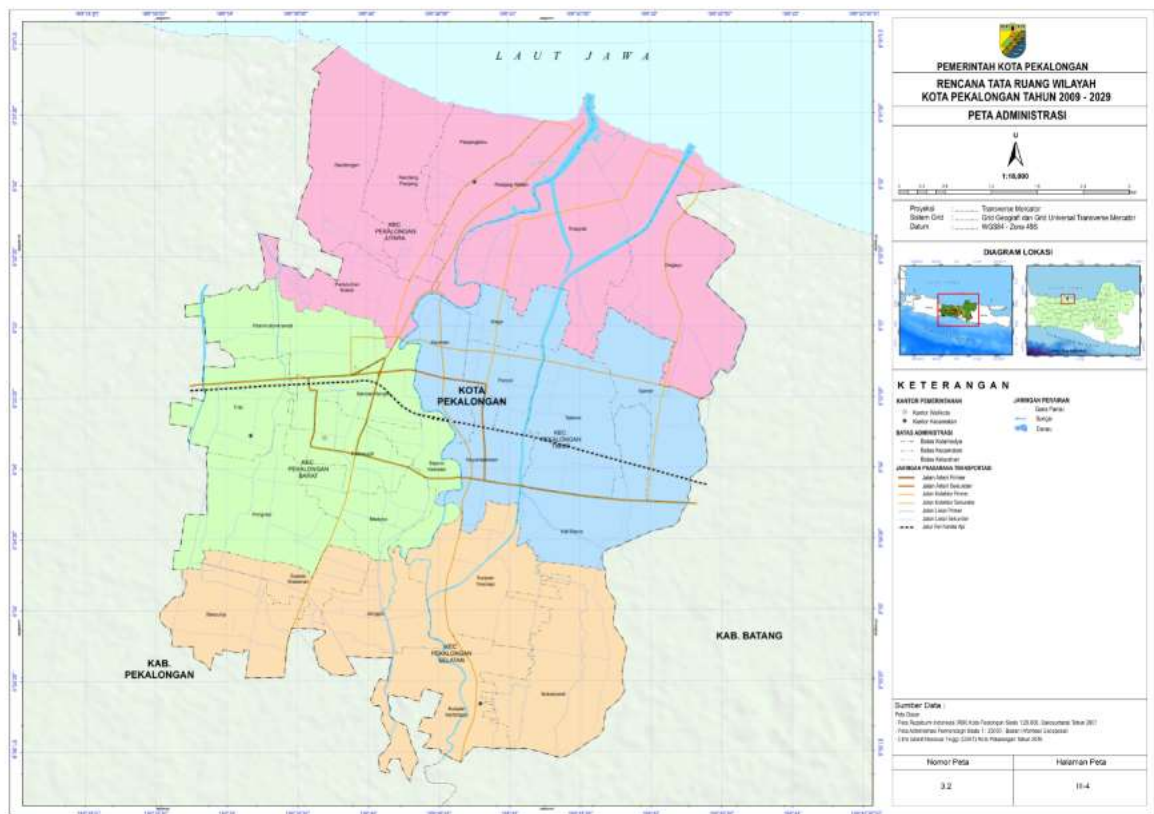
Gambar 2.1 Peta Orientasi Kota Pekalongan

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2021

Batas administratif Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang;
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Pekalongan; dan
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan.

Jarak terjauh dari wilayah Utara ke wilayah Selatan ± 9 Km dan dari wilayah Barat ke wilayah Timur ± 7 Km. Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan dan pada mulanya 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, secara administratif Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan (diberlakukan per 1 Januari 2015). Penggabungan kelurahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, melaksanakan fungsi pemerintahan secara efisien serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.2 Peta Administratif Kota Pekalongan

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2021

Berdasarkan peta administratif tersebut bahwa arah pengembangan wilayah kota terkonsentrasi di sepanjang koridor jalan, terutama jalan nasional arat Barat dan Timur serta jalan ke arah Selatan. RTRW Kota Pekalongan juga menetapkan sepanjang koridor-koridor jalan tersebut sebagai kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa.

Tabel 2.1 Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase Luas (persen)
1	Kecamatan Pekalongan Barat	10,00	22
2	Kecamatan Pekalongan Timur	9,63	21
3	Kecamatan Pekalongan Selatan	11,47	25
4	Kecamatan Pekalongan Utara	15,32	33
	TOTAL	46,42	100

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2021

Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Medono, Podosugih, Sapuro Kebulen, Bendan Kergon, Pasirkratonkramat, Tirto dan Pringrejo. Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Noyontaansari, Kauman, Poncol, Klego, Gamer, Setono dan Kali Baros. Kecamatan Pekalongan Selatan terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Banyurip, Buaran Kradenan, Jenggot, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo dan Sokoduwet. Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Krapyak, Kandang Panjang, Panjang Wetan, Padukuhan Kraton, Degayu, Bandengan dan Panjang Baru.

Pekalongan Utara adalah kecamatan terluas di Kota Pekalongan yaitu 15,32 Km² atau 33 persen dari luas wilayah Kota Pekalongan.

2.1.2. Topografi dan Jenis Tanah

Secara topografis wilayah Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa dengan ketinggian lahan antara 0 - 6 meter dpl. Keseluruhan wilayah berada pada kemiringan lereng 0-8 persen. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa keseluruhan wilayah Kota Pekalongan sangat datar, beda tinggi yang sangat kecil dan bahkan di beberapa tempat tertentu telah teridentifikasi memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut seperti di Kawasan Pabean Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) di wilayah Kota Pekalongan. Berdasarkan penelitian dan pendapat beberapa ahli, penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan telah terjadi secara signifikan dan menjadi salah satu ancaman bagi pengembangan wilayah kota ke depan sehingga harus mendapatkan perhatian yang sangat serius untuk menanggulangnya.



Gambar 2.3 Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2021

Wilayah yang sangat datar, kemudian terdapat kawasan yang memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut, berimplikasi terhadap pengelolaan sumberdaya air, terutama drainase. Tantangan pengelolaan sumberdaya air dan drainase ini tentunya akan semakin berat dihadapi Kota Pekalongan, apalagi dengan adanya fenomena pemanasan global dan perubahan iklim yang berimplikasi terjadinya kenaikan permukaan air laut.

Terdapat 4 (empat) jenis tanah di wilayah Kota Pekalongan, yaitu alluvial hidromorf, alluvial kelabu tua serta alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan. Sebaran tanah alluvial hidromorf yaitu di kawasan Utara kota. Sebaran alluvial kelabu tua di wilayah

Timur dan Barat kota serta sebaran tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan terdapat di sepanjang koridor ke arah Selatan kota.

Jenis tanah alluvial hidromorf mempunyai ciri-ciri fisik warna kelabu, bertekstur liat, dan memiliki permeabilitas (*water run off*) lambat. Jenis tanah ini biasanya banyak digenangi oleh air sehingga warnanya tua kelabu sampai kehitaman. Daerah penyebarannya terdapat di berbagai ketinggian tetapi umumnya di dataran rendah dengan wilayah relatif datar. Jenis tanah alluvial hidromorf cocok dimanfaatkan untuk pertanian, pertambakan dan permukiman. Jenis tanah alluvial kelabu tua mempunyai ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah alluvial hidromorf, namun warnanya yang kelabu tua. Jenis tanah alluvial kelabu tua cocok juga digunakan untuk pertanian, pertambakan dan permukiman. Demikian juga jenis tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan memiliki ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah alluvial hidromorf dan cocok dimanfaatkan untuk penggunaan pertanian, pertambakan dan permukiman.

Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir, yaitu merupakan kawasan hilir dan muara beberapa sungai. Dengan kondisi tersebut maka kondisi ini berimplikasi terhadap sebagian wilayah Kota Pekalongan, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat, sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut, curah hujan dan kondisi aliran sungai dari hulu. Bahkan di beberapa tempat sudah mengalami genangan permanen karena elevasinya yang sangat rendah, di bawah permukaan air laut. Kecenderungan yang terjadi adalah semakin meningkatnya kawasan rob dan genangan pada kawasan permukiman, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat. Sebaran permukiman berada pada seluruh wilayah kota, terutama sepanjang koridor jalan karena seluruh wilayah Kota Pekalongan merupakan wilayah yang datar.

2.1.3. Geologi

Berdasarkan informasi batuan yang berasal dari analisis Peta Geologi Lembar Pekalongan, Skala 1:1000 yang bersumber dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung bahwa Litologi batuan di Kota Pekalongan merupakan endapan sedimen alluvium, terbentuk pada jaman holosen periode tersier dengan ketebalan ± 150 m yang terdiri dari kerikil, pasir, lanau dan lempung, endapan sungai dan rawa. Endapan alluvium ini terbentuk menutupi lapisan batuan anggota breksi formasi Ligung yang bersusunan andesit, lava andesit hornblend dan tufa yang merupakan bagian atas formasi Ligung yang terbentuk pada pliosen akhir- pliosen awal. Lapisan alluvium pada permukaan di sepanjang pantai didominasi oleh pasir sedangkan di daerah muara adalah lempung, endapan sungai dan rawa.

Morfologi pantai di bagian Barat, berpasir halus yang bercampur dengan vegetasi seperti semak belukar atau ladang dan di pantai bagian Timur adalah berpasir cenderung berlumpur. Bentuk lahan di Kota Pekalongan dibedakan menjadi 2 bentukan yaitu dataran alluvial dan dataran alluvial pantai. Dataran alluvial merupakan hasil proses *fluvial* sedangkan dataran alluvial pantai merupakan hasil dari proses *marine*.

Satuan-satuan bentuk lahan yang berada pada kelompok dataran alluvial semuanya tersusun atas batuan yang berasal dari pengendapan material yang dibawa oleh aliran air karena diendapkan oleh aliran air maka terdapat sortasi yang baik. Material yang berukuran halus akan diendapkan belakangan dibandingkan dengan material yang berukuran kasar.

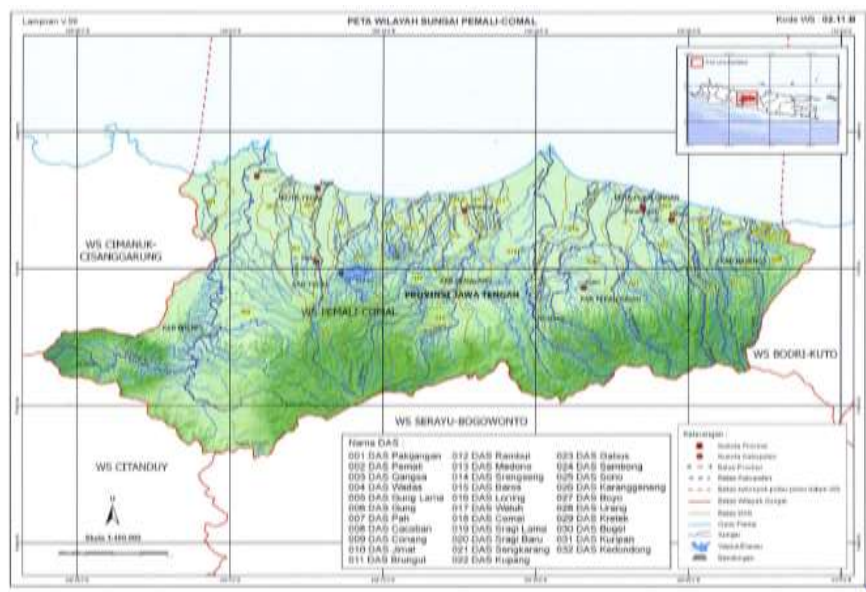


Gambar 2.4 Peta Geologi Wilayah Kota Pekalongan

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2021

2.1.4. Hidrologi

Kota Pekalongan sebagai kota yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, dialiri beberapa sungai. Terdapat 4 (empat) sungai yang melewati wilayah Kota Pekalongan yaitu Sungai Meduri, Bremi, Pekalongan dan Banger. Keempat sungai tersebut termasuk ke dalam 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Sengkarang, DAS Kupang dan DAS Gabus.



Gambar 2.5 Wilayah Sungai Pemali-Comal

Sumber : Keppres No. 12 Tahun 2012 tentang Wilayah Sungai

Daerah Irigasi (DI) yang berada di wilayah Kota Pekalongan meliputi DI kewenangan Pemerintah, DI kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DI kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan. DI kewenangan Pemerintah meliputi DI Kupang-Kroempeng seluas 919 Ha dan DI Pesantren Kletak seluas 271 Ha. DI kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi DI Asem Siketek/Kesetu seluas 262 Ha. Sedangkan DI kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan meliputi DI tambak yang terletak di wilayah Utara Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan merupakan dataran rendah yang hanya memiliki elevasi maksimum sekitar 6 mdpl menyebabkan laju aliran sungai menuju muara tidak terlalu deras karena berada pada wilayah muara sehingga setiap limbah yang dibuang ke sungai banyak yang mengendap. Ditambah lagi dengan beban pencemaran yang sangat besar dari buangan limbah rumah tangga dan industri di wilayah Kota Pekalongan maupun dari wilayah hulu (terutama Kabupaten Pekalongan) maka air permukaan di wilayah Kota Pekalongan tidak bisa dimanfaatkan sebagai air baku untuk air bersih. Di wilayah Kota Pekalongan muncul suatu keyakinan, jika air sungainya berwarna-warni atau sangat kotor maka menunjukkan perekonomian sedang bagus. Air sungai yang kotor tersebut menunjukkan limbah buangan industri di Kota Pekalongan meningkat karena terjadinya proses produksi industri yang meningkat. Sebaliknya, jika air sungai relatif bersih maka menandakan berkurangnya proses produksi yang dilakukan industri.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah (CAT) di Indonesia maka wilayah Kota Pekalongan termasuk dalam bagian CAT Pekalongan-Pemalang. CAT Pekalongan-Pemalang berlokasi pada 1090 18' 45,31" - 1090 51' 52,35" Bujur Timur dan 060 46' 33,52" - 070 13' 24,20" Lintang Selatan, yang meliputi wilayah Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan. Air baku untuk air bersih Kota Pekalongan berasal dari wilayah Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Sumber air baku dari wilayah Kabupaten Pekalongan dan Batang meliputi : a) sumber air baku dari Program SPAM Regional Petanglong Tahap 1 yang terletak di Desa Jambangan Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan; b) sumber air baku dari Sungai Kupang Sambong di Desa Cepagan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, pemanfaatan melalui Instalasi Pengolah Air (IPA); c) sumber air baku dari mata air Desa Kembanglangit Kecamatan Blado Kabupaten Batang, pemanfaatan dengan pengambilan langsung; d) sumber air baku dari mata air di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, pemanfaatan dengan pengambilan langsung, pemanfaatan melalui IPA (Instalasi Pengolahan Air). Sumber air baku bagi air minum dari wilayah Kota Pekalongan berasal dari pemanfaatan air tanah karena tidak adanya sumber mata air dan air permukaan yang sudah tidak memungkinkan dimanfaatkan sebagai sumber air baku.

Dengan memperhatikan faktor topografi, geologi dan kondisi hidrogeologi, sumber daya air tanah di wilayah Kota Pekalongan termasuk ke dalam kategori air tanah dataran pantai sehingga kondisi air tanahnya sebagian besar merupakan air tanah dangkal. Air tanah dataran pantai ditutupi oleh *al gluvium* dan endapan pantai sebagai hasil rombakan batuan yang lebih tua. Kondisi ini dapat kita temui di sebagian besar wilayah, ketika kita melubangi tanah 1 (satu) meter saja maka akan segera keluar rembesan air tanah. Dengan memperhitungkan sebaran batuan, vegetasi dan kemiringan lereng, maka diperkirakan 30 persen dari jumlah curah hujan tersebut merupakan surplus pengisian kembali air tanah.

Karena ketersediaan air tanah yang cukup memadai maka beberapa lokasi telah dilakukan pengeboran sumur tanah dalam yang dikelola oleh PDAM Kota Pekalongan maupun PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Tetapi dengan kecenderungan tekanan kebutuhan yang semakin meningkat, baik kebutuhan perumahan/permukiman maupun kebutuhan industri pengolahan, dan kondisi wilayah

Kota Pekalongan yang merupakan wilayah pesisir maka sebaiknya pengambilan air tanah dalam di wilayah Kota Pekalongan diharapkan dapat dikendalikan sehingga tidak mengganggu ketersediaannya. Dari data Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, pada tahun 1985 PDAM Kota Pekalongan mulai membuat sumur bagi air baku dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Namun ketika tahun 2015 PDAM membuat sumur maka kedalamannya telah mencapai ± 24 meter. Dari kondisi tersebut, selama 30 tahun, bahwa setiap tahunnya telah terjadi penurunan permukaan air tanah rata-rata 11 centimeter per tahun. Data ini tentunya menunjukkan pemanfaatan air tanah yang telah melebihi daya dukungnya. Apabila hal ini berlangsung terus-menerus maka dapat menimbulkan risiko lingkungan yang sangat besar, utamanya intrusi air laut dan penurunan permukaan tanah.

Bertambahnya jumlah penduduk menjadikan kebutuhan akan air bersih juga terus bertambah. Sebagai salah satu sumber terbaik untuk air bersih, air tanah terus diambil secara intensif, terutama untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih. Seringkali, pengambilan air tanah ini menjadi tidak terkontrol dan tidak sesuai dengan ketersediaan serta zona pemanfaatannya yang dapat berdampak terhadap kuantitas, kualitas dan daya dukung lingkungan pada CAT setempat. Dampak dari pengambilan air tanah bisa menimbulkan terjadinya penurunan muka air tanah yang melebihi ambang batas dan juga amblesan tanah dan daya rusak air tanah lain seperti pencemaran air tanah dan penyusupan (intrusi) air laut.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2020 sedang melakukan penelitian untuk memastikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat segera didapatkan sehingga dapat dijadikan dasar bagi pengambilan kebijakan ke depan bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kota Pekalongan.

2.1.5. Klimatologi

Iklim Kota Pekalongan termasuk dalam kategori iklim tropis basah. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Jumlah hari dan curah hujan selama setahun sangat bervariasi. Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, jumlah hari hujan paling banyak terjadi pada tahun 2016, dengan hari hujan sebanyak 140 hari dan curah hujan paling banyak terjadi pada tahun 2020 sebanyak 2.896 mm. Sementara itu selama lima tahun terakhir jumlah curah hujan paling sedikit terjadi pada tahun 2017, dengan jumlah hari hujan sebanyak 104 hari dan curah hujan sebanyak 1.647 mm³.

Dilihat dari kondisi tersebut maka menurut Smith dan Ferguson tipe iklim di wilayah Kota Pekalongan adalah Tipe B. Iklim Tipe B menggambarkan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah basah, dengan nilai Q (perbandingan bulan kering dan bulan basah dikalikan 100 persen) bernilai antara 14,3-33,3 persen. Sementara itu suhu/temperatur di wilayah Kota Pekalongan sepanjang tahun 2020 berkisar antara 23,40°C – 33,1°C.

**Tabel 2.2 Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan
Kota Pekalongan Tahun 2020**

No	Bulan	Hari Hujan (Hari)	Curah Hujan (mm)
1	Januari	17	497
2	Februari	17	763
3	Maret	13	351
4	April	9	203

No	Bulan	Hari Hujan (Hari)	Curah Hujan (mm)
5	Mei	6	252
6	Juni	4	20
7	Juli	4	15
8	Agustus	7	76
9	September	9	135
10	Oktober	6	76
11	Nopember	9	196
12	Desember	15	312
TOTAL		116	2.896
Tahun 2019		80	1.831
Tahun 2018		93	1.710
Tahun 2017		104	1.647
Tahun 2016		140	2.477

Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka Tahun 2021, 2021

2.1.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan tanah dibedakan menjadi tanah sawah dan kering. Luas tanah di Kota Pekalongan tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, namun apabila dilihat dari fungsi/penggunaannya maka mengalami pergeseran. Tanah sawah luasnya setiap tahun berkurang, sebaliknya tanah kering mengalami peningkatan perluasan. Pada tahun 2020, luas tanah sawah adalah 886 Ha, hal ini berkurang sekitar 4,22 persen dari luas 925 Ha pada tahun 2019. Sedangkan untuk tanah kering meningkat menjadi 3.756 Ha, ada penambahan sekitar 4,33 persen dari luas 3.600 Ha pada tahun 2019.

Tabel 2.3 Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

No	Kecamatan	Tanah Sawah (Ha)	Tanah Kering (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Pekalongan Barat	81,00	918,70	999,70
2	Pekalongan Timur	271,00	692,37	963,37
3	Pekalongan Selatan	419,00	728,38	1.147,38
4	Pekalongan Utara	115,00	1.416,50	1.531,50
TOTAL		886,00	3.756,00 (pembulatan)	4.642,00 (pembulatan)
Tahun 2019		925,00	3.600,00	4.525,00
Tahun 2018		969,00	3.556,00	4.525,00
Tahun 2017		980,00	3.545,00	4.525,00
Tahun 2016		1.152,00	3.373,00	4.525,00

Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka Tahun 2021, 2021

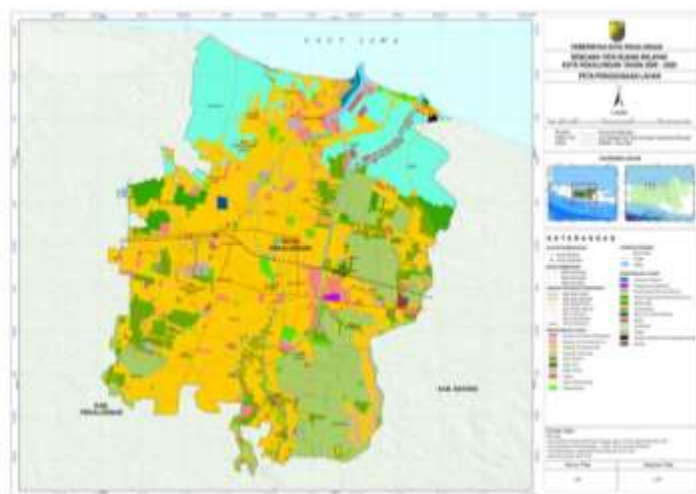
Menurut sistem pengairannya, sawah-sawah di Kota Pekalongan adalah dengan sistem pengairan teknis. Total sawah irigasi teknis tahun 2020 adalah seluas 886 Ha, yang meliputi Kecamatan Pekalongan Barat seluas 81 Ha, Kecamatan Pekalongan Timur seluas 271 Ha, Kecamatan Pekalongan Selatan seluas 419 Ha dan Kecamatan Pekalongan Utara seluas 115 Ha. Kecenderungan yang ada, dari tahun ke tahun, jumlah sawah irigasi teknis semakin menyusut. Jumlah sawah irigasi teknis di Kota Pekalongan tahun 2016 seluas 1.152 Ha dan tahun 2017 seluas 980 Ha. Adapun jumlah sawah irigasi

teknis pada tahun 2018 dan 2019 seluas 969 Ha dan 925 Ha dan tahun 2020 seluas 886 Ha.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perubahan guna lahan yang kecenderungannya semakin meningkat untuk kawasan terbangun (*built up area*). Kawasan terbangun tersebut terutama untuk pembangunan perumahan/kawasan permukiman, industri serta jasa dan perdagangan. Di samping karena kebutuhan untuk kegiatan budidaya non pertanian, semakin berkurangnya sawah/sawah beririgasi teknis karena semakin meluasnya kawasan sawah yang terkena air laut sehingga tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi lahan *idle* (lahan menganggur atau lahan yang tidak digunakan), terutama lahan yang berada di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara.

Upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dapat dilakukan melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Dimana lahan yang dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu: lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut, maupun lahan tidak beririgasi. Berdasarkan revisi RTRW Kota Pekalongan yang telah disahkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 maka telah dialokasikan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 521 Ha atau berkurang dari luasan sebelumnya yaitu seluas 737 Ha. Perubahan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam luasan yang lebih kecil karena didasarkan kondisi dan fakta di lapangan semakin menyempitkan lahan pertanian di wilayah Kota Pekalongan serta semakin meningkatnya kebutuhan lahan bagi pengembangan permukiman, sarana dan prasarana perkotaan.

Dalam proses perubahan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009–2029, diusulkan perubahan luasan dan sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut. Usulan tersebut adalah penyesuaian lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam luasan yang lebih kecil karena didasarkan kondisi dan fakta di lapangan semakin menyempitkan lahan pertanian di wilayah Kota Pekalongan serta semakin meningkatnya kebutuhan lahan bagi pengembangan prasarana dan sarana perkotaan.



Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2021

Penggunaan lahan di wilayah Kota Pekalongan yang paling dominan adalah kawasan permukiman, pertanian, tambak serta perdagangan dan jasa. Akibat kebutuhan bagi pengembangan wilayah, termasuk penyediaan sarana dan prasarana perkotaan maka tekanan terhadap kebutuhan lahan akan terus meningkat. Kecenderungan tekanan tersebut lebih banyak terhadap penggunaan sawah karena sawah dan tambak tentunya memiliki nilai lahan (*land value*) yang relatif lebih rendah. Sedangkan pilihan penggunaan tambak tidak dilakukan karena sebagian besar tambak berlokasi di wilayah Utara, yang merupakan kawasan rob/pasang surut sehingga kecenderungan alih fungsi lahan adalah pada lahan pertanian.

Permasalahan umum pengembangan wilayah di Kota Pekalongan adalah keterbatasan lahan. Kebutuhan pembangunan perkotaan berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan lahan. Tentunya, kecenderungannya adalah menyebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian. Namun, di sisi lain terdapat kebijakan untuk tetap mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Salah satu dinamika permasalahan perkotaan ini harus dikelola sebaik-baiknya, khususnya dalam kerangka kebijakan penataan ruang. Fokus pelaksanaan urusan penataan ruang harus lebih ditekankan pada tataran pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan RPJPD bahwa visi Kota Pekalongan adalah “Pekalongan Kota Batik yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Sedangkan berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah “Terwujudnya Kota Kreatif yang didukung Perdagangan dan Jasa, Industri, dan Perikanan, yang Nyaman, Aman, Produktif, serta Berkelanjutan”.

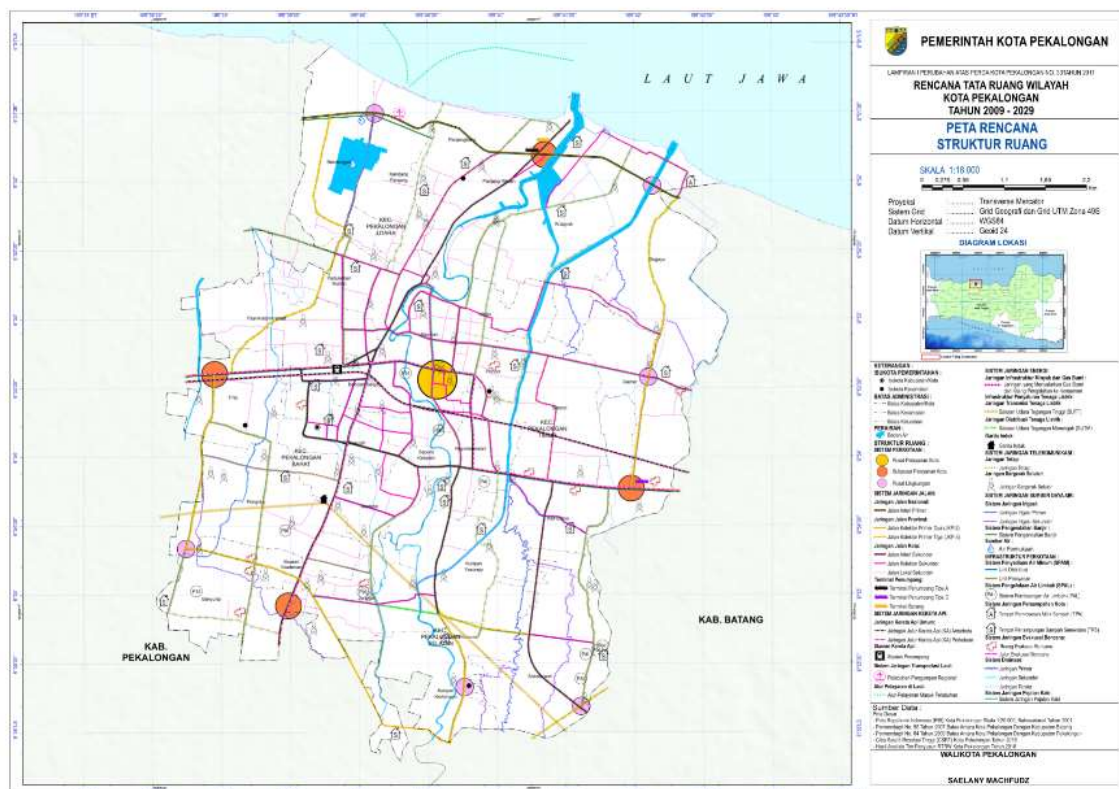
Sebagaimana visi dan tujuan di atas serta kondisi yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa wilayah Kota Pekalongan memiliki kekhasan kondisi yang tentunya berbeda dengan daerah lainnya. Secara geografis alami, Kota Pekalongan merupakan simpul strategis di koridor pantai Utara Pulau Jawa. Berdasarkan sistem pengembangan wilayah pun, Kota Pekalongan merupakan salah satu simpul pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini pun tidak terlepas dari perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan yang didominasi oleh sumbangan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Konstruksi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Kota Pekalongan berkembang dengan batik sebagai penggerak perekonomian wilayah, di samping sektor andalan lainnya yang terus dikembangkan yaitu sektor perikanan dan industri. Pengembangan batik, perikanan industri ke depan diharapkan dapat semakin terus ditingkatkan dengan daya inovasi yang dimiliki seluruh warga Kota Pekalongan sehingga dapat memberikan nilai tambah (*value added*) setinggi-tingginya bagi Kota Pekalongan. Namun demikian, tentunya pengembangan potensi tersebut harus tetap dibingkai dalam kerangka tata ruang wilayah dan lingkungan hidup sehingga dapat mewujudkan pembangunan Kota Pekalongan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, rencana struktur ruang Kota Pekalongan terdiri atas Pusat Kegiatan dan Sistem Jaringan Prasarana. Pusat Kegiatan dijabarkan dalam hirarki yang terdiri dari Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), dan Pusat Lingkungan (PL). Pusat Pelayanan Kota (PPK) meliputi kawasan Alun-Alun, pusat kegiatan perdagangan-jasa skala regional dan kawasan Stasiun di Kelurahan Bendan Kergon. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota, SPPK Kecamatan Pekalongan Utara terletak di Kelurahan Panjang Wetan, SPPK Kecamatan Pekalongan Barat terletak di Kelurahan Tirto, SPPK Kecamatan Pekalongan Timur terletak di Kelurahan Kalibaros, SPPK Kecamatan Pekalongan Selatan

terletak di Kelurahan Banyurip. Pusat Lingkungan sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota berada di Kelurahan Pringrejo, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Degayu, Kelurahan Gamer, Kelurahan Kuripan Kertoharjo dan Kelurahan Sokoduwet.

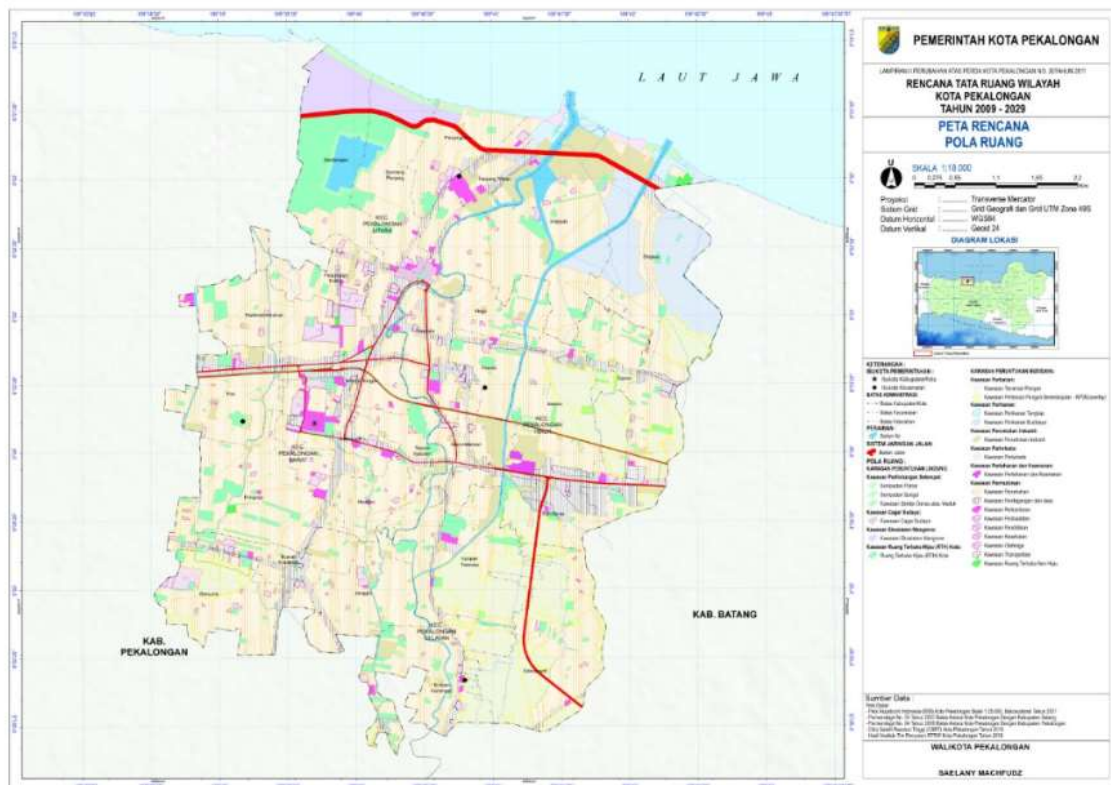
Untuk sistem jaringan prasarana terdiri atas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan. Untuk rata-rata ketercapaian infrastruktur dasar perkotaan di Kota Pekalongan, pada tahun 2019 mencapai 91,41 persen yang terdiri dari sektor air minum, sanitasi dan persampahan. Gambaran lebih detail dapat dilihat pada peta rencana struktur ruang berikut.



Gambar 2.7 Peta Rencana Struktur Ruang

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, 2021

Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, peruntukan lahan dengan memperhatikan rencana pola ruang, terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya, ruang terbuka hijau (RTH) kota dan kawasan ekosistem mangrove. Adapun kawasan budidaya terdiri atas kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata dan kawasan pertahanan keamanan. Rencana pola ruang digambarkan sebagaimana peta berikut.



Gambar 2.8 Peta Rencana Pola Ruang

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2021

Berikut diuraikan potensi pengembangan wilayah Kota Pekalongan, sebagaimana tertuang pada Rencana Pola Ruang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 pada Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.

1. Kawasan Lindung

1) Kawasan Perlindungan Setempat

Terdiri atas sempadan sungai, sempadan pantai dan kawasan sekitar danau atau waduk. Sempadan sungai memiliki luas ± 24 Ha, sempadan pantai memiliki luas ± 23 Ha dan kawasan sekitar danau atau waduk memiliki luas ± 15 Ha. Kawasan sempadan sungai bertanggung dengan lebar sempadan sungai 3 meter meliputi sempadan Sungai Kupang, Gawe, Banger Lama dan Gabus. Kawasan sempadan sungai tidak bertanggung dengan lebar sempadan sungai 10 meter meliputi Sungai Meduri dan Bremi. Sempadan pantai diperuntukkan perlindungan pantai dari erosi dan abrasi serta perlindungan untuk mangrove dan terumbu karang, selebar 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi dengan luas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hektar ke arah darat yang berlokasi di Kecamatan Pekalongan Utara, meliputi, Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Panjang Baru, Krapyak dan Degayu. Kawasan sekitar danau atau waduk yang berfungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada danau atau waduk yang berada di Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara.

2) Kawasan Cagar Budaya

Seluas ± 9 Ha, terdiri dari Kawasan Heritage Jetayu di Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Wetan dan Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara.

3) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota

Terdiri dari RTH publik seluas 338 Ha (atau sekitar 13,16 persen dari luas wilayah terbangun Kota Pekalongan) RTH Publik terdiri dari taman, lapangan dan Pemakaman yang tersebar di seluruh wilayah Kota Pekalongan.

4) Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan Ekosistem Mangrove merupakan sebuah lingkungan dengan ciri khusus dimana lantai hutannya digenangi oleh air dimana salinitas juga fluktuasi permukaan air tersebut sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Kawasan ekosistem mangrove berada di Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Krapyak dan Panjang Baru seluas 89 (delapan puluh sembilan) hektar.

2. Kawasan budidaya

1) Kawasan Pertanian

Kawasan Pertanian berupa tanaman pangan seluas 521 (lima ratus dua puluh satu) Ha berada di Kelurahan Banyurip, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo, Sokoduwet, Pringrejo, Degayu, Gamer, Kalibaros dan Setono. Lahan pertanian tanaman pangan tersebut merupakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

2) Kawasan Perikanan

Terdiri atas kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya. Kawasan perikanan tangkap seluas kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektar berupa pengembangan fasilitas hasil perikanan tangkap meliputi :

- a. Pengolahan hasil perikanan berada di Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara.
- b. Kawasan pemasaran hasil perikanan berupa fasilitas pelelangan/ pasar ikan yang berada di Kelurahan Panjang Wetan dan/ atau Kelurahan Krapyak.
- c. Teknopark perikanan yang berada di Kelurahan Panjang Wetan.
- d. Prasarana penunjang pelabuhan perikanan.

Kawasan perikanan budidaya dengan luas kurang lebih 173 (seratus tujuh puluh tiga) hektar berada di Kelurahan Degayu dan Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara.

3. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman terdiri atas kawasan perumahan seluas kurang lebih, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan peribadatan, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan olahraga, kawasan transportasi, kawasan ruang terbuka non hijau dan kawasan sektor informal yang tersebar di seluruh Kota Pekalongan. Dengan luas sebagai berikut:

- a. Kawasan perumahan dengan luas kurang lebih 2.429 (dua ribu empat ratus dua puluh sembilan) hektar.
- b. Kawasan perdagangan dan jasa dengan luas kurang lebih 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) hektar.
- c. Kawasan perkantoran terdiri atas perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta dengan luas kurang lebih 52 (lima puluh dua) hektar.
- d. Kawasan peribadatan dengan luas kurang lebih 11 (sebelas) hektar.
- e. Kawasan pendidikan dengan luas kurang lebih 98 (Sembilan puluh delapan) hektar.
- f. Kawasan kesehatan dengan luas kurang lebih 16 (enam belas) hektar.

- g. Kawasan olahraga dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar.
- h. Kawasan transportasi dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar.
- i. Kawasan ruang terbuka non hijau dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar.
- j. Kawasan sektor informal.

4. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri besar dan industri menengah. Seluas kurang lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hektar berada di :

a. Kecamatan Pekalongan Selatan berada di:

- 1. Kelurahan Banyurip;
- 2. Kelurahan Buaran Kradenan;
- 3. Kelurahan Jenggot;
- 4. Kelurahan Kuripan Kertoharjo; dan
- 5. Kelurahan Kuripan Yosorejo.

b. Kecamatan Pekalongan Utara berada di:

- 1. Kelurahan Bandengan;
- 2. Kelurahan Krapyak;
- 3. Kelurahan Padukuhan Kraton;
- 4. Kelurahan Panjang Wetan;
- 5. Kelurahan Kandang Panjang; dan
- 6. Kelurahan Panjangbaru.

c. Kecamatan Pekalongan Timur berada di:

- 1. Kelurahan Gamer;
- 2. Kelurahan Kali Baros;
- 3. Kelurahan Klego;
- 4. Kelurahan Noyontaansari;
- 5. Kelurahan Poncol; dan
- 6. Kelurahan Setono.

d. Kecamatan Pekalongan Barat berada di:

- 1. Kelurahan Bendan Kergon;
- 2. Kelurahan Medono;
- 3. Kelurahan Pasirkratonkramat;
- 4. Kelurahan Pringrejo;
- 5. Kelurahan Sapuro Kebulen; dan
- 6. Kelurahan Tirto.

5. Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata terdiri dari pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan. Pariwisata budaya berada di Kelurahan Panjang Wetan (Kawasan Jetayu), Kelurahan Krapyak, Kelurahan Padukuhan Kraton, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kelurahan Pringrejo Kelurahan Noyontaansari dan Kelurahan Kauman. Pariwisata alam seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar berada di Kelurahan Krapyak, Panjang Wetan dan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara. Pengembangan pariwisata buatan, meliputi wisata belanja batik, kerajinan tenun, dan *handycraft* terletak di Kelurahan Podosugih, Medono, Bendan Kergon, Poncol, Kali

Baros, Gamer, Noyontaansari, Setono, Klego, Banyurip, Kauman; dan Pasirkratonkramat.

6. Kawasan Pertahanan-Keamanan Negara

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara terdiri atas asrama dan markas Brimob di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur; asrama dan kantor Polwil di Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat; kantor Polwil di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; kantor Polresta di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; dan kantor Kodim di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat.

7. Sinergi Kota Pekalongan Dengan Daerah Tetangga Berkaitan Dengan Aspek Tata Ruang

Terkait aspek perencanaan tata ruang dalam revisi Perda RTRW Kota Pekalongan telah direncanakan beberapa hal yang dapat bersinergi dengan Perda RTRW Kabupaten Pekalongan dan Perda RTRW Kabupaten Batang, sebagai berikut:

1) Struktur Ruang

- a. Telah direncanakan Jalan Lingkar Utara Petanglong, yang akan menghubungkan kawasan strategis PLTU Batang dan Kawasan Industri Terpadu (di Kabupaten Batang) – Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara dan Kawasan Wisata Pantai (di Kota Pekalongan) – Rencana Kawasan Industri (di Kabupaten Pekalongan) – jalur Pantura. Adanya Jalan Lingkar Utara Petanglong ini akan mempermudah akses ke kawasan-kawasan strategis tersebut, sekaligus juga akan mengurangi kemacetan di jalur Pantura, sehingga harapannya akan menaikkan potensi pertumbuhan ekonomi di 3 daerah tersebut.
- b. Telah direncanakan jalur transportasi masal (BRT) yang menghubungkan dari Kota Batang – Kota Pekalongan – Kota Kajen. Diharapkan dengan disediakannya fasilitas transportasi masal (BRT) yang nyaman ini, akan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, sehingga akan mengurangi kepadatan lalu-lintas pada jalur-jalur yang menghubungkan 3 daerah tersebut.

2) Pola Ruang

Perencanaan Pola Ruang untuk wilayah-wilayah perbatasan telah melalui proses padu serasi dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan, sehingga sudah ada sinkronisasi. Namun demikian, perlu diperhatikan juga perkembangan potensi kebencanaan di masa mendatang yang ada di wilayah-wilayah perbatasan tersebut, yang menjadikan perlu dipikirkan dan disepakati bersama antara dua daerah yang berbatasan, rencana Pola Ruang yang lebih feasible.

Pada wilayah-wilayah yang dekat pantai, “pergerakan kawasan yang terdampak rob dengan probabilitas tinggi bergeser dari tahun 2025 hingga 2030 pada kawasan tambak. Kondisi ini menunjukkan bahwa lahan tambak merupakan lahan yang memiliki probabilitas paling tinggi terdampak dan berubah menjadi kawasan rob. Hingga pada akhir tahun 2035, rob mulai masuk pada kawasan persawahan untuk menjadi kawasan rob. Hal ini tentu menggambarkan dampak yang diberikan pada risiko bencana banjir, mengancam aktivitas ekonomi masyarakat di lokasi kajian, khususnya aktivitas perikanan dan pertanian” (*Laporan Loss and Damage Assesment in Pekalongan City* dan

Pekalongan Regency Under Zurich Flood Resilience Alliance Program, Yayasan Mercy Corps Indonesia, 2021).

3) Batas Wilayah administratif

Telah dilakukan kegiatan survey dan perapatan patok batas wilayah di 3 daerah tersebut, yang melibatkan Bagian Tata Pemerintahan Setda, Lurah / Kepala Desa yang berbatasan dan BPN. Yang outputnya akan menghasilkan batas wilayah yang lebih detail deliniasinya. Untuk melegal formalkan out put kegiatan ini perlu dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan di tingkat kepala daerah, kemudian dimintakan persetujuan ke Kementerian Dalam Negeri.

2.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Kota Pekalongan merupakan wilayah pesisir Utara Pulau Jawa. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang sangat dinamis, dengan berbagai macam proses fisik, termasuk kenaikan muka air laut, penurunan permukaan tanah (*land subsidence*), serta erosi-sedimentasi. Selain itu, wilayah pesisir juga menerima berbagai dampak yang disebabkan oleh aktivitas manusia, sebagai contohnya adalah beban bangunan serta ekstraksi air tanah besar-besaran yang menyebabkan penurunan permukaan tanah. Semua proses tersebut mempengaruhi perubahan garis pantai dan perkembangan bentuk landscape pesisir.

Pekalongan sebagai salah satu kota pesisir di pantai Utara Jawa dengan topografi yang landai merupakan kawasan yang sangat rawan terhadap kenaikan air laut. Kondisi ini tentu saja berbeda jika dibandingkan dengan topografi di pantai Selatan Jawa yang relatif lebih curam. Beberapa ahli mengatakan bahwa kondisi geografis Pekalongan memiliki tingkat kerentanan yang relatif tinggi terhadap pemanasan global. Tingginya nilai kerentanan itu tidak terlepas dari kondisi geomorfologi Pekalongan yang berupa pantai berpasir dan erosi pantai mencapai lebih dari 1 meter per tahun. Selain itu, kisaran pasang surutnya sekitar 0,7 meter. Berdasarkan kajian yang dilakukan Diposaptono (2009), penghitungan nilai risiko terhadap kenaikan paras muka air laut di Pekalongan rata-rata 2,4. Nilai tersebut dikategorikan sebagai daerah berisiko besar.

Bencana alam yang telah dan resiko terjadi di wilayah Kota Pekalongan meliputi abrasi, rob, banjir dan angin puting beliung. Perubahan iklim global yang ditandai dengan kenaikan suhu bumi dan kenaikan permukaan air laut bisa jadi juga telah melanda wilayah Kota Pekalongan. Dalam beberapa tahun ini, upaya untuk menanggulangi rob/air pasang di wilayah Kota Pekalongan terus-menerus dilakukan namun kawasan tergenang rob senantiasa bertambah luas dan bertambah intensitasnya.

Berdasarkan potensi ancaman bencana maka terdapat 4 (empat) potensi bencana di wilayah Kota Pekalongan yaitu bencana rob, bencana banjir, bencana abrasi dan bencana angin puting beliung. Keempat ancaman tersebut merupakan ancaman bagi wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Ancaman bencana, bukan lagi hanya pada kawasan di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara saja, tetapi juga menjadi ancaman bagi keseluruhan kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan Selatan dan Pekalongan Timur. Ancaman untuk keempat kecamatan tersebut adalah banjir. Banjir menjadi potensi yang besar karena topografi wilayah Kota Pekalongan yang sangat datar dan merupakan kawasan muara dari beberapa sungai dari kawasan hulu di daerah lainnya.

Bencana yang cukup signifikan memberikan dampak bagi masyarakat yang tinggal di Kota Pekalongan, khususnya Kecamatan Pekalongan Utara antara lain bencana banjir dan banjir rob/pasang. Bencana tersebut memberi dampak pada kehidupan masyarakat yang tinggal di kota ini. Tidak hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur dan sarana

wilayah saja, melainkan juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Jumlah kawasan kumuh (*slum area*) yang masih terdapat di wilayah Kota Pekalongan, terutama disebabkan oleh bencana rob ini, Faktor pemicu terjadinya kawasan kumuh, bukan hanya karena prasarana dan sarana perumahan dan permukiman yang tidak memadai saja tetapi akibat rob yang lebih dominan.

Abrasi di Kota Pekalongan telah menimbulkan persoalan sosial yang kompleks. Abrasi terparah di Kota Pekalongan terjadi di Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, yaitu di Pantai Sari. Di sana abrasi bahkan telah mengganggu ketenangan hidup sekitar 200 kepala keluarga (KK). Pasalnya, abrasi telah menimbulkan rob yang hampir setiap hari menggenangi rumah penduduk. Akibatnya, warga di sana banyak yang terkena penyakit kulit dan terganggu aktivitasnya.

Penurunan permukaan tanah juga menjadi resiko bencana yang terjadi di wilayah Kota Pekalongan. Berdasarkan naskah akademik penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan (KSP) Petanglong bahwa penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan terjadi karena tanah yang membentuk wilayah Kota Pekalongan adalah tanah alluvial, yang merupakan hasil sedimentasi. Tanah-tanah hasil sedimentasi masih memerlukan waktu ratusan tahun ke depan agar kondisi tanah menjadi stabil. Penurunan permukaan tanah juga memungkinkan terjadi karena kondisi cekungan air tanah yang kosong akibat eksploitasi atau pengambilan air tanah dalam yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini terutama disebabkan oleh pengambilan air tanah yang terjadi, kapasitasnya melebihi dari kapasitas pengisian alami air tanah.

Berdasarkan gambaran potensi kebencanaan di Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kota (Pasal 5) dan strategi untuk melaksanakan peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana (Pasal 13A) melalui Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029, yaitu :

- 1) Kebijakan penataan ruang wilayah kota, meliputi :
 - a. Pengembangan kegiatan industri kreatif yang mempertimbangkan kualitas lingkungan;
 - b. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang mampu meningkatkan peran Kota sebagai pusat kawasan regional Petanglong;
 - c. Pengaturan kegiatan industri;
 - d. Peningkatan hasil perikanan dan optimalisasi lahan pertanian;
 - e. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana;
 - f. Peningkatan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
 - g. Pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan;
 - h. Peningkatan pengelolaan kawasan strategis Kota;
 - i. Peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana; dan
 - j. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 2) Strategi untuk melaksanakan peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana, meliputi :
 - a. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung penanganan kawasan rawan bencana;
 - b. Mengembangkan RTH di sekitar DAS dan pada kawasan rawan bencana risiko tinggi;
 - c. Meningkatkan mitigasi bencana risiko tinggi;

- d. Mewujudkan arahan peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana; dan
- e. Mewujudkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana.

Pada Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029 disebutkan adanya Sistem jaringan evakuasi bencana berupa jalan yang direncanakan sebagai jalur evakuasi bencana menuju ruang evakuasi bencana. Jalur evakuasi bencana terdiri dari :

- a. Jalur evakuasi terhadap bencana abrasi, meliputi Jalan Pantai Slamaran di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara dan Jalan Pantai Sari dan Jalan Samudra di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara;
- b. Jalur evakuasi terhadap bencana rob, meliputi Jalan Samudera Kelurahan Panjang Baru dan Kelurahan Kandang Panjang, Jalan Samudera Pasai di Kelurahan Panjang Baru, Jalan Kusuma Bangsa di Kelurahan Panjang Wetan, dan Jalan WR. Supratman di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara;
- c. Jalur evakuasi terhadap bencana banjir terdapat di :
 - Kecamatan Pekalongan Selatan, meliputi Jalan Gatot Subroto di Kelurahan Banyurip dan Kelurahan Buaran Kradenan;
 - Kecamatan Pekalongan Barat, meliputi Jalan Ahmad Dahlan di Kelurahan Tirto, Kelurahan Pringrejo dan Jalan Pemuda di Kelurahan Bendan Kergon; dan Jalan Gajah Mada di Kelurahan Pasir Kraton Kramat;
 - Kecamatan Pekalongan Utara, meliputi Jalan WR. Supratman dan Jalan Kusuma Bangsa di Kelurahan Panjang Wetan, Jalan Diponegoro dan Jalan Imam Bonjol di Kelurahan Padukuhan Kraton.
- d. Jalur evakuasi terhadap bencana angin topan, terdapat di Jalan Ki Mangun Sarkoro di Kelurahan Degayu dan Jalan Patimura di Kelurahan Gamer.

Sedangkan Ruang evakuasi bencana, antara lain :

- Lapangan;
- Stadion;
- Taman publik;
- Bangunan rumah;
- Bangunan kantor pemerintah;
- Bangunan fasilitas sosial;
- Bangunan fasilitas umum, dan
- Ruang/bangunan Lainnya.

2.1.9. Aspek Demografi

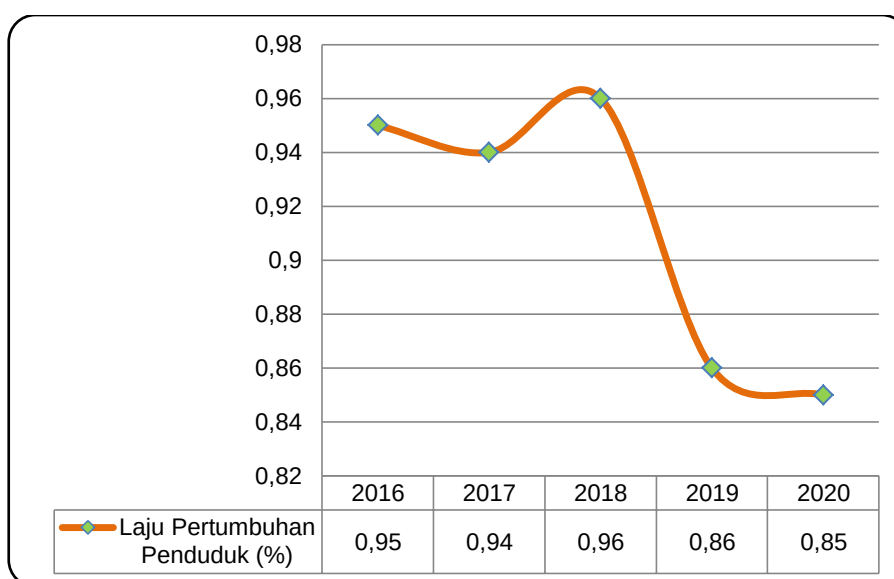
Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2020 berdasarkan proyeksi BPS Kota Pekalongan sebanyak 307.150 jiwa, terdiri dari 155.145 jiwa laki-laki dan 152.005 jiwa perempuan. Perkembangan selama lima tahun terakhir, jumlah laki-laki hampir sama dengan jumlah perempuan. Hal ini terlihat pada angka sex ratio sebesar 102,07 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102,07 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk Kota Pekalongan dan berdasarkan jenis kelaminnya, disajikan dalam tabel 2.4. berikut.

**Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan
Tahun 2016 – 2020**

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
2016	149.623	149.599	299.222
2017	150.887	150.983	301.870
2018	152.202	152.275	304.477
2019	153.778	153.319	307.097
2020	155.145	152.005	307.150

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa rata-rata penambahan jumlah penduduk Kota Pekalongan dari tahun 2016 sampai tahun 2019 sekitar 2.625 jiwa. Pada tahun 2020 bertambah 53 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,85 persen.

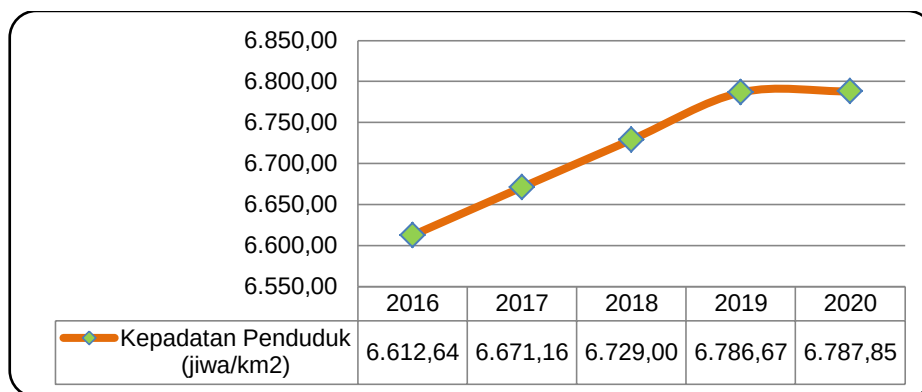


**Gambar 2.9 Laju Pertumbuhan Penduduk
Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020**

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

Gambar 2.9 menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan tahun 2016-2020. Selama lima tahun terakhir pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,85 persen. Dari tahun 2018 sampai tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan cenderung menurun.

Dari segi kepadatan penduduk, Kota Pekalongan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seiring dengan bertambahnya penduduk yang lahir, penduduk yang meninggal, migrasi masuk ke kota Pekalongan dan keluar Kota Pekalongan, kepadatan penduduk per kilometer persegi mengalami peningkatan. Berikut data kepadatan penduduk Kota Pekalongan dari tahun 2016-2020 disajikan dalam Gambar 2.10 berikut.



Gambar 2.10 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan berpendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Pekalongan pada Tahun 2020, pendidikan SD ke bawah sebanyak 52.326 jiwa (35,79 persen), diikuti SMP sebanyak 29.357 jiwa (20,08 persen) dan Sekolah Menengah (SM) ke atas sebanyak 64.536 jiwa (44,13 persen) Adapun jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang bekerja pada tahun 2020 berjumlah 146.219 jiwa.

Secara bertahap mulai tahun 2016, struktur pekerja yang lulusan SD kebawah berfluktuatif akan tetapi tidak signifikan baik secara persentase maupun jumlah. Demikian juga struktur pekerja pada pendidikan SLTP dan Sekolah Menengah (SM) keatas selama lima tahun baik dalam jumlah kuantitatif maupun persentase mengalami perbaikan namun tidak signifikan. Pada tahun 2020 terjadi penurunan komposisi pekerja pada tingkat pendidikan SD ke bawah yaitu 52.326 jiwa (35,79 persen) dan tingkat SLTP 29.357 jiwa (20,08 persen). Namun pada tingkat pendidikan SM (Sekolah Menengah) ke atas meningkat yaitu 64.536 jiwa (44,13 persen). Secara lengkap data Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun keatas yang Bekerja Tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5 Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja						Jumlah
	≤SD		SLTP		≥SM		
	orang	persen	orang	persen	orang	persen	
2016	58.503	40,80	30.951	21,59	53.922	37,61	143.376
2017	61.346	41,03	30.055	20,11	58.086	38,86	149.487
2018	61.358	40,47	31.072	20,50	59.167	39,03	151.597
2019	56.934	35,89	35.203	22,19	66.498	41,92	158.635
2020	52.326	35,79	29.357	20,08	64.536	44,13	146.219

Sumber : diolah dari Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

*) BPS tidak melakukan survei untuk tahun 2016 dan data yang disajikan sama dengan tahun 2015

Pada tingkat minimal Sekolah Menengah, secara struktur pekerja yang bekerja meningkat *trendnya* selama lima tahun berturut-turut. Pada tahun 2016 berjumlah 53.922 jiwa atau setara 37,61 persen dari jumlah pekerja, sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 64.536 jiwa atau setara 44,13 persen. Secara garis besar selama lima tahun terakhir jumlah pekerja untuk tingkat SD, SMP dan SM mengalami fluktuasi, dan jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 158.635 jiwa.

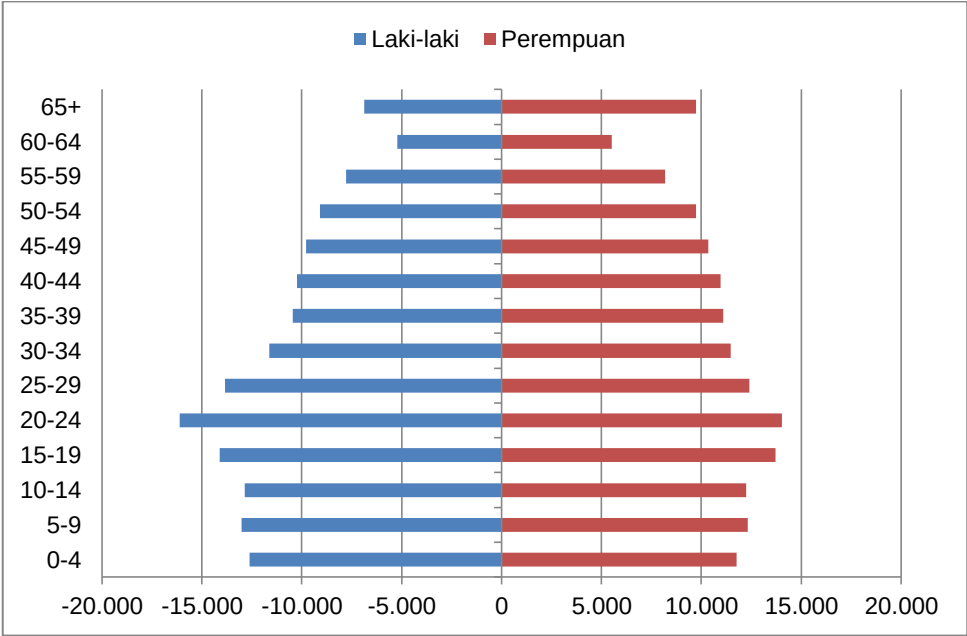
Dalam konteks rentang usia, penduduk Kota Pekalongan tahun 2020 paling banyak berada pada rentang usia 25-29 tahun yaitu sebanyak 25.645 jiwa, diikuti rentang usia 30-34 tahun sebanyak 25.585 jiwa. Sedangkan jumlah lansia di atas usia 60 tahun sebanyak 16.721 jiwa. Dan pada rentang usia lainnya perbedaan jumlah penduduk tidak terlalu signifikan. Secara lengkap data Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020 menurut kelompok umur dan jenis kelamin (jiwa) disajikan dalam Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)

Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	12.254	11.703	23.957
5-9	12.600	11.956	24.556
10-14	12.639	11.832	24.471
15-19	13.086	12.291	25.377
20-24	13.023	12.144	25.167
25-29	13.443	12.202	25.645
30-34	13.395	12.190	25.585
35-39	12.737	12.109	24.846
40-44	12.004	11.861	23.865
45-49	10.130	10.510	20.640
50-54	8.981	9.632	18.613
55-59	7.628	8.052	15.680
60-64	5.793	6.234	12.027
65+	7.432	9.289	16.721
Jumlah	155.145	152.005	307.150

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

Dan disajikan dalam bentuk diagram piramida seperti berikut.



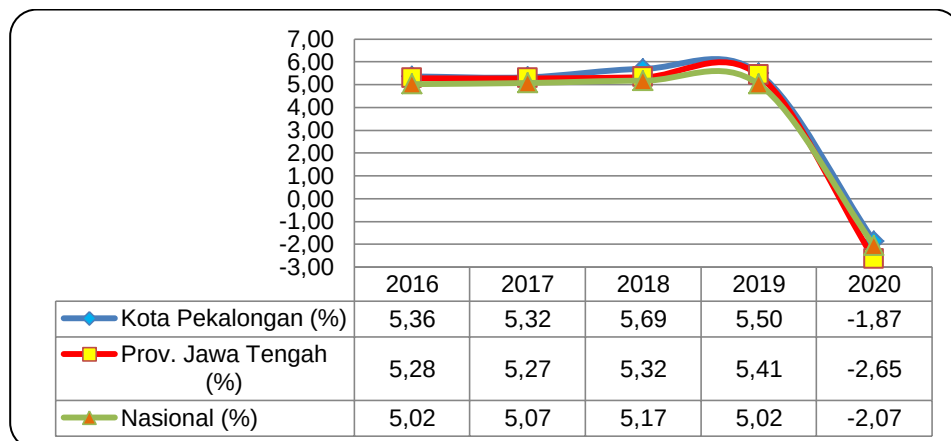
Gambar 2.11 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021 (diolah), 2021

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami fluktuasi, namun meningkat dari 5,36 persen di tahun 2016 menjadi 5,50 persen di tahun 2019. Di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun tajam bahkan minus 1,87 persen. Hal ini disebabkan wabah global yaitu *COVID-19* yang menyerang ke seluruh dunia hingga menjadi pandemi dan berdampak pada munculnya kebijakan *lockdown*. Seluruh sendi kehidupan tak terhindar dari dampak wabah ini hingga mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi global.

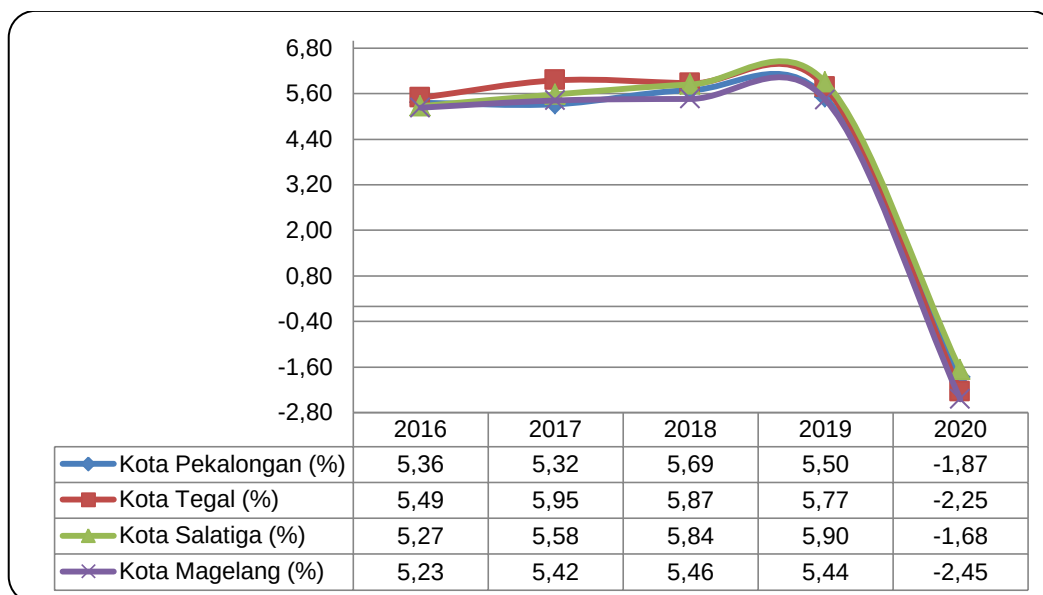


Gambar 2.12 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021 (diolah), 2021

Meskipun demikian, persentase pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sepanjang lima tahun terakhir selalu di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Begitu juga jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan selalu di atas pertumbuhan ekonomi Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada pada posisi tertinggi di tahun 2018 yaitu sebesar 5,69 persen, dan posisi terendah pada tahun 2020 yaitu -1,87 persen.

Jika dibandingkan dengan Daerah setara seperti Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan secara umum berada di posisi tengah diantara ketiga Daerah tersebut. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada dibawah Kota Tegal, diatas Kota Salatiga dan Kota Magelang. Tahun 2017 berada dibawah ketiga Kota tersebut, pada tahun 2018 dan 2019 berada diatas Kota Magelang, dibawah Kota Tegal dan Kota Salatiga. Sementara itu di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada dibawah Kota Salatiga, diatas Kota Tegal dan Kota Magelang. Selengkapnya disajikan dalam Gambar 2.13 berikut.



Gambar 2.13 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2016 – 2020

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

2.2.2. Struktur Ekonomi

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Pengolahan dan konstruksi yang terlihat dari peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan selama lima tahun. Peranan terbesar pada struktur perekonomian tahun 2020 adalah pada lapangan usaha Industri Pengolahan yakni 21,40 persen dan ini meningkat dibandingkan tahun 2019 yakni 20,85 persen, kemudian diikuti lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,16 persen dan ini turun dibandingkan tahun 2019 yakni sebesar 21,80 persen dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 14,60 persen dan ini turun dibandingkan tahun 2019 yakni 14,64 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0 – 6 persen. Struktur ekonomi ini adalah gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan disajikan dalam Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (persen)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,26	4,74	4,67	4,66	5,10
B	Pertambangan dan Penggalian	—	—	-	-	-
C	Industri Pengolahan	21,43	21,13	20,94	20,85	21,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,10	0,12
F	Konstruksi	14,36	14,39	14,60	14,64	14,60

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,72	21,78	21,76	21,80	21,16
H	Transportasi dan Pergudangan	6,05	6,32	6,28	6,40	5,01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,42	5,39	5,42	5,44	5,32
J	Informasi dan Komunikasi	3,88	4,15	4,21	4,36	5,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,14	6,26	6,27	6,13	6,22
L	Real Estat	2,68	2,68	2,71	2,71	2,74
M,N	Jasa Perusahaan	0,40	0,41	0,42	0,44	0,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,75	4,72	4,58	4,47	4,50
P	Jasa Pendidikan	4,58	4,67	4,75	4,65	4,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,25	1,25	1,26	1,29	1,44
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,82	1,84	1,87	1,90	1,91
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

PDRB Kota Pekalongan menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup subkategori usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, sub kategori usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan subkategori usaha Perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2020, peranan pada kategori atau lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku adalah sebesar 5,10 persen. Peranan kategori ini mengalami fluktuasi. Tahun 2016, peranan kategori ini sebesar 5,26 persen, kemudian melemah tahun 2017 sebesar 4,74 persen, dan semakin menurun tahun 2018 sebesar 4,67 persen, tahun 2019 sebesar 4,66 persen dan meningkat 5,10 persen di tahun 2020.

Industri Pengolahan

Kategori ini mencakup subkategori usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas Industri Batubara dan Pengilangan Minyak, Industri Makanan dan Minuman, Pengolahan Tembakau, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, Industri Kulit; Barang dari Kulit dan Alas Kaki, Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman, Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional, Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik, Industri Barang Galian bukan Logam, Industri Logam Dasar, Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik,

Optik dan Peralatan Listrik, Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL, Industri Alat Angkutan, Industri Furnitur dan Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan. Kategori ini memiliki peranan dalam sektor perekonomian PDRB Kota Pekalongan sebesar 21,40 persen pada tahun 2020.

Peran kategori ini cenderung mengalami pelemahan hingga tahun 2019, yakni pada tahun 2016 sebesar 21,43 persen, pada tahun 2019 makin lemah menjadi 20,85 persen.

Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas, mempunyai peran sebesar 0,16 persen terhadap perekonomian Kota Pekalongan pada tahun 2020, sama seperti tahun 2019 yaitu 0,16 persen. Peran kategori ini dalam struktur perekonomian cukup stabil. Tahun 2016 hingga tahun 2020 peran kategori ini sebesar 0,16 persen.

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian tidak termasuk dalam kategori ini. Peranan kategori ini terhadap struktur perekonomian di Kota Pekalongan stabil selama 2015-2018 yaitu sebesar 0,11 persen dan menurun 0,10 persen pada tahun 2019, kemudian meningkat 0,12 persen pada tahun 2020.

Konstruksi

Pada tahun 2020 kategori konstruksi mempunyai peran dalam struktur perekonomian sebesar 14,60 persen terhadap total perekonomian Kota Pekalongan. Secara umum, peran kategori ini pada perekonomian cenderung meningkat yaitu tahun 2016 sebesar 14,36 persen, tahun 2017 sebesar 14,39 persen, tahun 2018 sebesar 14,60 persen dan tahun 2019 sebesar 14,64 persen. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan konstruksi di Kota Pekalongan besarnya tahun 2020 adalah -1,09 persen pada tahun 2016 pertumbuhannya 4,52 persen. Pertumbuhan konstruksi di tahun 2017 besarnya 5,51 persen, 5,59 persen pada tahun 2018, dan 4,71 persen pada tahun 2019.

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mempunyai peran terhadap PDRB selalu lebih dari 20 persen. Pada tahun 2020, peranan kategori ini sebesar 21,16 persen lebih kecil dibandingkan peranan di tahun 2019 yang sudah mencapai 21,80 persen terhadap PDRB Kota Pekalongan.

Transportasi dan Pergudangan

Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 (enam) sub kategori, yaitu Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Kategori ini peranannya terhadap struktur perekonomian Kota Pekalongan sebesar 5,01 persen di tahun 2020. Selama kurun waktu lima tahun terakhir dari 2016 – 2020 peran kategori ini berfluktuatif. Tahun 2016 6,05 persen, tahun 2017 naik menjadi 6,32 persen. Tahun 2018 mengalami penurunan yaitu 6,28 persen, namun tahun 2019 kembali meningkat menjadi 6,40 persen.

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Pada tahun 2020, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dalam struktur perekonomian Kota Pekalongan sebesar 5,32 persen. Secara keseluruhan, laju pertumbuhan tahun 2019 merupakan yang paling tinggi dalam kurun waktu 5 tahun

terakhir yaitu tahun 2016 sebesar 5,42 persen, tahun 2017 sebesar 5,39 persen, tahun 2018 sebesar 5,42 persen dan tahun 2020 sebesar 5,32 persen.

Informasi dan Komunikasi

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini menjadi indikator kemajuan suatu daerah, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap PDRB Kota Pekalongan tahun 2016 sebesar 3,88 persen, tahun 2017 sebesar 4,15 persen, tahun 2018 sebesar 4,21 persen, tahun 2019 sebesar 4,36 persen dan tahun 2020 sebesar 5,15 persen. Laju pertumbuhan ekonomi pada kategori ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat yaitu tahun 2016 sebesar 8,47 persen, tahun 2017 sebesar 11,94 persen, tahun 2018 sebesar 10,43 persen, tahun 2019 sebesar 10,57 persen, dan tahun 2020 sebesar 17,20 persen.

Jasa Keuangan dan Asuransi

Kegiatan kategori jasa keuangan dan asuransi pada tahun 2020, perannya sebesar 6,22 persen terhadap PDRB Kota Pekalongan. Secara umum, selama empat tahun terakhir peran kategori ini pada perekonomian berfluktuatif yaitu tahun 2016 sebesar 6,14 persen, tahun 2017 sebesar 6,26 persen, tahun 2018 sebesar 6,27 persen, dan tahun 2019 sebesar 6,13 persen.

Real Estate

Kategori real estate memberikan peran yang relatif stabil bagi PDRB Kota Pekalongan dengan peranan sekitar 2,7 persen. Berturut-turut sumbangan kategori real estate selama tahun 2016-2020 sebesar 2,68 persen, 2,68 persen, 2,71 persen, 2,71 persen dan 2,74 persen. Laju pertumbuhan ekonomi kategori ini cukup signifikan dengan pertumbuhan selalu di atas 5 persen pada tahun 2016-2019, namun melambat pada tahun 2020 dikisaran -0,08 persen. Laju pertumbuhan dari tahun 2016-2019 adalah tahun 2016 sebesar 6,54 persen, pada tahun 2017 5,84 persen, 5,97 persen di tahun 2018, dan 5,62 persen di tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 sebesar -0,08 persen.

Jasa Perusahaan

Selama 5 tahun terakhir, peran dalam struktur perekonomian di Kota Pekalongan kategori jasa perusahaan relatif tidak banyak berubah, yaitu dari 0,40 persen pada tahun 2016, tahun 2017 menjadi sebesar 0,41 persen, tahun 2018 sebesar 0,42 persen, tahun 2019 sebesar 0,44 persen dan tahun 2020 turun menjadi 0,43 persen. Hal ini menunjukkan pula peranan kategori ini relatif kecil dibandingkan peranan kategori-kategori lainnya pada perekonomian Kota Pekalongan. Laju pertumbuhan kategori jasa perusahaan sangat fluktuatif dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Laju pertumbuhan pada tahun 2016 pertumbuhannya sebesar 10,28 persen, pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 7,85 persen, ditahun 2018 tumbuh sebesar 7,95, tahun 2019 tumbuh sebesar 8,31 persen dan melambat sebesar -4,32 persen di tahun 2020.

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2016-2019 peranan kategori ini relatif stabil namun menunjukkan sedikit penurunan, yaitu dengan nilai peran tahun 2016 sebesar 4,75 persen, tahun 2017 sebesar 4,72 persen, tahun 2018 sebesar 4,58 persen, tahun 2019 sebesar 4,47 persen dan meningkat di tahun 2020 sebesar 4,50 persen. Laju pertumbuhan dari kategori ini cenderung fluktuatif, yaitu dari sebesar 2,58 persen di tahun 2016 menjadi 3,75 persen di tahun 2017.

Pertumbuhan pada 2018 sebesar 3,99 persen, 3,82 persen di tahun 2019 dan -1,00 persen di tahun 2020.

Jasa Pendidikan

Pada tahun 2020, jasa pendidikan mempunyai peranan 4,73 persen dalam struktur perekonomian Kota Pekalongan. Angka ini meningkat dibandingkan pada tahun 2019 yang peranannya sebesar 4,65 persen. Trend peningkatan peran kategori ini juga terlihat pada kurun waktu antara 2016-2018 yaitu tahun 2016 sebesar 4,58 persen, tahun 2017 sebesar 4,67 persen, dan di tahun 2018 sebesar 4,75 persen. Berdasarkan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan jasa pendidikan Kota Pekalongan mengalami fluktuasi pada periode tahun 2016 – 2020, masing-masing yaitu 7,49 persen di tahun 2016, tahun 2017 tumbuh sebesar 6,82 persen, tahun 2018 tumbuh sebesar 7,59 persen, tahun 2018 tumbuh sebesar 2,63 persen dan pertumbuhannya melambat di tahun 2020 sebesar -0,56 persen.

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Selama tahun 2015-2020 peranannya relatif stabil dengan menunjukkan sedikit peningkatan, yaitu tahun 2016 dan tahun 2017 sebesar 1,25 persen, tahun 2018 sebesar 1,26 persen, tahun 2019 sebesar 1,29 persen dan tahun 2020 sebesar 1,44 persen. Dilihat dari laju pertumbuhannya, terjadi perlambatan ekonomi khususnya kegiatan jasa kesehatan dan kegiatan sosial dari tahun 2016 dengan pertumbuhan sebesar 9,65 persen melambat di tahun 2017 hingga tahun 2019 sebesar masing-masing 7,74 persen, 7,93 persen dan 7,84 persen, dan meningkat pertumbuhannya di tahun 2020 sebesar 8,35 persen.

Jasa lainnya

Peranan Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kota Pekalongan relatif kecil yaitu berturut-turut tahun 2016 sebesar 1,82 persen, tahun 2017 sebesar 1,84 persen, tahun 2018 sebesar 1,87 persen, tahun 2019 sebesar 1,90 persen dan tahun 2020 sebesar 1,91 persen. Dilihat dari sisi laju pertumbuhannya, kategori ini mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi selama tahun 2016-2020, yaitu tahun 2016 sebesar 7,23 persen, pada tahun 2016 pertumbuhannya naik menjadi 8,09 persen, tahun 2018 naik menjadi 9,02 persen, tahun 2019 pertumbuhannya melambat menjadi 8,47 persen dan tahun 2020 kembali turun menjadi -1,19 persen.

2.2.2.1. Pertumbuhan PDRB

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu tahun 2016-2019, laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan bertumbuh antara 5,36 persen pada tahun 2016 dan 5,50 persen pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan mengalami perlambatan sebesar -1,87 persen. Pada tahun 2016, pertumbuhan tiga besar yakni Jasa Perusahaan sebesar 10,28 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,65 persen, dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,03 persen. Pada tahun 2020, lapangan usaha yang mengalami pergeseran pertumbuhan ekonomi, tiga besar diantaranya adalah Informasi dan Komunikasi sebesar 17,20 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,35 persen dan Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,91 persen. Hal ini sesuai dengan Kota Pekalongan yang saat ini sedang menuju Pekalongan *Smart City*.

Pertumbuhan ekonomi ini merupakan gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga konstan disajikan dalam tabel Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,98	-4,80	3,03	4,63	6,36
B	Pertambangan dan Penggalian	–	–	-	-	-
C	Industri Pengolahan	4,16	4,35	4,46	4,84	-0,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,69	4,93	5,29	3,72	-0,26
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,16	5,86	5,16	4,21	6,91
F	Konstruksi	4,52	5,51	5,59	4,71	-1,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,86	5,71	5,53	5,47	-4,68
H	Transportasi dan Pergudangan	5,16	5,84	7,07	7,53	-24,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,94	5,92	5,88	6,76	-3,78
J	Informasi dan Komunikasi	8,47	11,94	10,43	10,57	17,20
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,03	7,35	5,12	3,76	0,93
L	Real Estat	6,54	5,84	5,97	5,62	-0,08
M,N	Jasa Perusahaan	10,28	7,85	7,95	8,31	-4,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,58	3,75	3,99	3,82	-1,00
P	Jasa Pendidikan	7,49	6,82	7,59	2,63	-0,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,65	7,74	7,93	7,84	8,35
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,23	8,09	9,02	8,47	-1,19
Produk Domestik Regional Bruto		5,36	5,32	5,69	5,50	-1,87

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

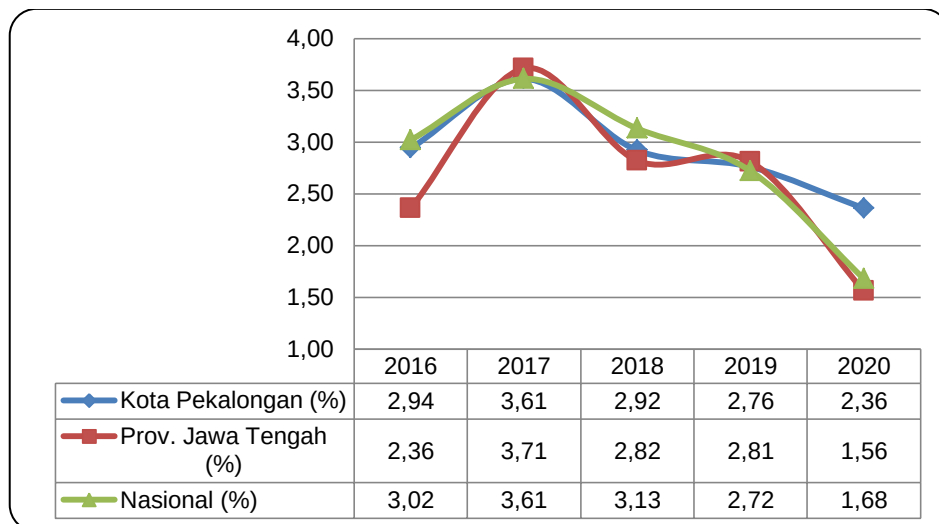
Laju pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2016-2020 berfluktuasi namun berkesinambungan, dengan penopang pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan pada tahun 2019 mayoritas adalah sektor Informasi dan Komunikasi.

2.2.3. Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kota Pekalongan, laju inflasi di Kota Pekalongan merujuk angka inflasi Kota Tegal (daerah setara). Pada periode tahun 2016 – 2020, inflasi di Kota Pekalongan

cenderung berfluktuasi dari kisaran 2,36 persen sampai 3,61 persen. Nilai inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2020 lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

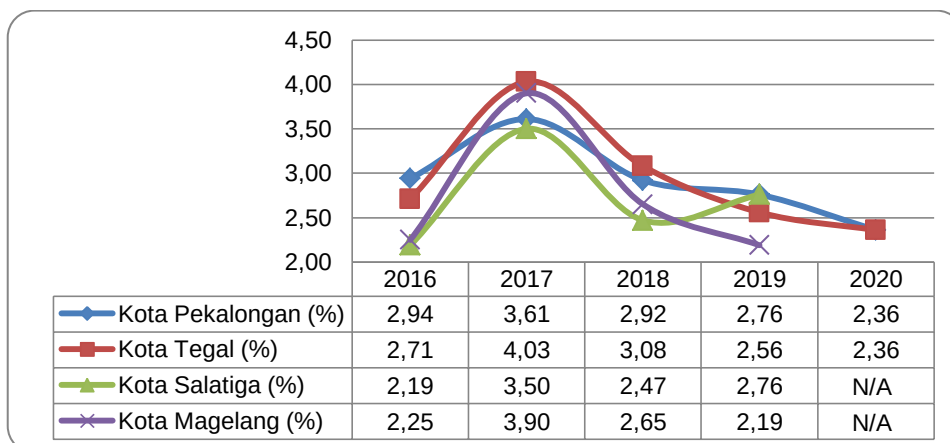
Adapun perkembangan inflasi Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional disajikan dalam Gambar 2.14 berikut.



Gambar 2.14 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016 – 2020

Sumber : www.bps.go.id, 2021

Jika dibandingkan dengan daerah setara (Kota Tegal, Kota Salatiga, dan Kota Magelang), inflasi Kota Pekalongan tahun 2016 berada di posisi paling atas yaitu 2,94%. Tahun 2017 di urutan ketiga tertinggi yaitu Kota Tegal (4,03%), Kota Magelang (3,90%), Kota Pekalongan (3,61%) dan Kota Salatiga (3,50). Tahun 2018 berada pada urutan tertinggi kedua yaitu Kota Tegal (3,08%), Kota Pekalongan (2,92%), Kota Magelang (2,65%) dan Kota Salatiga (2,47%). Tahun 2019 berada pada urutan tertinggi bersama Kota Salatiga yaitu 2,76%, dan untuk Kota Tegal sebesar 2,56% dan Kota Magelang sebesar 2,19%. Untuk tahun 2020, inflasi Kota Pekalongan sama dengan Kota Tegal yaitu 2,36%, sementara Kota Salatiga dan Kota Magelang tidak dilakukan penghitungan laju inflasi.



Gambar 2.15 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Daerah Setara Tahun 2016 – 2020

Sumber : www.bps.go.id, 2021

Penyumbang inflasi terbesar di Kota Pekalongan adalah kelompok Bahan Makanan, kesehatan, pendidikan, sandang, kemudian kelompok umum, makanan jadi, perumahan dan transport. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Kelompok Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
Umum	2,94	3,61	2,92	2,76	-
Bahan Makanan	6,03	4,63	3,66	8,00	-
Makanan Jadi	5,85	2,46	3,05	1,60	-
Perumahan	0,88	4,02	3,47	0,40	0,33
Sandang	5,01	5,40	2,51	3,31	4,01
Kesehatan	1,99	1,15	0,54	4,75	2,89
Pendidikan	2,84	3,26	1,33	3,74	-2,71
Transport	-3,07	3,96	2,43	0,31	1,33
Perlengkapan	-	-	-	-	2,70
Infokom	-	-	-	-	1,20
Rekreasi	-	-	-	-	6,27
Restoran	-	-	-	-	1,76
Perawatan Pribadi	-	-	-	-	4,20

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2021

2.2.4. PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku sejak 2016 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada Tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 28,43 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 35,41 juta rupiah. Namun mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 35,22 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sebesar Rp. 35,22 juta menurun sebesar 0,53 persen dibanding PDRB per kapita tahun 2019 sebesar Rp. 35,41 juta.

Tabel 2.10 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB					
- ADHB (Miliar Rp)	8.507,54	9.274,26	10.089,25	10.873,98	10.818,53

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
- ADHK (Miliar Rp)	6.367,27	6.706,27	7.087,92	7.477,43	7.337,83
PDRB Per Kapita					
- ADHB (Juta Rp)	28,43	30,72	33,14	35,41	35,22
- ADHK (Juta Rp)	21,28	22,22	23,28	24,35	23,89
Pertumbuhan PDRB per Kapita					
- ADHB (persen)	8,39	8,06	7,86	6,86	-0,53
- ADHK (persen)	4,42	4,40	4,79	4,60	-1,88

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2021

2.2.5. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 (nol) menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

Indeks gini pada tahun 2018 sebesar 0,336 seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sebesar 5,69 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi pada 2019 sebesar 5,50 persen sehingga menurunkan indeks gini Kota Pekalongan menjadi 0,305. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi 1,87%. Meskipun demikian, indeks gini masih meningkat menjadi 0,314. Indeks gini Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.11 berikut.

**Tabel 2.11 Indeks Gini Kota Pekalongan
Tahun 2018 – 2020**

Tahun	Indeks Gini
2018	0,336
2019	0,305
2020	0,314

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2021

2.2.6. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks, baik faktor penyebabnya maupun dampaknya. Selain itu, kemiskinan menjadi salah satu indikator yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah karena menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat.

2.2.6.1. Garis Kemiskinan

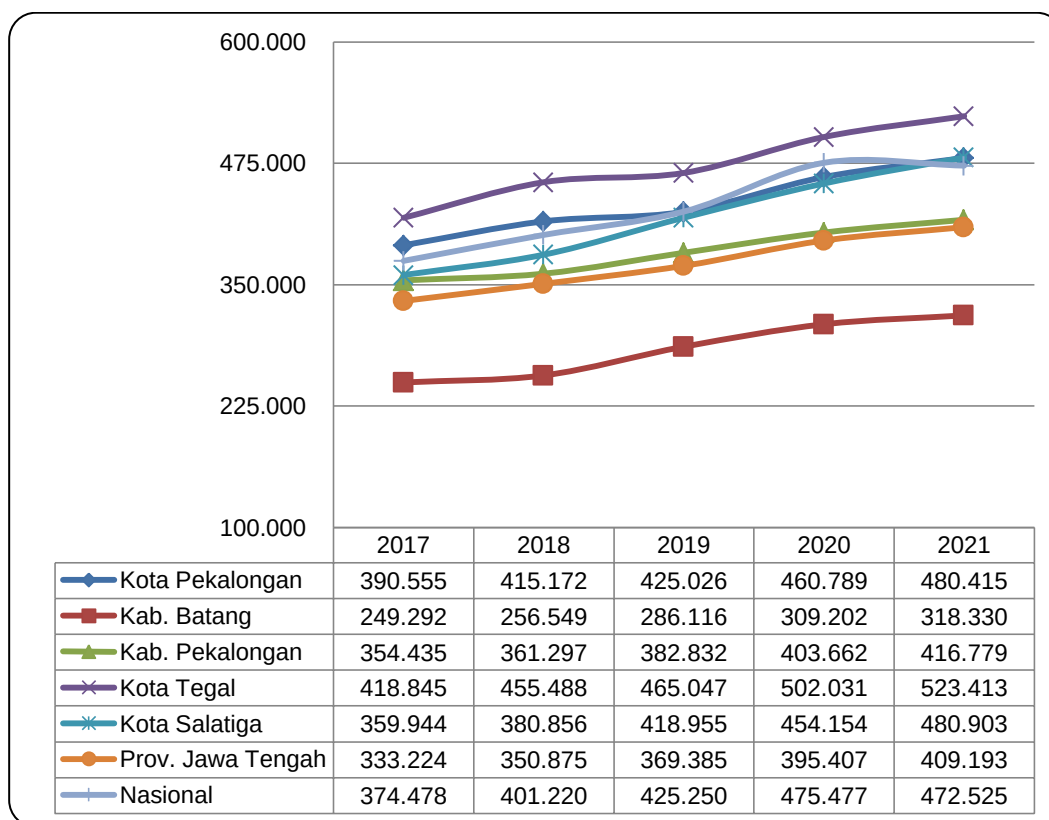
Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah pada November 2021, Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan sebesar Rp.480.415/kapita/bulan. Angka ini di atas Garis Kemiskinan Nasional sebesar Rp.472.525 dan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.409.193,00.

Tabel 2.12 Garis Kemiskinan (GK) Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Tahun	GK Kota Pekalongan (Rp)	GK Kab Batang (Rp)	GK Kab Pekalongan (Rp)	GK Kota Tegal (Rp)	GK Kota Salatiga (Rp)	GK Provinsi Jawa Tengah (Rp)	GK Nasional (Rp)
2017	390.555	249.292	354.435	418.845	359.944	333.224	374.478
2018	415.172	256.549	361.297	455.488	380.856	350.875	401.220
2019	425.026	286.116	382.832	465.047	418.955	369.385	425.250
2020	460.789	309.202	403.662	502.031	454.154	395.407	475.477
2021	480.415	318.330	416.779	523.413	480.903	409.193	472.525 (semester I 2021)

Sumber : <https://pekalongankota.bps.go.id/>, <https://jateng.bps.go.id/>, dan <https://www.bps.go.id/> (diolah), 2021



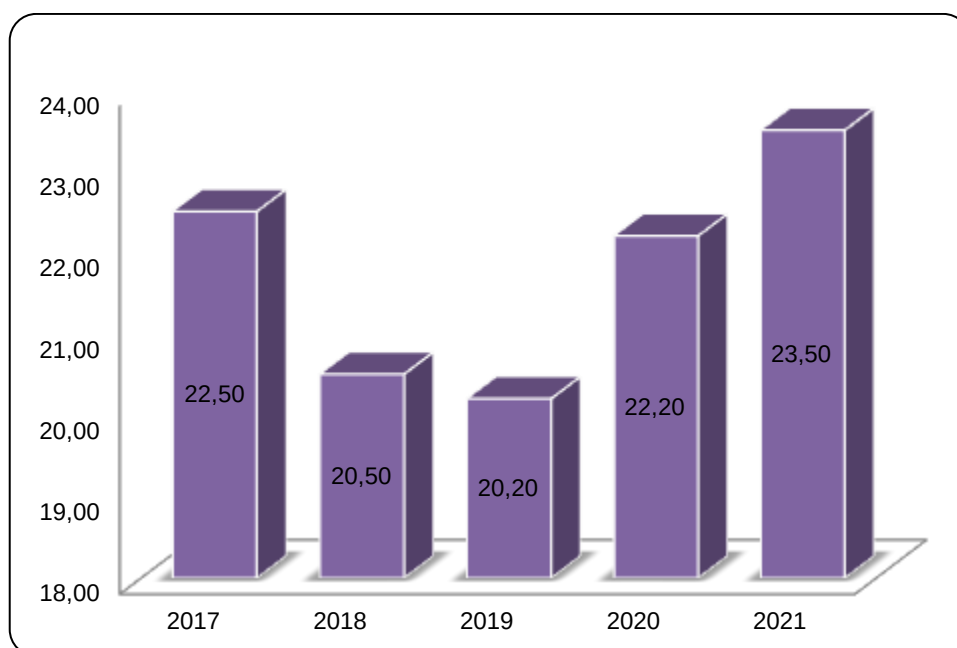
Gambar 2.16 Perbandingan Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021

Sumber : <https://pekalongankota.bps.go.id/>, <https://jateng.bps.go.id/>, dan <https://www.bps.go.id/> (diolah), 2021

2.2.6.2. Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kemiskinan di Kota Pekalongan diantaranya adanya program-program nasional seperti PKH, bantuan pangan non tunai, beasiswa untuk siswa miskin dan program Pemerintah Kota Pekalongan antara lain bantuan Fasilitas Operasional Pendidikan (FOP) ke masyarakat. FOP bertujuan menekan beban pengeluaran non konsumsi rumah tangga di tengah-tengah masyarakat, meningkatkan pendapatan, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, pengembangan usaha kecil dan mikro, dan sinergitas serta peningkatan kerjasama penanganan lintas sektor, keterlibatan swasta, perguruan tinggi, perbankan dan unsur masyarakat.



**Gambar 2.17 Jumlah Penduduk Miskin
di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 (000 jiwa)**

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

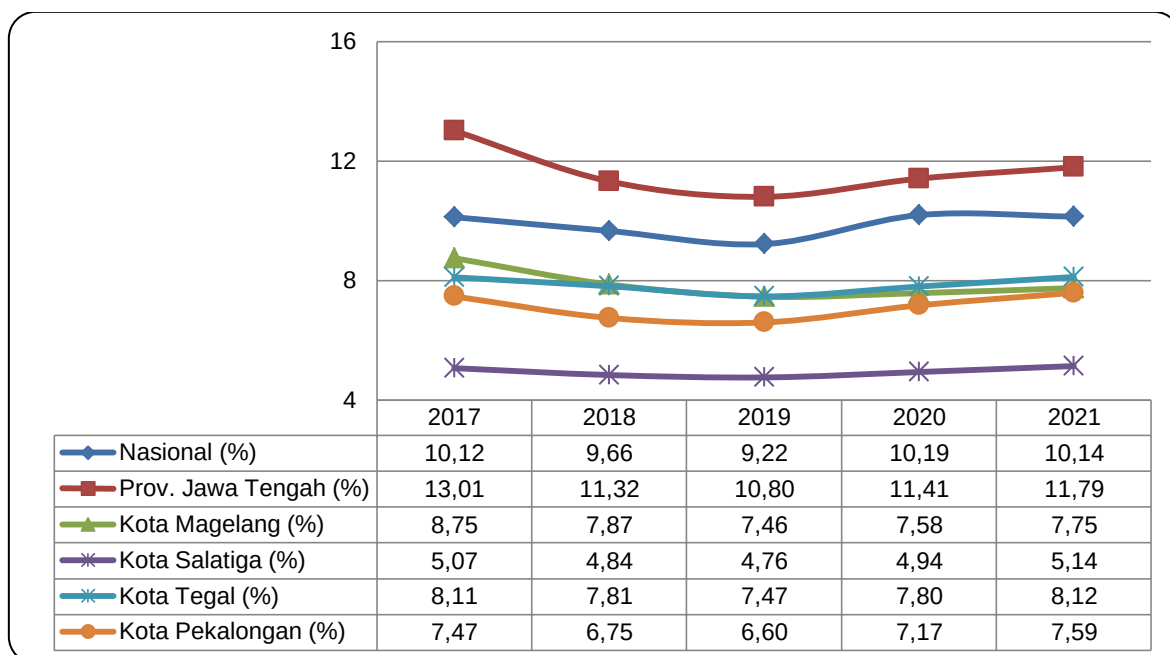
Sepanjang kurun waktu tahun 2016-2019, bisa dikatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Pekalongan selalu mengalami penurunan, namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga mencapai sekitar 22,20 ribu jiwa dan 23,50 ribu jiwa pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan dampak pandemi *COVID-19*. Namun jika dibandingkan lebih rendah dari Provinsi dan Nasional.

Selama kurun waktu 2017 hingga tahun 2021 tingkat kemiskinan Kota Pekalongan selalu berada di bawah rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah. Tingkat kemiskinan Kota Pekalongan juga cenderung menurun. Selama tahun 2017 hingga tahun 2019 angka ini terus mengalami penurunan. Namun pada tahun 2020 tingkat kemiskinan Kota Pekalongan mengalami kenaikan menjadi 7,17 persen dan 7,59% pada tahun 2021.

Pada tahun 2017 tingkat kemiskinan rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,01 persen, sedangkan tingkat kemiskinan Kota Pekalongan 7,47 persen. Selanjutnya pada tahun 2018 tingkat kemiskinan rata-rata Provinsi Jawa Tengah turun menjadi 11,32

persen, sedangkan tingkat kemiskinan Kota Pekalongan mengalami penurunan sebesar 0,72 persen sehingga menjadi 6,75 persen.

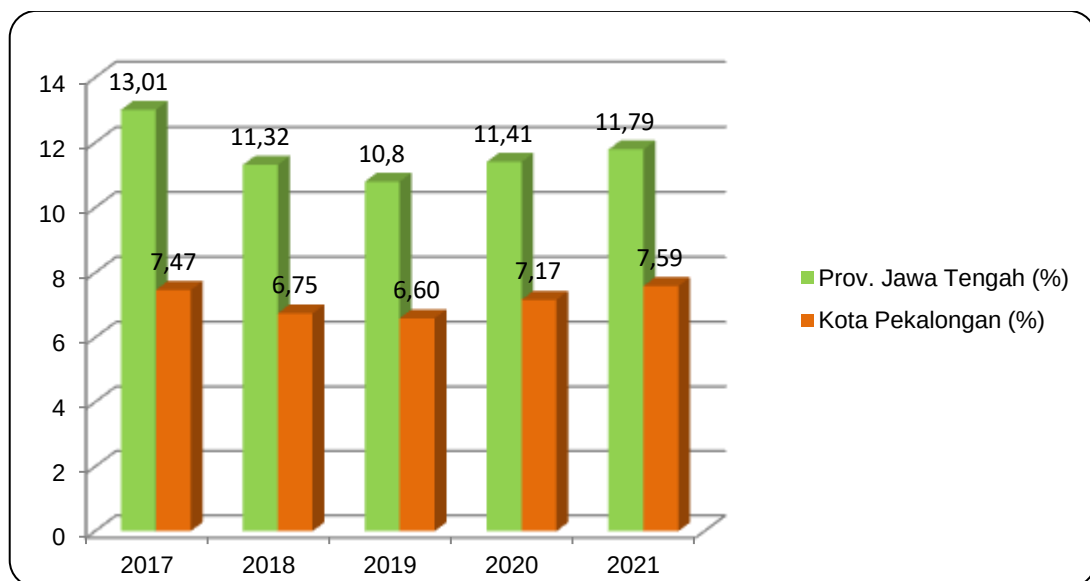
Tahun 2019 tingkat kemiskinan rata-rata Provinsi sebesar 10,80 persen, sedangkan Kota Pekalongan mencapai 6,60 persen. Kemudian pada tahun 2020 tingkat kemiskinan rata-rata Provinsi sebesar 11,41 persen, sedangkan Kota Pekalongan menduduki angka 7,17 persen. Selanjutnya pada tahun 2021 tingkat kemiskinan rata-rata Provinsi Jawa Tengah meningkat menjadi 11,79 persen, begitu juga dengan tingkat kemiskinan Kota Pekalongan meningkat sebesar 0,42 persen sehingga menjadi 7,59 persen.



Gambar 2.18 Perbandingan Rasio Penduduk Miskin Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021

Sumber : <https://pekalongankota.bps.go.id/>, <https://jateng.bps.go.id/>, dan <https://www.bps.go.id/> (diolah), 2021

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan Kota Pekalongan selalu berada di bawah tingkat kemiskinan rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Dari tahun 2017 sampai tahun 2019 terjadi penurunan tingkat kemiskinan meski belum signifikan. Namun dengan ada pandemi *COVID-19* di tahun 2020, tingkat kemiskinan kembali meningkat di angka 7,17 persen dan 7,59 persen di tahun 2021.



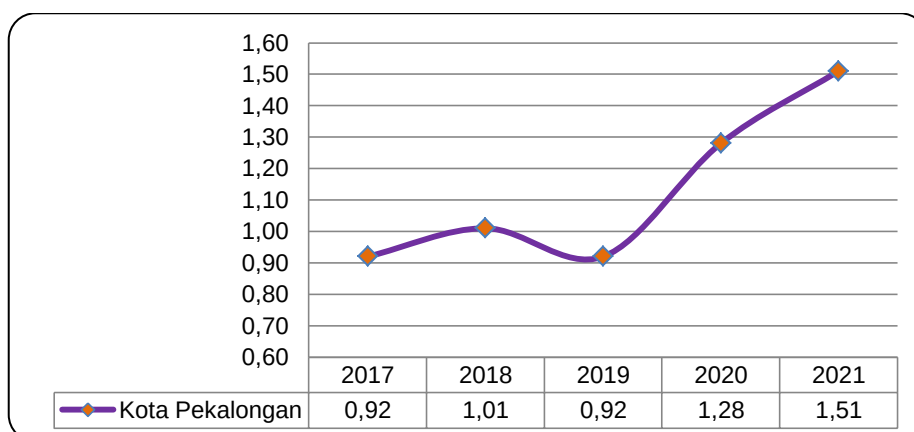
Gambar 2.19 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Sumber : <https://pekalongankota.bps.go.id/> dan <https://jateng.bps.go.id/> (diolah), 2021

2.2.6.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index – P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks ini merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan selama kurun waktu 2017-2021 relatif stagnan bahkan ada kecenderungan meningkat, dimana pada tahun 2017 sebesar 0,92. Selanjutnya naik pada tahun 2018 menjadi sebesar 1,01. Namun pada tahun 2019 indeks ini mengalami penurunan sebesar 0,09 yaitu menjadi 0,92. Dan pada tahun 2020 mencapai 1,28 serta mengalami kenaikan kembali menjadi 1,51 di tahun 2021. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 disajikan dalam Gambar 2.20 berikut.

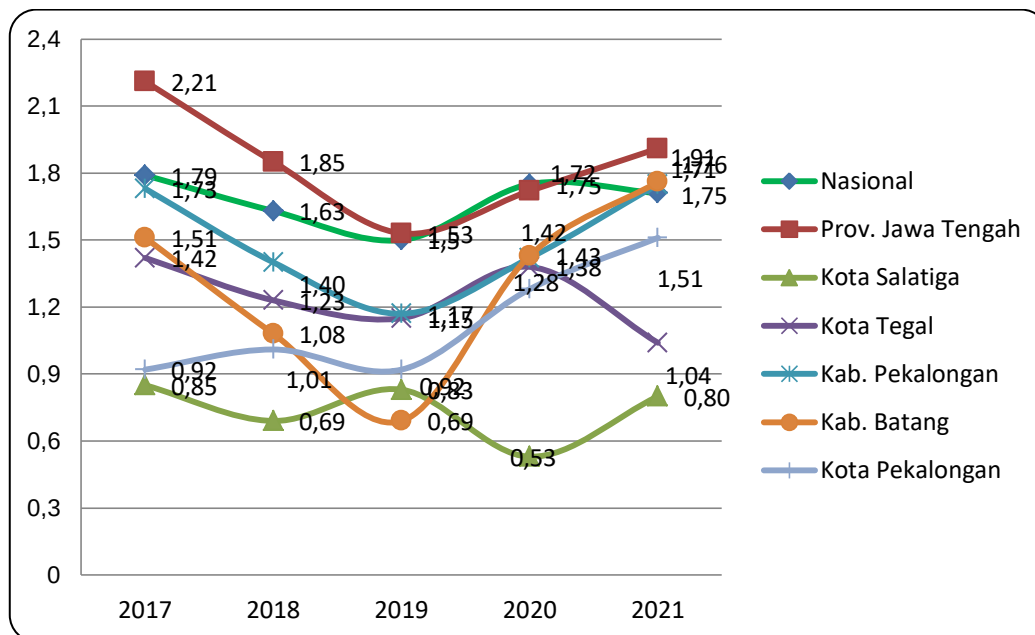


Gambar 2.20 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Sumber : <https://pekalongankota.bps.go.id/> dan <https://jateng.bps.go.id/> (diolah), 2021

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Tegal Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan cenderung lebih rendah. Sedangkan jika dibandingkan dengan Kota Salatiga, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan lebih tinggi.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan masih berada di bawah Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi dan Nasional. Namun perlu upaya lebih keras bagi Pemerintah Kota Pekalongan untuk menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan mengingat angka indeks yang cenderung mengalami kenaikan pada tahun-tahun sebelumnya. Selengkapnya disajikan dalam Gambar 2.21 berikut.



Gambar 2.21 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021

Sumber : <https://pekalongankota.bps.go.id/>, <https://jateng.bps.go.id/>, dan <https://www.bps.go.id/> (diolah), 2021

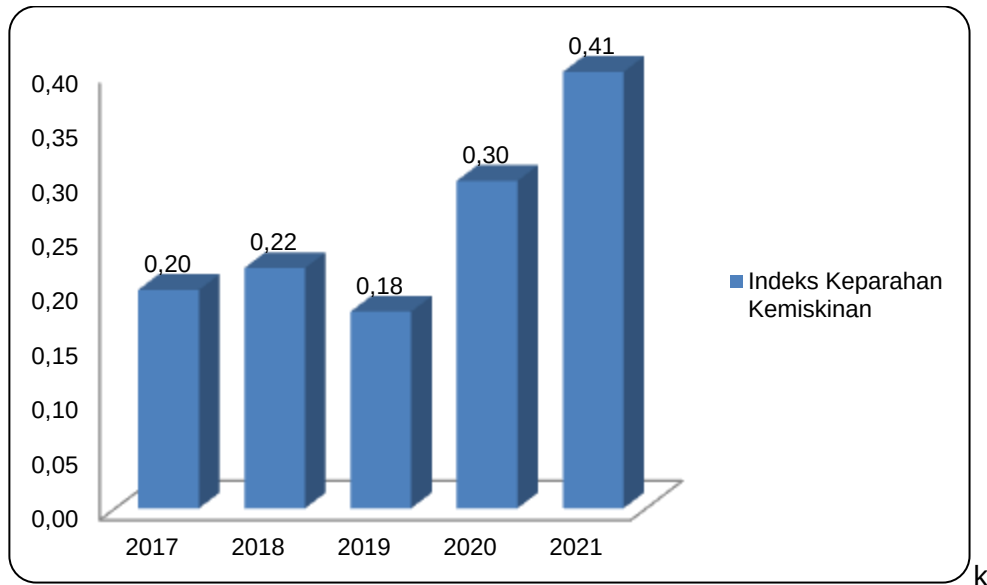
2.2.6.4. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*–P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Indeks keparahan kemiskinan Kota Pekalongan pada tahun 2017 sebesar 0,20. Tahun selanjutnya, yaitu tahun 2018 indeks ini mengalami kenaikan menjadi 0,22, yang berarti kondisi memburuk. Kemudian indeks ini menurun pada 2019 menjadi 0,18 dan di tahun 2020 meningkat 0,30 yang artinya ketimpangan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin pada tahun 2020 semakin bertambah dibanding tahun 2019. Pada tahun 2021 indeks keparahan kemiskinan Kota Pekalongan kembali meningkat menjadi 0,41.

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan yang cenderung fluktuatif dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan justru cenderung naik. Sedangkan jika dibandingkan dengan Kota Tegal dan Kota Salatiga pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan lebih rendah. Namun pada tahun 2020

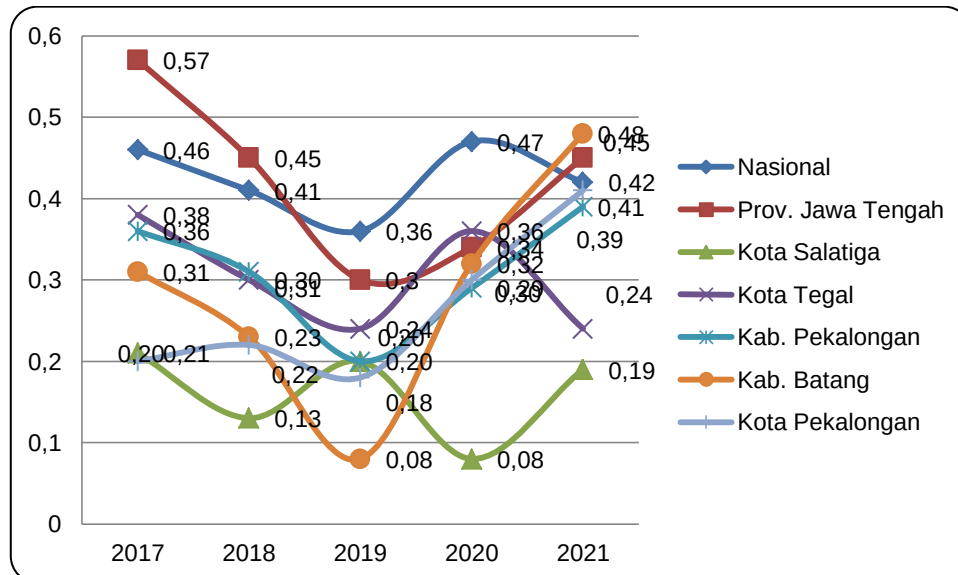
Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan lebih rendah dibandingkan Kota Tegal dan lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Salatiga.



Gambar 2.22 Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Sumber : <https://pekalongankota.bps.go.id/> dan <https://jateng.bps.go.id/> (diolah), 2021

Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan masih berada di bawah Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi dan Nasional. Namun perlu upaya lebih keras bagi Pemerintah Kota Pekalongan untuk menurunkan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan mengingat angka indeks yang cenderung mengalami kenaikan pada tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 2.23 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021

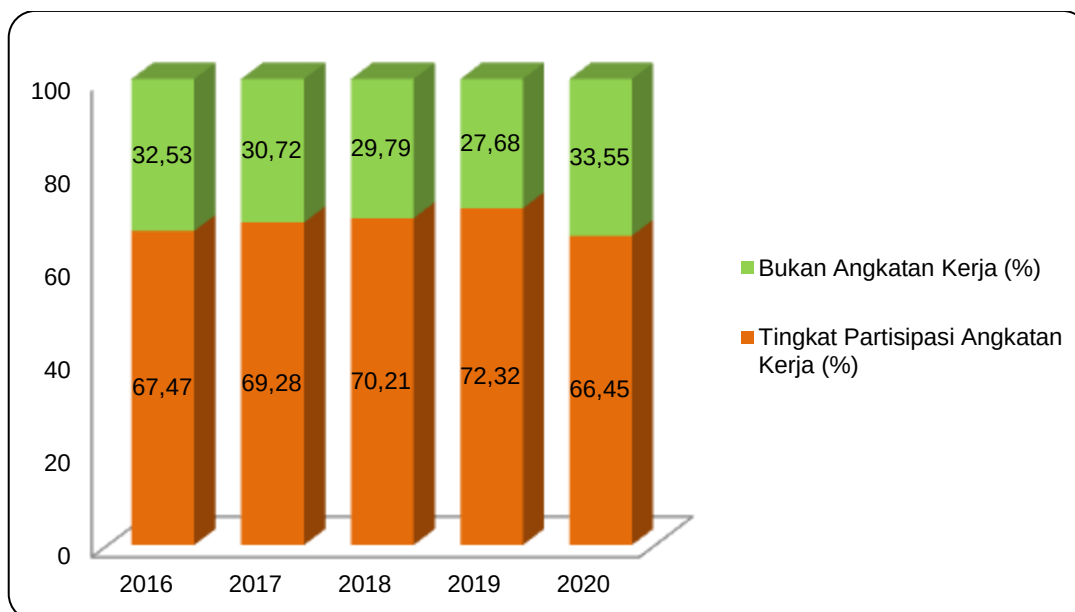
Sumber : <https://pekalongankota.bps.go.id/>, <https://jateng.bps.go.id/>, dan <https://www.bps.go.id/> (diolah), 2021

Pasca pandemi COVID-19, kondisi perekonomian belum pulih sepenuhnya. Hal ini dikarenakan penduduk terdampak pandemi, di antaranya penduduk yang telah menjadi pengangguran akibat PHK pada beberapa perusahaan, para pengusaha yang mengalami penurunan penghasilan akibat daya beli masyarakat yang menurun sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Kondisi ini mengakibatkan besarnya kemungkinan peningkatan jumlah penduduk miskin (absolut) maupun persentase penduduk miskin di Kota Pekalongan.

Peningkatan penduduk miskin baik secara absolut maupun persentase ini dikarenakan bertambahnya penduduk yang penghasilannya rendah atau di bawah garis kemiskinan serta mereka yang sebelum pandemi bekerja di luar kota kemudian kembali ke Kota Pekalongan karena kehilangan pekerjaan dan pasca pandemi masih berada di Kota Pekalongan.

2.2.7. Angka Rasio Penduduk yang Bekerja

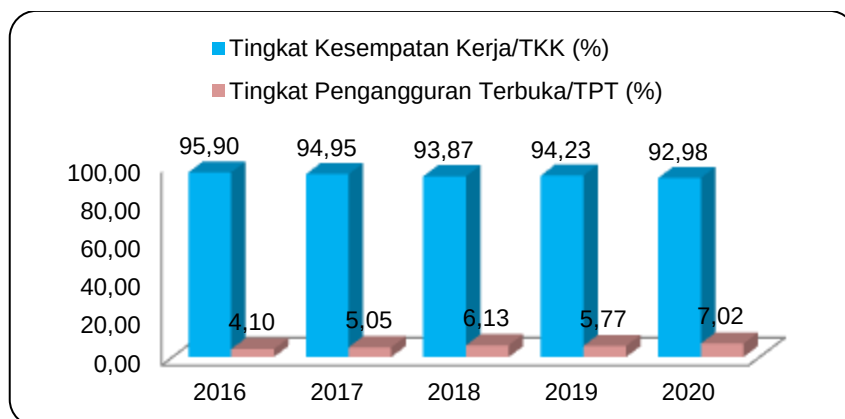
Penduduk Usia Kerja (PUK) atau penduduk yang berusia 15 tahun ke atas di Kota Pekalongan Tahun 2020 tercatat sekitar 236.675 orang. Dari jumlah tersebut, persentase angkatan kerja menurun dari 72,32 persen menjadi 66,45 persen atau turun 5,87 poin pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa rasio jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja (15 Tahun ke atas) menurun. Sisanya, yaitu 33,55 persen adalah Bukan Angkatan Kerja, yaitu rasio penduduk berusia kerja yang bukan termasuk angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja. Penurunan TPAK pada tahun 2020 seiring dengan penurunan jumlah penduduk usia kerja.



Gambar 2.24 Rasio TPAK dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

Sementara itu Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kota Pekalongan cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada persentase penduduk yang termasuk angkatan kerja yang bekerja yang mencapai 92,98 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,02 persen atau meningkat 1,25 poin, artinya adalah pada setiap 100 orang yang termasuk angkatan kerja, maka ada 7 orang yang benar-benar menganggur.



Gambar 2.25 Rasio TTK dan TPT di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2021

*Keterangan : tahun 2016 sama dengan 2015 karena tidak ada Sakernas Tahunan

Nilai TPT mengalami peningkatan yang disebabkan meningkatnya jumlah kelulusan anak sekolah yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Beberapa musibah seperti kebakaran Pasar Banjarsari dan bencana banjir rob yang menggenangi wilayah industri di Kota Pekalongan juga mengurangi penyerapan tenaga kerja di sektor industri.

Upaya yang telah dilakukan antara lain menarik investor yang padat karya dengan cara memberi kemudahan dalam proses perizinan, peningkatan kapasitas ketrampilan tenaga kerja di Balai Latihan Kerja, dan penyebarluasan informasi pasar kerja, serta pembinaan masyarakat penganggur melalui pengembangan kewirausahaan.

2.2.8. Angka Kriminalitas yang Ditangani

Kriminalitas di Kota Pekalongan dari tahun 2016 sampai 2020 cenderung meningkat. Angka kriminalitas dihitung per 10.000 penduduk, dimana pada tahun 2016 berada di angka 3,34 dan menurun di angka 1,03 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 meningkat di angka 3,78 dan kembali melonjak di tahun 2019 dan tahun 2020 menjadi 4,59 dan 4,69. Sepanjang lima tahun terakhir, rata-rata kasus tertinggi ada pencurian.

Tabel 2.13 Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Angka Kriminalitas
2016	3,34
2017	1,03
2018	3,78
2019	4,59
2020	4,69

Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan, 2021

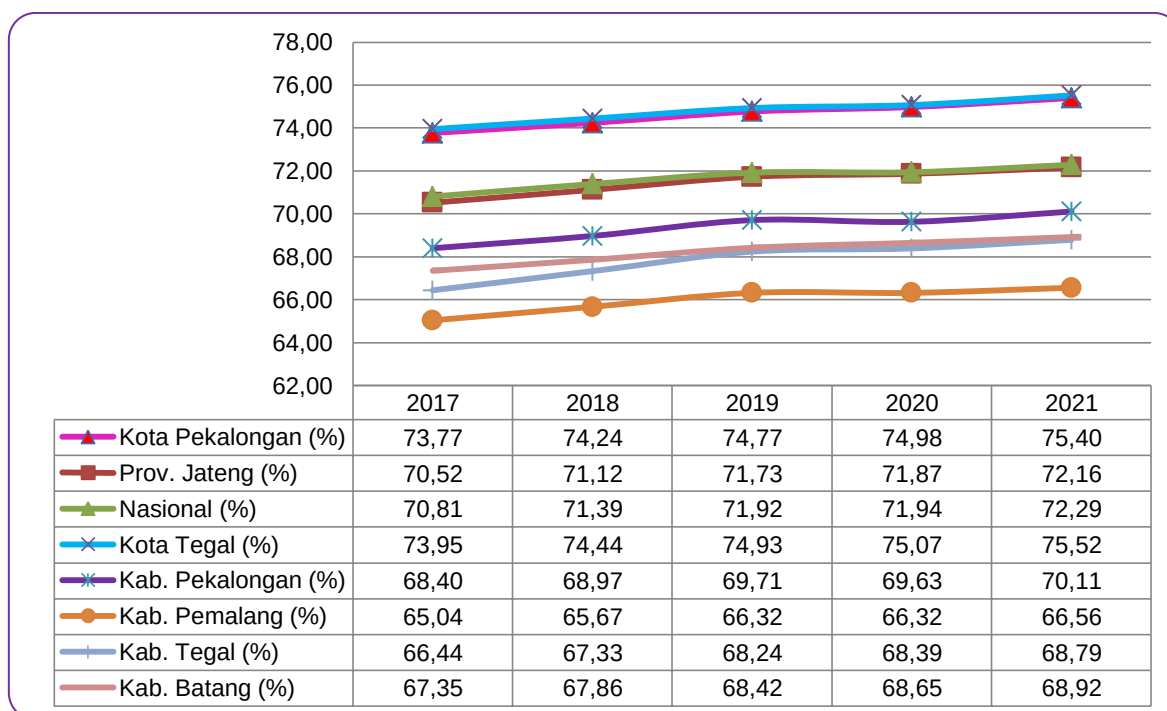
2.2.9. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur empat dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Harapan Hidup saat

lahir, capaian tingkat pendidikan yang terdiri dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak.

Perkembangan IPM Kota Pekalongan terus meningkat dari tahun 2017 yang hanya sebesar 73,77 menjadi 75,40 di tahun 2021. Dibandingkan dengan IPM rata-rata Provinsi Jawa Tengah, IPM Kota Pekalongan diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Apabila dilihat dari IPM se-eks Karisidenan Pekalongan, dari tahun 2017 sampai 2021, Kota Pekalongan menempati urutan kedua di bawah Kota Tegal.

Hampir sama dengan PDRB, Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2016 juga mengalami perubahan. Komponen yang ada sekarang berubah menjadi : Angka Harapan Hidup (tetap), Harapan Lama Sekolah (baru), Rata-rata Lama Sekolah (tetap), dan Pengeluaran per Kapita per bulan (baru). Baik secara nilai ataupun secara peringkat, penghitungan ini telah menggeser posisi pemeringkatan IPM secara nasional, termasuk di Jawa Tengah, terutama untuk peringkat Kota Pekalongan. Namun demikian, terdapat pendekatan baru yang harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah dan Masyarakat Kota Pekalongan, yaitu dengan dimasukkannya komponen Harapan Lama Sekolah. Kota Pekalongan memiliki riwayat pemahaman tentang kemanfaatan pendidikan yang relatif belum terlalu lama. Bagi sebagian masyarakat di Kota Pekalongan, kesempatan dan waktu yang ada lebih diprioritaskan untuk kegiatan membatik ataupun berdagang. Angka harapan lama sekolah meskipun memiliki kecenderungan mengalami peningkatan, namun masih belum sesuai harapan yang tentunya berimplikasi terhadap IPM Kota Pekalongan.



Gambar 2.26 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2017-2021

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2021

Pekerjaan rumah yang lain adalah masih rendahnya rata-rata lama sekolah. Secara rata-rata, penduduk Kota Pekalongan masih baru sampai di kelas 9 semester 1. Jadi

belum sampai lulus kelas 9 SMP. Oleh karena itu, selain menjadikan hal ini sebagai beban dan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, juga menjadi masukan dalam menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Sehingga arah komunikasi pembangunan lebih dapat tersampaikan dengan baik. Secara lengkap, Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 disajikan dalam Tabel 2.14 berikut.

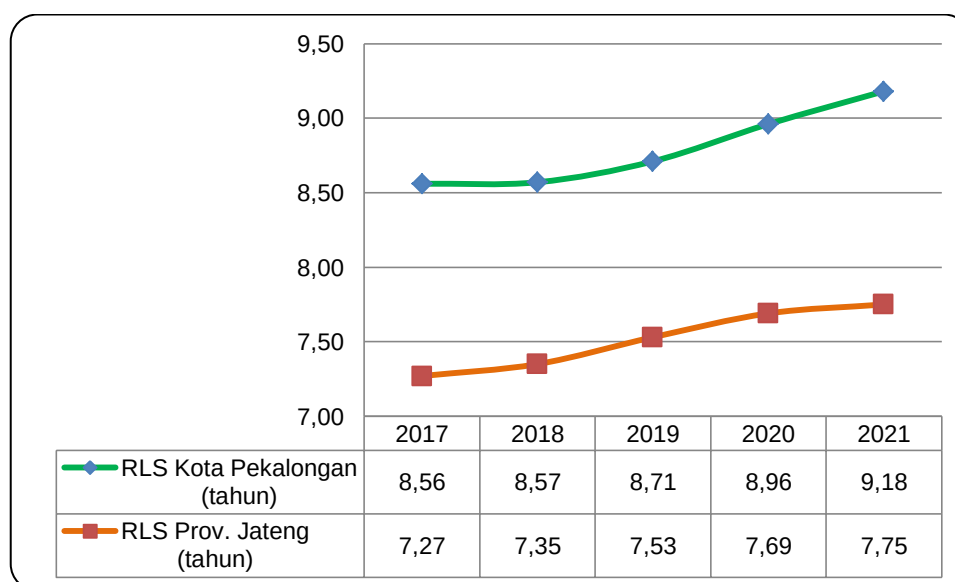
Tabel 2.14 Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Usia Harapan Hidup (tahun)	Pengeluaran per Kapita per tahun (Rp 000)	IPM
2017	8,56	12,78	74,19	11.800,00	73,77
2018	8,57	12,79	74,25	12.312,00	74,24
2019	8,71	12,83	74,28	12.680,00	74,77
2020	8,96	12,84	74,38	12.467,00	74,98
2021	9,18	12,85	74,44	12.598,00	75,40

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2021

2.2.10. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami peningkatan secara moderat. Apabila pada tahun 2017 rata-rata lama sekolah hanya 8,56 tahun, pada tahun berikutnya, 2018 menjadi 8,57 tahun. Pada tahun 2019, rata-rata lama sekolah menjadi 8,71 tahun, di tahun 2020 sebesar 8,96 tahun dan tahun 2021 menjadi 9,18 tahun. Angka tersebut lebih tinggi dari angka rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2021 berada pada angka 7,75.



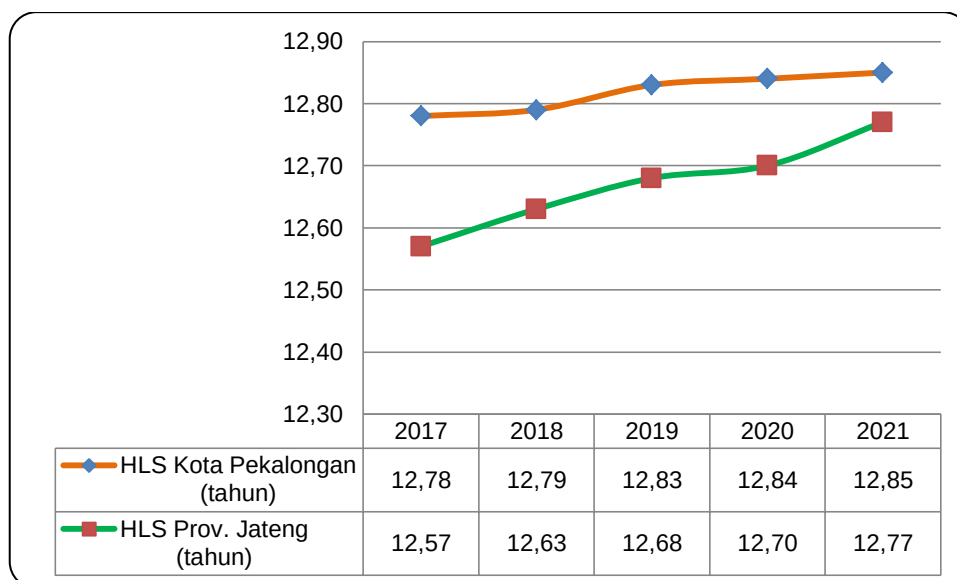
Gambar 2.27 Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2021

2.2.11. Harapan Lama Sekolah

Salah satu variabel dari komponen IPM adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.



Gambar 2.28 Harapan Lama Sekolah di Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2021

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Pekalongan selama lima tahun terakhir berada di atas Provinsi Jawa Tengah dan cenderung meningkat di tiap tahunnya.

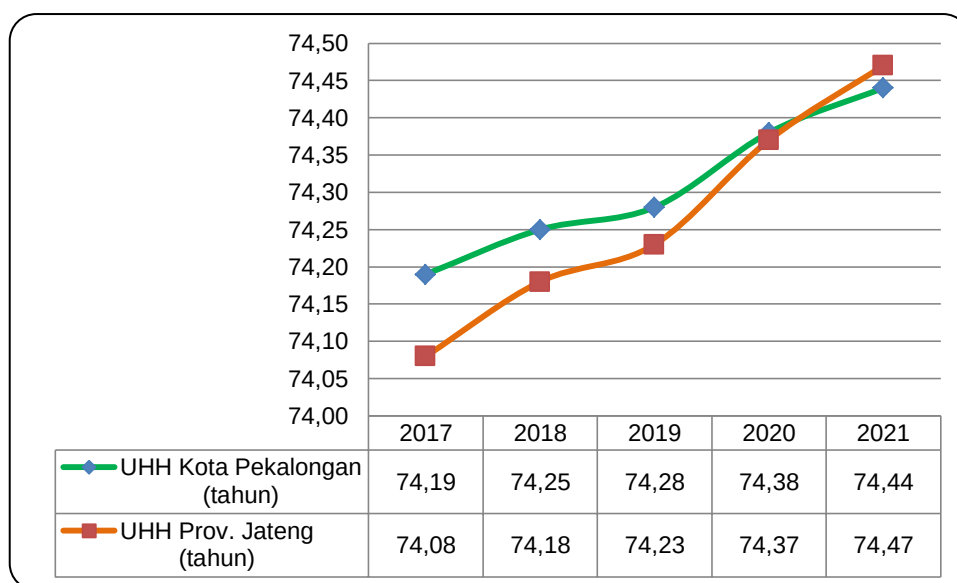
Pada tahun 2021 angka Harapan Lama Sekolah Kota Pekalongan sebesar 12,85 tahun, artinya bahwa penduduk Kota Pekalongan yang berumur 7 tahun ke atas diharapkan masih bersekolah selama minimal 12 tahun ke depan atau minimal di umur 19 tahun masih sekolah.

2.2.12. Usia Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam kurun waktu 2017 - 2021, Umur Harapan Hidup di Kota Pekalongan semakin meningkat dari 74,19 pada tahun 2017 menjadi 74,44 di tahun 2021, artinya secara rata-rata anak yang dilahirkan di Kota Pekalongan dapat bertahan hidup hingga mencapai usia 74 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat di Kota Pekalongan secara umum sudah semakin membaik.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi UHH dan bersifat kompleks yaitu aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek sosial dan aspek lingkungan. Faktor dominan yang mempengaruhi UHH adalah aspek kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diperhatikan serta menjadi investasi di masa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, maka diperlukan berbagai upaya paradigma sehat melalui kegiatan promotif dan preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan termasuk pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan lintas sektor. Perwujudan peningkatan UHH sangat dipengaruhi oleh faktor kesehatan ibu, bayi dan balita; perbaikan gizi; perubahan perilaku; pencegahan penyakit menular dan tidak menular; kesehatan lingkungan serta faktor pelayanan kesehatan dengan pendekatan *continuum of care* atau asuhan pelayanan kesehatan berkesinambungan yang komprehensif disepanjang siklus kehidupan mulai dari sejak masa kehamilan, bayi, anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia (lansia) yang melibatkan peran keluarga, komunitas, fasilitas kesehatan primer (Puskesmas) dan fasilitas kesehatan rujukan (Rumah Sakit).



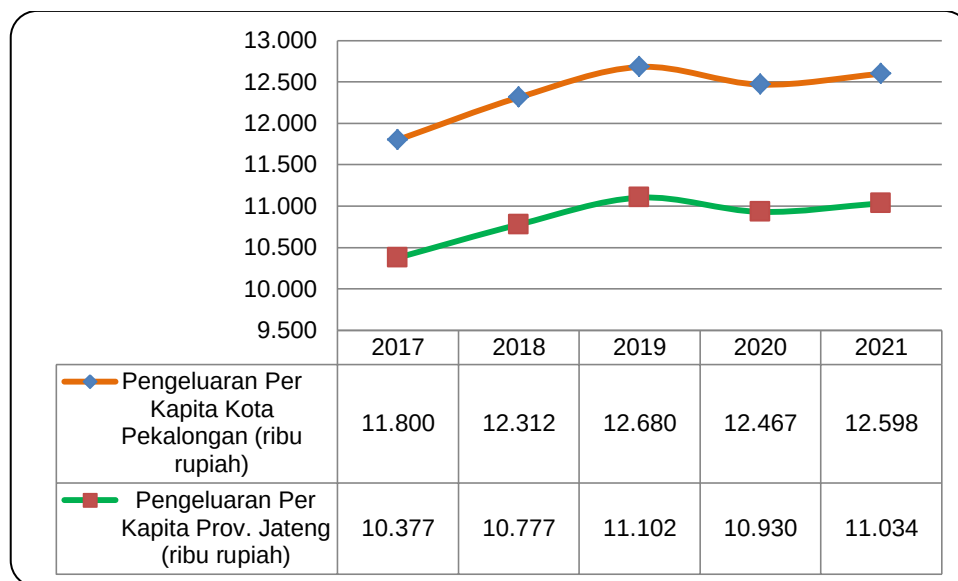
Gambar 2.29 Perbandingan Umur Harapan Hidup di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2021

Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Pekalongan pada tahun lebih rendah dibandingkan angka Jawa Tengah.

2.2.13. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduknya pada suatu wilayah. Kesejahteraan penduduk Kota Pekalongan terus meningkat sepanjang 2017-2021. Pada tahun 2017 pengeluaran per kapita Kota Pekalongan sebesar Rp.11.800.000, kemudian meningkat menjadi Rp.12.312.000 pada tahun 2018. Di tahun 2019 berada di angka Rp.12.680.000, dan di tahun 2020 turun menjadi Rp.12.467.000. Namun pada tahun 2021 pengeluaran per kapita Kota Pekalongan meningkat kembali sebesar Rp.12.598.000.



Gambar 2.30 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jateng Tahun 2017-2021

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2021

2.2.14. Angka Partisipasi Kasar

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah antara lain : Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. APK Kota Pekalongan sepanjang 5 (lima) tahun terakhir mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi, baik di jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK.

Tabel 2.15 Angka Partisipasi Kasar Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

Tahun	SD/MI/Sederajat (persen)		SMP/MTs/Sederajat (persen)		SMA/MA/SMK/Sederajat (persen)	
	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah
2016	116,78	109,46	79,95	89,96	119,17	86,27
2017	114,47	108,44	82,97	91,09	92,04	84,35
2018	110,86	108,18	74,54	91,96	74,41	84,15
2019	112,45	107,74	75,91	91,70	74,92	86,76
2020	110,98	106,32	79,36	93,21	78,66	86,83

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2021

Pada tahun 2016, APK jenjang SD/MI/ sederajat sebesar 116,78 persen, tahun 2017 sebesar 114,47 persen, pada tahun 2018 menurun sebesar 110,86 persen, kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 112,45 persen. Pada akhir periode (tahun 2020) APK jenjang SD/MI/ sederajat kembali mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019, yaitu 110,98 persen. APK di jenjang SMP/MTs juga mengalami fluktuasi seperti APK jenjang SD/MI. APK jenjang SMP/MTs mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 79,95 persen menjadi 82,97 persen di tahun 2017. Namun pada tahun 2018 turun menjadi 74,54 persen, meningkat kembali di tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu sebesar 75,91 persen dan 79,36 persen. Sementara itu APK jenjang SMA/MA/SMK mengalami penurunan dari awal periode (tahun 2016) hingga tahun 2019 dan di akhir periode (tahun 2020) meningkat menjadi 78,66 persen.

Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, APK jenjang SD/MI berada di atas 100 persen selama periode tahun 2016-2020, namun cenderung mengalami penurunan, hingga pada tahun 2020, yaitu sebesar 106,32 persen. APK jenjang SMP/MTs berada di atas 89 persen, dan APK jenjang SMA/MA/SMK berada di kisaran 84-86 persen. Secara umum, APK Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan APK Provinsi Jawa tengah.

Angka partisipasi kasar kota menurut jenis sekolah berbasis gender di Kota Pekalongan bervariasi. Pada jenjang SD/MI, angka partisipasi kasar berbasis gender lebih didominasi laki-laki dengan nilai 102,02. Sedangkan angka partisipasi kasar SMP/ setara lebih didominasi kaum perempuan dengan nilai 110,31. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.16 berikut.

Tabel 2.16 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenis Sekolah Berbasis Gender di Kota Pekalongan Tahun 2020

Rasio	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
Angka Partisipasi Kasar	SD/Setara (persen)	102,02	100,56
	SMP/Setara (persen)	100,98	110,31
	SMA/Setara (persen)	N/A	N/A

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

2.2.15. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Sejalan dengan capaian angka rata-rata lama sekolah, angka pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas SDM pada suatu wilayah. Dalam kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 2017-2019, persentase pada jenjang pendidikan SD/ sederajat berada di posisi tinggi dibandingkan tingkat pendidikan lainnya. Pada tahun 2017 dan 2018, persentase pendidikan yang ditamatkan jenjang SMA/ sederajat lebih tinggi daripada SMP/ sederajat. Namun di tahun 2019 posisi tersebut berubah dimana pada jenjang SMP/ sederajat lebih tinggi daripada jenjang SMA/ sederajat. Sementara untuk jenjang Diploma IV/ S1/ S2 persentasenya lebih tinggi dari jenjang Diploma I/ II/ III/ Sarjana Muda dalam kurun waktu 2017-2019. Untuk kategori Tidak/ Belum Tamat SD/ sederajat berada di kisaran angka 15-19 persen, dan untuk kategori Tidak/ Belum Pernah Sekolah berada di kisaran angka ± 1 persen. Untuk tahun 2020 BPS tidak menghitung angka pendidikan yang ditamatkan sehingga tidak tersedia data.

Tabel 2.17 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2017-2019

Tahun	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak/ Belum Tamat SD sederajat	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Diploma I/ II/ III/ Sarjana Muda	Diploma IV/ S1/ S2
2017	1,87	15,86	28,04	21,42	26,73	1,35	4,74

Tahun	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Tidak/Belum Tamat SD sederajat	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Diploma I/II/III/Sarjana Muda	Diploma IV/S1/ S2
2018	1,53	18,41	27,96	20,61	25,32	1,79	4,37
2019	0,87	15,78	27,51	25,82	22,66	1,81	5,55
2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : pekalongankota.bps.go.id, 2021

2.2.16. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Capaian APM Kota Pekalongan dari tahun 2016-2020 jenjang SD/MI berada di kisaran 98 persen sampai dengan 100 persen. Capaian APM pada jenjang SMP/MTs pada tahun 2020 meningkat jika dibandingkan tahun 2019. Demikian juga APM pada jenjang SM/MA/SMK pada akhir periode (2020) mengalami peningkatan. Secara rinci perkembangan APM di Kota Pekalongan dari tahun 2016-2020 baik SD/MI, SMP/MTs dan SM/MA disajikan dalam Tabel 2.18 berikut.

Tabel 2.18 Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

Tahun	SD/MI/Sederajat (persen)		SMP/MTs/Sederajat (persen)		SMA/MA/SMK/Sederajat (persen)	
	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah
2016	100,00	96,64	74,49	78,89	52,91	58,49
2017	98,23	97,13	74,08	79,13	55,32	59,20
2018	100,00	97,75	74,54	79,31	74,41	59,31
2019	99,52	97,77	71,85	79,84	54,81	59,35
2020	99,48	98,00	74,55	81,00	55,58	59,74

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2021

Perkembangan Angka Partisipasi Murni berdasarkan gender di Kota Pekalongan pada tahun 2020, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu signifikan. Pada tingkat SD/setara, APM laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Sedangkan pada jenjang SMP/setara, APM perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.19 berikut.

Tabel 2.19 Angka Partisipasi Murni di Kota Pekalongan Berbasis Gender Tahun 2020

Rasio	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
Angka Partisipasi Murni	SD/Setara	83,73	82,07
	SMP/Setara	59,28	62,97
	SMA/Setara	N/A	N/A

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

2.2.17. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi merupakan kejadian kematian yang terjadi pada periode sejak bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Kematian bayi dipengaruhi oleh jumlah kematian neonatal, yang merupakan masalah yang kontribusinya sangat tinggi terhadap

kematian bayi. Penyebab kematian neonatal antara lain adanya infeksi (pneumonia, tetanus, diare), prematur/BBLR, dan kelainan *congenital*. Status kesehatan bayi tersebut sangat terkait dengan beberapa faktor ibu selama hamil dan ibu melahirkan, seperti rendahnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, rendahnya pemeriksaan selama masa kehamilan, dan juga status gizi ibu hamil yang masih rendah.

Angka Kematian Bayi dihitung berdasarkan jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi. Angka Kematian Bayi tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 12,36 per 1.000 kelahiran hidup dan terendah pada tahun 2020 sebesar 8,81 per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi berbanding terbalik dengan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB). Jika tren Angka Kematian Bayi di suatu wilayah cenderung meningkat maka tren Angka Kelangsungan Hidup Bayi akan semakin menurun. Angka Kelangsungan Hidup Bayi dari tahun 2016 sampai 2020 per 1.000 kelahiran mengalami fluktuasi seiring dengan naik turunnya Angka Kematian Bayi. Angka Kelangsungan Hidup Bayi terendah terjadi pada tahun 2016 dengan angka 987,64 bayi per 1.000 kelahiran hidup dan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan angka 990,92 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Namun mulai tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 989,01 bayi per 1.000 kelahiran hidup dan turun kembali menjadi 988,01 bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2019, kemudian meningkat di tahun 2020 menjadi 991,19 bayi per 1.000 kelahiran hidup.

Adapun penyebab Angka Kematian Bayi di Kota Pekalongan diantaranya disebabkan oleh kasus BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), *asfiksia*, kelainan *kongenital*, kelainan saluran pencernaan, *pnemonia*, diare dan adanya penyakit penyerta lainnya.

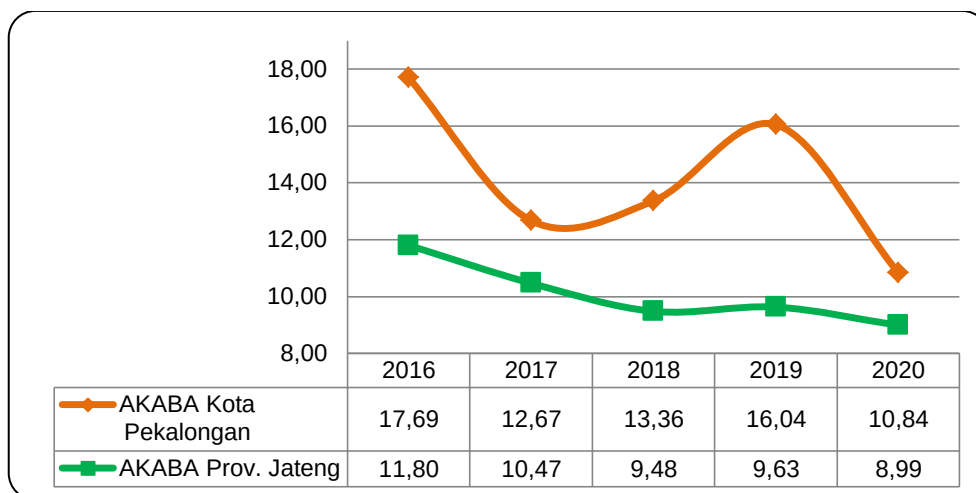
**Tabel 2.20 Angka Kematian Bayi (AKB) dan
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020**

Tahun	AKB per 1000 kelahiran	AKHB per 1000 kelahiran
2016	12,36	987,64
2017	9,08	990,92
2018	10,99	989,01
2019	11,99	988,01
2020	8,81	991,19

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

2.2.18. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup (KH). AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan kesehatan pada balita dan kondisi sosial, ekonomi dan sanitasi lingkungan tempat balita tinggal.



Gambar 2.31 Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Pekalongan dan Jawa Tengah Tahun 2016-2020

Sumber : Evaluasi RKPD Kota Pekalongan TW. IV Tahun 2020 dan Buku Saku Kinerja Program Kesehatan 2020 Dinkes Jawa Tengah, 2021

Capaian AKABA dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 cenderung berfluktuasi. AKABA tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 17,69 per 1.000 KH kemudian menurun menjadi 12,67 per 1.000 KH pada Tahun 2017. Namun mulai tahun 2018 sampai 2019 meningkat kembali dari 13,36 per 1.000 KH pada tahun 2018 menjadi 16,04 per 1.000 KH pada tahun 2019. Namun kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 10,84 per 1.000 KH. Tingginya Angka Kematian Balita (AKABA) di Kota Pekalongan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya disebabkan oleh adanya penyakit penyerta pada Balita seperti ISPA, Diare, DBD, Campak ataupun kombinasi dari penyakit menular lainnya serta kurangnya pemahaman orang tua tentang deteksi dini balita sakit. Sementara itu AKABA di tingkat Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2016 – 2020 mengalami tren yang cenderung menurun. Pada tahun 2016, AKABA sebesar 11,80 per 1.000 KH, kemudian turun di tahun 2017 menjadi 10,47 per 1.000 KH, tahun 2018 menurun menjadi 9,48 per 1.000 KH, naik menjadi 9,63 per 1.000 KH pada tahun 2019 dan kembali menurun menjadi 8,99 per 1.000 KH di tahun 2020.

2.2.19. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dll di setiap 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Tingginya Angka Kematian Ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri yang rendah pula.

Tabel 2.21 Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Jumlah Kelahiran Hidup	AKI per 100.000 kelahiran hidup
2016	8	5824	137,36
2017	10	5839	171,26
2018	7	5911	118,42
2019	6	5923	101,30
2020	9	5905	152,41

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

Kondisi Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Pekalongan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 semakin meningkat. Pada tahun 2016 AKI sebesar 137,36 dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 8 kasus meningkat menjadi 171,26 pada tahun 2017 dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 10 kasus. Namun mulai tahun 2018 Pemerintah Kota Pekalongan berhasil menurunkan jumlah kasus kematian ibu menjadi 118,42 per 100.000 KH pada tahun 2018 dan kemudian menurun lagi menjadi 101,30 per 100.000 KH pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 AKI kembali meningkat menjadi 152,41 dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 9 kasus. Adapun penyebab langsung kematian Ibu di Kota Pekalongan diantaranya disebabkan karena kasus pre eklamsia berat, perdarahan dan emboli air ketuban.

2.2.20. Angka Kesakitan

Angka kesakitan (Morbiditas) merupakan angka yang menunjukkan tingkat kesakitan akibat gangguan struktur maupun fungsi tubuh seseorang yang merupakan derajat sakit, cedera maupun gangguan pada populasi yang merupakan penyimpangan dari status sehat atau kesejahteraan suatu masyarakat. Angka Morbiditas merupakan indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat umum yang dilihat dari persentase penduduk dengan keluhan kesehatan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan.

Angka kesakitan di Kota Pekalongan dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017, angka kesakitan berada di angka 13,33 persen. Angka tersebut terus meningkat sampai dengan tahun 2019 dan mencapai angka tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu 16,68 persen. Di tahun 2020 dan tahun 2021 menurun menjadi 12,89 persen dan 8,38 persen. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.22 berikut.

Tabel 2.22 Angka Kesakitan di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021

Tahun	Angka Kesakitan (persen)
2017	13,33
2018	13,07
2019	16,68
2020	12,89
2021	8,38

Sumber : jateng.bps.go.id dan pekalongankota.bps.go.id, 2022

2.2.21. Prevalensi Balita Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak Balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang badan atau tinggi badan dibandingkan umur berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Menurut WHO stunting atau pertumbuhan yang terhambat mencerminkan proses kegagalan untuk mencapai potensi pertumbuhan linier sebagai akibat dari kondisi kesehatan atau gizi yang kurang optimal. Berdasarkan populasi, tingkat stunting yang tinggi dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi yang buruk dan peningkatan risiko sering dan awal terpapar dengan kondisi buruk seperti penyakit atau praktik pemberian makan yang tidak tepat.

Gambaran prevalensi angka stunting Kota Pekalongan dari tahun 2016 – 2020 disajikan dalam Tabel 2.23 berikut.

Tabel 2.23 Prevalensi Balita Stunting Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

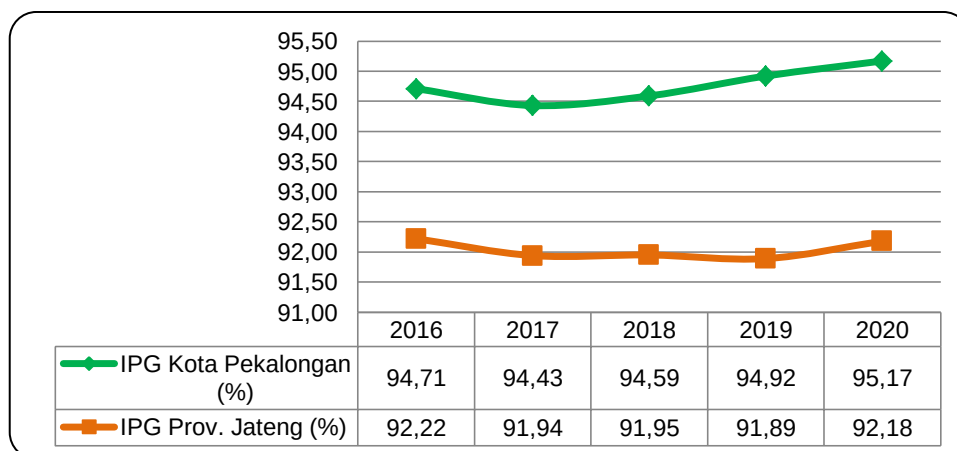
Tahun	Prevalensi Stunting
2016	8,90%
2017	8,06%
2018	6,99%
2019	6,87%
2020	9,42%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

Dari Tabel 2.23 dapat dilihat bahwa prevalensi Balita Stunting di Kota Pekalongan pada tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami penurunan dari 8,9% di tahun 2016 menjadi 6,87% di tahun 2019 namun di tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 9,42%.

2.2.22. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG.



Gambar 2.32 Perbandingan IPG di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020

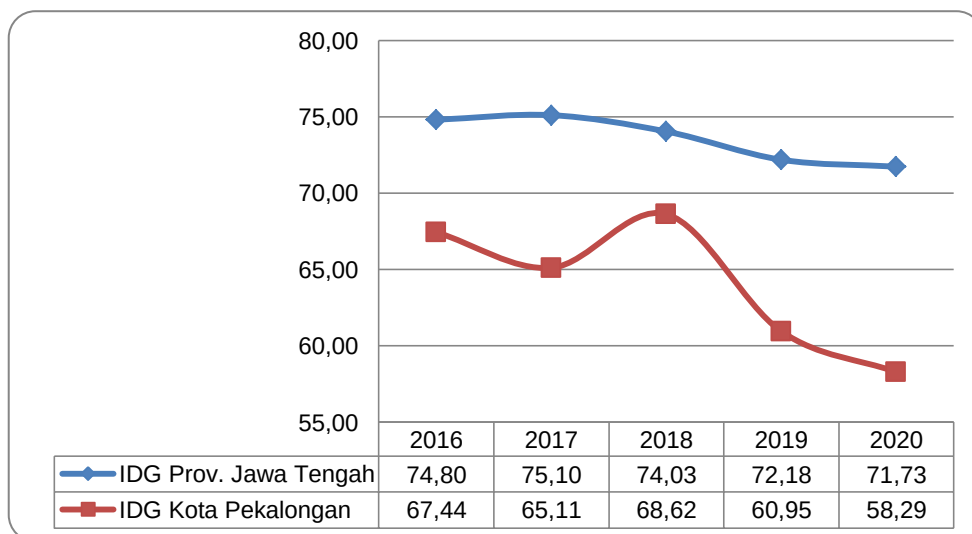
Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2021

Perkembangan IPG Kota Pekalongan sepanjang tahun 2016-2020 cenderung relatif stabil. Jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah, IPG Kota Pekalongan masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2020, IPG Kota Pekalongan sebesar 95,17 mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia perempuan di Kota Pekalongan semakin membaik khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan dan upaya peningkatan pendapatan. Sedangkan jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah, IPG Kota Pekalongan masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah.

2.2.23. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 2020, nilai IDG Kota Pekalongan berfluktuasi. Pada tahun 2016, nilai IDG Kota Pekalongan sebesar 67,44, kemudian menurun di tahun 2017 menjadi 65,11 dan meningkat kembali di tahun 2018 di angka 68,62. Pada tahun 2019 menurun cukup drastis di angka 60,95 dan kembali menurun di tahun 2020 di angka 58,29.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2016-2020, nilai IDG Kota Pekalongan masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.33. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran aktif penduduk perempuan di Kota Pekalongan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dalam kehidupan ekonomi dan politik menurun partisipasinya.



Gambar 2.33 Perkembangan IDG Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

Sumber : www.bps.go.id, 2021

2.2.24. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku dan karya cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Pembangunan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru di era globalisasi. Pengaruh budaya global dapat disesuaikan dengan identitas nasional yang mengandung nilai-nilai luhur yang sesuai dengan falsafah Pancasila.

Kota Pekalongan sebagai sebuah kota pesisir, dalam proses pembangunannya juga memandang bahwa faktor-faktor budaya dapat dijadikan sebagai modal dalam proses pembangunan. Kesenian merupakan salah satu wujud kebudayaan yang ada di Kota

Pekalongan. Kesenian yang berkembang di Kota Pekalongan banyak dipengaruhi oleh beberapa unsur budaya, seperti pengaruh budaya Jawa, Arab, Tionghoa dan juga pesisir. Beberapa kesenian yang berkembang di Kota Pekalongan antara lain : Simtuduror, Sheik Rebana, Kendang Pencak dan Nyadranan. Kegiatan tersebut masuk dalam agenda Pekan Batik Tahunan dan dilaksanakan dalam peringatan hari-hari besar di Kota Pekalongan.

Perkembangan jumlah kelompok kesenian di Kota Pekalongan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.24 menunjukkan kecenderungan peningkatan. Dibandingkan pada tahun 2016 maka jumlah kelompok kesenian pada tahun 2018, 2019 dan 2020 mencapai hampir dua kali lipatnya. Jumlah kelompok kesenian pada tahun 2019 dan 2020 mengalami sedikit penyusutan dibandingkan tahun 2018. Jumlah gedung kesenian di Kota Pekalongan sepanjang tahun 2016 sampai 2020 berjumlah tetap yakni empat buah gedung kesenian, sehingga persentase sarana budaya per jumlah kelompok menunjukkan kecenderungan penurunan karena belum adanya penambahan sarana budaya selama tahun 2016 s.d. 2020.

Tabel 2.24 Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian dan Gedung Kesenian Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kelompok Kesenian	82	109	164	162	162
Jumlah Gedung Kesenian	4	4	4	4	4
Persentase Sarana Budaya per Jumlah Kelompok (persen)	4,87	3,67	2,44	2,47	2,47

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

2.2.25. Pemuda dan Olahraga

Pemuda sebagai motor penggerak pembangunan mempunyai peran dan arti penting bagi proses pembangunan. Pembangunan dan pembinaan generasi muda dilakukan melalui organisasi kepemudaan yang ada di Kota Pekalongan. Pada tahun 2016 jumlah organisasi pemuda yaitu 8 organisasi. Jumlahnya relatif tetap, dimana pada tahun 2017 dan 2018 hanya 9 organisasi dan meningkat cukup signifikan pada tahun 2019 menjadi 26 organisasi pemuda. Sementara itu jumlah kegiatannya tidak berubah banyak, antara 8 sampai 10 kegiatan kepemudaan sepanjang lima tahun terakhir.

Adapun organisasi yang masih berperan aktif selama tahun 2016-2020 antara lain adalah PPI, Forum Kota Pekalongan, Gerakan Pemuda Nusantara, Forum Pemuda Mataram, GMPI, Pemuda Muhammadiyah, KAMMI, KNPI, dan Karang Taruna. Lebih lengkapnya perkembangan organisasi pemuda dan kegiatan kepemudaan Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.25 berikut.

Tabel 2.25 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Organisasi Pemuda	8	9	9	26	24
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	10	8	8	8	8

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

Selain organisasi kepemudaan, Dinparbudpora juga melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap klub-klub olahraga yang ada di Kota Pekalongan. Tidak banyak jumlah

klub olahraga di Kota Pekalongan, jumlahnya 20 klub. Dari tahun 2016, jumlah klub olahraga adalah 19 klub, berkurang menjadi 16 klub pada tahun 2017, dan bertambah lagi menjadi 20 klub pada tahun 2018, 2019 dan 2020. Sementara itu fasilitas gedung olahraga yang tersedia sampai saat ini berjumlah 2 unit.

Tabel 2.26 Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Klub Olahraga	19	16	20	20	20
Jumlah Gedung Olahraga	2	2	2	2	2

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

Jumlah organisasi olahraga di Kota Pekalongan tahun 2016 berjumlah 30 organisasi dan jumlahnya masih tetap hingga tahun 2018 dan terdapat penambahan 1 (satu) organisasi olahraga di tahun 2019 sehingga menjadi 31 organisasi olahraga. Begitu pula dengan gelanggang/balai remaja selain milik swasta, jumlahnya tetap dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yakni sebanyak 3 gelanggang yaitu GOR Jetayu, Stadion Hoegeng dan Warung Apresiasi. Untuk lapangan olahraga bisa dikatakan cukup banyak, yaitu berjumlah 55 lapangan pada tahun 2020, dimana sebelumnya di tahun 2016 hanya berjumlah 12 lapangan. Hal ini dikarenakan lapangan olahraga milik sekolah turut diperhitungkan. Kegiatan olahraga sebanyak 8 kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal, diantaranya Popda tingkat Kota, Popda tingkat karesidenan, Popda tingkat provinsi, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) tingkat karesidenan, tingkat provinsi, Pekan Olahraga Wilayah Dulongmas, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), dan Kejuaraan Provinsi (Kejurprov). Penyelenggaraan olahraga selama tahun 2018 dan 2019 terdiri dari penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan, pusat pelatihan olahraga tingkat karesidenan/provinsi, penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota dan pembibitan dan pembinaan olahraga berbakat.

Tabel 2.27 Perkembangan Fasilitas dan Kegiatan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Organisasi Olahraga	30	30	30	31	31
Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta)	3	3	3	3	3
Lapangan olahraga	12	55	55	55	55
Jumlah kegiatan olahraga	5	7	7	8	8

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pelayanan pemerintahan di bidang pendidikan memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermanfaat. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kompetensi masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih

baik. Pemerintah Kota Pekalongan selalu berusaha meningkatkan pelayanan di bidang Pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat pada data pelayanan bidang pendidikan sebagai berikut.

a. Angka Partisipasi Sekolah

1) PAUD

PAUD sebagai salah satu tempat untuk membina anak usia dini merupakan salah jenjang pendidikan yang ditargetkan dalam pembangunan Kota Pekalongan. Dalam lima tahun terakhir, jumlah siswa PAUD/TK di Kota Pekalongan cenderung fluktuatif dengan hasil akhir di tahun 2020 menurun. Jumlahnya meningkat pada tahun 2017 dan 2019, namun di tahun 2020 menurun cukup banyak, semula 9.019 siswa menjadi 7.485 siswa. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.28 berikut.

Tabel 2.28 Jenjang Pendidikan PAUD/TK di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah siswa TK/RA	Jumlah anak usia 4-6 tahun	Persentase PAUD
2016	7.901	15.422	51,23
2017	8.107	15.873	51,07
2018	8.000	16.180	49,44
2019	9.019	16.625	54,25
2020	7.485	15.710	47,64

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

2) Pendidikan Dasar

Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2016-2020 pada jenjang pendidikan SD/MI cenderung bervariasi, dari 110,93 di tahun 2016 menjadi 103,79 di tahun 2020. Sementara itu capaian APS jenjang SMP/MTs cenderung meningkat dari 102,67 di tahun 2016 menjadi 103,67 di tahun 2020. Dalam perjalanannya, di tahun 2019 capaian APS jenjang SD/MI dan SMP/MTs tidak mencapai target seperti pada tahun-tahun sebelumnya yang selalu di atas 100 persen. Hal ini karena adanya kebijakan Zonasi yang mulai diterapkan di tahun ajaran 2018/2019. Selain itu, sebagian besar orang tua menyekolahkan anaknya di usia yang lebih muda daripada ketentuan yang berlaku juga menjadi faktor penurunan target ini.

Perkembangan APS Kota Pekalongan untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2020 disajikan dalam Tabel 2.29 berikut.

Tabel 2.29 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
APS SD/MI	110,93	110,57	106,97	98,67	103,79
APS SMP/MTs	102,67	104,21	104,67	97,69	103,67

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

3) Usia 5-15 tahun

APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah.

Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Indikator APS untuk mencapai sasaran meningkatnya akses layanan pendidikan di Kota Pekalongan pada tingkat TK, SD, SMP, Paket A, Paket B, RA, MI, MTs.

Secara series, Angka Partisipasi Sekolah di jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 disajikan dalam Tabel 2.30 berikut.

Tabel 2.30 Angka Partisipasi Sekolah Jenjang TK-SMP di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun		Jml. Anak Usia Sekolah TK s.d SMP	Jml. Penduduk Usia 5 – 15 Tahun	APS (persen)	
2016	L	26.481	28.331	93,47	95,55
	P	25.853	26.439	97,78	
2017	L	27.187	29.166	93,21	94,84
	P	26.245	27.172	96,59	
2018	L	28.202	29.456	95,74	98,65
	P	28.051	27.569	101,75	
2019	L	29.622	29.585	100,13	100,77
	P	28.028	27.625	101,46	
2020	L	28.348	29.524	96,02	96,75
	P	27.019	27.703	97,53	

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauh mana ketersediaan sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah. Selama kurun waktu tahun 2016-2020, ketersediaan jumlah SD/MI cenderung naik namun tidak signifikan, dimana pada tahun 2016 sebanyak 145 sekolah dan di tahun 2020 sebanyak 146 sekolah. Sedangkan jumlah sekolah SMP/MTs cenderung stagnan yaitu 38 sekolah. Untuk jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun, secara umum cenderung fluktuatif. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.31 berikut.

Tabel 2.31 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah SD/MI	145	146	149	149	146
Jumlah SMP/MTs	37	38	38	38	38
Jumlah Penduduk Usia 7-12 th	30.519	29.873	30.524	32.855	31.581
Jumlah Penduduk Usia 13-15 th	15.682	15.229	15.330	15.385	15.067

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

Berdasarkan data diatas maka rasio ketersediaan sekolah untuk usia sekolah pendidikan dasar di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.32 berikut.

Tabel 2.32 Rasio Ketersediaan Sekolah Untuk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Rasio per 10.000 penduduk usia 7-12 thn dan usia 13-15 thn
2016	39,61
2017	40,57
2018	40,78
2019	38,76
2020	39,44

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

c. Rasio Guru terhadap Murid Per 10.000 Penduduk Usia Sekolah

Rasio guru terhadap murid per 10.000 penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai kualitas pembelajaran di kelas. Selama kurun waktu tahun 2016-2020, rasio ketersediaan guru pendidikan dasar yang terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs terhadap jumlah murid setiap 10.000 usia anak sekolah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 rasio sebesar 599,41, kemudian mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 menjadi 586,37 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.33 berikut.

Tabel 2.33 Rasio Guru dan Murid di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
	Jumlah Guru	1.889	1.763	1.887	1.840	1.841
	Jumlah Murid	32.242	32.121	32.210	32.092	31.752
2	SMP/MTs					
	Jumlah Guru	1.015	963	993	933	932
	Jumlah Murid	16.206	16.168	15.905	15.759	15.539
	Jumlah Guru (SD/MI+SMP/MTs)	2.904	2.726	2.880	2.773	2.773
	Jumlah Murid (SD.MI+SMP/MTS)	48.448	48.289	48.115	47.851	47.291
	Rasio Guru (SD/MI+SMP/MTs) Per Murid Per 10.000 penduduk	599,41	564,52	598,57	579,51	586,37

Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka Tahun 2021, 2021

d. Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-Rata

Rasio guru terhadap murid rata-rata adalah perbandingan guru sekolah pendidikan dasar per kelas dengan jumlah murid pendidikan dasar per 10.000 anak usia sekolah. Sesuai Tabel 2.35, rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata dalam 10.000 anak usia sekolah mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tahun 2016-2020, dan berakhir menurun di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2016 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.34 berikut.

**Tabel 2.34 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020**

Tahun	Jumlah guru pendidikan dasar*)	Jumlah kelas pendidikan dasar*)	Jumlah guru sekolah per kelas*)	Murid Pendidikan dasar*)	Rasio guru/murid per kelas rata-rata setiap 10.000 anak usia sekolah
2016	2.904	1.654	1,76	48.448	0,360
2017	2.726	1.708	1,6	48.289	0,331
2018	2.880	1.689	1,71	48.115	0,354
2019	2.773	1.778	1,56	47.843	0,326
2020	2.801	1.770	1,58	47.882	0,330

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

*) data pertengahan tahun ajaran

Sementara itu rasio guru dan murid jenjang SD/MI di Kota Pekalongan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 juga mengalami fluktuasi. Mulai dari 0,5 di tahun 2016, mengalami naik turun sampai tahun 2020 dengan kondisi terakhir di angka 0,46 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.35 berikut.

**Tabel 2.35 Rasio Guru dan Murid Jenjang SD/MI
di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020**

Karakteristik	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Guru SD/MI*)	1.889	1.763	1.887	1.840	1.856
Rombongan Kelas*)	1.161	1.195	1.215	1.173	1.265
Jumlah Guru Sekolah SD/MI per Kelas*)	1,62	1,47	1,55	1,57	1,47
Murid SD/MI*)	32.242	32.121	32.210	32.855	31.995
Rasio guru terhadap murid (SD/MI) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk	0,5	0,46	0,48	0,48	0,46

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

*) data pertengahan tahun ajaran

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama / Sederajat digambarkan dalam tabel rasio guru terhadap murid (SMP/MTs) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk dari tahun 2016-2020. Selama lima tahun terakhir, rasio tersebut cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 berada di angka 1,27, kemudian turun di tahun 2017 dan 2018. Namun kembali naik di tahun 2019 di angka 1,26 dan menurun di tahun 2020 menjadi 1,18. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.36 berikut.

**Tabel 2.36 Rasio Guru dan Murid Jenjang SMP/MTs
di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020**

Karakteristik	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Guru SMP/MTs*)	1.015	963	933	933	945
Rombongan Kelas*)	493	513	516	481	505
Jumlah Guru Sekolah SMP/MTs per Kelas*)	2,06	1,88	1,81	1,94	1,87

Karakteristik	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Murid SMP/MTs*)	16.206	16.168	15.905	15.385	15.887
Rasio guru terhadap murid (SMP/MTs) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk	1,27	1,16	1,14	1,26	1,18

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

*) data pertengahan tahun ajaran

e. Fasilitas Pendidikan

Kondisi bangunan penyelenggaraan pendidikan adalah salah satu faktor utama terselenggaranya kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah. Bangunan sekolah yang baik memberikan kontribusi yang baik terhadap kegiatan proses belajar mengajar bagi pendidik dan peserta didik.

Dalam kurun waktu 2016-2020, kondisi bangunan SD/setara dan SMP/setara mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016-2018 kondisi bangunan SD/setara meningkat, namun pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan sampai di angka 73,30 persen. Hal serupa juga terjadi pada kondisi bangunan SMP/setara, dimana pada tahun 2016 sebesar 77,87 persen dan pada tahun 2017 menjadi 94,82 persen. Sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 86,80 persen, namun kembali meningkat pada tahun 2019 yaitu sebesar 92,10 persen dan menurun drastis di tahun 2020 mejadi 68,95 persen. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.37 berikut.

Tabel 2.37 Kondisi Bangunan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Dalam Kondisi Baik Tahun 2016 – 2020

Jenjang	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI (persen)	86,51	91,65	95,01	92,72	73,30
SMP/MTs (persen)	77,87	94,82	88,86	94,13	68,95

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

f. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan. Penyebab utama putus sekolah antara lain kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya, kondisi ekonomi orang tua yang miskin, dan keadaan geografis.

Angka putus sekolah untuk jejang pendidikan SD/MI dalam kurun waktu 2016-2020 cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2016 sebesar 0,09 persen dan pada tahun 2017 menurun menjadi 0,07 persen, kemudian meningkat di tahun 2020 sebesar 0,29 persen. Sama halnya dengan jenjang SD/MI, jenjang SMP/MTs juga fluktuatif. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.38 berikut.

Tabel 2.38 Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan 2016 – 2020

Jenjang	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI (persen)	0,09	0,07	0,07	0,10	0,29

Jenjang	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
SMP/MTs (persen)	0,43	0,14	0,15	0,46	0,97

Sumber : Evaluasi RKPD Tahun 2020, 2021

g. Angka Kelulusan Sekolah

Angka kelulusan sekolah menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Pada tingkat SD/setara, sepanjang tahun 2016-2020 mencapai tingkat kelulusan sebesar 100 persen. Untuk angka kelulusan sekolah SMP/ sederajat selama kurun waktu 2016-2020 dapat mencapai 100 persen di tahun 2017 sampai 2020. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.39 berikut.

Tabel 2.39 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Jenjang	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI	100	100	100	100	100
SMP/MTs	99,98	100	100	100	100

Sumber : Evaluasi RKPD Tahun 2020, 2021

Dari nilai ujian akhir nasional, jenjang SD/MI cenderung fluktuatif. Begitu pula dengan jenjang SMP/MTs. Pada Tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi COVID-19 tidak diselenggarakan Ujian Akhir Nasional. Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI dan SMP/MTs disajikan dalam Tabel 2.40 berikut.

Tabel 2.40 Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

No	Jenjang	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SD	7,30	7,53	7,26	69,69	0,00
	MI	7,26				
2	SMP	6,088	6,13	5,74	59,02	0,00
	MTs	5,393				

Sumber : Evaluasi RKPD Tahun 2020, 2021

h. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan sekolah adalah salah satu bukti nyata dari kegiatan pendidikan yang secara berjenjang terjadi dalam siklus pendidikan. Angka melanjutkan sekolah dari tingkat SD/setara ke jenjang SMP/setara dalam kurun waktu tahun 2016-2020 telah diatas 100 persen, meskipun dalam perjalanannya cenderung fluktuatif. Sementara itu untuk angka melanjutkan dari jenjang pendidikan dari SMP/setara ke SMA/setara sepanjang tahun 2016-2020 cenderung menurun dan sempat berada di bawah 100 persen di tahun 107 dan 2018. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.41 berikut.

Tabel 2.41 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kota Pekalongan tahun 2016 – 2020

Jenjang	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	113,35	111,82	102,44	104,78	102,79
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	105,12	98,41	98,00	101,25	102,44

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

i. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Peningkatan kualitas pendidik dapat diukur dari tingkat pendidikan yang dimiliki. Tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi tingkat pendidikan S1 atau D4 terus ditingkatkan, baik pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs. Meskipun pada kenyataannya selalu mengalami fluktuasi seperti yang disajikan dalam Tabel 2.42 berikut.

Tabel 2.42 Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Jenjang	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pendidik SD/MI Berkualifikasi S1/DIV	90,45	94,23	92,42	92,80	93,53
Pendidik SMP/MTs Berkualifikasi S1/DIV	92,12	93,39	93,96	94,96	95,66

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

j. Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A

Mutu penyelenggaraan pendidikan salah satunya ditunjukkan dengan nilai akreditasi sekolah. Tabel 2.45 menunjukkan sekolah jenjang TK sampai SMP yang memperoleh akreditasi A.

Tabel 2.43 Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jenjang TK/RA					
- Sekolah Terakreditasi A	-	3	8	18	18
- Jumlah Sekolah	104	108	109	110	110
- Persen	0,00	2,78	7,34	16,36	16,36
Jenjang SD/MI					
- Sekolah Terakreditasi A	85	99	95	102	99
- Jumlah Sekolah	145	146	149	149	146
- Persen	58,62	76,81	63,76	68,46	67,81
Jenjang SMP/MTs					
- Sekolah Terakreditasi A	18	23	23	26	26
- Jumlah Sekolah	37	38	38	38	38
- Persen	48,65	60,53	60,53	68,42	68,42
Jenjang TK-SMP					

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
- Sekolah Terakreditasi A	103	122	122	146	143
- Jumlah Sekolah	286	292	292	297	294
- Persen	36,00	41,78	42,57	49,16	48,64

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

k. Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter

Persentase Implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di Kota Pekalongan diukur berdasarkan rata-rata persentase implementasi pendidikan keagamaan dan implementasi pendidikan karakter. Pendidikan keagamaan di Kota Pekalongan telah diimplementasikan di seluruh jenjang mulai Usia Dini sampai dengan Pendidikan Dasar (PAUD, SD dan SMP). Sedangkan pendidikan karakter diukur berdasarkan jumlah sekolah yang telah mengimplementasikan Kurikulum 2013 (K-13).

Tabel 2.44 Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2020

Tahun	Sekolah yang mengimplementasi pendidikan keagamaan		Sekolah yang mengimplementasi pendidikan karakter		Rata-rata
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	
2018	297	100	142	47,81	73,90
2019	297	100	200	67,34	83,67
2020	294	100	294	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2021

Realisasi kinerja indikator persentase penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter pada tahun 2020 melebihi target yang ditetapkan RPJMD.

2. Kesehatan

a. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

Tabel 2.45 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per 1.000 Balita di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah balita	Rasio Posyandu /Balita
2016	406	21.420	18,95
2017	407	22.933	17,75
2018	409	23.269	17,58
2019	411	23.173	17,74
2020	414	23.008	17,99
Rata-rata			18,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

Jumlah Posyandu dari tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan tiap tahunnya, sedangkan Rasio Posyandu per 1000 balita tidak terlalu banyak

mengalami perubahan, dengan asumsi pertambahan Posyandu jumlahnya hampir sama dengan jumlah per 1000 Balita. Rata-rata Rasio pos pelayanan terpadu per 1000 Balita selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2016 – 2020 adalah 18,00 yang berarti setiap seribu balita yang ada dilayani oleh 18 posyandu atau setiap posyandu melayani sebanyak 56 balita yang ada di wilayah tersebut.

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 berdasarkan data pada Tabel 2.46, secara agregat, jumlah puskesmas, puskesmas pembantu tidak mengalami perubahan jumlah. Sedangkan untuk Rumah Sakit, dengan bertambahnya 1 (satu) Rumah Sakit maka ada perubahan rasio. Rasio tersebut, menggambarkan rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik dan Rumah Sakit terhadap 1.000 penduduk setiap tahunnya.

Tabel 2.46 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Rumah Sakit per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Tahun	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Pustu		Poliklinik		Rumah Sakit	
		Jml	Rasio	Jml	Rasio	Jml	Rasio	Jml	Rasio
2016	299.222	14	0,047	27	0,090	22	0,074	8	0,027
2017	301.870	14	0,046	27	0,089	14	0,046	8	0,027
2018	304.477	14	0,046	27	0,089	13	0,043	9	0,030
2019	307.097	14	0,046	27	0,088	12	0,039	9	0,029
2020	307.150	14	0,046	26	0,085	11	0,036	9	0,029

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

b. Rumah Sakit Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi

Akreditasi merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap manajemen RS karena telah memenuhi standar yang ditentukan. Data rumah sakit di Kota Pekalongan yang telah terakreditasi secara rinci disajikan dalam Tabel 2.47 berikut.

Tabel 2.47 Persentase Rumah Sakit Rujukan yang Terakreditasi Tahun 2016 - 2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rumah Sakit yang terakreditasi	8	8	8	9	9
Jumlah seluruh rumah sakit	8	8	9	9	9
Persentase Rumah Sakit Rujukan yang Terakreditasi	100,00	100,00	88,89	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

c. Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Ketersediaan dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan, dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat. Kesehatan masyarakat

penting sebagai modal masyarakat dalam menjalani aktifitas kehidupan. Kurun waktu 2016 – 2020, rasio dokter umum di Kota Pekalongan lebih besar dibandingkan dokter spesialis dan dokter gigi. Menurut Standar Target Rasio Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014, tahun 2019 dan tahun 2025 dalam Kepmenkes Bidang Kesra No.54 Tahun 2013, rasio dokter spesialis sudah mencapai target sebesar 11 per 100.000 penduduk. Rasio dokter umum berdasarkan data yang diolah sudah memenuhi standar dan target rasio Kebutuhan SDM Kesehatan yaitu 45 dokter per 100.000 penduduk. Untuk Rasio dokter gigi berdasarkan data yang diolah untuk tahun 2018 sudah mencapai target rasio Kebutuhan SDM Kesehatan yaitu 13 dokter gigi per 100.000 penduduk dokter gigi per 1.000 penduduk. Secara umum rasio dokter persatuan penduduk meningkat dari tahun 2016 ke tahun 2018, namun menurun di tahun 2019 dan sedikit meningkat di tahun 2020. Data perkembangan rasio dokter disajikan dalam Tabel 2.48 berikut.

Tabel 2.48 Rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Dokter Spesialis	0,42	0,48	0,53	0,39	0,42
Dokter Umum	0,52	0,79	0,91	0,60	0,66
Dokter Gigi	0,1	0,17	0,16	0,11	0,12
Rasio Dokter per satuan penduduk	0,94	1,45	1,60	1,1	1,2

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

Tenaga paramedis dibutuhkan masyarakat sebagai penunjang aktivitas pelayanan kesehatan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, tenaga paramedis yang terdiri dari perawat, bidan dan bidang kefarmasian perlu terus ditambah agar tercapai rasio per 1.000 penduduk minimal terdapat satu tenaga para medis.

Keberadaan tenaga paramedis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Rasio tenaga paramedis (perawat, bidan, tenaga farmasi) di Kota Pekalongan dari Tahun 2016 – 2020 semakin membaik. Secara rinci disajikan dalam Tabel 2.49 berikut.

Tabel 2.49 Rasio Tenaga Paramedis di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Perawat	2,23	2,32	2,58	2,63	2,71
Rasio Bidan	0,95	1,00	1,20	1,08	1,09
Rasio Farmasi	0,44	0,93	1,18	0,84	0,90
Perawat	698	709	804	827	832
Bidan	286	304	375	339	335
Tenaga Farmasi	133	285	348	265	276

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

d. Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek

Tenaga kesehatan merupakan sumber daya utama dalam pembangunan kesehatan. Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan tenaga kesehatan harus mempunyai ijin, kecuali tenaga kesehatan masyarakat. Tujuan dari perijinan ini

selain melindungi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan juga melindungi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar. Mulai Tahun 2019 DPMPTSP Kota Pekalongan telah mengeluarkan izin bagi tenaga kesehatan di Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perizinan Tenaga Kesehatan. Secara rinci disajikan dalam Tabel 2.50 berikut.

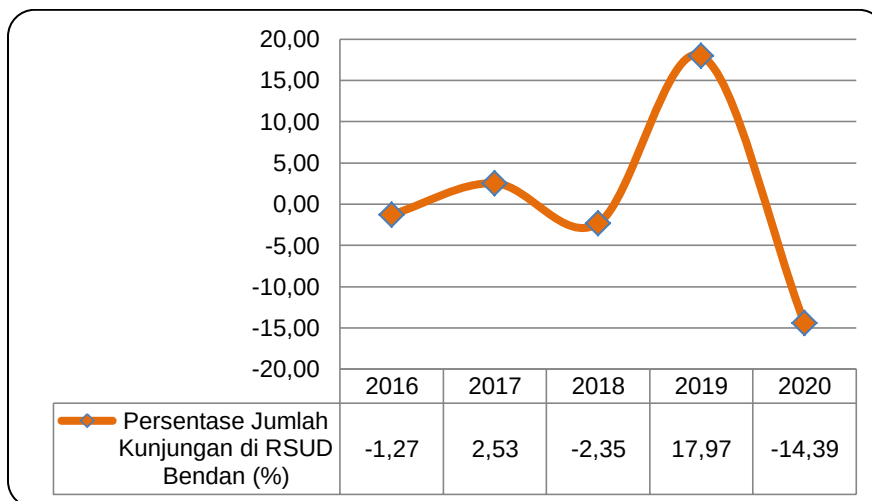
Tabel 2.50 Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Surat Ijin Praktek Tahun 2019 - 2020

Uraian	2019	2020
Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek (yang dikeluarkan DPMPTSP)	544	698
Jumlah tenaga kesehatan yang berkewajiban memiliki Surat Ijin Praktek	2.348	2.498
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	23,17	27,94

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

e. Jumlah Kunjungan di RSUD Bendan

Pandemi *COVID-19* telah memengaruhi operasional rumah sakit. Wabah virus corona menyebabkan penurunan kunjungan pasien rawat jalan maupun rawat inap non *COVID-19*. Kondisi tersebut mengakibatkan penurunan tingkat okupansi. Rasio Kunjungan di RSUD Bendan Kota Pekalongan menunjukkan tren yang negatif pada tahun 2020 yaitu sebesar -14,39 persen. Secara rinci disajikan dalam Gambar 2.34 berikut.



Gambar 2.34 Persentase Kunjungan di RSUD Bendan Kota Pekalongan Periode Tahun 2016 - 2020

Sumber : RSUD Bendan, 2021

Jumlah Kunjungan pasien pada tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan secara signifikan disebabkan adanya pengembangan pelayanan di RSUD Bendan. Namun sejak terjadinya Pandemi *COVID-19* secara global termasuk Kota Pekalongan mulai bulan Maret 2020 mengakibatkan penurunan kunjungan pasien rawat jalan maupun rawat inap non *COVID-19* secara signifikan. Kondisi tersebut mengakibatkan penurunan tingkat pemakaian tempat tidur rumah sakit. Rasio kunjungan pasien di RSUD Bendan Kota Pekalongan menunjukkan

tren yang negatif pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar -14,39 persen.

f. Sarana Farmasi yang Memenuhi Standar

Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian bertujuan untuk meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Secara rinci sarana farmasi di Kota Pekalongan yang telah memenuhi standar disajikan dalam Tabel 2.51 berikut.

Tabel 2.51 Persentase Sarana Farmasi yang Memenuhi Standar Tahun 2016 - 2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Sarana Farmasi yang memenuhi standar	364	50	161	102	61
Sarana Farmasi yang dilakukan pengawasan	420	60	208	115	68
Persentase Sarana Farmasi yang Memenuhi Standar	86,67	83,33	77,40	88,70	89,71

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

g. Persentase Balita Usia <6 bulan mendapat ASI Eksklusif

Pemberian makanan bayi yang terbaik dan benar adalah menyusui bayi secara eksklusif (usia 0-6 bulan), dengan ASI Eksklusif dan dilanjutkan sampai dengan usia 24 bulan. Sedangkan makanan pendamping ASI dapat diberikan sejak usia bayi 6 bulan. ASI, yang sangat bermanfaat bagi bayi, merupakan makanan yang sempurna dan terbaik karena mengandung unsur-unsur yang bermanfaat untuk tumbuh kembang bayi secara optimal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas, pada tahun 2020 presentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif adalah 53,40 persen. Angka ini sudah memenuhi presentase yang ditetapkan pada tahun 2020 yaitu 47 persen. Untuk terus meningkatkan persentase ini maka dilakukan sosialisasi dan kampanye pemberian ASI eksklusif di puskesmas dan posyandu di Kota Pekalongan menyadarkan para ibu-ibu. Presentase Balita (usia 0 – 6 bulan) yang mendapatkan ASI Eksklusif selama 5 tahun terakhir sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.52 berikut.

Tabel 2.52 Persentase Balita Usia <6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Tahun	Jumlah Bayi	Jumlah Bayi yang diberi ASI Eksklusif	Cakupan (persen)
2016	1.996	1.731	86,72
2017	5.066	2.168	42,80
2018	5.176	2.668	51,55
2019	5.136	2.938	57,20
2020	4.524	2.416	53,40

Sumber : Evaluasi RKPD Tahun 2020, 2021

h. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Persentase balita gizi buruk di Kota Pekalongan 2020 sebesar 0,16 persen. Secara umum jumlah kasus balita gizi buruk di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami fluktuasi. Meski ada penurunan jumlah balita gizi buruk pada tahun 2019 sebanyak 12 kasus, tetapi jumlah balita gizi buruk sampai dengan tahun 2020 terus mengalami kenaikan menjadi 35 kasus. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.53 berikut.

Tabel 2.53 Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita	Persentase balita gizi buruk
2016	37	23.468	0,16
2017	31	22.933	0,14
2018	19	22.666	0,08
2019	12	23.050	0,05
2020	35	22.506	0,16

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

i. Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi

Penyakit menular yang menjadi prioritas program di Kota Pekalongan adalah TB, HIV/AIDS, Demam Berdarah Dengue (DBD). Kondisi penyakit menular yang terdeteksi di Kota Pekalongan selama 5 tahun terakhir (2016 - 2020) disajikan dalam Tabel 2.54 berikut.

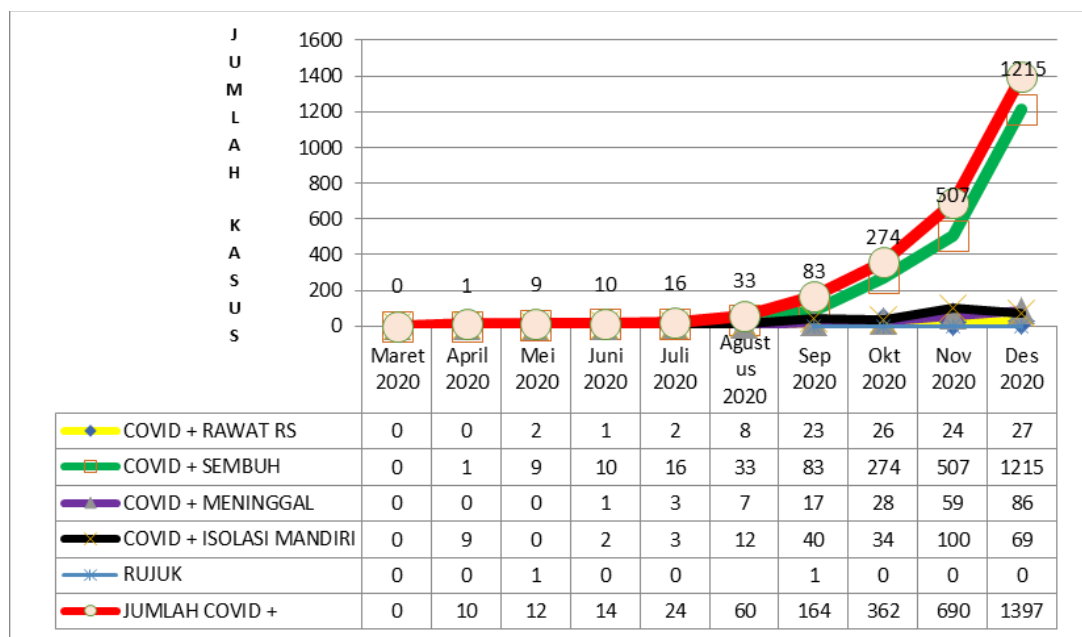
Tabel 2.54 Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Tahun	IR DBD per 100.000 penduduk	CFR DBD (persen)	CFR TB per 100.000 penduduk	CNR TB per 100.000 penduduk	HIV/AIDS	
					HIV	AIDS
2016	15,56	0,00	5,33	193,97	14	14
2017	14,42	4,55	5,9	214,72	32	16
2018	11,24	8,57	4,17	260,67	68	29
2019	18,19	1,75	4,78	249,71	57	40
2020	26,89	7,06	1,27	171,14	118	1

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

Pandemi *COVID-19* yang melanda secara global termasuk Kota Pekalongan sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini sangat berpengaruh pada seluruh sektor kehidupan baik sektor kesehatan, sosial maupun ekonomi. Sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin.

Indonesia terus mengalami peningkatan tajam dalam jumlah *COVID-19* kasus di berbagai provinsi dan kabupaten dalam beberapa bulan terakhir. Penyebaran virus *COVID-19* juga terjadi di Kota Pekalongan. Data penderita *COVID-19* bersifat fluktuatif yang mengalami perubahan setiap hari.



Gambar 2.35 Perkembangan Persebaran COVID-19 di Kota Pekalongan Bulan Maret-Desember 2020

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan (diolah), 2021

Secara umum Pandemi COVID-19 di Kota Pekalongan naik secara signifikan. Persebaran kasus COVID-19 mulai terkonfirmasi pada bulan April 2020 sejumlah 10 kasus. Terhitung sampai bulan Desember 2020 ada 1.397 kasus jumlah orang yang sudah terjangkit COVID-19. Tercatat sampai akhir tahun 2020 terdapat 27 dirawat RS, 1.215 kasus sudah sembuh, 86 kasus meninggal, dan isolasi mandiri 69 kasus.

i. Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran

Pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan / atau persyaratan kesehatan. Terkait hal tersebut di atas, Undang-Undang tersebut mengamankan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan daya saing Industri Rumah Tangga (IRT) atau yang sering dikenal dengan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan yang dihasilkan IRTP serta menumbuhkan kesadaran dan motivasi produsen dan karyawan tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis dan tanggung jawab terhadap keselamatan konsumen. Upaya Dinas Kesehatan dalam pengawasan Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga adalah dengan rutin melakukan pemeriksaan sampling terhadap produk olahan pangan industry rumah tangga. Secara rinci disajikan dalam Tabel 2.55 berikut.

Tabel 2.55 Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran Tahun 2016 - 2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah sample produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran (mikro biologi, fisika, kimia)	249	105	161	2.008	648
Jumlah sample produk pangan olahan produk rumah tangga yang dilakukan pemeriksaan	270	135	208	2.104	654
Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran	92,22	77,78	77,40	95,44	99,08

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

j. Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat

Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) terdiri dari rumah makan / restoran, jasa boga / catering, penjaja makanan, depot air minum dan kantin. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Pengelolaan Makanan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam rangka upaya preventif dan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan melakukan pembinaan dan pengawasan Temoat Pengelolaan Makanan untuk menjaga keamanan makanan yang beredar di masyarakat. Data rinci Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat disajikan dalam Tabel 2.56 berikut.

Tabel 2.56 Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat Tahun 2016 - 2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	825	772	770	606	609
Seluruh Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM)	869	826	849	658	664
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	94,94	93,46	90,69	92,10	91,72

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

k. Jumlah Penduduk Miskin yang memanfaatkan Jamkesmas dan Jamkesda

Berdasarkan BPS, jumlah penduduk miskin cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya sampai dengan tahun 2019. Namun kembali melonjak

pada tahun 2020 yaitu sebanyak 22.160 orang. Dan pada kenyataannya penerima BPJS Kesehatan melebihi jumlah penduduk miskin.

Data kepesertaan Jaminan Kesehatan di Kota Pekalongan tahun 2020 adalah PBI APBN sebanyak 88.685 jiwa dan Jamkesda sebanyak 70.307 jiwa. Secara lengkap data penduduk miskin yang mendapat jaminan kesehatan di Kota Pekalongan selama 5 tahun terakhir (tahun 2016 - 2020) disajikan dalam Tabel 2.57 berikut.

Tabel 2.57 Penduduk Miskin yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penerima Jamkesmas	Persentase Penerima Jamkesmas	Jumlah Penerima Jamkesda	Persentase Penerima Jamkesda
2016	299.222	23.650	77.379	25,86	36.060	12,05
2017	301.870	22.510	77.464	25,66	50.621	16,77
2018	304.477	20.520	77.415	25,43	65.946	21,66
2019	307.097	20.268	79.933	26,03	70.931	23,10
2020	307.150	22.160	88.685	28,87	70.307	22,89

Sumber : BPS, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

I. Indeks Keluarga Sehat

Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari Agenda ke-5 Nawa Cita, yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Program ini didukung oleh program sektoral lainnya yaitu Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Kerja, dan Program Indonesia Sejahtera. Program Indonesia Sehat selanjutnya menjadi program utama Pembangunan Kesehatan yang kemudian direncanakan pencapaiannya melalui Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015.

Program Indonesia Sehat dilakukan melalui pendekatan keluarga, yang ditujukan untuk pencapaian keluarga sehat dengan indikator Indeks Keluarga Sehat. Ada 12 Indikator Keluarga Sehat Menurut Kemenkes RI, yaitu :

- 1) Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
- 2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
- 3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
- 4) Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif;
- 5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
- 6) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
- 7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
- 8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
- 9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
- 10) Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- 11) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih;
- 12) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan Program Percepatan Indikator Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Dari hasil pendataan tersebut menunjukkan bahwa hingga Bulan Maret 2019

pendataan PIS-PK dinilai masih rendah. Dari jumlah 97.594 jumlah KK hanya 59.593 KK yang telah dilakukan pendataan PIS-PK atau sekitar 61 persen. Dari jumlah 59.593 KK yang didata, angka IKS baru mencapai 0,16 persen. Sedangkan angka ideal IKS yaitu 0,8 persen dari jumlah data.

m. Rumah Tangga Sehat

Rumah Tangga Sehat adalah rumah tangga yang melakukan 10 PHBS di rumah tangga, terdiri dari persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi ASI Eksklusif, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik di rumah, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktifitas fisik setiap hari serta tidak merokok di dalam rumah. Penerapan 10 indikator PHBS di tingkat rumah tangga sangat tergantung dengan kesadaran dan peran serta aktif masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Sebab upaya untuk mewujudkan lingkungan yang sehat akan menunjang pola perilaku kehidupan rakyat yang sehat secara berkelanjutan.

Cakupan rumah tangga sehat di Kota Pekalongan tahun 2017 dan 2018 meningkat cukup signifikan. Dari target 75,20 persen di tahun 2017, terealisasi 83,51 persen, dan target 75,40 persen di tahun 2018, terealisasi 96,34 persen, namun pada tahun 2019 menurun 94,60 persen dan meningkat kembali ditahun 2020 dengan realisasi 96,78 persen. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.58 berikut.

Tabel 2.58 Cakupan Rumah Tangga Sehat di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Tahun	Cakupan Rumah Tangga Sehat (persen)
2016	92,66
2017	83,51
2018	96,34
2019	94,60
2020	96,78

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2021

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pembangunan prasarana kota meliputi jalan dan jembatan, irigasi dan drainase, pengendalian banjir serta penataan ruang.

a. Jalan

Jalan raya di Kota Pekalongan terbagi menjadi dua kategori berdasarkan kewenangan. Jalan raya milik Pemerintah Pusat dan jalan milik Pemerintah Kota. Kurun waktu 2016-2020, kondisi jalan di Kota Pekalongan mengalami perubahan. Perubahan panjang jalan Negara terjadi mulai tahun 2017, dimana sebelumnya 10,37 Km berkurang menjadi 9,090 Km. Pada tahun 2018, 2019 dan 2020 kembali bertambah menjadi 9,420 Km dengan kondisi baik 67,40 persen, kondisi sedang 20,16 persen dan kondisi rusak 12,42 persen.

**Tabel 2.59 Kondisi Jaringan Jalan Negara
di Kota Pekalongan Tahun 2016–2020**

Tahun	Jalan Negara						
	Panjang Jalan Negara (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (km)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (km)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (persen)
2016	10,73	10,73	0	0	100	0	0
2017	9,090	8,585	0,505	0	94,44	5,56	0
2018	9,420	7,250	2,170	0	76,96	23,03	0
2019	9,420	3,433	4,359	1,642	36,49	46,32	17,45
2020	9,420	6,350	1,900	1,170	67,40	20,16	12,42

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2019, DPUPR Kota Pekalongan, 2021

Sedangkan untuk jalan kota, dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami perubahan seiring bertambahnya panjang jalan yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi maupun penambahan ruas jalan kota. Pada tahun 2016 panjang jalan kota semula 140,49 km berubah menjadi 153,41 km. Jalan dalam kondisi baik perkotaan dibawah kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2020 sepanjang 104,71 km. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.60 berikut.

**Tabel 2.60 Kondisi Jaringan Jalan Kota
di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020**

Tahun	Jalan Kota						
	Panjang Jalan Kota (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (km)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (km)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (persen)
2016	140,49	108,29	12,92	19,27	77,08	9,20	13,72
2017	153,41	92,64	22,11	38,66	60,39	14,41	25,20
2018	153,41	96,04	21,97	35,41	62,60	14,32	23,08
2019	153,41	110,23	12,15	29,35	71,85	7,92	20,22
2020	153,41	104,71	18,27	30,43	68,25	11,90	19,83

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan, 2021

b. Irigasi

Rasio jaringan irigasi di Kota Pekalongan pada tahun 2016-2020 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 26,58 persen. Kondisi ini menggambarkan penggunaan lahan yang hanya sedikit merubah fungsi lahan dikarenakan pemerintah berupaya mempertahankan penggunaan lahan sepanjang lima tahun. Adapun data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.61.

**Tabel 2.61 Rasio Jaringan Irigasi
di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020**

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Jaringan Irigasi (persen)	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan, 2021

Senada dengan rasio jaringan irigasi, luas irigasi yang tercatat dalam kondisi baik juga tidak mengalami perubahan dalam tiga tahun (tahun 2016 sampai dengan tahun 2018). Pada tahun 2018 luas irigasi dalam kondisi baik tercatat 76,43 persen, tahun 2019 menurun menjadi 70,43 persen dan kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 66,14 persen, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.62 berikut.

**Tabel 2.62 Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik
di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020**

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Luas irigasi kota dalam kondisi baik (persen)	76,43	76,43	76,43	70,43	66,14

Sumber : Profil DPUPR Kota Pekalongan, 2021

Pantauan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan selama periode 2016-2020, pemanfaatan sempadan sungai sebagai kegiatan atau aktifitas ekonomi maupun tempat tinggal tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 25 persen berkurang dari tahun 2014 sebesar 40 persen. Hal ini dilakukan dengan membongkar bangunan tidak berizin di sempadan sungai. Aktifitas pembongkaran atas bangunan liar dilakukan terutama di Kecamatan Pekalongan Utara. Perkembangan kondisi sempadan sungai yang dipakai bangunan liar disajikan dalam Tabel 2.63 berikut.

**Tabel 2.63 Kondisi Sempadan Sungai yang dipakai
Bangunan Liar di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020**

Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (persen)	25	25	25	25	25

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan, 2021

c. Drainase

Selain saluran irigasi, yang setiap tahunnya menjadi perhatian pemerintah adalah saluran drainase. Total panjang saluran drainase di Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2020 sepanjang 31.715 meter, terdiri dari saluran drainase primer dan sekunder. Sistem drainase primer di Kota Pekalongan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut :

- 1) Kawasan Barat (3 buah), meliputi Kali Breml, Kali Kranding, dan Kali Pekalongan
- 2) Kawasan Tengah (2 buah), meliputi Kali Sibulanan, Kali Banger Lama
- 3) Kawasan Timur (6 buah), meliputi Kali Banger, Kali Susukan, Kali Cempayan, Kali Sitotok, Kali Selorejo dan Kali Gabus

Sedangkan Sub sistem drainase terdiri dari 8 buah yaitu Sub sistem Breml, Sub sistem Bandengan, Sub sistem Pabeian, Sub sistem Loji, Sub sistem Banger Lama, Sub sistem Sibulanan, Sub sistem Banger Hilir, Sub sistem Banger Hulu.

Saluran Drainase Sekunder, selain sungai, di Kota Pekalongan terdapat beberapa jaringan saluran irigasi maupun pembuangan, antara lain sebagai berikut : Saluran Sekunder Grabyak, Saluran Sekunder Baros, Saluran Sekunder Larangan, Saluran Sekunder Asem Binatur dan Saluran Sekunder Podo Timur. Secara keseluruhan, terdapat 53 saluran drainase yang terletak di jalan utama Kota dengan konstruksi batu belah dan saluran tanah, jenis saluran terbuka, tertutup dan gorong-gorong, dengan kondisi baik sepanjang 15.287 meter, kondisi rusak sepanjang 7.534 meter dan kondisi sebagian rusak sepanjang 8.894 meter.

Tabel 2.64 Data Saluran Drainase di Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2020

FUNGSI	KONDISI			Jumlah (meter)
	Baik (meter)	Sebagian Rusak (meter)	Rusak (meter)	
Sekunder	7.317	6.284	5.838	19.439
Primer	7.970	2.610	1.696	12.276
Total	15.287	8.894	7.534	31.715

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan, 2021

d. Pengendalian Banjir

Secara topografis, Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa, dengan ketinggian lahan antara 0 meter di atas permukaan laut (dpl) pada wilayah bagian Utara dan 6 meter dpl pada wilayah bagian Selatan. Ditinjau dari kemiringan lahan, kota Pekalongan termasuk daerah yang relatif datar, yaitu dengan kemiringan lahan rata – rata antara 0 – 5 persen. Kondisi ini secara topografis akan menyulitkan pengaturan Saluran Drainase, karena persentase kemiringan lahan relatif kecil. Akibatnya di beberapa kawasan Kota Pekalongan sering mengalami gangguan genangan banjir, sementara di sisi Utara wilayah Kota Pekalongan, yang berbatasan dengan kawasan pesisir pantai mengalami bencana rob dengan frekuensi dan luasan genangan yang meningkat. Data genangan Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.65 berikut.

Tabel 2.65 Genangan Banjir dan Rob di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Tahun	Luas Wilayah Kota Pekalongan (Ha)	Luas Genangan (Ha)	Persentase
2016	4.525	1.870	41,33
2017	4.525	1.396	30,85
2018	4.525	1.391	30,75
2019	4.525	1.057	23,35
2020	4.525	1.730	38,23

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan, 2021

Beberapa hal yang mengakibatkan rawan genangan banjir dan rob adalah sebagai berikut :

- Ketinggian Wilayah hanya 0-6 meter di atas permukaan air laut
- Persentase Kemiringan Lahan relatif kecil 0-5 persen
- Termasuk dataran rendah dengan pola aliran air sejajar menuju ke pantai utara laut jawa

- Berkurangnya kawasan tangkapan air (*catchment area*) karena semakin tingginya kepadatan bangunan sehingga air aliran permukaan akibat hujan (*run off*) yang semakin membesar juga
- Pendangkalan Sungai di wilayah Hilir

Sabuk pantai berupa tanggul-tanggul *revetment* yang telah dibangun juga tidak kuat menahan gelombang air laut. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan berbagai upaya, khususnya untuk mengurangi dampak bencana abrasi. Upaya tersebut antara lain adalah penguatan revetmen pantai yang telah selesai pada tahun 2015 yaitu sepanjang bibir pantai sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.66 berikut.

Tabel 2.66 Pembangunan Revetment di Kota Pekalongan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Revetment (meter)	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
Panjang Bibir pantai (meter)	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150

Sumber : Profil DPUPR Kota Pekalongan, 2021

Khusus terkait bencana rob yang melanda sebagian besar wilayah utara dan barat Kota Pekalongan, saat ini sedang dimulai pembangunan tanggul rob oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana. Meskipun berdampak sangat positif bagi pengurangan genangan akibat rob, namun keberadaan tanggul ini akan menyisakan beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan, antara lain :

1. Operasional dan pemeliharaan tanggul, baik untuk operasional pompa ataupun pemeliharaan tanggul itu sendiri.
2. Pembangunan kembali saluran – saluran drainase yang akan terkoneksi dengan *long storage* sebelah selatan tanggul.
3. Perencanaan penggunaan lahan di sebelah selatan tanggul yang kemungkinan akan menjadi kering dan dapat diperuntukkan bagi pembangunan permukiman ataupun pertanian.
4. Penataan kawasan di sebelah utara tanggul, baik untuk drainase dan irigasi tambak ataupun untuk konservasi guna mencegah berkurangnya luas wilayah sebagai akibat hilangnya daratan karena tingginya air laut.
5. Penanganan kawasan di sisi timur Jl. Kunti Utara ataupun sebelah selatan Jl. Samudra. Kawasan ini dapat terancam oleh limpasan air rob karena masih rendahnya Jl. Kunti Utara ataupun parapet pantai di sisi utara sepanjang Jl. Samudra.

e. Penataan Ruang

Penataan ruang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengatur ruang agar aktivitas kehidupan manusia dan lingkungan alam di sekitarnya berkembang secara harmonis dan lestari. Di sini terdapat dua hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian secara serius yaitu: pertama, adanya tiga unsur penting dalam penataan ruang yaitu: manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat, dan pemanfaatan ruang oleh manusia di lingkungan alam tersebut. Kedua, proses pemanfaatan ruang haruslah bersifat terbuka, berkeadilan, memiliki perlindungan hukum dan mampu memenuhi kepentingan semua pihak (*stakeholder*) secara terpadu dan berdayaguna serta serasi. Tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Terkait dengan penataan ruang, Kota Pekalongan telah menyusun Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009–2029. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah terwujudnya kota jasa, industri dan perdagangan batik, serta minapolitan, yang maju, mandiri dan sejahtera. Berdasarkan tujuan penataan ruang tersebut maka kebijakan penataan ruang wilayah yang dilakukan meliputi :

- a) Peningkatan peran kota sebagai PKW;
- b) Peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat pelayanan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kota di pusat kota dengan sub pusat pelayanan kota dan atau dengan pusat pelayanan lingkungan;
- c) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana kota;
- d) Pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
- e) Pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan, serta menjamin keamanan dengan memantapkan fungsi pertahanan-keamanan;
- f) Pengembangan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan (Kawasan Minapolitan) dan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa terutama untuk industri dan perdagangan batik;
- g) Pengembangan KSK untuk kepentingan sosial budaya yang dapat memberdayakan potensi tradisi sosial budaya masyarakat pesisir yang religius dan mendayagunakan peninggalan sejarah di kota; dan
- h) Pengembangan KSK untuk kepentingan lingkungan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan di kota.

Terkait dengan berbagai aktivitas pembangunan di Kota Pekalongan, ada beberapa rencana pola ruang yang perlu mendapatkan perhatian pada masa mendatang yaitu kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan rawan bencana alam, kawasan pariwisata. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk dalam kerangka pengendalian pemanfaatan ruang masing-masing pemanfaatan ruang agar tetap sinkron serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang, di Kota Pekalongan dibutuhkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hingga tahun 2014 jumlah RDTR yang telah disusun mencapai sebanyak 4 dokumen, yaitu RDTR 4 kecamatan. Rancangan RDTR tersebut telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kota Pekalongan namun belum dapat ditetapkan menjadi Perda karena belum mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri.

Tabel 2.67 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase tersedianya luasan RTH publik (persen)	18,40	18,40	18,60	18,60	18,60
2.	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan (persen)	0,2	0,3	0,16	0,17	0,17
3.	Ketaatan terhadap RTRW (persen)	95	96	98	98	98

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan, 2021

Persentase tersedianya luasan RTH publik relatif tidak terlalu banyak perubahan yaitu sekitar 18,6 persen dari total luas wilayah. Rasio bangunan ber-IMB menunjukkan nilai fluktuatif sepanjang tahun 2016-2020 dari 0,2 pada tahun 2016 menjadi 0,17 pada tahun 2020. Ketaatan terhadap RTRW menunjukkan angka yang cenderung meningkat sepanjang 2016-2020. Ketaatan terhadap RTRW pada tahun 2016 sebesar 95 persen. Namun secara kinerja pada akhir tahun 2018, 2019 dan 2020 membaik menjadi 98 persen.

Selanjutnya untuk kesesuaian pemanfaatan ruang disajikan dalam Tabel 2.68 berikut.

Tabel 2.68 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW

No.	Pola Ruang	Luas Pemanfaatan Ruang sesuai Perda 30/2011 (Ha)	Tidak Sesuai Peruntukan	Sesuai Peruntukan
A	Kawasan Lindung			
1.	Jalur Hijau Sepanjang Pantai	39,31	1,07	38,24
2.	Jalur Hijau Sepanjang Sungai	153,95	48,16	105,79
3.	TPU	32,07	1,56	30,50
4.	Taman Kota	28,17	4,54	23,64
B	Kawasan Budidaya			
1.	Perkantoran Pemerintah	7,34	0,67	6,66
2.	Perkantoran Swasta	5,51	0	5,51
3.	Peruntukan Industri	103,30	0	103,30
4.	Peruntukan Pariwisata	42,68	17,17	25,51
5.	Perdagangan dan jasa	538,08		538,08
6.	Perikanan Tangkap	82,03	4,55	77,48
7.	Perikanan Budidaya	277,54	11,20	266,34
8.	Pertanian	1116,31	54,41	1061,90
9.	Perumahan Kepadatan Rendah	1033,31	17,26	1016,05
10.	Perumahan Kepadatan Sedang	1020,29	15,55	1004,74
11.	Perumahan Kepadatan Tinggi	8,26	0	8,26
12.	RTNH	37,14	2,15	34,99
	Luas Total (Ha)	4525,28	178,29	4346,99
	Persentase (%)		3,94	96,06

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Layak Huni

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah layak huni, salah satu

ukurannya adalah mempunyai bangunan yang kokoh. Salah satu indikator pelayanan pada sub urusan perumahan yaitu meningkatnya jumlah rumah layak huni. Pada tahun 2016 jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) berdasarkan SPM sebesar 8,68 persen, setara dengan 6.448 unit rumah. Tahun 2016-2020 rasio rumah tidak layak huni semakin menurun, artinya kondisi ini semakin membaik. Pada tahun 2016 sebesar 8,68 persen menjadi 2,57 persen pada tahun 2020. Perkembangan rumah tidak layak huni dan rumah layak huni di Kota Pekalongan pada tahun 2016-2020 disajikan dalam Tabel 2.69 berikut.

Tabel 2.69 Perkembangan Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Layak Huni di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Rumah (Unit)	Rumah Tidak Layak Huni		Rumah Layak Huni	
		Jumlah (unit)	Rasio (persen)	Jumlah (unit)	Rasio (persen)
2016	74.313	6.448	8,68	67.865	91,32
2017	74.970	5.159	6,88	69.811	93,12
2018	75.618	3.428	4,53	72.190	95,47
2019	76.269	2.369	3,11	73.900	96,89
2020	76.603	1.966	2,57	74.637	97,43

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan, 2021

Selain data tentang rumah tidak layak huni dan rumah layak huni, pembangunan urusan perumahan dan kawasan permukiman juga perlu mempertimbangkan kebutuhan rumah di Kota Pekalongan. secara lengkap, kebutuhan rumah (*backlog*) disajikan dalam Tabel 2.70 berikut.

Tabel 2.70 Data Kebutuhan Rumah (*Backlog*) di Kota Pekalongan Tahun 2020

Kecamatan	<i>Backlog</i> Kepemilikan	<i>Backlog</i> Penghunian
Pekalongan Barat	7.271	6.513
Pekalongan Timur	5.281	4.813
Pekalongan Utara	6.267	5.849
Pekalongan Selatan	4.020	3.825

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan, 2021

b. Air Minum

Cakupan penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman di Kota Pekalongan pada tahun 2016 sebesar 85,89 persen dari jumlah penduduk Kota Pekalongan. Cakupan penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman terus bertambah dalam tiga tahun terakhir dimana pada akhir tahun 2020 mencapai 88,79 persen dari jumlah penduduk Kota Pekalongan.

Tabel 2.71 Persentase Pelayanan Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk yang Terlayani Air Bersih (jiwa)	257.002	255.724	265.430	272.090	272.718
Jumlah Penduduk (jiwa)	299.222	301.870	304.477	307.097	307.150
Persentase Penduduk yang Terlayani Air Bersih	85,89	84,71	87,18	88,60	88,79

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan (diolah), 2021

Sementara itu berdasarkan KLHS RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, Nilai Daya Dukung Air Kota Pekalongan Tahun 2020 sebesar 0,81 yang berarti daya dukung airnya berada dalam kategori Daya Dukung Air Terlampaui atau Buruk. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah penduduk dan jumlah pekerja industri. Sedangkan di sisi lain tidak ada peningkatan jumlah ketersediaan air. Pemanfaatan sumber daya air permukaan (dari air hujan) belum optimal karena masih terbatasnya sarana penampungan sumber daya air (embung, polder, dan bendung) untuk keperluan air baku. Kemungkinan terjadi ancaman penurunan kualitas sumber daya air permukaan dan air tanah dangkal akibat pencemaran dari kegiatan permukiman maupun industri di perkotaan. Selain itu kemungkinan ancaman penurunan kualitas sumber daya air permukaan dan air tanah dangkal akibat dari intrusi air laut/payau. Hal ini mengakibatkan terjadinya keterbatasan sumber daya air di kawasan perkotaan, sehingga dibutuhkan kerjasama dengan wilayah sekitar (daerah hulu) dalam pemenuhan air bersih terutama untuk air minum.

c. Pengguna Listrik

Pelanggan listrik di Kota Pekalongan dari tahun 2016-2019 terus mengalami peningkatan. Persentase pengguna listrik terus meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Pada tahun 2016 sebesar 112,86 persen, dan angka tersebut terus meningkat menjadi 121,44 persen pada tahun 2019. Namun persentase pengguna listrik menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 113,07 persen. Persentase pengguna listrik yang mencapai di atas 100 persen disebabkan adanya rumah tangga yang memiliki sambungan listrik lebih dari 1 sambungan listrik.

**Tabel 2.72 Rumah Tangga Pengguna Listrik
Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020**

Tahun	Jumlah Pelanggan	Jumlah RT	Persentase Pengguna Listrik
2016	83.868	74.313	112,86
2017	86.740	74.970	115,70
2018	89.686	75.618	118,60
2019	92.622	76.269	121,44
2020	95.313	84.296	113,07

Sumber : BPS Kota Pekalongan (diolah), 2021

d. Penduduk Bersanitasi

Sanitasi merupakan usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan sedemikian rupa sehingga munculnya penyakit dapat dihindari. Sehingga dapat dikatakan bahwa sanitasi adalah suatu usaha pengendalian faktor-faktor lingkungan untuk mencegah timbulnya suatu penyakit dan penularannya yang disebabkan oleh faktor lingkungan tersebut, sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat optimal.

Perkembangan penduduk bersanitasi di Kota Pekalongan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 disajikan dalam Tabel 2.73 berikut.

**Tabel 2.73 Penduduk Bersanitasi di Kota Pekalongan
Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Bersanitasi (jiwa)	276.810	284.029	297.839	305.009	304.969

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk (jiwa)	299.222	301.870	304.477	307.097	307.150
Rasio Penduduk Bersanitasi (persen)	92,51	94,09	97,82	99,32	99,29

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan, 2021

Cakupan pelayanan sanitasi di Kota Pekalongan terus membaik. Pada tahun 2016 cakupan pelayanan sebesar 92,51 persen dan pada tahun 2020 mencakup 99,29 persen.

e. Kawasan Permukiman Kumuh

Persentase kawasan permukiman kumuh yang dimaksud dalam indikator ini adalah perbandingan antara sisa kawasan kumuh berdasarkan luas kawasan kumuh dalam SK Wali Kota Pekalongan Tahun 2014 (yang kemudian diverifikasi oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2017) dibandingkan dengan luas kota Pekalongan.

Berdasarkan penetapan SK Wali Kota Tahun 2014 dan verifikasi di Tahun 2017, Luas kawasan kumuh adalah sebesar 195,59 hektar. Sejak tahun 2017, Pemerintah Kota Pekalongan melalui berbagai program dan kegiatan telah menangani kekumuhan pada kawasan tersebut. Luas kawasan yang tertangani sampai dengan Tahun 2020 telah mencapai 185,89 hektar.

Merujuk data tersebut, maka sisa luasan kawasan kumuh pada akhir tahun 2020 adalah sebesar 9,7 hektar. Berikut rincian penanganan kawasan kumuh sejak tahun 2017-2020.

Tabel 2.74 Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pekalongan sampai dengan Tahun 2020

No	Nama Kelurahan	Luas Kumuh (persen)	Luas Pengurangan Kumuh (persen)				Total Penanganan Sd 2020 (persen)	Sisa Kumuh Sd 2020 (persen)
			2017	2018	2019	2020		
1	Padukuhan Kraton	30,84	9,95	10,83	5,31	3,93	30,02	0,82
2	Bandengan	23,92	3,32	15,28	2,95	0	21,55	2,37
3	Panjang Baru	40,85	6,27	20,78	11,08	0,52	38,65	2,20
4	Panjang Wetan	13,85	5,52	6,06	1,84	0,28	13,70	0,15
5	Krapyak	11,90	7,55	3,32	0,63	0	11,50	0,40
6	Kandang Panjang	28,22	5,53	18,99	0,56	3,14	28,22	0,00
7	Tirto	3,70	0,47	0,24	2,06	0	2,77	0,93
8	Poncol	9,21	3,05	4,29	1,67	0	9,01	0,20
9	Pasirkratonkramat	22,46	2,83	17,25	0,00	0	20,08	2,38
10	Banyurip	6,78	0,80	5,73	0,00	0	6,53	0,25
11	Klego	2,89	0,29	2,60	0,00	0	2,89	0,00
12	Degayu	0,17	0,00	0,17	0,00	0	0,17	0,00
13	Jenggot	0,80	0,00	0,80	0,00	0	0,80	0,00
	Total	195,59	45,58	106,34	26,10	7,87	185,89	9,70

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan, 2021

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Kamtramtibum

Pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan semua tugas tersebut, salah satunya, ditentukan dengan ketersediaan Polisi Pamong Praja. Selama kurun waktu 2016-2020 rasio Polisi Pamong Praja (PNS) di Kota Pekalongan sempat mengalami fluktuasi yaitu penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2016 dengan rasio sebesar 0,77 atau 23 personel untuk setiap 10.000 penduduk dan mengalami penurunan rasio menjadi 0,76 atau 23 personel untuk setiap 10.000 penduduk pada tahun 2017. Pada tahun 2018 meningkat cukup tajam untuk rasio menjadi 1,31 atau 40 personel untuk setiap 10.000 penduduk dan mengalami penurunan rasio pada tahun 2019 sebesar 0,91 atau 28 personel dan mengalami penurunan rasio kembali di tahun 2020 sebesar 0,88 atau 27 personel untuk setiap 10.000 penduduk.

Bantuan Polisi PP (Banpol Non PNS) sangat membantu peningkatan rasio Polisi PP. Pada tahun 2016 untuk ratio sebesar 3,44 atau 103 personil untuk setiap 10.000 penduduk. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 4,17 atau 126 personil, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 3,58 atau 109 personil setiap 10.000 penduduk dikarenakan penambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2019 rasio mengalami penurunan kembali menjadi 3,45 atau 106 personil dan pada tahun 2020 rasio mengalami kenaikan menjadi 3,91 atau 120 personil setiap 10.000 penduduk.

Bantuan Polisi PP (Non PNS) sangat membantu peningkatan rasio Polisi PP. Dengan adanya Bantuan Polisi PP (Non PNS), rasio Polisi PP meningkat dari 4,21 per 10.000 penduduk pada tahun 2016 menjadi 4,94 per 10.000 penduduk pada tahun 2017. Pada tahun 2018 jumlahnya masih sama dengan tahun 2017 yaitu 149 personil. Tetapi rasionya menurun menjadi 4,89 per 10.000 penduduk dikarenakan penambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2019 rasio mengalami penurunan menjadi 4,36 personel per 10.000 penduduk dan pada tahun 2020 rasionya mengalami kenaikan menjadi 4,79 personel per 10.000 penduduk.

Berikut adalah tabel rasio jumlah Satpol PP, Banpol dan pelanggaran Perda dalam kurun waktu 2016-2020.

Tabel 2.75 Rasio Jumlah Polisi PP (PNS) dan Jumlah Polisi PP (Banpol Non PNS) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Polisi PP (PNS)	Persentase Jumlah Polisi PP (PNS)	Jumlah Polisi (Banpol Non PNS)	Persentase Jumlah Polisi (Banpol Non PNS)	Jumlah Polisi PP (PNS dan Banpol Non PNS)	Persentase Jumlah Polisi (PNS dan Banpol Non PNS)	Jumlah Penduduk
2016	23	0,77	103	3,44	126	4,21	299.222
2017	23	0,76	126	4,17	149	4,94	301.870
2018	40	1,31	109	3,58	149	4,89	304.477
2019	28	0,91	106	3,45	134	4,36	307.097
2020	27	0,88	120	3,91	147	4,79	307.150

Sumber : Satpol PP Kota Pekalongan, 2021

Pelanggaran Peraturan Daerah dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami fluktuasi dan cenderung naik. Pada tahun 2016 pelanggaran Perda sebanyak 1.337 kasus, dan pada tahun 2017 melonjak menjadi 2.003 kasus. Namun sampai dengan akhir tahun 2019 jumlah pelanggaran Perda dapat ditekan menjadi 1.382

kasus dan pada tahun 2020 terjadi lonjakan jumlah pelanggar Perda sebanyak 1.782 kasus. Meskipun demikian, Satpol PP Kota Pekalongan terus berusaha melakukan penyelesaian atas pelanggaran Perda yang terjadi. Hal ini dibuktikan dengan persentase penyelesaian atas pelanggaran Perda yang berada diatas 90 persen mulai tahun 2016 sampai dengan 2020.

Tabel 2.76 Penyelesaian Pelanggaran Perda di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Pelanggaran Perda	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persentase
2016	1.337	1.217	91,02
2017	2.003	1.883	94,01
2018	1.552	1.475	95,04
2019	1.382	1.363	98,63
2020	1.782	1.759	98,71

Sumber : Satpol PP Kota Pekalongan, 2021

b. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Kamtramtibum

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kamtramtibum merupakan salah satu alternatif upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan kurangnya jumlah personil aparat pengamanan. Upaya pemberdayaan yang dilakukan antara lain melalui perekrutan Linmas dan pemantauan terhadap keberadaan Pos Siskamling. Rasio jumlah Linmas per 10.000 Penduduk (Ton Inti) menunjukkan rasio yang fluktuatif, dimana rasio pada tahun 2016 adalah 48,36 atau 1.447 personil dan pada tahun 2020 turun menjadi 47,27 atau 1.452 personil.

Untuk jumlah Linmas Kecamatan dan Kelurahan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2016 dengan rasio sebesar 1,04 atau 31 personil. Kemudian pada tahun 2020 terjadi peningkatan rasio sebesar 1,14 atau 35 personil per 10.000 penduduk.

Tabel 2.77 Rasio Jumlah Linmas (Ton Inti) dan Linmas (Kecamatan dan Kelurahan) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Linmas (Ton Inti)	Rasio	Jumlah Penduduk	Jumlah Linmas (Kec. dan Kel.)	Rasio
2016	1.447	48,36	299.222	31	1,04
2017	1.533	50,78	301.870	35	1,16
2018	1.417	46,54	304.477	35	1,15
2019	1.708	55,62	307.097	35	1,14
2020	1.452	47,27	307.150	35	1,14

Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka 2021, 2021

Sementara itu jumlah pos siskamling bisa dikatakan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 berjumlah 432 pos siskamling, meningkat menjadi 514 pada tahun 2017 dan 2018. Namun pada tahun 2019 dan 2020 berkurang menjadi 441 pos.

**Tabel 2.75 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan
di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020**

Tahun	Jml Pos Siskamling	Jml Kelurahan	Rasio
2016	432	27	16
2017	514	27	19
2018	514	27	19
2019	441	27	16
2020	441	27	16

Sumber : Satpol PP Kota Pekalongan, 2021

6. Sosial

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti sumber daya ekonomi dan teknologi.

a. Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), salah satunya dikaitkan dengan panti asuhan. Kepemilikan panti ini dapat oleh pemerintah daerah maupun swasta. Jumlah Panti Asuhan pada tahun 2020 adalah 20 panti, bertambah 12 Panti dibandingkan tahun 2019. Namun untuk jumlah anak yang diasuh juga lebih banyak dibandingkan tahun 2019. Secara lengkap jumlah Panti Asuhan dan jumlah anak yang diasuh selama 5 tahun terakhir (2016-2020) disajikan dalam Tabel 2.78 berikut.

**Tabel 2.78 Jumlah Panti Asuhan dan Anak yang Diasuh
di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020**

Tahun	Jumlah Panti Asuhan	Jumlah Anak yang Diasuh
2016	9	260
2017	7	237
2018	7	545
2019	8	354
2020	20	1.052

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2021

b. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang dimaksud kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan istilah yang dipakai untuk orang-orang yang memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial untuk hidup layak. Pada tahun 2020 jumlah PMKS adalah 27.499 jiwa, dengan jumlah tertinggi adalah fakir miskin sebesar 22.683 jiwa. Data selengkapnya selama 5 tahun terakhir (tahun 2016-2020) disajikan dalam Tabel 2.79 berikut.

**Tabel 2.79 Kategori dan Jumlah PMKS
di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020**

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Generasi Muda Penyandang Masalah Kesra	-	-	-	-	-
Keluarga Penyandang Sosial Psikologi	-	-	-	-	-
Anak Terlantar/Gelandangan	254	105	12	3	-
Usia Lanjut/Jompo/Terlantar	942	337	21	164	145
Wanita Rawan Sosial	865	361	827	-	8
Keluarga yang Kondisi/ Perumahan, Lingkungan Tidak Layak	4.545	-	-	-	-
Anak Nakal	51	69	50	-	98
Korban Penyalahgunaan Narkoba	74	67	6	2	-
Penyandang Cacat :	966	1.142	343	535	1.354
- Tubuh	297	316	110	357	234
- Netra	170	174	58	103	107
- Mental	328	449	132	-	429
- Ganda	30	56	12	-	484
- Wicara	141	147	31	75	100
Bekas Penyandang Penyakit Kronis	-	542	-	-	-
Gelandangan	-	16	-	-	3
Tuna Susila	-	-	-	-	-
Waria	-	-	-	-	-
Bekas Narapidana	-	87	30	3	1
Bencana Alam	-	-	2.623	-	3107
Fakir Miskin	115.796	75.839	63.829	24.116	22.683
Jumlah	124.459	79.707	67.741	24.823	27.499

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2021

Penanganan PMKS di Kota Pekalongan juga melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Jumlah partisipasi masyarakat dalam bentuk organisasi/yayasan sampai dengan tahun 2020 untuk organisasi sosial berjumlah 20 organisasi, karang taruna berjumlah 32 organisasi, WKKS sebanyak 5 orang dan jumlah PSM sebanyak 63 orang. Selanjutnya disajikan dalam Tabel 2.80 berikut.

Tabel 2.80 Jumlah PSKS di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Perintis / Pejuang Kemerdekaan	0	0	9	6	0
Wanita Kader Kepemimpinan Sosial	87	87	5	5	5
Pekerja Sosial Masyarakat	288	288	88	53	63
Karang Taruna	27	32	91	32	32
Organisasi Sosial	8	7	7	9	20

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2021

Keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh program-program yang tepat inovatif, tetapi juga harus didukung dengan kriteria kemiskinan yang jelas, serta data yang akurat dan *up to date*. Untuk mendapatkan

data yang *up to date* tersebut, perlu dilakukan verifikasi dan validasi secara berkala sesuai dengan jenis programnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial dengan didukung oleh Pemerintah Daerah mendapatkan mandat untuk merumuskan kebijakan tentang verifikasi, validasi data dan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berbasis teknologi informasi melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan *Social Next Generation* (SIKS-NG). Selanjutnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah diverifikasi dan divalidasi tersebut ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai data terpadu yang dapat dipergunakan dalam menjalankan program penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ini memuat informasi status sosial ekonomi rumah tangga 40 persen terendah, keluarga dan individu yang meliputi data demografi, pendidikan, kesehatan, perumahan, kepemilikan aset dan kepesertaan program bantuan sosial/subsidi.

Berikut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pekalongan selama Tahun 2019-2020.

Tabel 2.81 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan DTKS di Kota Pekalongan Tahun 2019-2020

Tahun	Rumah Tangga Sasaran	Anggota Rumah Tangga Sasaran
2019	29.618	112.613
2020	29.282	108.436

Sumber : Dinas Sosial P2KB Kota Pekalongan, 2021

Dari Tabel 2.81 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan Rumah Tangga Sasaran sebanyak 336 RTS jika dibandingkan dengan tahun 2019 menjadi 29.282 RTS dan penurunan Anggota Rumah Tangga Sasaran dari 112.613 jiwa pada tahun 2019 menjadi 108.436 jiwa pada tahun 2020. Penurunan ini terjadi dikarenakan adanya intervensi penanggulangan kemiskinan yaitu melalui program pengurangan beban pengeluaran, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat, pengembangan keberlanjutan UMKM dan adanya sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dengan lintas program dan lintas sektor.

Menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generations* (SIKS-NG), jumlah rumah tangga miskin di Kota Pekalongan tahun 2019 sebanyak 33.282 rumah tangga, terdiri dari desil 1 sebanyak 20.807 rumah tangga, desil 2 sebanyak 6.246 rumah tangga, desil 3 sebanyak 1.583 rumah tangga, desil 4 sebanyak 1.299 rumah tangga, desil 4+ sebanyak 1.335 rumah tangga, dan tanpa desil sebanyak 2.012 rumah tangga.

2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Ketenagakerjaan

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan persentase angkatan kerja usia 15 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke

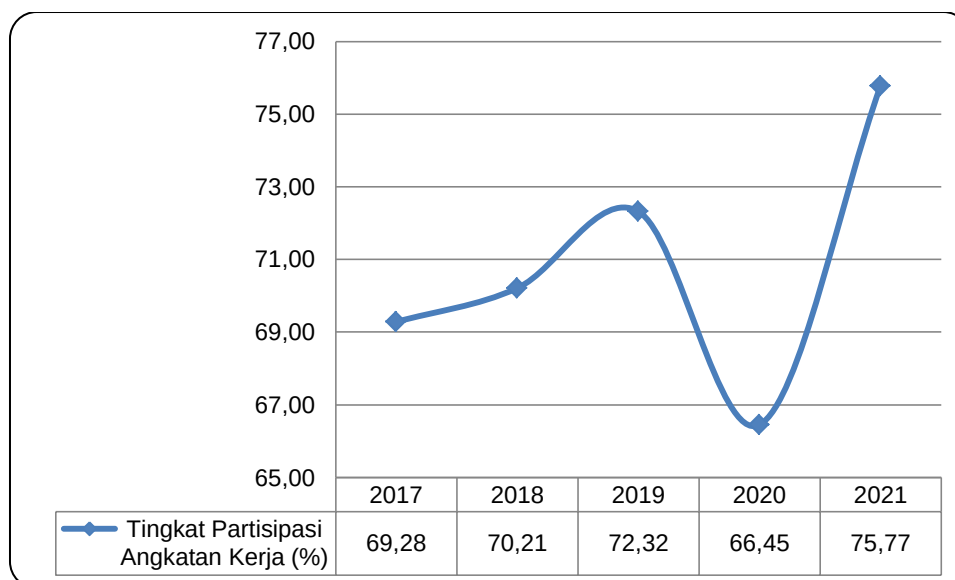
atas). Angkatan Kerja di Kota Pekalongan pada kurun waktu 2017 s.d. Agustus 2021 berfluktuasi, pada tahun 2020 menurun menjadi 157.260 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.82 berikut.

Tabel 2.82 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekalongan Tahun 2017 – Agustus 2021

No	Tahun	Jumlah Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)
1	2017	157.445	69,28
2	2018	161.502	70,21
3	2019	168.339	72,32
4	2020	157.260	66,45
5	s.d Agustus 2021	n/a	75,77

Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka 2021 dan www.jateng.bps.go.id, 2021

Pada tahun 2017 sampai tahun 2021 tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Pekalongan cenderung meningkat dari 69,28 persen di tahun 2017 menjadi 72,32 persen di tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 66,45 persen dan meningkat kembali pada Agustus 2021 menjadi 75,77 persen. Penduduk Usia Kerja (PUK) atau penduduk yang berusia 15 tahun ke atas pada tahun 2019 tercatat sekitar 236.675 orang. Persentase angkatan kerja menurun dari 72,32 persen menjadi 66,45 persen atau turun 5,87 poin pada tahun 2020, hal ini menunjukkan bahwa rasio jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja (15 tahun ke atas) menurun.



Gambar 2.36 Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2021

b. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan

melalui perundingan bipartit, dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Bila mediasi dan konsiliasi gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Sepanjang lima tahun terakhir mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, jumlah sengketa antara pengusaha dan pekerja tergolong tidak banyak, masih di bawah 30 (tiga puluh) kasus dari sekitar 300 perusahaan. Meskipun jumlah dan persentase sengketa masih berfluktuasi untuk itu persengketaan ini harus tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.83 berikut.

Tabel 2.83 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Sengketa	Jumlah Perusahaan	Persentase Sengketa
2016	11	368	2,99
2017	13	382	3,40
2018	13	365	3,60
2019	11	369	2,98
2020	28	484	5,79

Sumber : Dinperinaker Kota Pekalongan, 2021

c. Pencari Kerja yang Ditempatkan (Persentase)

Secara umum, kondisi ketenagakerjaan dapat dilihat melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dimana pada tahun 2020 sebesar 66,45 persen. Pencari kerja ada yang ditempatkan melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Sepanjang lima tahun terakhir jumlah AKL dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif dan berakhir tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2019, begitu juga dengan AKAD dan AKAN memiliki nilai yang berfluktuasi. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.84 berikut.

Tabel 2.84 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2016 – 2020

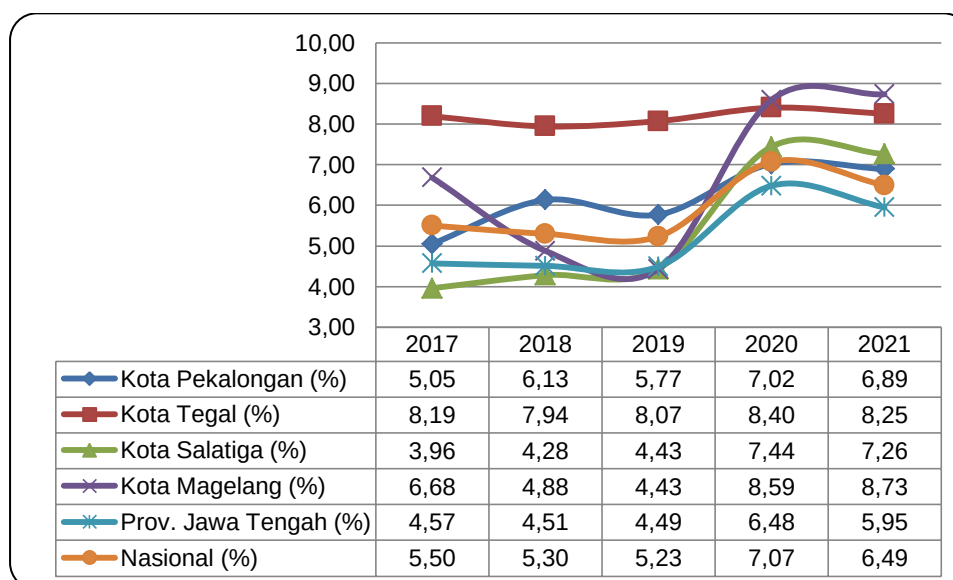
Tahun	Pencari Kerja Yang Ditempatkan		
	Antar Kerja Lokal (AKL)	Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
2016	58	3	20
2017	104	33	200
2018	180	21	103
2019	184	4	111
2020	3	0	24

Sumber : Dinperinaker Kota Pekalongan, 2021

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan angka persentase jumlah penganggur pada usia kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekalongan Agustus tahun 2021 sebesar 6,89 persen atau menurun 0,13 poin dari tahun 2020, artinya, pada setiap 100 orang yang termasuk angkatan kerja, maka ada 7 orang yang benar-benar menganggur.

Nilai TPT mengalami kenaikan yang disebabkan terjadinya pandemi COVID-19 menyebabkan banyak tempat usaha gulung tikar. Sedangkan faktor yang menyebabkan TPT tidak bisa turun signifikan antara lain beberapa musibah seperti kebakaran pasar Banjarsari dan bencana banjir rob yang menggenangi wilayah industri di Kota Pekalongan yang berdampak pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri.



Gambar 2.37 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2017- Agustus 2021

Sumber : www.bps.go.id (diolah), 2021

Pada tahun 2017 TPT Kota Pekalongan melampaui TPT Provinsi Jawa Tengah bahkan pada tahun 2021 melampaui TPT Jawa Tengah dan Nasional. Artinya, jumlah pengangguran di Kota Pekalongan semakin meningkat. Jika dibandingkan dengan Kota Tegal, TPT Kota Pekalongan masih lebih rendah dari Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang.

e. Keselamatan dan Perlindungan

Sebagai salah satu alat kepentingan pegawai dan perusahaan, penerapan K3 di lingkungan perusahaan menciptakan budaya kerja dan keselamatan bagi tercapainya kenyamanan bekerja. Dalam kurun waktu tahun 2016 sampai 2020 terjadi peningkatan penerapan K3 perusahaan di Kota Pekalongan, mulai dari 300 perusahaan di tahun 2016 hingga meningkat menjadi 410 perusahaan yang menerapkan K3 di tahun 2018, namun sangat menurun di tahun 2019 menjadi 319 perusahaan dan 360 perusahaan di tahun 2020. Jika dilihat dari sisi persentase akan terlihat fluktuatif dan puncaknya pada tahun 2017 sebesar 96,86 persen. Fluktuasi ini dikarenakan jumlah perusahaan yang juga fluktuatif. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.85 berikut.

Tabel 2.85 Persentase Perusahaan Menerapkan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Perusahaan Menerapkan K3	Jumlah Perusahaan di Wilayah Kab/kota	Persentase
2016	300	368	81,52
2017	370	382	96,86

Tahun	Jumlah Perusahaan Menerapkan K3	Jumlah Perusahaan di Wilayah Kab/kota	Persentase
2018	410	425	96,47
2019	319	376	84,84
2020	360	416	86,54

Sumber : Diperinaker Kota Pekalongan, 2021

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Persentase Partisipasi Perempuan Bekerja di Lembaga Pemerintah

Indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah indikator yang diukur dengan membandingkan jumlah ASN perempuan Pemerintah Kota Pekalongan tahun N dengan seluruh pekerja perempuan (ASN perempuan dan pekerja perempuan di perusahaan formal) Tahun N. Tahun 2019 ASN perempuan di Pemerintah Kota Pekalongan sejumlah 1.616 orang, sedangkan jumlah pekerja perempuan sebanyak 66.690 orang.

Tabel 2.86 Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

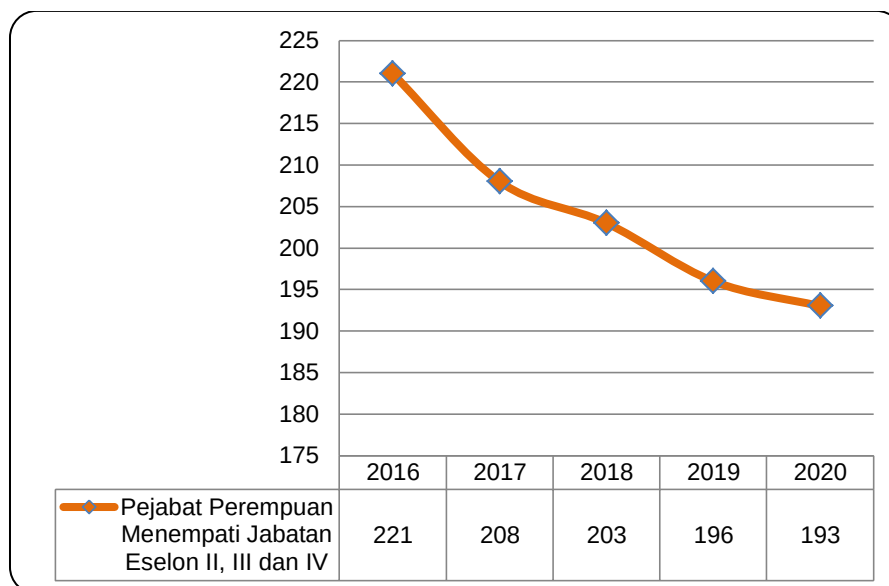
URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah (org)	2.007	1.621	1.540	2.322	1.616
Jumlah pekerja perempuan (org)	56.536	9.799	9.870	45.571	66.690
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (persen)	3,55	16,54	15,60	5,10	2,42

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2021, 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah berkurang, semula 2.322 orang pada tahun 2019 menjadi 1.616 orang pada tahun 2020.

b. Partisipasi Perempuan dalam Jabatan Struktural ASN

Partisipasi perempuan dalam jabatan eselon II, III, dan IV di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2016-2020 terus menurun. Pada tahun 2016 pejabat perempuan yang menduduki eselon II, III dan IV dibandingkan seluruh jabatan yang terisi sebesar 208 orang. Jumlah tersebut terus menurun sampai pada jumlah 193 orang di tahun 2020. Data selengkapnya disajikan dalam Gambar 2.38 berikut.

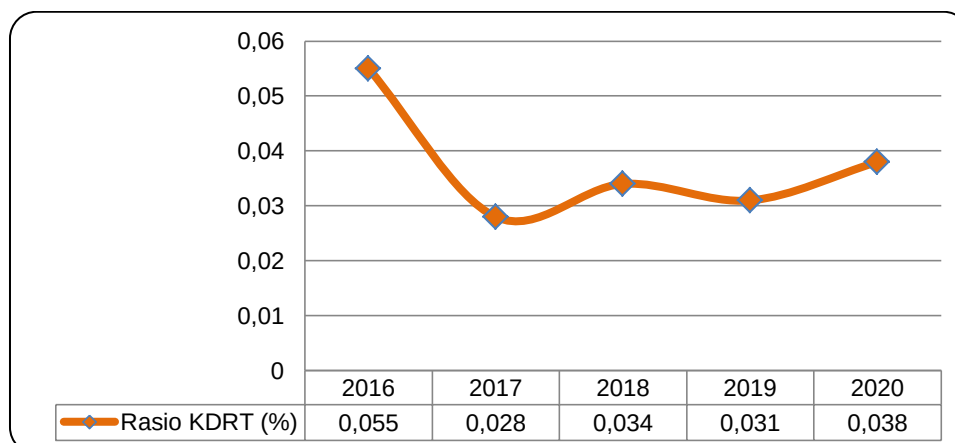


Gambar 2.38 Jumlah Perempuan Dalam Jabatan ASN di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021 (diolah), 2021

c. Rasio KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Rasio KDRT menunjukkan persentase kasus KDRT dibandingkan dengan jumlah rumah tangga. Selama kurun waktu 2016-2020 rasio KDRT mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Semakin kecil rasio KDRT menunjukkan indikasi yang semakin baik. Rasio KDRT terendah terjadi pada tahun 2019 dengan angka rasio 0,031 persen.



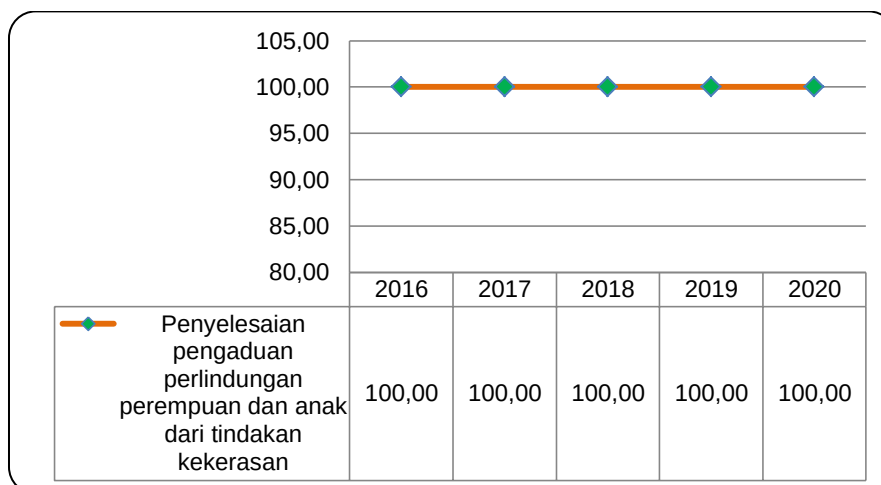
Gambar 2.39 Perkembangan Rasio KDRT di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2021

d. Penyelesaian Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Pekalongan telah menunjukkan prestasi yang baik. Sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 seluruh kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak dapat diselesaikan. Salah satu faktor keberhasilan atas prestasi tersebut dikarenakan adanya Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-

PAR) dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA).



Gambar 2.40 Perkembangan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2021

e. Kota Layak Anak

Kota Layak Anak (KLA) didefinisikan sebagai Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Ada 24 indikator yang mampu mewakili terpenuhinya hak-hak anak sehingga dapat dikatakan menuju kabupaten/kota layak anak yang terdiri dari 5 kluster, yaitu : (1) hak sipil dan kebebasan; (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif/pengganti; (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; (5) perlindungan khusus.

Pada tahun 2018, Kota Pekalongan meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori Pratama dengan nilai 565 dari nilai maksimal 1000. Upaya terus ditingkatkan, salah satunya adalah fokus pada sarana dan prasarana mengenai informasi layak anak seperti baliho, dan sebagainya. Upaya lain juga dilakukan untuk memenuhi indikator dan klaster KLA. Hasilnya, pada tahun 2019 Kota Pekalongan kembali meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori Madya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan berupaya serius untuk mengejar peringkat Nindya sebagai Kota Layak Anak (KLA) tingkat nasional. Komitmen ini dibuktikan dengan dibukanya layanan Unit Pelaksana Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (UP PKSAI) yang akan bertugas melakukan penjangkauan kepada anak-anak rentan di Kota Pekalongan. Dengan berdirinya UP PKSAI ini diharapkan dapat semakin memudahkan pemerintah membangun mekanisme layanan terpadu bagi anak di tingkat masyarakat.

3. Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu : (a) ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan pangan, (b)

Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan, informasi; (c) Konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan; serta (d) keamanan pangan melalui sanitasi, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan.

Tabel 2.87 Rasio Ketersediaan Pangan Utama Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Ketersediaan Pangan Utama Per tahun	Jumlah Penduduk	Persentase
2016	6.855.003	299.222	22,91
2017	7.382.286	301.870	24,46
2018	5.860.781	304.477	19,25
2019	5.400.416	307.097	17,59
2020	4.769.190	307.150	15,53

Sumber : Dinperpa Kota Pekalongan, 2021

Ketersediaan pangan pada satu wilayah ditunjukkan dengan rasio ketersediaan pangan utama. Pada Tabel 2.87 dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2016-2017 ketersediaan pangan utama mengalami kecenderungan naik, dari 6.855.003 di tahun 2016 menjadi 7.382.286 di tahun 2017. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup tajam menjadi 5.860.781 dan pada tahun 2019 dan 2020 lebih menurun lagi menjadi 5.400.416 dan 4.769.190. Secara otomatis persentase ketersediaan pangan juga sebanding dengan fluktuasi ketersediaan pangan, yaitu meningkat pada tahun 2016-2017 dan semakin menurun pada tahun 2018-2020.

Pola Pangan Harapan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa (Depkes RI, 2005). Kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Pekalongan dari tahun 2016-2020 yang ditunjukkan dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH), merupakan salah satu indikator keberhasilan ketahanan pangan di Kota Pekalongan dari aspek konsumsi.

Skor PPH selama lima tahun terakhir terus membaik. Skor PPH Kota Pekalongan menunjukkan perkembangan yang semakin membaik pada tahun 2016-2020. Jika skor PPH tahun 2016 sebesar 88,70 maka pada tahun 2020 semakin naik menjadi 92,01. Capaian skor PPH disajikan dalam Tabel 2.88 berikut.

Tabel 2.88 Skor PPH Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Skor PPH Kota Pekalongan
2016	88,70
2017	89,71
2018	90,42
2019	91,31
2020	92,01

Sumber : Dinperpa Kota Pekalongan, 2021

Berdasarkan pengelompokan menurut jenis bahan pangan, menunjukkan bahwa konsumsi beras di Kota Pekalongan menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun dan pada tahun 2020 sebesar 108,7 kg per kapita/tahun. Begitu pula dengan sayur dan buah bisa dikatakan cukup tinggi jika dibandingkan dengan kelompok

pangan lainnya, yaitu 82,2 kg per kapita/tahun pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 70,0 kg per kapita/tahun pada tahun 2020. Di urutan ketiga ditempati kelompok pangan hewani (45 kg/kapita/tahun tahun 2019) dan menurun menjadi 36,8 kg perkapita/tahun pada tahun 2020, selanjutnya diikuti dengan kacang-kacangan, umbi-umbian dan kelompok pangan lainnya. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.89 berikut.

Tabel 2.89 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Capaian Konsumsi Kelompok Pangan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Padi-padian	Kg/Kap/th	101,5	107,0	98,8	102,0	108,7
Umbi-umbian	Kg/Kap/th	16,0	16,5	16,5	18,8	7,9
Pangan Hewani	Kg/Kap/th	38,3	40,2	47,0	45,0	36,8
Minyak dan Lemak	Kg/Kap/th	17,2	12,2	11,8	5,7	6,6
Buah/biji berminyak	Kg/Kap/th	3,5	2,6	2,8	2,3	0,8
Kacang-kacangan	Kg/Kap/th	13,8	19,0	18,0	23,5	8,4
Gula	Kg/Kap/th	9,5	10,0	9,5	5,9	7,7
Sayur & Buah	Kg/Kap/th	78,4	74,1	73,8	82,2	70,0
lain-lain	Kg/Kap/th	2,8	1,3	1,4	2,3	44,1

Sumber : Dinperpa Kota Pekalongan, 2021

Dari segi konsumsi energi yang diukur dari kilo kalori (kkal) per kapita/tahun, konsumsi beras selalu menempati posisi pertama dengan jumlah 1.006,1 kkal/kapita/tahun pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 1.251,5 kkal/kapita/tahun pada tahun 2020. Urutan berikutnya selalu berubah jenis kelompok pangannya. Pada tahun 2020, di urutan kedua ada pangan hewani sebesar 272,5 kkal/kapita/tahun, diikuti oleh minyak dan lemak sebanyak 160,7 kkal/kapita/tahun. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.90 berikut.

Tabel 2.90 Konsumsi Energi Per Kapita/tahun di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Capaian Konsumsi Kelompok Pangan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Padi-padian	Kkal/Kg/Kap/th	1.000,8	1.055,0	974,9	1.006,1	1251,5
Umbi-umbian	Kkal/Kg/Kap/th	48,0	49,5	49,6	56,3	24,7
Pangan Hewani	Kkal/Kg/Kap/th	217,2	228,1	266,7	255,4	272,5
Minyak dan Lemak	Kkal/Kg/Kap/th	410,7	289,8	280,1	136,8	160,7
Buah/biji berminyak	Kkal/Kg/Kap/th	60,2	45,3	49,1	40,6	12,7
Kacang-kacangan	Kkal/Kg/Kap/th	124,9	172,1	163,4	213,2	53,8
Gula	Kkal/Kg/Kap/th	94,9	99,8	94,7	58,7	77,5
Sayur dan Buah	Kkal/Kg/Kap/th	111,4	105,3	104,9	116,8	97,3
Lain-lain	Kkal/Kg/Kap/th	22,6	10,3	11,1	18,5	56,1

Sumber : Dinperpa Kota Pekalongan, 2021

4. Pertanian

Dalam era otonomi daerah saat ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 9 urusan pertanian yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kota.

Kesembilan urusan tersebut adalah Izin Lokasi, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pelayanan Umum, Sengketa Tanah Garapan, Ganti Rugi, Penetapan Subyek Obyek Redistribusi tanah, tanah ulayat, pemanfaatan tanah kosong, izin membuka tanah, dan penggunaan tanah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pertanahan kabupaten/kota hanya meliputi 8 sub urusan yaitu izin lokasi; sengketa tanah garapan; ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; tanah ulayat; tanah kosong; izin membuka tanah; serta penggunaan tanah.

Pelayanan umum kepada masyarakat di urusan pertanahan, bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Beberapa hal yang dilakukan antara lain dengan memberikan insentif kepada masyarakat dalam rangka mempertahankan lahan pertanian, serta memberikan sertifikat tanah masyarakat yang berada di kawasan lindung dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

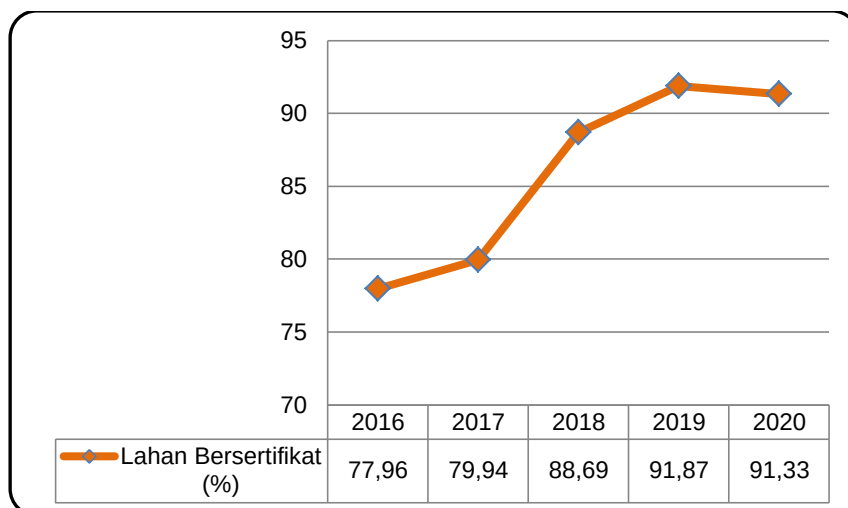
Perkembangan kepemilikan sertifikat tanah di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan. Secara lengkap tanah bersertifikat di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.91 berikut.

Tabel 2.91 Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Luas wilayah	4.525	4.525	4.525	4.525	4.642
Luas tanah bersertifikat	3.690,93	3.778,43	4.013,28	4.157,29	4.239,50
Hak Milik	2.939,78	3.013,55	3.192,36	3.320,74	3.360,02
HGB	289,49	293,52	305,94	13,21	322,95
Hak Guna Usaha	5,76	6,76	6,76	6,76	6,76
Hak Pakai	394,95	403,04	444,70	451,53	481,01
Hak Pengelolaan	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00
Hak Wakaf	56,96	58,57	60,5396	62,06	63,76
Lahan Bersertifikat (persen)	77,96	79,94	88,69	91,87	91,33

Sumber : BPN Kota Pekalongan (diolah), 2021

Kinerja persertifikatan bidang tanah di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 luas lahan bersertifikat adalah 77,96 persen, dalam kurun waktu tahun 2016-2019 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, semakin meningkatnya persentase tersebut dapat juga menandakan kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat, khususnya terhadap pertanahan. namun pada tahun 2020 jumlah lahan di Kota Pekalongan yang sudah bersertifikat menurun sebanyak 91,33 persen dikarenakan adanya koreksi total luas lahan Kota Pekalongan.

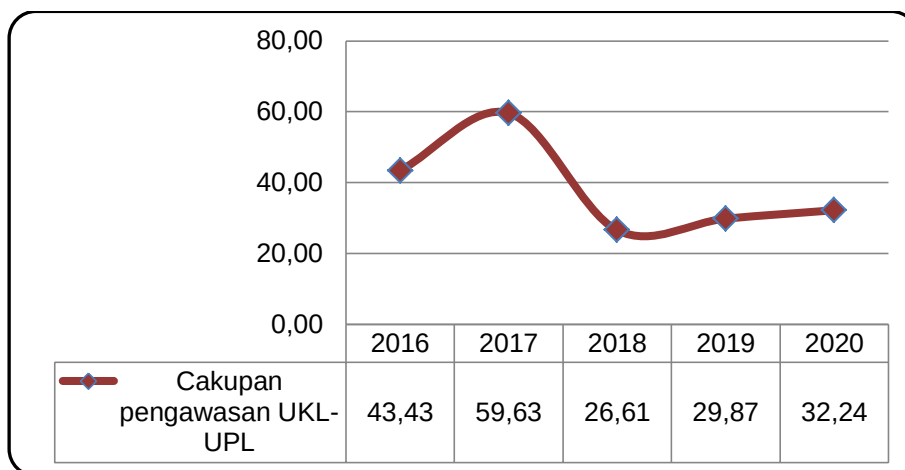


Gambar 2.41 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : BPN Kota Pekalongan (diolah), 2021

5. Lingkungan Hidup

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) merupakan upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.



Gambar 2.42 Cakupan Pengawasan Pelaksanaan UKL-UPL Tahun 2016 – 2020

Sumber : DLH Kota Pekalongan, 2021

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL menunjukkan persentase perusahaan wajib UKL dan UPL yang diawasi dibandingkan dengan jumlah seluruh perusahaan wajib UKL dan UPL. Selama kurun waktu tahun 2016-2020, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UPL dan UKL mengalami pasang surut sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.42.

Pada tahun 2016 cakupan pengawasan terhadap UKL-UPL sebesar 43,43 persen. Pada akhir tahun 2017, pengawasan UPL-UKL mengalami kenaikan menjadi

59,63 persen. pada tahun 2018 dan 2019 terus mengalami penurunan masing-masing menjadi 26,61 persen dan 29,87 persen. Dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu sebesar 32,24 persen.

Peningkatan jumlah pemilik dokumen lingkungan (UKL/UPL dan amdal) seiring dengan peningkatan jumlah usaha di Kota Pekalongan. Peningkatan ini juga didorong oleh perijinan usaha yang mempersyaratkan disusunnya dokumen pengelolaan lingkungan baik berupa UKL/UPL maupun amdal bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan (UKL/UPL dan amdal) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tingkat pelaporan monitoring UKL/UPL dan amdal juga cenderung meningkat, hal ini menunjukkan naiknya tingkat kesadaran pengusaha dalam pengelolaan lingkungan. Perlu ada upaya lebih untuk meningkatkan kesadaran pelaporan diantaranya dengan melakukan pengawasan dan pemberian insentif /disinsentif bagi usaha dan/atau kegiatan yang menaati tertib hukum lingkungan. Persentase tertib hukum lingkungan di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.91 berikut.

Tabel 2.92 Persentase Tertib Hukum Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Usaha yang melaporkan UKL-UPL/AMDAL	4	5	6	8	12
Jumlah UKL-UPL/AMDAL	99	109	124	154	158
Persentase Tertib Hukum Lingkungan	4,04	4,59	4,84	5,19	7,59

Sumber : DLH Kota Pekalongan, 2021

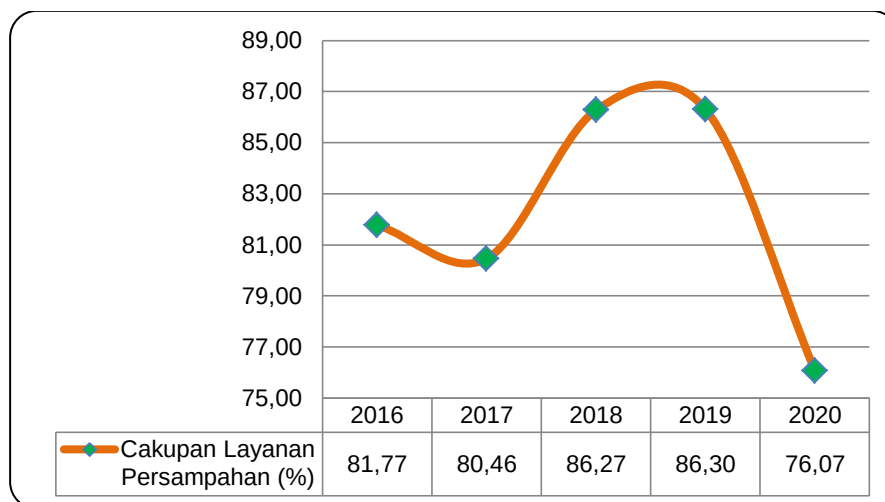
Sebagai salah satu kota pantai dan penghasil batik, Pemerintah Kota Pekalongan berkomitmen untuk melestarikan lingkungan hidup di Kota Pekalongan. Komitmen itu antara lain dengan membangun instalasi IPAL baik untuk kebutuhan industri batik, industri tempe maupun industri peternakan. Hal ini diperlukan dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan industri rumah tangga. Industri yang semakin bertumbuh dari tahun 2016-2020 diikuti dengan volume pengelolaan limbah yang semakin baik.

Tabel 2.93 Perkembangan Pemanfaatan IPAL Komunal di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

IPAL	2016		2017		2018		2019		2020	
	Jumlah Industri	Limbah (m ³)	Jumlah Industri	Limbah (m ³)	Jumlah Industri	Limbah (m ³)	Jumlah Industri	Limbah (m ³)	Jumlah Industri	Limbah (m ³)
Kauman	29	100	26	100	29	120	20	150	20	125
Jenggot	75	400	75	400	102	700	80	700	80	600
Industri Kecil	83	425	83	426	83	426	83	426	73	426
IPAL Bersama	3	500	3	500	3	500	3	500	2	700
Industri Besar	5	700	5	700	5	700	5	900	3	500
IPAL Biogas Duwet	125	160	28	90	125	120	125	120	30	70
IPAL Biogas Ternak	7	210	7	210	7	210	7	75	-	-
IPAL Pringrejo	-	-	-	-	70	180	20	50	25	60
IPAL Banyurip	-	-	-	-	-	-	69	150	55	125
JUMLAH	327	2.495	227	2.426	424	2.956	412	3.071	288	2.606

Sumber : DLH Kota Pekalongan, 2021

Cakupan pelayanan persampahan merupakan persentase wilayah yang terlayani persampahan dibandingkan dengan luas wilayah Kota Pekalongan. Cakupan pelayanan persampahan Kota Pekalongan selama kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung turun seperti disajikan dalam Gambar 2.43.



Gambar 2.43 Cakupan Layanan Persampahan Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Sumber : DLH Kota Pekalongan, 2021

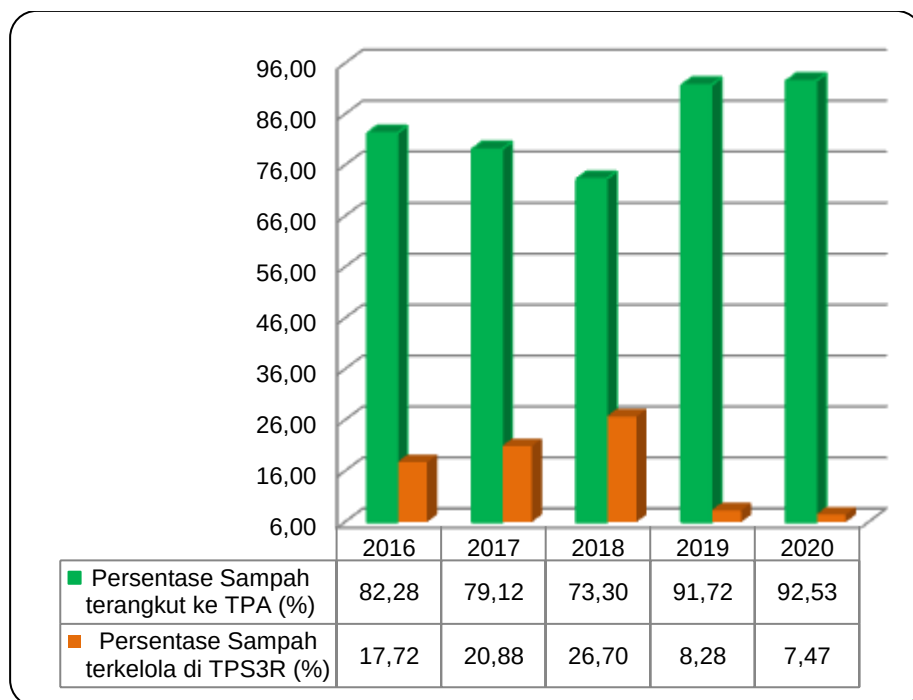
Jumlah sampah Kota Pekalongan setiap tahun dari tahun 2016 - 2020 terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk selama tahun 2016-2020. Pengelolaan sampah menggunakan TPS3R selama tahun 2016-2020 pengelolannya setiap hari semakin menurun.

Tabel 2.94 Penanganan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Data Sampah per Hari	2016		2017		2018		2019		2020	
	(m ³)	%	(m ³)	%	(m ³)	%	(m ³)	%	(m ³)	%
Timbulan sampah										
Sampah terangkut ke TPA	650	82,28	530	79,12	271,87	73,30	353,93	91,72	382,19	92,53
Sampah terkelola di TPS3R, bank sampah dan sodaqoh sampah	140	17,72	140	20,88	99	26,70	31,97	8,28	30,87	7,47
Jml Sampah tertangani (m3)	790	95,40	670	100	370,87	54,48	385,91	86,30	413,06	76,07

Sumber : DLH Kota Pekalongan, 2021

TPA di Kota Pekalongan beroperasi pada tahun 1994. Lokasi TPA tersebut berada di Kelurahan Degayu. Luas TPA tersebut adalah 5,8 Ha dengan desain umur TPA 15 tahun. Pengoperasian TPA Degayu tersebut merupakan control *landfill*. Jarak TPA terhadap permukiman adalah 0,3 km. Adapun jarak TPA terhadap pusat Kota adalah 5 km dan jarak ke badan air terdekat adalah 0,1 km.



Gambar 2.44 Persentase Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Sumber : DLH Kota Pekalongan, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah sampah Kota Pekalongan setiap tahun dari tahun 2016–2020 terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk selama tahun 2016–2020. Pengelolaan sampah menggunakan TPS3R, bank sampah dan kegiatan sdaqoh sampah selama tahun 2016–2020 pengelolaannya setiap hari semakin menurun. Hal ini disebabkan menurunnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah.

Baik dan buruknya lingkungan hidup diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan salah satu indikator kinerja dalam pengelolaan lingkungan di Kota Pekalongan. Dalam melakukan perhitungan IKLH menggunakan tiga komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL). Dari perhitungan tersebut didapatkan hasil IKLH Kota Pekalongan pada tahun 2017-2020 yang disajikan dalam Tabel 2.95 berikut.

Tabel 2.95 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2017-2020

Tahun	IKA	IKU	IKTL	IKLH
2017	44,67	99,29	23,5	52,59
2018	46,00	98,82	23,5	52,85
2019	46,00	99,05	23,5	52,92
2020	35,33	79,96	23,6	50,84

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2021

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2017-2019 mengalami tren naik 0,165 setiap tahunnya, jika dilihat masing-masing komponen maka IKU merupakan komponen yang berkontribusi baik terhadap IKLH, sementara dua komponen lainnya yaitu IKA dan IKTL nilainya masih sangat rendah.

Sedangkan IKLH di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 50,84, kondisi ini dikarenakan terjadinya penurunan pada komposisi IKA dan IKU.

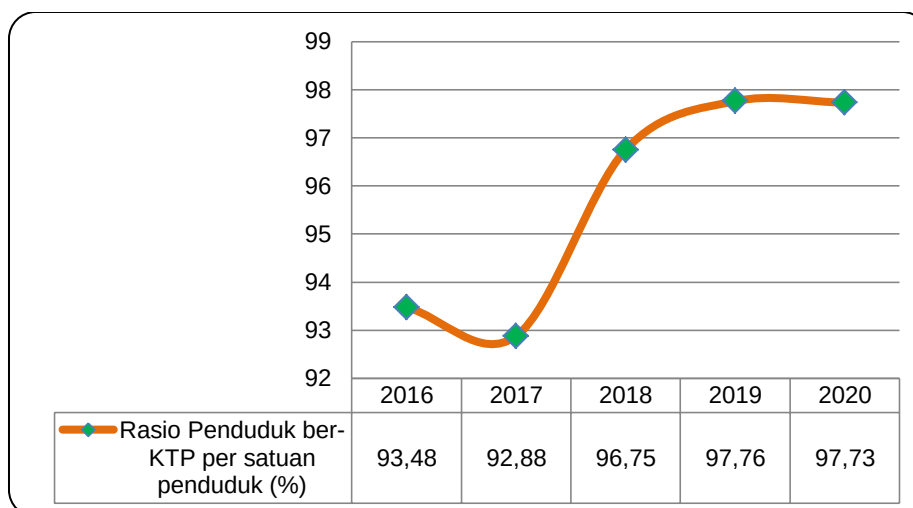
Rendahnya IKA di Kota Pekalongan disebabkan oleh beberapa parameter yang melebihi baku mutu air kelas II seperti BOD, COD, DO, dan Fecal Coliform. Parameter tersebut merupakan karakteristik dari limbah cair domestik yang bersumber dari pemukiman berupa grey water yang merupakan hasil dari cucian dapur, cucian pakaian dan kamar mandi, dan sekitar 60-85 persen dari total volume kebutuhan air bersih akan menjadi limbah cair domestik. Karakteristik dari limbah domestik (*grey water*) yaitu mengandung unsur nitrogen, fosfat, dan potasium, unsur tersebut merupakan nutrisi bagi tumbuhan yang akan menyebabkan eutrofikasi pada badan air. Tingginya kadar organik dalam perairan akan berdampak pada tingginya konsentrasi BOD, COD dan rendahnya konsentrasi DO. Adanya pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan merupakan salah satu potensi terhadap tingginya pencemaran air di Kota Pekalongan.

Sementara itu Indeks Tutupan Lahan (IKTL) di Kota Pekalongan dari tahun 2017-2019 masih sama dengan nilai IKTL yang sangat kecil. Kondisi ini dikarenakan di wilayah Kota Pekalongan lebih didominasi oleh pemukiman, sedangkan persentase tutupan lahannya masih sangat kurang. Sehingga perlu adanya upaya dalam memperbaiki kondisi tutupan lahan di Kota Pekalongan terutama di kawasan mangrove.

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Rasio Penduduk ber KTP

Sebagai salah satu sarana penting identitas nasional, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap penduduk wajib memiliki identitas diri termasuk akta kelahiran dan KTP nasional. Rasio kepemilikan KTP yang dimaksud adalah jumlah penduduk memiliki KTP dibagi jumlah penduduk di atas usia 17 tahun atau telah menikah.



Gambar 2.45 Rasio Kepemilikan KTP di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan, 2021

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga pada tahun 2020 telah melaksanakan perekaman KTP-el mencapai 227.268 jiwa (97,73 persen) dan

kepemilikan KTP-el telah mencapai 227.268 jiwa (97,76 persen) dari target wajib KTP-el sebesar 232.540 jiwa.

b. Persentase Penduduk ber-NIK

Sesuai dengan bunyi pasal 1 point 12 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK tersebut berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Dalam lima tahun terakhir (tahun 2016-2020), semua penduduk di Kota Pekalongan telah memiliki NIK sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.96 berikut.

Tabel 2.96 Persentase Penduduk ber-NIK di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

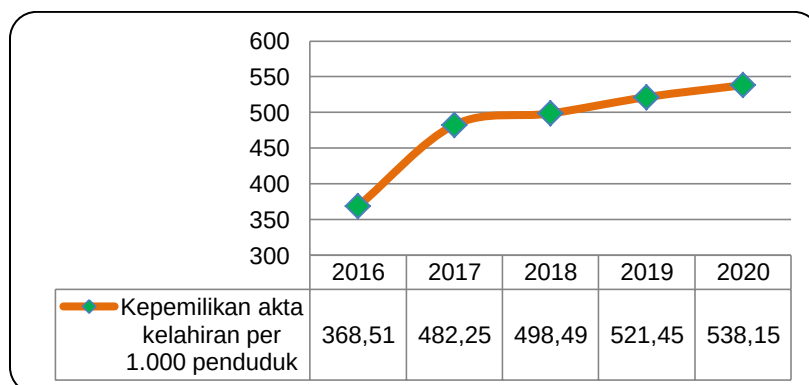
Tahun	Persentase Penduduk ber-NIK
2016	100
2017	100
2018	100
2019	100
2020	100

Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan, 2021

c. Persentase Penduduk Ber Akta Kelahiran

Sebagai salah satu syarat identitas diri bagi penduduk yang telah dilahirkan, maka Pemerintah Daerah mengeluarkan akta kelahiran bagi penduduknya. Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk ditunjukkan dengan membandingkan jumlah akta kelahiran dan jumlah penduduk dalam seribu penduduk.

Dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Kepemilikan akta kelahiran Kota Pekalongan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Secara lengkap kepemilikan akta kelahiran di Kota Pekalongan tahun 2016 sampai dengan 2020 disajikan dalam Gambar 2.46 berikut.



Gambar 2.46 Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan (diolah), 2021

d. Penerbitan Akta kematian

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian.

Dalam lima tahun terakhir, penerbitan akta kematian terus meningkat. Pada tahun 2016 telah diterbitkan sebanyak 1.133 akta, pada tahun 2017 diterbitkan sebanyak 1.473 akta. Setiap tahun terus bertambah hingga pada tahun 2020 diterbitkan sebanyak 3.220 akta sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.97 berikut.

**Tabel 2.97 Penerbitan Akta Kematian
di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020**

Tahun	Jumlah Akta Kematian
2016	1.133
2017	1.473
2018	2.691
2019	2.797
2020	3.220

Sumber : Dindikcapil Kota Pekalongan dan Kota Pekalongan dalam Angka 2021, 2021

e. Penerbitan Akta Nikah

Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan. Di Kota Pekalongan, akta nikah hanya diterbitkan bagi penduduk non Islam. Sepanjang lima tahun terakhir, akta nikah yang diterbitkan tidak banyak, sekitar 50-60 lembar per tahunnya.

**Tabel 2.98 Penerbitan Akta Nikah
di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020**

Tahun	Jumlah Akta Nikah
2016	62
2017	43
2018	60
2019	46
2020	45

Sumber : Dindikcapil Kota Pekalongan dan Kota Pekalongan dalam Angka 2021, 2021

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa.

Pada tahun 2010 di Kota Pekalongan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). Pembentukan lembaga tersebut untuk lebih meningkatkan peran masyarakat dalam aspek pelayanan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di kelurahan. LKK meliputi 6 unsur yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak PKK kelurahan, RT/RW, Karang Taruna, Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dilakukan dengan melibatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K). LPM pada tahun pertama dari periode 2013-2017 sebanyak 47 LPM. Jumlah ini berkurang menjadi 27 LPM pada tahun 2014 sampai sekarang dikarenakan penggabungan kelurahan dari 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan. Adapun jumlah LPM Kelurahan yang aktif di Kota Pekalongan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.99 berikut.

Tabel 2.99 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah LPM
2016	27
2017	27
2018	27
2019	27
2020	27

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2021

PKK sebagai salah satu penggerak pemberdayaan masyarakat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayahnya. PKK membantu pemerintah Kota Pekalongan memberdayakan peran ibu-ibu di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Jumlah PKK aktif mulai tahun 2016 sebanyak 32 PKK. Hal ini terjadi karena adanya penggabungan kelurahan di Kota Pekalongan dari 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan.

Tabel 2.100 PKK Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah PKK Aktif
2016	32
2017	32
2018	32
2019	32
2020	32

Sumber : DPMPPA Kota Pekalongan, 2021

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Posyandu juga berperan dalam membantu lansia untuk

meningkatkan kualitas hidupnya di masa tuanya. Hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan Posyandu kepada masyarakat selama kurun waktu Tahun 2016-2020 adalah meningkatkan peran dan fungsi Posyandu sebagai garda terdepan dalam menanggulangi kesehatan masyarakat yang bersifat preventif. Pada tahun 2020 terdapat tambahan 3 Posyandu dari 411 pada tahun 2019 menjadi 414 ditahun 2020. Data posyandu aktif di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.101 berikut.

**Tabel 2.101 Posyandu Aktif di Kota Pekalongan
Tahun 2016 – 2020**

Tahun	Jumlah Posyandu Aktif
2016	406
2017	407
2018	409
2019	411
2020	414

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan & BPS Kota Pekalongan, 2021

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor Keluarga Berencana (KB) Kota Pekalongan per 100 pasangan usia subur di Kota Pekalongan dari tahun 2016 - 2017 terus mengalami penurunan. Artinya, jumlah akseptor KB semakin berkurang. Namun pada tahun 2018 hingga 2020 kembali meningkat di diatas 27.000 orang. Perkembangan akseptor KB dari tahun 2016-2020 disajikan dalam Tabel 2.102 berikut.

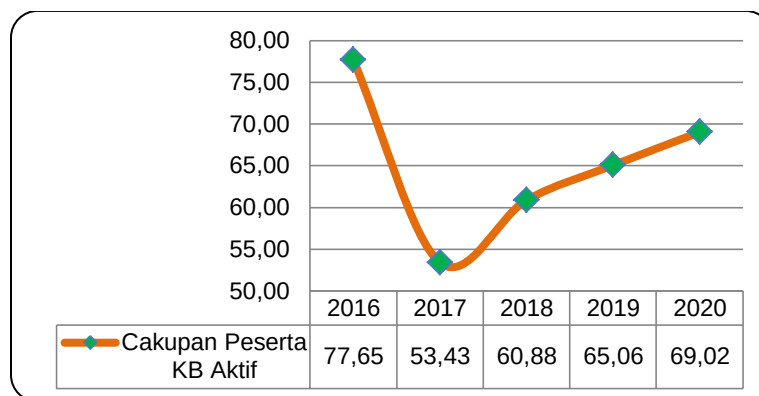
**Tabel 2.102 Rasio Akseptor KB per 100 Pasangan Usia Subur
di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020**

Tahun	Jumlah PUS	Jumlah Akseptor KB	Rasio
2016	45.805	35.570	77,65
2017	44.965	24.027	53,43
2018	44.851	27.306	60,88
2019	46.652	30.352	65,06
2020	45.836	31.636	69,02

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2021

b. Cakupan Peserta Aktif KB

Cakupan peserta aktif KB menunjukkan persentase jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan subur. Cakupan peserta KB Aktif dalam kurun waktu tahun 2016 sampai 2020 berfluktuatif sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.47 berikut.



Gambar 2.47 Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2021

c. Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Cakupan keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I Kota Pekalongan mengalami penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2020 persentase Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dibandingkan Jumlah Kepala Keluarga adalah 47,70 persen, menurun dari tahun 2019 sebesar 4,29 persen. Perkembangan Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dari tahun 2016-2020 disajikan dalam Tabel 2.103 berikut.

Tabel 2.103 Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persentase
1	2016	77.747	55.032	70,78
2	2017	77.575	46.478	59,91
3	2018	77.817	44.487	57,71
4	2019	80.653	41.938	51,99
5	2020	80.840	38.563	47,70

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2021

9. Perhubungan

a. Kepadatan Lalu Lintas

Sebagai kota yang menghubungkan Kota Jakarta dan Kota Surabaya, Kota Pekalongan memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur perhubungan. Lokasi yang strategis sebagai tempat istirahat membawa konsekuensi sebagai perlintasan di pantai Utara Pulau Jawa. Perlintasan pantai Utara yang berkembang, membawa konsekuensi semakin berkembangnya moda angkutan darat. Hal ini berdampak pada meningkatnya VC ratio yang semula sebesar 0,87 di tahun 2016, meningkat menjadi 0,88 di tahun 2017. Pada tahun 2018, VC ratio mengalami penurunan menjadi 0,39, dimana salah satu faktor penyebabnya adalah operasional jalan tol trans Jawa. Dengan adanya jalan tol yang pada saat itu masih dalam tahap uji coba dan tidak dikenakan biaya, banyak kendaraan yang lebih memilih menggunakan jalan tol dibandingkan menggunakan jalan kota sehingga VC ratio menurun. Setelah tol trans Jawa secara resmi beroperasi pada tahun 2019 dan dikenakan biaya, sebagian kendaraan yang

semula menggunakan jalan tol beralih melewati jalan kota, sehingga VC ratio meningkat menjadi sebesar 0,45.

Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 yang terjadi diseluruh dunia berdampak terhadap hampir semua sendi kehidupan, salah satunya yaitu adanya kebijakan pembatasan mobilitas. Dengan adanya kebijakan ini, arus lalu lintas menurun drastis yang mengakibatkan penurunan VC ratio menjadi 0,36. Meskipun demikian, mobilitas darat tetap dapat dilakukan.

Range nilai VC ratio ditakegorikan ke dalam 6 (enam) tingkat pelayanan jalan sebagaimana disajikan dalam tabel 2.104 berikut.

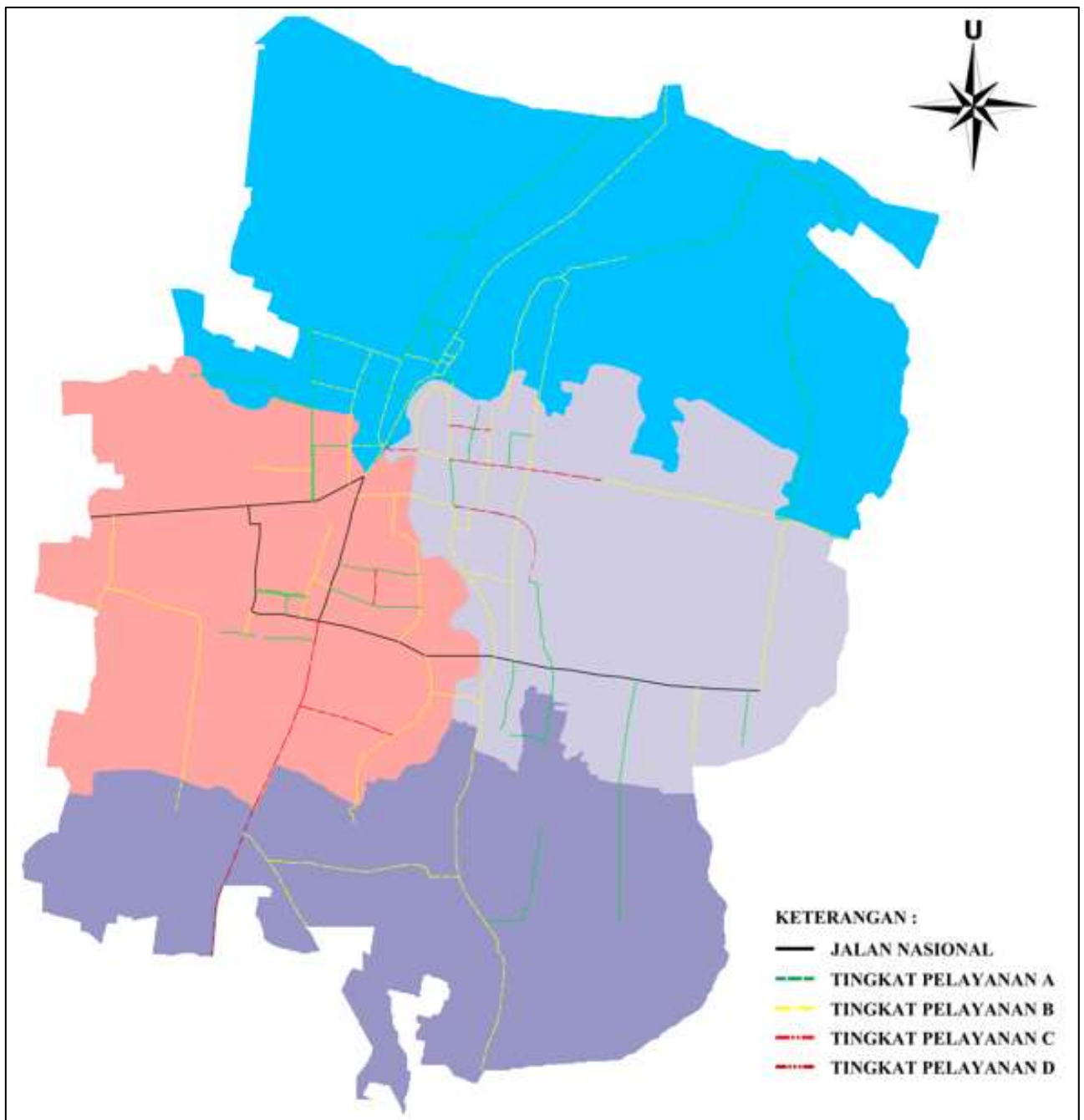
Tabel 2.104 Kategori Tingkat Pelayanan Jalan

Tingkat Pelayanan	V/C Rasio
A	0,0 - 0,20
B	0,21 - 0,44
C	0,45 - 0,74
D	0,75 - 0,84
E	0,85 - 1, 00
F	>1, 00

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

Dari tabel Tingkat Pelayanan diatas, jalan – jalan yang memiliki tingkat pelayanan A, pada ruas tersebut kendaraan dapat memilih kecepatan yang dikehendaki. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan B, kendaraan dapat memilih kecepatannya namun kecepatan tersebut sedikit terbatas oleh arus lalu lintas. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan C kecepatannya dibatasi oleh arus lalu lintas. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan D arus mulai tidak stabil, kecepatan rendah, volume lalu lintas mendekati kapasitas ruas jalan yang ada. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan E, kecepatannya rendah volume sudah hampir sama dengan kapasitas yang ada, pada tingkat pelayanan ini ruas jalan bisa dikatakan mengalami kemacetan. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan F, arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume diatas kapasitas, sering terjadi kemacetan pada waktu yang cukup lama.

Peta tingkat pelayanan jalan di Kota Pekalongan disajikan dalam Gambar 2.48 berikut.



Gambar 2.48 Peta Tingkat Pelayanan Jalan di Kota Pekalongan

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

Berdasarkan gambar diatas, kinerja ruas jalan di Kota Pekalongan yang diukur dari tingkat pelayanan disajikan dalam Tabel 2.105 berikut.

Tabel 2.105 Kinerja Ruas Jalan di Kota Pekalongan yang Diukur Dari Tingkat Pelayanan

Tingkat Pelayanan A	Tingkat Pelayanan B	Tingkat Pelayanan C	Tingkat Pelayanan D
Jl. Ahmad Yani	Jl. Angkatan 45	Jl. Bandung	Jl. Dr. Cipto
Jl. Asem Binatur	Jl. Angkatan 66	Jl. Kalimantan	Jl. Gatot Subroto
Jl. Bahagia	Jl. Argopuro	Jl. Karya Bhakti	-

Tingkat Pelayanan A	Tingkat Pelayanan B	Tingkat Pelayanan C	Tingkat Pelayanan D
Jl. Barito	Jl. Belimbing	Jl. Manggis	-
Jl. Cempaka	Jl. Cenderawasih	Jl. Melati	-
Jl. Hasanudin	Jl. Dharma Bhakti	Jl. P. Kemerdekaan	-
Jl. Indragiri	Jl. Diponegoro	Jl. Pintas Sapuro	-
Jl. Interchange Duwet	Jl. Dr. Kusuma Atmaja	Jl. Semarang	-
Jl. Jawa	Jl. Dr. Wahidin	Jl. Seruni	-
Jl. Jeruk	Jl. H. Agus Salim	Jl. Tondano	-
Jl. Kenanga	Jl. Hayam Wuruk	Jl. Urip Sumoharjo	-
Jl. KH. Hasyim Ashari	Jl. HOS Cokroaminoto	-	-
Jl. Ki Hajar Dewantara	Jl. Imam Bonjol	-	-
Jl. Kutilang	Jl. Irian	-	-
Jl. Labuan	Jl. Jetayu	-	-
Jl. Majapahit	Jl. Jlamprang	-	-
Jl. Mataram	Jl. Kemakmuran	-	-
Jl. Merak	Jl. KH. Ahmad Dahlan	-	-
Jl. Otto Iskandar Dinata	Jl. Ki Mangun Sarkoro	-	-
Jl. Pramuka	Jl. Kurinci	-	-
Jl. Raden Saleh	Jl. Letjen Suprpto	-	-
Jl. Samudera Pasai	Jl. Maninjau	-	-
Jl. Sumatera	Jl. Manunggal	-	-
Jl. Surabaya	Jl. Merpati / Parkit	-	-
Jl. Tentara Pelajar	Jl. Nusantara	-	-
Jl. Trikora	Jl. Parang Garuda Raya	-	-
Jl. Tritura	Jl. Patriot	-	-
-	Jl. Pattimura	-	-
-	Jl. Pelita III	-	-
-	Jl. Progo	-	-
-	Jl. R.A Kartini	-	-
-	Jl. Salak	-	-
-	Jl. Sulawesi	-	-
-	Jl. Sultan Agung	-	-
-	Jl. Sunan Ampel	-	-
-	Jl. Supriyadi	-	-
-	Jl. Tembus Hos Cokro -	-	-
-	Jl. Teratai	-	-
-	Jl. Truntum	-	-
-	Jl. Untung Suropati	-	-
-	Jl. Veteran	-	-
-	Jl. Wachid Hasyim	-	-
-	Jl. WR. Supratman	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

Hingga saat ini, lalu lintas regional dan lokal masih bercampur pada ruas-ruas jalan di wilayah Kota Pekalongan. Lalu lintas regional yang mendominasi adalah kendaraan barang dan penumpang (AKAP maupun AKDP) yang berdimensi besar maupun kendaraan pribadi yang masih memilih melewati jalur jalan nasional dibandingkan jalan tol trans Jawa.

Masih bercampurnya lalu lintas tersebut sangat berimplikasi bagi keamanan, ketertiban, kebersihan dan kenyamanan kota serta tata ruang kota. Dampak yang paling dirasakan adalah keamanan dan kenyamanan warga Kota Pekalongan dalam berlalu lintas karena bercampur dengan lalu lintas regional. Akibat lalu lintas yang bercampur, terutama kendaraan berdimensi besar, sebagian kawasan perdagangan dan jasa di wilayah Kota Pekalongan tidak bisa berkembang dengan optimal. Kondisi ini terutama terjadi pada koridor Jl. Jenderal Sudirman yang tidak berkembang. Salah satu sektor andalan Kota Pekalongan adalah perdagangan dan jasa. Dengan terbatasnya luas wilayah serta kawasan perdagangan dan jasa yang terbatas, Pemerintah Kota Pekalongan memiliki kesulitan dalam pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di lokasi lain. Jika kawasan perdagangan dan jasa tidak bisa berkembang optimal tentunya akan berdampak juga bagi upaya-upaya pengembangan wilayah, khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, salah satu upaya sistemik dalam mengatasi bercampurnya lalu lintas regional dan lokal di Kota Pekalongan adalah pembangunan jalan lingkaran di Kota Pekalongan. Lebih tepatnya jalan lingkaran Petanglong (Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Sesuai dengan Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah, wilayah Petanglong, yang berpusat di Perkotaan Petanglong, merupakan salah satu wilayah Pengembangan di Jawa Tengah. Sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah, perkotaan Petanglong merupakan salah satu kawasan strategis di Jawa Tengah. Jalan lingkaran tersebut diharapkan berdampak bagi mengatasi permasalahan kemacetan dan keamanan lalu lintas, kebersihan dan kenyamanan kota, serta yang utama adalah optimalisasi tata ruang, di wilayah Kota Pekalongan khususnya, dan Kawasan Perkotaan Petanglong pada umumnya.

Dalam dimensi yang lain, mencontoh kasus di daerah lain, pembangunan jalan lingkaran di Kota Petanglong dan/atau Kawasan Perkotaan Petanglong dapat dilakukan dengan konstruksi yang sekaligus dapat berfungsi sebagai tanggul penahan rob. Jika jalan lingkaran tersebut dapat terwujud diharapkan dapat menjadi katalis bagi pengembangan wilayah Kota Pekalongan dan kawasan sekitarnya.

b. Angkutan Umum

Rasio izin trayek yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan pada tahun 2016 sebesar 0,00028. Hal ini memiliki makna 2,8 izin per 10.000 penduduk. Pada tahun 2017 sebesar 0,00032 mengalami kenaikan atau 3,2 per 10.000 penduduk. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 stagnan di angka 0,00032 atau 3,2 izin per 10.000 penduduk dan di tahun 2020 sedikit menurun di angka 0,00031 atau 3,1 izin per 10.000 penduduk.

Tabel 2.106 Perkembangan Rasio Izin Trayek di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	Jumlah penduduk	Rasio
2016	83	299.222	0,00028
2017	97	301.870	0,00032

Tahun	Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	Jumlah penduduk	Rasio
2018	97	304.477	0,00032
2019	97	307.097	0,00032
2020	95	307.150	0,00031

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada penumpang Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta angkutan regional, Kota Pekalongan memiliki 1 (satu) terminal tipe A yaitu Terminal Bus Kota Pekalongan yang berlokasi di Jl. Dr. Sutomo, dimana tahun 2017 menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Terminal ini menjadi terminal transit bagi bus yang hendak melanjutkan ke daerah lain maupun menjadi tujuan akhir para penumpang.

Berdasarkan SK Dirjen Perhubungan Darat No : SK.687/AJ/DRJD/2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur Faktor muat (*Load Factor*) merupakan perbandingan antara kapasitas terjual dan kapasitas tersedia untuk satu perjalanan yang dinyatakan dalam persen. Sedangkan standar yang ditetapkan oleh Departemen Perhubungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1993, untuk nilai *Load Factor* antara 70 persen - 110 persen. Jika nilai *Load Factor* lebih dari 110 persen maka penumpang akan merasakan kurang nyaman dalam menggunakan angkutan umum tersebut, jika nilai *Load Factor* kurang dari 70 persen menggambarkan bahwa angkutan umum tersebut kurang optimal dalam melayani pergerakan penumpang. Sedangkan standar nilai *Load Factor* yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No. 687 tahun 2002 adalah sebesar 70 persen. Di Kota Pekalongan *Load Factor* angkutan kota yang berkapasitas kurang lebih 12 penumpang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berada dikisaran 30 persen sampai 41 persen. Kurang optimalnya angkutan kota dalam melayani pergerakan penumpang dikarenakan masyarakat sudah beralih menggunakan kendaraan pribadi terlebih lagi adanya angkutan *online*, sehingga load faktor angkutan kota kurang dari 70 persen.

Tabel 2.107 Faktor Muat (*Load Factor*) Angkutan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Faktor Muat (<i>Load Factor</i>) (persen)	30	33	35	37	41

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

Berdasarkan Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, pembangunan terminal penumpang Tipe C direncanakan akan dibangun secara bertahap mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2029. Adapun lokasi yang akan dibangun terminal penumpang Tipe C berada di Wilayah Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Selatan.

Dari tahun 2017 sampai dengan 2020, jumlah penumpang yang melalui terminal pada tahun 2017 berjumlah 1.912.577 orang dan naik di tahun 2018 menjadi 1.938.614 orang, Pada tahun 2019 turun sebesar 1.876.174 orang dan kembali turun ditahun 2020 menjadi 771.497 orang. Penurunan ini selain karena

banyaknya masyarakat yang memilih bepergian menggunakan kendaraan pribadi, juga adanya pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya pandemi COVID-19. Sedangkan otobis AKAP dan AKDP di tahun 2017 berjumlah 377.428 unit dan menurun di tahun 2018 menjadi 339.637 unit. Per tahun 2019, jumlah otobis berjumlah 294.470 unit dan tahun 2020 berjumlah 125.162 unit, sehingga dapat dikatakan bahwa persentase AKAP dan AKDP di Kota Pekalongan mengalami naik turun, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.108 berikut ini.

Tabel 2.108 Persentase Angkutan Darat AKAP dan AKDP Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Otobis AKAP AKDP	600	377.428	339.637	294.470	125.162
Jumlah Penumpang yang melalui terminal	n/a	1.912.577	1.938.614	1.876.174	771.497
Persentase Angkutan Darat	n/a	19,8	17,6	15,7	16,2

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

c. Kendaraan Laik Jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus. Kendaraan bermotor wajib uji yang selanjutnya disebut kendaraan bermotor adalah kendaraan yang wajib melakukan uji berkala berupa mobil penumpang umum, bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan.

Kepemilikan KIR untuk kendaraan umum di Kota Pekalongan dari tahun 2016-2020 cenderung meningkat, meskipun pada tahun 2020 kembali menurun. Pada tahun 2016, jumlah kepemilikan KIR angkutan umum sebanyak 743 kendaraan. Tahun 2017 meningkat menjadi 800 kendaraan, namun pada tahun 2018 menurun menjadi 788 kendaraan dan kembali meningkat pada tahun 2019 sebesar 829 kendaraan dan menurun di tahun 2020 sebesar 817 kendaraan.

Tabel 2.109 Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kepemilikan KIR angkutan umum	743	800	788	829	817
Jumlah Kendaraan Wajib Uji yang melakukan Uji Kir	3.785	3.902	4.002	4.166	4.267
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	19,63	20,50	19,69	19,90	19,15

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

Kelayakan dalam pengujian kelayakan kendaraan umum penting bagi keselamatan pengemudi dan para penumpang. Agar kelayakan kendaraan umum

dalam berkendara ada yang diujikan sehingga kelayakan kendaraan itu baik. Pengujian kendaraan itu antara lain pra uji kendaraan bermotor meliputi pemeriksaan dimensi kendaraan dan kelengkapan kendaraan; uji ketebalan asap (*Smoke Tester*) untuk kendaraan berbahan bakar solar; uji emisi gas buang (Co-Hc) untuk kendaraan berbahan bakar bensin; uji speedometer; pemeriksaan bagian bawah kendaraan dengan *Pit Lift* dan *Play Detector*; uji lampu utama; uji *side slip*; uji *axle load*; untuk kendaraan baru / rubah bentuk dan ganti buku dan uji rem. Selengkapnya mengenai lama uji kelayakan kendaraan umum disajikan dalam Tabel 2.110 berikut.

Tabel 2.110 Lama Pengujian Kelayakan Kendaraan Umum (KIR) di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Lama Pengujian (Menit)	20	20	30	30	30

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

Kota Pekalongan telah memiliki tempat pengujian yang representatif. Terletak di lingkungan Dinas Perhubungan. Sampai saat ini Kota Pekalongan hanya memiliki 1 (satu) tempat pengujian KIR. Adapun biaya pengujian kelayakan angkutan umum selama 2016-2020 tidak ada kenaikan yaitu Rp.40.000.

Tabel 2.111 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Pekalongan 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp.)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

d. Perparkiran

Dishub Kota Pekalongan hingga saat ini telah mengelola 424 titik parkir yang tersebar di Kota Pekalongan yang didominasi di Jalan Urip Sumoharjo dimana setiap titik parkir disesuaikan berdasarkan surat tugas oleh juru parkir yang ditunjuk yang difasilitasi dengan perlengkapan seperti rompi petugas, peluit, bendera dan sebagainya. Adapun titik parkir yang berpotensi penarikan retribusi terbesar di Kota Pekalongan yang mampu mendongkrak capaian retribusi parkir diantaranya berada di Jalan Hayam Wuruk, Jalan Hasanudin, Jalan Sultan Agung, Kawasan Sorogenen, serta Alun-Alun yang mampu menyumbang hingga 60 persen. selain mengelola retribusi parkir di tepi jalan umum (*on street*), Dishub Kota Pekalongan juga melakukan penarikan retribusi parkir *off street* (di luar badan jalan) seperti di Jalan Veteran depan RSUD Kraton dan trayek terminal serta parkir insidentil (biasanya saat digelar sebuah *event* kegiatan). Dalam mencapai target yang ditetapkan, Dishub Kota Pekalongan telah membentuk tim pembinaan dan pengawasan parkir yang terdiri dari unsur Subdenpom, Polres, Kejaksaan, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya. Data penyelenggaraan parkir di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.112 berikut.

**Tabel 2.112 Persentase Penyelenggaraan Parkir Berizin
di Kota Pekalongan 2016 – 2020**

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah parkir yang berizin	326	344	361	418	419
Jumlah potensi parkir yang belum berizin	17	15	14	16	15
Jumlah seluruh parkir	343	359	375	434	434
Persentase Penyelenggaraan Parkir Berizin	95,04	95,82	96,27	96,31	96,54

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

e. Fasilitas Perlengkapan Jalan

Dalam rangka mendukung keselamatan berlalu lintas di jalan raya maka dilakukan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di sepanjang jalan Kota Pekalongan. Fasilitas keselamatan lalu lintas ini berguna untuk memastikan keamanan para pengendara maupun para pejalan kaki. Fasilitas yang diperlukan bagi keselamatan berlalu lintas itu terdiri dari rambu lalu lintas, Rambu Pendahuluan Petunjuk Jalan (RPPJ), Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL), guardrail dan marka jalan. Pemenuhan kebutuhan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di Kota Pekalongan terakut dengan banyaknya kerusakan fasilitas lalu lintas di lapangan serta banyaknya permintaan dari warga terkait permintaan fasilitas lalu lintas sehingga diperlukan penggantian fasilitas lalu lintas dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan prioritas, kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kasus COVID-19 yang berdampak pada refocusing anggaran.

**Tabel 2.113 Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan
di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020**

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pemasangan Rambu lalu lintas Pada Tahun n	21	95	141	2	33
Jumlah Rambu lalu lintas yang Seharusnya Tersedia	321	300	290	150	100
Persentase Pemasangan Rambu lalu lintas	6,54	31,67	48,62	1,33	33,00
Jumlah Pemasangan Rambu Pendahuluan Petunjuk Jalan (RPPJ) Pada Tahun n	0	0	5	0	0
Jumlah Rambu Pendahuluan Petunjuk Jalan (RPPJ) yang Seharusnya Tersedia	20	15	15	10	10
Persentase Pemasangan Rambu Pendahuluan Petunjuk Jalan (RPPJ)	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00
Jumlah Pemasangan Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL) Pada Tahun n	2	1	1	2	0
Jumlah Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang Seharusnya Tersedia	8	6	5	4	2

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pemasangan Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL)	25,00	16,67	20,00	50,00	0,00
Jumlah Pemasangan guardrail Pada Tahun n	0	0	4	0	0
Jumlah guardrail yang Seharusnya Tersedia	14	14	14	10	10
Persentase Pemasangan guardrail	0,00	0,00	28,57	0,00	0,00
Jumlah Pemasangan marka jalan Pada Tahun n	27 lokasi	20 lokasi	25 lokasi	13 lokasi	12 lokasi
Jumlah marka jalan yang Seharusnya Tersedia	150 ruas jalan	150 ruas jalan	150 ruas jalan	150 ruas jalan	150 ruas jalan
Persentase Pemasangan marka jalan	18,00	13,33	16,67	8,67	8,00

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

f. Perkeretaapian

Kota Pekalongan memiliki satu stasiun utama. Stasiun Besar Kota Pekalongan terletak di pusat pemerintahan Kota Pekalongan di Kecamatan Pekalongan Barat. Pengguna jasa angkutan darat seperti kereta api, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.114 berfluktuasi dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2019 merupakan jumlah penumpang terbanyak yang menaiki kereta api melalui Stasiun Pekalongan yaitu sejumlah 863.851 penumpang. Perkembangan dari tahun 2016-2019 menunjukkan semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan jasa layanan kereta api, khususnya yang datang maupun pergi dari Kota Pekalongan dan daerah sekitarnya. Namun terjadi penurunan drastis jumlah penumpang yang memanfaatkan jasa layanan kereta api pada tahun 2020 menjadi 271.920 orang, karena pandemi *COVID-19* membuat adanya larangan bepergian ke luar daerah.

Tabel 2.114 Banyaknya Penumpang Yang Naik Kereta Api Melalui Stasiun KA Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Pekalongan
2016	537.704
2017	585.215
2018	821.085
2019	863.851
2020	271.920

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

Kota Pekalongan berada dibawah daerah operasi PT. Kereta Api Indonesia DAOP 4 Semarang. Panjang jalur operasional kereta api DAOP 4 Semarang adalah sepanjang 656 km, dimana jalur kereta sepanjang 6,85 km berada di wilayah Kota Pekalongan, dengan jumlah perlintasan sebindang sebanyak 10 perlintasan.

**Tabel 2.115 Jalur Perlintasan Kereta Api
di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020**

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Rel Kereta Api	6,85 km	6,85 km	6,85 km	6,85 km	6,85 km
Jumlah Perlintasan Rel dengan jalan	10	10	10	10	10
Perlintasan Sebidang	10	10	10	10	10
Perlintasan Tidak Sebidang	-	-	-	-	-
Perlintasan Resmi	9	9	10	10	10
Perlintasan Tidak Resmi	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

g. Keselamatan Lalu Lintas

Angka kecelakaan secara umum menggambarkan kecelakaan total yang terjadi. Di dalam angka kecelakaan terdapat angka kematian yang menggambarkan kecelakaan yang korbannya sampai meninggal dunia. Meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya perkembangan kota, meningkatnya aktivitas masyarakat baik, ekonomi, sosial dan budaya, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan meningkatnya jumlah kendaraan pada sistem lalu lintas jalan tak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Data kecelakaan yang terjadi di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.116 berikut.

**Tabel 2.116 Total Kecelakaan Rerata per km untuk 1 tahun
di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020**

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Jalan	155,44	155,44	155,44	155,44	153,41
Jumlah Kejadian Kecelakaan	121	60	91	122	121
Total Kecelakaan Rerata per km untuk 1 tahun	0,78	0,39	0,59	0,78	0,79

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

Berdasarkan tabel diatas frekuensi atau rata-rata kejadian kecelakaan per kilometer di Kota Pekalongan adalah 1 kejadian per tahunnya.

**Tabel 2.117 Angka Kematian akibat kecelakaan per 100.000 penduduk
di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020**

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Korban Kecelakaan	149	77	116	145	142
Luka-luka	113	54	86	117	134
Meninggal Dunia	36	23	30	28	8
Jumlah Penduduk	299.222	301.870	304.477	307.097	307.150
Angka Kematian akibat kecelakaan per 100.000 penduduk	12,03	7,62	9,85	9,12	2,60

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

10. Komunikasi dan Informatika

Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Aplikasi yang dikembangkan selama ini aplikasi berbasis web. Melalui sistem informasi yang terintegrasi memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan memudahkan bagi aparat dalam menyajikan informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Pemerintah Kota Pekalongan telah membangun sistem informasi manajemen dalam memajukan pelayanan publik.

Keterbukaan informasi publik Perangkat Daerah menjadi indikator keberhasilan Pemerintah Kota Pekalongan dalam melayani masyarakat. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah di Kota Pekalongan tahun 2020 disajikan dalam Tabel 2.118 berikut.

Tabel 2.118 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Kota Pekalongan di Tahun 2020

Peringkat	Badan Publik	Skor	Keterangan
1	BAPPEDA	1000	Informatif
2	BKPPD	995	Informatif
3	DPMPTSP	980	Informatif
4	DINSOS P2KB	976	Informatif
5	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	970	Informatif
6	DINKOMINFO	950	Informatif
7	RSUD BENDAN	940	Menuju Informatif
8	DPMPPA	910	Menuju Informatif
9	KESBANGPOL	910	Menuju Informatif
10	BPBD	849	Menuju Informatif
11	DINPERPA	824	Menuju Informatif
12	DLH	809	Menuju Informatif
13	DPUPR	796	Cukup Informatif
14	DINDAGKOP UKM	769	Cukup Informatif
15	DINPERINAKER	769	Cukup Informatif
16	DINPERKIM	764	Cukup Informatif
17	DINARPUS	755	Cukup Informatif
18	SATPOL PP	682	Cukup Informatif
19	DINDUKCAPIL	677	Cukup Informatif
20	DINKES	664	Cukup Informatif
21	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	642	Cukup Informatif
22	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	610	Cukup Informatif
23	DKP	606	Cukup Informatif
24	INSPEKTORAT	600	Cukup Informatif
25	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	579	Cukup Informatif
26	DINPARBUDPORA	548	Cukup Informatif
27	SETDA	526	Cukup Informatif
28	DINDIK	516	Cukup Informatif
29	SEKRETARIAT DPRD	512	Cukup Informatif
30	BKD	455	Kurang Informatif
31	DINHUB	417	Kurang Informatif

Sumber : Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2021

Untuk menunjang informasi bagi masyarakat, Pemerintah Daerah memiliki web dengan portal <http://pekalongankota.go.id>. Berbagai Sistem Informasi Manajemen juga dikembangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.119 berikut.

**Tabel 2.119 Jumlah Sistem Informasi Manajemen
Pemerintah Daerah Tahun 2016 - 2020**

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah SIM	53	55	76	92	107

Sumber : Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2021

Setiap tahun Dinas Kominfo membangun dan mengembangkan SIM/aplikasi, baik yang digunakan untuk internal Pemerintah Kota Pekalongan maupun masyarakat. Salah satu SIM/aplikasi yang dibangun adalah SIM/aplikasi satu data terpadu yang diberi nama PUSAKA (Pusat Data Terpadu Kota Batik) dengan alamat <http://pusaka.pekalongankota.go.id>. SIM/aplikasi ini diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan data yang bersifat *single data* sehingga dapat dijadikan pedoman.

Berkaitan dengan pemberdayaan komunitas dalam pemanfaatan teknologi informasi, telah dilakukan pemberdayaan komunitas melalui pelatihan intensif pada komunitas BKR, Wirausaha/Pelaku Usaha, KNPI, BKM, LPM, Guru TIK/BTIK/SMP/MTs, Blogger, Pecinta Internet Hebat, Animator, Vlog Kota PKL, Robotik, Puskomas, Pengelola Web Sekolah, Karang Taruna, Anti Hoax, Film, Himpaudi, Telecenter, MGMP Multipedia, Explore Pekalongan, Relawan TIK, KIM, dan Dewan TIK.

Dalam hal infrastruktur, dibutuhkan jaringan komunikasi sebagai media penyebar luasan data dan informasi. Jaringan komunikasi merupakan kumpulan terimal, tautan, dan titik koneksi yang saling terhubung untuk memungkinkan telekomunikasi di antara pengguna. Semakin banyaknya jumlah pengguna dan penyelenggara jaringan telekomunikasi melahirkan kebutuhan akan sebuah regulasi yang mengatur tata cara penyelenggaraan jaringan telekomunikasi secara benar dan sesuai. Di Indonesia, regulasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi ini merupakan seperangkat aturan dalam bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010. Adapun jaringan telepon genggam antara lain Indihome (Telkom), Sentral Telkom, pabx, voip, CDMA, LAN, 4G. Jumlah menara yang terdaftar sampai akhir tahun 2018 hingga akhir tahun 2020 di Kota Pekalongan sebanyak 80 menara. Rasio jaringan komunikasi Kota pekalongan disajikan dalam Tabel 2.120 berikut.

**Tabel 2.120 Rasio Jumlah Jaringan Komunikasi
di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020**

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jaringan telepon genggam	12	12	12	7	7
Stasioner	84	84	80	80	80
Rasio jaringan komunikasi	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Sumber : Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2021

Keterangan : jaringan telepon genggam : Indihome (Telkom), Sentral Telkom, pabx, voip, CDMA, LAN, 4G.

Perkembangan surat kabar cetak di Kota Pekalongan tidak mengalami perubahan. Surat kabar yang terbit setiap pagi hari adalah lembaran tercetak yang

memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca. Surat kabar nasional yang beredar di Kota Pekalongan yang paling dikenal masyarakat antara lain Kompas, Sindo, Tempo dan Jawa Pos. Surat kabar lokal antara lain Radar, Wawasan, Suara Merdeka dan Kedaulatan Rakyat. Perkembangan jumlah surat kabar di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.121 berikut.

Tabel 2.121 Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal yang Masuk ke Daerah Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Surat Kabar	10	10	15	15	15

Sumber : Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Penyiaran terbagi dua yakni penyiaran radio dan penyiaran televisi. Penyiaran radio di Kota Pekalongan berasal dari Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Adapun penyiaran televisi berasal dari Kota Tegal dan Kota Semarang. Perkembangan penyiaran radio dan televisi disajikan dalam Tabel 2.122 berikut.

Tabel 2.122 Jumlah Penyiaran Radio dan Televisi di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penyiaran Radio	10	13	14	17	8
Jumlah Penyiaran TV	15	15	16	20	20

Sumber : Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2021

Jaringan tetap adalah suatu jaringan telepon yang melalui sebuah medium padat, baik melalui kabel logam atau serat optik. Layanan jaringan tetap di Indonesia dan di Kota Pekalongan khususnya, dilayani oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Adapun jumlah satuan sambungan telepon sepanjang tahun 2016-2020 semakin menurun. Pada tahun 2016, jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 14.271 orang. Jumlah tersebut terus meningkat sampai tahun 2018 dengan jumlah pelanggan sebanyak 15.096 orang. Namun jumlah tersebut menurun secara signifikan di tahun 2019 menjadi 10.531 orang dan 11.254 orang di tahun 2020. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.123.

Tabel 2.123 Persentase Rumah Tangga Pelanggan Telepon Tetap di Kota Pekalongan 2016-2020

Tahun	Jumlah Pelanggan Telepon Tetap	Jumlah RT	Persentase Pelanggan Telepon Tetap (persen)
2016	14.271	74.313	19,20
2017	14.671	74.970	19,57
2018	15.096	75.618	19,96
2019	10.531	76.269	13,81

Tahun	Jumlah Pelanggan Telepon Tetap	Jumlah RT	Persentase Pelanggan Telepon Tetap (persen)
2020	11.254	84.296	13,35

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2021, 2021

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dalam penerapan SPBE, diperlukan tata kelola SPBE yang bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu, yang meliputi : Rencana Induk SPBE Nasional; Arsitektur SPBE; Peta Rencana SPBE; rencana dan anggaran SPBE; Proses Bisnis; data dan informasi; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE; dan Layanan SPBE.

Penyusunan Arsitektur SPBE Nasional untuk periode tahun 2020-2024 diselesaikan paling lambat 6 (bulan) setelah RPJMN periode tahun 2020-2024, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Arsitektur SPBE Nasional memuat referensi arsitektur dan domain arsitektur, dimana referensi arsitektur mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur. Domain arsitektur mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat :

- a) domain arsitektur Proses Bisnis;
- b) domain arsitektur Data dan Informasi;
- c) domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
- d) domain arsitektur Aplikasi SPBE;
- e) domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
- f) domain arsitektur Layanan SPBE.

Pada tahun 2019, SPBE Kota Pekalongan telah dievaluasi oleh Kementerian PAN dan RB dengan hasil sebagai berikut :

- Domain Kebijakan SPBE : 2,76
- Domain Tata Kelola : 2,86
- Domain Layanan SPBE : 3,39

Adapun indeks SPBE Kota Pekalongan tahun 2019 yaitu 3,14 dengan predikat “Baik”. Informasi secara lengkap disajikan dalam Gambar 2.49 berikut.



Gambar 2.49 Indeks SPBE Kota Pekalongan Tahun 2019

Sumber : spbe.go.id, 2020

Tahun 2020 Kota Pekalongan tidak menjadi target survey dari Kemenpan, sehingga tidak ada penilaian, namun tahun selanjutnya akan diadakan penilaian mandiri tidak melalui Kemenpan.

11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

a. Persentase Koperasi Aktif

Upaya pemberdayaan Koperasi & UMKM diharapkan untuk mewujudkan Koperasi dan MKM yang tangguh dan mandiri dengan mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi, pembinaan terhadap koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif, meningkatkan kualitas koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan citra koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia dan lembaga ekonomi kerakyatan.

Jumlah Koperasi aktif di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020. Akan tetapi persentase koperasi aktif di Tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2016, hal ini disebabkan karena adanya penambahan jumlah total koperasi yang berasal dari pembentukan dan pendirian koperasi baru, akan tetapi tidak diikuti dengan pengurangan jumlah koperasi yang tidak aktif. Kondisi pada tahun 2018 masih sama dengan tahun 2017, kemudian terus meningkat di tahun 2019 dan 2020 menjadi 89,77 persen.

Tabel 2.124 Persentase Koperasi Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah seluruh Koperasi	Persentase koperasi aktif
2016	238	276	86,23
2017	235	280	83,93
2018	236	281	83,93
2019	237	281	84,34
2020	272	303	89,77

Sumber : Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2021

b. Jumlah UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaan Dindagkop dan UMKM Kota Pekalongan terdiri dari sektor industri, perdagangan, dan pedagang pasar-PK5. Jumlah UMKM di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2016-2020 mengalami penurunan. Namun dalam perjalanannya, jumlah IMKM mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai 2020. Pada tahun 2017 berjumlah 19.820 UMKM, menurun cukup drastis dari tahun 2016 yaitu 23.681. Kemudian jumlahnya terus naik menjadi 23.233 UMKM di tahun 2020, namun jumlahnya masih lebih rendah dibandingkan tahun 2016.

**Tabel 2.125 Jumlah UMKM di Kota Pekalongan
Tahun 2016 - 2020**

Tahun	Komponen UMKM				Jumlah
	Perdagangan (SIUP)	Industri Kecil Menengah	Pedagang Pasar	Pedagang Kaki Lima	
2016	9.722	6.469	6.480	1.010	23.681
2017	7.840	4.570	6.400	1.010	19.820
2018	9.115	5.476	6.400	914	21.905
2019	9.314	6.152	6.600	914	22.980
2020	9.115	6.594	6.610	914	23.233

Sumber : Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2021

12. Penanaman Modal

Kegiatan penanaman modal di Kota Pekalongan sepanjang tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi baik dari jumlah investor, jumlah nilai investasi, jumlah tenaga kerja yang terserap maupun rasio daya serap tenaga kerja selama lima tahun berturut-turut. Hal ini disajikan dalam Tabel 2.126 berikut.

**Tabel 2.126 Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Penyerapan
Tenaga Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020**

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Investor (PMA/PMDN)	385	304	202	745	181
Jumlah Nilai Investasi (Rp. Milyar)	460	233	175	3.294,76	196.116
Jumlah Tenaga Kerja pada Perusahaan PMA/PMDN	2.825	1.274	1.351	8.377	2.349
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	7,34	4,19	6,68	11,24	12,97

Sumber : DPMPSTSP Kota Pekalongan, 2021

Dalam hal penyerapan tenaga kerja yang mampu diserap oleh kegiatan penanaman modal sepanjang 2016-2020, sepanjang lima tahun hanya pada tahun 2019 penyerapan tenaga kerja terbanyak yakni sebanyak 8.377 orang dengan rasio daya serap tenaga kerja terbesar sebesar 11,24. Adapun jumlah tenaga kerja terkecil yang diserap sepanjang lima tahun adalah tahun 2017 dengan jumlah tenaga kerja sebesar 1.274 orang dengan rasio daya serap tenaga kerjanya sebesar 4,19.

Tabel 2.127 Realisasi PMDN di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi PMDN Tahun Evaluasi (Rp. Milyar)	460,727	232,835	175,150	3.294,76	193,116

Sumber : DPMPTSP Kota Pekalongan, 2021

Tabel 2.127 menyajikan realisasi penanaman modal yang dilakukan oleh Penanaman Modal Dalam Negeri sepanjang tahun 2016-2020 atas realisasi PMDN tahun evaluasi, dimana realisasinya cenderung menurun. Pada tahun 2016, realisasi PMDN tahun evaluasi sebesar Rp.460,727 miliar. Tahun 2017 dan 2018 terus menurun menjadi Rp.175,150 miliar di tahun 2018. Kemudian meningkat signifikan di tahun 2019 sebesar Rp.3.294,76 miliar, dan kembali menurun di tahun 2020 sebesar Rp.193,116 miliar.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Dalam rangka meningkatkan pembangunan bidang kepemudaan, pada tahun 2016 telah dilakukan kegiatan kepemudaan sebanyak 8 kegiatan utama yang bertujuan meningkatkan partisipasi pemuda dalam berorganisasi dan bermasyarakat. Pelaksanaan kegiatan kepemudaan tersebut difasilitasi melalui pembentukan organisasi kepemudaan, namun di tahun 2017–2020 kegiatan kepemudaan menjadi 8 kegiatan. Pada tahun 2019 terjadi penambahan organisasi kepemudaan sebanyak 26 organisasi sesuai yang tercatat di Disporapar Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.128 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Organisasi Kepemudaan	8	9	9	26	24
Jumlah kegiatan Kepemudaan	10	8	8	8	8
Jumlah Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta)	3	3	3	3	3

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

Pada bidang keolahragaan, kinerja pembangunan diwadahi melalui organisasi olahraga dan sampai dengan tahun 2016 telah terbentuk 30 organisasi dalam bentuk Pengurus Cabang Olah Raga. Pada tahun 2019, jumlah organisasi olahraga menjadi 31 organisasi termasuk organisasi utama olahraga yakni KONI. Dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 jumlah kegiatan olahraga pada kisaran 5 sampai 8 kegiatan, dan jumlah lapangan olahraga masih tetap dan perlu ditingkatkan.

Tabel 2.129 Perkembangan Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Organisasi Olahraga	30	30	30	31	31
Jumlah kegiatan Olahraga	5	7	7	8	8
Jumlah Lapangan Olahraga	12	55	55	55	55

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

14. Statistik

Kebutuhan akan menentukan keputusan merupakan hal yang sangat penting dengan harapan sajian data terkumpul, terkelola dan termanfaatkan secara akurat, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mudah terakses dan dibagipakaikan. Akan tetapi kondisi yang ada saat penyajian data sendiri-sendiri sehingga akan menjadi data tidak sempurna dan bias dalam memutuskan karena tidak saling terintegrasi. Mengintegrasikan data-data yang sudah adapun sangat sulit karena penyajiannya yang berbeda menjadi tumpang tindih yang sulit dipadukan dan merasa punya data dan saling menutup sendiri. maka terbitlah Peraturan Presiden Nomor 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Yang mendasari perubahan-perubahan dalam pengelolaan penyajian

Perubahan melalui pasal 37 ayat 6 disebutkan bahwa akses data di portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh Walidata selaku pengguna data pada instansi pusat dan daerah. Dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna data diluar instansi pusat dan daerah.

Di masa transisi saat ini penyelenggaraan urusan statistik Pemerintah Daerah selain rutinitas cetakan masih berkelanjutan menjadi kegiatan tersendiri juga sudah mengelola data terpadu dalam bentuk PDA (Pekalongan Dalam Angka) juga menyajikan data sektoral beralamatkan pusaka.pekalongankota.go.id yang masih proses dengan berpedoman pada pasal 37 ayat 6 tentang Admin data (pejabat pengelola informasi yang bertanggungjawab) dan Walidata selaku pengguna data.

kedepan isian oleh OPD yang menyajikan sebagai admin dan data akan disajikan sesuai kebutuhan.

15. Persandian

Perkembangan era teknologi informasi dan komunikasi telah berdampak pada perubahan-perubahan yang mendasar pada sebagaimana informasi diproses dan ditransmisikan, sehingga membawa paradigma baru pada persandian. Peran persandian tidak lagi hanya menyangkut kerahasiaan saja, tetapi juga menyangkut keamanan informasi.

Arah perubahan Paradigma penyelenggaraan persandian di Daerah, tidak hanya sekedar kirim berita, tidak hanya melayani Kepala Daerah, tidak hanya terbatas pada informasi rahasia, akan tetapi melaksanakan pengamanan informasi daerah melalui penyelenggaraan persandian, layanan terhadap kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan dan nir sangkal atas informasi, penyediaan layanan e-Government, dan secara aktif meningkatkan kesadaran keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Saat ini penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi Pemerintah Daerah menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah serta layanan keamanan informasi dengan menerapkan sertifikasi elektronik untuk melindungi sistem elektronik dan dokumen elektronik.

16. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah, yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada budaya nasional.

Guna mewujudkan ketahanan budaya, dalam kurun waktu 2016-2019 telah dilaksanakan berbagai kegiatan seni dan budaya. Meskipun jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya cenderung tetap, tetapi jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya justru semakin meningkat. Semula berjumlah 42 *event* pada tahun 2018, menjadi 57 *event* di tahun 2019. Hal ini menunjukkan keberhasilan penguatan seni dan budaya serta minat masyarakat terhadap penyelenggaraan even tersebut. Namun di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi *COVID-19* penyelenggaraan festival seni dan budaya hanya ada 6 *event*.

Selain seni dan budaya, hal lain yang patut menjadi perhatian adalah pengelolaan cagar budaya. Meskipun merupakan kewenangan pemerintah pusat namun Pemerintah Kota Pekalongan telah memberikan kontribusi positif dengan melakukan identifikasi dan upaya pelestarian cagar budaya, seperti disajikan dalam Tabel 2.130 berikut.

Tabel 2.130 Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	23	29	42	57	6
Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	4	4	4	4	4
Jumlah Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	282	282	282	282	282

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

Dalam upaya pelestarian budaya dan menjadikan Kota Pekalongan sebagai destinasi wisata, telah dilakukan berbagai upaya penyelenggaraan festival/seni untuk menciptakan *brand image* Kota Pekalongan sebagai *world city of batik* dan salah satu kota kreatif dunia. Di samping itu, seni budaya Pekalongan juga terus dilakukan pembinaan untuk dapat berkembang di masyarakat. Pada tahun 2020, dikarenakan pandemi *COVID-19* Pemerintah Kota Pekalongan hanya menyelenggarakan beberapa even seni dan budaya dengan total 6 *event* sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.131 berikut.

Tabel 2.131 Penyelenggaraan Festival/ Pentas Seni/ Event di Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Kegiatan	Waktu	Tempat
1	Pekalongan Art Festival	1 – 8 Sept 2020	Kota Pekalongan
2	Festival Bubur Suro	19 – 20 Sept 2020	Kota Pekalongan
3	Kauman Art	10 Okt 2020	Kota Pekalongan
4	Pentas Peringatan Hari Batik	1 Okt 2020	Kota Pekalongan
5	Sadranan	16 Nov 2020	Kota Pekalongan
6	Pentas Wayang Kulit Virtual	11- 13 Nov 2020	Kota Pekalongan

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

Dari berbagai festival seni budaya yang diselenggarakan, jika dikelompokkan ada 17 jenis seni budaya sebagaimana tabel berikut. Pemerintah Kota Pekalongan bersama masyarakat berupaya melestarikan semua seni budaya yang ada dengan cara melakukan pembinaan, fasilitasi dan penyelenggaraan *event*. Sehingga pelestarian seni budaya dapat tercapai 100 persen.

Tabel 2.132 Seni Budaya Kota Pekalongan Tahun 2018-2020

No	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Simtuduror	Simtuduror	Simtuduror
2	Seni Musik	Seni Musik	Seni Musik
3	Sanggar Teater	Sanggar Teater	Sanggar Teater
4	Seni Tari	Seni Tari	Seni Tari
5	Seni Rakyat	Seni Rakyat	Seni Rakyat
6	Seni Karawitan	Seni Karawitan	Seni Karawitan
7	Perfilman	Perfilman	Perfilman
8	Komunitas Musik Rakyat	Komunitas Musik Rakyat	Komunitas Musik Rakyat
9	Orkes Melayu (Dangdut)	Orkes Melayu (Dangdut)	Orkes Melayu (Dangdut)
10	Samroh	Samroh	Samroh
11	Terbang Genjring/Jawan	Terbang Genjring/Jawan	Terbang Genjring/Jawan
12	Musik Keroncong	Musik Keroncong	Musik Keroncong
13	Reklame	Reklame	Reklame
14	Dekorasi	Dekorasi	Dekorasi
15	Seni Lukis	Seni Lukis	Seni Lukis
16	Kerajinan	Kerajinan	Kerajinan
17	Sastra	Sastra	Sastra

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

17. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai salah satu sumber informasi masih diminati oleh berbagai kalangan, terutama oleh pelajar. Di Kota Pekalongan, jumlah pengunjung perpustakaan terbilang cukup tinggi meskipun angkanya fluktuatif. Pada tahun 2016 jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 87.849 orang, kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 89.682 pengunjung. Pada tahun 2018 jumlahnya menurun lagi menjadi 83.068, tetapi pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 90.150. Dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 maka jumlah kunjungan menurun drastis menjadi 39.885. Salah satu penyebab menurunnya jumlah pengunjung tidak lepas dari kemudahan akses informasi dari berbagai media, termasuk media *online* yang saat ini sudah dalam genggaman. Berikut jumlah pengunjung perpustakaan mulai tahun 2016 sampai tahun 2020.

Tabel 2.133 Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Kunjungan Selama 1 Tahun	Jumlah Populasi yang Harus Dilayani	Rasio
2016	87.849	299.142	0,29
2017	89.682	268.070	0,33
2018	83.068	261.944	0,32
2019	90.150	261.944	0,34
2020	39.885	258.543	0,16

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2021

Sementara itu jumlah perpustakaan di Kota Pekalongan relatif tetap. Hanya jumlah perpustakaan RW yang berkurang, dari 328 perpustakaan di tahun 2016, berkurang menjadi 105 di tahun 2017, di tahun 2019 dan 2020 kembali berkurang menjadi 94 dan 90. Hal ini dikarenakan banyak perpustakaan RW yang tidak aktif

karena berbagai faktor, diantaranya terkena dampak rob di wilayah utara dan di wilayah lain juga pengelola perpustakaan yang tidak aktif. Perkembangan perpustakaan di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.134 berikut.

Tabel 2.134 Perkembangan Perpustakaan di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Uraian Data	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Perpustakaan Umum Kota Pekalongan	1	1	1	1	1
Perpustakaan Keliling	3	3	3	3	4
Perpustakaan RW	328	105	105	94	90
Perpustakaan SD/MI	77	77	77	77	77
Perpustakaan SLTP	34	34	34	34	34
Perpustakaan SLTA	23	23	23	23	23
Perpustakaan Perguruan Tinggi	6	6	6	6	6

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2021

18. Kearsipan

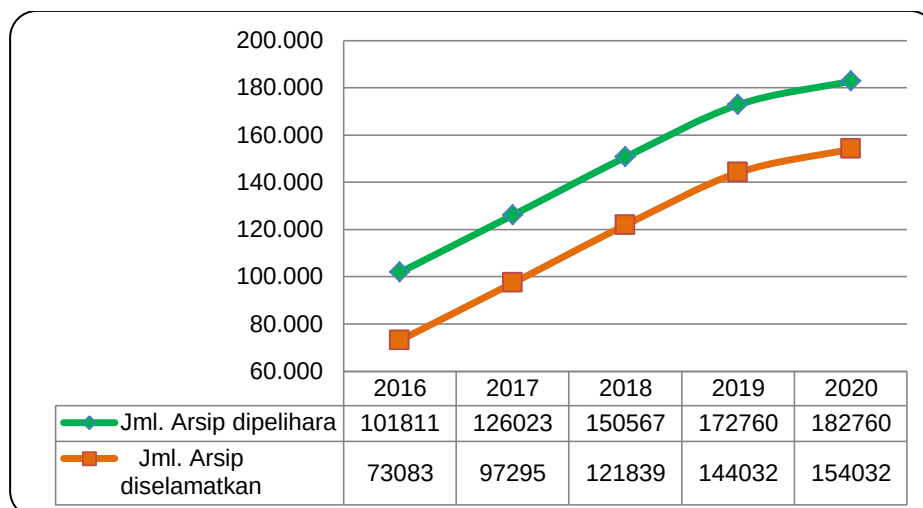
Pengelolaan kearsipan di lingkungan Perangkat Daerah (PD) Kota Pekalongan pada kurun waktu Tahun 2016 - 2020 sudah dilakukan secara baku sesuai dengan norma dan standar yang ada namun belum optimal. Pada tahun 2016 sampai tahun 2017 tidak ada penambahan PD yang mengelola arsip secara baku, stagnan di angka 22 OPD. Namun pada tahun 2018 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berupaya melakukan percepatan, salah satunya dengan cara melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada PD sehingga dapat meningkatkan jumlah Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku, dari 22 PD menjadi 49 PD seperti disajikan dalam Tabel 2.135 berikut.

Tabel 2.135 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah PD	Jumlah PD yang Mengelola Arsip Secara Baku	Rasio
2016	34	22	64,71
2017	66	22	33,33
2018	66	49	74,24
2019	66	49	74,24
2020	66	49	74,24

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2021

Selain pengelolaan, penyelamatan arsip juga sama pentingnya. Tindakan ini dilakukan untuk menambah khazanah arsip statis di lembaga kearsipan sebagai upaya menyelamatkan arsip dari tindakan penyusutan yang tidak prosedural atau adanya pembiaran arsip dari lembaga pencipta arsip. Jumlah arsip yang dipelihara dan diselamatkan disajikan dalam Gambar 2.50 berikut.



Gambar 2.50 Jumlah Arsip yang Dipelihara dan Diselamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2021

Adapun pelestarian arsip merupakan tindakan memperpanjang usia simpan arsip di lembaga kearsipan melalui kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pengawetan arsip dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor kimia, fisika, dan biota baik secara manual maupun mekanik. Grafik diatas menunjukkan bahwa arsip yang diselamatkan selama kurun waktu lima tahun terakhir yakni 2016-2020 mengalami peningkatan signifikan. Demikian juga arsip yang dilestarikan selama kurun waktu 2016-2020 terus mengalami peningkatan signifikan. Hal ini menunjukkan kesadaran bahwa dokumen penting layak diarsipkan.

Salah satu jenis arsip yang dikelola yaitu arsip statis. Arsip statis merupakan arsip yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan sehari-hari suatu organisasi tetapi arsip tetap harus disimpan dan dikelola berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ada dengan mempertimbangkan nilai guna arsip. Tidak banyak orang yang memanfaatkan. Pada tahun 2017, jumlah orang yang memanfaatkan arsip statis sebanyak 23 orang, pada tahun 2018 sebanyak 28 orang, pada tahun 2019 sebanyak 48 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 50 orang.

Tabel 2.136 Pemanfaatan Arsip Statis Tahun 2017-2020

Tahun	Jumlah Pengguna Arsip (orang)			Total (Orang)
	Masyarakat	Mahasiswa/Pelajar	Peneliti	
2017	6	16	1	23
2018	7	20	1	28
2019	10	36	2	48
2020	7	42	1	50

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2021

Dalam mengelola arsip, dibutuhkan sumber daya manusia kearsipan yang memiliki nilai kelayakan dan kualitas dalam profesionalisme dan kompetensi sesuai dengan standar yang berlaku. Seiring dengan peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Kota Pekalongan berupaya meningkatkan jumlah arsiparis untuk mengelola kearsipan. Tercatat di tahun 2017 ada sebanyak 4 orang arsiparis, lalu berkurang menjadi 3 orang di tahun 2018 karena mengundurkan diri, dan bertambah 4 orang sehingga total sampai tahun 2020 adalah 7 orang. Dari ketujuh orang arsiparis tersebut, 1 orang tidak perlu uji kompetensi karena masih menggunakan

aturan lama, 1 orang tidak dapat mengikuti uji kompetensi karena berpendidikan SMA (untuk dapat mengikuti uji kompetensi, minimal berpendidikan D3), dan 5 orang belum memiliki sertifikat.

Tabel 2.137 Sertifikasi Kompetensi Kearsipan Tahun 2017-2020

Tahun	Jumlah Arsiparis (orang)	Sertifikasi Kompetensi	Persentase
2017	4	0	0
2018	3	0	0
2019	3	0	0
2020	7	0	0

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2021

2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan masih merupakan potensi yang diandalkan Pemerintah Kota Pekalongan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Perikanan tangkap Kota Pekalongan memiliki potensi ekonomi strategis karena adanya fasilitas sebagai pusat pendaratan ikan, yaitu Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sangat representatif.

Pencapaian produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 hampir mencapai target yang diharapkan yaitu sebesar 90,76 persen dari target sebesar 15.300 ton, dengan realisasi 13.887 ton. Pencapaian Target budidaya ikan payau sebesar 1.200 ton dapat terpenuhi, dengan realisasi 7.173 ton (597,75 persen). Pencapaian produksi ikan air tawar pada tahun 2020 sebesar 91,7 ton dari target sebesar 83 ton, atau hanya tercapai 110,5 persen. Perkembangan produksi budidaya air payau dan budidaya air tawar mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke 2020, namun untuk perikanan tangkap mengalami penurunan atau berkurang.

Secara lengkap Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Pekalongan selama 5 (lima) tahun (tahun 2016-2020) disajikan dalam Tabel 2.138 berikut.

Tabel 2.138 Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Pekalongan Tahun 2016- 2020 (kg)

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Ikan Tangkap					
a. Jumlah Produksi Ikan	15.641	10.475	10.980	14.992	13.887
b. Target Daerah	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
Persentase Produksi	104,27	68,46	71,76	97,99	90,76
Ikan Budidaya Air Payau					
a. Jumlah Produksi Ikan	1.392	1.578,50	1.698,30	1.746,2	7.173
b. Target Daerah	745	1.200	1.200	1.200	1.200
Persentase Produksi	186,85	131,54	141,53	145,51	597,75
Ikan Budidaya Air Tawar					
a. Jumlah Produksi Ikan	110	46,7	46,90	11,3	91,7
b. Target Daerah	83	83	83	83	83
Persentase Produksi	132,53	56,27	56,51	13,61	110,5
Jumlah Produksi (ton)	17.143	12.100	12.725	16.750	21.152
Target Produksi	15.828	16.583	16.583	16.583	16.583

Sumber : DKP Kota Pekalongan, 2021

Konsumsi ikan di Kota Pekalongan perkapita di Kota Pekalongan dari tahun 2016-2020 secara kuantitas per kapita mengalami peningkatan. Dari tahun 2016 sampai tahun 2017 belum bisa mencapai target yang ditentukan yaitu 30 kg/kapita/tahun. Namun pada tahun 2018 sudah dapat melampaui target yaitu 31,60 kg/kapita/tahun dengan persentase 105,33 persen. Sedangkan untuk tahun 2019 jumlah konsumsi ikan mencapai 32,12 kg/kapita/tahun dengan persentase 107,07 persen dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 32,64 kg/kapita/tahun dengan persentase 108,80 persen. Perkembangan konsumsi ikan di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.139 berikut.

**Tabel 2.139 Konsumsi Ikan di Kota Pekalongan
Tahun 2016-2020 (kg/kapita/tahun)**

Tahun	Jumlah Konsumsi Ikan	Target Daerah	Persentase Konsumsi Ikan
2016	25,2	30	84,00
2017	26,7	30	89,00
2018	31,6	30	105,33
2019	32,12	30	107,07
2020	32,64	30	108,80

Sumber : DKP Kota Pekalongan, 2021

Saat ini terdapat 6 (enam) kelompok nelayan yang telah berbadan hukum, yang kemudian pada tahun 2017 ditindaklanjuti dengan pembinaan berupa pemberian bantuan/hibah. Namun demikian pemberian bantuan/hibah harus mengacu kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (6), dimana hibah diberikan dengan persyaratan telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itulah Pemerintah Kota Pekalongan tidak bisa memberikan bantuan kepada kelompok nelayan sejak tahun 2017 sampai tahun 2019.

**Tabel 2.140 Cakupan Bina Kelompok Nelayan
di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020**

Tahun	Jumlah Kelompok Nelayan Mendapatkan Bantuan Pemda	Jumlah Kelompok Nelayan	Persentase Cakupan Bina Nelayan (%)
2016	1	34	2,94
2017	0	34	0,00
2018	0	35	0,00
2019	0	35	0,00
2020	4	36	11,11

Sumber : DKP Kota Pekalongan, 2021

Di sisi produksi perikanan, mulai tahun 2016 hingga tahun 2019 sempat mengalami penurunan, namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018, yaitu 14.991 ton (tahun 2018 sebesar 10.980 ton) dan di tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 13.887 ton. Sedangkan jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan mengalami penurunan, dari 471,82 ton di tahun 2016 menjadi 108,83 ton di tahun 2019. Penurunan di tahun 2019 dikarenakan beberapa kapal milik kelompok nelayan, seperti kapal Inka Mina, tidak melakukan operasional penangkapan ikan karena kapal sudah tidak layak jalan/operasional. Selain itu ada rencana untuk mengalihfungsikan kapal menjadi kapal pengangkut.

Secara lengkap data Produksi Ikan Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 disajikan dalam Tabel 2.141 berikut.

Tabel 2.141 Produksi Ikan Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (ton)

Tahun	Jumlah Produksi Ikan Kontribusi hasil Kelompok Nelayan	Jumlah Produksi Ikan di Daerah	Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
2016	471,82	15.641	3,02
2017	259,48	10.475	2,48
2018	145,96	10.980	1,33
2019	108,83	14.991	0,73
2020	155,62	13.887	1,12

Sumber : DKP Kota Pekalongan, 2021

Peran Pemerintah Kota Pekalongan meningkatkan persentase perikanan dari kelompok nelayan cukup besar melalui inisiasi Gemar Makan Ikan yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kondisi ini harus tetap dipertahankan sehingga akan terdapat kecenderungan yang semakin meningkat.

2. Pariwisata

Pengembangan kepariwisataan yang handal harus didukung dengan ketersediaan akomodasi yang memadai juga. Hotel sebagai sarana akomodasi utama dan penunjang utama di Kota Pekalongan penting dalam mewujudkan Kota Pekalongan sebagai kota jasa di masa depan, terutama pariwisata. Jumlah hotel di wilayah Kota Pekalongan mengalami penurunan jumlahnya dari 31 hotel pada tahun 2016 menjadi 28 hotel pada tahun 2017. Tahun 2018 jumlah hotel di Kota Pekalongan bertambah 2 sehingga menjadi 30 hotel. Kemudian pada tahun 2019 terdapat 2 hotel yang direnovasi sehingga jumlahnya menjadi 28 hotel. Pada tahun 2020, kedua hotel tersebut dibuka kembali sehingga jumlahnya menjadi 30 hotel. Kelas hotel di Kota Pekalongan pun beragam, mulai dari kelas melati, bintang 1 sampai bintang 3.

Sarana akomodasi lainnya yang menunjang pariwisata adalah restoran. Restoran sebagai sarana akomodasi penunjang berperan menarik minat wisatawan untuk menikmati kuliner Kota Pekalongan selain menyediakan kuliner nasional dan internasional yang selama ini telah dikenal oleh wisatawan itu sendiri. Perkembangan jumlah restoran juga dapat menggambarkan perkembangan kepariwisataan dan perekonomian di Kota Pekalongan. Jumlah restoran yang semula hanya 132 di tahun 2016, sekarang telah berkembang menjadi 150 restoran di tahun 2020. Sedangkan untuk jumlah kunjungan wisata sebesar 283.882 pada tahun 2020, turun sekitar 60 persen dari tahun 2019.

Tabel 2.142 Jumlah Hotel, Restoran dan Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Hotel	Jumlah Restoran dan Rumah Makan	Jumlah Kunjungan Wisata
2016	31	132	363.585
2017	28	137	387.417
2018	30	138	784.254
2019	28	152	720.816
2020	30	150	283.882

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

Perkembangan pariwisata juga dapat dilihat dari tingkat okupansi hotel, dimana tahun 2018 dan 2019 tingkat okupansinya tidak signifikan. Untuk hotel kelas melati berada di angka 22 persen, hotel bintang 1 sebesar 18 persen, hotel bintang 2 sebesar 18 persen, dan hotel bintang 3 mengalami kenaikan dari 33 persen di tahun 2018 menjadi 36 persen di tahun 2019. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.143 berikut.

Tabel 2.143 Tingkat Okupansi Hotel di Kota Pekalongan Tahun 2018-2019

Kelas Hotel	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Rata-rata Okupansi (%)	
			2018	2019
Melati	20	445	22	22
Bintang 1	1	65	13	13
Bintang 2	1	47	18	18
Bintang 3	8	739	33	36

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

Untuk memajukan pariwisata di Kota Pekalongan, pemerintah beserta masyarakat menyelenggarakan kegiatan budaya dan seni. Tujuannya selain mendongkrak jumlah wisatawan, juga untuk meningkatkan citra wisata Kota Pekalongan sebagai tujuan wisata di pantai Utara Pulau Jawa. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya disajikan dalam Tabel 2.144 berikut.

Tabel 2.144 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penyelenggaraan	23	35	42	57	6

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

Daya tarik lain yang ditawarkan Kota Pekalongan adalah obyek wisata. Meskipun tidak memiliki banyak obyek wisata, namun cukup banyak pengunjung yang berwisata di Kota Pekalongan, antara lain di pantai Pasir Kencana, pantai Slamanan Indah, Museum Batik, Kampung Batik Kauman, Kampung Wisata Batik Pesindon dan Kampung Canting Landungsari. Obyek-obyek wisata tersebut yang menjadi andalan kepariwisataan di Kota Pekalongan. Bahkan Pemerintah Kota Pekalongan telah membangun Gapura Nusantara serta menata kawasan Alun-alun untuk menambah daya tarik wisata. Jumlah pengunjung wisata bahari mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya adalah abrasi yang merusak kawasan pantai, adanya rob dan adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020.

Sementara itu kunjungan di Museum Batik walaupun menurun, namun wisatawan dari mancanegara masih ada yang berkunjung. Hal ini menunjukkan bahwa minat wisatawan terhadap budaya batik Pekalongan masih cukup tinggi. Tetapi tidak demikian dengan kolam renang Tirta Sari, sejak tahun 2016 resmi ditutup karena tidak layak operasional.

**Tabel 2.145 Jumlah Kunjungan Wisata dan Pendapatan Daerah
dari Obyek Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020**

No	Objek Wisata	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pasir Kencana					
	Pengunjung					
	1). Wisman	0	0	6	2	0
	2). Wisnus	109.057	105.360	69.184	69.057	7.429
	B. Pendapatan (Rp.)	509.935.500	529.565.500	360.360.250	355.370.750	39.449.750
2	Slambaran Indah					
	Pengunjung					
	1). Wisman	0	0	0	0	0
	2). Wisnus	7.437	9.134	7.641	11.283	10.426
	B. Pendapatan (Rp.)	27.310.000	31.851.500	32.826.750	44.572.750	33.759.750
3	Museum Batik					
	Pengunjung					
	1). Wisman	265	358	454	286	138
	2). Wisnus	21.834	23.044	25.154	28.312	9.982
	B. Pendapatan (Rp.)	70.653.000	84.254.000	96.861.000	100.530.000	31.447.000
4	Kolam Renang Tirta Sari					
	Pengunjung					
	1). Wisman	0	0	0	0	0
	2). Wisnus	40.901	0	0	0	0
	B. Pendapatan (Rp.)	42.042.000	0	0	0	0

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2021

3. Pertanian

Capaian pembangunan pertanian Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2016-2020 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Puncak produktifitas padi terjadi pada tahun 2017 sebesar 7,29 ton per hektar. Kemudian menurun cukup drastis di tahun-tahun berikutnya yaitu sebesar 6,36 ton per hektar di tahun 2018. Tahun 2019 sebesar 3,16 ton per hektar dan tahun 2020 menurun lagi pada posisi 2,92 ton per hektar. Produktivitas padi di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel 2.146 berikut.

Tabel 2.146 Produksi Padi di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi tanaman padi (ton)	11.793,00	12.425,00	10.077,00	5.131,09	4.769,19
Luas areal tanaman padi (Ha)	2.771,00	1.704,00	1.584	1.618,74	1.631,53
Produktifitas padi per hektar (ton/Ha)	4,25	7,29	6,36	3,16	2,92

Sumber : Dinperpa Kota Pekalongan, Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

Untuk meningkatkan produksi pertanian, salah satu yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah melakukan pembinaan kepada kelompok tani. Jumlah kelompok tani yang mendapat pembinaan dari Pemkot meningkat di tahun 2018, dari 67 kelompok tani pada tahun 2017 menjadi 80 kelompok tani di tahun 2018, 87 kelompok tani di tahun 2019 dan 88 kelompok tani di tahun 2020. Kelompok tani ini terdiri dari KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) sebanyak 28 kelompok, kelompok tani sebanyak 28 kelompok dan kelompok ternak sebanyak 24 kelompok.

**Tabel 2.147 Cakupan Bina Kelompok Petani
Kota Pekalongan Tahun 2016-2020**

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kelompok tani mendapat bantuan Pemda	0	3	28	40	40
Jumlah kelompok tani	66	67	80	87	88
Cakupan bina kelompok petani (persen)	0,00	4,48	35,00	45,98	45,45

Sumber : Dinperpa Kota Pekalongan, 2021

4. Perdagangan

Aktivitas perekonomian di Kota Pekalongan yang didominasi oleh aktivitas perdagangan produk unggulan yaitu batik dan perikanan, juga ditopang oleh keberadaan pasar rakyat dan toko modern. Sektor perdagangan dan koperasi sangat memberikan kontribusi secara agregat yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya aktivitas perdagangan produk unggulan Kota Pekalongan diantaranya batik, ikan, tenun, konveksi dan aneka kerajinan lainnya berkembang dengan penuh inovasi dan kreativitas. Upaya Pemerintah dalam memfasilitasi dan menguatkan aktivitas usaha UMKM tersebut memberikan manfaat bagi keberlangsungan dan kepastian usaha UMKM, sehingga aktivitas bisnis UMKM Kota Pekalongan tetap terjaga dan mampu memenuhi pasar lokal, regional, nasional dan internasional.

Di samping didominasi aktivitas perdagangan produk unggulan yaitu batik dan perikanan juga ditopang oleh keberadaan pasar rakyat dan toko modern. Adapun jenis pasar rakyat dan toko modern seperti disajikan dalam Tabel 2.148 berikut.

**Tabel 2.148 Jenis Pasar dan Toko
di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020**

JenisPasar / Toko	2016	2017	2018	2019	2020
Sentra Perdagangan Batik	3	3	3	3	3
PasarTradisional	11	11	11	11	11
- Toko	247	247	74	74	74
- Kios	1.652	1.685	555	555	555
Toko diluar Pasar Tradisonal	2.726	2.726	2.726	2.726	2.726
Toko Modern :					
- Minimarket	26	41	42	43	53
- Supermarket	2	2	3	3	5
- Department store	4	4	3	3	4
- Hypermarket	2	2	1	1	1
- Perkulakan	0	0	0	0	0

Sumber : Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2021

Aktivitas perdagangan juga mencakup pedagang/usaha informal yang tidak kalah banyak dengan usaha formal. Pada tahun 2020, pedagang/usaha informal sebanyak 1.043 pedagang yang tersebar di titik-titik strategis di Kota Pekalongan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.149 berikut.

**Tabel 2.149 Jumlah Pedagang/Usaha Informal
di Kota Pekalongan Tahun 2020**

No.	Lokasi	Jumlah
1	Jl. Sultan Agung	30
2	Jl. Hasanudin	6
3	Jl. Urip Sumoharjo	57
4	Jl. Gatot Subroto	61
5	Jl. Kurinci	23
6	Jl. Kusuma Bangsa	44
7	Jl. Tentara Pelajar	16
8	Jl. Merak	3
9	Jl. WR. Supratman	13
10	Jl. Progo	10
11	Jl. Merpati	16
12	Jl. Mawar	18
13	Jl. Melati	38
14	Jl. Kepodang	16
15	Jl. Mataram	50
16	Alun-alun timur	22
17	Alun-alun utara	30
18	Alun-alun konveksi	209
19	SKLP	82
20	Tentara Pelajar	18
21	Jl. Veteran	50
22	Jl. Angkatan 45	6
23	Resimen	5
24	Gajahmada	9
25	Jl. Ahmad Dahlan	14
26	JL. HOS cokroaminoto	43
27	Jl. RA Kartini	24
28	Jl. Wahid Hasyim	15
29	Jl. Agus Salim	11
30	Jl. Dr Wahidin	16
31	Jl. Cendrawasih	36
32	JL. Rajawali	52
	Total	1.043

Sumber : Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan (diolah), 2021

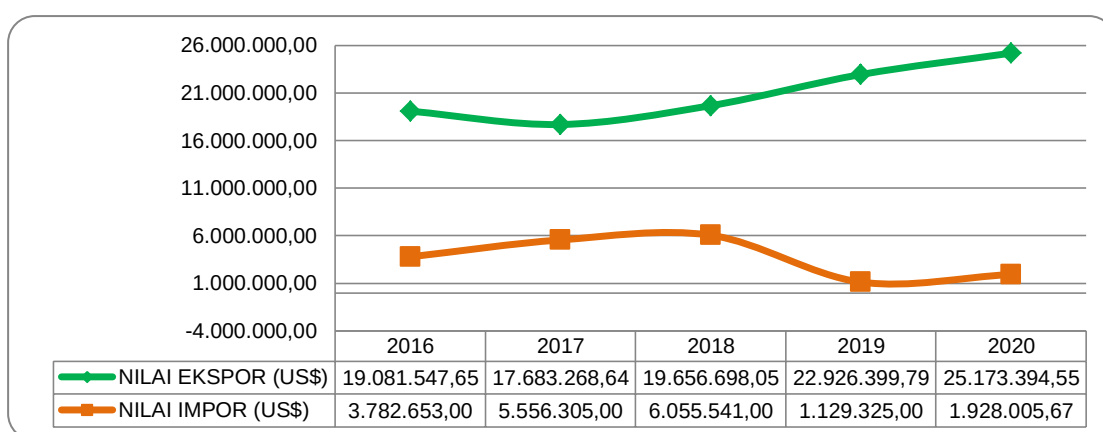
Dari sisi perdagangan, kontribusi di sektor perdagangan atas harga berlaku terus meroket dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Pada tahun 2016 sebesar Rp.1,847 triliun dan terus naik sampai di angka Rp.2,370 triliun di tahun 2019. Begitu pula dengan kontribusi sektor perdagangan atas harga konstan yang terus naik, mulai dari Rp.1,407 triliun di tahun 2016 menjadi Rp.1,655 triliun di tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 kontribusi sektor perdagangan atas harga berlaku dan atas harga konstan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, masing-masing menjadi sebesar Rp. 2.289 triliun dan Rp. 1.578 triliun. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.150 berikut.

Tabel 2.150 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

No	Keterangan		2016	2017	2018	2019	2020
1	ADHB	PDRB Total (Rp. Juta)	8.507.535,11	9.274.261,81	10.089.284,87	10.873.976,04	10.818.530,64
		PDRB Perdagangan (Rp. Juta)	1.847.835,00	2.019.945,16	2.195.304,05	2.370.293,83	2.289.121,10
		Kontribusi	21,72	21,78	21,76	21,80	21,16
2	ADHK 2010	PDRB Total	6.367.272,96	6.706.278,70	7.087.915,58	7.477.425,04	7.337.833,89
		PDRB Perdagangan (Rp. Juta)	1.407.425,41	1.487.771,72	1.570.073,03	1.655.883,36	1.578.463,62
		Kontribusi	22,10	22,18	22,15	22,15	21,51

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

Kenaikan kontribusi sektor perdagangan tidak sejalan dengan perkembangan nilai ekspor yang cenderung naik dari tahun 2016 sampai 2020, meskipun sempat menurun di tahun 2017. Nilai ekspor semula 91,081 juta US\$ di tahun 2016, turun menjadi 17,683 juta US\$ di tahun 2017. Namun setelah itu terus naik menjadi 25,173 juta US\$ di tahun 2020. Sementara itu untuk impor terus ditekan, namun dalam perjalanannya mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2020. Data selengkapnya disajikan dalam Gambar 2.51 berikut.



Gambar 2.51 Realisasi Nilai Ekspor dan Impor di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Sumber : Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2021

5. Perindustrian

Kinerja pembangunan urusan perindustrian dapat tergambarkan dari capaian beberapa indikator, seperti kontribusi sektor industri terhadap PDRB; dan pertumbuhan industri.

a. Kondisi Umum Industri

Jumlah industri di Kota Pekalongan sejak Tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2016 terdapat 36 unit industri, tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 20 unit dan di tahun 2018 penurunannya menjadi 14 unit, namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 89 unit dan di tahun 2020 menurun kembali menjadi 8 unit. Klasifikasi industri di Kota Pekalongan dari tahun 2016-2020 disajikan dalam Tabel 2.151 berikut.

Tabel 2.151 Klasifikasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

KLASIFIKASI INDUSTRI	JUMLAH UNIT INDUSTRI				
	2016	2017	2018	2019	2020
Industri Logam Mesin & Kimia (ILMK)	0	0	8	14	4
Industri Aneka (IA)	36	20	6	47	3
Industri Hasil Pertanian (IHP)	0	0	0	6	1
JUMLAH	36	20	14	89	8

Sumber : DPMPTSP Pekalongan, 2021

Jika dilihat dari nilai investasinya, industri di Kota Pekalongan mengalami perkembangan yang cukup baik seperti disajikan dalam Tabel 2.152 berikut.

Tabel 2.152 Nilai Investasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

KLASIFIKASI INDUSTRI	INVESTASI (Rp Juta)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Industri Logam Mesin & Kimia (ILMK)	0	0	933,00	9.412,03	955,00
Industri Aneka (IA)	13.779,40	9.683,00	11.682,00	69.483,30	7.184,00
Industri Hasil Pertanian (IHP)	0	0	0	2.721,41	1.450,00
JUMLAH	13.779,40	9.683,00	12.615	81.616,74	9.589,00

Sumber : DPMPTSP Kota Pekalongan, 2021

b. Industri Unggulan

Produk unggulan Kota Pekalongan adalah industri batik, pengolahan perikanan, teh, pertenunan ATM dan pertenunan ATBM. Dari kelima produk unggulan tersebut, batik, pakaian jadi dari tekstil dan pengolahan ikan merupakan kompetensi inti daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Kota Pekalongan. Untuk kegiatan pengolahan ikan sepanjang tahun 2016-2020 jumlah industrinya cenderung stagnan. Berikut ini adalah profil industri unggulan di Kota Pekalongan.

Tabel 2.153 Jumlah IKM Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Jenis industri	2016	2017	2018	2019	2020
Batik	878	760	770	781	1.457
Pakaian jadi dari tekstil	606	913	913	953	941
Pembekuan ikan	6	NA	NA	NA	NA
Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	1	1	1	1	1
Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	53	22	22	23	26
Penggaraman/Pengeringan Ikan	25	5	5	9	38
Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	44	7	7	8	88
Pengolahan Teh dan Kopi	41	8	8	11	31
Pertenunan	151	31	31	34	33

Sumber : Dinperinaker, 2021

**Tabel 2.154 Jumlah Tenaga Kerja Produk Unggulan
di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020**

Jenis industri	2016	2017	2018	2019	2020
Batik	12.937	12.104	5.197	5.278	7.964
Pakaian jadi dari tekstil	6.751	5.630	5.849	6.047	6.600
Pembekuan ikan	50	30	NA	NA	NA
Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	396	396	477	477	583
Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	175	102	56	59	52
Penggaraman/Pengeringan Ikan	681	390	71	75	190
Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	639	380	58	58	227
Pengolahan Teh dan Kopi	1.478	450	1.066	1.174	1.834
Pertenunan	4.055	760	595	595	466

Sumber : Dinperinaker Kota Pekalongan, 2021

**Tabel 2.155 Nilai Investasi (Rp. Juta) IKM Produk Unggulan
di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020**

Jenis industri	2016	2017	2018	2019	2020
Batik	49.235	45.760	n/a	n/a	10.041
Pakaian jadi dari tekstil	33.540	25.750	n/a	12.573	2.098
Pembekuan ikan	406	215	n/a	n/a	n/a
Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	11.500	11.500	n/a	n/a	n/a
Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	278	210	n/a	n/a	14,2
Penggaraman/Pengeringan Ikan	1.218	560	n/a	n/a	135
Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	7.542	3.950	n/a	n/a	72.15
Pengolahan Teh dan Kopi	46.530	19.115	n/a	n/a	3.550
Pertenunan	33.533	7.250	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinperinaker Kota Pekalongan, 2021

c. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB sepanjang 2016-2020 terus meningkat baik berdasarkan ADHB. Pada tahun 2016 kontribusi sektor perindustrian ADHB sebesar Rp. 1.822.761,68 Juta (21,43 persen dari total PDRB), dan terus mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi Rp. 2.315.321,70 juta (21,40 persen dari total PDRB), meskipun secara persentase berfluktuasi. Peningkatan kinerja sektor perindustrian mampu menunjang aktivitas perekonomian Kota Pekalongan selain sektor perdagangan. Lapangan usaha industri pengolahan merupakan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB Kota Pekalongan. Perkembangan kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB disajikan dalam Tabel 2.156.

Tabel 2.156 Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Keterangan		2016	2017	2018	2019	2020
ADHB	PDRB Total (Rp. Juta)	8.507.535,11	9.274.261,81	10.089.284,87	10.873.976,04	10.818.530,64
	PDRB Perindustrian (Rp. Juta)	1.822.761,68	1.959.739,49	2.112.720,60	2.267.013,33	2.315.321,70
	Kontribusi	21,43	21,13	20,94	20,85	21,40
ADHK (2010)	PDRB Total	6.367.272,96	6.706.278,70	7.087.915,58	7.477.425,04	7.337.833,89
	PDRB Perindustrian	1.356.596,75	1.415.641,58	1.478.741,06	1.550.360,71	1.542.947,72
	Kontribusi	21,31	21,11	20,86	20,73	21,03

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

2.3.4. Unsur Penunjang

1. Sekretariat Daerah

a. Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah dilaksanakan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Bentuk kerjasama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan meliputi kerjasama daerah dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam Negeri dan Perguruan Tinggi.

Tabel 2.157 Jumlah Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah	72	118	150	136	93

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda, 2021

b. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi akan menjadi prasyarat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang harus semakin meningkat, sesuai dengan tuntutan dinamika global. Kepegawaian akan sangat terkait dengan reformasi birokrasi. Dalam rangka perwujudan *good governance* telah disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014 oleh pemerintah, yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif). Dalam bahasa yang lain, reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan mencakup beberapa area perubahan yaitu :

- 1) Penataan dan penguatan organisasi, dilaksanakan melalui evaluasi kelembagaan PD.

- 2) Penataan tatalaksana, dilaksanakan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), peningkatan Standar Manajemen Mutu (SMM)/Sertifikasi ISO.
- 3) Penataan sistem manajemen SDM aparatur, dilaksanakan melalui penyelenggaraan diklat aparatur, pengadaan CPNS Pemerintah Kota Pekalongan, tes kompetensi pejabat struktural, kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dan peningkatan kualitas PNS melalui fasilitasi tugas/izin belajar.
- 4) Penguatan pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal pada PD.
- 5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dilakukan melalui penerbitan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- 7) Penataan peraturan perundang-undangan, dimana produk hukum Pemerintah Kota Pekalongan dapat diakses melalui alamat <https://jdih.pekalongankota.go.id>.
- 8) Pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan), dilakukan melalui sosialisasi dan diklat TOT pengembangan budaya kerja, penerapan nilai-nilai budaya kerja dan etika PNS, serta pembentukan kelompok budaya kerja pada setiap PD.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, telah dilakukan peningkatan SMM/sertifikasi ISO pada PD, terutama yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Beberapa PD yang telah memperoleh sertifikasi ISO yaitu : 1) ISO 9001:2008 oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; 2) ISO 9001:2008 di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM); 3) ISO 9001:2008 oleh Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu; 4) ISO 9001:2008 oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; 5) ISO 9001:2015 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 6) ISO 9001:2015 oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta; 7) ISO 9001:2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja terus dilaksanakan dengan peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari tahun ke tahun Nilai Akuntabilitas Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2018 mengalami lompatan 2 peringkat dari CC menjadi BB.

Pada Tahun 2020 hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan memperoleh nilai 73,07 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Pekalongan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik. Rincian penilaian SAKIP disajikan dalam Tabel 2.158 berikut.

Tabel 2.158 Nilai SAKIP Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2016	Nilai 2017	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2020
1	Perencanaan Kinerja	30	15,05	19,95	24,42	24,53	24,70
2	Pengukuran Kinerja	25	9,48	10,39	17,07	17,54	17,92
3	Pelaporan Kinerja	15	9,65	8,56	10,46	11,09	11,17

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2016	Nilai 2017	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2020
4	Evaluasi Internal	10	4,31	5,12	7,24	7,29	7,39
5	Capaian Kinerja	20	9,04	11,71	11,69	12,14	11,89
	Nilai SAKIP	100	47,53	55,73	70,88	72,59	73,07
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		C	C	CC	BB	BB

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2021

Upaya Pemerintah Kota Pekalongan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, juga ditempuh dengan melaksanakan kajian terhadap kepuasan masyarakat terhadap Unit Pelayanan Publik (UPP). Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Pada Tahun 2020 Survei Kepuasan Masyarakat Kota Pekalongan mendapat nilai 80,42 dengan kategori Baik. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di Kota Pekalongan Tahun 2020 disajikan dalam Tabel 2.159 berikut.

Tabel 2.159 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di Kota Pekalongan Tahun 2020

Nama OPD		Nilai IKM	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	79,24	Baik
2	Dinas Kesehatan	82,18	Baik
3	Rumah Sakit Umum Daerah Benda	85,68	Baik
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	77,42	Baik
5	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	75,76	Kurang Baik
6	Satuan Polisi Pamong Praja	85,59	Baik
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	81,99	Baik
8	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	79,98	Baik
9	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan KB	79,48	Baik
10	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	79,53	Baik
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Dan Perlindungan Anak	83,19	Baik
12	Dinas Pertanian Dan Pangan	79,08	Baik
13	Dinas Lingkungan Hidup	75,91	Kurang Baik
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	79,44	Baik
15	Dinas Perhubungan	77,20	Baik
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	80,60	Baik
17	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	75,99	Kurang Baik
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu	86,18	Baik
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga	78,75	Baik
20	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	78,51	Baik
21	Dinas Kelautan Dan Perikanan	78,00	Baik
22	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah	83,98	Baik

	Nama OPD	Nilai IKM	Keterangan
23	Badan Keuangan Daerah	78,63	Baik
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	81,54	Baik
25	Sekretariat DPRD	78,61	Baik
26	Inspektorat	80,19	Baik
27	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	78,15	Baik
28	Bagian Protokol dan Kompim Setda	84,67	Baik
29	Bagian Organisasi Setda	86,01	Baik
30	Bagian Umum Setda	81,89	Baik
31	Bagian Hukum Setda	84,23	Baik
32	Bagian PBJ dan Minbang Setda	80,38	Baik
33	Bagian Perekonomian dan SDA Setda	81,94	Baik
34	Bagian Pemerintahan Setda	85,12	Baik
35	Kecamatan Pekalongan Utara	80,80	Baik
36	Kelurahan Kandang Panjang	81,37	Baik
37	Kelurahan Panjang Wetan	79,95	Baik
38	Kelurahan Panjang Baru	81,08	Baik
39	Kelurahan Krapyak	77,32	Baik
40	Kelurahan Padukuhan Kraton	80,66	Baik
41	Kelurahan Degayu	80,88	Baik
42	Kelurahan Bandengan	80,07	Baik
43	Kecamatan Pekalongan Selatan	80,92	Baik
44	Kelurahan Kuripan Kertoharjo	81,62	Baik
45	Kelurahan Kuripan Yosorejo	87,17	Baik
46	Kelurahan Jenggot	79,13	Baik
47	Kelurahan Buaran Kradenan	77,02	Baik
48	Kelurahan Banyurip	79,52	Baik
49	Kelurahan Soko Duwet	80,53	Baik
50	Kecamatan Pekalongan Barat	79,60	Baik
51	Kelurahan Medono	78,14	Baik
52	Kelurahan Podosugih	80,37	Baik
53	Kelurahan Pasir Kraton Kramat	82,04	Baik
54	Kelurahan Tirto	81,09	Baik
55	Kelurahan Sapuro Kebulen	80,02	Baik
56	Kelurahan Bendan Kergon	79,16	Baik
57	Kelurahan Pringrejo	78,36	Baik
58	Kecamatan Pekalongan Timur	80,97	Baik
59	Kelurahan Kauman	83,22	Baik
60	Kelurahan Poncol	82,64	Baik
61	Kelurahan Klego	79,43	Baik
62	Kelurahan Gamer	78,93	Baik
63	Kelurahan Noyontaansari	80,85	Baik
64	Kelurahan Setono	80,16	Baik
65	Kelurahan Kalibaros	78,21	Baik
	Rata-rata IKM Kota Pekalongan	80,42	Baik

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2021

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Dari hasil penilaian Kemenpan RB tahun 2019, indeks reformasi birokrasi Kota Pekaongan yang dicapai adalah 68,97 dengan predikat “B”. Dengan nilai tersebut, Kota Pekalongan berada pada peringkat kedua se-Jawa Tengah setelah Kota Semarang. Adapun rincian komponen penilaian tersebut disajikan dalam Tabel 2.160 berikut.

Tabel 2.160 Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2018-2019

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2018	2019
I	Komponen Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5,00	2,33	2,47
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	1,46	1,62
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,51	3,47
4	Penataan Tatalaksana	5,00	2,84	2,90
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	12,11	10,52
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	5,08	5,07
7	Penguatan Pengawasan	12,00	5,15	5,62
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,63	3,65
	Total Komponen pengungkit (A)	60,00	36,11	35,32
II	Komponen Hasil			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	7,80	9,92
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,72	4,99
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	6,16	6,74
4	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,65	9,00
	Total Komponen Hasil (B)	40,00	30,33	33,65
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	66,44	68,97

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2020

Tabel diatas menggambarkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi telah didukung dengan komitmen yang tinggi dari pimpinan sehingga mampu mendorong terjadinya perubahan dalam tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, ada perubahan dalam komponen penilaian. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif, dan analisis yang holistik. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi disajikan dalam Tabel 2.161 berikut.

Tabel 2.161 Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2020
A	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	14,41
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,08

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2020
	III. Reform	30,00	18,88
Total Komponen Pengungkit		60,00	39,37
B	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,08
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	7,25
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	7,58
4.	Kinerja Organisasi	10,00	6,63
Total Komponen Hasil		40,00	29,54
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	68,91

Sumber : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020, 2021

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD adalah unsur penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang DPRD. Sekretariat DPRD membantu pencapaian kinerja DPRD, dimana yang menjadi indikator kinerja yaitu penetapan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) menjadi Perda (Peraturan Daerah). Usulan Raperda yang masuk ke Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) diupayakan untuk ditetapkan menjadi Perda. Pada tahun 2020, usulan Raperda yang masuk ke Propemperda sebanyak 15 Raperda yang terdiri dari 1 Raperda inisiatif dan 14 Raperda usulan Wali Kota.

Dalam pelaksanaan pembahasan Raperda, tidak semua usulan Raperda menjadi Perda. Sampai dengan akhir tahun 2020, jumlah Raperda yang berhasil ditetapkan menjadi Perda yaitu sebanyak 7 Perda, terdiri dari 1 Perda inisiatif dan 6 Perda usulan Wali Kota.

2.3.5. Unsur Pendukung

1. Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun. Periode RPJPD Kota Pekalongan yakni tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017. Sementara itu RPJMD tahun 2021-2026 yang saat ini sedang disusun merupakan RPJMD IV atas RPJPD Kota Pekalongan. Selanjutnya, dokumen RKPD sebagai perencanaan pembangunan tahunan disusun berdasarkan RPJMD.

Dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan, Bappeda Kota Pekalongan selalu berupaya tepat waktu sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahkan selalu berupaya melakukan percepatan-percepatan dari jadwal yang telah ditentukan.

Sebagai bentuk sinergitas dengan kebijakan Pusat dan Provinsi, dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan disusun dengan memperhatikan RPJP, RPJMN, RKP, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RKPD Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

2. Keuangan

Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Perda Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, Perda Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual, nilai historis, realistis, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar.

Optimalisasi pengelolaan aset daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD. Untuk itu dilakukan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, *updating* data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/sengketa aset, pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD).

Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Pemerintah Kota Pekalongan belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini yang diterima adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kondisi ini menuntut kerja bersama segenap elemen Pemerintah Kota Pekalongan agar dapat memperoleh Opini WTP pada tahun berikutnya. Upaya ini membuahkan hasil pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 dimana secara berturut-turut Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

3. Kepegawaian

Dalam upaya menggerakkan roda pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), ASN (Aparatur Sipil Negara) menduduki peran yang sangat penting. Peran ASN dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi

dengan level mulai dari tingkat pelaksana sampai eselon II (Pemerintah Kab/Kota), serta mempertimbangkan tingkat pendidikan.

Pada tahun 2019, jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sebanyak 3.142 orang, kemudian berkurang menjadi 2.956 orang di tahun 2020. Berkurangnya jumlah ASN dikarenakan adanya ASN yang pensiun dan beberapa meninggal dunia dikarenakan pandemi COVID-19.

Jumlah ASN menurut jabatan dan jenis kelamin disajikan dalam Tabel 2.162 berikut.

Tabel 2.162 Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2020

Jabatan	2019			2020		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Eselon II	22	6	28	23	4	27
Eselon III	69	34	103	70	35	105
Eselon IV	216	156	372	207	154	361
Fungsional Umum	681	406	1.087	627	378	1.005
Fungsional Tertentu	538	1.014	1.552	511	947	1.458
Jumlah Total	1.526	1.616	3.142	1.438	1.518	2.956

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

Sedangkan jumlah ASN menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin disajikan dalam Tabel 2.163 berikut.

Tabel 2.163 Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2020

Jabatan	2019			2020		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sarjana/ doktor/ Ph.d	803	1.171	1.974	765	1.080	1.845
Diploma III/ Sarjana Muda	140	218	358	137	222	359
Diploma I, II	24	16	40	22	11	33
SMA/ Sederajat	383	202	858	342	174	516
SLTP/ sederajat	101	8	109	93	7	100
SD	75	1	76	61	0	61
Jumlah Total	1.526	1.616	3.142	1.438	1.518	2.956

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

Upaya lain yang nantinya akan dilakukan yaitu dengan pengukuran indeks penerapan Sistem Merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Tujuan dari Sistem Merit antara lain :

- Melakukan rekrutmen, seleksi, dan promosi berdasarkan kompetensi yang terbuka dan adil dengan menyusun perencanaan SDM Aparatur secara berkelanjutan;
- Memperlakukan pegawai ASN secara adil dan setara;
- Mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien;

- d. Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dengan memperhatikan hasil kinerja;
- e. Memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi;
- f. Memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin;
- g. Menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku, dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat;
- h. Menerapkan pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;
- i. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai ASN;
- j. Melaksanakan manajemen kinerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi;
- k. Melindungi pegawai ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan;
- l. Memberikan perlindungan kepada pegawai.

Adapun indikator yang digunakan dalam pengukuran indeks penerapan Sistem Merit menurut Pasal 134 Ayat (2) PP No. 11 tahun 2017 yaitu :

- a. Seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan;
- b. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja;
- c. Pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka;
- d. Memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta;
- e. Memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan;
- f. Menerapkan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN;
- g. Merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja;
- h. Memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang; dan
- i. Memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN.

Pada tahun 2020, Indeks Sistem Merit Kota Pekalongan mencapai nilai 204 dengan metode penilaian mandiri (*self assessment*).

4. Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan kapasitas SDM aparatur merupakan upaya untuk mewujudkan profesionalisme dan mendukung peningkatan pelayanan publik, dilaksanakan melalui pengadaan CPNS; diklat formal (pengiriman tugas belajar dan pemberian izin belajar), diklat kader (bintek dan kursus), tes kompetensi (Quasi, PCAP, dan ujian kedinasan), kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penilaian prestasi kerja, pembinaan disiplin, pemberian penghargaan dan kesejahteraan, pemberhentian dan pensiun serta pemutakhiran data.

Pemerintah Kota Pekalongan juga telah memfasilitasi pelaksanaan diklat aparatur. Diklat tersebut meliputi diklat teknis, fungsional, kepemimpinan dan prajabatan. Secara umum terjadi kecenderungan perkembangan jumlah aparatur yang mengikuti diklat. Dengan semakin banyaknya aparatur yang telah mengikuti diklat, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat. Secara detail disajikan dalam Tabel 2.164 berikut.

**Tabel 2.164 Jumlah Diklat Aparatur
di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020**

Diklat	2016	2017	2018	2019	2020
Teknis	250	455	350	366	151
Fungsional	206	231	285	166	75
Kepemimpinan	35	5	52	8	1
Prajabatan	65	2	3	251	0

Sumber : BKPPD Kota Pekalongan, 2021

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa untuk pelaksanaan diklat di Kota Pekalongan sangat fluktuatif disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Diklat prajabatan pada tahun 2019 mengalami kenaikan karena adanya pengangkatan CPNS pada tahun 2018 sejumlah 251 orang.

Di samping hal-hal tersebut di atas, dalam rangka pembinaan kepegawaian juga telah dilaksanakan pembinaan kepada aparatur yang akan memasuki masa pensiun/purna tugas. Dengan persiapan pensiun yang sebaik-baiknya diharapkan aparatur keseluruhan dapat bekerja dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk-bentuk pembinaan terhadap aparatur yang akan pensiun tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui status kesehatan aparatur (*general check-up*) serta diklat persiapan pensiun/purna tugas. Hal ini didasarkan pada Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Jumlah ASN yang melakukan *general check-up* dan mengikuti diklat purna tugas terhitung fluktuatif, tergantung dari jumlah ASN yang akan memasuki masa pensiun. ASN yang melakukan *general check-up* tahun 2016 sebanyak 64 orang, tahun 2017 sebanyak 75 orang, tahun 2018 sebanyak 53 orang, tahun 2019 sebanyak 343 orang dan tahun 2020 sebanyak 11 orang. Sementara ASN yang mengikuti diklat purna tugas 2016 sebanyak 26 orang, tahun 2017 sebanyak 45 orang, tahun 2018 sebanyak 90 orang, tahun 2019 dan 2020 sebanyak 60 orang.

**Tabel 2.165 Jumlah Aparatur yang Melakukan General Check-up dan
Mengikuti Diklat Purna Tugas di Pemerintah Kota Pekalongan
Tahun 2016 – 2020**

Jenis Pembinaan Memasuki Masa Pensiun	2016	2017	2018	2019	2020
General Check-Up	64	75	53	343	11
Diklat Purna Tugas	26	45	90	60	60

Sumber : BKPPD Kota Pekalongan, 2021

5. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan memegang peranan penting sebagai problem solving permasalahan yang ada di daerah. Hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan diharapkan dapat mendukung Pemerintah Daerah dalam proses perumusan kebijakan dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Kegiatan yang rutin dilaksanakan adalah Riset Unggulan Daerah (RUD) dan fasilitasi Riset Bersama (Risber). RUD merupakan kegiatan fasilitasi pembiayaan riset yang mengarah kepada isu aktual dan strategis Kota Pekalongan, sedangkan fasilitasi Riset Bersama

merupakan salah satu upaya pengambilan keputusan dan kebijakan publik berbasis fakta dan bukti ilmiah yaitu dengan memperluas mitra kerja sama di bidang penelitian dan pengkajian.

RUD dilaksanakan berdasarkan seleksi oleh tim reviewer terhadap proposal yang sudah masuk. Pada tahun 2020, telah ditetapkan 5 pemenang sebagai berikut :

1. Universitas Diponegoro, dengan judul “Studi Potensi dan Penentuan Sumur Resapan Sebagai Upaya Pengendalian Banjir di Kota Pekalongan Berbasis Sistem Informasi Geografis”;
2. Universitas Pekalongan, dengan judul “Strategi Mitigasi Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 : Optimalisasi Peran Pentahelix di Kota Pekalongan Berdasar Pendekatan Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah”;
3. STIMIK Widya Pratama Pekalongan “Meningkatkan Peranan Aparatur Pemerintah Tingkat RT dan RW dalam Dashboard Eksekutif untuk Memudahkan Pemerintah Kota Pekalongan dalam Mengkoordinasi dan Memonitoring”;
4. Universitas Selamat Sri, dengan judul “Desain Pendidikan Agama dalam Keluarga Guna Membangun Problem Solving Anak”;
5. STIMIK Widya Pratama Pekalongan, dengan judul “Edukasi dan Mitigasi Bencana Banjir untuk Siaga Bencana di Kota Pekalongan”.

Riset Bersama dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau lembaga penelitian melalui penunjukan langsung. Tema yang diusung dalam riset bersama berdasarkan usulan dari OPD atau kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan sesuai dengan kebutuhan. Hasil riset bersama tahun 2019 antara lain sebagai berikut :

1. Tim Peneliti Poltekkes, dengan judul “Megono Kaleng Kuliner Tradisional Kota Pekalongan”;
2. CV. Monalisa Art, dengan judul “Studi Konsep Pengembangan Pekalongan Baru”;
3. CV. Tunas, dengan judul “Road Map Percepatan Pengembangan Pariwisata Kota Pekalongan”;
4. CV. Pijar Mulya Wasesa, dengan judul “Penelitian Analisis Investasi Penyertaan Modal Perumda Tirtayasa”.

2.3.6. Unsur Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada pengawasan internal secara berkala pada beberapa objek pemeriksaan meliputi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Tujuan ditetapkan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan adalah :

- (1) Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota;
- (2) Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP;
- (3) Mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui Pengawasan umum dan teknis yang dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya. Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan kinerja yang dilakukan secara komprehensif dengan ruang lingkup pemeriksaan pada aspek kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah.

APIP melakukan penilaian kematangan/maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada OPD. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik pula kualitas sistem pengendalian intern organisasi itu. Tingkat kematangan SPIP Kota Pekalongan dari tahun 2016 sampai 2020 terus meningkat, diawali dari level 2 sampai level 3 dengan rincian sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.166 berikut.

Tabel 2.166 Tingkat Kematangan SPIP Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tingkat Maturitas SPIP	2016	2017	2018	2019	2020
Level	Level 2 infrastruktur penuh	Level 3 dengan catatan	Level 3 dengan catatan	Level 3 Penuh	Level 3 Penuh

Sumber : Inspektorat Kota Pekalongan, 2021

2.3.7. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas daerah di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2016 – 2020 secara umum menunjukkan situasi yang aman dan tertib, meskipun masih terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain penganiayaan, pencurian, penipuan, dan narkoba. Pada tahun 2020 kasus tindak kejahatan narkoba dan psikotropika mengalami kenaikan. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.167 berikut.

Tabel 2.167 Banyaknya Kasus Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Tindak Kejahatan	2016	2017	2018	2019	2020
Pembunuhan	0	0	1	0	2
Pemeriksaan	1	0	2	0	0
Penganiayaan	1	1	6	7	3
Pencurian	47	25	45	71	33
Penipuan	18	0	11	19	18
Penadahan	2	2	0	0	0
Narkoba dan Psikotropika	31	3	50	44	64

Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan, 2021

Kondusivitas wilayah juga dipengaruhi oleh terjadinya konflik sosial. Berbagai upaya preventif telah dilakukan dalam rangka mencegah potensi kerawanan sosial menjadi konflik sosial. Tabel 2.167 menunjukkan data konflik sosial di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2016-2020.

Tabel 2.168 Jumlah Kasus Konflik Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kasus Konflik Sosial	14	1	2	1	1

Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan, 2021

Berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka tindakan preventif agar tidak muncul konflik sosial. Pengelolaan potensi konflik sosial dilakukan melalui Program Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, antara lain dengan kegiatan Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama, Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar Dan Mahasiswa, Pembinaan Karakter Dan Penguatan Wawasan Kebangsaan Bagi Aparatur, Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda, Pengawasan Orang Asing, Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial, dan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah.

2. Politik

Kondisi politik Kota Pekalongan dapat digambarkan melalui pelaksanaan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, serta Pemilukada yang berjalan tertib dan demokratis tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis. Pembinaan politik dilakukan setiap akan diselenggarakan pemilihan umum. Oleh karena itu pada tahun 2016 dan 2017 tidak dilakukan kegiatan pembinaan politik karena pada tahun tersebut tidak ada pemilihan umum di Kota Pekalongan.

Tabel 2.169 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Kegiatan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kegiatan pembinaan Politik Daerah	0	0	32	32	38

Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan, 2021

Tingkat partisipasi politik ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pemilu, baik Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah (Gubernur dan Wali Kota) dan Pemilu Legislatif. Pada tahun 2020 telah diadakan pemilihan Wlikota dan Wakil Wali Kota Pekalongan dengan tingkat partisipasi di Kota Pekalongan sebesar 79,35 persen.

Tabel 2.170 Tingkat Partisipasi Politik di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

JENIS PEMILIHAN UMUM	2016	2017	2018	2019	2020
Pemilu Kepala Daerah (Wali Kota) (persen)	-	-	-	-	79,35
Pemilu Kepala Daerah (Gubernur) (persen)	-	-	64,00	-	-
Pemilu Presiden (persen)	-	-	-	85,88	-
Pemilu Legislatif (persen)	-	-	-	85,51	-

Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan, 2021

3. Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Sebagai upaya pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama kurun waktu 2016-2020 telah dilakukan kegiatan pendayagunaan potensi LSM, Ormas dan OKP. Kegiatan tersebut hanya dilaksanakan pada tahun 2016-2020 masing-masing sebanyak 1 kali pada tahun 2016, 2018 dan 2019. Sedangkan di tahun 2017 dilakukan sebanyak 2 kali dan 3 kali di tahun 2020.

Tabel 2.171 Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Tahun 2016 – 2020

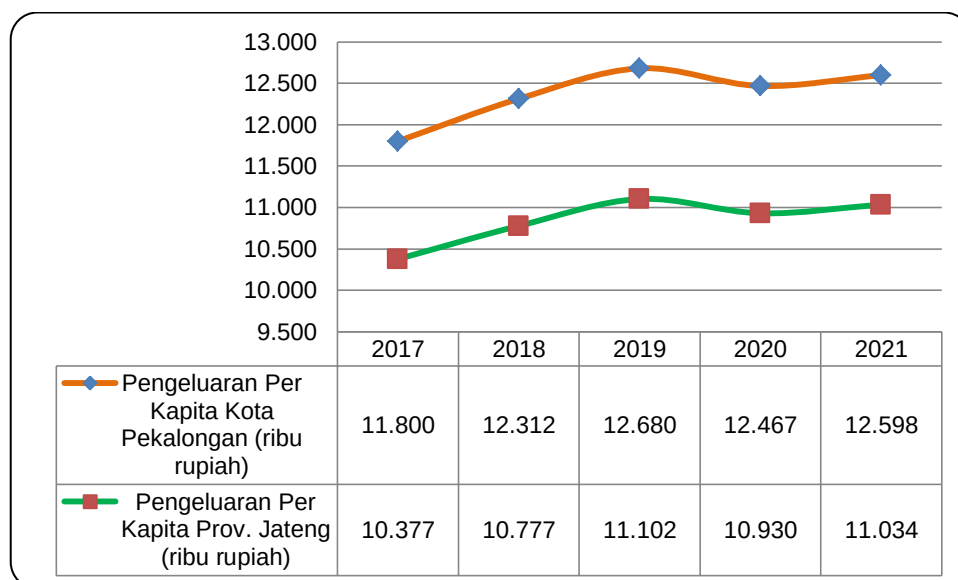
Kegiatan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1	2	1	1	3

Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan, 2021

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi suatu daerah adalah pengeluaran konsumsi per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menunjukkan derajat daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa. Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan utama sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut semakin meningkat.



Gambar 2.52 Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jateng Tahun 2017-2021

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2021

Kesejahteraan penduduk Kota Pekalongan terus meningkat sepanjang 2017-2021. Hal ini terlihat dari pengeluaran riil per kapita per tahun (disesuaikan) Kota Pekalongan terus meningkat. Pada 2017 berada di angka Rp.11.800.000, dan di tahun 2018 naik hingga Rp.12.312.000. Pada tahun 2019 pengeluaran per kapita Kota Pekalongan mencapai Rp.12.680.000 dan menurun sebesar Rp. 12.467.000 di tahun 2020, kemudian meningkat kembali di angka Rp. 12.598.000 pada tahun 2021. Gambar 2.47 menjelaskan pengeluaran riil per kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017 sampai tahun 2021.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah kendaraan. Di Kota Pekalongan, jumlah kendaraan cukup fluktuatif (baik kendaraan roda dua, roda tiga, dan roda empat/lebih), dimana sepanjang tahun 2016 sampai 2020 jumlahnya naik turun. Adapun penambahan panjang jalan raya baik jalan negara, jalan provinsi dan jalan kota secara agregat tidak mengalami pertumbuhan signifikan. Namun demikian rasionya tidak berubah signifikan. Kondisi selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.172.

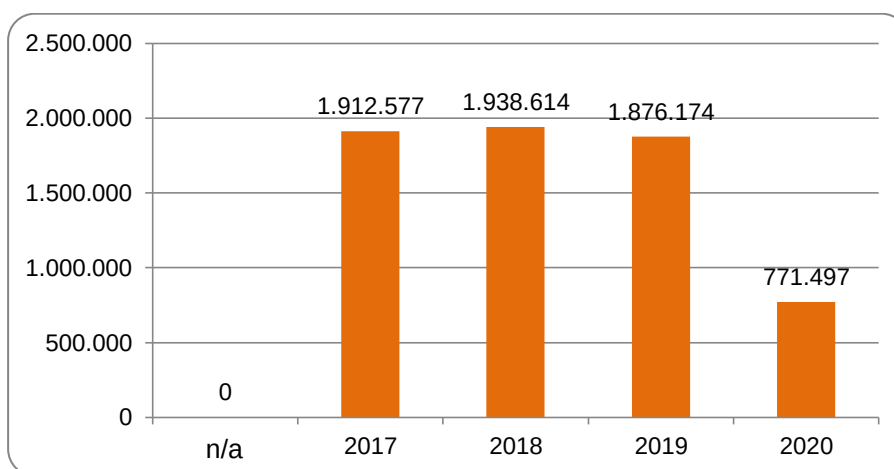
Tabel 2.172 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Tahun	Panjang Jalan (km)	Jumlah Kendaraan	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
2016	155,44	182.944	0,0008
2017	155,44	147.135	0,0008
2018	155,44	157.332	0,0009
2019	155,44	163.989	0,0009
2020	153,41	173.114	0,0009

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dan Kota Pekalongan dalam Angka 2021, 2021

2. Jumlah Orang yang Melalui Terminal Per Tahun

Di Kota Pekalongan terdapat terminal tipe A yang dapat dimanfaatkan sebagai terminal untuk bis antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi dan dalam kota. Sejak diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan atas Terminal Type A ada di Pemerintah Pusat. Jumlah orang yang melalui terminal Kota Pekalongan mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2018, yaitu dari 1.912.577 penumpang menjadi 1.938.614 penumpang. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1.876.174 penumpang. Kemudian mengalami penurunan jumlah penumpang yang cukup drastis di tahun 2020 menjadi 771.497 penumpang. Adapun perkembangannya disajikan dalam Gambar 2.53 berikut.

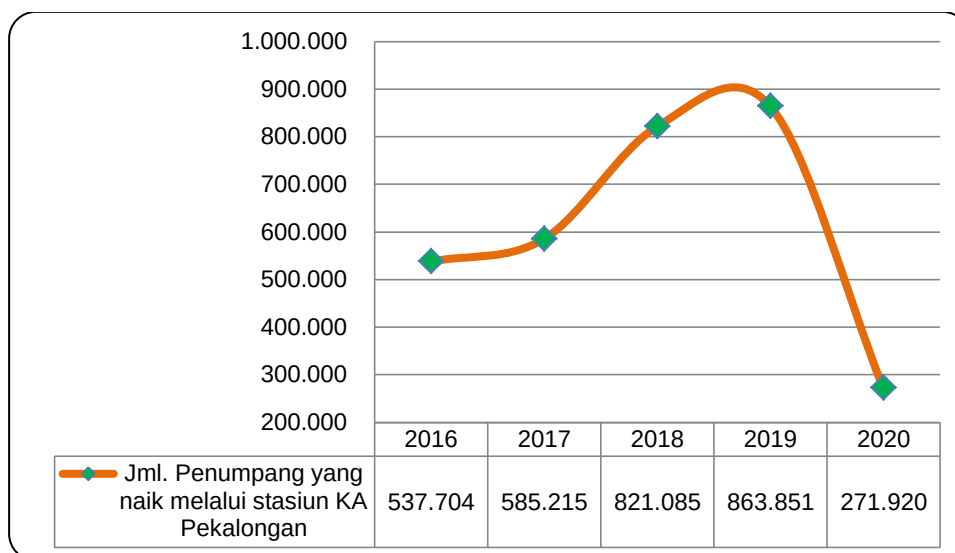


Gambar 2.53 Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

3. Jumlah Penumpang yang Naik Melalui Stasiun Kereta Api

Sebagai salah satu kota utama di Jawa Tengah, Kota Pekalongan memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomiannya melalui kunjungan yang dilakukan orang luar daerah. Penggunaan moda transportasi darat seperti kereta api menjadi salah satu moda yang paling digemari karena lebih mudah, cepat dan memiliki ketepatan waktu lebih tinggi serta letak Stasiun Besar Pekalongan yang berada di kawasan pusat kota. Di samping itu, fasilitas hotel yang dekat dengan stasiun memudahkan penumpang mencari tempat beristirahat.



Gambar 2.54 Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2021

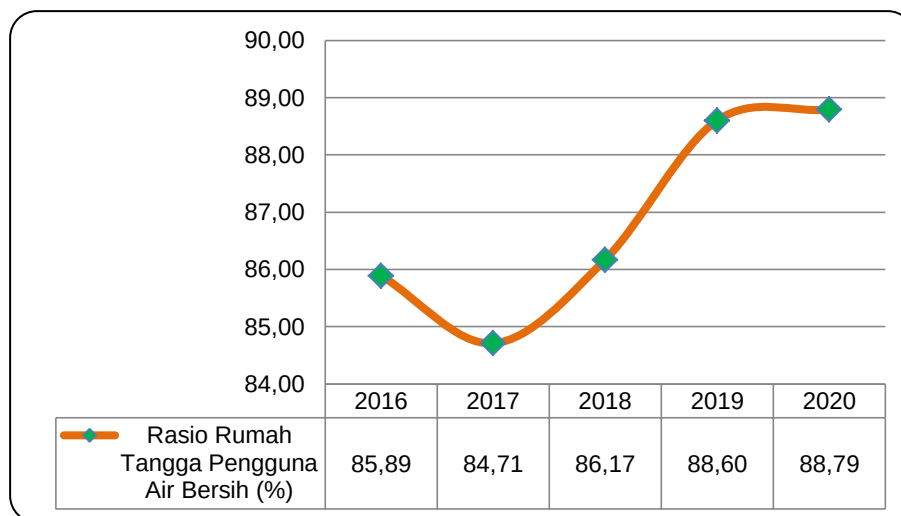
Jumlah penumpang yang melalui Stasiun Pekalongan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti yang disajikan dalam Gambar 2.54. Tahun 2016 jumlah orang yang naik melalui stasiun sebanyak 537.704 penumpang. Dalam kurun waktu 2016-2019 terus mengalami peningkatan sehingga jumlah penumpang yang naik melalui stasiun pada tahun 2019 sebanyak 863.851 penumpang. Namun jumlah penumpang menurun drastis di tahun 2020 sebanyak 271.920 penumpang. Hal ini disebabkan adanya larangan bepergian keluar daerah karena adanya pandemi COVID-19.

Kondisi seperti yang diuraikan di atas menggambarkan peranan moda transportasi kereta api yang saat ini lebih menjadi pilihan masyarakat yang menuju/dari Kota Pekalongan, dibandingkan angkutan umum lainnya yaitu yang menggunakan moda transportasi bus. Pengembangan moda transportasi bus agar lebih dapat berkompetisi ke depan, membutuhkan penyediaan prasarana jalan regional dengan kapasitas yang memadai sehingga perjalanan menjadi lancar serta membutuhkan dukungan fasilitas terminal bus, apalagi di Kota Pekalongan terdapat terminal tipe A yang mulai tahun 2017 menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

4. Persentase Rumah Tangga (RT) Pengguna Air Bersih

Dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan air bersih di Kota Pekalongan. Dari tahun ke tahun rasio rumah tangga yang terlayani kebutuhan air bersih semakin bertambah, meskipun belum 100 persen terlayani. Pada tahun 2016, rumah tangga yang menggunakan air bersih sebanyak 85,89 persen, pada tahun 2017 menurun menjadi 84,17 persen, dan

meningkat dengan kondisi akhir di tahun 2018 sebesar 86,17 persen, 88,60 persen di tahun 2019 dan di tahun 2020 rasionya menjadi 88,79 persen. Data selengkapnya disajikan dalam Gambar 2.55 berikut.



Gambar 2.55 Persentase Rumah Tangga (RT) Pengguna Air Bersih di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan, 2021

Di Kota Pekalongan, layanan air bersih disediakan oleh PDAM dan Pamsimas. Pada tahun 2020, jumlah sambungan rumah (SR) yang menggunakan PDAM dengan air bawah tanah sebanyak 19.120 SR menurun dari 22.160 SR di tahun 2019, sedangkan jumlah sambungan rumah (SR) yang menggunakan Pamsimas dan sumur (Dana Alokasi Khusus) sebanyak 21.663 SR. Dengan demikian total SR yang menggunakan air bawah tanah pada tahun 2020 sebanyak 40.783 SR menurun dibanding tahun 2019 yaitu sebanyak 44.093 SR. Dengan jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2020 sebanyak 307.150 jiwa, jika diasumsikan bahwa 1 SR digunakan untuk 5 orang maka total kebutuhan SR untuk seluruh penduduk yaitu sebanyak 61.430 SR. Sehingga persentase sambungan rumah (SR) yang menggunakan air bawah tanah pada tahun 2020 sebesar 66,39 persen. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel 2.173 berikut.

Tabel 2.173 Penggunaan Air Tanah Untuk Kebutuhan Sambungan Rumah (SR) di Kota Pekalongan Tahun 2019-2020

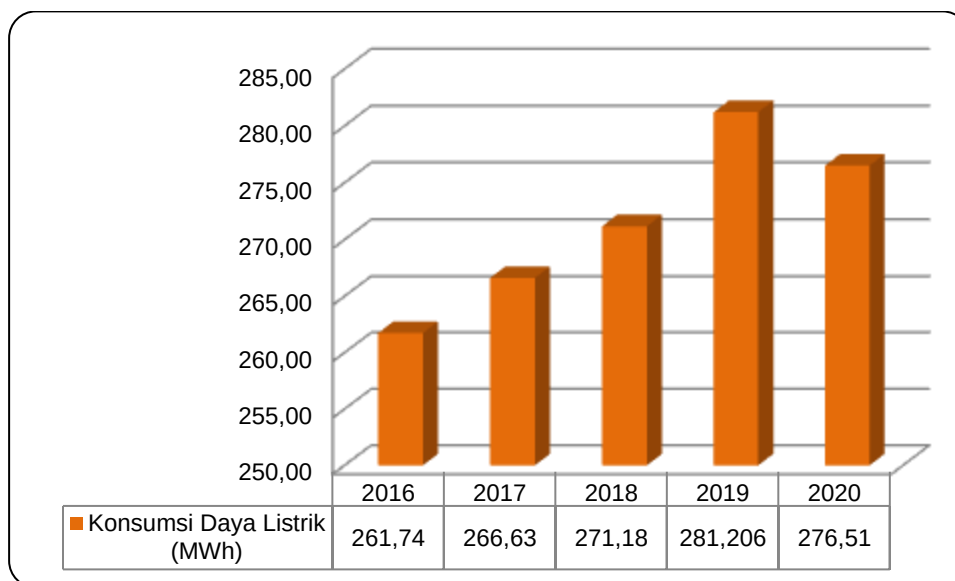
Tahun	SR dari PDAM	SR dari PAMSIMAS dan Sumur	Jumlah SR pengguna air bawah tanah	Jumlah kebutuhan SR	Persentase penggunaan air tanah untuk kebutuhan sambungan rumah
2019	22.160	21.933	44.093	61.419	71,79
2020	19.120	21.663	40.783	61.430	66,39

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan (diolah), 2021

5. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Listrik di Kota Pekalongan disediakan oleh PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan distribusi listrik di area pelayanan Pekalongan. Kebutuhan yang terus meningkat, meningkatkan konsumsi listrik masyarakat Kota Pekalongan dari tahun ke tahun. Kebutuhan listrik di Kota Pekalongan dari tahun ke tahun berfluktuasi. Konsumsi listrik selama lima tahun terus meningkat. Apabila tahun 2016 sebesar

261,74 MWh, maka pada akhir tahun 2020 sebesar 276,51 MWh. Berikut gambaran kebutuhan listrik Kota Pekalongan dari tahun 2016-2020.



Gambar 2.56 Ketersediaan Listrik di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

6. Persentase Pengguna Listrik

Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik bertambah sepanjang tahun 2016-2020 sehingga meningkatkan konsumsi listrik di Kota Pekalongan. Jumlah pengguna listrik berdasarkan data BPS selama lima tahun terakhir menunjukkan bertambahnya jumlah pelanggan PLN, terdiri dari pelanggan rumah tangga dan pelanggan non rumah tangga seperti kantor, badan usaha atau pelanggan lain. Persentase jumlah pelanggan PLN pada tahun 2016 sebesar 112,86 persen. Jumlah tersebut terus naik hingga mencapai 121,44 persen pada tahun 2019. Secara lengkap disajikan dalam Tabel 2.174 berikut.

Tabel 2.174 Persentase RT yang menggunakan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Pengguna Listrik	Jumlah RT	Persentase Pengguna Listrik
2016	83.868	74.313	112,86
2017	86.740	74.970	115,70
2018	89.686	75.618	118,60
2019	92.622	76.269	121,44
2020	95.313	84.296	113,07

Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id, 2021

7. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/ Hotel

Jumlah hotel di Kota Pekalongan saat ini cukup memadai. Tingkat okupansi tahun 2019 sebesar 75 persen, sangat memadai sebagai daerah tujuan wisata bagi Kota Pekalongan dan sekitarnya. Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2017-2020 jumlah hotel berbintang, baik bintang 1, 2, dan 3 sebanyak 10 (sepuluh) hotel. Sedangkan hotel melati berjumlah 20 (dua puluh) hotel. Tersedianya berbagai pilihan hotel maka berpeluang bagi pengembangan kepariwisataan di

wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya. Karena tantangan kepariwisataan, di samping membutuhkan obyek dan daya tarik wisata maka kebutuhan utama lainnya adalah tersedianya akomodasi yang *representative* salah satunya yakni hotel.

Tabel 2.175 Jumlah dan Tipe Akomodasi Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Akomodasi	2016	2017	2018	2019	2020
Hotel Berbintang	9	10	10	10	10
Hotel Non Berbintang	22	18	20	20	25

Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka 2021, 2021

2.4.3. Fokus Iklim Investasi

1. Lama Proses Perijinan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2018 Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Penyelenggara PTSP di Kota Pekalongan adalah Pemerintah Kota Pekalongan yang bertujuan untuk : memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; memperpendek proses pelayanan; mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau; mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan Standar Operasi Prosedur (SOP) pelayanan pemberian izin dan lama proses permohonan izin, berbeda-beda sesuai dengan jenis izinnya. Sampai dengan tahun 2018, telah dibuka layanan perijinan untuk 83 jenis ijin, dimana lama proses perijinan bervariasi antara rentang waktu 2-12 menit. Dengan adanya SOP lamanya proses perijinan, Pemerintah Kota Pekalongan berupaya memberikan jaminan kepastian waktu proses perijinan.

2. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Iklim investasi di suatu daerah sangat ditentukan kebijakan daerah yang mendukung pengembangan investasi/usaha. Kebijakan itu terutama dalam bentuk peraturan daerah yang terkait penciptaan iklim usaha yang kondusif. Paling tidak tercatat 16 Perda yang mendukung penciptaan iklim usaha kondusif di Kota Pekalongan tersebut, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.176 berikut.

Tabel 2.176 Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha

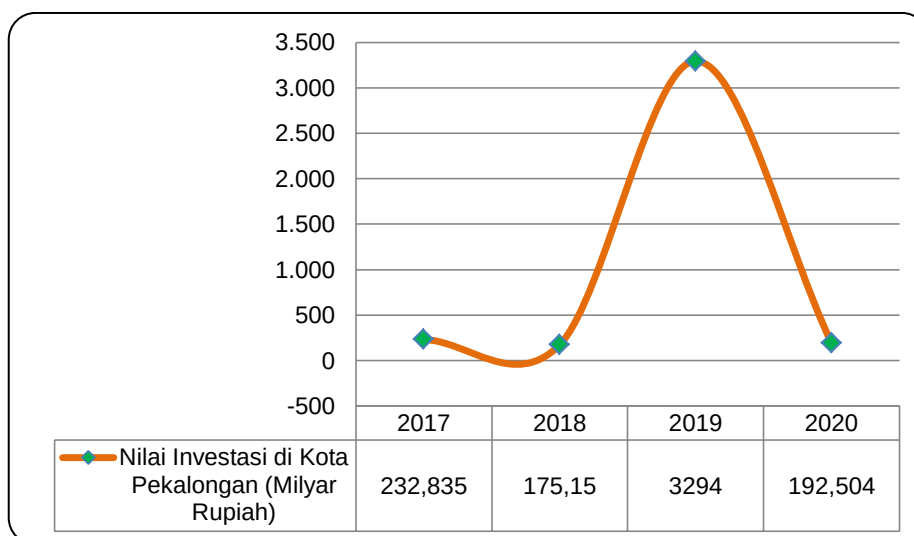
No	Nomor Perda	Tahun	Tentang
1	3	2009	Bangunan Gedung
2	12	2011	Pajak Reklame
3	30	2011	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029
4	28	2011	Rumah Potongan Hewan Dan Retribusi Rumah Potongan Hewan
5	10	2011	Pajak Sarang Burung Walet
6	13	2012	Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
7	20	2012	Perizinan Dan Sertifikat Bidang Kesehatan
8	8	2012	Penanaman Modal

No	Nomor Perda	Tahun	Tentang
9	15	2015	Penyelenggaraan Rumah Kos
10	13	2015	Penyelenggaraan Perhubungan
11	16	2015	Penyelenggaraan Usaha Warung Internet
12	11	2017	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
13	13	2018	Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	1	2018	Izin Usaha Industri
15	7	2018	Penyelenggaraan Pendidikan
16	19	2019	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Sumber : DPMPTSP Kota Pekalongan, 2021

3. Nilai Investasi

Pemerintah Kota Pekalongan terus mendukung upaya pencapaian realisasi investasi dari tahun ke tahun melalui berbagai kebijakan dan aturan. Dengan keterbatasan wilayah dan sumber daya alam, Kota Pekalongan juga berusaha menciptakan kondisi daerah yang pro investasi yaitu dengan menguatkan perekonomian di sektor jasa dan perdagangan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kota Pekalongan. Dan berikut disajikan data perkembangan investasi di Kota Pekalongan.

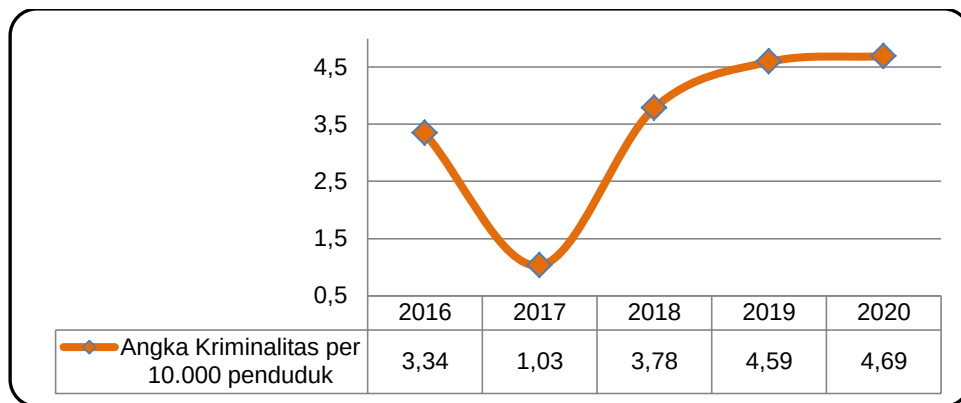


Gambar 2.57 Perkembangan Nilai Investasi di Kota Pekalongan Tahun 2017-2020

Sumber : DPMPTSP Kota Pekalongan, 2021

4. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dihitung per 10.000 penduduk, dimana secara garis besar angka kriminalitas di Kota Pekalongan bersifat fluktuatif, mengalami naik turun sepanjang lima tahun terakhir seperti yang disajikan dalam Gambar 2.58 berikut.



Gambar 2.58 Rasio Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan, 2021

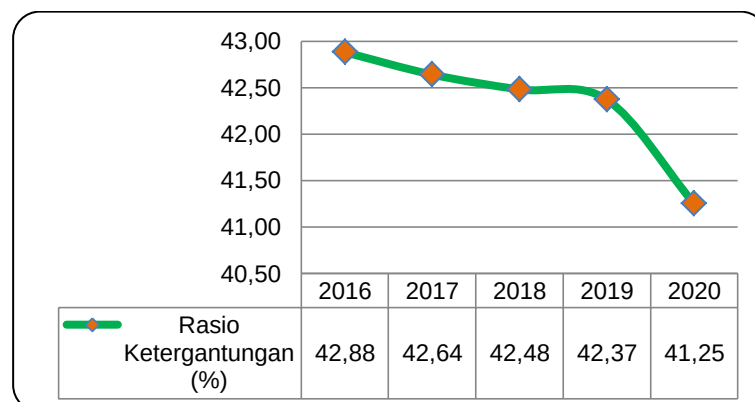
Meskipun demikian, kondusivitas di Kota Pekalongan masih terkendali sehingga masih menguntungkan bagi kehidupan masyarakat sehingga dapat lebih aman dan nyaman serta berimplikasi bagi pengembangan investasi.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

1. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan (persentase) penduduk usia 0-14 dan di atas 65 dibandingkan dengan penduduk usia kerja (15-64). Dalam kurun waktu 2016 – 2020 rasio ketergantungan Kota Pekalongan terus menurun. Pada tahun 2016 rasio ketergantungan penduduk di Kota Pekalongan sebesar 42,88 dan pada tahun 2020 menjadi 41,25.

Dengan kecenderungan angka yang semakin menurun menandakan beban yang harus ditanggung oleh usia produktif menjadi semakin sedikit. Kondisi ini sebenarnya merupakan fenomena umum yang terjadi secara nasional yaitu adanya bonus demografi. Bonus demografi ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi permasalahan ke depan. Data secara rinci disajikan dalam Gambar 2.59 berikut.



Gambar 2.59 Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2020

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2021, 2021

2.4.5. Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Sistem Inovasi Daerah merupakan suatu bentuk cara pandang/pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, inovatif, holistik, berkelanjutan, dengan lebih menekankan kerja kolaboratif antar stakeholders pembangunan daerah. Sistem Inovasi Daerah juga dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan dari sehimpunan pelaku pembangunan, kelembagaan (termasuk kebijakan), hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi inovasi, termasuk teknologi, dan praktek baik/terbaik serta proses pembelajarannya.

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah, Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah. Peraturan tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam mendorong Sistem Inovasi Daerah yang ada di daerahnya, sehingga terbentuk keselarasan dalam pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, yang dimaksud inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuan dari Inovasi Daerah tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun bentuk inovasi daerah menurut Peraturan Pemerintah dimaksud yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Berikut inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam hal tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah

Dalam hal inovasi tata kelola Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Pekalongan telah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam membangun dan mengembangkan tata kelola yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, atau lebih dikenal dengan istilah *e-Government*. Infrastruktur jaringan (disebut Batiknet) serta berbagai aplikasi telah dibangun sejak tahun 2008 dan terus dikembangkan hingga sekarang. Hampir semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan terkoneksi jaringan Batiknet, baik menggunakan serat optik maupun radio *wireless*. Lebih dari 50 SIM (Sistem Informasi Manajemen)/aplikasi telah dibangun guna mendukung tata kelola yang lebih baik.

Pada tahun 2018, beberapa SIM/aplikasi dibangun/dikembangkan sebagai bentuk inovasi tata kelola, antara lain sebagai berikut :

- a. Penambahan fitur peta lokasi pada SIMRAL (SIM Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi). Hal ini bertujuan untuk menentukan lokasi yang akan menjadi objek pembangunan, misalnya lokasi pembangunan jalan. Dengan adanya fitur ini diharapkan dapat meminimalisir penyimpangan antara perencanaan dengan realisasi di lapangan.
- b. Penambahan fitur evaluasi pada SIMRAL. Fitur ini berfungsi untuk mendukung SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan), dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
- c. Pembangunan aplikasi *Pekalongan Smart Creative City*. Aplikasi ini berbasis android, berisikan berbagai macam aplikasi yang telah dibangun sebelumnya (baik aplikasi untuk internal Pemerintah Kota Pekalongan maupun aplikasi untuk layanan publik), serta fitur-fitur baru yang dikembangkan. Dengan aplikasi *Pekalongan Smart Creative City* ini semua informasi yang berkaitan dengan Kota Pekalongan dapat diakses dengan lebih cepat dan lebih mudah.

- d. Pembangunan aplikasi PUSAKA. Aplikasi ini merupakan salah satu wujud dari pengelolaan satu data terpadu Kota Pekalongan. Dengan SIM/aplikasi diharapkan dapat menjadi portal pengelolaan satu data terpadu, sehingga tidak ada lagi perbedaan data atas jenis data yang sama. Selain itu, data yang ada nantinya akan dapat diolah dan diintegrasikan.
- e. Integrasi data pendidikan. Integrasi ini mencakup data pendidikan Kota, Kemenag, dan data kependudukan. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengelolaan data siswa yang merupakan penduduk Kota Pekalongan, sebagai data dasar untuk perencanaan pembangunan bidang pendidikan, misalnya pemberian beasiswa agar tepat sasaran.

Inovasi tata kelola lainnya adalah pengendalian administrasi kegiatan, yaitu dengan membubuhkan paraf pengendali program (Kepala Bidang) di lembar A2. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi tahun sebelumnya, dimana Kepala Bidang tidak melakukan pengecekan terhadap administrasi kegiatan, yang secara otomatis tidak dapat mengendalikan program sepenuhnya. Atas dasar itulah maka mulai tahun 2019 Kepala Bidang sebagai pengendali program harus membubuhkan paraf sebagai bukti telah mengecek administrasi kegiatan.

2. Inovasi Pelayanan Publik

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang prima dan dituntut untuk terus melahirkan inovasi-inovasi. Begitu halnya dengan Pemerintah Kota Pekalongan yang berupaya membuat inovasi-inovasi untuk pelayanan publik dalam beberapa tahun terakhir, antara lain sebagai berikut :

- a. P21 (Puskesmas 21) atau Pusdalu (Puskesmas Buka Sampai Dalu). Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Kesehatan telah membuka beberapa Puskesmas sampai jam 21.00 atau jam 9 malam, diantaranya Puskesmas Tirto, Puskesmas Noyontaan, Puskesmas Jenggot dan Puskesmas Dukuh. Layanan ini sudah dimulai tahun 2017 dan masih berlangsung hingga sekarang. Hal ini dilakukan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan pada malam hari.
- b. Layanan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) dibuka 6 hari (senin-sabtu). Pada dasarnya hari kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya 5 hari kerja (Senin-Jumat). Namun demikian layanan kependudukan dan pencatatan sipil dibuka sampai hari Sabtu. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta upaya percepatan untuk mencapai target kinerja Dindukcapil.
- c. Aplikasi *Pekalongan Smart Creative City* berbasis android. Aplikasi ini tidak hanya memuat layanan untuk internal Pemerintah Kota Pekalongan, tetapi juga menyediakan portal layanan informasi publik seperti kesehatan, pendidikan, SPBU, ATM dan Bank, kuliner, property, hotel dsb. Dengan layanan ini masyarakat dimudahkan dengan ketersediaan berbagai informasi dalam satu aplikasi.
- d. SMS LBA (*Location Based Advertising*). Merupakan metode pengiriman SMS dengan memanfaatkan informasi lokasi keberadaan telepon seluler sesuai cakupan BTS provider. Inovasi ini dilakukan dalam rangka merespon adanya jalan Tol Trans Jawa yang melintasi Kota Pekalongan dimana para pengendara tidak lagi masuk ke Kota Pekalongan. Untuk menarik minat para pengendara tersebut, digunakan SMS LBA berisi berbagai informasi yang disebarkan kepada pengguna ponsel sebelum masuk Kota Pekalongan. Dengan strategi ini diharapkan para pengguna jalan akan transit di Kota Pekalongan untuk menikmati wisata dan berbagai layanan lainnya.

- e. Sistem Informasi Kodifikasi Regulasi Perizinan Terpadu (SIKAREP) adalah sebuah sistem informasi penunjang pelayanan publik yang digunakan di DPMPTSP Kota Pekalongan yang bertujuan untuk mempermudah bagi pemohon izin yang ingin mengetahui tentang regulasi-regulasi produk pelayanan perizinan. Sikarep sangat membantu pemohon izin untuk mengetahui regulasi tanpa harus bertanya kepada petugas informasi. karena SIKAREP didesain mudah untuk digunakan oleh user (*user friendly*). Bahkan pemohon izin yang ingin menggunakan SIKAREP tidak harus datang ke kantor DPMPTSP untuk mengoperasikanya karena SIKAREP sudah dapat diakses melalui koneksi internet di alamat berikut :sikarep.pekalongankota.go.id sehingga SIKAREP dapat diakses dimana saja bahkan bisa menggunakan smartphone selama masih terkoneksi dengan internet.
- f. PETROC [*PEKALONGAN TRADING ONLINE CREATIVITY*] LAYANAN CYBER UMKM. Perkembangan *Online Marketing* di Indonesia sangat cepat. Perubahan gaya hidup masyarakat, telah menggeser pola jual beli di pasar konvensional. Masyarakat yang semula melakukan transaksi jual beli di pasar Konvensional, kini telah banyak beralih ke pasar dunia maya (*Online*). Beberapa pasar elektronik di Jakarta melakukan penutupan kios-kiosnya. Banyak pasar yang tutup dikarenakan penjualannya menurun. Ada juga butik batik asal Pekalongan yang terpaksa menutup beberapa tokonya di Jakarta. Selama mudik lebaran 2016, penjualan di pasar batik Grosir Setono mengalami penurunan yang sangat drastis. Penjualan menurun hingga 30 persen dibanding tahun sebelumnya. Melihat kemungkinan bertambah buruknya iklim perekonomian di Pekalongan, terutama dari sektor UMKM, Dindagkop Kota Pekalongan berinisiatif membuat layanan khusus UMKM. Layanan tersebut berupa edukasi dan transformasi cara berjualan. Dari yang semula berjualan secara konvensional, dialihkan menjadi berjualan *Online*. Layanan Cyber UMKM ini diberi nama PETROC (*Pekalongan Trading Online Creativity*). Dindagkop Kota Pekalongan membuat tim layanan, yang bertugas memberikan wawasan, pembelajaran tentang Internet Marketing.
- g. DAYA LEKAT (swaDAYA LElang masyaraKAT). Pudarnya “Sambatan” atau yang disebut juga gotong-royong merupakan latar belakang munculnya inovasi swadaya lelang masyarakat sebagai wadah untuk melestarikan budaya gotong-royong agar tetap terjaga yang beriringan dengan program pengentasan kemiskinan. Dimana program tetap berjalan dan gotong royong masyarakat dapat dibangkitkan kembali, karena roh dari pemberdayaan ialah gotong royong. *Output* dari pelaksanaan lelang swadaya antara lain; terbangunnya budaya swadaya dimana pelaksana kegiatan ialah lembaga masyarakat yang berhasil mengajukan swadaya tertinggi, karena besarnya nilai swadaya masyarakat merupakan salah satu indikator potensi pembangunan di Kelurahan; terjaganya nilai kebersamaan atau gotong-royong; membangun masyarakat yang lebih sejahtera, mampu, mandiri secara sinergi, partisipatif dan terpadu berdasarkan nilai-nilai religiusitas; pengelolaan pasca kegiatan, karena masyarakat merasa ikut terlibat dalam pembangunan. Sehingga ikut serta dalam merawat atau menjaga hasil pembangunan yang telah dilaksanakan; Efisiensi dana pemerintah dan luasnya jangkauan pembangunan berbasis masyarakat, dengan adanya swadaya masyarakat ikut berperan dalam menambah volume kegiatan.
- h. SIMPATIKK adalah Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara *Online* (Jaringan Internet dan Intranet) untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada warga kelurahan yang diintegrasikan dengan pelayanan di kecamatan dan dengan data base kependudukan (E-KTP) di Dindukcapil serta menggunakan teknologi dan tata kelola Tanda Tangan Elektronik. SIMPATIKK

terselenggara bekerjasama dengan Dinkominfo Kota Pekalongan sebagai dinas teknis.

- i. Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan hak bagi semua masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut untuk mempermudah pemohon informasi tidak harus data dengan mengisi lewat *online* aplikasi ppid.pekalongankota.go.id lalu mengisi Pemohon Informasi. Dalam hal pemohon informasi tidak dibatasi dan proses pelaksanaan sudah diatur dalam Perwal Nomor 555/126 Tahun 2017. Semua permohonan informasi akan diproses asal tanda dukung KTP dalam bentuk scanning sama dengan pemohon. Adapun kemudahan lainnya akan disediakan member yang telah membutuhkan aplikasi ini, agar lebih cepat dan mudah. Selain dari sisi pengguna juga dari sisi penyedia informasi untuk OPD Kota PEkalongan dan jajarannya agar selalu mengisi data informasi yang telah ditetapkan sebagai standar penyedia informasi lewat user dan login pengisian yang telah didaftarkan. Adapun monitoring evaluasi yang dilakukan setiap semester sekali untuk dilakukan evaluasi oleh Lembaga PPID yang terdiri dari Wali Kota (penanggungjawab Dinkominfo), Lembaga Pattiro, Perguruan Tinggi dan LSM. Diadakan desk bagi yang belum mengisi informasi yang harus dipenuhi agar informasi selalu update dan tercukupi. Dari proses kerja penyedia informasi dan pengguna informasi, aplikasi ini terhubung ke tapd.pekalongankota.go.id (merupakan Transparansi Pengelolaan Anggaran) Proses permohonan informasi setiap tahap bisa dilacak sehingga pemohon mengetahui secara langsung surat berjalan. Selain itu sistem juga terhubung dengan twitter @kipprovjateng, twitter @pkl_diskominfo dan twitter @pemkotpkl juga dengan website pekalongankota.go.id.
- j. PAPERLESS OFFICE. Istilah kantor berhubungan dengan kertas dan berkas, sehingga di zaman serba elektronik perlu memanfaatkan elektronik sebagai sarana yang tidak harus membutuhkan kertas banyak dan tenaga kurir banyak. Untuk itu disusunlah *e-paperless* sebagai surat sekali klik berjalan sampai ke sasaran lewat media elektronik berbasis android. Tentunya ada surat masuk dan surat keluar. Surat masuk diterima agendaris lalu ke Kepala Unit kemudian di disposisi kembali ke agendaris dan dibagikan ke alamat tujuan. Sedangkan surat keluar membuat surat lalu digandakan/dicopi untuk di cap basah lalu dibuatkan tanda terima dan dikirim sesuai alamat, hal ini bisa memakan berhari-hari apalagi yang jauh alamatnya sehingga proses ini selain memakan waktu banyak juga pemborosan kertas otomatis anggaran (dalam bentuk kertas, tinta disposisi dan biaya transport). Semua itu sudah dirancang sesuai dengan aturan yang sudah berlaku sehingga tidak mempersulit operator yang pemula surat diterima atau belum akan terlihat warna tulisan dan dimanapun berada selaku pimpinan yang mendisposisi surat akan mendistribusikan/memerintahkan kebawahnya untuk menindaklanjuti yang hanya makan waktu hitungan detik sekali klik asal surat sudah terbaca. Demikian Kota Pekalongan sudah menerapkan dan keunggulan lainnya unit kerja dan Kepala atau pejabat dibawahnya sudah *by job* dan *by name* yang terintegrasi langsung dengan database SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) sehingga apabila sudah dilantik sehingga pejabat yang menduduki sudah berganti nama sesuai dengan kondisi pejabat yang baru.
- k. iPekalongankota (Perpustakaan Digital Berbasis Media Sosial). Di era globalisasi, informasi telah menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Pemanfaatannya telah merambah ke seluruh aspek kehidupan tidak terkecuali di bidang perpustakaan yang penyampaiannya telah sedemikian canggihnya sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi. Penerapan aplikasi multimedia pada teknologi informasi memungkinkan pengguna perpustakaan mendapat informasi yang diperlukannya dalam bentuk informasi maya (*virtual*

information) secara mudah dan cepat tanpa batasan ruang serta waktu. iPekalongankota perpustakaan digital berbasis media sosial menjawab kebutuhan masyarakat akan kebutuhan informasi. Diluncurkan pada bulan april tahun 2018 oleh Wali Kota pekalongan sampai dengan saat ini aplikasi sudah sangat berkembang. Beberapa keunggulan iPekalongan adalah :

1. Buku digital gratis;
 2. Aplikasi berbasis android & dekstop sehingga *user friendly*;
 3. Metode 2 arah penyampaian informasi, karena setiap anggota dapat berinteraksi;
 4. Menunjang koleksi perpustakaan sekolah;
 5. Penerbitan karya tulis dalam bentuk digital;
 6. Menyelamatkan informasi konten lokal daerah.
- I. Aplikasi Pendaftaran BeMO (Bendan Mobile). Peningkatan jumlah pengguna jasa kesehatan di RSUD Bendan Kota Pekalongan selalu menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2009 hingga tahun 2018, hal ini disebabkan oleh tingkat kepuasan pasien rawat jalan yang meningkat setiap tahun. Dengan adanya peningkatan jumlah pasien perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan rawat jalan, hal ini perlu dilakukan untuk memberikan performa pelayanan yang baik dan memudahkan pelayanan, baik dari pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi dan pelayanan penunjang lainnya. Sejak awal berdiri pelayanan rawat jalan meningkat berbagai kualitas pelayanan, mulai dari penambahan dokter spesialis, peningkatan kompetensi tenaga medis, peningkatan administrasi dll. Seiring dengan berjalannya waktu, berbagai masalah dalam pelayanan mulai timbul, sebagai contoh pada pendaftaran pasien rawat jalan yang menggunakan nomor antrian konvensional, ternyata menimbulkan banyak permasalahan seperti pasien harus antri pada dini hari untuk mendapatkan nomor pendaftaran hari berikutnya, adanya calo nomor antrian yang merugikan pasien. Dengan adanya permasalahannya tersebut, pihak manajemen RSUD Bendan menghadirkan inovasi pelayanan pendaftaran rawat jalan via SMS yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah, seiring perkembangan jalan, sistem SMS dikembangkan menjadi pelayanan berbasis Android, dimana pelayanan ini akan memberikan informasi tambahan yang lengkap, seperti nomor antrian, riwayat pemeriksaan, jadwal dokter yang real time, dan bisa daftar di rumah, pasien cukup melakukan pendaftaran dan cetak SEP BPJS Kesehatan, karena semua telah dilakukan secara *online*.

3. Inovasi Daerah Lainnya

Pemerintah Kota Pekalongan tidak hanya dituntut menciptakan inovasi dalam hal tata kelola dan pelayanan publik, tetapi juga harus bisa mendorong masyarakat untuk turut serta dalam menciptakan inovasi-inovasi yang bermanfaat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan lomba Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat) yang diadakan setiap tahun. Pada tahun 2020, terdapat 5 (lima) pemenang Krenova sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.177 berikut.

Tabel 2.177 Inovasi Daerah Lainnya

No.	Judul Inovasi	Nama Pengusul	Inovasi yang diusulkan
1.	Kran Air Cuci Tangan Tangkal COVID-19 (Kran Air Robotik Menggunakan Sistem Sensor Ultrasonik)	Benni Ismail	Inovasi yang diciptakan dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 dengan membuat Kran Air Cuci Tangan tanpa harus menyentuh kran, tetapi cukup menggunakan sistem sensor ultrasonik

No.	Judul Inovasi	Nama Pengusul	Inovasi yang diusulkan
2.	Pertanian Apung sebagai Alternatif Budidaya Pertanian dan Ekowisata Terpadu Pada Lahan Terdampak Banjir dan Rob di Kampung Iklim RW 09 Kelurahan Gamer Kota Pekalongan	Pokja Proklamasi Gamer	Inovasi yang diciptakan dalam pemanfaatan lahan terdampak banjir untuk Budidaya Pertanian Apung dan Ekowisata terpadu yang dapat menciptakan lokasi wisata baru di Kota Pekalongan
3.	Kaori-dama: Si Penyejuk Mata Bikin Harum Ruangan (sebuah inovasi Florikultura dengan memanfaatkan limbah serbuk kayu)	Fla Gardenia	Inovasi yang diciptakan dalam menggabungkan konsep tanaman hias yang bisa digunakan untuk mengharumkan ruangan dan menggunakan limbah serbuk kayu yang dibentuk pot sebagai tempatnya
4.	"Sablak" Menurunkan Sisa Tembakau Akhir Proses di Area Giling di Kelompok 4	PT. Urip Sugiharto	Inovasi yang diciptakan dalam proses pelintingan rokok untuk mengurangi tembakau yang terbuang
5.	Tas Recycle	Afni Dhia Aqmarina, S.I.Kom	Inovasi yang diciptakan dalam memanfaatkan limbah plastik menjadi tas dengan didahului proses pemanasan plastik untuk menghilangkan bakteri yang menempel

Sumber : jarlitbangnov.pekalongankota.go.id, 2021

4. Daya Dukung Inovasi Daerah

Dalam mengembangkan inovasi daerah, tidak hanya Pemerintah yang berperan, tetapi juga dibutuhkan *stakeholder* lain untuk mendorong percepatan inovasi. Salah satu hal yang paling mendasar lahirnya inovasi daerah adalah kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni. Untuk itulah dibutuhkan peran perguruan tinggi selaku lembaga pendidikan sekaligus pengembang inovasi.

Di Kota Pekalongan, terdapat perguruan tinggi antara lain Universitas Pekalongan (Unikal), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang dengan Program Studi Keperawatan di Pekalongan, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Widya Pratama Pekalongan, Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan dan Akademi Komunitas Negeri Kota Pekalongan dengan total lebih dari 1.000 (seribu) orang yang lulus setiap tahunnya, baik lulusan Diploma, Sarjana maupun Magister.

Tabel 2.178 Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan

No.	Nama Perguruan Tinggi	Periode Wisuda	Jumlah Lulusan (orang)			Jumlah
			D3	S1	S2	
1.	Universitas Pekalongan	September 2020	32	642	-	674
2.	STMIK Widya Pratama	Oktober 2020	66	296	-	362
3.	Akbid Harapan Ibu	November 2020	12	-	-	12
4.	AKN	Oktober 2020	38	-	-	38
5.	IAIN Pekalongan	Desember 2020	12	658	35	705

Sumber : Berbagai sumber (diolah), 2021

Selain berperan menciptakan SDM yang berdaya saing, perguruan tinggi juga didorong untuk menciptakan inovasi. Oleh karena itu beberapa perguruan tinggi di Kota Pekalongan membangun pusat inovasi sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.179 berikut.

Tabel 2.179 Pusat Inovasi yang Dimiliki Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan

No	Perguruan Tinggi	Nama Pusat Inovasi
1.	Universitas Pekalongan	Pusat Inovasi dan Teknologi (PIT)
2.	STIMIK Widya Pratama	Tidak Ada
3.	IAIN Pekalongan	Tidak Ada
4.	Poltekkes Semarang Prodi Keperawatan	Tidak Ada
5.	AKBID Harapan Ibu	Tidak Ada

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

2.5. Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Sampai Dengan Tahun 2020

Berdasarkan Pasal 306 Ayat (3) Permendagri No. 86 Tahun 2017 bahwa hasil evaluasi RKPD kabupaten/kota digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD kabupaten/kota untuk tahun berikutnya. Idealnya, penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 memperhatikan hasil evaluasi RKPD triwulan III tahun 2021. Namun pada triwulan III belum bisa memperoleh hasil capaian IKD (Indikator Kinerja Daerah) dikarenakan hasil capaian baru diperoleh pada triwulan IV. Oleh karena itu, hasil evaluasi IKD yang disajikan adalah hasil evaluasi tahun 2020.

2.5.1. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Sampai Dengan Tahun 2020

Evaluasi capaian indikator kinerja RPJMD tahun 2020 ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Program yang terbagi atas Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.

Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Evaluasi Hasil RPJMD terdiri dari 4 kategori, yaitu tercapai, akan tercapai, belum tercapai dan belum tersedia data. Rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Utama Daerah RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021 di tahun 2020 dari 111 indikator, sebanyak :

- 42 indikator tercapai (37,84 persen),
- 25 indikator akan tercapai (22,52 persen),
- 41 indikator belum tercapai (36,93 persen), dan
- 3 indikator belum tersedia data (2,70 persen).

Tabel 2.180 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Aspek Kesejahteraan Masyarakat										
1	IPM	Indeks	76,90	71,53	74,77	76,12	74,98	74,98	97,50	Akan Tercapai
2	Indeks Gini	Indeks	0,34	0,34	0,305	0,34	0,31	0,31	108,28	Tercapai
3	Inflasi	Persen	3 ± 1	3,46	2,76	3 ± 1	2,36	2,36	118,00	Tercapai
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,00	5,36	5,5	2,65	-1,87	-1,87	-31,17	Belum Tercapai
5	Pertumbuhan PDRB sektor Industri pengolahan	Persen	5,10	3,99	4,84	2,21	-0,48	-0,48	-9,41	Belum Tercapai
6	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	Persen	5,80	3,62	5,72	2,53	-4,37	-4,37	-75,34	Belum Tercapai
7	Harapan Lama Sekolah (expected Years Of Schooling)	Tahun	13,21	11,93	12,83	13,10	12,84	12,84	97,20	Akan Tercapai
8	Angka Kemiskinan	Persen	5,14	8,02	6,6	8,75	7,17	7,17	71,69	Belum Tercapai
9	Konflik Sosial	Kasus	-	34,00	1,00	0,00	1,00	1,00	< target	Belum Tercapai
10	Angka Partisipasi Sekolah	Persen	99,00	-	97,13	98,00	96,99	96,99	97,97	Akan Tercapai
11	Persentase penyelenggaraan pendidikan berakreditasi A	Persen	60,00	-	49,16	49,16	48,64	48,64	81,07	Belum Tercapai
12	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,41	74,09	74,28	74,36	74,38	74,38	99,96	Akan Tercapai
13	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,50	5,42	5,77	5,00	7,02	7,02	49,86	Belum Tercapai
14	Persentase Penurunan PMKS	Persen	41,68	-	12,83	9,62	14,01	52,56	126,11	Tercapai
15	Persentase luas wilayah genangan banjir dan rob	Persen	9,04	42,43	23,36	9,30	38,23	38,23	23,64	Belum Tercapai
16	Persentase kawasan permukiman kumuh	Persen	0,00	-	0,39	0,39	0,21	0,21	< target	Akan Tercapai
17	Persentase penurunan kasus konflik sosial	Persen	20,00	-	50,00	16,67	0,00	0,00	> target	Belum Tercapai
18	Persentase Implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter	Persen	65,00	-	83,67	60,00	100,00	100,00	153,85	Tercapai
19	Persentase seni budaya yang dilestarikan	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
20	persentase peningkatan penyelenggaraan event	Persen	100,00	16,00	183,87	0,00	80,65	80,65	80,65	Belum Tercapai
Aspek Pelayanan Umum										
1	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang PAUD/TK	Persen	70,00	-	70,00	67,50	60,28	60,28	86,11	Belum Tercapai
2	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang DIKDAS	Persen	100,00	-	100,00	100,00	102,65	102,65	102,65	Tercapai
3	Persentase Penyelenggaraan PAUD Berakreditasi A	Persen	5,50	-	5,50	9,00	9,09	9,09	165,29	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Berakreditasi A	Persen	85,00	-	85,00	68,45	69,57	69,57	81,84	Belum Tercapai
5	Persentase implementasi pendidikan karakter di sekolah	Persen	30,00	-	30,00	20,00	100,00	100,00	333,33	Tercapai
6	Persentase implementasi pendidikan keagamaan di sekolah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
7	Angka Kenakalan Pelajar	Per 100 Siswa	2,00	-	n/a	3,00	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
8	AKI	Persen	102,00	-	101,30	102,00	152,41	152,41	66,92	Belum Tercapai
9	AKB	Persen	9,60	-	11,99	9,60	8,81	8,81	109,02	Tercapai
10	AKABA	Persen	12,25	12,50	16,04	12,30	10,84	10,84	113,03	Tercapai
11	Tingkat Kemandirian BLUD Rumah Sakit	Persen	71,70	-	79,74	71,50	107,62	107,62	150,10	Tercapai
12	BOR (Bed Occupation Rate)	Persen	80,00	-	57,36	78,00	57,66	57,66	72,08	Belum Tercapai
13	NDR (Net Death Rate)	Persen	≤ 20/1000 pasien	-	18,04	≤ 21/1000 pasien	32,67	32,67	61,22	Belum Tercapai
14	GDR (Gross Death Rate)	Persen	≤ 40/1000 pasien	-	47,36	≤ 41/1000 pasien	54,57	54,57	76,97	Belum Tercapai
15	ALOS	Hari	6-9	-	3,92	6-9	4,14	4,14	> target	Tercapai
16	Ketersediaan Sarpras Pengendali Banjir dan Rob	Persen	43 unit	-	86,96	81,40	88,37	38,00	88,37	Akan Tercapai
17	Persentase kawasan strategis yang tertata (Jetayu, Kampung Pecinan, Kampung Arab, Batas Kota, Pati Unus)	Persen	100,00	14,29	78,57	85,70	92,86	92,86	92,86	Akan Tercapai
18	Persentase ketersediaan drainase lingkungan	Persen	47,46	-	26,79	47,15	30,14	30,14	63,51	Belum Tercapai
19	Rasio akses air minum terhadap jumlah penduduk	Persen	95,99	-	88,60	83,95	88,79	88,79	92,50	Akan Tercapai
20	Cakupan layanan pengelolaan limbah domestik	Persen	97,33	-	99,26	95,99	99,32	99,32	102,04	Tercapai
21	Cakupan jalan lingkungan dalam kondisi mantap	Persen	87,75	-	69,56	75,29	86,86	86,86	98,99	Akan Tercapai
22	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	98,74	-	96,93	97,29	97,30	97,30	98,54	Akan Tercapai
23	Berkurangnya pelanggaran perda	Kasus	500,00	-	1.382	1.000	1782,00	1782,00	28,06	Belum Tercapai
24	Waktu respon penanganan kebakaran	Menit	15,00	-	15,50	15,00	15,00	15,00	100,00	Tercapai
25	Persentase korban bencana yang ditangani	Persen	80,00	-	100,00	80,00	31,95	31,95	39,93	Belum Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Persentase potensi kerawanan sosial yang dibina	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
27	Presentase tingkat partisipasi politik masyarakat	Persen	tingkat partisipasi mengikuti target KPU Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan Pilgub, pilpres, dan pilwalkot	tingkat partisipasi pemilu pada pilwalkot, pilgub, rata2 pilpres dan pilleg pada periode sblmnya	85,88	77,50	79,35	79,35	102,39	Tercapai
28	Persentase PMKS Tertangani	Persen	41,68	-	7,29	6,95	8,56	47,44	113,81	Tercapai
29	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	69,64	-	72,32	69,26	66,45	66,45	95,42	Akan Tercapai
30	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	64,58	-	60,95	64,48	58,29	58,29	90,26	Belum Tercapai
31	Predikat Kota Layak Anak	Pratama	Pratama	-	Madya	Pratama	Madya	Madya	> target	Tercapai
32	Konsumsi pangan penduduk sesuai dengan Pola Pangan Harapan	Skor	92,50	-	91,13	76,02	83,00	83,00	89,73	Belum Tercapai
33	Peningkatan produksi tanaman pangan kg (Persen per tahun)	Persen	3,00	-	-8,00	3,00	11,54	11,54	384,54	Tercapai
34	Indeks Kualitas Air	Indeks	43,48	-	46,00	43,47	35,33	35,33	81,26	Belum Tercapai
35	Indeks kualitas Udara	Indeks	99,29	-	99,05	99,29	79,96	79,96	80,53	Belum Tercapai
36	Indeks kualitas Tutupan Lahan	Indeks	23,90	-	23,50	23,80	23,60	23,60	98,74	Akan Tercapai
37	Cakupan Layanan Persampahan	Persen	93,43	-	65,84	89,74	76,07	76,07	81,42	Akan Tercapai
38	Tertib hukum lingkungan	Persen	30,00	-	20,82	25,00	25,17	25,17	83,89	Belum Tercapai
39	Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	Persen	87,00	-	79,38	80,13	81,39	81,39	93,55	Akan Tercapai
40	Persentase Swadaya Masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	10,00	-	15,02	10,00	25,27	25,27	252,70	Tercapai
41	Persentase akseptor KB	Persen	66,00	-	65,06	64,00	69,02	69,02	104,58	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Kapasitas Jalan Perkotaan (satuan mobil penumpang per jam)		37,150	-	39.992	37.150	39.992,36	39.992,36	107,65	Tercapai
43	Skor Nilai dalam penghargaan WTN	Skor	> 85	-	>85	> 85	> 85	> 85	>85	Tercapai
44	Persentase teknologi informasi yang dikembangkan dan dimanfaatkan oleh komunitas	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
45	cakupan komunitas yang berdaya dan memanfaatkan teknologi informasi	Kelompok	30,00	-	21,00	23,00	23,00	23,00	76,67	Belum Tercapai
46	Cakupan OPD dengan nilai KIP Kategori "Cukup Informatif/ Baik"	Persen	52,63	-	67,74	42,11	93,55	93,55	177,75	Tercapai
47	Persentase peningkatan jumlah pengguna aplikasi berbasis komunitas	Persen	100,00	-	70,00	63,64	100,00	100,00	100,00	Tercapai
48	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi (Rp. Trilyun)	Rp Trilyun	9,43	-	8,79	9,16	7,22	7,22	76,54	Belum Tercapai
49	Persentase UMKM menerima KUP/ KUR	Persen	60,27	-	99,39	56,81	69,82	69,82	115,85	Tercapai
50	Persentase capaian target investasi	Persen	1,95 triliun	-	256,02	88,53	264,18	5,15	264,18	Tercapai
51	Persentase ketersediaan sarana budaya	Persen	2,69	-	2,15	2,15	2,47	2,47	91,79	Akan Tercapai
52	Persentase peningkatan kelompok budaya	Persen	125 kel di thn 2021	83 kel di 2015	129,60	96,00	47,20	59,00	47,20	Belum Tercapai
53	Kenaikan kunjungan Perpustakaan	Persen	2,00	-	7,60	2,00	-46,79	-46,79	-44,79	Belum Tercapai
54	Persentase OPD+Kelurahan yang tertib administrasi kearsipan	Persen	36,36	-	NA	34,85	35,38	35,38	97,31	Akan Tercapai
55	Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persen	1,42	-	0,39	1,42	1,04	1,04	73,51	Belum Tercapai
56	Prestasi olahraga tingkat provinsi (peringkat secara umum semua cabor)	Jumlah	31,00	-	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum Tercapai
57	Persentase capaian target pendapatan daerah bersumber dari TPI sebesar Rp. 5,5 Miliar	Persen	5,5 M	4,2 M di tahun 2015	37,73	90,91	96,46	5,30	96,36	Akan Tercapai
58	Kunjungan wisata per tahun	Orang	550.000,00	-	720.816	250.000	281.858,00	281.858,00	51,25	Belum Tercapai
59	Peningkatan Produksi Pangan Hewani kg (Persen per tahun)	Persen	5,00	-	6,96	4,00	-35,98	-35,98	-719,60	Belum Tercapai
60	Pertumbuhan IKM Batik	IKM	800,00	-	780,00	790,00	790,00	790,00	98,75	Akan Tercapai
61	Persentase capaian target 1 pasar sesuai kriteria SNI	Persen	100,00	-	-	0	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
63	Pelaporan Keuangan Daerah Berkualitas	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
64	Persentase peningkatan PAD	Persen	10,00	-	40,17	10,00	50,66	50,66	506,58	Tercapai
65	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Indeks Profesionalitas Pegawai minimal 80	Persen	100,00	-	60,54	60,54	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
66	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	Persen	50,00	-	54,55	45,00	80,00	80,00	160,00	Tercapai
67	Kategori evaluasi AKIP	Grade	BB	C	BB	B	BB	BB	100,00	Tercapai
68	Tingkat kematangan implementasi SPIP	Skor	3,50	-	3,02	3,00	3,02	3,02	86,29	Belum Tercapai
69	Opini BPK atas LKD	Opini	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	Tercapai
70	Persentase PD dengan IKM Baik	Persen	100,00	n/a	93,94	96,77	95,38	95,38	95,38	Akan Tercapai
71	Persentase OPD dengan Nilai Keterbukaan Informasi Publik kategori Baik (Informatif)	Persen	100,00	-	67,74	78,95	38,71	38,71	38,71	Belum Tercapai
72	Efektivitas Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan	Persen	98,75	-	NA	98,50	99,37	99,37	100,63	Tercapai
73	Level Kapabilitas APIP	Kategori	4 DC	-	3,00	3,00	3,00	3,00	75,00	Belum Tercapai
74	Tingkat implementasi SPIP Hasil Self Assesment	Skor	4,00	-	3,20	3,50	3,50	3,50	87,50	Belum Tercapai
75	Persentase OPD yang memenuhi kriteria WBK	Persen	64,52	-	35,48	48,39	41,94	41,94	65,00	Belum Tercapai
76	Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	Persen	100,00	-	100	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Aspek Daya Saing										
1	Nilai produksi perikanan tangkap	Rp Milyar	183,33	-	116,63	172,99	176,84	176,84	96,46	Akan Tercapai
2	Nilai produksi perikanan budidaya	Rp Milyar	24,36	-	21,89	8,41	30,78	30,78	126,37	Tercapai
3	nilai ekspor perdagangan (Juta US \$)	Juta US\$	19,58	-	22,92	19,19	25,42	25,42	129,83	Tercapai
4	Persentase penurunan Luas Genangan	Persen	78,70	-	24,01	49,82	-63,67	-63,67	-80,90	Belum Tercapai
5	Persentase lingkungan permukiman yang berkualitas	Persen	100,00	-	99,61	99,61	99,79	99,79	99,79	Akan Tercapai
6	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan	Persen	100,00	94,94	96,64	98,61	97,00	97,00	97,00	Akan Tercapai
7	Persentase pemenuhan ruang publik yang ramah lingkungan	Persen	100,00	-	63,64	81,82	81,82	81,82	81,82	Belum Tercapai
8	Persentase jalan kota dalam keadaan mantap	Persen	78,48	-	84,06	77,58	80,03	80,03	101,98	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Rasio Kapasitas Jalan (VC Ratio)	Indeks	0,73	0,87	0,45	0,75	0,36	0,36	202,78	Tercapai
10	Persentase pemenuhan sarana prasarana pada ruang publik kreatif (taman bahagia)	Persen	100,00	-	71,43	80,00	82,86	82,86	82,86	Belum Tercapai
11	Cakupan Layanan Sarpras Permukiman Perkotaan	Persen	93,63	-	88,17	88,17	90,74	90,74	96,92	Akan Tercapai
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	52,76	-	52,92	52,72	50,84	50,84	96,36	Akan Tercapai
13	Persentase sekolah menuju Level 4 Standar Nasional Pendidikan	Persen	54,00	-	93,08	40,00	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
14	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	86,00	-	60,54	60,54	50,80	50,80	59,07	Belum Tercapai
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85,00	70,88	68,97	78,00	68,91	68,91	81,07	Belum Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

2.5.2. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama Sampai Dengan Tahun 2020

1. URUSAN PENDIDIKAN

Tabel 2.181 Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pendidikan										
1	APS 3-6 tahun	Persen	68,50	-	91,44	68,00	85,28	85,28	124,50	Tercapai
2	APK PAUD	Persen	62,50	-	69,64	62,00	60,28	60,28	96,44	Akan Tercapai
3	APM PAUD	Persen	70,00	-	64,10	65,00	58,37	58,37	83,39	Belum Tercapai
4	APS 5-6 tahun	Persen	80,00	-	99,16	78,00	105,81	105,81	132,26	Tercapai
5	APK TK/RA	Persen	81,00	-	81,16	78,00	71,70	71,70	88,52	Belum Tercapai
6	APM TK/RA	Persen	80,00	-	34,49	77,00	37,26	37,26	46,58	Belum Tercapai
7	APS 7-12 tahun	Persen	100,00	-	98,67	100,00	103,79	103,79	103,79	Tercapai
8	APK SD/MI	Persen	100,00	-	98,32	100,00	101,31	101,31	101,31	Tercapai
9	APM SD/MI	Persen	96,00	-	79,03	95,50	82,93	82,93	86,39	Belum Tercapai
10	APS 13-15 tahun	Persen	100,00	-	97,69	100,00	103,67	103,67	103,67	Tercapai
11	APK SMP/MTs	Persen	100,00	-	106,27	100,00	105,44	105,44	105,44	Tercapai
12	APM SMP/MTs	Persen	77,50	-	61,14	77,00	61,04	61,04	78,76	Belum Tercapai
13	Angka Partisipasi PNF (non PAUD)	Persen	29,00	-	306,69	25,00	0,33	0,33	1,14	Belum Tercapai
14	Angka Partisipasi Kesenjangan	Persen	45,00	-	239,63	40,00	81,78	81,78	181,73	Tercapai
15	Rasio Partisipasi ATS pada Pendidikan Kesenjangan	Persen	95,00	-	3,67	90,00	93,86	93,86	98,80	Akan Tercapai
16	Angka Partisipasi LKP	Persen	30,00	-	NA	25,00	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
17	Angka Partisipasi PKBM	Persen	12,00	-	NA	9,00	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
18	Angka Melek Huruf	Persen	100,00	-	99,98	99,50	99,98	99,98	99,98	Akan Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Rasio Ketercukupan Guru (sekolah negeri dan swasta) (SD)	Persen	SD : 95 Persen	-	90,81	SD : 90 Persen	91,05	91,05	95,84	Akan Tercapai
20	Rasio Ketercukupan Guru (sekolah negeri dan swasta) (SMP)	Persen	SMP : 100 Persen	-	86,41	SMP : 97,5 Persen	98,15	98,15	98,15	Akan Tercapai
21	Rasio Ketercukupan Guru (sekolah negeri dan swasta) (TK)	Persen	TK : 100 Persen	-	104,97	TK : 100 Persen	109,80	109,80	109,80	Tercapai
22	Rasio Ketercukupan Tenaga Kependidikan (sekolah negeri) (SD)	Persen	SD : 50 Persen	-	3,76	SD : 30 Persen	64,08	64,08	128,17	Tercapai
23	Rasio Ketercukupan Tenaga Kependidikan (sekolah negeri) (SMP)	Persen	SMP : 80 Persen	-	57,35	SMP : 70 Persen	144,12	144,12	180,15	Tercapai
24	Rasio Ketercukupan Tenaga Kependidikan (sekolah negeri) (TK)	Persen	TK : 60 Persen	-	n/a	TK : 40 Persen	100,00	100,00	166,67	Tercapai
25	Persentase pendidik/guru jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs berijazah S1/DIV	Persen	100,00	-	91,20	95,00	91,99	91,99	91,99	Akan Tercapai
26	Persentase pendidik/guru bersertifikat profesi pendidik	Persen	62,00	-	52,71	60,00	50,47	50,47	81,41	Belum Tercapai
27	Rasio kepala sekolah yang memenuhi kualifikasi	Persen	75,00	-	32,51	50,00	62,14	62,14	82,86	Belum Tercapai
28	Rasio tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi	Persen	75,00	-	71,01	50,00	73,21	73,21	97,61	Akan Tercapai
29	Persentase ketersediaan data dan informasi pendidikan yang dibutuhkan	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
30	Persentase satuan pendidikan yang terfasilitasi peningkatan kapasitas manajemen	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
31	Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen	0,03	-	0,12	0,04	0,29	0,29	976,36	Tercapai
32	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Persen	0,08	-	0,46	0,09	0,97	0,97	1213,59	Tercapai
33	Persentase Lulusan SD/MI yang melanjutkan ke SMP/MTs	Persen	100,00	-	104,78	100,00	102,79	102,79	102,79	Tercapai
34	Persentase Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke SMA/SMK/MA	Persen	100,00	-	101,25	100,00	102,44	102,44	102,44	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Rasio Pertumbuhan Daya Tampung Dikdas dan PAUD formal	Persen	100,00	-	870,73	100,00	-69,67	-69,67	-69,67	Tercapai
36	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas TK/RA	Persen	75,00	-	62,77	70,00	71,13	71,13	94,84	Akan Tercapai
37	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas Dikdas	Persen	100,00	-	107,49	100,00	113,72	113,72	113,72	Tercapai
38	Rata-rata Kelengkapan Jumlah sarana dan prasarana pembelajaran dan pendukung	Persen	70,00	-	65,44	67,50	72,83	72,83	104,04	Tercapai
39	Rasio Kondisi sarana dan prasarana layak pakai	Persen	90,00	-	85,86	80,00	99,71	99,71	110,78	Tercapai
40	Angka Lulus Jenjang Dikdas	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
41	Nilai Rata-rata UN SD/MI	Nilai	77,00	-	69,69	0,00	0,00	0,00	100,00	Tercapai
42	Nilai Rata-rata UN SMP/MTs	Nilai	65,00	-	59,02	0,00	0,00	0,00	100,00	Tercapai
43	Persentase Sekolah Jenjang dikdas yang terfasilitasi Penilaian Akreditasi	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
44	Angka sekolah Jenjang Dikdas penyelenggara pendidikan Inklusi	Indeks	3,30	-	2,67	3,30	2,72	2,72	82,35	Belum Tercapai
45	Persentase sekolah Jenjang Dikdas yang terfasilitasi pembinaan oleh pengawas	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
46	Persentase Sekolah Jenjang PAUD yang menerapkan model Pendidikan Keagamaan	Persen	90,00	-	100,00	85,00	100,00	100,00	111,11	Tercapai
47	Persentase Sekolah Jenjang PAUD yang menerapkan model pembentukan karakter yang melibatkan peran aktif wali murid	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
48	Rasio Siswa Jenjang PAUD yang mengikuti pembelajaran di TPQ/madin	Persen	10,00	-	n/a	15,00	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
49	Persentase Satuan Pendidikan Jenjang PAUD yang terfasilitasi dalam Kegiatan Lomba dan Apresiasi	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
50	Persentase Satuan Pendidikan PAUD&PNF yang terfasilitasi penilaian akreditasi	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Persentase satuan pendidikan PAUD & PNF yang terfasilitasi pembinaan oleh Pengawas/penilik	Persen	95,00	-	100,00	94,00	100,00	100,00	105,26	Tercapai
52	Persentase organisasi mitra PAUD & PNF yang terfasilitasi pemberdayaan	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
53	Persentase Satuan Pendidikan PAUD & PNF yang terfasilitasi lomba dan apresiasi	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
54	Persentase Siswa Muslim Kelas VI SD yang berijazah BTQ	Persen	100,00	-	71,87	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
55	Persentase Sekolah Jenjang Dikdas yang menerapkan model Pendidikan Keagamaan	Persen	60,00	-	100,00	40,00	100,00	100,00	166,67	Tercapai
56	Persentase Sekolah Jenjang Dikdas yang menerapkan model pembentukan karakter yang melibatkan peran aktif wali murid	Persen	30,00	-	100,00	20,00	100,00	100,00	333,33	Tercapai
57	Rasio Siswa Jenjang Dikdas yang mengikuti pembelajaran di TPQ/Madin	Rasio	70,00	-	n/a	60,00	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
58	Persentase Sekolah Jenjang Dikdas yang terfasilitasi dalam kegiatan lomba dan apresiasi bagi siswa	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
59	Rasio siswa jenjang Dikdas yang terfasilitasi kegiatan kepramukaan	Rasio	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Penjelasan pada 9 (sembilan) indikator yang belum tercapai statusnya terhadap capaian akhir RPJMD di tahun 2021

- Indikator APM PAUD, masih belum tercapai karena masih banyak anak usia jenjang PAUD yang sudah bersekolah di SD dan MI,
- Indikator APK TK/RA masih belum tercapai karena Dampak Pandemi COVID-19.
- Indikator APM TK/RA disebabkan masih banyak anak usia 5- 6 tahun yang sudah/tidak bersekolah di TK/RA tapi juga sekolah di lembaga lain.
- Indikator APM SD/MI disebabkan masih banyak siswa SD MI yang berusia kurang dari 7 tahun SD dan MI dan anak usia 12 tahun sdh ada di SMP/MTS.
- Indikator APM SMP/MTs disebabkan karena masih banyak siswa SD MI yang berusia kurang 13 tahun pada SMP dan MTs dan anak usia 15 tahun yg sudah lulus SMP/MTs di SMA, SMK, MA.
- Indikator Angka Partisipasi PNF (non PAUD) karena pada masa Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak LKP yang tidak bisa melaksanakan pelatihan.
- Indikator Persentase pendidik/guru bersertifikat profesi pendidik yang belum tercapai karena kuota peserta sertifikasi dari pusat tidak sebanding dengan jumlah

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pendidik bersertifikasi yang pensiun. h. Indikator Rasio kepala sekolah yang memenuhi kualifikasi belum mencapai target karena dampak pandemi <i>COVID-19</i>. i. Indikator Angka sekolah Jenjang Dikdas penyelenggara pendidikan Inklusi masih belum memenuhi target karena adanya pandemi <i>COVID-19</i>, rencana membuka satu satu lagi sekolah yg memberi layanan inklusi batal.									

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

2. URUSAN KESEHATAN

Tabel 2.182 Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Kesehatan										
1	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yg memenuhi standar	Persen	95,00	-	88,70	95,00	89,71	89,71	94,43	Akan Tercapai
2	Persentase temuan makanan berbahaya	Persen	3,00	-	4,56	3,50	0,92	0,92	327,00	Tercapai
3	Persentase kasus balita gizi buruk	Persen	0,05	13,00	0,05	0,05	0,07	0,07	75,02	Belum Tercapai
4	Persentase ibu hamil KEK	Persen	< 13,5	22,30	13,33	< 13,6	13,22	13,22	102,12	Tercapai
5	Persentase bayi usia < 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	Persen	50,00	-	57,20	47,00	53,40	53,40	106,81	Tercapai
6	Persentase puskesmas yang terakreditasi minimal utama	Persen	100,00	-	42,86	42,86	42,86	42,86	42,86	Belum Tercapai
7	Persentase RS yang terakreditasi minimal utama	Persen	100,00	-	55,56	55,56	55,56	55,56	55,56	Belum Tercapai
8	Persentase sarana kesehatan lainnya yang terakreditasi	Persen	50,00	n/a	0,00	25,00	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Angka Kesakitan DBD per 10.000 penduduk	Indeks	<2	-	1,82	<2	2,71	2,71	73,88	Belum Tercapai
10	Cakupan pelayanan penderita TB (SPM)	Persen	100,00	-	100,00	100,00	78,43	78,43	78,43	Belum Tercapai
11	Cakupan pelayanan penderita HIV AIDS (SPM)	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
12	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi	Persen	99,00	-	93,89	98,00	90,02	90,02	90,93	Akan Tercapai
13	Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi (SPM)	Persen	100,00	-	29,91	100,00	27,10	27,10	27,10	Belum Tercapai
14	Cakupan pelayanan kesehatan usia produktif (SPM)	Persen	100,00	-	16,69	100,00	28,57	28,57	28,57	Belum Tercapai
15	Cakupan pelayanan kesehatan Diabetes Melitus (SPM)	Persen	100,00	-	96,34	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
16	Cakupan pelayanan Kesehatan Jiwa (SPM)	Persen	100,00	-	69,68	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
17	Tingkat kemandirian BLUD Puskesmas	Persen	50,00	-	103,32	45,00	103,25	103,25	206,50	Tercapai
18	Tingkat kemandirian BLUD BKPM	Persen	30,00	-	97,43	0,00	0,00	0,00	100,00	Tercapai
19	Tingkat kemandirian BLUD PSPJ	Persen	25,00	-	99,29	23,00	72,90	72,90	291,61	Tercapai
20	Cakupan Kelurahan Open Defecation Free (ODF)	Persen	59,26	-	77,78	55,56	77,78	77,78	131,25	Tercapai
21	Persentase kualitas air minum pada penyelenggara air minum	Persen	84,00	-	82,99	81,00	82,21	82,21	97,87	Akan Tercapai
22	Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yg memenuhi syarat kesehatan	Persen	98,00	-	92,10	96,00	92,02	92,02	93,90	Akan Tercapai
23	Persentase Pembinaan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal dan informal	Persen	40,00	-	41,37	37,00	41,48	41,48	103,70	Tercapai
24	Persentase pembinaan kesehatan olah raga pada anak SD	Persen	40,00	-	33,33	0,00	0,00	0,00	100,00	Tercapai
25	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	Persen	100,00	98,00	97,73	100,00	98,22	98,22	98,22	Akan Tercapai
26	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin (SPM)	Persen	100,00	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)	Persen	100,00	99,10	99,88	100,00	99,59	99,59	99,59	Akan Tercapai
28	Cakupan pelayanan kesehatan balita (SPM)	Persen	100,00	94,50	94,81	100,00	88,39	88,39	88,39	Belum Tercapai
29	Cakupan pelayanan kesehatan pada remaja	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	Tercapai
30	Cakupan pelayanan kesehatan lansia (SPM)	Persen	65,00	58,70	100,00	64,90	70,57	70,57	108,57	Tercapai
31	Cakupan penduduk yg mempunyai jaminan kesehatan	Persen	95,00	-	80,08	81,00	77,15	77,15	81,21	Belum Tercapai
32	Persentase puskesmas yang memenuhi standar puskesmas	Persen	95,00	-	100,00	95,00	100,00	100,00	105,26	Tercapai
33	Persentase ketersediaan obat di Puskesmas dan BKPM	Persen	100,00	-	94,61	100,00	83,91	83,91	83,91	Belum Tercapai
34	Persentase peningkatan jumlah produksi Obat Asli Indonesia	Persen	18,00	-	27,00	16,00	6,88	6,88	38,24	Belum Tercapai
35	Persentase peningkatan jumlah varian produk obat asli Indonesia	Persen	18,00	-	15,56	16,00	5,77	5,77	32,05	Belum Tercapai
36	Cakupan Posyandu strata mandiri	Persen	30,00	-	24,33	24,64	24,40	24,40	81,32	Belum Tercapai
37	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (SPM)	Persen	100,00	-	99,29	100,00	52,54	52,54	52,54	Belum Tercapai
38	Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan yang dibutuhkan	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
39	Persentase satuan kesehatan yang terfasilitasi peningkatan kapasitas manajemen	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
40	Persentase penanganan BBLR 1500 gr - 2500 gr	Persen	100,00	-	93,18	99,00	95,42	95,42	95,42	Akan Tercapai
41	Persentase kematian ibu bersalin yang disebabkan oleh pendarahan	Persen	≤ 1	-	4,29	≤ 1	4,00	4,00	25,00	Belum Tercapai
42	Persentase kematian ibu bersalin yang disebabkan oleh pre-eklampsia	Persen	≤ 30	-	0,45	≤ 30	1,15	1,15	196,17	Tercapai
43	Persentase kematian ibu bersalin yang disebabkan oleh sepsis	Persen	≤ 0,2	-	0,00	≤ 0,2	0,00	0,00	> target	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan RS	Persen	100,00	-	96,97	98,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
45	Rata-rata waktu tunggu pelayanan obat jadi kurang dari sama dengan 30 menit	Menit	30,00	-	28,38	35,00	27,09	27,09	110,74	Tercapai
46	Rata-rata waktu tunggu pelayanan obat racikan kurang dari sama dengan 60 menit	Menit	50,00	-	48,39	52,00	43,15	43,15	115,89	Tercapai
47	Skor Akreditasi RS	Skor	Terakreditasi	-	Terakreditasi Snars	Reakreditasi	Terakreditasi SNARS	Terakreditasi SNARS	Terakreditasi snars	Belum Tercapai
48	Persentase perawat yang bersertifikasi BTCLS (basic trauma cardlac life saving) dan bidan yang bersertifikasi PPGDON (penanganan penderita gawat darurat obstetric dan neonatus)	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Pada urusan kesehatan ini, 16 dari 48 Indikator capaian masih kurang dari 80 Persen dari target akhir RPJMD, sehingga kemungkinan belum tercapai pada akhir tahun RPJMD di Tahun 2021. Indikator tersebut antara lain :

- Persentase kasus balita gizi buruk, yang dikarenakan pandemi penyelenggaraan posyandu banyak yang tutup, sehingga pemantauan tumbuh kembang bayi dan gizi menjadi kurang.
- Persentase puskesmas yang terakreditasi minimal utama, yang disebabkan belum ada fasilitasi akreditasi untuk fasyankes lainnya dan adanya Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/VI/0885/2020 tentang Pemberitahuan Penangguhan Penyelenggaraan Survei Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama dan Laboratorium.
- Persentase RS yang terakreditasi minimal utama, yang disebabkan adanya Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/VI/0885/2020 tentang Pemberitahuan Penangguhan Penyelenggaraan Survei Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama dan Laboratorium.
- Angka Kesakitan DBD per 10.000 penduduk karena kondisi/cuaca yang tidak stabil yang mengakibatkan banyak genangan air, sehingga dapat menjadi tempat bertelur nyamuk aedes aegypti
- Cakupan pelayanan penderita TB (SPM), karena dampak pandemi Covid yang menyebabkan penundaan penyuluhan TBC oleh kader TB maupun petugas P2 puskesmas di wilayah kerja kesehatan yang ketat.
- Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi (SPM) karena adanya perubahan formulasi dari Kementerian dalam penetapan target sasaran, yang semula berdasarkan penetapan data dasar dari data tahun 2019, namun berubah menjadi data riil berdasarkan survey Risesdas.
- Cakupan pelayanan kesehatan usia produktif (SPM) , yang disebabkan pandemi COVID-19, penundaan posbindu PTM.

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
h. Cakupan pelayanan kesehatan balita (SPM), yang disebabkan pandemi <i>COVID-19</i> , penundaan posbindu PTM. i. Cakupan penduduk yg mempunyai jaminan kesehatan, yang disebabkan keikutsertaan jaminan kesehatan penduduk yang berkurang karena kemampuan pembayaran iuran jaminan kesehatan. j. Persentase ketersediaan obat di Puskesmas dan BKPM, yang disebabkan karena beberapa item obat tidak diadakan pada tahun 2020, terdapat obat dropping dari provinsi kadaluarsa di tahun 2020, dan sejumlah obat tidak dapat dipenuhi oleh penyedia di pengadaan tahun 2020. k. Persentase peningkatan jumlah produksi Obat Asli Indonesia, yang disebabkan dampak pandemi <i>COVID-19</i> yang mengakibatkan jumlah permintaan jumlah produksi Jamu berkurang. l. Persentase peningkatan jumlah varian produk obat asli Indonesia, yang disebabkan terdapat varian baru masih dalam tahap penelitian formulasi awal. m. Cakupan Posyandu strata mandiri, yang belum tercapai namun masih <i>on track</i> dalam kerangka target RPJMD. n. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (SPM), karena ada anak-anak yang tidak diijinkan berangkat ke sekolah oleh orangtuanya untuk imunisasi karena masih kondisi pandemi sehingga capaiannya tidak dapat memenuhi target. o. Persentase kematian ibu bersalin yang disebabkan oleh pendarahan tidak memenuhi target karena Ada 2 pasien bersalin yang meninggal. Keduanya suspek <i>COVID-19</i> . Satu dirujuk ke RS Karyadi, tetapi karena di RS Karyadi ruang perawatan <i>COVID-19</i> penuh, akhirnya dikembalikan ke RS Bendan, dan 1 orang karena kekurangan ventilator khusus Covid di RS Bendan. p. Skor Akreditasi RS, yang belum tercapai disebabkan tidak adanya akreditasi karena pandemi <i>COVID-19</i> .										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tabel 2.183 Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1	persentase progres tahapan pembangunan Jalan akses ke jalan tol	Persen	100,00	5,00	91,42	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
2	Persentase sarpas pengendali banjir dalam kondisi baik	Persen	94,74	n/a	90,00	94,44	90,00	90,00	95,00	Akan Tercapai
3	persentase titik lampu yang telah bermeterisasi dan LED	Persen	40,00	n/a	33,23	36,00	43,98	43,98	109,94	Tercapai
4	Komponen ruang publik kreatif (taman bahagia) yang ditingkatkan sarana prasarananya	Persen	100,00	-	71,43	80,00	82,86	82,86	82,86	Belum Tercapai
5	Peningkatan sarpas lokasi makam	Persen	100,00	-	33,33	67,00	67,00	67,00	67,00	Belum Tercapai
6	Persentase peningkatan jumlah bangunan ber-IMB	Persen	16,286 unit	n/a	4,14	4,50	2,18	15125,00	92,87	Akan Tercapai
7	Persentase jembatan dalam kondisi baik	Persen	92,21	-	89,31	92,21	89,31	89,31	96,86	Akan Tercapai
8	Persentase Trotoir dalam kondisi baik	Persen	12,18	-	12,02	12,02	12,02	12,02	98,69	Akan Tercapai
9	Persentase Saluran Pematul Jalan dalam kondisi baik	Persen	42,62	-	42,37	42,40	42,53	42,53	99,79	Akan Tercapai
10	Fasilitasi perencanaan bangunan gedung	Persen	100,00	-	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00	Tercapai
11	Fasilitasi pembangunan bangunan gedung	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
12	persentase jaringan irigasi yang dipelihara	Persen	78,26	-	n/a	77,33	78,47	78,47	100,27	Tercapai
13	Persentase drainase primer dalam kondisi baik	Persen	70,14	-	58,90	62,05	62,40	62,40	88,96	Belum Tercapai
Pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdapat 3 indikator yang belum mencapai target akhir RPJMD, antara lain : Komponen ruang publik kreatif (taman bahagia) yang ditingkatkan sarana prasarananya, Peningkatan sarpas lokasi makam, Persentase drainase primer dalam kondisi baik. Namun demikian, ketiga indikator tersebut masih <i>on the track</i> mengingat pelaksanaan sisa target direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2021.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

4. URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Tabel 2.184 Capaian Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman										
1	Rasio Rumah Tidak Layak Huni	Persen	1,26	-	3,07	2,71	2,70	2,70	46,71	Belum Tercapai
2	Persentase perumahan MBR yang menyediakan fasum fasos	Persen	100,00	-	62,73	50,00	79,50	79,50	79,50	Belum Tercapai
3	Rasio panjang jalan lingkungan yang terlayani drainase	Persen	87,75	-	72,04	75,29	72,05	72,05	82,11	Belum Tercapai
4	Cakupan jalan dan jembatan permukiman dalam kondisi baik	Persen	47,46	-	69,56	47,15	81,44	81,44	171,59	Tercapai
5	Persentase penduduk yang mengakses air bersih yang terlindungi dengan perpipaan	Persen	95,99	-	83,33	83,95	88,79	88,79	92,50	Akan Tercapai
6	Cakupan akses sanitasi	Persen	97,33	-	99,32	95,99	96,59	96,59	99,24	Akan Tercapai
Pada urusan Perumahan dan Permukiman, terdapat 3 indikator yang belum tercapai, yaitu : - 2 (dua) diantaranya Persentase perumahan MBR yang menyediakan fasum fasos dan Rasio panjang jalan lingkungan yang terlayani drainase, masih on the track dengan rencana pencapaian target akhir RPJMD karena pelaksanaan sisa target di tahun 2021. - Namun demikian, untuk target Rasio Rumah Tidak Layak Huni masih cukup jauh dari Target Akhir RPJMD karena pada pelaksanaan tergantung intervensi kebijakan Pusat (DAK) dan pada Tahun 2020 anggaran tersebut terkena refocusing.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS

Tabel 2.185 Capaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas										
1	Cakupan Kelompok Sasaran Tibum yang dibina	Persen	100,00	-	44,44	29,00	18,52	18,52	18,52	Belum Tercapai
2	persentase pemilih pemula yang terdidik politik	Persen	21,11	-	17,47	17,12	17,21	17,21	81,52	Belum Tercapai
3	Persentase Informasi Barang Cukai Ilegal yang dikoordinasikan untuk ditangani	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4	Persentase Penanganan Kedaruratan Sipil Non Kebakaran	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
5	Persentase penanganan bencana kebakaran sesuai dengan SPM	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
6	Persentase penyelesaian pelanggaran perda yang dilaporkan	Persen	100,00	-	99,35	100,00	98,71	98,71	98,71	Akan Tercapai
7	Persentase Penanganan kerawanan/konflik sosial	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
8	Persentase penurunan kasus narkoba	Persen	23,08	n/a	12,00	23,53	11,76	11,76	50,97	Belum Tercapai
9	persentase korban bencana alam yang ditangani	Persen	75,00	-	100,00	75,00	31,95	31,95	42,60	Belum Tercapai
10	peningkatan peran serta lembaga masyarakat/komunitas masyarakat tanggap bencana	Persen	33,33	-	83,33	33,33	66,67	66,67	200,02	Tercapai

Pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum , terdapat 4 indikator yang belum tercapai.

- Cakupan Kelompok Sasaran Tibum yang dibina, yang disebabkan pembinaan tibum tranmas terkendala penertiban tibum.
- persentase pemilih pemula yang terdidik politik, yang terhambat penyelenggaraan karena memenuhi prokes COVID-19 membatasi kerumunan.
- Persentase penurunan kasus narkoba, belum tercapai namun masih *on track* dalam kerangka target RPJMD.
- persentase korban bencana alam yang ditangani belum tercapai karena Korban bencana banjir dan rob yang tidak mau mengungsi tidak dihitung sebagai capaian penanganan korban bencana.

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

6. URUSAN SOSIAL

Tabel 2.186 Capaian Indikator Urusan Sosial Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Sosial										
1	Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	Persen	1,66	-	1,30	1,50	1,57	1,57	94,63	Akan Tercapai
2	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi , perlindungan dan jaminan sosial	Persen	37,02	-	39,35	30,22	46,72	46,72	126,20	Tercapai
3	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	Persen	75,00	-	75,00	66,67	75,00	75,00	100,00	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

7. URUSAN TENAGA KERJA

Tabel 2.187 Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Tenaga Kerja										
1	Cakupan tenaga kerja yang berkompeten	Orang	800,00	-	1200,00	560,00	528,00	528,00	66,00	Belum Tercapai
2	Persentase Wirausaha yang mandiri dan produktif yang masih melanjutkan usaha	Persen	50,00	-	82,93	45,00	87,23	87,23	174,47	Tercapai
3	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	Persen	70,00	-	66,25	51,43	68,00	68,00	97,14	Akan Tercapai
4	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	75,00	-	65,00	0,00	0,00	0,00	100,00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	Persen	55,00	-	75,00	54,00	60,00	60,00	109,09	Tercapai
6	Rasio kenaikan upah minimum	Persen	8,74	-	8,03	8,73	8,66	8,66	99,05	Akan Tercapai
7	Rasio jumlah sarana hubungan industrial LKS Bipartit yang terbentuk di perusahaan	Persen	50,00	-	47,80	43,00	45,83	45,83	91,67	Akan Tercapai
8	Rasio jumlah sarana hubungan industrial peraturan Perusahaan / perjanjian kerja bersama yang dibuat perusahaan	Persen	47,00	-	46,00	42,00	43,56	43,56	92,67	Akan Tercapai
Pada urusan Tenaga Kerja masih terdapat 1 indikator yang belum tercapai terhadap target akhir RPJMD, yakni pada indikator Cakupan tenaga kerja yang berkompeten . Namun demikian pencapaiannya namun masih <i>on track</i> dalam kerangka target RPJMD.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

8. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tabel 2.188 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
1	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	Persen	100,00	-	96,77	77,42	90,32	90,32	90,32	Akan Tercapai
2	Persentase kampung layak anak	Persen	100,00	-	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	Belum Tercapai
3	Cakupan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih terdapat 1 indikator yang belum tercapai terhadap target akhir RPJMD, yakni pada indikator presentase kampung layak anak. Namun demikian pencapaiannya namun masih <i>on track</i> dalam kerangka target RPJMD.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

9. URUSAN PANGAN

Tabel 2.189 Capaian Indikator Urusan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pangan										
1	Indeks capaian skor pola pangan harapan ketersediaan pangan	Skor	90,20	-	91,31	77,16	92,01	92,01	102,01	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

10. URUSAN PERTANAHAN

Tabel 2.190 Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pertanahan										
1	persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot untuk infrastruktur kota	Persen	75,00	55,22	79,60	75,00	71,40	71,40	95,20	Akan Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

11. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Tabel 2.191 Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Lingkungan Hidup										
1	Persentase sampah terangkut ke TPA	Persen	72,00	69,05	79,15	74,00	92,53	92,53	77,82	Akan Tercapai
2	Persentase sampah terkelola di TPS3R	Persen	43,00	30,95	20,85	26,00	7,47	7,47	17,38	Belum Tercapai
3	Persentase capaian target 801 usaha dan/atau kegiatan terolah limbahnya	Persen	100,00	-	75,00	87,00	43,58	43,58	43,58	Belum Tercapai
4	persentase kenaikan jenis informasi publik tentang Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persen	100,00	-	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
5	Persentase peningkatan pemberdayaan komunitas yang dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup	Persen	100,00	-	90,00	92,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
6	Persentase peningkatan jumlah ruang terbuka hijau (RTH)	Persen	0,10	-	n/a	0,10	0,00	0,00	0,00	Belum Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	Persen	18,90	18,30	8,23	18,80	18,70	18,70	98,94	Akan Tercapai
8	Persentase usaha / kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis aspek lingkungan	Persen	100,00	-	65,00	80,00	86,21	86,21	86,21	Belum Tercapai
9	Persentase pengaduan masyarakat yang telah terselesaikan	Persen	90,00	-	80,00	85,00	83,33	83,33	92,59	Akan Tercapai
10	Persentase capaian target jumlah ABT yang terawasi	Persen	100 Persen (70 titik ABT)	-	72,00	85,71	285,71	285,71	285,71	Tercapai
11	Persentase target capaian kampung iklim di Tahun 2021	Persen	100 Persen (4 kampung)	-	74,00	75,00	266,67	266,67	266,67	Tercapai
12	Cakupan pemantauan kualitas udara di perumahan, industri dan fasilitas umum	Persen	100 Persen (24 titik)	-	66,67	83,30	83,33	83,33	83,33	Belum Tercapai

Pada urusan lingkungan hidup, terdapat 5 (lima) indikator yang belum tercapai targetnya terhadap target akhir RPJMD, antara lain :

- Persentase sampah terkelola di TPS3R, disebabkan kesadaran pengelolaan sampah di TPS3R yang masih rendah.
- Persentase capaian target 801 usaha dan/atau kegiatan terolah limbahnya, disebabkan saat pentargetan RPJMD direncanakan akan dibangun 6 lokasi IPAL komunal dari APBD dan DAK. Namun sampai dengan tahun 2020 hanya terbangun 2 lokasi karena keterbatasan anggaran.
- Persentase peningkatan jumlah ruang terbuka hijau (RTH) karena penetapan target terlalu tinggi sehingga pencapaian sangat sulit.
- Persentase usaha / kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis aspek lingkungan, belum tercapai namun masih *on track* dalam kerangka target RPJMD.
- Cakupan pemantauan kualitas udara di perumahan, industri dan fasilitas umum, Belum tercapai namun masih *on track* dalam kerangka target RPJMD.

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

12. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tabel 2.192 Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
1	OPD yang memanfaatkan data kependudukan	Perangkat Daerah	26,00	-	1,00	13,00	1,00	1,00	3,85	Belum Tercapai
2	Stakeholder yang berkoordinasi dalam pemanfaatan data kependudukan	Pemangku Kepentingan	78,00	-	26,00	26,00	26,00	26,00	33,33	Belum Tercapai
3	Cakupan penerbitan KTP	Persen	95,00	-	97,76	94,00	97,73	97,73	102,88	Tercapai
4	Cakupan penerbitan KK	Persen	98,00	-	91,27	97,50	93,14	93,14	95,04	Akan Tercapai
5	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	Persen	75,00	-	52,14	55,00	53,81	53,81	71,75	Belum Tercapai
6	Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	Persen	80,00	-	75,94	75,00	80,87	80,87	101,09	Tercapai
Pada urusan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil terdapat 3 (tiga) indikator yang statusnya masuk dalam kategori belum tercapai terhadap Target Akhir RPJMD, antara lain : a. OPD yang memanfaatkan data kependudukan, disebabkan penetapan target awal terlalu tinggi sehingga menemui kesulitan dalam pencapaian target. b. Stakeholder yang berkoordinasi dalam pemanfaatan data kependudukan, disebabkan pemanfaatan data kependudukan harus seijin Kemendagri sehingga kesulitan dilaksanakan intervensi. c. Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran, kesulitan intervensi penambahan akta kelahiran bagi penduduk dewasa yang belum memiliki akta kelahiran.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

13. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tabel 2.193 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
1	Persentase kelurahan yang terfasilitasi kegiatan pemberdayaan	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
2	Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat	Persen	100,00	-	33,33	66,67	66,67	66,67	66,67	Belum Tercapai
3	persentase kinerja kelembagaan masyarakat	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
Pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih terdapat 1 indikator yang belum tercapai terhadap target akhir RPJMD, yakni pada indikator Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat. Namun demikian pencapaiannya namun masih <i>on track</i> dalam kerangka target RPJMD.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

14. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Tabel 2.194 Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
1	Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	Persen	66,00	n/a	20,51	22,00	19,30	19,30	29,25	Belum Tercapai
2	Persentase capaian target penurunan kasus perkawinan dibawah umur 20 th menjadi 250 kasus	Persen	100,00	n/a	69,33	88,89	101,11	101,11	101,11	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih terdapat 1 indikator yang belum tercapai terhadap target akhir RPJMD, yakni pada indikator Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia. Hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan pembatasan pelayanan MKJP di puskesmas dan di bidan mandiri.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

15. URUSAN PERHUBUNGAN

Tabel 2.195 Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Perhubungan										
1	Persentase peningkatan fasilitas LLAJ	Persen	100,00	-	95,41	89,72	97,08	97,08	97,08	Akan Tercapai
2	Ketersediaan angkutan umum	Persen	20,95	-	17,97	18,84	22,69	22,69	108,30	Tercapai
3	Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan uji berkala	Persen	92,40	-	84,52	92,34	83,21	83,21	90,05	Akan Tercapai
4	Persentase peningkatan kasawan tertib lalulintas (KTL)	Persen	100,00	-	100,00	88,89	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

16. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tabel 2.196 Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Komunikasi dan Informatika										
1	Persentase OPD, Kelurahan dan Kecamatan dalam layanan infrastruktur dan JaringanTIK/ Fiber Optik (FO)	Persen	100,00	-	93,27	96,67	93,94	93,94	93,94	Akan Tercapai
2	Persentase Cakupan dalam layanan infrastruktur dan JaringanTIK/ Fiber Optik (FO) Klaster Kesehatan (Puskesmas, RS, Pustudll)	Persen	37,78	-	65,91	35,56	88,24	88,24	233,55	Tercapai
3	Persentase Cakupan layanan infrastruktur dan JaringanTIK/ Fiber Optik (FO) Klaster Pendidikan (Sekolah negeri, smp, sd, tk)	Persen	27,84	-	20,00	24,74	24,74	24,74	88,86	Belum Tercapai
4	Persentase OPD yang menjalankan layanannya dengan menggunakan Aplikasi/ Sistem Informasi	Persen	100,00	-	87,10	93,55	100,00	100,00	100,00	Tercapai
5	Persentase kelompok masyarakat mendapatkan capacity building TIK untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi	Persen	100,00	-	41,84	76,67	100,00	100,00	100,00	Tercapai
6	Persentase OPD / Urusan Pemerintahan/ Sektor Pembangunan yang tercakup dalam layanan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	100,00	-	100,00	88,37	100,00	100,00	100,00	Tercapai
7	Persentase Kelurahan yang memiliki / mengembangkan Sumber Daya Komunikasi Publik Sebagai Jejaring Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik.	Persen	66,67	-	71,43	62,96	74,07	74,07	111,10	Tercapai
8	Persentase OPD Menerapkan KIP dengan Kategori "Cukup Informatif/ Baik"	Persen	38,10	-	67,74	28,57	93,55	93,55	245,53	Tercapai
9	Persentase OPD yang melakukan Pengelolaan Pengaduan / Aspirasi Masyarakat	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pada urusan Komunikasi dan Informatika masih terdapat 1 indikator yang belum tercapai terhadap target akhir RPJMD, yakni pada indikator Persentase Cakupan layanan infrastruktur dan Jaringan TIK/ Fiber Optik (FO) Klaster Pendidikan (Sekolah negeri, smp, sd, tk). Namun demikian, pencapaiannya namun masih <i>on track</i> dalam kerangka target RPJMD										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

17. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Tabel 2.197 Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
1	UMKM penerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat) dan jenis pembiayaan lainnya	UMKM	15.000	570,00	22.653,00	14.000	31.603,00	31.603,00	210,69	Tercapai
2	UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha dan jaringan kemitraan	UMKM	895,00	115,00	150	0	20,00	20,00	47,49	Belum Tercapai
3	Kenaikan jumlah UMKM	UMKM	24.888	22.934,00	22.983	24.642	23.233	23.233,00	93,35	Akan Tercapai
4	Persentase koperasi/unit simpan pinjam/ syariah yang sehat dan cukup sehat	Persen	100,00	81,11	79,29	96,67	73,00	73,00	73,00	Belum Tercapai
5	Persentase koperasi aktif	Persen	99,18	-	84,38	98,76	89,77	89,77	90,51	Akan Tercapai
Pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah terdapat 2 (dua) indikator yang kemungkinan belum memenuhi target akhir RPJMD, yaitu :										
a. UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha dan jaringan kemitraan, yang disebabkan pengaruh COVID-19										
b. Persentase koperasi/unit simpan pinjam/ syariah yang sehat dan cukup sehat, yang disebabkan Berdasarkan peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM RI Nomor : 06/PER/DEP/IV/2016 tentang penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan injam, terjadi kenaikan skor pada kelompok cukup sehat, semula skor 60 s/d 80 menjadi 66 s/d 80. jadi yang tadinya kategori koperasi cukup sehat menjadi kategori dalam pengawasan										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

18. URUSAN PENANAMAN MODAL

Tabel 2.198 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Penanaman Modal										
1	Kepeminatan (LoI) kerjasama atau kemitraan antara UMK dengan UMB	Buah	85,00	-	68,00	0,00	0,00	0,00	80,00	Belum Tercapai
2	Nilai investasi per tahun (milyar)	Milyar Rupiah	223,70	-	3294,76	200,10	193,10	193,10	86,32	Belum Tercapai
3	Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai Standar Pelayanan	Persen	95,00	-	83,45	85,00	97,27	97,27	102,39	Tercapai
Pada urusan Penanaman Modal, terdapat 2 (dua) indikator yang kemungkinan belum memenuhi target pada akhir tahun RPJMD, yakni : a. Kepeminatan (LoI) kerjasama atau kemitraan antara UMK dengan UMB. b. Nilai investasi per tahun (milyar). Hal ini disebabkan dampak pandemi yang sangat kuat terhadap urusan penanaman modal.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

19. URUSAN KEBUDAYAAN

Tabel 2.199 Capaian Indikator Urusan Kebudayaan Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Kebudayaan										
1	Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan skala nasional	Event	12,00	-	2,00	2,00	1,00	5,00	41,67	Belum Tercapai
2	Event kesenian yang difasilitasi	Event	42,00	-	21,00	7,00	6,00	40,00	95,24	Akan Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	Komunitas	30,00	-	100,00	5,00	59,00	165,00	550,00	Tercapai
4	Persentase pengunjung museum batik	Persen	4,86	-	3,96	4,83	6,68	6,68	137,38	Tercapai

Pada urusan kebudayaan masih terdapat 1 indikator yang belum tercapai terhadap target akhir RPJMD, yakni pada indikator *Event* kesenian dan kebudayaan yang disiapkan skala nasional). Hal ini disebabkan karena pengaruh adanya pandemi yang mensyaratkan pemenuhan terhadap protocol kesehatan pencegahan penyebaran virus melalui pengurangan kerumunan.

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

20. URUSAN PERPUSTAKAAN

Tabel 2.200 Capaian Indikator Urusan Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Perpustakaan										
1	Rasio Pengunjung Perpustakaan per tahun (penduduk usia 5-60 thn)	Indeks	27,00	-	36,21	14,00	15,40	15,40	57,04	Belum Tercapai
2	Persentase perpustakaan kelurahan yang aktif	Persen	25,93	-	11,11	18,52	7,41	7,41	28,57	Belum Tercapai

Kedua indikator pada urusan perpustakaan masih cukup jauh capaiannya terhadap target akhir RPJMD. Hal ini sangat disebabkan pengaruh adanya pandemi yang membatasi kerumunan untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19 sehingga pengunjung perpustakaan secara fisik jauh berkurang. Namun demikian, telah dilakukan usaha pengadaan perpustakaan secara digital untuk menggantikan sementara perpustakaan secara fisik.

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

21. URUSAN KEARSIPAN

Tabel 2.201 Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Kearsipan										
1	Persentase Pembinaan Kearsipan yang ditindaklanjuti	Persen	69,70	-	33,30	57,58	60,00	60,00	86,08	Belum Tercapai
2	Persentase jumlah OPD yang dilakukan audit	Persen	63,16	-	53,33	34,84	35,38	35,38	56,02	Belum Tercapai
3	Arsip yang dilestarikan (statis)	Arsip	11.000	-	9.296,00	10.000,00	18.496	18.496,00	168,15	Tercapai
2 (dua) dari 3 (tiga) indikator pada urusan Kearsipan belum tercapai. 1 (satu) indikator yakni Persentase Pembinaan Kearsipan yang ditindaklanjuti, masih on the track dengan target akhir RPJMD. Namun demikian, pada indikator Persentase jumlah OPD yang dilakukan audit, capaian terpengaruh dampak pandemi COVID-19.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

22. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Tabel 2.202 Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Kepemudaan dan Olahraga										
1	Persentase anggota organisasi kepemudaan yang dibina	Persen	85,71	-	26,67	36,36	106,67	106,67	124,44	Tercapai
2	Prestasi olahraga tingkat provinsi (Medali)	Orang	113,00	-	22,00	0,00	0,00	51,00	45,13	Belum Tercapai
3	Prestasi olahraga tingkat nasional (Medali)	Orang	14,00	-	1,00	0,00	0,00	3,00	21,43	Belum Tercapai
4	Peningkatan event olahraga tk Provinsi dan Nasional	Event	14,00	-	1,00	0,00	0,00	1,00	7,14	Belum Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Persentase ketersediaan sarpras Olahraga sesuai jenis cabor	Persen	45,00	-	42,86	40,00	46,15	46,15	102,56	Tercapai
Pada urusan Kepemudaan dan Olahraga terdapat 3 (tiga) indikator yang Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMDnya belum tercapai terhadap Target Akhir RPJMD. Penyebab belum tercapai ketiga indikator tersebut adalah terjadinya pandemi yang mengakibatkan penundaan berbagai kejuaran olahraga tingkat kota, provinsi, nasional.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

23. URUSAN STATISTIK

Tabel 2.203 Capaian Indikator Urusan Statistik Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Statistik										
1	Persentase data statistik sektoral yang tersusun	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

24. URUSAN PERSANDIAN

Tabel 2.204 Capaian Indikator Urusan Persandian Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Persandian										
1	Persentase berita daerah yang lancar, aman dan terjaga kerahasiaannya	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

25. URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

Tabel 2.205 Capaian Indikator Urusan Perikanan dan Kelautan Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Perikanan dan Kelautan										
1	Peningkatan nilai produksi perikanan tangkap	Persen	209 M	187 M di Tahun 2015	13,23	1,95	-0,41	176,84	84,61	Akan Tercapai
2	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	Rp. Miliar	5,5 M	4,2 M	13,23	1,95	-0,41	5,30	96,36	Akan Tercapai
3	Nelayan yang dibina	Persen	888 orang	600 orang	11,83	8,00	14,64	963,00	108,45	Tercapai
4	Peningkatan produksi perikanan budidaya	Persen	1870,00	1382 ton	0,70	0,00	-53,97	809,03	43,26	Belum Tercapai
5	peningkatan konsumsi makan ikan	Persen	28 kg/kpt/tahun	22,3 kg/kpt/tahun	12,73	6,00	8,10	33,64	179,89	Tercapai
6	persentase pembudidaya yang dibina	Persen	644 orang	230 orang	30,00	30,00	29,81	1181,00	183,39	Tercapai
7	Peningkatan tenant dan non tenant	persen	24 tenant	6 tenant	57,00	50,00	50,00	30,00	125,00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pada urusan Perikanan dan Kelautan terdapat 1 (satu) indikator yang Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD terhadap target akhir belum tercapai. Indikaor tersebut adalah peningkatan produksi perikanan yang capaiannya baru mencapai 43,26 Persen dari target akhir RPJMD. Hal ini disebabkan produksi perikanan budidaya yang sulit meningkat karena faktor alam (banjir hujan dibulan februari dan rob di bulan mei, juni, oktober, november, desember) serta dampak pembangunan tanggul pada tambak.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

26. URUSAN PARIWISATA

Tabel 2.206 Capaian Indikator Urusan Pariwisata Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pariwisata										
1	persentase destinasi wisata yang berkembang	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
2	Persentase pelaku pariwisata yang terbina	Persen	1,85	100,00	1,55	1,69	0,60	0,60	32,19	Belum Tercapai
3	Persentase destinasi pariwisata yang dipromosikan	Persen	100,00	n/a	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	Belum Tercapai
2 (dua) dari 3 (tiga) indikator pada urusan Pariwisata belum mencapai target akhir RPJMD. Penyebab terjadi belum tercapainya indikator tersebut adalah pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi usaha di sektor pariwisata.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

27. URUSAN PERTANIAN

Tabel 2.207 Capaian Indikator Urusan Pertanian Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pertanian										
1	Persentase kenaikan nilai produksi peternakan	Persen	4,00	-	6,96	4,00	-2,68	-2,68	-67,07	Belum Tercapai
2	Persentase Peningkatan Layanan Pemotongan Hewan di RPH	Persen	5,00	-	-34,00	3,00	-3,85	-3,85	-77,02	Belum Tercapai
3	Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis	kasus	2.400,00	-	0,00	2.400,00	2.432,00	2.432,00	98,68	Akan Tercapai
4	Persentase kenaikan kelas kelompok tani	Persen	25,00	-	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Belum Tercapai
5	Persentase peningkatan produksi padi	Persen	10,00	-	-8,00	3,00	11,54	11,54	115,36	Tercapai
Pada urusan pertanian terdapat 3 (tiga) indikator yang belum tercapai, yang antara lain disebabkan : - Persentase kenaikan nilai produksi peternakan karena nilai produksi peternakan menurun cukup drastis pada jenis ternak yang bernilai tinggi (daging), sehingga total nilai produksi terlihat menurun signifikan. - Persentase Peningkatan Layanan Pemotongan Hewan di RPH karena permintaan pemotongan hewan ternak turun signifikan (daya beli daging turun) pengaruh pandemi covid. - Persentase kenaikan kelas kelompok tani, yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

28. URUSAN PERINDUSTRIAN

Tabel 2.208 Capaian Indikator Urusan Perindustrian Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Perindustrian										
1	Pelaku IKM Batik Baru	IKM	10,00	-	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	Tercapai
2	Persentase IKM dalam LIK	Persen	100,00	-	0,00	15,00	80,00	80,00	80,00	Belum Tercapai
3	Produk Hukum Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah	perda	1,00	-	1,00	0,00	0,00	1,00	100,00	Tercapai
4	Peningkatan Jumlah IKM Terlatih Peningkatan SDM Teknologi Industri	IKM	255,00	-	75,00	30,00	30,00	205,00	80,39	Belum Tercapai
Pada urusan perindustrian, 2 (dua) indikator belum tercapai yakni Persentase IKM dalam LIK dan Peningkatan Jumlah IKM Terlatih Peningkatan SDM Teknologi Industri, namun demikian capaian tersebut masih on the track dengan target akhir RPJMD.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

29. URUSAN PERDAGANGAN

Tabel 2.209 Capaian Indikator Urusan Perdagangan Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Perdagangan										
1	Peningkatan jumlah UTP yang ditera ulang	Persen	100,00	-	58,19	97,00	68,96	68,96	68,96	Belum Tercapai
2	persentase peningkatan obyek sasaran pengawasan barang beredar	Persen	100,00	-	100,00	94,68	101,06	101,06	101,06	Tercapai
3	Eksportir di Kota Pekalongan	pelaku usaha	18,00	12,00	21,00	17,00	21,00	21,00	116,67	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Pelaku usaha yang difasilitasi sarana promosi melalui even pameran	UMKM	72,00	-	16,00	3,00	3,00	3,00	4,17	Belum Tercapai
5	Pelaku usaha yang difasilitasi sarana promosi Pekalongan Batik Night Market	UMKM	300,00	10,00	60,00	0,00	0,00	60,00	20,00	Belum Tercapai
6	Pelaku usaha yang difasilitasi sarana promosi melalui E-Marketplace	UMKM	70,00	-	70,00	70,00	70,00	70,00	100,00	Tercapai
7	Kawasan tertib PK5	kawasan	7,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	Tercapai
8	Persentase pemenuhan persyaratan teknis SNI Pasar Rakyat	Persen	30,77	-	26,57	27,27	27,27	27,27	88,63	Belum Tercapai

Pada urusan perdagangan, terdapat 4 (empat) indikator yang belum tercapai. 3 (tiga) diantaranya disebabkan karena dampak pandemi, yakni:

- Peningkatan jumlah UTTP yang ditera ulang.
- Pelaku usaha yang difasilitasi sarana promosi melalui even pameran.
- Pelaku usaha yang difasilitasi sarana promosi Pekalongan Batik Night Market.

1 (satu) indikator yakni Persentase pemenuhan persyaratan teknis SNI Pasar Rakyat, belum tercapai terhadap target namun masih on the track dalam kerangka pencapaian target akhir RPJMD.

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

30. URUSAN PERENCANAAN

Tabel 2.210 Capaian Indikator Urusan Perencanaan Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Perencanaan										
1	Persentase pemanfaatan data/informasi dalam perencanaan	Persen	100,00	-	112,72	0,00	0,00	112,72	112,72	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Penyusunan dokumen perencanaan Tahunan Tepat Waktu	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Triwulanan Tepat Waktu	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4	persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
5	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang infrastruktur Wilayah, Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman	Persen	100,00	-	89,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
6	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Pemsosbud	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

31. URUSAN KEUANGAN

Tabel 2.211 Capaian Indikator Urusan Keuangan Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Keuangan										
1	Persentase Peningkatan potensi pendapatan	Persen	4,50	-	4,90	4,00	22,73	22,73	505,15	Tercapai
2	persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot	Persen	64,50	-	62,07	63,00	37,82	37,82	58,63	Belum Tercapai
3	Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4	Persentase OPD yang menyelesaikan laporan Persediaan	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
5	Ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
7	Persentase OPD yang menerapkan pelaporan keuangan berbasis SAP	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
8	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Pajak	Persen	100,00	-	108,92	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
9	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Retribusi	Persen	100,00	-	27,71	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
10	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
11	Persentase Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Pada urusan keuangan terdapat 1 (satu) indikator yang kemungkinan pada akhir tahun RPJMD belum mencapai target yang diharapkan. Indikator tersebut adalah persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot. Hal ini disebabkan Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kota Pekalongan yang belum bersertifikat sejumlah 1959 bidang akan diselesaikan secara bertahap. Saat ini sudah dilakukan pengukuran tetapi masih proses pembuatan sertifikat.

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

32. URUSAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

Tabel 2.212 Capaian Indikator Urusan Kepegawaian dan Diklat Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Kepegawaian dan Diklat										
1	Persentase PNS yang memiliki Kompetensi	Persen	28,00	-	27,95	3,96	11,00	11,00	39,29	Belum Tercapai
2	Persentase PNS tugas belajar dan ijin belajar	Persen	32,53	-	0,62	1,38	1,23	1,23	3,77	Belum Tercapai
3	Tingkat kepuasan PNS terhadap administrasi kepegawaian	Persen	25,00	-	23,00	28,00	40,05	40,05	160,19	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Persentase Ketersediaan data PNS	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,60	100,60	100,60	Tercapai
5	Persentase Kesesuaian Kompetensi dengan Jabatan	Persen	78,00	-	81,05	83,20	72,63	72,63	93,12	Akan Tercapai
6	Persentase PNS berkembang karier	Persen	40,00	-	36,96	13,17	36,00	36,00	90,00	Akan Tercapai

Pada urusan kepegawaian dan diklat, terdapat 2 (dua) indikator yang belum tercapai, yang antara lain disebabkan :

a. Persentase PNS yang memiliki Kompetensi, yang disebabkan dampak Pandemi menyebabkan pelaksanaan diklat kompetensi sulit dilakukan.

b. Persentase PNS tugas belajar dan ijin belajar, yang dikarenakan adanya regulasi yang mensyaratkan PNS untuk meningkatkan pendidikan terutama jabatan fungsional.

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

33. URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Tabel 2.213 Capaian Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Penelitian dan Pengembangan										
1	Persentase kesesuaian penelitian dengan arah kebijakan selama periode RPJMD	Persen	60,00	-	82,00	60,00	80,00	80,00	133,33	Tercapai
2	Persentase PD yang difasilitasi dalam inovasi daerah	Persen	95,00	-	100,00	0,00	100,00	100,00	105,26	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

34. URUSAN FUNGSI LAIN

Tabel 2.214 Capaian Indikator Urusan Fungsi Lain Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Fungsi Lain										
1	Persentase penyelesaian kasus-kasus / pengaduan masyarakat pada Wilayah Irbanwil I	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
2	Persentase penyelesaian kasus-kasus / pengaduan masyarakat pada Wilayah Irbanwil II	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
3	persentase perda inisiatif yang diterbitkan	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4	Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	Persen	100,00	-	155,56	100,00	111,11	111,11	111,11	Tercapai
5	Ketentuan Cukai yang telah disosialisasikan	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
6	Rata-rata nilai persepsi kinerja unit pelayanan	Indeks	88,00	-	82,21	85,00	80,42	80,42	91,39	Akan Tercapai
7	Persentase PD yang melaksanakan evaluasi kelembagaan	Persen	25,80	-	87,50	6,50	100,00	100,00	387,60	Tercapai
8	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Evaluasi AKIP Kota	Nilai	15,00	-	11,09	14,00	11,17	11,17	93,08	Akan Tercapai
9	Persentase Capaian Target Pengawasan Internal pada Wilayah Irbanwil I	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,92	100,92	100,92	Tercapai
10	Persentase Capaian Target Pengawasan Internal pada Wilayah Irbanwil II	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,93	100,93	100,93	Tercapai
11	Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Barat	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
12	Tingkat kinerja bidang pembangunan Wilayah Barat	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
13	Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Barat	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
14	Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Timur	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Tingkat kinerja bidang pembangunan Wilayah Timur	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
16	Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Timur	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
17	Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Selatan	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
18	Tingkat kinerja bidang pembangunan Wilayah Selatan	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
19	Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Selatan	Persen	100,00	-	100,00	100,00	85,26	85,26	85,26	Belum Tercapai
20	Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Utara	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
21	Tingkat kinerja bidang pembangunan Wilayah Utara	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
22	Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Utara	Persen	100,00	-	100,00	100,00	52,08	52,08	52,08	Belum Tercapai
23	Persentase OPD yang menyelenggarakan SPIP level berkembang	Persen	100,00	-	61,29	77,42	80,65	80,65	80,65	Belum Tercapai
24	Persentase OPD dengan hasil evaluasi pembangunan ZI minimal B	Persen	80,65	-	54,84	64,52	67,74	67,74	84,00	Belum Tercapai
25	Persentase pengaduan masyarakat bidang hukum yang tertangani	Persen	80,00	-	100,00	72,00	100,00	100,00	125,00	Tercapai
26	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
27	Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan		7,00	-	2,00	1,00	6,00	6,00	85,71	Belum Tercapai
28	Persentase kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, Perusda, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan pelaksanaannya	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Persentase medical general check up	Persen	100,00	-	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	Belum Tercapai
30	Nilai LPPD	indeks	3,23	-	3,23	3,05	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
31	Persentase efektivitas kerjasama daerah	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
32	Persentase realisasi patok batas wilayah	Persen	100,00	-	51,40	67,00	92,52	92,52	92,52	Akan Tercapai
33	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	Persen	100,00	-	99,57	100,00	99,37	99,37	99,37	Akan Tercapai
34	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	Persen	100,00	-	95,29	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
35	Persentase OPD tertib pelaporan pelaksanaan APBD	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
36	Persentase penyelenggara pendidikan keagamaan yang mendapatkan sertifikat/ syahadah	Persen	100,00	-	99,07	95,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
37	Persentase capaian fasilitasi lembaga sosial kemasyarakatan	Persen	100,00	-	100,00	95,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
38	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persen	95,00	-	100,00	90,00	100,00	100,00	105,26	Tercapai
39	Persentase kerjasama informasi dengan mas media yang efektif	Persen	100,00	-	94,84	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
40	Persentase pelayanan keprotokoleran dan kehumasan	Persen	100,00	-	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
41	Persentase Capaian target pemenuhan infrastruktur KPA-Kapabilitas APIP	Persen	80,00	-	64,24	70,00	70,00	70,00	87,50	Belum Tercapai
42	Persentase penyelesaian TLHP APF	Persen	85,00	-	89,61	85,00	90,02	90,02	105,91	Tercapai
43	Persentase Perda yang ditetapkan	Persen	100,00	-	27,00	100,00	46,67	46,67	46,67	Belum Tercapai

Pada urusan Fungsi lain, terdapat 8 (delapan) indikator yang belum tercapai, antara lain

- Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Selatan, karena Pandemi kegiatan senam tidak dilaksanakan dikarenakan akan menimbulkan kerumunan.
- Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Utara, yang disebabkan Pandemi kegiatan senam tidak dilaksanakan dikarenakan akan menimbulkan kerumunan.
- Persentase OPD yang menyelenggarakan SPIP level berkembang, belum tercapai namun masih *on track* dalam kerangka target RPJMD.

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
d. Persentase OPD dengan hasil evaluasi pembangunan ZI minimal B, belum tercapai namun masih on track dalam kerangka target RPJMD. e. Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan, belum tercapai namun masih on track dalam kerangka target RPJMD f. Persentase medical general check up, beberapa penyakit yang memerlukan perawatan medis tertentu telah ditanggung oleh BPJS sehingga anggaran tidak terealisasi g. Persentase Capaian target pemenuhan infrastruktur KPA-Kapabilitas APIP, belum tercapai namun masih on track dalam kerangka target RPJMD h. Persentase Perda yang ditetapkan, yang disebabkan dampak pandemi COVID-19.										

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

35. URUSAN RUTIN

Tabel 2.215 Capaian Indikator Urusan Rutin Kota Pekalongan Tahun 2020

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Rutin										
1	Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi	Persen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
2	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	Persen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
3	Persentase kehadiran aparatur	Persen	100,00	0,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
5	Persentase capaian aparatur berkompeten	Persen	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Realisasi Capaian RPJMD sd 2020	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2020	Realisasi Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Pengaduan yang diterima	kasus	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	100,00	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

2.5.3. Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2020

2.5.3.1. Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota meliputi :

1. Pendidikan Dasar;
2. Pendidikan Kesetaraan; dan
3. Pendidikan Anak Usia Dini.

Pada tahun 2020, ketiga indikator SPM Bidang Pendidikan tidak tercapai. Hal ini dikarenakan :

1. Pada Pendidikan Dasar, jumlah penduduk kota Pekalongan usia 7 – 15 tahun mendapatkan layanan Pendidikan Dasar (Dikdas) yaitu sebanyak 41.886 orang dari target yang seharusnya 43.648 orang atau sebesar 89,79 persen. Karena banyak orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya di sekolah luar kota dan juga tidak sedikit penduduk Kota Pekalongan yang berdomisili di luar kota dan menyekolahkan anaknya di luar kota juga;
2. Pada Pendidikan Kesetaraan, Jumlah penduduk kota Pekalongan usia 7 – 18 tahun yang belum mendapatkan pendidikan formal dan mendapatkan layanan pendidikan kesetaraan yaitu sebanyak 1.678 orang dari target yang seharusnya 6.582 orang atau sebesar 25,49 persen. Disebabkan belum adanya pendampingan khusus bagi Anak Tidak Sekolah (ATS) sehingga mempunyai motivasi untuk bersekolah, dan juga tidak adanya proses pembelajaran tatap muka;
3. Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pada tahun 2020 jumlah penduduk kota Pekalongan usia 5 – 6 tahun mendapatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu sebanyak 10.045 orang dari target yang seharusnya 10.439 orang atau sebesar 96,23 persen. Karena banyak orang tua utamanya yang tidak mampu tidak menyekolahkan anaknya di PAUD.

Hasil pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020 disajikan dalam Tabel 2.216 berikut.

Tabel 2.216 Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kota Pekalongan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar(SD/MI, SMP/ MTs)	100 persen	89,79 persen	Tidak Tercapai
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 persen	25,49 persen	Tidak Tercapai
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 persen	96,23 persen	Tidak Tercapai

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020, 2021

2.5.3.2. Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar urusan kesehatan meliputi :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat;
11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis; dan
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Hasil capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020 disajikan dalam Tabel 2.217 berikut.

Tabel 2.217 Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kota Pekalongan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase pelayanan ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil	100 persen	98,22 persen	Tidak Tercapai
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase pelayanan ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan	100 persen	100 persen	Tercapai
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase pelayanan bayi baru lahir mendapat pelayanan bayi baru lahir	100 persen	99,59 persen	Tidak Tercapai
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standard	100 persen	88,39 persen	Tidak Tercapai
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard	100 persen	52,54 persen	Tidak Tercapai
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standard	100 persen	28,57 persen	Tidak Tercapai
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	100 persen	70,57 persen	Tidak Tercapai
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard	100 persen	27,1 persen	Tidak Tercapai
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standard	100 persen	100 persen	Tercapai

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Tercapai/ Tidak Tercapai
10	Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standard	100 persen	100 persen	Tercapai
11	Pelayanan Kesehatan pada Orang terduga Tuberculosis (Tb)	Persentase Orang terduga TBC yang mendapat pelayanan TBC sesuai standard	100 persen	78,43 persen	Tidak Tercapai
12	Pelayanan Kesehatan pada Orang terinfeksi virus HIV/AIDS	Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standard	100 persen	100 persen	Tercapai

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020, 2021

Dari ke 12 indikator tersebut, sebanyak 4 indikator mencapai target, dan sebanyak 8 indikator tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan :

1. Pada pelayanan kesehatan ibu hamil, Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 6.122 orang atau sebesar 98,22 persen. Belum tercapai dikarenakan adanya kasus kematian pada ibu hamil dan ada beberapa ibu hamil yang pindah tempat tinggal;
2. Pada pelayanan kesehatan bayi baru lahir, jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 5.881 orang atau sebesar 99,59 persen dikarenakan adanya kasus kematian pada bayi;
3. Pada pelayanan kesehatan Balita, jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 22.614 orang atau sebesar 88,39 persen. Hal ini dikarenakan selama masa pandemi *COVID-19* Posyandu banyak yang tutup sehingga banyak balita yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan balita;
4. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, jumlah warga negara pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 23.280 orang atau sebesar 52,54 persen. Hal ini disebabkan karena sekolah libur selama pandemi sehingga tidak semua siswa hadir atau diijinkan hadir saat pemeriksaan;
5. Pelayanan kesehatan pada usia produktif, jumlah warga negara pada usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 59.357 orang atau sebesar 28,57 persen. Ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya :
 - a. Pelayanan kesehatan usia produktif di masa pandemi, Posbindu PTM baru diijinkan mulai akhir Juli 2020, bulan September dihentikan lagi dan baru dimulai akhir bulan Oktober 2020 dan tidak semua Posbindu tetapi hanya Posbindu yang mampu menerapkan protokol kesehatan yang diijinkan melaksanakan kegiatan;
 - b. Target sasaran untuk pelayanan kesehatan/skrining kesehatan usia produktif terlalu tinggi;
 - c. Bahan pemeriksaan untuk usia produktif untuk gula darah belum mencukupi.
6. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut, jumlah warga negara pada usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 19.563 orang atau sebesar 70,57 persen. Hal ini dikarenakan masa Pandemi poksila tidak dibuka;
7. Pada pelayanan kesehatan penderita hipertensi, jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 20.834 orang atau sebesar 27,10 persen. Hal ini dikarenakan adanya perubahan definisi operasional dari sasaran pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang semula 6 persen dikalikan jumlah penduduk ≥ 15 tahun menjadi 32,2 persen dikalikan jumlah penduduk ≥ 15 tahun sehingga menyebabkan sasarannya terlalu tinggi. Selain itu kegiatan Posbindu PTM

untuk deteksi dini faktor resiko penyakit hipertensi, baru diijinkan mulai/buka akhir Juli 2020, dihentikan lagi pada September dan Oktober 2020 mulai kembali akhir Oktober 2020. Tidak semua Posbindu PTM mulai kegiatan, tetapi hanya Posbindu PTM yang mampu menerapkan protokol kesehatan yang diijinkan mulai kegiatan;

8. Pada pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 4.228 orang atau sebesar 78,43 persen. Hal ini dikarenakan kader kesehatan tidak dapat bekerja secara optimal dan penyuluhan kesehatan terkait tuberkulosis terhentisaat adanya pandemi COVID-19.

2.5.5.3. Urusan Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota meliputi :

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.

Hasil Capaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum tahun 2020 disajikan dalam Tabel 2.218 berikut.

Tabel 2.218 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Pekalongan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 persen	100 persen	Tercapai
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 persen	100 persen	Tercapai

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020, 2021

Kedua indikator tersebut dapat mencapai target yang ditentukan yaitu sejumlah 31.321 KK untuk Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan sejumlah 60.627 KK untuk Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik air minum.

2.5.5.4. Urusan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota meliputi :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Hasil Capaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2020 disajikan dalam Tabel 2.219 berikut.

Tabel 2.219 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kota Pekalongan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 persen	100 persen	Tercapai
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 persen	100 persen	Tercapai

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020, 2021

Kedua indikator tersebut mencapai target karena untuk Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban Bencana Kab/Kota dapat dipenuhi yaitu sejumlah 66 orang, dan untuk fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Dearah Kab/Kota sejumlah 16 orang juga terpenuhi (relokasi warga yang berada di bantaran sungai di Kelurahan Krapyak).

2.5.5.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat kabupaten/kota meliputi :

1. Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan Informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Hasil Capaian Indikator SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 disajikan dalam Tabel 2.220 berikut.

Tabel 2.220 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Pekalongan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Pencapaian	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100 persen	100 persen	Tercapai
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 persen	100 persen	Tercapai

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Pencapaian	Tercapai/Tidak Tercapai
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 persen	8,43 persen	Tidak Tercapai
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 persen	2,69 persen	Tidak Tercapai
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 persen	100 persen	Tercapai

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020, 2021

Dari kelima indikator tersebut, 3 indikator mencapai target dan 2 indikator tidak mencapai target, dikarenakan :

1. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (jumlah warga negara yang menjadi korban bencana daerah kabupaten/kota) sebanyak 26.306 orang atau sebesar 8,43 persen, terdiri dari :
 - a. Korban/terdampak banjir sebanyak 15.054 orang;
 - b. Korban/terdampak gelombang pasang/ abrasi sebanyak 9.158 orang;
 - c. Korban/terdampak angin puting beliung/ angin kencang/ cuaca ekstrem sebanyak 2.094 orang.
2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana tingkat kab/kota), hanya sebanyak 8.404 orang yang bersedia untuk dievakuasi dan diungsikan ke posko pengungsian orang atau sebesar 2,69 persen.

2.5.5.6. Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar Urusan Sosial Kabupaten/Kota meliputi:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota.

Hasil Capaian Indikator SPM Bidang Sosial Tahun 2020 disajikan dalam Tabel 2.221 berikut.

Tabel 2.221 Capaian SPM Bidang Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Pencapaian	Tercapai/ Tidak Tercapai
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 persen	100 persen	Tercapai
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 persen	100 persen	Tercapai
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 persen	100 persen	Tercapai
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 persen	100 persen	Tercapai
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 persen	100 persen	Tercapai

Sumber : Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020, 2021

Dari kelima indikator tersebut, semua dapat tercapai sesuai target 100 persen.

2.5.4. Hasil Evaluasi *Sustainable Development Goals* (SDG's) Tahun 2020

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*The 2030 Agenda for Sustainable Development* atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Di Indonesia, SDG's ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dokumen Metadata Indikator TPB/SDG's Indonesia dibagi dalam 4 (empat) dokumen besar yang tidak terpisahkan, yaitu : Pilar Pembangunan Sosial; Pilar Pembangunan Ekonomi; Pilar Pembangunan Lingkungan; dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

2.5.4.1. Pilar Pembangunan Sosial

Pada Pilar Pembangunan Sosial, terdiri dari 5 *goals* 47 target dan 77 indikator. Namun demikian indikator yang sudah terintegrasi dalam dokumen perencanaan Kota Pekalongan adalah sebanyak 65 indikator sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.222 berikut.

**Tabel 2.222 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Sosial
di Kota Pekalongan Tahun 2020**

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TUJUAN 1: MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN								
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.								
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Angka Kemiskinan	BPS	persen	5,70	7,17	Tidak Tercapai
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.								
1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Proporsi penduduk miskin non kuota yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan	Cakupan penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	DINKES	persen	85	77,15	Tidak Tercapai
1.3.1 (b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	DINPER INAKER	persen		NA	Untuk indikator tersebut belum bisa disajikan karena harus dikonfirmasi ke BPJS Ketenagakerjaan dulu, sedangkan BPJS mulai tahun 2018 pendataan peserta Jamsostek digabung dengan pendataan peserta yang non tenaga kerja sehingga kesulitan untuk memilah-milah
1.3.2 (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Persentase penyandang disabilitas miskin	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	DINSOS P2KB	persen	PM	0,18	Tidak ada target tetapi data tersedia
1.3.1 (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Prgram Keluarga Harapan	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Prgram Keluarga Harapan	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Prgram Keluarga Harapan	DINSOS P2KB	KPM	PM	10.695	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.								
1.4.1 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49	Cakupan persalinan di fasilitas	DINKES	persen	100	100	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	tahun yang prosesnya melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	tahun yang prosesnya melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	pelayanan kesehatan					
1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Cakupan imunisasi dasar lengkap	DINKES	persen	100 persen	90,02	Tidak Tercapai
1.4.1 (c)	Prevalensi Penggunaan metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Prevalensi Penggunaan metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	CPR/ Peserta KB Aktif	DINSOS P2KB	persen	64	67,35	Tercapai
1.4.1 (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Cakupan Pelayanan air minum: - Perdesaan - Perkotaan	DINPER KIM	persen	93,99	97,09	Tercapai
1.4.1 (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Cakupan Pelayanan Sanitasi	DINPER KIM	persen	95,99	91,72	Tidak Tercapai
1.4.1 (f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	DINPER KIM	persen	1,77	3,79	Tercapai
1.4.1 (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ sederajat	DINDIK	persen	95,5	82,93	Tidak Tercapai
1.4.1 (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ sederajat	DINDIK	persen	77,5	60,89	Tidak Tercapai
1.4.1 (i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ MA/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ MA/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ MA/ sederajat	BPS	persen	PM	55,58	Tidak ada target tetapi data tersedia
1.4.1 (j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	DINDUK CAPIL	persen	55	53,81	Tidak Tercapai
1.4.1 (k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik-listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik-listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik-listrik baik dari PLN dan bukan PLN	BPS	persen		NA	Data tidak tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.								
1.5.1 (e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Jumlah Desa Tangguh Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	DINSOS P2KB	persen	PM	9	Tidak ada target tetapi data tersedia
1.5.2 (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	BPBD	Rupiah	PM	12.037.798.900	Tidak ada target tetapi data tersedia
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat provinsi	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat kota	BPBD	Dokumen	1	0	Tidak Tercapai
TUJUAN 2: MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN								
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.								
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	Ketersediaan pangan utama beras (ton)	Skor Pola Pangan Harapan	DINPER PA	skor	77,16	92,01	Tercapai
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	DINPER PA	persen	NA	NA	Data tidak tersedia (tidak termasuk indikator kinerja dalam RPJMD maupun Renstra)
2.1.2 (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/ kapita/ hari	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/ kapita/ hari	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/ kapita/ hari	DINKES	persen	2,1	9,10	Tercapai
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.								
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita	DINKES	persen	< 12 persen	9,42	Tercapai
2.2.1 (a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada	DINKES	persen	6,85	5,82	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	baduta	baduta	anak di bawah dua tahun/ baduta					
2.2.2*	Prevalensi Malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe)	Prevalensi Gizi Buruk	Prevalensi Gizi Buruk	DINKES	persen	<0,5	0,16	Tercapai
2.2.2 (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Jumlah kasus anemia pada ibu hamil	DINKES	kasus	9,02	8,33	Tercapai
2.2.2 (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Cakupan ASI eksklusif	Cakupan ASI eksklusif	DINKES	persen	47 persen	53,4	Tercapai
2.2.2 (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan	DINPER PA	skor	76,02	77,16	Tercapai
TUJUAN 3: MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA								
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.								
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka Kematian Ibu (AKI).	DINKES	Per 100.000 KH	102	152,41	Tidak Tercapai
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Cakupan Pertolongan Persalinan Tenaga Kesehatan	Cakupan Pertolongan Persalinan Tenaga Kesehatan	DINKES	persen	100	100	Tercapai
3.1.2 (a)	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	DINKES	persen	100	100	Tercapai
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.								
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	DINKES	Per 1.000 KH	12,30	10,84	Tercapai
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Cakupan neonatal komplikasi yang ditangani	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	DINKES	Per 1.000 KH	6,7	4,91	Tidak Tercapai
3.2.2 (a)	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	DINKES	Per 1.000 KH	9,6	8,81	Tercapai
3.2.2 (b)	Persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	Cakupan UCI desa	Cakupan UCI desa	DINKES	persen	100	100	Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.								
3.3.1 (a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Prevalensi HIV-AIDS	Jumlah kasus HIV/ AIDS	DINKES	orang	100	Jumlah kasus HIV umur 15-49 tahun = 99	Tercapai
3.3.2 (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Jumlah Insiden TB	Jumlah kasus TB Paru BTA (+)	DINKES	kasus	-	172,31	Tidak Tercapai
3.3.3 (a)	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi Malaria.	Angka Kesakitan Malaria	Angka Kesakitan Malaria	DINKES	per 1.000 penduduk beresiko	-	NA	Data tidak tersedia (tidak ada kasus malaria)
3.3.4 (a)	Persentase Kab/ Kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Persentase Kab/ Kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Jumlah kasus hepatitis B	DINKES	kasus	PM	Jumlah kasus Hepatitis B = 45 kasus	Tidak ada target tetapi data tersedia
3.3.5*	Jumlah Orang Yang Memerlukan Intervensi Terhadap Penyakit Tropis Yang Terabaikan (Filiariasis dan Kusta)	Angka penemuan kasus baru kusta	Angka penemuan kasus baru kusta	DINKES	per 100.000 penduduk	<10	70,83	Tidak Tercapai
3.3.5 (b)	Jumlah kab/ kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap 1)	Angka kasus filaria yang ditangani	Angka kasus filaria yang ditangani	DINKES	per 100.000 penduduk	<1	Angka kasus filaria yang ditangani= 2 kasus	Tidak Tercapai
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.								
3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Proporsi kasus hipertensi di fasyankes	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	DINKES	persen	100	27,10	Tidak Tercapai
3.4.1 (c)	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ Tahun (Persen)	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ Tahun (Persen)	Deteksi dini obesitas pada penduduk usia 15+ tahun di fasyankes	DINKES	persen	18	3,77	Tercapai
Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.								
3.5.1 (a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	Jumlah penyalahgunaan narkotika	KESBA NGPOL	orang	PM	11	Tidak ada target tetapi data tersedia
3.5.1 (b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	KESBA NGPOL	orang		NA	Data tidak tersedia (indikator provinsi)
3.5.1 (c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam	KESBA NGPOL	orang	PM	22	Tidak ada target tetapi data tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			panti sesuai standar pelayanan					
3.5.1 (d)	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/ dibantu	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/ dibantu	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan / dibantu	KESBA NGPOL	Rumah sakit	PM	2	Tidak ada target tetapi data tersedia
3.5.1 (e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	BNN/ Kesbang pol	Persen		NA	Data tidak tersedia (tidak termasuk indikator kinerja dalam RPJMD maupun Renstra)
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.								
3.7.1 (a)	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin	CPR/ Peserta KB Aktif	CPR/ Peserta KB Aktif	DINSOS P2KB		PM	67,35	Tidak ada target tetapi data tersedia
3.7.2 (a)	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	DINSOS P2KB	persen	2,252	2,166	Tercapai
3.7.2 (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	DINSOS P2KB		24,00	19,63	Tidak Tercapai
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR)	DINSOS P2KB			NA	Data tidak tersedia (tidak termasuk indikator kinerja dalam RPJMD maupun Renstra)
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.								
3.8.1 (a)	Unmeet Need Pelayanan Kesehatan	Unmeet Need	Unmeet Need KB	DINSOS P2KB	persen	12,00	18,18	Tidak Tercapai
3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Cakupan Jaminan Kesehatan Daerah	Cakupan Jaminan Kesehatan Daerah	DINKES	persen	85	77,15	Tidak Tercapai
Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.								
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	BPS	persen	PM	24,48 persen	Tidak ada target tetapi data tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TUJUAN 4: MENJAMIN PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MEMPROMOSIKAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT								
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.								
4.1.1 (a)	Persentase SD/ MI berakreditasi minimal B	Persentase SD/ MI berakreditasi minimal B	Persentase SD/ MI berakreditasi A	DINDIK	persen	PM	69,86	Tidak ada target tetapi data tersedia
4.1.1 (b)	Persentase SMP/ MTs berakreditasi minimal B	Persentase SMP/ MTs berakreditasi minimal B	Persentase SMP/ MTs berakreditasi A	DINDIK	persen	PM	68,42	Tidak ada target tetapi data tersedia
4.1.1 (c)	Persentase SMA/ MA berakreditasi minimal B	Persentase SMA/ MA berakreditasi minimal B		DINDIK			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
4.1.1 (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ sederajat	DINDIK	persen	100	101,31	Tercapai
4.1.1 (e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat	DINDIK	persen	100	105,44	Tercapai
4.1.1 (f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/ MA/ sederajat	BPS	persen	PM	60,28	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.								
4.2.2 (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DINDIK	persen	62,5	60,28	Tidak Tercapai
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.								
4.3.1 (a)	Persentase APK SMA/ SMK/ MA/ sederajat	Persentase APK SMA/ SMK/ MA/ sederajat	Persentase APK SMA/ SMK/ MA/ sederajat	BPS	persen	PM	78,66	Tidak ada target tetapi data tersedia
4.3.1 (b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	BPS	persen		NA	Data tidak tersedia
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.								
4.5.1 *	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/ MI/ sederajat; (2) SMP/ MTs/ sederajat; (3) SMA/ SMK/ MA/ sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/ laki-laki di PT	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/ laki-laki di (1) SD/ MI/ sederajat; (2) SMP/ MTs/ sederajat; (3) SMA/ SMK/ MA/ sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/ laki-laki di PT	1) APM SD/ MI/ sederajat 2) APM SMP/ MTs/ Sederajat (2018)	DINDIK		1) 96 2) 77,5	1) 82,93 2) 60,89	Tidak Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.								
4.6.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Angka melek huruf	Angka melek huruf	BPS	persen		NA	Data tidak tersedia (BPS tidak melakukan survei)
Target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.								
4.a.1	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	persen Ruang kelas SMA/ MA/ SMK sesuai standar nasional pendidikan	Persentase Ruang kelas SD/ MI dan SMP/ MTs sesuai standar nasional pendidikan	Dindik	persen	PM	99,7	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.								
4.c.1	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik	Persentase pendidik SMA/ SMALB/ MA/ SMK bersertifikat pendidik	Persentase pendidik TK-SD-SMP bersertifikat pendidik	Dindik	persen	52,71	50,47	Tidak Tercapai
TUJUAN 5: MENCAPAI KESETERAAN GENDER DAN MEMPERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN								
Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.								
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Rasio kabupaten/ kota yang menerapkan kebijakan responisf gender dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	DPMPP A		PM	SK (Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 463/ 806 Tahun 2020 tentang Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Pekalongan, Keputusan Wali Kota Nomor 463/ 807 thn 2020 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga, Perwal Nomor 65 B	Tidak ada target tetapi data tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Thn 2020 tentang LPPAR = 3	
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.								
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan	DPMPPA	persen	PM	perempuan dewasa = 27/ 110,241*100= 0,02449	Tidak ada target tetapi data tersedia
5.2.1 (a)	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	DPMPPA	persen	PM	anak perempuan n = 6/ 12,177= 0,04927	Tidak ada target tetapi data tersedia
5.2.2 (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan terlayani	persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan terlayani	DPMPPA	persen	100	= (27 perempuan n+16 anak)*100 = 100	Tercapai
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.								
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur(PUS) kurang dari 20 tahun	Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur(PUS) kurang dari 20 tahun	DINSOS P2KB	Kasus	250	245	Tercapai
5.3.1 (c)	Angka Partisipasi Ksar (APK) SMA/ SMK/ MA sederajat	Angka Partisipasi Ksar (APK) SMA/ SMK/ MA sederajat	Angka Partisipasi Ksar (APK) SMA/ SMK/ MA sederajat	BPS	persen	PM	78,66	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.								
5.5.1 *	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah	Setwan	persen	PM	8,82	Tidak ada target tetapi data tersedia
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi	Persentase perempuan pada jabatan eselon I,II,III, dan IV	BKPPD	persen	PM	36,07	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.								
5.6.1 (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/ KB yang	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga	Unmet need KB	DINSOS P2KB	persen	12	18,18	Tidak Tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	tidak terpenuhi)	Berencana/ KB yang tidak terpenuhi).						
5.6.1 (b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	DINSOS P2KB		64	67,35	Tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2021

2.5.4.2. Pilar Pembangunan Ekonomi

Pada Pilar Pembangunan Sosial, terdiri dari 5 *goals* 54 target dan 72 indikator. Namun demikian indikator yang sudah terintegrasi dalam dokumen perencanaan Kota Pekalongan adalah sebanyak 18 indikator sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.223 berikut.

Tabel 2.223 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Ekonomi di Kota Pekalongan Tahun 2020

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TUJUAN 7 : MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA								
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern								
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Rasio elektrifikasi	Rasio elektrifikasi	PLN-ESDM-BPS	persen		NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
7.1.1 (a)	Konsumsi listrik per kapita	Konsumsi listrik per kapita	Konsumsi listrik per kapita	PLN-ESDM-BPS	Kwh/ Kapita		NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
7.1.2 (a)	Jumlah sambungan jaringan gas rumah tangga	Jumlah sambungan jaringan gas rumah tangga	Jumlah sambungan jaringan gas rumah tangga	BPS			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
7.1.2 (b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Rasio penggunaan gas rumah tangga	BPS		PM	95,7	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.								
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	Bauran energi terbarukan	Bauran energi terbarukan	BPS			NA	Data tidak tersedia (belum ada bauran energi terbarukan di Kota Pekalongan)
TUJUAN 8 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YG INSKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF & MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YG LAYAK UNTUK SEMUA								
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.								
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB perkapita	Laju pertumbuhan PDRB	Laju pertumbuhan PDRB	BPS / Bappeda	persen	5.70	-1,87	Tidak tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.1.1. (a)	PDRB per kapita	PDRB per kapita	PDRB per kapita	BPS	juta rupiah	PM	35,22	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya								
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BPS	persen		NA	Data tidak tersedia
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan								
8.3.1*	Pekerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin	Pekerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin	Pekerja informal sektor non pertanian berdasarkan jenis kelamin	BPS			NA	data estimasi dari Sakernas kurang cakupan untuk angka Kabupaten/ Kota
8.3.1. (a)	Presentase Tenaga kerja formal	Presentase Tenaga kerja formal	Persentase Tenaga kerja formal	BPS	persen		NA	data estimasi Sakernas belum dihitung
8.3.1. (b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS	persen		NA	data estimasi dari Sakernas kurang cakupan untuk angka Kabupaten/ Kota
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.								
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	Upah rata-rata per jam pekerja	Upah Minimum Kota	Dinperinaker	Rupiah	PM	2.139.754,00	Tidak ada target tetapi data tersedia
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	persen	3,60	7,02	Tidak Tercapai
8.5.2 (a)	Tingkat setengah pengangguran	Tingkat setengah pengangguran	Tingkat setengah pengangguran	BPS			NA	data estimasi Sakernas belum dihitung
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan								
8.6.1*	Usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	Jumlah pelatihan untuk pemuda	DINPERINAKER	orang	560	528	Tidak Tercapai
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.								
8.9.1. (a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinparbudpora	orang	600	224	Tidak tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.9.1. (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinparbudpora	orang	534.400	283.658	Tidak tercapai
Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestic untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua								
8.10.1 *	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	DPMPTSP			NA	Data tidak tersedia (tidak ada dalam indikator kinerja RPJMD dan Renstra)
8.10.1. (a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	DPMPTSP			NA	Data tidak tersedia (tidak ada dalam indikator kinerja RPJMD dan Renstra)
TUJUAN 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN SERTA MENDORONG INOVASI								
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua								
9.1.1. (a)	Kondisi mantap jalan nasional	Kondisi jalan baik	Persentase jalan kota dalam keadaan mantap (kondisi baik dan sedang)	DPU PR	persen	77,58	80,03	Tercapai
9.1.2 (b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Jumlah dermaga penyeberangan	Jumlah dermaga penyeberangan	Dinhub	dermaga		NA	Data tidak tersedia
9.1.2 (c)	Jumlah pelabuhan strategis	Jumlah pelabuhan strategis	Jumlah pelabuhan strategis	Dinhub	pelabuhan		NA	Data tidak tersedia
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang								
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	BPS	persen		NA	Data tidak tersedia
9.2.1. (a)	Laju pertumbuhan PDB Industri Manufaktur	Laju pertumbuhan PDB Industri manufaktur pengolahan	Laju pertumbuhan PDB Industri manufaktur pengolahan	BPS	persen		NA	Data tidak tersedia
Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.								
9.4.1*.	Rasio Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	Rasio Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	Rasio Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
9.4.1. (a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Perubahan Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Perubahan Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negaranegara kurang berkembang pada tahun 2020.								
9.C.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	DINKOMI NFO	Persen		NA	Data tidak tersedia (tidak ada dalam indikator kinerja RPJMD dan Renstra)
9.C.1. (a)	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	BPS	Persen		NA	Data tidak tersedia (BPS tidak melakukan survei)
9.c.1. (b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	BPS	Persen		NA	Data tidak tersedia (BPS tidak melakukan survei)
TUJUAN 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA								
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional								
10.1.1 *	Pertumbuhan pengeluaran atau pendapatan per kapita diantara penduduk yang berada di bawah 40 persen dan terhadap total penduduk	Koefisien Gini	Koefisien Gini	BPS / Bappeda	-	0,34	0,314	Tercapai
10.1.1. (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan	BPS / Bappeda	persen	5,70	7,17	Tidak tercapai
10.1.1. (d)	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	-			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut								
10.3.1. (a)	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Kebebasan Sipil	BPS			NA	Data tidak tersedia
10.3.1. (b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	-			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
10.3.1. (c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	-			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar								
10.4.1. (b)	Proporsi peserta program jaminan bidang ketenagakerjaan	Proporsi peserta program jaminan bidang ketenagakerjaan	Proporsi peserta program jaminan bidang ketenagakerjaan	DINPERIN AKER			NA	Untuk indikator tersebut belum bisa disajikan karena harus dikonfirmasi ke BPJS Ketenagakerjaan dulu, sedangkan BPJS mulai tahun 2018 pendataan peserta Jamsostek digabung dengan pendataan peserta yang non tenaga kerja sehingga kesulitan untuk memilah-milah
Target 10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik								
10.7.2. (b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupansi	DINPERIN AKER	kegiatan		NA	Tidak ada kegiatan karena pandemi COVID-19
TUJUAN 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.								
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada Negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya								
17.1.1 *	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDM menurut sumbernya	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	BKD/ BPS		981.36 1.482. 000	485.317.8 42.324,61	Tidak tercapai
17.1.1 (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	BKD		218.02 0.320. 000	NA	Data di BKD hanya target dan realisasi Pendapatan dan penerimaan pajak sedangkan data PDP ada di BPS
Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.								
17.6.2 (c)	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile</i>	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile</i>	Proporsi penduduk terlayani	DINKOMI NFO			NA	Data tidak tersedia (tidak ada dalam

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<i>broadband</i>	<i>broadband</i>	<i>mobile broadband</i>					indikator kinerja RPJMD dan Renstra)
Target 17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk Negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi								
17.8.1 *	Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	Proporsi individu yang menggunakan internet	BPS			NA	Data Susenas BPS
Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi Negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020								
17.11.1 (a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	Jumlah ekspor non migas	Pertumbuhan ekspor produk non migas	BPS			NA	data tersedia sampai level provinsi, untuk kabupaten/ kota susah diperoleh (pelabuhan sebagai titik ekspor impor)
Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama								
17.17.1 (a)	Jumlah Proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	Jumlah Proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	Jumlah Proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	BAPPEDA			NA	Data tidak tersedia (tidak ada KPBU)
17.17.1 (b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek dan dukungan pemerintah dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha	BAPPEDA			NA	Data tidak tersedia (tidak ada KPBU)
Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional								
17.18.1 (a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas dan statistik	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas dan statistik	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas dan statistik	BPS	persen		NA	Data tidak tersedia
17.18.1 (d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	Jumlah indikator SDGs Kota	Bappeda	indikator	222	195	Tidak tercapai

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2021

2.5.4.3. Pilar Pembangunan Lingkungan

Pada Pilar Pembangunan Sosial, terdiri dari 6 *goals* 56 target dan 69 indikator. Namun demikian indikator yang sudah terintegrasi dalam dokumen perencanaan Kota Pekalongan adalah sebanyak 19 indikator sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.224 berikut.

Tabel 2.224 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2020

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TUJUAN 6 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA								
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.								
6.1.1. (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Cakupan Pelayanan air minum: - Perdesaan - Perkotaan	Cakupan Pelayanan air minum: - Perdesaan - Perkotaan	DINPERKIM	Persen	93,99	97,09	Tercapai
6.1.1. (b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Kapasitas Prasarana air baku	Kapasitas Prasarana air baku	DINPERKIM	m3	PM	12.196.014	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.								
6.2.1. (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Cakupan pelayanan sanitasi	Cakupan pelayanan sanitasi	DINPERKIM	Persen	95,99	91,72	Tidak tercapai
6.2.1. (c)	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	DINPERKIM	Kelurahan	27	27	Tercapai
6.2.1. (d)	Jumlah desa/ kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Jumlah desa/ kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Jumlah desa/ kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	DINKES	Kelurahan	15	21	Tercapai
6.2.1 (e)	Jumlah kabupaten/ kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	Jumlah kabupaten/ kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	Jumlah IPAL yang terbangun dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal	DLH	Persen	NA	NA	Data tidak tersedia (bukan indikator kinerja dalam RPJMD dan Renstra)
Target 6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.3.1 (a)	Jumlah Kabupaten/ kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Kabupaten/ kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Kabupaten/ kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	DLH		NA	NA	Data tidak tersedia (bukan indikator kinerja dalam RPJMD dan Renstra)
6.3.1 (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan indikator kinerja dalam RPJMD dan Renstra)
Target 6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.								
6.4.1. (a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	DLH		50	50	Tercapai
Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.								
6.5.1. (a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan indikator kinerja dalam RPJMD dan Renstra)
6.5.1 (b)	Jumlah stasiun Hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	Jumlah stasiun Hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	Jumlah stasiun Hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
6.5.1. (c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan indikator kinerja dalam RPJMD dan Renstra)
6.5.1. (e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
6.5.1. (h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan	melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan					kota)
6.5.1. (i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.								
6.6.1. (d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
6.6.1. (e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
TUJUAN 11: MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN TANGGUH DAN BERKELANJUTAN								
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.								
11.1.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki hunian yang layak dan terjangkau	Rasio rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	DINPERKIM	Persen	97,35	97,30	Tidak tercapai
Target 11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.								
11.2 .1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	DINHUB			NA	Data tidak tersedia (bukan indikator kinerja dalam RPJMD dan Renstra)
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.								
11.4.1. (a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	DPUPR			NA	Data tidak tersedia (bukan indikator kinerja dalam RPJMD dan Renstra)
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1) 11.5.1 *	(2) Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(3) Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(4) Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(5) BPBD	(6) Orang	(7) PM	(8) 1000,9	(9) Tidak ada target tetapi data tersedia
11.5.1. (a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	BPBD			NA	Data tidak tersedia (bukan indikator kinerja dalam RPJMD dan Renstra)
11.5.1. (b)	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk.	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk.	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk.	DINSOS P2KB			NA	Data tidak tersedia
11.5.1. (c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	BPBD			NA	Data tidak tersedia (Kota Pekalongan belum memiliki sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan)
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.								
11.6.1. (a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	DLH	Persen	89,74	87,98	Tidak ada target tetapi data tersedia
11.6.1. (b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Jumlah bank sampah skala kota dan kelurahan	DLH		PM	1	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.								
11.7.1. (a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau	DLH	Persen	18,8	8,23	Tidak tercapai
Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030.								
11.b.1 *	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan bencana	BPBD	dokumen	1	0	Tidak tercapai

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11.b.2 *	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	dokumen	1	0	Tidak tercapai
TUJUAN 12: MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKENAJUTAN								
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.								
12.4.1. (a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	DLH	buah		NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
12.4.2. (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	DLH	Ton/ tahun	PM	4.416	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.								
12.5.1. (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	DLH	persen	26	26	Tercapai
Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.								
12.6.1. (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	DLH			NA	Data tidak tersedia (tidak ada perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001)
TUJUAN 13: MENGATASI LANGKAH SEGERA UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA								
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara								
13.1.1 *	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	BPBD	Dokumen	1	0	Tidak tercapai
13.1.2 *	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	orang	PM	1000,9	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional								
13.2.1. (a)	Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
TUJUAN 14: MELAKUKAN KONSERVASI DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA LAUT, SAMUDERA DAN MARITIM UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN								

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/ Kota	Sumber Data	Satuan	Target dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia								
14.5.1 *	Cakupan kawasan konservasi laut	Cakupan kawasan konservasi laut	Cakupan kawasan konservasi laut	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO)								
14.6.1. (a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	Persentase kepatuhan pelaku usaha		-			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar								
14.b.1 (b)	Jumlah nelayan yang terlindungi	Jumlah nelayan yang terlindungi	Jumlah nelayan yang terlindungi (asuransi)	DKP		100	190	Tercapai
TUJUAN 15: PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN								
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.								
15.1.1. (a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	DLH			NA	Data tidak tersedia (tidak ada dalam indikator kinerja RPJMD dan Renstra)
Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.								
15.2.1. (a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
15.2.1. (b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
15.2.1. (d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan	DLH			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi								
15.3.1 (a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	DLH			NA	Data tidak tersedia (tidak ada dalam indikator kinerja RPJMD dan Renstra)

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2021

2.5.4.4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Pada Pilar Pembangunan Sosial, terdiri dari 1 *goals* 12 target dan 23 indikator. Namun demikian indikator yang sudah terintegrasi dalam dokumen perencanaan Kota Pekalongan adalah sebanyak 13 indikator sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.225 berikut.

Tabel 2.225 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola di Kota Pekalongan Tahun 2020

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target Dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
TUJUAN 16: PERDAMIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG KOKOH								
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun								
16.1.1. (a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	POLRES	kasus		NA	Data tidak tersedia (data di luar kewenangan Pemkot)
16.1.2. (a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	POLRES			NA	Data tidak tersedia (data di luar kewenangan Pemkot)
16.1.3. (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir	POLRES			NA	Data tidak tersedia (data di luar kewenangan Pemkot)
16.1.4 *	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	BPS			NA	Data tidak tersedia (tidak melakukan survei)
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak								
16.2.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir	BPS			NA	Data tidak tersedia (tidak melakukan survei)
16.2.1. (b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	Rasio korban kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan	Rasio korban kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan	DPMPA		PM	anak L = 5/13,095*100 = 0,0382 , anak P = 6/12,177*100 = 0,0493	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua								
16.3.1. (a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	POLRES	persen		NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target Dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16.3.1. (b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi	Jumlah penanganan perkara masyarakat yang tidak mampu	Jumlah penanganan perkara masyarakat yang tidak mampu	Bagian Hukum	Perkara	5	5	Tercapai
16.3.1. (c)	Jumlah Pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos layanan hukum	Jumlah Pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos layanan hukum	Jumlah Pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, dan pos layanan hukum				NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya								
16.5.1. (a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	BPS			NA	Data tersedia pada level nasional
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat								
16.6.1 *	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Realisasi APBD Pemerintah Kota	BKD		1.012.737.890.000	944.840.460.674	Serapan Anggaran sebesar : 93,30 persen
16.6.1 (a)	Prosentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan daerah dengan opini WTP	Jumlah laporan keuangan daerah dengan opini WTP	BKD	WTP	WTP	WTP	Tercapai
16.6.1. (b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	BAGIAN ORGANISASI		B	BB	Tercapai
16.6.1. (c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan (SIRUP)	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBELANJAN	persen	100	92	Tidak Tercapai
16.6.2. (a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	IKM	BAGIAN ORGANISASI		83	80,42	Tidak Tercapai
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan								
16.7.1. (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota	SETWAN	Persen	PM	8,82	Tidak ada target tetapi data tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target Dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16.7.1. (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	Persentase perempuan pada jabatan eselon I,II,III, dan IV	Persentase perempuan pada jabatan eselon I,II,III, dan IV	BKPPD	Persen	PM	36.07	Tidak ada target tetapi data tersedia
16.7.2. (a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	Indeks Lembaga Demokrasi.	Indeks Lembaga Demokrasi.	-			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
16.7.2. (b)	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks Kebebasan Sipil	-			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
16.7.2. (c)	Indeks Hak-hak Politik.	Indeks Hak-hak Politik.	Indeks Hak-hak Politik.	-			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.								
16.9.1.	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	DINDUKC APIL	persen	PM	99,43	Tidak ada target tetapi data tersedia
16.9.1 (a)	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40 persen berpendapatan bawah	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40 persen berpendapatan bawah	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40 persen berpendapatan bawah	DINDUKC APIL			NA	Data tidak tersedia (tidak ada dalam indikator kinerja RPJMD dan Renstra)
16.9.1. (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	DINDUKC APIL	Persen	PM	93,46	Tidak ada target tetapi data tersedia
Target 16.10 Menjamin akses public terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional								
16.10. 1.(a)	Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir	Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir	Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir	-			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
16.10. 1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan	DPMPA		PM	27 pengaduan	Tidak ada target tetapi data tersedia

Kode Indikator	Indikator Nasional	Indikator Provinsi	Indikator Kab/Kota	Sumber Data	Satuan	Target Dan Capaian Tahun 2020		Keterangan
						Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, stautori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi	Persentase SKPD yang mengembangkan Teknologi Informasi	Persentase peningkatan jumlah pengguna aplikasi berbasis komunitas	DINKOMI NFO	Persen	PM	92,86	Tidak ada target tetapi data tersedia
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah badan publik telah menyusun peraturan layanan informasi publik di Provinsi	Persentase OPD Menerapkan KIP dengan Kategori "Cukup Informatif/ Baik"	DINKOMI NFO	Persen		NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	-			NA	Data tidak tersedia (bukan kewenangan kota)

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2021

2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.6.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah idealnya dilakukan dengan mendasarkan pada hasil evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) triwulan III tahun 2021. Namun demikian, IKU dan IKD tersebut masih menggunakan RPJMD Tahun 2016-2021, sementara itu Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 sudah menggunakan RPJMD Tahun 2021-2026 sehingga hasil evaluasi tidak lagi relevan.

Oleh karena itu, identifikasi permasalahan pembangunan didasarkan pada IKU sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.226 berikut.

Tabel 2.226 Permasalahan Pembangunan Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PERMASALAHAN
AKABA (Angka Kematian Balita)	Masih tingginya AKABA, AKB dan AKI serta rendahnya capaian Indeks Keluarga Sehat
AKB (Angka Kematian Bayi)	
AKI (Angka Kematian Ibu)	
Indeks Keluarga Sehat	
Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	Masih tingginya angka kemiskinan
Rata-Rata Lama Sekolah	Belum optimalnya mutu dan akses pendidikan serta penguatan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan
Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Belum optimalnya pemerataan kesempatan kerja

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
Kategori Kota Layak Anak	
Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh
Luas Genangan Banjir dan Rob	Banjir dan rob yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup
Indeks Kualitas Air	
Indeks Kualitas Lahan	
Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	
Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	Belum optimalnya layanan infrastruktur perkotaan
Persentase pelayanan sampah	
Tingkat pelayanan jalan (<i>Level Of Service</i>)	
Persentase keterhubungan jalan	
Pertumbuhan ekonomi	Belum optimalnya kapasitas SDM dan daya saing dalam meningkatkan perekonomian daerah
Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan seni dan budaya
Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	Masih adanya konflik sosial
Indeks SPBE	Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan
IKM Kota	
Nilai KIP Tingkat Kota	
Nilai SAKIP Kota	
Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	
Indeks Merit System	
Maturitas SPIP	
Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

2.7. Isu Strategis

Dari identifikasi permasalahan pembangunan daerah di Kota Pekalongan sebagaimana dijelaskan pada sub bab 2.5, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Pekalongan tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.228 berikut.

Tabel 2.227 Isu Strategis

Permasalahan	Isu Strategis
Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Tata kelola pemerintahan
Banjir dan rob yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup	Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup
Masih adanya kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman
Belum optimalnya layanan infrastruktur perkotaan	

Permasalahan	Isu Strategis
Masih tingginya AKABA, AKB dan AKI serta rendahnya capaian indeks keluarga sehat	Peningkatan Derajat Kesehatan (Masa Pandemi COVID-19)
Masih tingginya angka kemiskinan	Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran
Belum optimalnya pemerataan kesempatan kerja	
Belum optimalnya mutu dan akses pendidikan serta penguatan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	
Belum optimalnya kapasitas SDM dan daya saing dalam meningkatkan perekonomian daerah	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal
Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan seni dan budaya	Pelestarian Budaya Lokal
Masih adanya konflik sosial	Kondusivitas Wilayah

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

Selanjutnya isu strategis dijelaskan sebagai berikut :

2.7.1. Tata Kelola Pemerintahan

Isu strategis tata kelola pemerintahan adalah upaya peningkatan secara kontinyu sehingga dapat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu tata kelola pemerintahan yang melayani untuk kepentingan masyarakat, serta memenuhi beberapa kriteria pokok yaitu : transparan, partisipatif, akuntabel dan koordinatif. Untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Pusat telah menetapkan indikator berupa Indeks Reformasi Birokrasi. Hingga tahun 2019, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan sebesar 68,97 dan pada tahun 2020 sebesar 68,91. Upaya untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan tersebut, disebabkan beberapa aspek terkait masih terjadi permasalahan dan harus segera dioptimalkan. Beberapa permasalahan tersebut, yaitu: a) Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum optimal, karena indeks SPBE masih sebesar 3,14. Pemerintah Kota Pekalongan selama ini telah membangun sistem tersebut dan akan terus diperkuat; b) Layanan publik belum dikelola dengan optimal, karena persentase OPD dengan IKM Baik masih sebesar 93,94 persen; c) Keterbatasan ASN, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dikarenakan Indeks Profesionalitas ASN masih sebesar 50,80; d) Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan karena nilai SAKIP BB. Meskipun nilai SAKIP telah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun tetapi harus terus ditingkatkan agar optimal; e) Akuntabilitas keuangan masih perlu ditingkatkan terus, meskipun dalam beberapa tahun terakhir telah memperoleh WTP; f) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena maturitas SPIP bernilai 3.022; g) Belum optimalnya penataan dan kompetensi ASN karena belum terwujudnya merit system secara penuh; dan h) Belum optimalnya tingkat kapabilitas APIP karena kapabilitas APIP masih pada level 3.

Upaya untuk selalu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan, secara kontinyu telah dan akan terus dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dan didukung pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Dengan integrasi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan tata kelola pemerintahan selalu meningkat dan dimanfaatkan bagi terwujudnya pemerintahan untuk melayani kepentingan masyarakat secara optimal. Tata kelola pemerintahan yang baik, akan menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan.

Selama ini, peran masyarakat dirasakan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan partisipasi seluruh elemen masyarakat sehingga pengelolaan pemerintahan dan pembangunan dapat lebih berhasil. Secara hakiki, tata kelola pemerintahan yang baik ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Tata Kelola Pemerintahan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan harus terus dioptimalkan dalam rangka melayani kepentingan masyarakat.

2.7.2. Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup

Permasalahan Kota Pekalongan yang sering terjadi dan dapat dengan mudah diidentifikasi adalah banjir dan rob serta kualitas lingkungan yang belum optimal. Banjir, rob dan kualitas lingkungan sangat berdampak bagi kegiatan sosial ekonomi dan kenyamanan kehidupan masyarakat maupun kunjungan wisatawan maupun pendatang. Isu strategisnya adalah banjir, rob dan kualitas lingkungan hidup sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi dan kenyamanan lingkungan. Dalam arti luas, banjir, rob dan kualitas lingkungan yang tidak optimal sangat berdampak bagi seluruh sendi kehidupan masyarakat di Kota Pekalongan. Oleh karena itu, banjir dan rob harus dikendalikan serta kualitas lingkungan hidup dioptimalkan agar berdampak bagi peningkatan kondisi sosial ekonomi dan kenyamanan lingkungan.

Secara topografi, wilayah Kota Pekalongan merupakan wilayah pesisir Laut Jawa dan memiliki ketinggian 0-6 m dpl. Beberapa kawasan di Kota Pekalongan telah memiliki ketinggian di bawah permukaan laut. Fenomena ketinggian di bawah permukaan laut tersebut, tidak terlepas dari kondisi permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan yang mengalami penurunan (*land subsidence*). Secara morfologi, wilayah Kota Pekalongan pun juga sangat datar karena memiliki kelerengan yang sangat rendah. Oleh karena itu, secara alamiah, wilayah Kota Pekalongan sangat rentan dan memiliki risiko tinggi bencana banjir dan/atau rob. Tantangan penanganan banjir dan rob semakin besar karena adanya fenomena pemanasan global yang berdampak peningkatan permukaan air laut. Banjir dan rob sangat berdampak bagi masyarakat, oleh karena itu, banjir dan rob harus mendapatkan penanganan yang optimal sehingga kegiatan sosial ekonomi masyarakat dapat terus berjalan dan berkembang.

Upaya penanganan banjir dan rob telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan serta didukung oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terakhir telah dilakukan adalah dengan pembangunan tanggul raksasa di kawasan pesisir dan peninggian tanggul yang dilakukan setiap tahun. Namun demikian, hingga saat ini, luas genangan masih sebesar 38,23 persen dari luas wilayah Kota Pekalongan. Beberapa hal yang menyebabkan masih tingginya luasan kawasan banjir dan rob, meliputi: a) Drainase perkotaan belum optimal, persentase drainase dalam kondisi baik masih rendah yaitu 58,9 persen; b) Tingginya penurunan permukaan tanah (*land subsidence*), sekitar 3-4 cm per tahun; dan c) Ketimpangan kualitas lingkungan permukiman, yaitu persentase luasan kawasan kumuh masih sekitar 0,69 persen.

Kendala utama pengembangan drainase adalah Kota Pekalongan merupakan wilayah yang relatif sangat datar, dengan ketinggian 0 – 6 meter dpl dan di beberapa kawasan justru telah memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut. Oleh karena itu, penataan drainase secara bertahap perlu diarahkan pada sistem polder dengan penambahan secara terus menerus atas penyediaan kolam-kolam retensi (ruang air) ataupun *water storage* guna memaksimalkan upaya pengurangan genangan di lingkungan permukiman

Kendala penataan sistem drainase semakin bertambah dengan adanya permasalahan yang sedang terjadi yaitu penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan. Penelitian sedang memastikan apakah penurunan tanah disebabkan oleh eksploitasi air tanah dalam yang melebihi daya dukungnya atau karena fenomena alamiah karena wilayah Kota Pekalongan terbentuk karena proses sedimentasi sehingga terjadi proses pemampatan lapisan tanah. Namun kebijakan yang paling tepat dilakukan adalah membatasi eksploitasi air tanah tanpa melebihi daya dukungnya.

Isu yang lain adalah isu Kualitas Lingkungan Hidup, khususnya terkait kualitas tutupan lahan. Dengan menggunakan alat penginderaan jauh dan sistem informasi geografis, seseorang dapat mengidentifikasi bahwa Kota Pekalongan memiliki kualitas tutupan lahan yang cukup mengkhawatirkan. Secara fisik dengan mengamati kondisi di wilayah Kota Pekalongan pun seseorang dapat mengidentifikasi bahwa wilayah Kota Pekalongan terkesan panas karena masih minimnya tutupan lahan atau vegetasi. Melalui pengukuran di lapangan pun, sudah diidentifikasi bahwa beberapa sungai yang mengalir di wilayah Kota Pekalongan telah tercemar, yaitu telah terlampauinya beberapa indikator pencemar terhadap baku mutu yang ditentukan.

Kualitas lingkungan hidup Kota Pekalongan belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Pekalongan pada tahun 2019 sebesar 52,92 dan pada tahun 2020 turun menjadi 50,84. IKLH yang belum baik tersebut ditandai dengan masih rendahnya kenyamanan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat maupun pengunjung atau wisatawan yang datang ke Kota Pekalongan. Padahal, kualitas lingkungan merupakan unsur penting pendukung bagi pengembangan sektor lainnya, misalkan pariwisata. Kualitas lingkungan hidup yang baik akan mendorong seseorang untuk mempromosikan hal-hal baik sehingga dapat menarik orang yang semakin banyak untuk datang ke Kota Pekalongan.

Indeks kualitas tutupan lahan sangat dipengaruhi luasan Ruang Terbuka Hijau. Terbatasnya RTH di Kota Pekalongan karena upaya untuk pengembangan RTH belum dilaksanakan secara kontinyu dan belum terbangunnya kesadaran bahwa pengembangan RTH dapat membantu proses-proses alamiah lingkungan hidup, seperti terjaminnya ketersediaan kawasan resapan air dan siklus alamiah air. Padahal sesuai ketentuan, seharusnya RTH publik dan privat harus mencapai minimal 30 persen dari luas wilayah. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran bersama dan penegakan hukum terhadap ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Pekalongan. Kota Pekalongan pun sangat identik dengan sungai kotor dan tercemar. Tingginya pencemaran air disebabkan buangan limbah industri dan limbah domestik. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran bersama dan penegakan hukum terhadap ketentuan lingkungan hidup, agar pencemaran air dapat dikendalikan. Belum optimalnya kualitas tutupan lahan, kongruen dengan masih terbatasnya RTH. Upaya peningkatan kualitas tutupan lahan harus dilakukan secara kontinyu, melalui peningkatan kesadaran bahwa vegetasi sangat dibutuhkan dan pemanfaatan kawasan sempadan dan kawasan lindung untuk pengembangan vegetasi, penegakan hukum serta melanjutkan pembangunan RTH.

Isu penanganan banjir dan rob serta pengendalian kualitas lingkungan hidup juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; serta melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Isu ini juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi khususnya terkait lingkungan hidup dan bencana serta keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam, yang

dibuktikan dengan penempatan proyek prioritas strategis RPJMN di Kota Pekalongan yaitu penanganan banjir/rob (Rancangan RPJMN Tahun 2020-2024).

Upaya penanganan banjir rob secara terintegrasi juga menjadi agenda percepatan ekonomi kawasan sebagaimana dijabarkan dalam Perpres 19 Tahun 2019, antara lain : Pengendalian banjir Sistem Sungai Loji/Pekalongan/Kupang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 300 Milyar dari APBN), Pengendalian banjir Sistem Sungai Sengkarang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 250 Milyar dari APBN), Pengendalian Banjir dan Rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN), serta penyempurnaan sistem banjir dan rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN).

2.7.3. Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman

Kota Pekalongan memiliki peran penting bagi wilayah sekitarnya. Peran penting tersebut, terutama disebabkan potensi ekonomi dan posisi strategis yang dimilikinya. Oleh karena itu, sesuai dengan RTRWN, Kota Pekalongan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Sesuai dengan RTRWP Jawa Tengah, Kota Pekalongan juga berperan sebagai pusat dari kawasan Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan).

Oleh karena itu, Kota Pekalongan selalu berkembang, secara ekonomi ditandai dengan pergeseran peran sektor primer ke sektor sekunder dan tersier serta secara fisik, ditandai dengan semakin berkembangnya perkotaan, yaitu semakin meluasnya kawasan terbangun (*built up area*), terutama untuk perumahan dan kawasan permukiman, kegiatan industri serta perdagangan jasa. Perkembangan kegiatan perkotaan yang dinamis tersebut dan pertumbuhan jumlah penduduk berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan, termasuk perumahan dan kawasan permukiman.

Namun demikian, peningkatan kebutuhan tersebut, belum diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan secara optimal. Infrastruktur dasar perkotaan yang harus terus ditingkatkan layanannya, terutama adalah air bersih dan persampahan perkotaan karena cakupan pelayanannya yang belum optimal, serta sanitasi yang cakupannya harus mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat. Infrastruktur dasar perkotaan yang cakupannya optimal akan mendukung perkembangan perkotaan yang optimal, dalam rangka menuju kota yang berketahanan (*resilience city*), yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Cakupan layanan air bersih perpipaan di Kota Pekalongan tahun 2019 adalah sebesar 88,60 persen dan pada tahun 2020 menjadi 88,79 persen. Cakupan layanan ini harus terus ditingkatkan sehingga dapat mencakup seluruh masyarakat dan seluruh wilayah Kota Pekalongan. Tantangan pengembangan cakupan layanan air bersih sangat besar karena terbatasnya sumber air baku bagi air bersih di wilayah Kota Pekalongan dan kebutuhan jaringan SPAM yang membutuhkan investasi yang cukup besar. Air permukaan di wilayah Kota Pekalongan, belum dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku karena kualitasnya yang sangat rendah. Selama ini, sumber air baku tersebut, di samping bersumber dari air tanah di wilayah Kota Pekalongan, karena keterbatasan potensi air tanah di Kota Pekalongan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan jika dieksploitasi melebihi daya dukungnya, juga sangat bergantung dari sumber air baku dari daerah tetangga, yaitu wilayah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Cakupan pelayanan persampahan pun juga belum optimal, persentase layanan persampahan tahun 2019 sebesar 86,30 persen dan pada tahun 2020 menjadi 87,98 persen. Cakupan pelayanan persampahan harus terus ditingkatkan sehingga dapat mencakup seluruh masyarakat dan seluruh wilayah. Tantangan pengelolaan persampahan terutama disebabkan keterbatasan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, terutama kapasitas TPA Degayu yang semakin terbatas dan membutuhkan segera penggantian. Di samping itu, tantangan pengelolaan persampahan, terutama terkait dengan perilaku masyarakat yang belum mendukung pengelolaan persampahan, misalnya masih adanya sebagian masyarakat yang menjadikan badan air sebagai tempat sampah dan proses pemilahan sampah yang belum berjalan secara optimal.

Kondisi jalan kota pun juga harus terus ditingkatkan, agar dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangan perekonomian kota. Hingga tahun 2020, jalan kota kondisi mantap sebesar 80,16 persen. Di samping itu, pengembangan perekonomian harus didukung kondisi lalu lintas yang lancar dan aman. Kota Pekalongan merupakan salah satu simpul wilayah di Jawa Tengah dan Kawasan Petanglong, sehingga masih bercampurnya lalu lintas regional dan lalu lintas lokal. Meskipun V/C Ratio secara rata-rata atas jalan kota masih rendah (0,36), namun untuk Jalan Pantura ruas Kota Pekalongan, khususnya pada persimpangan sebidang kereta api masih sering terjadi kemacetan. Potensi kemacetan ini diperkirakan akan muncul kembali sebagaimana pernah terjadi pada saat sebelum pandemi COVID-19 dan pasca uji coba penggunaan jalan tol dimana kendaraan berat seperti truck kembali ke jalan pantura.

Penyediaan infrastruktur dasar tersebut, karena peran Kota Pekalongan terhadap daerah sekitarnya, bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pekalongan semata, tetapi harus mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat. Salah satu sumber air baku untuk air minum, merupakan hasil dari pengelolaan SPAM Petanglong. Diharapkan debit yang diberikan untuk Kota Pekalongan dapat segera meningkat sehingga dapat meningkatkan cakupan air bersih yang lebih optimal. Di bidang persampahan pun, TPA Regional Petanglong diharapkan dapat segera diwujudkan karena keterbatasan lahan di wilayah Kota Pekalongan dan ketentuan teknis yang tidak memungkinkan pengembangan TPA di wilayah Kota Pekalongan.

Isu Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Kualitas infrastruktur lingkungan permukiman sangat dipengaruhi oleh kondisi wilayah maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat. Wilayah Kota Pekalongan sangat rentan terjadinya bencana banjir dan rob, sehingga sangat berdampak terhadap kualitas infrastruktur lingkungan permukiman. Beberapa perumahan dan kawasan permukiman yang telah terendam rob dalam beberapa tahun terakhir, menjadi kawasan yang ditinggalkan penghuninya. Sementara kawasan lainnya pun juga selalu terendam banjir dan rob, tetapi masih tetap ditinggali pemiliknya karena tidak adanya pilihan tempat tinggal. Kawasan rentan tersebut merupakan kawasan yang akan menurun infrastruktur lingkungan permukimannya.

Hingga tahun 2020, berdasarkan SK Wali Kota Pekalongan terbaru, luas kawasan kumuh mencapai 10,74 persen dari luas wilayah Kota Pekalongan. Persentase tersebut merupakan luasan yang cukup signifikan, terutama kawasan tersebut berada pada kawasan yang memiliki kepadatan penduduk relatif tinggi.

Kondisi infrastruktur lingkungan permukiman yang rendah sangat mempengaruhi terhadap kondisi sosial ekonomi, kesehatan maupun kenyamanan warganya. Oleh karena itu, salah satu tantangan ke depan Pemerintah Kota Pekalongan adalah peningkatan

infrastruktur lingkungan permukiman. Keberhasilan peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan permukiman harus didukung dengan keberhasilan pengendalian banjir dan rob.

2.7.4. Peningkatan Derajat Kesehatan (Masa Pandemi COVID-19)

Kesehatan menjadi prasyarat manusia untuk tumbuh, berkembang dan berperan dalam pembangunan secara optimal. Oleh karena itu derajat kesehatan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan. Apalagi, pada saat ini sedang terjadi pandemi *COVID-19* sehingga tantangan untuk meningkatkan derajat kesehatan semakin berat. Pada saat pandemi ini, seluruh sumber daya kesehatan difokuskan pada penanganan pandemi, dan disisi lain muncul kekhawatiran masyarakat terhadap berkurangnya upaya promotif dan preventif serta kurangnya optimalisasi penanganan pada penderita penyakit kronis baik penderita penyakit menular/penyakit tidak menular yang dikhawatirkan dapat berimplikasi terhadap penurunan derajat kesehatan masyarakat.

Pembangunan bidang kesehatan, tidak hanya berfokus terhadap pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana kesehatan untuk tujuan kuratif semata, tetapi juga yang sifatnya preventif dan promotif. Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan upaya tersebut namun peningkatan derajat kesehatan masyarakat masih belum optimal. Upaya preventif dan promotif yang telah dilakukan diantaranya pemberian makanan tambahan terutama kepada bayi dan balita gizi kurang dan gizi buruk, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang maupun penerapan pola hidup bersih dan sehat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat di Kota Pekalongan ini, ditunjukkan dengan : a) Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), tahun 2019 AKI masih bernilai 101,30 per 100.000 kelahiran hidup; b) Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB), tahun 2019 AKB masih bernilai 11,99 per 1.000 kelahiran hidup; c). Masih tingginya angka kematian balita (AKABA), tahun 2019 AKABA masih bernilai 9,63 per 1.000 KH; d). Masih tingginya angka kesakitan dengan nilai 12,89 persen; e) masih ditemukan Balita Gizi Buruk sebesar 0,05 persen pada tahun 2019 dan Balita Stunting sebanyak 6,87 persen , f) masih rendahnya sistem ketahanan pangan, ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 91,31 persen serta g) masih tingginya Angka Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, pada tahun 2019 mencapai sebesar 22,29 persen.

Usia Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2019 sebesar 74,28 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 74,38 masih berada pada posisi terbawah jika dibandingkan dengan kota-kota setara di Jawa Tengah. Sehingga UHH tersebut masih terus untuk ditingkatkan secara optimal, melalui pembangunan bidang kesehatan secara terintegrasi, baik dari sisi preventif promotif maupun kuratif serta didukung peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Masih tingginya AKI Kota Pekalongan disebabkan masih belum optimalnya kesadaran masyarakat, terutama keluarga ibu hamil akan pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin, terutama ibu hamil yang memiliki risiko tinggi. Prasarana sarana kesehatan, khususnya persalinan, harus terus ditingkatkan dan diupayakan merata, sehingga pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu hamil dan ibu melahirkan, dapat diandalkan serta memiliki akses yang mudah dijangkau. Kongruen dengan AKI, tingginya AKB dan AKABA menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat serta penyediaan prasarana sarana kesehatan, terutama bagi bayi dan balita, harus terus ditingkatkan ketersediaannya sehingga mudah diakses. Angka kesakitan juga masih cukup tinggi yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular. Angka ini akan semakin tinggi dengan adanya pandemi *COVID-19*.

Peningkatan derajat kesehatan menjadi salah satu isu strategis karena berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu ; menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia serta menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Kesehatan di Kota Pekalongan juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi, sehingga beberapa prioritas pembangunan nasional dan provinsi akan dilakukan di Kota Pekalongan yaitu Pembangunan RSUD dengan pelayanan unggulan Ibu dan Anak dengan Rencana investasi sebesar Rp. 430 Milyar dari KPBU (Perpres Nomor 79 Tahun 2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023).

2.7.5. Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, salah satunya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan telah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Angka kemiskinan menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun dan pada tahun 2019 sebesar 6,60 persen. Namun akibat dampak pandemi *COVID-19*, angka kemiskinan Kota Pekalongan tahun 2020 meningkat menjadi 7,17 persen. Dengan indikator tersebut, masih dirasakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan yang belum optimal. Penanganan angka kemiskinan di Kota Pekalongan masih menjadi isu strategis karena sasaran pengentasan kemiskinan sudah menyentuh kemiskinan struktural, sehingga upaya pengentasan kemiskinan semakin berat. Hal ini merupakan fenomena yang sering dihadapi di berbagai daerah ketika angka kemiskinan semakin rendah sehingga dibutuhkan upaya seluruh pemangku kepentingan yang terintegrasi untuk lebih mengoptimalkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bila dicermati lebih detail berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jumlah warga miskin di Kota Pekalongan pun masih sangat tinggi. Apalagi, sejak awal tahun 2020 hingga saat ini, terjadi pandemi *COVID-19* yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tetapi juga hampir seluruh sektor kehidupan, yang pada akhirnya berimplikasi semakin meningkatnya jumlah warga miskin, akibat terjadinya kontraksi ekonomi. Jumlah warga miskin (DTKS) tahun 2020 sebanyak 121.889 jiwa dari semula 112.613 jiwa pada tahun 2019, atau kenaikan sebanyak 9.276 jiwa. Oleh karena itu, menjadi tantangan bersama ke depan, agar kebijakan pembangunan dapat lebih terintegrasi dan konvergen dalam penanganan upaya pengentasan kemiskinan.

Penurunan angka kemiskinan yang optimal harus mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Sumber daya yang dimiliki baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun perguruan tinggi dan seluruh elemen masyarakat harus didayagunakan secara terpadu dan sinergis, guna menurunkan angka kemiskinan ini. Masing-masing elemen dapat memiliki peran sesuai sumber daya yang dimilikinya.

Isu kemiskinan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana menjadi tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SGD's) yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun, menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; serta menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua serta mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

Perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, Tingkat Pengangguran Terbuka cenderung mengalami penurunan, terutama akibat adanya pandemi *COVID-19*. Angka pengangguran di Kota Pekalongan belum menunjukkan penurunan yang optimal dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi isu strategis karena pengangguran merupakan salah satu permasalahan utama pembangunan nasional maupun daerah. Tujuan pemerintahan daerah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga penurunan angka pengangguran menjadi salah satu sasaran pembangunan yang harus diwujudkan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pekalongan masih cukup tinggi. TPT masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2019 sebesar 5,77 persen dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 7,02 persen. Menyikapi hal ini, perlu adanya upaya dengan berbagai kebijakan yang tepat sasaran dan terarah. Upaya sistemik dan sinergis harus terus dilakukan untuk peningkatan kualitas dan kompetensi pencari kerja, perluasan kesempatan kerja, link and match dunia pendidikan/pelatihan dengan dunia usaha/dunia industri, penciptaan iklim kondusif bagi pengembangan usaha serta peningkatan investasi, sehingga pada gilirannya dapat menurunkan angka pengangguran di Kota Pekalongan.

2.7.6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pembangunan karena menjadi salah satu penentu keberhasilan pembangunan. Bonus demografi yang terjadi seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sebagai peluang pembangunan. Mayoritas usia produktif merupakan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan menambah kemiskinan dan pengangguran karena kualitas sumberdaya manusia yang tidak optimal. Namun demikian, kualitas sumber daya manusia di Kota Pekalongan belum optimal, sehingga harus ditingkatkan secara kontinyu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan tahun 2019 adalah 74,77 dan tahun 2020 meningkat menjadi 74,98. Meskipun IPM Kota Pekalongan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun, tetapi IPM tersebut menunjukkan angka terendah dibandingkan kota-kota yang ada Jawa Tengah. Kualitas sumber daya manusia yang belum optimal tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Harapan lama sekolah yang belum optimal. Pada tahun 2020, harapan lama sekolah sebesar 12,84 tahun. Artinya harapan lama sekolah penduduk adalah 12,84 tahun atau penduduk diharapkan menamatkan pendidikan sampai SMA/SMK (12 tahun) dan kuliah sampai semester 1 atau 8 bulan. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa berpendidikan tingkat sekolah menengah sudah cukup dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki tersebut sudah dapat masuk ke pasar kerja. Implikasinya adalah harapan lama sekolah di Kota Pekalongan belum optimal.
- b. Rata-rata lama sekolah belum optimal. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 adalah 8,96 tahun. Artinya penduduk Kota Pekalongan memiliki rata-rata lama sekolah 8,96 tahun atau rata-rata penduduk telah menamatkan pendidikan jenjang SMP kelas 8 belum sampai kelas 9 SMP atau belum sampai lulus SMP. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk Kota Pekalongan tersebut diakibatkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting pendidikan. Oleh karena itu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap arti penting pendidikan harus terus dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan kebijakan membuka dan mempermudah kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat usia sekolah untuk bersekolah tetapi hal tersebut harus secara kontinyu dilanjutkan.
- c. Belum optimalnya pengarusutamaan gender. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2019 sebesar 60,95. Pada dasarnya peran perempuan dalam kegiatan ekonomi kehidupan sehari-hari sangat tinggi, tetapi seringkali hal ini belum diperhitungkan secara baik dan terbuka sehingga berimplikasi terhadap belum optimalnya IDG. Peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik harus terus ditingkatkan untuk mendukung tercapainya pengarusutamaan gender secara optimal. Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan terhadap pemberdayaan gender pun juga telah berlangsung lama, namun peran aktif perempuan belum dapat optimal, baik dalam ekonomi maupun politik. Oleh karena itu, upaya peningkatan peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik harus secara kontinyu ditingkatkan, sehingga dapat lebih optimal.

Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu isu strategis karena berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu : menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; serta mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

2.7.7. Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal

Kota Pekalongan memiliki posisi strategis terhadap wilayah sekitarnya dan dalam konteks lalu lintas pantai Utara Pulau Jawa, oleh karena itu Kota Pekalongan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan pusat dari Kawasan Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan). Kota Pekalongan pun telah berkembang dengan industri TPT (tekstil produk tekstil), khususnya batik dan industri kreatif lainnya. Kota Pekalongan pun juga berkembang budayanya yang khas, dengan akulturasi budaya Jawa pesisir, Arab dan China. Budaya khas tersebut menjadi potensi yang dapat dikembangkan. Hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang dimiliki Kota Pekalongan dan menjadi keuntungan perbandingan (*comparative advantage*). Dengan keunggulan yang dimiliki tersebut, seharusnya Kota Pekalongan berkembang pesat, namun yang terjadi adalah daya saingnya belum optimal berkembang.

Beberapa hal yang membuktikan bahwa daya saing Kota Pekalongan belum optimal berkembang, yaitu: a) Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,50 persen dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi, yaitu minus 1,87 persen; b) Pendapatan perkapita belum optimal, dimana PDRB perkapita tahun 2020 sebesar Rp 35,22 juta per tahun; c) Pemerataan pendapatan yang belum optimal, yang ditunjukkan dengan Gini Ratio yang belum mengalami penurunan atau perbaikan; dan d) Belum terkelolanya budaya dengan baik, yaitu persentase seni budaya yang dilestarikan masih terbatas.

Dengan potensi (keunggulan komparatif) yang dimiliki Kota Pekalongan, seharusnya perekonomian dapat berkembang optimal, dengan memanfaatkan pergeseran sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, terutama dengan mengembangkan pariwisata, industri pengolahan, industri kreatif, dan perdagangan jasa. Beberapa hal yang menyebabkan belum berkembangnya daya saing, dilihat dari berbagai aspek penyebab, meliputi: a) Tingkat kunjungan wisatawan masih belum optimal dan semakin rendah ketika pandemi covid, jumlah kunjungan wisatawan tahun 2019 sebesar 720.000 orang dan pada tahun 2020 turun menjadi 283.882 orang; b) Pertumbuhan investasi belum optimal, nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp 3,29 Triliun dan tahun 2020 sebesar Rp. 196,11 Milyar; c) Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal, pertumbuhan ekonomi kreatif tahun 2019 masih terbatas; d) Pertumbuhan ekonomi sektor industri belum optimal, pertumbuhan ekonomi sektor industri tahun 2019 sebesar 4,84, persen dan tahun 2020 berkontraksi sebesar minus 0,48 persen; e) Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa belum optimal, pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa tahun 2019 sebesar 5,72 persen dan tahun 2020 berkontraksi sebesar -4,37 persen; dan f) Masih terbatasnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan, penyelenggaraan *event* budaya tahun 2020 masih sangat terbatas dan belum berskala besar.

Tingkat kunjungan wisatawan ke Kota Pekalongan belum optimal, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19, sektor pariwisata mengalami dampak yang sangat signifikan. Upaya pembangunan sektor pariwisata telah berjalan, terutama dengan pengembangan destinasi wisata dan prasarana sarana pendukung pariwisata, namun upaya tersebut harus terus dilakukan. Memperbesar aksesibilitas masuk dan keluar Kota Pekalongan melalui berbagai moda transportasi telah dilakukan. Upaya pengembangan sektor pariwisata harus terus dilakukan, terutama dengan mengembangkan kolaborasi antar pemangku

kepentingan maupun antar daerah. Upaya lain yang telah dilakukan dan akan dilanjutkan adalah pengembangan daya tarik Kota Pekalongan melalui revitalisasi obyek dan atraksi wisata serta pembangunan Kawasan Pekalongan Baru dan TOD (*Transit Oriented Development*) Stasiun Pekalongan. Tingkat kunjungan wisata juga dipengaruhi oleh belum optimalnya penanganan kemacetan karena bercampurnya lalu lintas lokal dan regional, dan disisi lain kapasitas jalan tidak bertambah. Tentunya hal ini berimplikasi terhadap VCR yang cenderung tinggi. Upaya penanganan yang selama ini dilakukan, terutama terbatas terkait dengan pengendalian dan rekayasa lalu lintas, padahal upaya mendasar yang seharusnya dilakukan adalah dengan memisahkan lalu lintas lokal dan regional. Dengan pemisahan lalu lintas lokal dan regional, pada gilirannya dapat merevitalisasi beberapa kawasan perdagangan jasa. Selama ini, kegiatan perdagangan jasa tidak dapat berkembang optimal karena bercampurnya lalu lintas lokal dan regional. Dengan terpisahnya lalu lintas tersebut maka diharapkan kawasan perdagangan jasa dapat berkembang optimal.

Pertumbuhan investasi di Kota Pekalongan belum optimal, lebih disebabkan faktor alamiah suatu kota, yaitu keterbatasan lahan yang dapat dikembangkan. Padahal dari sisi perizinan investasi, Kota Pekalongan telah memiliki SOP perizinan yang handal. Dengan telah selesainya revisi Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan investasi sehingga dapat lebih optimal.

Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal di Kota Pekalongan. Hal ini membutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, sehingga potensi yang telah tumbuh dan berkembang di Kota Pekalongan dapat disinergikan untuk pengembangan ekonomi kreatif. Pertumbuhan ekonomi sektor industri belum optimal disebabkan ketersediaan lahan yang terbatas di wilayah Kota Pekalongan sehingga industri tidak dapat berkembang serta nilai produksi dari sektor industri yang belum meningkat signifikan akibat masih terbatasnya permintaan. Demikian juga pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan jasa belum optimal karena kegiatan perdagangan jasa mengalami kendala karena terbatasnya prasarana sarana perdagangan, seperti terbakarnya Pasar Banjarsari yang merupakan pasar terbesar di Kota Pekalongan. Upaya untuk lebih mengoptimalkan pertumbuhan sektor industri maupun sektor perdagangan jasa adalah dengan penyediaan dan pengembangan prasarana sarana yang memadai, termasuk dukungan tersedianya lahan yang memadai.

Daya saing ekonomi juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua; meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara; melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; serta menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Daya saing ekonomi juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi, khususnya terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, Investasi dan perdagangan. Program Nasional dengan lokus di Kota Pekalongan sesuai dengan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 adalah Pembangunan TOD (*Transit Oriented Development*) Stasiun Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 200 Milyar dari BUMN. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan di Kota Pekalongan juga menjadi isu strategis provinsi, sehingga program prioritas pembangunan provinsi akan dilakukan di Kota Pekalongan yaitu pengembangan Minabatik (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023).

Peningkatan daya tarik pariwisata menjadi fokus program kewilayahan Jateng dengan lokus di Kota Pekalongan yaitu pengembangan potensi masyarakat destinasi

pariwisata di Kabupaten Pemalang, Batang, Pekalongan dan Kota Pekalongan (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023).

2.7.8. Pelestarian Budaya Lokal

Pemerintah Kota Pekalongan akan terus memperkuat dan mengembangkan budaya lokal menjadi salah satu kekayaan yang harus diwariskan ke generasi berikutnya. Masih terbatasnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan, dikarenakan belum optimalnya peran pemerintah dalam pembinaan di satu sisi, dan di sisi lainnya, dukungan para budayawan dan seniman yang belum optimal, menjadi isu strategis dalam pelestarian budaya lokal.

Urgensi pelestarian budaya lokal adalah Kota Pekalongan harus memperkuat jati dirinya karena budaya yang berkembang selama ini telah memberikan dampak bagi perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan. Batik sebagai salah satu warisan dunia, telah memperkuat budaya Kota Pekalongan dan telah menghantarkan Kota Pekalongan menjadi kota kreatif dunia. Sebagian besar masyarakat Kota Pekalongan terkait dengan rantai ekonomi industri batik, sehingga pelestarian budaya menjadi salah satu kunci penting bagi pengembangan Kota Pekalongan ke depan. Di sektor lainnya, budaya yang telah berkembang di Kota Pekalongan menjadi salah satu atraksi wisata, yang mampu menarik wisatawan. Oleh karena itu, pelestarian budaya menjadi hal yang sangat penting.

Para pemangku budaya dan seni harus bersinergi agar kekayaan budaya khas Pekalongan dapat dilestarikan dan dimanfaatkan sehingga dapat meningkatkan daya tarik Kota Pekalongan, khususnya dengan sektor pariwisata. Dengan penguatan seni budaya serta dikolaborasikan dengan sektor lainnya maka dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.7.9. Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas wilayah yang baik, menjadi isu strategis, merupakan salah satu prasyarat penting bagi perwujudan keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat. Dengan kondusivitas yang terjaga maka rantai ekonomi dan kondisi perikehidupan masyarakat dapat berjalan dengan normal. Dengan kondusivitas yang baik tersebut maka perekonomian dapat berkembang optimal dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konflik sosial di wilayah Kota Pekalongan tahun 2019 berjumlah satu kasus dan pada tahun 2020 juga berjumlah satu kasus. Kondusivitas wilayah Kota Pekalongan masih menjadi permasalahan karena masih tingginya angka kriminalitas serta masih tingginya penyalahgunaan NAPZA. Angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk menunjukkan kecenderungan yang menurun dan pada tahun 2019 sebesar 4,59 (per 10.000 penduduk), namun angka tersebut harus terus dioptimalkan. Kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang tertangani pada tahun 2019 adalah sebesar 44 kasus. Angka tersebut masih cukup tinggi dan Kota Pekalongan merupakan salah satu kabupaten/kota yang memiliki risiko tinggi penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Jawa Tengah. Angka kriminalitas maupun kasus penyalahgunaan NAPZA harus diturunkan, untuk dapat mendukung terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Pandemi *COVID-19* yang belum berakhir berdampak pada tekanan kondisi ekonomi meskipun tidak separah di awal pandemi. Pemerintah Pusat dan Daerah sampai menurunkan target makro pembangunan dengan harapan masih bisa dicapai meskipun cukup pesimis. Faktanya, Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2021 mencapai Rp4.325,4 triliun atau atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.815,9 triliun. Sementara itu pada triwulan III-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,55 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,10 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,28 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan III-2021 terhadap triwulan III-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,51 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,06 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,16 persen. Sampai dengan triwulan III-2021, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 3,24 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,81 persen. Sementara dari sisi pengeluaran semua komponen tumbuh, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 22,23 persen.

Pertumbuhan ekonomi (y-on-y) pada triwulan III-2021 mengalami peningkatan di hampir seluruh wilayah, kecuali kelompok di Pulau Bali dan Nusa Tenggara yang mengalami kontraksi pertumbuhan 0,09 persen. Namun, Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 57,55 persen mencatat pertumbuhan sebesar 3,03 persen.

Bank Dunia memproyeksikan perekonomian Indonesia menunjukkan pemulihan setelah mengalami kontraksi akibat pandemi *COVID-19* pada 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksi tumbuh positif pada 2021 hingga 2023. Pada 2021, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 3,7%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut dengan asumsi Indonesia tidak mengalami gelombang baru *COVID-19* yang lebih parah.

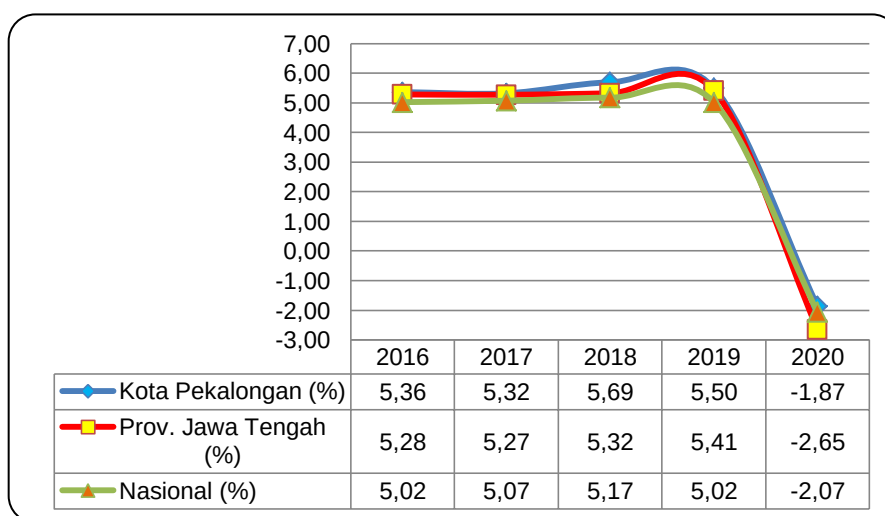
Kendati demikian, proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan proyeksi yang dirilis pada Juni lalu. Ketika itu, Bank Dunia memprediksi perekonomian Indonesia tumbuh 4,4% pada 2021. Penurunan prediksi ini akibat dari dampak varian Delta yang menyebar pada Juli-Agustus lalu. Bank Dunia juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat 5,2% pada 2022 dan 5,1% pada 2023. Proyeksi tersebut berdasarkan asumsi program vaksinasi akan terus dilakukan dengan harapan sebagian besar provinsi bisa mencapai tingkat vaksinasi hingga 70% pada 2022 dan dengan catatan Indonesia tidak akan mengalami gelombang baru *COVID-19* yang lebih parah. Selain itu, prediksi tersebut juga diasumsikan kebijakan moneter dan fiskal domestik akan tetap akomodatif serta pertumbuhan perdagangan global dan harga komoditas meningkat moderat di tengah pengetatan kondisi keuangan global. Konsumsi juga diperkirakan akan pulih lebih kuat

karena tingkat vaksinasi sudah lebih luas sehingga akan meningkatkan konsumsi dan permintaan masyarakat.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami fluktuasi, namun meningkat dari 5,36 persen di tahun 2016 menjadi 5,50 persen di tahun 2019. Di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun tajam bahkan minus 1,87 persen. Hal ini disebabkan wabah global yaitu *COVID-19* yang menyerang ke seluruh dunia hingga menjadi pandemi dan berdampak pada munculnya kebijakan *lockdown*. Seluruh sendi kehidupan tak terhindar dari dampak wabah ini hingga mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi global.

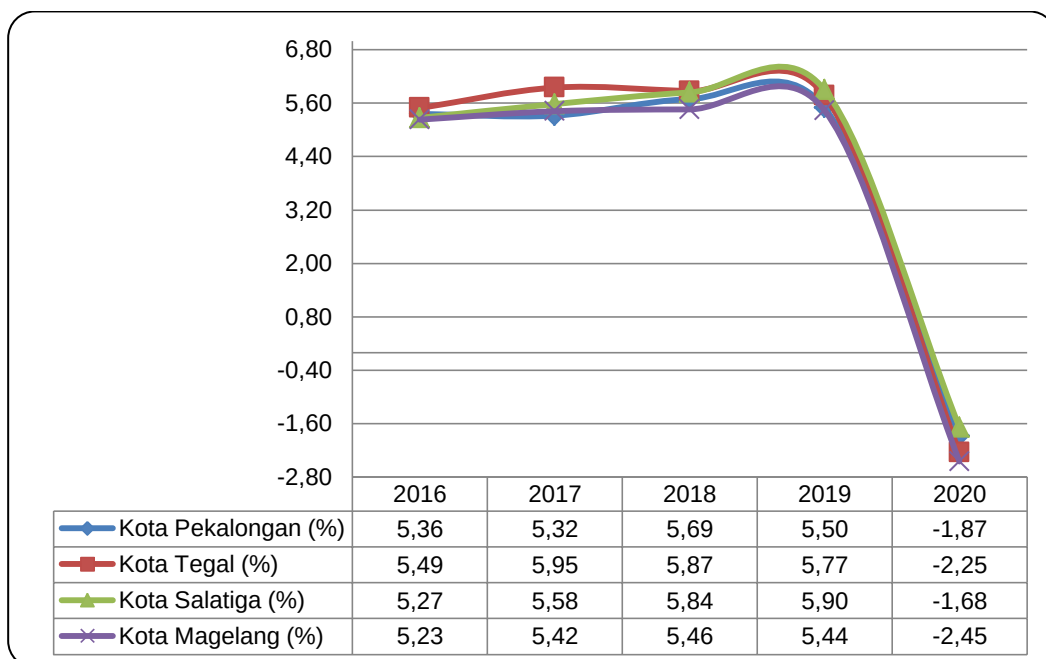


Gambar 3.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021 (diolah), 2021

Meskipun demikian, persentase pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sepanjang lima tahun terakhir selalu di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Begitu juga jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan selalu di atas pertumbuhan ekonomi Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada pada posisi tertinggi di tahun 2018 yaitu sebesar 5,69 persen, dan posisi terendah pada tahun 2020 yaitu -1,87 persen.

Jika dibandingkan dengan Daerah setara seperti Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan secara umum berada di posisi tengah diantara ketiga Daerah tersebut. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada dibawah Kota Tegal, diatas Kota Salatiga dan Kota Magelang. Tahun 2017 berada dibawah ketiga Kota tersebut, pada tahun 2018 dan 2019 berada diatas Kota Magelang, dibawah Kota Tegal dan Kota Salatiga. Sementara itu di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada dibawah Kota Salatiga, diatas Kota Tegal dan Kota Magelang. Selengkapnya disajikan dalam Gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2016 – 2020

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Pengolahan dan konstruksi yang terlihat dari peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan selama lima tahun. Peranan terbesar pada struktur perekonomian tahun 2020 adalah pada lapangan usaha Industri Pengolahan yakni 21,40 persen dan ini meningkat dibandingkan tahun 2019 yakni 20,85 persen, kemudian diikuti lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,16 persen dan ini turun dibandingkan tahun 2019 yakni sebesar 21,80 persen dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 14,60 persen dan ini turun dibandingkan tahun 2019 yakni 14,64 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0 – 6 persen. Struktur ekonomi ini adalah gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku disajikan dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2016-2020 (persen)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,26	4,74	4,67	4,66	5,10
B	Pertambangan dan Penggalian	—	—	-	-	-
C	Industri Pengolahan	21,43	21,13	20,94	20,85	21,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,10	0,12
F	Konstruksi	14,36	14,39	14,60	14,64	14,60

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,72	21,78	21,76	21,80	21,16
H	Transportasi dan Pergudangan	6,05	6,32	6,28	6,40	5,01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,42	5,39	5,42	5,44	5,32
J	Informasi dan Komunikasi	3,88	4,15	4,21	4,36	5,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,14	6,26	6,27	6,13	6,22
L	Real Estat	2,68	2,68	2,71	2,71	2,74
M,N	Jasa Perusahaan	0,40	0,41	0,42	0,44	0,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,75	4,72	4,58	4,47	4,50
P	Jasa Pendidikan	4,58	4,67	4,75	4,65	4,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,25	1,25	1,26	1,29	1,44
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,82	1,84	1,87	1,90	1,91
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, 2021

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku sejak 2016 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada Tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 28,43 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 35,41 juta rupiah. Namun mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 35,22 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sebesar Rp. 35,22 juta menurun sebesar 0,53 persen dibanding PDRB per kapita tahun 2019 sebesar Rp.35,41 juta.

Tabel 3.2 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB					
- ADHB (Miliar Rp)	8.507,54	9.274,26	10.089,25	10.873,98	10.818,53
- ADHK (Miliar Rp)	6.367,27	6.706,27	7.087,92	7.477,43	7.337,83
PDRB Per Kapita					
- ADHB (Juta Rp)	28,43	30,72	33,14	35,41	35,22

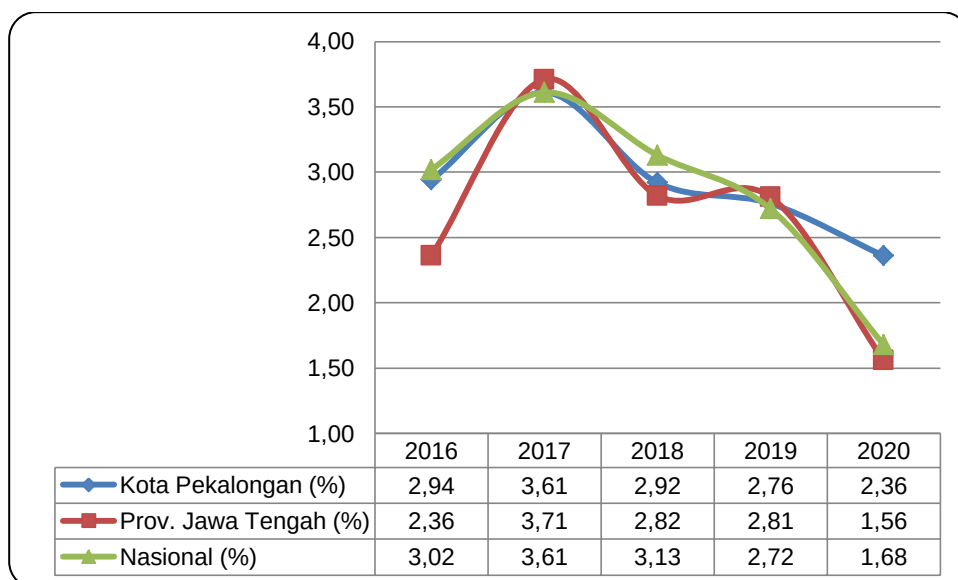
Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
- ADHK (Juta Rp)	21,28	22,22	23,28	24,35	23,89
Pertumbuhan PDRB per Kapita					
- ADHB (Persen)	8,39	8,06	7,86	6,86	-0,53
- ADHK (Persen)	4,42	4,40	4,79	4,60	-1,88

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2021

c. Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kota Pekalongan, laju inflasi di Kota Pekalongan merujuk angka inflasi Kota Tegal (daerah setara). Pada periode tahun 2016 – 2020, inflasi di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi dari kisaran 2,36 persen sampai 3,61 persen. Nilai inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2020 lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Adapun perkembangan inflasi Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional disajikan dalam Gambar 3.3 berikut.



Gambar 3.3 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2016 – 2020

Sumber : www.bps.go.id, 2021

Penyumbang inflasi terbesar di Kota Pekalongan adalah kelompok Bahan Makanan, kesehatan, pendidikan, sandang, kemudian kelompok umum, makanan jadi, perumahan dan transport, disajikan dalam Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Kelompok Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
Umum	2,94	3,61	2,92	2,76	-
Bahan Makanan	6,03	4,63	3,66	8,00	-
Makanan Jadi	5,85	2,46	3,05	1,60	-

Kelompok Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
Perumahan	0,88	4,02	3,47	0,40	0,33
Sandang	5,01	5,40	2,51	3,31	4,01
Kesehatan	1,99	1,15	0,54	4,75	2,89
Pendidikan	2,84	3,26	1,33	3,74	-2,71
Transport	-3,07	3,96	2,43	0,31	1,33
Perlengkapan	-	-	-	-	2,70
Infokom	-	-	-	-	1,20
Rekreasi	-	-	-	-	6,27
Restoran	-	-	-	-	1,76
Perawatan Pribadi	-	-	-	-	4,20

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2021

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Prospek perekonomian Kota Pekalongan tahun 2023 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 akan tumbuh tinggi.

Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kota Pekalongan antara lain :

- 1) Pemerintah Pusat berupaya melakukan percepatan vaksinasi *COVID-19* yang diharapkan menekan penyebaran *COVID-19* sehingga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di Kota Pekalongan dengan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*);
- 2) Pemerintah Pusat juga mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM melalui *rediscount* kredit.
- 3) Bantuan dari lembaga multilateral dan kerja sama antarnegara juga dilakukan dalam rangka penanganan dampak wabah *COVID-19*.
- 4) Kebijakan nasional terkait kegiatan strategis nasional di Kota Pekalongan, antara lain rencana pembangunan *Transit Oriented Development* (TOD), wisata Pasir Kencana, dan penanganan banjir/rob di wilayah utara Kota Pekalongan akan memberikan pengaruh pada peningkatan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga;
- 5) Kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kota Pekalongan yaitu :

- a. Respon atas kebijakan Pusat yaitu penuntasan vaksinasi *COVID-19* bagi usia di atas 12 tahun dan percepatan vaksinasi *COVID-19* bagi usia dibawah 12 tahun dalam rangka menekan penyebaran *COVID-19* dan mengakhiri pandemi.
- b. Kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dari Pusat perlu disikapi dengan kebijakan daerah yang tepat agar perekonomian tetap berjalan dengan baik dan kondisi ekonomi terus tumbuh.

- c. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNPB SDA Nonmigas.
- d. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain : (1) belum optimalnya *outcome* atau *output* yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional.
- e. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.
- f. Perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pasca pandemi *COVID-19*, antara lain : (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.
- g. Upaya pemulihan ekonomi akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pasca pandemi *COVID-19*. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali.
- h. Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum *COVID-19* terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan *comparative/competitive advantage* dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca pandemi *COVID-19*.
- i. Isu penguatan ketahanan pangan, energi, dan air dimana ketergantungan Kota Pekalongan masih sangat besar untuk mendapatkan pasokan dari luar daerah terutama dari daerah sekitar.
- j. Melemahnya daya saing Kota Pekalongan seiring dengan belum berkelanjutannya produk unggulan daerah terutama pada produk unggulan batik yang masih berupa bahan komoditi pemenuhan kebutuhan pasar semata namun untuk Batik Pekalongan sendiri belum memiliki *brand* produk yang original dan kuat di pasaran dan masih sebatas sebagai tempat memproduksi saja.
- k. Perlunya menciptakan ekonomi inklusif dengan penguatan UKM di Kota Pekalongan melalui optimalisasi technopark perikanan dan pengembangan pusat inovasi dan budaya batik.
- l. Meski letak Kota Pekalongan yang strategis sebagai pusat pelayanan kegiatan wilayah regional Petanglong namun hal ini belum dimaksimalkan terutama dalam hal pelayanan jasa dan perdagangan dimana selama dua tahun terakhir tidak terlalu signifikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi *COVID-19* diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata, dan ekspor melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan, serta pembangunan pariwisata.
- b. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik.

- c. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan.
- d. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.
- e. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat.
- f. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM).
- g. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan pembangunan di Kota Pekalongan dapat tumbuh sebagaimana digambarkan melalui indikator makro berikut :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022. Pandemi COVID-19 diharapkan sudah berakhir dan benar-benar masuk pada masa pemulihan secara total dengan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*).

Di tahun 2021, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Ekonomi triwulan III-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,55 persen, sementara untuk triwulan III-2021 terhadap triwulan III-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,51 persen (y-on-y). untuk Jawa Tengah, kondisi ekonomi triwulan III-2021 tumbuh sebesar 1,66 persen dibandingkan triwulan II-2021. Secara Kumulatif sampai dengan triwulan III-2021 tumbuh sebesar 2,44 persen.

Dengan asumsi optimis bahwa pemulihan ekonomi dapat dilakukan dengan cepat, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.4 berikut.

**Tabel 3.4 Realisasi, Target dan Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan**

Indikator	Relisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Proyeksi 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,87	2,28-2,84	2,28-2,84	2,48 - 2,83	2,53 - 3,32

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2021

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian IPM Kota Pekalongan tahun 2021 bergerak naik dari 74,98 di tahun 2020, menjadi 75,40 di tahun 2021. Capaian di tahun 2021 telah melebihi angka yang ditargetkan yaitu 75,10. Dengan upaya percepatan vaksinasi dan pemulihan ekonomi serta adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) dari dampak pandemi COVID-19, IPM tahun 2023 ditargetkan sebesar 75,52. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 3.5 berikut.

**Tabel 3.5 Realisasi, Target dan Proyeksi
Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan**

Indikator	Relisasi 2021	Target 2022	Target 2023	Proyeksi 2024
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,40	75,32	75,52	75,71

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, yakni sebesar 58,29 di tahun 2020. Angka tersebut belum mencapai target yang diharapkan yaitu 64,48. Pada RPJMD Tahun 2021-2026, target IDG dilakukan penyelesaian sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.6 berikut.

**Tabel 3.6 Realisasi, Target dan Proyeksi
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan**

Indikator	Relisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Proyeksi 2024
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	58,29	58,43	58,78	59,14	59,59

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2021

d. Tingkat Kemiskinan

Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 telah menghantam berbagai sendi kehidupan. Hal yang paling dirasakan masyarakat adalah dampak terhadap kondisi sosial ekonomi. Bertambahnya jumlah warga miskin akibat pembatasan kegiatan dan PHK (pemutusan hubungan kerja) menjadi catatan tersendiri. Tingkat kemiskinan melonjak dari angka 7,17 persen di tahun 2020 menjadi 7,59 di tahun 2021, melebihi dari angka yang ditargetkan di tahun 2021 yaitu 6,94. Melihat kondisi demikian maka pada RPJMD Tahun 2021-2026 Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penyesuaian target sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.7 berikut.

**Tabel 3.7 Realisasi, Target dan Proyeksi
Tingkat Kemiskinan di Kota Pekalongan**

Indikator	Relisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023	Proyeksi 2024
Tingkat kemiskinan (persen)	7,17	7,59	6,71	6,50	6,29

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2021

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Senada dengan tingkat kemiskinan, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga terpaut cukup jauh dengan target yang ditetapkan, yaitu capaian sebesar 7,02 persen dari target 3,60 persen pada penetapan 2020 dan 5,00 persen pada perubahan 2020. Hal tersebut membuat Pemerintah Kota Pekalongan harus menyesuaikan target penurunan TPT pada RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.8 berikut.

**Tabel 3.8 Realisasi, Target dan Proyeksi
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pekalongan**

Indikator	Relisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Proyeksi 2024

Indikator	Relisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Proyeksi 2024
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	7,02	6,84	6,66	6,48	6,31

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

f. Inflasi

Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa di Kota Pekalongan masih relatif terkendali. Setiap tahunnya, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan inflasi sebesar 3 ± 1 persen atau berada pada angka 2-4 persen. Inflasi tahun 2020 masih berada pada range tersebut yaitu 2,36 persen. Sementara untuk tahun 2021 dan 2022 ditargetkan 3 ± 1 persen sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9 Realisasi, Target dan Proyeksi Inflasi di Kota Pekalongan

Indikator	Relisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Proyeksi 2024
Inflasi (persen)	2,36	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2021

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Pemberian Pinjaman Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian maka diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi pelayanan BLUD, PD penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah Kota Pekalongan.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kota Pekalongan masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

Dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Proyeksi Pendapatan Pajak Daerah dihitung berdasarkan :
 - a. Perkiraan potensi yang ada dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku;
 - b. Kemungkinan realisasi penagihan piutang;
 - c. Mempertimbangkan realisasi pendapatan selama 2 tahun.
2. Proyeksi Hasil Retribusi Daerah dihitung berdasarkan :
 - a. Perkiraan potensi yang ada dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku;
 - b. Kemungkinan realisasi penagihan piutang;
 - c. Mempertimbangkan realisasi pendapatan selama 2 tahun.
3. Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dihitung berdasarkan estimasi perolehan laba dari BUMD.
4. Proyeksi Lain-lain PAD yang Sah dihitung berdasarkan :
 - a. Dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah selama 2 tahun terakhir;
 - b. Perkiraan suku bunga BI;
 - c. Potensi aset yang disewakan;
 - d. Estimasi perhitungan aset yang akan dilelang;
 - e. Estimasi denda pajak dan retribusi yang akan diterima.
5. Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan sama dengan APBD Tahun 2022.
6. Dana Insentif Daerah diasumsikan naik dengan upaya perbaikan kinerja yang menjadi indikator dasar perolehan DID.
7. Asumsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah selain DID disusun berdasarkan asumsi perhitungan secara proporsional yang tercantum di dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kota pekalongan Tahun 2023 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;

2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Revisi dan evaluasi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui :

- 1) *E-monitoring* pajak daerah yang merupakan monitoring secara elektronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti *tapping box* dan sejenisnya. Tujuan dari e-Monitoring Pajak Daerah antara lain :
 - Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak
 - Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan
 - Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak
 - Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak
 - Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak
 - Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.
- 2) Pemberian *Reward* dan *Punishment*, antara lain :
 - a) *Reward* :
 - Penganugerahan Wali Kota Pekalongan *Regional Tax Award* setiap tahunnya diberikan kepada WP pembayar pajak daerah tertaat, terbesar, kooperatif didalam pemeriksaan pajak daerah dll.
 - Undian Berhadiah Pajak PBB bagi WP yang telah melunasi Pajak PBB sebelum Jatuh Tempo Pembayaran.
 - Pemberian stimulus fiskal berupa keringanan/penghapusan denda keterlambatan.
 - Pemberian *doorprize/souvenir* untuk Wajib Pajak yang taat pada *event-event* yang digelar oleh Pemkot Pekalongan, seperti pameran Keterbukaan Informasi Publik dan Pekan Inovasi Daerah.
 - b) *Punishment* :
 - Pemberian sanksi denda bagi WP yang terlambat bayar.
 - Penerapan sanksi pidana, hal ini akan dilakukan/diterapkan kepada WP yang membandel setelah dilakukan upaya-upaya persuasif.
- 3) Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum).
- 4) Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
- 5) Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2.
- 6) Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah.

- 7) Pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (Simpatda) dan pemasangan alat perekam data transaksi para wajib pajak (*tapping box* atau sejenisnya).
- 8) Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun *online*.
- 9) Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah.
- 10) Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah.
- 11) Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.
- 12) Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah.
- 13) Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah / Simpatda untuk semua objek pajak daerah.
- 14) Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek Pajak Restoran, Hotel, PBB, BPHTB, PPJ Non PLN, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, antara data simpatda di BKD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya.
- 15) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien.
- 16) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah.
- 17) Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan brand image.
- 18) Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito.
- 19) Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah.
- 20) Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kota Pekalongan tahun 2019-2024 disajikan dalam Tabel 3.10 berikut.

**Tabel 3.10 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2024**

URAIAN	Realisasi 2019	Realisasi 2020 (Audited)	P-APBD 2021	APBD 2022	Ranwal RKPD 2023	Proyeksi 2024
PENDAPATAN	971.624.464.121	953.155.394.615	930.156.232.000	956.875.257.000	958.646.537.000	969.900.012.000
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	212.777.435.294	229.867.935.361	214.208.310.000	223.246.981.000	230.163.583.000	241.417.058.000
Pendapatan Pajak Daerah	87.578.474.262	76.255.221.742	82.200.000.000	87.550.000.000	92.400.000.000	98.450.000.000
Hasil Retribusi Daerah	16.667.656.492	14.870.124.919	16.282.910.000	19.165.390.000	18.132.193.000	19.008.320.000
Hasil Pengel.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.101.173.105	5.821.083.050	5.803.900.000	5.951.841.000	6.473.378.000	6.862.472.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	102.430.131.435	132.921.505.650	109.921.500.000	110.579.750.000	113.158.012.000	117.096.266.000
PENDAPATAN TRANSFER	734.897.351.238	700.838.013.854	690.242.857.000	733.628.276.000	706.104.314.000	706.104.314.000
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	643.593.762.948	625.666.101.409	602.819.457.000	635.728.454.000	616.144.097.000	616.144.097.000
Bagi Hasil Pajak	17.751.480.700	27.182.869.066	25.068.114.756	24.270.118.000	23.583.183.000	23.583.183.000
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.275.750.200	1.780.895.008	1.925.086.244	2.543.489.000	1.504.841.000	1.504.841.000
Dana Alokasi Umum	475.842.089.000	433.354.907.000	426.399.738.000	426.399.738.000	426.399.738.000	426.399.738.000
Dana Alokasi Khusus	115.463.501.048	104.991.517.335	127.896.993.000	177.818.849.000	134.656.335.000	134.656.335.000
Dana Insentif Daerah	33.260.942.000	58.355.913.000	21.529.525.000	4.696.260.000	30.000.000.000	30.000.000.000
Transfer Pemerintah Provinsi	91.303.588.290	75.171.912.445	87.423.400.000	97.899.822.000	89.960.217.000	89.960.217.000
Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi	72.167.436.245	63.377.912.445	78.870.400.000	86.446.822.000	78.202.217.000	78.202.217.000
Bantuan Keuangan Provinsi	19.136.152.045	11.794.000.000	8.453.000.000	11.453.000.000	11.758.000.000	11.758.000.000
Bantuan Keuangan Umum Dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000	-		
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.949.677.589	22.449.445.400	25.705.065.000	-	22.378.640.000	22.378.640.000
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23.949.677.589	22.449.445.400	22.987.065.000	-	22.378.640.000	22.378.640.000
Pendapatan Hibah	0	0	2.718.000.000	-	0	0

Sumber : BPKAD Kota Pekalongan, 2022

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan belanja daerah pada tahun 2023 dihitung dengan berdasar proyeksi pada RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- a. Proyeksi belanja daerah diasumsikan turun sebesar 3,69 persen dibandingkan penetapan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021;
- b. Perhitungan gaji pegawai diasumsikan turun sebesar 1,28 persen dibandingkan dengan tahun 2021.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi, maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kondusivitas wilayah guna mendorong investasi dan kesempatan berusaha;
- b. Peningkatan penyediaan dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan dan lingkungan permukiman;
- c. Upaya penanganan rob secara berkelanjutan dengan menjaga sinkronisasi program pembangunan tanggul yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta upaya untuk menekan pencemaran guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- d. Upaya meningkatkan layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan dalam masa pandemi *COVID-19* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta mendorong kreatifitas tenaga pendidik;
- e. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Pekalongan melalui berbagai upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitasi dengan mengutamakan pencegahan dan penanganan *COVID-19*;
- f. Peningkatan *skills* calon tenaga kerja dan calon wira usaha sebagai upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), perluasan kesempatan bekerja dan berusaha melalui berbagai alternatif lapangan kerja dan lapangan usaha, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- g. Mendorong pemulihan aktifitas kepariwisataan berbasis budaya dan potensi unggulan daerah dengan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*).

Adapun realiasi dan proyeksi belanja daerah Kota Pekalongan tahun 2019-2024 disajikan dalam Tabel 3.11 berikut.

**Tabel 3.11 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2019 – 2024**

URAIAN	Realisasi 2019	Realisasi 2020 (Audited)	P-APBD 2021	APBD 2022	Ranwal RKPD 2023	Proyeksi 2024
BELANJA	954.397.012.827	863.280.127.422	1.041.206.081.000	998.875.257.000	1.040.255.723.000	1.070.177.106.000
BELANJA OPERASI	771.512.589.320	678.982.771.474	848.502.419.000	825.236.232.000		
Belanja Pegawai	390.898.339.975	312.861.230.596	420.853.844.000	410.055.530.000		
Belanja Barang dan Jasa	336.953.793.745	327.664.407.878	391.265.135.000	384.028.070.000		
Belanja Hibah	30.031.913.000	36.250.151.000	35.570.690.000	28.381.802.000		
Belanja Bantuan Sosial	13.621.739.100	2.206.982.000	812.750.000	2.770.830.000		
BELANJA MODAL	182.153.984.579	126.926.093.953	178.869.825.000	167.702.025.000		
Belanja Modal Tanah	3.912.172.520	13.144.232.065	11.443.780.000	951.500.000		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.699.453.221	29.045.998.699	39.532.373.000	45.801.097.000		
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.367.203.715	33.911.226.174	53.443.379.000	35.564.935.000		
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.876.027.946	50.106.236.575	70.860.468.000	78.207.441.000		
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.299.127.177	644.610.440	3.339.825.000	7.177.052.000		
Belanja Aset Lainnya	0	73.790.000,00	250.000.000	0		
BELANJA TAK TERDUGA	730.438.928	57.371.261.995	13.833.837.000	5.937.000.000		
Belanja Tak Terduga	730.438.928	57.371.261.995	13.833.837.000	5.937.000.000		

Sumber : BPKAD Kota Pekalongan, 2022

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan berasal dari pencairan dana cadangan dan SiLPA. Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2023 di Kota Pekalongan antara lain diarahkan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian, dan pembentukan dana cadangan.

Rincian pembiayaan daerah disajikan dalam Tabel 3.12 berikut.

**Tabel 3.12 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2024**

URAIAN	Realisasi 2019	Realisasi 2020 (Audited)	P-APBD 2021	APBD 2022	Rancangan Awal RKPD 2023	Proyeksi 2024
PEMBIAYAAN	77.874.259.018	104.227.367.651	111.049.849.000	42.000.000.000	81.609.186.000	100.277.094.000
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	92.028.388.994	108.747.997.651	112.549.849.000	48.000.000.000	93.209.186.000	106.277.094.000
Penggunaan SiLPA	87.928.207.176	95.101.710.312	112.542.301.000	48.000.000.000	93.209.186.000	92.277.094.000
Pencairan Dana Cadangan	300.000.000	12.704.351.488	0	0	-	14.000.000.000
Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah	0	941.935.851	7.548.000	0	0	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.154.129.976	4.520.630.000	1.500.000.000	6.000.000.000	11.600.000.000	6.000.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	4.607.388.226	0	1.000.000.000	3.000.000.000	6.000.000.000	0
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	7.742.000.000	4.518.000.000	500.000.000	3.000.000.000	5.600.000.000	6.000.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	1.804.741.750	2.630.000	0	0	0	0

Sumber : BPKAD Kota Pekalongan, 2022

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode tahun 2021-2026, maka visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”

Visi tersebut dibangun dengan ruh perwujudan **Tahta Untuk Rakyat** sebagaimana falsafah pemerintahan yang dibangun oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam kerangka RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, falsafah Tahta Untuk Rakyat ini mengandung makna bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kekuasaan dalam pemerintahan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemanfaatan seluruh rakyat Kota Pekalongan.

Untuk mengetahui gambaran Visi tersebut, maka perlu diberikan gambaran pemaknaan atas uraian visi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang lebih jelas atas kondisi atau gambaran yang ingin diwujudkan pada akhir periode RPJMD.

4.1.1. Gambaran Kota Pekalongan dalam visi tahun 2021-2026

Gambaran Kota Pekalongan yang telah diuraikan pada periode RPJMD Tahun 2016–2021 adalah Kota Pekalongan yang meletakkan dinamika pembangunan sosial ekonomi, dan masyarakatnya pada dua potensi unggulan, yaitu batik dan perikanan. Kondisi ini terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan geografi, demografi, ataupun lingkungan strategis lainnya.

Dalam memetakan kontribusi batik sebagai produk unggulan yang diandalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak dapat lagi hanya memandang dari satu sisi saja yaitu *brand image* yang tidak diragukan lagi oleh Daerah-daerah lain di Indonesia. Namun lebih dari itu, Kota Pekalongan juga dihadapkan pada permasalahan daya saing dengan Daerah lainnya. Disamping itu, perkembangan industri di era 4.0 ini juga harus disikapi dengan berbagai inovasi yang sifatnya dinamis dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan konsumen. Pola-pola produksi dan pemasaran harus dikolaborasikan antara pendekatan tradisional dengan pendekatan modern yang identik dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Pada waktu – waktu yang akan datang, industri batik juga dihadapkan pada isu-isu lingkungan hidup yang akan sangat mempengaruhi keberlanjutan industri batik itu sendiri. Sumber daya air menjadi salah satu isu penting yang saling terkait. Industri batik, merupakan salah satu industri yang cukup tinggi membutuhkan ketersediaan air bersih. Aktivitasnya sangat rentan terdorong untuk mengeksploitasi sumber air yang ada di Kota Pekalongan dalam jumlah yang cukup besar. Di sisi lain, sumber-sumber air bersih yang

ada di permukaan seperti sumur dangkal dan juga sungai, seringkali menjadi tempat pembuangan limbah. Akibatnya sumber-sumber air tersebut tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, perlu langkah bersama seluruh komponen masyarakat untuk mulai memberikan keseimbangan pemanfaatan sumber daya air ini, sehingga akan memberikan dampak positif kembali pada keberlanjutan industri batik itu sendiri.

Industri batik juga akan dihadapkan pada kondisi perubahan iklim dan penurunan lahan (*land subsidence*). Kedua fenomena alam ini telah terbukti mengganggu aktivitas produksi, khususnya pada wilayah-wilayah yang sangat terdampak seperti di sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur, serta sebagian besar di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Oleh karena itu, perlu keterpaduan program, kegiatan, dan aktivitas-aktivitas pekerjaan antara Pemerintah dan masyarakat dalam menyikapinya. Arah kebijakan dan strategi pembangunan harus dapat dijabarkan sampai dengan pembagian tugas atas ranah mana yang akan dikerjakan oleh Pemerintah dan mana yang akan dikerjakan oleh masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi lingkungan alam dengan segala dinamika kegiatan masyarakat yang ada di Kota Pekalongan akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Pekalongan itu sendiri.

Potensi unggulan lainnya yang dimiliki oleh Kota Pekalongan adalah perikanan. Meskipun pernah mengalami kejayaan, namun dalam kurun waktu 5 – 10 tahun terakhir memiliki kecenderungan penurunan produksi. Faktor-faktor yang menjadi kendala perlu dilakukan kajian dan analisis secara menyeluruh, baik berkaitan dengan tata kelola, kemampuan SDM, kondisi sarana dan prasarana, ataupun koordinasi dan komunikasi antar berbagai pelaku dan pengusaha perikanan.

Saat ini Kota Pekalongan akan membangun optimisme dengan mendorong terwujudnya Pelabuhan *Onshore*. Komunikasi dan koordinasi akan dilakukan secara lebih intens dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Selain itu, kesiapan fasilitas pendukung seperti jalan akses, ketersediaan pasokan air bersih, dan juga listrik akan menjadi perhatian yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Optimisme ini diharapkan akan terwujud menjelang akhir periode tahun 2025, yang artinya akan sejalan dengan perwujudan masyarakat Kota Pekalongan yang lebih sejahtera.

Selain hal-hal di atas, Kota Pekalongan yang selama ini terus dihadapkan pada permasalahan banjir dan rob, diharapkan juga akan berkurang secara bertahap dan signifikan mulai medio periode RPJMD atau sekitar tahun 2023. Hal ini sesuai dengan target penyelesaian infrastruktur pengendali banjir dan rob skala besar yang dikerjakan oleh Pemerintah Pusat melalui BBWS Pemali Juana, serta pentahapan peningkatan kualitas sistem drainase perkotaan yang dikerjakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Selain itu, terdapat juga peran masyarakat untuk menjaga lingkungan dari sampah. Hal ini sangat penting, karena buruknya lingkungan atas sampah akan sangat berpengaruh bagi operasionalisasi sistem polder yang mengandalkan pompa bagi optimalnya fungsi drainase di lingkungan permukiman dan perkotaan.

Andalan lain yang nantinya diharapkan akan terwujud pada periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah pengembangan wisata yang didukung oleh operasionalisasi Transit Oriented Development (TOD). Pasca konstruksi Obyek Wisata Air Pasir Kencana di akhir tahun 2021 ini, Kota Pekalongan akan mempunyai wahana wisata baru yang akan sangat menarik kunjungan wisata. Hal ini akan menjadi pendorong bagi berkembangnya industri ikutan, seperti jasa perhotelan, transportasi, dan juga kuliner.

Pada awal periode RPJMD ini, Pemerintah Kota Pekalongan juga terus berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait upaya mewujudkan Pengembangan TOD yang telah masuk menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional di dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019. TOD ini akan menjadi penghubung mobilitas pengunjung

di titik-titik strategis daya tarik wisata Kota Pekalongan. Dengan demikian, akan sangat mendorong penyebaran keramaian kota secara lebih merata.

Upaya – upaya dan juga gambaran masa depan sampai dengan tahun 2026 sebagaimana tersebut di atas, akan dilakukan sejalan dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar khususnya bagi masyarakat tidak mampu, mulai dari Pendidikan, Kesehatan, Pangan dan Perumahan, air bersih, ataupun juga fasilitas-fasilitas (sarana prasarana, ekonomi, dan juga budaya) yang bertujuan membangun kemandirian bagi warga masyarakat.

Kemudian dari sisi tata kelola pemerintahan, gambaran di akhir periode tahun 2026, Kota Pekalongan akan memiliki sistem pemerintahan yang efektif dan efisien yang berpegang pada prinsip *good governance and clean government*. Kualitas SDM Aparatur akan ditingkatkan, baik dari aspek teknis ataupun manajerial, guna mewujudkan ASN yang profesional. Selain itu, ASN juga akan menjadi bagian dari upaya mengajak kolaborasi stakeholder-stakeholder atau pihak-pihak yang selama ini memberikan perhatian atau berpotensi memberikan perhatian terhadap pembangunan di Kota Pekalongan. Berbagai kesepakatan atas peran serta dari para stakeholder ini ditargetkan akan terwujud guna ikut serta menyelesaikan permasalahan fisik dan juga permasalahan sosial.

Hal ini mendasari bahwa sesungguhnya penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat dan Kota Pekalongan tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan sendiri. Tetapi, harus melibatkan peran serta banyak pihak. Oleh karena itu, misi ke delapan sebagaimana terdokumentasikan dalam tahapan-tahapan kontestasi Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan berubah penempatannya, yaitu semula merupakan misi, berubah menjadi bagian dari pengertian atas visi.

Hal ini didasari atas pemikiran bahwa misi kedelapan, yaitu Mewujudkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat, pada hakikatnya merupakan ruh metode yang menjadi pengikat dan sekaligus menjiwai dalam menjalankan tujuh misi lainnya. Selanjutnya, dalam praktik perencanaan nantinya akan terwadahi dalam struktur program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

1. Lebih Sejahtera

RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 ini merupakan akhir periode pentahapan pembangunan lima tahunan yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Pekalongan tahun 2005-2025. Oleh karena itu, makna sejahtera yang telah diuraikan dalam RPJPD tahun 2005-2025 menjadi penting untuk diperhatikan.

Kota Sejahtera dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang adalah Kota yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan batin) secara adil dan merata. Kota sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Dengan kondisi yang lebih sejahtera ini, maka akan terpenuhi seluruh kebutuhan sosial dasar bagi seluruh warganya, sehingga akan dapat hidup secara bermartabat.

Dengan mengacu pada definisi di atas, maka kondisi akhir periode RPJMD tahun 2026 akan diukur dari indikator-indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka

Kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Sekolah, Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indikator-indikator ini beserta pentargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

2. Lebih Mandiri

Sejalan dengan pemahaman kondisi kesejahteraan dari akhir periode pentahapan pembangunan lima tahunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD diatas, maka kondisi kemandirian Kota Pekalongan juga akan diambil dari definisi yang ada dalam RPJPD Kota Pekalongan tahun 2021-2026.

Di dalam RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa kemandirian masih mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat. Guna membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui daya saing yang menjadi kunci kemandirian. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik maupun sosial budaya dan ini tercermin dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan Kota Pekalongan; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah yang semakin kokoh serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya. Gambaran ini merangkum sebuah kondisi kemandirian pada segala aspek kehidupan.

Dengan melihat definisi Mandiri sebagaimana diuraikan di atas, maka kondisi Lebih Mandiri pada akhir periode RPJMD Tahun 2026 akan diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai investasi, dan Persentase Pendapatan Asli Daerah dibandingkan APBD. Indikator-indikator ini beserta pentargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

3. Lebih Religius

Kondisi religius tidak menjadi gambaran akhir visi periode RPJP-D Kota Pekalongan tahun 2005-2025. Namun, upaya untuk mewujudkan kehidupan yang religious ini tercermin dari Misi kesatu RPJP-D yaitu Mewujudkan kondisi perikehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang **agamis**, berbudaya, bersih, aman, tertib dan demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam uraian penjabarannya disebutkan bahwa Agama menjadi landasan utama dalam semua perikehidupan, sehingga mampu menghasilkan persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat yang bersih, termanifestasi dalam tingkat keimanan dan ketaqwaan yang tinggi. penghargaan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepatuhan terhadap nilai budaya, moral, etika, hukum, dan HAM, menjunjung tinggi eksistensi perbedaan dan kemajemukan, pengembangan keterbukaan dan demokratisasi politik lokal.

Sejalan dengan gambaran di atas, maka kondisi lebih religius dimaknai bahwa nilai-nilai keagamaan akan menjadi dasar dan corak dari seluruh tujuan kota. Selanjutnya, secara terukur kemandirian ini akan digambarkan sebagai suatu kondisi tatanan masyarakat Kota Pekalongan yang berakhlakul karimah, hidup rukun, dan berkarakter.

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai Program Perangkat Daerah terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang

sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Pekalongan 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”**, uraian tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut :

4.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, RPJMD ini merumuskan 7 (tujuh) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Ketujuh misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

Untuk mencapai Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, maka salah satu hal yang harus diupayakan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kondisi masyarakat dengan derajat kesehatan yang tinggi antara lain dapat dilihat dari rendahnya angka kesakitan, menurunnya kasus penyakit menular, rendahnya kematian Ibu, Bayi dan Balita, meningkatnya angka usia harapan hidup, dan juga meningkatnya kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan akan meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan, baik dari aspek jangkauan pelayanan, kualitas sarana dan prasarana, alat-alat kesehatan dan obat-obatan, kualitas dan kecukupan tenaga kesehatan, ataupun kapasitas dan kualitas lembaga pelayanan kesehatan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan tersebut, tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, tetapi juga oleh swasta dan masyarakat. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Perangkat Daerah terkait, mengajak dan memberikan ruang partisipasi yang luas dengan tetap memegang prinsip dan ketentuan yang berlaku untuk dapat berperan aktif dalam pelayanan di bidang kesehatan.

Selain peningkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan, upaya mewujudkan visi Kota Pekalongan yang lebih sejahtera juga dilakukan melalui pelayanan di bidang kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dilakukan mulai dari meningkatkan kualitas data sasaran yang terintegrasi dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sinkronisasi program dan kegiatan, baik dengan Pemerintah Pusat ataupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Pemerintah Kota Pekalongan juga akan mendorong peran swasta dan masyarakat, baik yang tergabung secara kelembagaan ataupun secara individu, untuk dapat bersama-sama menanggulangi permasalahan kesejahteraan masyarakat.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Adapun sasarannya adalah Meningkatnya Indeks Keluarga sehat dan Meningkatnya Penanganan Kemiskinan.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan

Saat ini hampir di semua tatanan masyarakat sedang dihadapkan pada isu perubahan yang dinamikanya semakin tinggi sebagai akibat dari pengaruh kemajuan Teknologi Informasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan bersama dengan masyarakat perlu membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan produktivitas yang tinggi, menguasai kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai cerminan SDM yang berkarakter dan religius.

Misi ini ditopang oleh institusi-institusi pendidikan baik formal maupun non formal, lembaga keagamaan baik lembaga Pemerintah ataupun organisasi kemasyarakatan dan agama, serta pelatihan ketrampilan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swasta. Keberhasilan melaksanakan misi kedua ini akan memberikan dampak positif bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan, peningkatan kemandirian, serta peningkatan implementasi nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan masyarakat.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten, dan produktif. Adapun sasaran misi ini adalah Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan, Meningkatnya akses pendidikan, Optimalnya pengarusutamaan gender, Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak, dan Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif.

3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman

Lingkungan permukiman yang diimpikan oleh hampir semua masyarakat adalah lingkungan yang sehat dan nyaman untuk berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan, beribadah, ataupun mencari nafkah dan mata pencaharian.

Kondisi ini berbeda sekali dibandingkan dengan kondisi riil yang dihadapi oleh sebagian masyarakat Kota Pekalongan, khususnya yang tinggal di wilayah-wilayah terdampak rob seperti sebagian Kecamatan Pekalongan Barat, hampir seluruh Kecamatan Pekalongan Utara, dan sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Timur. Hampir sebagian besar mengalami permasalahan rumah yang tidak layak huni serta terbatas dalam pemenuhan kebutuhan pengelolaan limbah ataupun jalan dan drainase lingkungan yang memadahi.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan dan masyarakat mengemban misi ini sesuai dengan porsi kewenangan, dan kemampuan anggarannya masing-masing. Upaya ini tidak hanya dilakukan di kawasan-kawasan yang masuk area kumuh, tetapi juga pada area lain di luar area kumuh.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman, dengan sasaran Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh.

4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan

Pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan, saat ini dihadapkan pada kondisi tanah yang terus mengalami penurunan atau *land subsidence*. Intensitas kejadian banjir dan rob akan semakin sering terjadi jika tidak dilakukan penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi. Oleh karena itu, misi ini bertujuan untuk menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob melalui sinergi sumber daya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Pekalongan, dan juga masyarakat. Pembangunan – pembangunan pengendali banjir dan rob berskala besar yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, harus

dibarengi dengan penataan sistem drainase kota dan kebijakan untuk menahan laju penurunan tanah oleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan dari sampah. Adapun sasarannya yaitu Optimalnya penanganan banjir dan rob.

Selain itu, misi ini juga bertujuan untuk meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan sasaran meliputi : menurunnya tingkat pencemaran air, optimalnya tutupan hutan/RTH, dan Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang. Kemudian terkait dengan infrastruktur dasar perkotaan yang menjadi kewajiban bagi Pemerintah, maka misi ini membawa juga tujuan untuk Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Dasar, dengan sasaran meliputi : Optimalnya layanan air minum, Optimalnya Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan, dan Meningkatnya Layanan Transportasi Perkotaan.

5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal.

Kota Pekalongan adalah kota pertama di Indonesia yang masuk jejaring kota kreatif dunia UNESCO. Selain itu, sekarang ini juga menjadi anggota jejaring kota kreatif di tingkat nasional. Sejalan dengan hal tersebut, aktivitas perekonomian yang masuk sektor-sektor ekonomi kreatif juga memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan. Oleh karena itu, misi ini meletakkan konsep pondasinya pada potensi lokal dalam menumbuhkan ekonomi kreatif Kota Pekalongan. Dalam kondisi ideal, diharapkan akan mampu menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat yang dapat dilihat dari PDRB perkapitanya. Adapun sasaran misi ini adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari berbagai upaya seperti peningkatan investasi, pengembangan industri, peningkatan nilai ekspor perdagangan, peningkatan nilai modal usaha UMKM yang bersumber dari koperasi, peningkatan nilai produksi perikanan, dan juga pembangunan bidang pariwisata.

6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah.

Kota Pekalongan terkenal dengan nuansa religiusnya dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Di Kota Pekalongan terdapat adat dan tradisi lainnya seperti Sya'banan (khol/ruwah), Syawalan, sedekah bumi, dan sedekah laut. Sya'banan (khol) adalah upacara keagamaan / kebudayaan yang diselenggarakan setiap tanggal 14 sya'ban (ruwah) setahun sekali di selenggarakan di Makam Sapuro. Syawalan adalah upacara adat bagi umat Islam yang diselenggarakan di Kelurahan Krapyak dengan pemotongan lopis raksasa. Tradisi Sedekah Laut (Nyadran), yaitu upacara melarung sesaji berupa kepala kerbau dan jajan pasar lengkap serta tabur bunga yang dilaksanakan setiap bulan Syuro (Muharam). Tradisi Pek-Chun yang hampir sama dengan tradisi sedekah laut, tradisi ini diselenggarakan oleh warga Tionghoa menurut kalender China pada perayaan tahun baru China atau Imlek.

Kota Pekalongan juga memiliki jenis kesenian yang beragam, antara lain Simtudh Duror dan Samproh, yaitu seni musik bernafaskan islam biasanya menyanyikan puji-pujian, shalawat dan lagu-lagu Islami. Jenis kesenian lainnya adalah Marawis, yaitu jenis "band tepuk" dengan perkusi sebagai alat musik utamanya. Orkes Gambus dengan alat musik petik seperti mandolin yang berasal dari Timur Tengah.

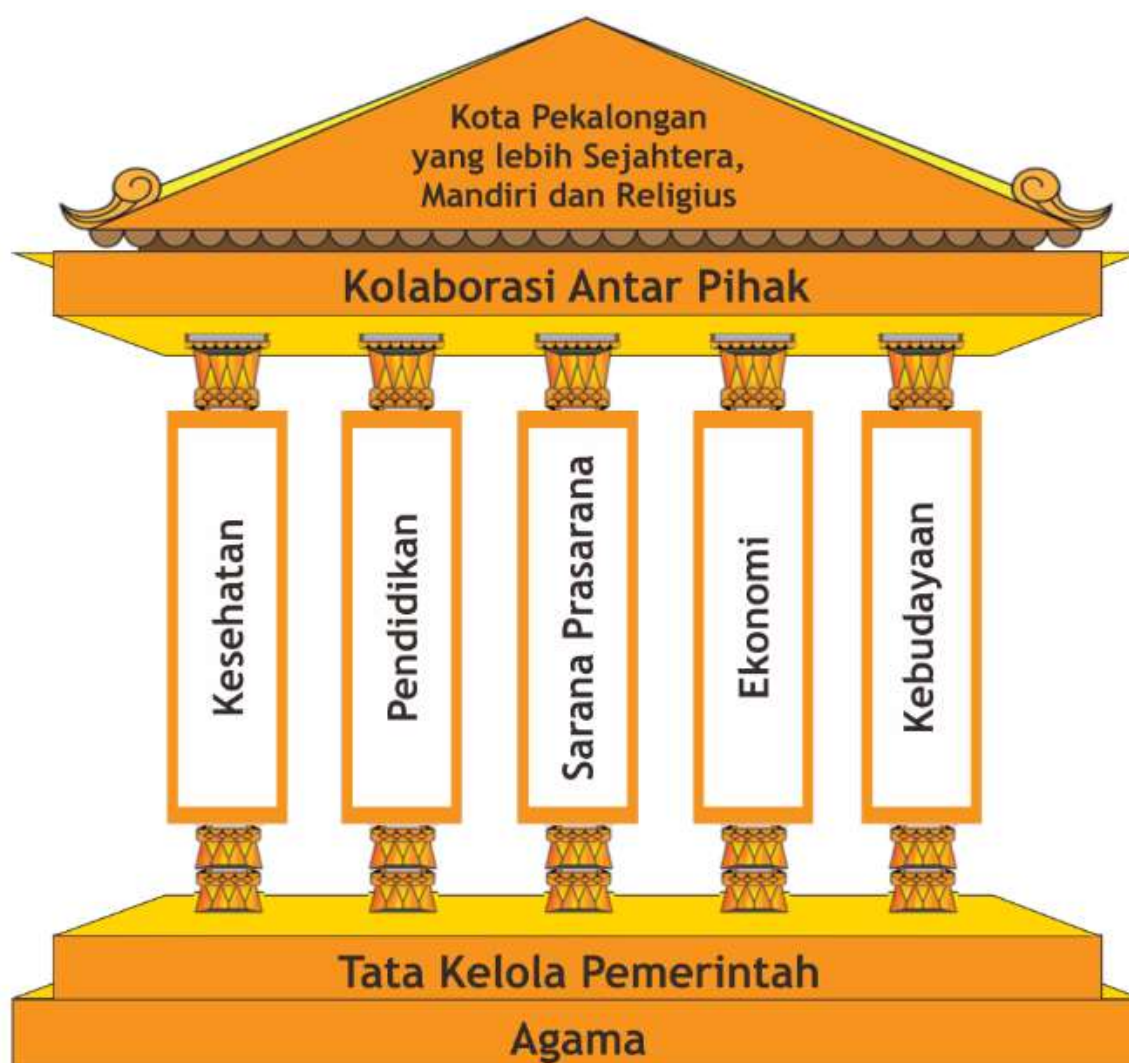
Dengan melihat keragaman budaya dan kearifan lokal di atas, maka Pemerintah bersama Masyarakat Kota Pekalongan mengemban misi untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal tersebut. Dalam praktiknya misi ini akan mewujudkan melalui upaya mendorong peningkatan intensitas *event* budaya yang diselenggarakan, baik oleh Pemerintah ataupun oleh masyarakat.

Kemudian untuk misi mengembangkan tata kehidupan yang berakhlakul karimah nantinya akan diimplementasikan guna untuk mencapai tujuan berupa mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan. Adapun sasarannya adalah manajemen atau pengelolaan potensi-potensi konflik sosial yang ada di masyarakat.

7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi yang kemudian dapat diandalkan secara prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini dapat akan dapat dilihat dari optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, meningkatnya kualitas layanan publik, meningkatnya kualitas manajemen ASN, meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, meningkatnya akuntabilitas keuangan, dan meningkatnya kualitas pengawasan.

Sebagai gambaran atas uraian visi dan misi selanjutnya dapat dilihat dalam ilustrasi berikut.



Gambar 4.1 Ilustrasi Visi dan Misi

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

4.1.3. Tujuan Dan Sasaran

4.1.3.1. Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

TUJUAN

- a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

SASARAN

- a. Meningkatnya indeks keluarga sehat
- b. Meningkatnya penanganan kemiskinan

4.1.3.2. Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan

TUJUAN

- a. Meningkatkan kualitas SDM yang religius, kompetitif dan produktif

SASARAN

- a. Meningkatnya akses pendidikan
- b. Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan
- c. Optimalnya pengarusutamaan gender
- d. Optimalnya pengarusutamaan hak anak
- e. Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif

4.1.3.3. Misi 3 : Mewujudkan Lingkungan Permukiman yang Nyaman

TUJUAN

- a. Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman

SASARAN

- a. Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh

4.1.3.4. Misi 4 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan

TUJUAN

- a. Menurunkan luas genangan banjir dan rob
- b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- c. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar

SASARAN

- a. Optimalnya penanganan banjir dan rob
- b. Menurunnya tingkat pencemaran air
- c. Optimalnya kualitas lahan
- d. Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang
- e. Optimalnya layanan air minum
- f. Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan
- g. Meningkatnya layanan transportasi perkotaan

4.1.3.5. Misi 5 : Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal

TUJUAN

- a. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat

SASARAN

- a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

4.1.3.6. Misi 6 : Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah

TUJUAN

- a. Melestarikan Seni Budaya
- b. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan

SASARAN

- a. Meningkatnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan
- b. Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial

4.1.3.7. Misi 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*

TUJUAN

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

SASARAN

- a. Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*Smart Governance*)
- b. Meningkatnya kualitas Layanan Publik (*Smart Governance*)
- c. Meningkatnya kualitas manajemen ASN
- d. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
- e. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan
- f. Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Penjabaran visi misi Wali Kota Pekalongan, tujuan dan sasaran seperti yang diuraikan di atas disusun juga dengan kaitan untuk mendukung pencapaian prioritas RPJMN tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023.

**Tabel 4.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Misi
RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021– 2026**

Visi : “Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 1: Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat												
1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup			Tahun	74,38	74,43	74,47	74,52	74,57	74,62	74,66	74,66
		1. Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,17	0,22	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50	0,50
			Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	152,41	140,34	128,28	116,21	104,14	92,08	80,01	80,01
			Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	8,81	8,51	8,21	7,91	7,60	7,30	7,00	7,00
			Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	10,84	10,53	10,23	9,92	9,61	9,31	9,00	9,00
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan			persen	7,17	6,94	6,71	6,50	6,29	6,09	5,89	5,89
		2. Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	n/a	1,00	1,00	2,00	2,50	3,00	3,00	11,89
Misi 2: Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan												
1. Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Indeks Pembangunan Manusia			indeks	74,98	75,10	75,32	75,52	75,71	75,88	76,03	76,03
		1. Meningkatnya akses pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,96	9,11	9,27	9,43	9,59	9,75	9,92	9,92
		2. Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		3. Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	58,29	58,43	58,78	59,14	59,59	60,28	61,00	61,00
		4. Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya
	Tingkat Pengangguran Terbuka			persen	7,02	6,84	6,66	6,48	6,31	6,15	5,99	5,99
		1. Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	66,45	70,01	70,28	70,54	70,81	71,08	71,34	71,34
Misi 3 : Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman												
1. Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen			persen	55,56	55,56	62,96	74,07	77,78	88,89	100,00	100,00
		1. Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	89,26 (SK Baru)	89,26	90,96	93,72	96,24	98,44	100,00	100,00
Misi 4 : Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan												
1. Menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob	Persentase Luas genangan Banjir dan Rob			persen	37,27	33,11	26,50	22,12	19,58	17,02	12,17	12,17
		1. Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	1730,00	1537,00	1230,00	1027,00	909,00	790,00	565,00	565,00
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			indeks	50,84	50,85	50,86	50,87	50,88	50,89	50,90	50,90
		1. Menurunnya tingkat pencemaran air	Indeks Kualitas Air	indeks	35,33	35,34	35,35	35,36	35,37	35,38	35,39	35,39
		2. Optimalnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan	indeks	23,60	23,60	23,60	23,60	23,60	23,61	23,61	23,61
		3. Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	4,00	4,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3. Menjamin Ketersediaan infrastruktur dasar	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar			persen	88,11	88,44	88,77	89,11	90,37	90,71	91,04	91,04
		1. Optimalnya layanan air minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2. Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Persentase pelayanan sampah	persen	67,12	68,12	69,12	70,12	71,12	72,12	73,12	73,12
		3. Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Tingkat pelayanan jalan (<i>Level Of Service</i>)	kategori	B	B	B	B	B	B	B	B
			Persentase keterhubungan jalan	persen	97,20	97,20	97,20	97,20	100,00	100,00	100,00	100,00
Misi 5 : Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal												
1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	PDRB Perkapita			Rp. Juta/jiwa/tahun	35,22	35,47 - 35,51	35,97 - 36,21	36,56 - 36,92	37,16 - 37,82	39,21	40,65	40,65
		1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	persen	-1,87	1,86 - 1,97	2,28 - 2,84	2,48 - 2,83	2,53 - 3,32	4,55	4,55	4,55
Misi 6 : Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlakul karimah												
1. Melestarikan Seni Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan			persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		1. Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	68,89	86,67	88,89	91,11	93,33	97,78	100,00	100,00
2. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Jumlah konflik sosial			kasus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government												
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi			indeks	n/a	70,69	71,69	72,69	73,69	74,69	75,69	75,69
		1. Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (<i>Smart Governance</i>)	Indeks SPBE	indeks	3,19	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,25
		2. Meningkatnya kualitas Layanan Publik (<i>Smart Governance</i>)	IKM Kota	persen	83,19	83,34	83,49	83,64	83,79	83,94	84,09	84,09
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota		skor	91,00	93,00	95,00	96,00	97,00	97,20	97,50	97,50	
	3. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit System	indeks	200,00	215,00	225,00	240,00	250,00	255,00	260,00	260,00	
	4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	skor	73,07	73,57	74,07	74,57	75,07	75,57	76,07	76,07	
	5. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK <i>Outcome</i>)	kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Maturitas SPIP	nilai	3,02	3,10	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,00	
		Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	8,00	

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

Selanjutnya, untuk menjelaskan kerangka logis keterhubungan kebijakan daerah dan perangkat daerah sasaran dipisahkan menjadi sasaran yang terkait dengan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan sasaran yang tidak secara langsung terkait dengan pencapaian visi dan misi Wali Kota tetapi secara langsung mencapai prioritas perangkat daerahnya tersebut. Selanjutnya sasaran secara spesifik pembangunan daerah terangkai menjadi sebagai arsitektur kinerja 'impact' yang saling terhubung. Dengan demikian, indikator tujuan pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian pembangunan daerah pada akhir periode Wali Kota Pekalongan pada tahun 2021. Berikut ini disajikan tabel keterkaitan kinerja daerah dan perangkat daerah Kota Pekalongan.

**Tabel 4.2 Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2021-2026**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat					
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	1. Indeks Keluarga Sehat 2. AKI 3. AKB 4. AKABA	Persentase capaian SPM Kesehatan	Kesehatan
				Skor PPH konsumsi	Pangan
				Total Fertility Rate	Keluarga Berencana
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Sosial
Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan					
Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya akses pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidikan
		Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persentase sumbangan pendapatan perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Anak
		Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	Pendidikan
				Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Perpustakaan
		Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	Kategori Kota Layak Anak	Skor Kota Layak Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	Tenaga Kerja
Misi 3 : Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman					
Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Persentase kelurahan dengan kawasan	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang	Persentase kawasan perumahan dan permukiman yang	Persentase rumah layak huni	Perumahan dan Kawasan Permukiman

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
	kumuh kurang dari 10 persen	tidak kumuh	tidak kumuh	Cakupan layanan pengelolaan limbah domestik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Cakupan jalan dan jembatan lingkungan kondisi mantap	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi 4 : Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan					
Menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob	Persentase Luas Genangan Banjir dan Rob	Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	Luas Genangan Banjir dan Rob	Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran air	Indeks Kualitas Air	Persentase tingkat pencemaran air	Lingkungan Hidup
		Optimalnya kualitas lahan	Indeks Kualitas lahan	Persentase Kenaikan Luasan RTH	Lingkungan Hidup
		Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	Persentase kesesuaian penataan ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Pertanahan
Menjamin layanan infrastruktur dasar	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	Optimalnya layanan air minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	Persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Persentase pelayanan sampah	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Lingkungan Hidup
				Pengembangan Sarana Persampahan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	Kapasitas Jalan Perkotaan	Perhubungan
Persentase keterhubungan jalan	Persentase jalan kota dalam keadaan Mantap			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Misi 5 : Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal					
Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	PDRB Perkapita	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Penanaman Modal
				Pertumbuhan Industri	Perindustrian
				Nilai ekspor perdagangan	Perdagangan
				Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Koperasi-UKM
				Nilai produksi tanaman pangan, holtikultura dan peternakan	Pertanian

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
				Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kab/kota (IKK Outcome)	Kelautan dan Perikanan
				Tingkat Kunjungan Wisata	Pariwisata
Misi 6 : Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlakul karimah					
Melestarikan Seni Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	Persentase peningkatan kelompok budaya	Kebudayaan
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Jumlah konflik sosial	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase etnis/suku/agama/or mas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa	Kesbangpol
				Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Memahami Tata Kehidupan Politik	Kesbangpol
				Tingkat ketenteraman dan ketertiban umum	Trantibum
Misi 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government					
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Indeks SPBE	Indeks domain tata kelola SPBE	Komunikasi dan Informatika
				Tingkat kematangan layanan data terbuka pada satu data terpadu daerah	Statistik
				Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Persandian
		Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	IKM Kota	Nilai indeks kepuasan masyarakat OPD	Semua Urusan
		Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit System	Indeks Profesionalitas ASN	Kepegawaian
				Indeks Profesionalitas ASN	Pendidikan dan Pelatihan
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	Penelitian dan Pengembangan
				Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Perencanaan
		Persentase capaian kinerja pembangunan	Sekretariat Daerah		

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	Keuangan
				Rasio PAD	Keuangan
		Meningkatnya kualitas pengawasan	Maturitas SPIP	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	Pengawasan
		Meningkatnya kualitas pengawasan	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM	Pengawasan

Sumber : RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, 2021

Dengan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi pada tiap sasaran RPJMD sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.3 berikut.

**Tabel 4.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Kota Pekalongan Tahun 2021-2026**

Visi : “Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”

MISI / TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat		
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Peningkatan kualitas keluarga sehat
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin dan mencegah munculnya miskin kembali bagi warga rentan dan hampir miskin
Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan		
Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Meningkatnya akses pendidikan	Pengurangan angka pengangguran dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	
	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Peningkatan kompetensi pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja
	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta stakeholder terkait
	Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	
Misi 3 : Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman		
Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Penurunan luas kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan limbah domestik dan peningkatan kualitas jalan lingkungan
Misi 4 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan		
Menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob	Optimalnya penanganan banjir dan rob	Penurunan luas genangan banjir/rob melalui penataan sistem drainase, pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran air	
	Optimalnya kualitas lahan	

MISI / TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	
Menjamin Ketersediaan infrastruktur dasar	optimalnya layanan air minum optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
Misi 5 : Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal		
Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Peningkatan daya tarik pariwisata dan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Misi 6 : Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah		
Melestarikan Seni Budaya	Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Pelestarian budaya lokal melalui peningkatan event budaya dengan pemberdayaan berbasis komunitas
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Pengendalian potensi konflik sosial melalui upaya preventif dengan pendekatan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat serta penyelesaian jalur non litigasi
Misi 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Clean Government		
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance) Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance) Meningkatnya kualitas manajemen ASN Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023

Perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2023 disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2023 juga disusun dengan mengacu pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Provinsi dan Daerah.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Presiden memberikan 5 (lima) arahan utama sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :
 - a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - b) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery* industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

- a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1) Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
 - 2) Peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
 - 3) Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
 - 4) Peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
 - 5) Pengembangan industri pendukung EBT.
- b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
 - 2) Pengelolaan hutan berkelanjutan;
 - 3) Penyediaan air untuk pertanian;
 - 4) Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
 - 5) Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air
 - 6) dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan
 - 7) infrastruktur hijau; dan
 - 8) Pengembangan waduk multiguna.
- c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - 2) Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
 - 3) Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
 - 4) Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
 - 5) Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1) Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
 - 2) Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
 - 3) Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
 - 4) Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
 - 5) Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.

- e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1) Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
 - 2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 - 3) Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
 - 4) Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.
- f) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1) Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
 - 2) Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
 - 3) Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
 - 4) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 - 5) Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
 - 6) Pengembangan industri halal.
- g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1) Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa;
 - 2) Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - 3) Pengelolaan Impor;
 - 4) Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif;
 - 5) Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global;
 - 6) Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif; dan
 - 7) Peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
- h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1) Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan;
 - 2) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0;
 - 3) Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga;
 - 4) Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri
 - 5) Pengolahan dan Pariwisata; dan
 - 6) Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi

- 7) Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman,
 - 8) Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :
- a) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
 - b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
 - c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
 - d) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
 - e) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :
- a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f) Pengentasan kemiskinan; dan
 - g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.
- Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :
- a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu :
 - 1) Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan;
 - 2) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan;
 - 3) Pendampingan dan Layanan Terpadu; dan
 - 4) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
 - b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1) Sistem jaminan sosial nasional;
 - 2) Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
 - 3) Kesejahteraan Sosial.
 - c) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
 - 2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;
 - 3) Peningkatan Pengendalian Penyakit;
 - 4) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
 - 5) Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.
- d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
- 1) Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
 - 2) Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun;
 - 3) Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 4) Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
 - 5) Peningkatan Tata Kelola Pendidikan.
- e) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
- 1) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
 - 2) Peningkatan Kesenjangan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
 - 3) Kualitas Pemuda.
- f) Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
- 1) Akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
 - 2) Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial;
 - 3) Reforma Agraria; dan
 - 4) Perhutanan Sosial.
- g) Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
- 1) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri;
 - 2) Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas;
 - 3) Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi; dan
 - 4) Prestasi Olahraga.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada :
- a) Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
 - b) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan

- c) Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan
- d) meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

- a) Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
 - 2) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
 - 3) Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
 - 4) Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
 - 5) Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
 - 6) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism.
- b) Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1) Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
 - 2) Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
 - 3) Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
 - 4) Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
 - 5) Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- c) Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
 - 2) Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama;
 - 3) Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya;
 - 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama; dan
 - 5) Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan.

- d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1) Peningkatan Budaya Literasi;
 - 2) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
 - 3) Pengembangan budaya lptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
 - 4) Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui :

 - a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
 - b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
 - c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
 - d) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
 - e) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

 - a) Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau;
 - 2) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
 - 3) Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan;
 - 4) Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
 - 5) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur; dan
 - 6) Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi.
 - b) Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Konektivitas Jalan;
 - 2) Konektivitas Kereta Api;
 - 3) Konektivitas Laut;
 - 4) Konektivitas Udara; dan
 - 5) Konektivitas Darat.
 - c) Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1) Transportasi Perkotaan; dan
 - 2) Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan.
 - d) Energi Dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1) Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan;

- 2) Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan; dan
- 3) Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik.
- e) Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1) Penuntasan Infrastruktur TIK;
 - 2) Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan
 - 3) Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan :

- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
- c) Pembangunan Rendah Karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 2) Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 3) Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - 4) Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- b) Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1) Penanggulangan Bencana; dan
 - 2) Peningkatan Ketahanan Iklim.
- c) Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1) Pembangunan Energi Berkelanjutan;
 - 2) Pemulihan Lahan Berkelanjutan; dan
 - 3) Pengembangan Industri Hijau.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :

- a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;

- b) Meningkatkan Hak-Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
- c) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut :

- a) Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1) Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi;
 - 2) Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan; dan
 - 3) Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik.
- b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1) Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri; dan
 - 2) Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional.
- c) Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1) Penguatan Implementasi Manajemen ASN;
 - 2) Transformasi pelayanan publik;
 - 3) Penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
 - 4) Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja.
- d) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - 1) Penguatan Keamanan Dalam Negeri;
 - 2) Penguatan Keamanan Laut; dan
 - 3) Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Prioritas pembangunan daerah tahun 2023 ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah guna **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari”**. Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 diarahkan pada :

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, dengan fokus pada :
 - a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani melalui antara lain hilirisasi berbasis industri, peningkatan kualitas kelembagaan petani berbasis korporasi, peningkatan akses permodalan dan subsidi bunga kredit, dukungan jaminan usaha/asuransi, pengembangan kawasan pertanian/food estate, peningkatan peran petani gurem dan buruh tani melalui penguatan database, serta peningkatan prasarana dan sarana pertanian;
 - b. Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan melalui jaminan kemudahan perijinan, peningkatan akses permodalan, asuransi nelayan, penguatan kelembagaan nelayan berbasis korporasi, meningkatkan nilai tambah produk perikanan melalui optimalisasi

Unit Pengolahan Ikan (UPI), serta peningkatan kualitas prasarana sarana perikanan berbasis teknologi;

- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fungsi lindung hutan;
 - d. Peningkatan ketahanan pangan melalui perwujudan sistem logistik daerah, pemanfaatan lahan pekarangan dan marjinal sebagai sumber pemenuhan pangan keluarga, penanganan desa rawan pangan, pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, diversifikasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman, serta mutu dan keamanan pangan segar;
 - e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil menengah, serta koperasi melalui peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, standarisasi produk dan inovasi produk, pengembangan inovasi teknologi produksi, pengembangan bahan baku industri substitusi impor, penguatan keberantaraan akses pembiayaan dan pemasaran terutama pemasaran berbasis digital, keberantaraan usaha kecil ke usaha menengah/besar, serta penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi dan UKM; Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing;
 - f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat dan lingkungan hidup melalui perbaikan prasarana sarana destinasi pariwisata, peningkatan promosi pariwisata, peningkatan aksesibilitas, serta optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata;
 - g. Peningkatan nilai penanaman modal melalui penyempurnaan sistem dan layanan perijinan yang mudah, murah, cepat, transparan, dan akuntabel, pemberian fasilitasi kemudahan perijinan berusaha, peningkatan upaya pengawalan kepemilikan dan pengawasan penanaman modal, penyediaan infrastruktur yang mendukung, serta penguatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah dan dunia usaha;
 - h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang, serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan serta antar wilayah pantura, tengah, dan pangsela;
 - i. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui konservasi DAS, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumberdaya air, perbaikan kualitas air sungai danau waduk, peningkatan tampungan air baku, pengendalian pemanfaatan air permukaan dan air tanah, pengendalian banjir dan rob, rehabilitasi kawasan pesisir dan laut, pengelolaan sampah berbasis 3Ng (Ngelongi, Nggunakke, dan Ngolah), penerapan Good Mining Practice, konservasi energi, pemanfaatan energi baru terbarukan, serta penguatan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup dengan pendekatan pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim;
 - j. Peningkatan ketahanan bencana melalui harmonisasi regulasi penanggulangan bencana di tingkat daerah, dokumentasi sejarah kebencanaan, penguatan literasi kebencanaan, perencanaan penanggulangan bencana, penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembiayaan dan penanggulangan bencana, pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, serta peningkatan kemitraan antar daerah dan antar lembaga dalam pengurangan risiko bencana.
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE), dengan fokus pada :

- a. Penyediaan *basic need access* (akses kebutuhan dasar) untuk penduduk miskin perdesaan dan perkotaan utamanya pada kelompok rumah tangga petani, nelayan, buruh, pelaku usaha mikro kecil (UMK), dan kelompok rentan lainnya baik bersifat langsung maupun tidak langsung dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin antara lain penyediaan layanan dasar untuk masyarakat miskin (Rumah Sederhana Layak Huni/RSLH, jamban, akses air bersih, dan listrik murah);
 - b. Penguatan *sustainable livelihood* (keberlanjutan ekonomi masyarakat) untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, utamanya melalui pendampingan dan pengembangan daya saing usaha mikro dan kecil yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas masyarakat miskin dan rentan miskin baik secara individu maupun berbasis kelompok (*community based*), pengembangan aktivitas ekonomi baru berbasis pada potensi lokal, pengembangan kewirausahaan pemuda yang berkelanjutan, dan pengembangan ekonomi digital;
 - c. Penguatan tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan terutama melalui verifikasi dan validasi data berbasis masyarakat dan pemanfaatan data di tingkat daerah, penguatan peran Puskesmas dalam keperantaraan penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial, serta penguatan sinergi kebijakan dan program baik secara horisontal maupun vertikal;
 - d. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, penciptaan atau perluasan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial, kesejahteraan pekerja, pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan, peningkatan kepatuhan dalam menerapkan peraturan ketenagakerjaan, penanganan kasus ketenagakerjaan, pelayanan pengawasan tenaga kerja, serta membangun kesatuan sistem *demand dan supply side* tenaga kerja. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah.
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing, dengan fokus pada :
- a. Penuntasan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), peningkatan sarana prasarana pendidikan, penyediaan pendidik dan tenaga pendidik yang merata dan berkualitas, peningkatan budaya baca pada satuan pendidikan dan masyarakat, serta internalisasi nilai-nilai masyarakat melalui agama, budaya, dan kearifan lokal;
 - b. Penguatan pembangunan kesehatan paripurna utamanya mitigasi kematian ibu, bayi, dan balita, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, penguatan manajemen dan layanan kesehatan, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, peningkatan perlindungan kesehatan khususnya bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, peningkatan respon krisis kesehatan, peningkatan pengetahuan dan perilaku hidup sehat, peningkatan kebugaran masyarakat melalui peningkatan partisipasi olahraga masyarakat, penyediaan sarana prasarana olahraga memadai, peningkatan tenaga keolahragaan, serta penyelenggaraan even olahraga;
 - c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak, serta penyelenggaraan layanan terpadu korban kekerasan perempuan dan anak;
 - d. Pembangunan kependudukan berdasarkan 5 pilar pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan.

4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah, dengan fokus pada :
 - a. Pemantapan kualitas pelayanan publik termasuk penerapan pemerintahan digital guna mendukung pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, kolaboratif, dan inovatif, sarana pelayanan publik yang inklusif, open government melalui perkuatan keterbukaan informasi publik, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja, penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi secara terpadu berbasis elektronik, pengendalian internal secara berkala terhadap capaian target indikator kinerja (organisasi dan individu) dan keuangan sebagai dasar dalam pemberian besaran tunjangan kinerja, serta mendorong implementasi kebijakan penguatan sistem integritas internal instansi;
 - c. Perwujudan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik melalui optimalisasi struktur organisasi yang adaptif dan mampu menjalankan proses bisnis menuju tercapainya tujuan dan sasaran kinerja, pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja, serta optimalisasi peta proses bisnis pemerintahan daerah;
 - d. Penguatan kondusivitas wilayah melalui edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan termasuk pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini, serta penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal;
 - e. Pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah secara lebih progresif, realistis, dan kondusif melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan dana transfer, dan penguatan peran BUMD.

Memperhatikan hal-hal di atas, adanya dinamika kinerja pembangunan daerah di masa pandemi *COVID-19*, target kinerja dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, RKP Tahun 2022, serta masukan keterwakilan masyarakat, maka kinerja utama daerah yang akan dicapai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 merupakan suatu harmonisasi kondisi dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut maka proyeksi awal Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 yaitu :

1. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15,00 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80,00;
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 persen;
4. Indeks Gini sebesar 0,34;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80 persen;
6. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,00 – 5,60 persen;
7. Inflasi pada angka $3,0 \pm 1$ persen;
8. PDRB per kapita sebesar 43,32 juta rupiah;
9. Indeks Williamson sebesar 0,56;
10. Nilai Tukar Petani 104,05;
11. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,75;
12. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,21; dan

13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,57.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan

Berpedoman pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka arah kebijakan pembangunan Kota Pekalongan tahun 2023 ditujukan untuk ***“Penguatan SDM Yang Sejalan Dengan Optimalisasi Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Disertai Pengembangan Pemasaran Produk Barang Dan Jasa Unggulan”***, dengan arah kebijakan meliputi :

1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit, dengan fokus pada Peningkatan layanan dan penguatan fasilitas kesehatan sebagai upaya mitigasi terhadap kematian ibu, bayi dan balita, penurunan angka stunting serta pembudayaan GERMAS guna pencegahan dan pengendalian penyakit.
2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha, dengan fokus pada Perluasan jangkauan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal.
3. Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas, dengan fokus pada :
 - a. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar serta pendampingan anak putus sekolah untuk kembali bersekolah;
 - b. Optimalisasi penerapan kurikulum pendidikan karakter pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar.
4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha, dengan fokus pada Optimalisasi kurikulum pelatihan dan penentuan sasaran pelatihan kerja di BLK serta peningkatan koordinasi dengan dunia usaha dalam upaya perluasan kesempatan kerja.
5. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), dengan fokus pada :
 - a. Peningkatan peran perempuan dalam memberikan kontribusi pendapatan keluarga;
 - b. Peningkatan dan optimalisasi fungsi kelurahan layak anak.
6. Pemantapan kerjasama dengan *stakeholder* potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan fokus pada Revitalisasi kawasan kumuh prioritas di wilayah Pekalongan Utara.
7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan fokus pada :
 - a. Penataan infrastruktur drainase di wilayah Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat, operasional dan pemeliharaan sistem pengendali banjir dan rob, serta penataan kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat;
 - b. *Pilot project* penerapan produksi bersih pada sentra industri batik;

- c. Peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau melalui alih fungsi lahan milik pemerintah dan penambahan taman kota serta pengendalian pemanfaatan ruang kota.
8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan fokus pada :
 - a. Pembangunan jaringan distribusi dan perluasan penyediaan akses layanan air minum melalui sinergitas bersama Pemerintah Pusat dan Provinsi serta optimalisasi kinerja Perusda penyedia air minum;
 - b. Pengoptimalan sarpras dan kelembagaan pengelolaan persampahan di TPS3R dan perluasan TPA secara bertahap yang disertai dengan penguatan literasi pengelolaan persampahan kepada masyarakat;
 - c. Lanjutan pembangunan skeleton kawasan Pekalongan Baru dan rintisan akses jalan ke pelabuhan *onshore*.
9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing, dengan fokus pada Optimalisasi kelembagaan destinasi wisata laut dan destinasi wisata berbasis masyarakat.
10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan *event* seni dan budaya, dengan fokus pada Penguatan dan pengembangan kelompok seni dan budaya lokal melalui kolaborasi antar kelompok dan pelibatan stake holder yang diwujudkan dalam penyelenggaraan *event* budaya sebagai bagian dari peningkatan industri pariwisata.
11. Optimalisasi peran serta *stakeholder* dalam mewujudkan kondusivitas wilayah, dengan fokus pada Edukasi keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan termasuk pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini, serta penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal.
12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan fokus pada :
 - a. Pemantapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada aspek-aspek integrasi penyelenggaraan perencanaan dan pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, manajemen kepegawaian, serta penguatan kualitas pelayanan di bidang perijinan, kependudukan, kesehatan dan pendidikan;
 - b. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan terukur serta penguatan keterbukaan informasi publik;
 - c. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan;
 - d. Penguatan sistem pengendalian internal pemerintah sekaligus mendorong upaya mewujudkan zona integritas menuju WBK/WBBM;
 - e. Pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja, implementasi roadmap *merit system*.

Memperhatikan kondisi global, nasional, tantangan dan upaya penanganan dan pemulihan pasca pandemi *COVID-19*, target indikator makro pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a) Pertumbuhan ekonomi sebesar 2,48 - 2,83 persen;
- b) Laju inflasi sebesar 3 ± 1 persen;
- c) Tingkat kemiskinan sebesar 6,50 persen;
- d) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,52;
- e) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,48 persen.

Prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2023 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kota Pekalongan tahun 2023. Keterkaitan

antara permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis Dan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2023

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Tahun 2023	
Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Tata kelola pemerintahan	12	Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik
Banjir dan rob yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup	Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup	7	Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
Masih adanya kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman	6	Pemantapan kerjasama dengan stakeholder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
Belum optimalnya layanan infrastruktur perkotaan		8	Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
Masih tingginya AKABA, AKB dan AKI serta rendahnya capaian indeks keluarga sehat	Peningkatan Derajat Kesehatan (Masa Pandemi COVID-19)	1	Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit
Masih tingginya angka kemiskinan	Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran	2	Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha
Belum optimalnya pemerataan kesempatan kerja		4	Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha
Belum optimalnya mutu dan akses pendidikan serta penguatan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	3	Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Tahun 2023	
			pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas
Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)		5	Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
Belum optimalnya kapasitas SDM dan daya saing dalam meningkatkan perekonomian daerah	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal	9	Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing
Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan seni dan budaya	Pelestarian Budaya Lokal	10	Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya
Masih adanya konflik sosial	Kondusivitas Wilayah	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

Berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2023, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2023 yang bersifat strategis, berdampak luas pada pencapaian sasaran, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta lintas sektor dan lintas wilayah sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit				
	1. AKABA (Angka Kematian Balita)	1. 9,92 per 1.000 KH	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
	2. AKB (Angka Kematian Bayi)	2. 7,91 per 1.000 KH	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
	3. AKI (Angka Kematian Ibu)	3. 116,21 per 100.000 KH	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
	4. Indeks Keluarga Sehat	4. 0,3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinperpa
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	
			Program Pengendalian Penduduk	Dinsos P2KB
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha				
	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	2,00%	Program Penanganan Bencana	Dinsos P2KB

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
			Program Pemberdayaan Sosial	
Program Rehabilitasi Sosial				
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial				
3. Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas				
	1. Rata-Rata Lama Sekolah	9,43 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindik
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Program Pembinaan Perpustakaan	
	2. Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	100,00%	Program Pengembangan Kurikulum	Dindik
4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha				
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,54%	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinperinaker
			Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Program Hubungan Industrial	
5. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)				
	1. Indeks Pemberdayaan	59,14	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DPMPPA

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
	Gender (IDG)		Program Perlindungan Perempuan	
	2. Kategori Kota Layak Anak	Madya	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Perlindungan Khusus Anak	DPMPA
6. Pemantapan kerjasama dengan stakeholder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh				
	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	93,72%	Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinperkim DPUPR
7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup				
	1. Luas Genangan Banjir dan Rob	1.072,00 Ha	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	DPUPR
	2. Indeks Kualitas Air	35,36	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	DLH
	3. Indeks Kualitas Lahan	23,603	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLH

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
	4. Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	7 regulasi	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinperkim
Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee				
Program Penataan Bangunan Gedung			DPUPR	
Program Pengembangan Jasa Konstruksi				
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang				
8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan				
	1. Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	100,00%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
	2. Persentase pelayanan sampah	70,12%	Program Pengelolaan Persampahan	DLH
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPUPR
	3. Tingkat pelayanan jalan (<i>Level Of Service</i>)	B	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinhub
4. Persentase keterhubungan jalan	97,20%	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR	
9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing				
	Pertumbuhan ekonomi	2,48 - 2,83 %	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
			Program Promosi Penanaman Modal	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinperinaker
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dindagkop UKM
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
			Program Pengembangan Ekspor	
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
			Program Pengembangan UMKM	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKP
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinparbudpora
			Program Pemasaran Pariwisata	
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinperpa
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
			Program Perizinan Usaha Pertanian	
			Program Penyuluhan Pertanian	
10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya				
	Persentase Penyelenggaraan	91,11%	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinparbudpora

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
	Event Budaya		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
			Program Pembinaan Sejarah	
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
Program Pengelolaan Permuseuman				
11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah				
	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	100,00%	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik				
	1. Indeks SPBE	2,95	Program Aplikasi Informatika	Dinkominfo
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
2. IKM Kota	83,64		Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Program Pengelolaan Arsip	Dinarpus
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	
			Program Pendaftaran Penduduk	Dindukcapil
			Program Pencatatan Sipil	
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinparbudpora
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	DPMPPA
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DLH
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
			Hidup Untuk Masyarakat	
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
	3. Nilai KIP Tingkat Kota	96,00	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinkominfo
	4. Nilai SAKIP Kota	74,57	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua OPD
			Program Pemerintahan dan	Setda

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2023		
			Kesejahteraan Rakyat Program Perekonomian dan Pembangunan	
	5. Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK <i>Outcome</i>)	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	6. Indeks Merit System	240,00	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	7. Maturitas SPIP	3,40	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
	8. Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	5	Program Penyelenggaraan Pengawasan	

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

4.2.4. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prioritas pembangunan Kota Pekalongan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan, serta memperhatikan arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 dan arah kebijakan Nasional tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1	Pemantapan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	2	Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha
				4	Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2	Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing	1	Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing			3	Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			5	Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim			6	Pemantapan kerjasama dengan stakeholder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS PROVINSI		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS	NO	PRIORITAS
				7	Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
				8	Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
				10	Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	3	Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin berdikari	9	Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
				12	Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

Keterkaitan perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Pekalongan juga tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kedungsepur, Kawasan Purwomanggung dan Kawasan Bregasmalang, dimana terdapat 6 Program/Proyek di Kota Pekalongan yaitu :

- Pengendalian Banjir Sistem S. Loji/ Pekalongan/Kupang, Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan;
- Pengendalian Banjir Sistem Sungai Sengkarang, Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan;
- Pengendalian Banjir dan Rob, Kota Pekalongan dan Kab. Batang;
- Penyempurnaan Sistem Banjir dan Rob, Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan;
- Pengembangan TOD (Transit Oriented Development) Stasiun Pekalongan, Kota Pekalongan;
- Pembangunan RSUD dengan pelayanan unggulan Ibu dan Anak.

4.2.5. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil pelaksanaan reses, selanjutnya ditelaah dan dikaitkan dengan arah kebijakan dan program pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2023 sebagai bagian dari perencanaan pembangunan dalam aspek politis.

4.2.6. Inovasi Kebijakan Pembangunan

Inovasi daerah, sebagai ide dan gagasan baru yang didukung oleh ilmu pengetahuan serta kebijakan Daerah, menjadi hal penting dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Hal-hal baru yang dapat diangkat menjadi inovasi dalam pelayanan publik tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, Pemerintah Daerah juga dituntut untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi daerah

secara kontinyu. Hal ini dibuktikan dengan adanya inovasi daerah sebagai salah satu komponen dalam penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) yang diselenggarakan oleh Bappenas, dan salah satu kategori kinerja dalam pemberian Dana Insentif Daerah (DID).

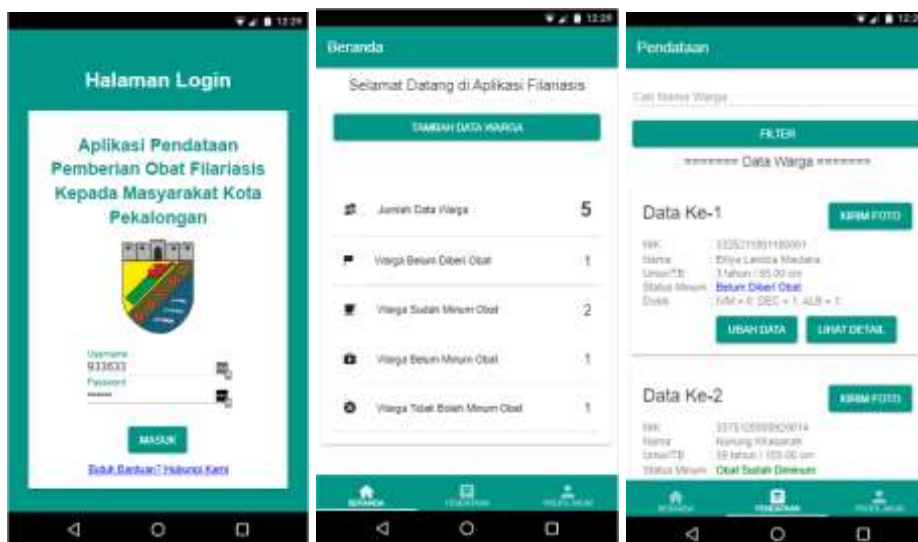
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan berupaya mendorong Perangkat Daerah untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Adapun inovasi yang sedang dan akan dikembangkan sebagai berikut :

1. SIM Filariasis

SIM Filariasis merupakan hasil penelitian dari fasilitasi Riset Bersama dengan judul Pengembangan *Dashboard* Eksekutif untuk Sistem Monitoring Penanganan Filariasis Kota Pekalongan. Latar belakang diciptakannya inovasi ini adalah fakta bahwa Kota Pekalongan menjadi salah satu kota di Jawa Tengah yang masih endemi penyakit kaki gajah. Dengan demikian Kota Pekalongan masih memiliki resiko penularan filariasis yang tinggi dan menyebabkan pemerintah harus terus melakukan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis.

Sejak tahun 2011 pemerintah telah memberikan obat massal pencegahan filariasis, namun tingkat kepatuhan minum obat masih rendah sehingga masih ditemukan beberapa kasus endemi filariasis. Pemberian obat filariasis kepada masyarakat saat ini dilakukan dengan cara membagikan kepada masyarakat, akan tetapi petugas tidak mengetahui apakah obat tersebut benar-benar dikonsumsi setelah dibagikan. Proses monitoring harus dilakukan dengan ketat agar masyarakat meminum obat filariasis yang telah dibagikan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, salah satu upaya yang diberikan adalah dengan membangun sistem monitoring tingkat kepatuhan masyarakat dalam meminum obat filariasis. Aplikasi dapat mencatat dan menampilkan profil masyarakat sasaran dan status pemberian obat. Data yang didapatkan dalam monitoring dapat digunakan oleh pemerintah dalam untuk menentukan kebijakan akan diambil dalam rangka penanganan penyakit filariasis di Kota Pekalongan.



Gambar 4.2 SIM Filariasis

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2021

2. SIM Pendataan Lengkap Rumah

Kota Pekalongan saat ini sedang mengembangkan Aplikasi Pendataan Rumah Berbasis Android yang akan digunakan untuk melakukan pendataan rumah se-Kota

Pekalongan. Pengembangan SIM Pendataan Rumah Lengkap ini merupakan pengembangan atas program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yang semula bernama “Membangun sistem database infrastruktur permukiman dalam rangka penanganan kawasan perumahan dan permukiman kumuh”. Perluasan program unggulan ini diperlukan untuk mendukung pemenuhan data rumah lintas sektoral lainnya yang penting dilakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program, antara lain pemenuhan data Standar Pelayanan Minimal (SPM), penyediaan infrastruktur perumahan dan permukiman, pendataan akses sanitasi dan air minum, dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.

Merujuk pada urgensi data, data rumah akan menjadi data prioritas yang harus disediakan dalam penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah pada Tahun 2022. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui koordinasi intensif antara BPS selaku Pembina Data, Bappeda selaku Koordinator Forum Data, Kominfo selaku Walidata, OPD terkait selaku Produsen Data, dan beberapa OPD lain sebagai calon penerima manfaat pendataan.

Proses yang dilakukan antara lain koordinasi intensif dalam rangka penentuan variable pendataan dan baseline data awal lintas stakeholder produsen dan pemanfaat data, pengajuan rekomendasi kegiatan statistik oleh produsen data, pendampingan intensif oleh Pembina data dan walidata, dan pengembangan aplikasi oleh pihak ketiga yang kompeten. Aplikasi ini disusun menggunakan basis data Nomer Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan basis data DTKS RTLH dari Dispertarum Provinsi Jawa Tengah. Proses identifikasi awal dilakukan melalui NOP PBB, yang selanjutnya dipilih kembali berdasarkan NIK kepala keluarga dari DTKS RLTH tersebut. Dengan basis data tersebut, petugas pendata akan melakukan pendataan sekaligus verifikasi data dalam baseline.

Sesuai dengan timeline yang rencananya akan disahkan dalam forum data, SIM Pendataan Rumah Lengkap ini akan digunakan dalam pendataan rumah se-Kota Pekalongan beserta tanah dan bangunan disekelilingnya pada Februari 2022 dan dilakukan update setiap 6 bulan sekali. Pendataan akan melibatkan pengurus RT dan RW se Kota Pekalongan dengan pendampingan fasilitator kelurahan. Selanjutnya, dengan data jumlah rumah yang sudah menggunakan prinsip satu data, OPD terkait lainnya dapat menambahkan variable yang dibutuhkan lainnya saat updating data.

Diharapkan dengan pengembangan aplikasi pendataan lengkap lintas stakeholder, hasil pendataan dapat memenuhi prinsip satu data, antara lain memenuhi standar data, metadata, data referensi, dan dapat dibagi-pakaikan. Setiap tahun, Forum data akan menetapkan data yang menjadi prioritas menjadi Data berprinsip satu data sehingga secara bertahap pada jangka menengah akan terbentuk Satu Data Terpadu Daerah yang dapat digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk Pemerintah dan Masyarakat Pekalongan.

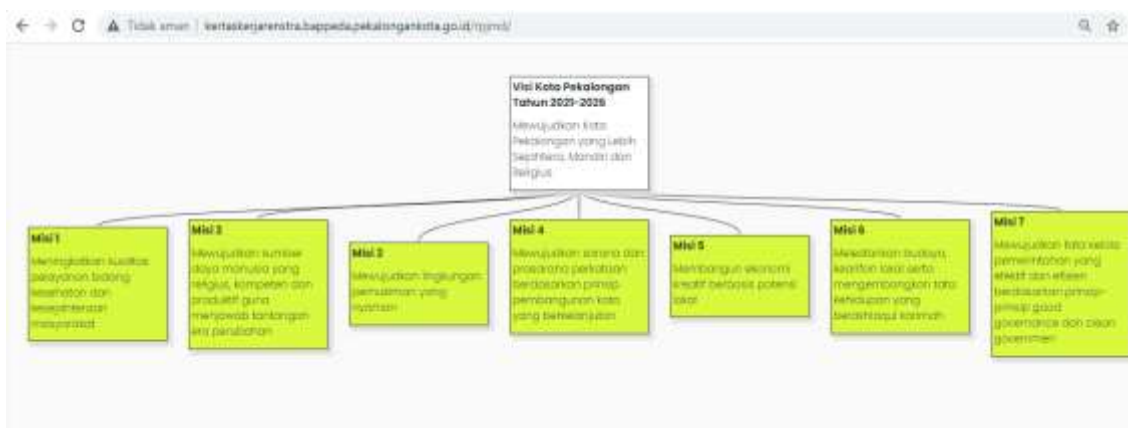
3. SIM Cascading

Tahun 2021 merupakan tahun yang cukup menantang dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Pekalongan menyusun RKPD tahun 2022 sekaligus RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai tindak lanjut atas dilantikannya Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada tanggal terpilih pada tanggal 26 Februari 2021. RKPD tahun 2022 dan RPJMD Tahun 2021-2026 disusun secara paralel mengingat penjadwalan sudah ditentukan di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan indikator sebagai tolok ukur kinerja disusun secara hati-hati dengan memperhatikan tingkatan (*leveling*) indikator, dimulai dari visi, misi, tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, tujuan OPD, indikator tujuan OPD, sasaran OPD, indikator sasaran OPD (IKU Renstra), program, indikator program, kegiatan, indikator

kegiatan, sub kegiatan, indikator sub kegiatan. Pagu indikatif disusun berdasarkan *output* sub kegiatan yang secara otomatis terakumulasi menjadi pagu sub kegiatan, pagu kegiatan dan pagu program. Target kinerja dan proyeksi anggaran disusun selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan periode RPJMD.

Kompleksitas dalam penyusunan indikator, target kinerja dan pagu indikatif tersebut mustahil dilakukan secara manual karena akan berisiko dalam akurasi datanya serta membutuhkan waktu yang lebih lama. Tuntutan penyelesaian dokumen diantara padatnya waktu penjadwalan menjadi tantangan tersendiri bagi tim penyusun. Berangkat dari pemikiran inilah maka tim penyusun mencoba berinovasi dengan membangun aplikasi sederhana yang disebut dengan SIM Cascading. Keunggulan aplikasi ini yaitu adanya kombinasi antara input data indikator, target kinerja dan pagu indikatif, yang kemudian disajikan ke dalam pohon kinerja RPJMD dan Renstra. Pohon kinerja ini menggambarkan alur kinerja indikator pembangunan secara berjenjang mulai dari indikator sub kegiatan sampai ke Visi Kepala Daerah. Dengan demikian, kompleksitas seperti yang telah diuraikan di atas dapat dipahami dengan mudah, dan tentunya mempercepat dalam penyusunan RKPD dan RPJMD.

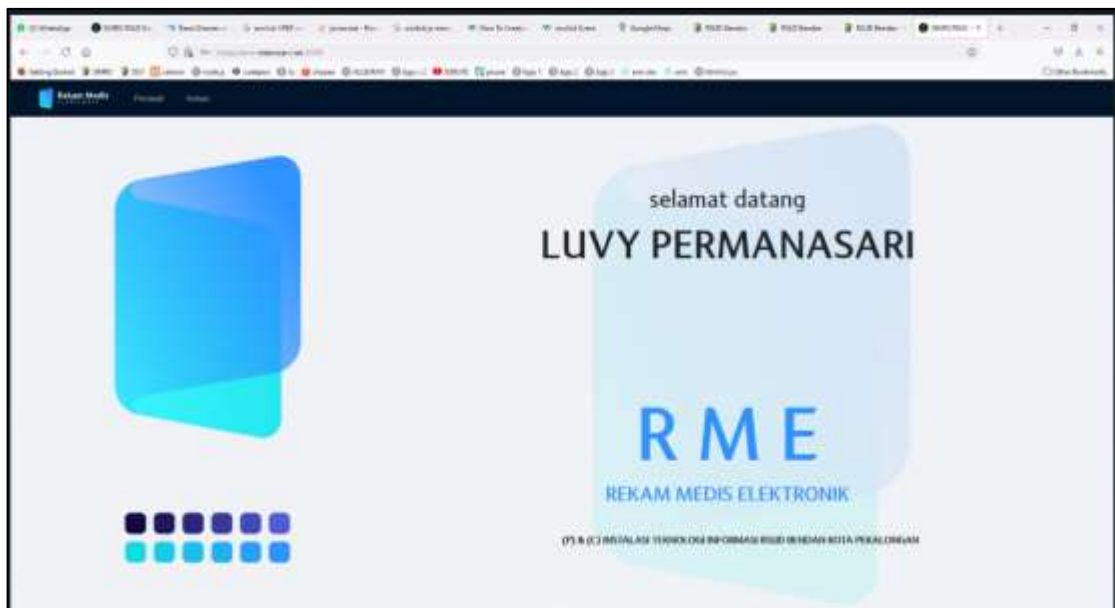


Gambar 4.3 SIM Cascading

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

4. E-RM (Rekam Medis)

RSUD Bendan sebagai satu-satunya rumah sakit milik Pemerintah Kota Pekalongan berupaya memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Digitalisasi dan sistem terkomputerisasi menjadi salah satu upaya percepatan dalam memberikan pelayanan. Salah satunya yaitu Rekam Medis Elektronik (RME) yang merupakan sistem informasi kesehatan yang berisi data sosial dan data medis pasien, serta dapat dilengkapi dengan sistem pendukung keputusan yang digunakan di RSUD Bendan.

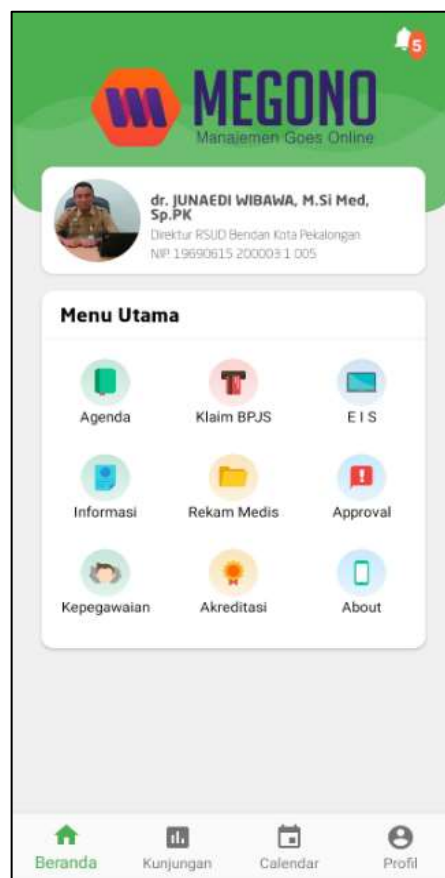


Gambar 4.4 Rekam Medis Elektronik (RME)

Sumber : RSUD Kota Pekalongan, 2021

5. Megono (Manajemen Go Online)

Aplikasi Manajemen Go Online (Megono) adalah aplikasi untuk manajemen RSUD Bendan yang memiliki fungsi *executive information system* (EIS).

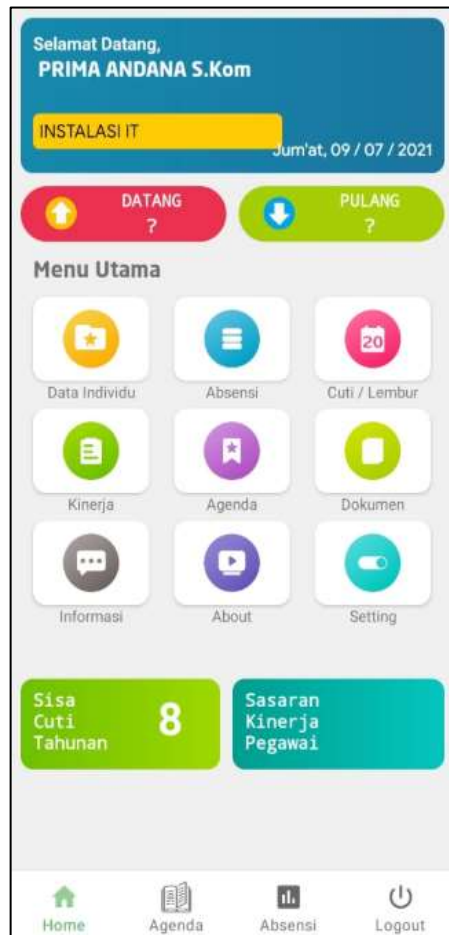


Gambar 4.5 Aplikasi Manajemen Go Online (Megono)

Sumber : RSUD Kota Pekalongan, 2021

6. Makaryo (Aplikasi Kepegawaian)

Aplikasi Manajemen Karyawan *Online* (Makaryo) adalah aplikasi untuk karyawan RSUD Bendan yang memiliki berbagai fungsi antara lain *update* data kepegawaian, pengajuan cuti *online*, presensi kehadiran dll.

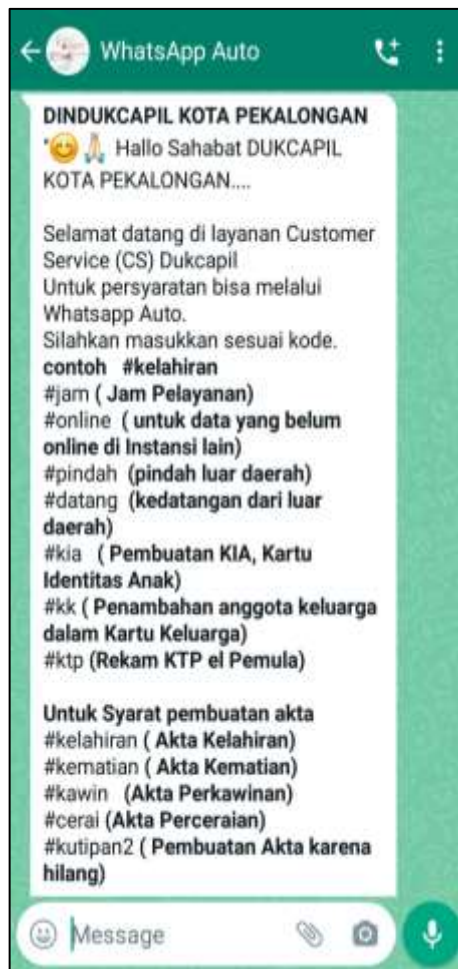


Gambar 4.6 Aplikasi Manajemen Karyawan *Online* (Makaryo)

Sumber : RSUD Kota Pekalongan, 2021

7. WhatsApp Auto

Sebuah layanan administrasi kependudukan yang dilakukan secara daring (*online*) dengan memanfaatkan aplikasi perpesanan otomatis *WhatsApp*. Layanan yang diberikan antara lain informasi waktu dan persyaratan layanan, lapor pindah atau datang, pembuatan KIA, penambahan anggota keluarga, dan perekaman e-KTP.



Gambar 4.7 WhatsApp Auto

Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan, 2021

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Indikasi rencana program Tahun 2023 berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan pada Tahun 2023, yang mempertimbangkan prioritas nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 guna mendukung pembangunan secara menyeluruh dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, dan 2 (dua) Unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan, 1 (satu) unsur pemerintahan umum, dan Non Urusan.

5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2023

5.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

5.1.1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendidikan

Fokus program adalah peningkatan sarpras pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase capaian SPM pendidikan sebesar 83,97 persen.

2. Program Pengembangan Kurikulum

Fokus program adalah peningkatan budaya literasi dan penyediaan kurikulum muatan lokal. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas sebesar 100 persen.

3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Fokus program adalah pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan penataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 100 persen.

5.1.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Fokus program adalah peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan jaminan kesehatan masyarakat, dan peningkatan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD dan penyediaan layanan kesehatan masyarakat di puskesmas. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota sebesar 90 Persen, Presentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome) sebesar 100

Persen, dan Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar sebesar 80 Persen, Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar sebesar 65,00 Persen, Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat Kabupaten/Kota sebesar 100 persen.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Fokus program adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek sebesar 94 Persen dan Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan sebesar 45 persen.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Fokus program adalah Pengendalian, pengawasan dan tindak lanjut pengawasan terhadap sarana farmasi dan tempat pengelolaan makanan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Sarana Farmasi yang memenuhi standar sebesar 100 Persen, Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran sebesar 96 Persen, dan Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat sebesar 96 Persen.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Fokus program adalah Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan lintas sektor. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Rumah Tangga Sehat sebesar 92 Persen.

5.1.1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Fokus program adalah pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dalam rangka pengendalian banjir dan rob, serta pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik sebesar 93,10 persen.

2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Fokus program adalah penguatan koordinasi pengelolaan dan pengembangan Sistem penyediaan air minum (SPAM) di Daerah dan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan. Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah sebesar 88,39 Persen.

3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

Fokus program adalah Penyediaan Sarana Persampahan di Wilayah Kota, dan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional sebesar 40 persen.

4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Fokus program adalah Pengelolaan, pengembangan, pemeliharaan dan rehabilitasi Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome) sebesar 11,07 persen.

5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Fokus program adalah pembangunan dan rehabilitasi sistem drainase perkotaan dan drainase lingkungan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 68,47 persen.

6. Program Penataan Bangunan Gedung

Fokus program adalah Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG. Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota sebesar 17,84 persen.

7. Program Penyelenggaraan Jalan

Fokus program adalah rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK *Outcome*) sebesar 83,30 persen.

8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Fokus program adalah penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi dan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Kabupaten/Kota, serta penyusunan data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi sebesar 13,20 persen.

9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Fokus program adalah penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) kab/kota dan pembangunan aplikasi sistem informasi penataan ruang. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota sebesar 100 persen.

5.1.1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan

Fokus program adalah penyediaan rumah layak huni bagi warga, pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana, dan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni sebesar 91,35 persen.

2. Program Kawasan Permukiman

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, peningkatan kualitas rtlh dan pembangunan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh. Indikator yang akan dicapai yaitu Luas kawasan permukiman kumuh sebesar 291,47 hektar.

3. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Fokus program adalah perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. Indikator yang akan dicapai yaitu Luas kawasan permukiman tidak kumuh sebesar 1.856,41 hektar.

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Fokus program adalah Penyediaan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum). Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK *Outcome*) sebesar 14,48 persen.

5.1.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Fokus program adalah optimalisasi penanganan gangguan trantibum. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK *Outcome*) sebesar 64,00 persen.

2. Program Penanggulangan Bencana

Fokus program adalah peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase korban bencana alam yang ditangani sebesar 100 persen.

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Fokus program adalah optimalisasi pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK *Outcome*) sebesar 100 Persen.

5.1.1.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial

Fokus program adalah Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Indikator yang akan dicapai Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan sebesar 58 Persen.

2. Program Rehabilitasi Sosial

Fokus program adalah peningkatan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis). Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK *Outcome*) sebesar 100 Persen.

3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Fokus program adalah Peningkatan perlindungan dan layanan jaminan sosial bagi keluarga miskin. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial sebesar 56,69 Persen.

4. Program Penanganan Bencana

Fokus program adalah fasilitasi kegiatan bantuan untuk korban bencana alam dan fasilitasi bantuan sosial bagi kelompok rentan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM) sebesar 100 Persen.

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Fokus program adalah rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan sebesar 100 Persen.

5.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

5.1.2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Fokus program adalah peningkatan pelatihan kerja bagi buruh rokok dan penganggur dan perawatan alat-alat pelatihan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK *Outcome*) sebesar 0,42 persen.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Fokus program adalah perluasan kesempatan kerja dan pengelolaan informasi pasar kerja. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK *Outcome*) sebesar 23,93 persen.

3. Program Hubungan Industrial

Fokus program adalah penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan dan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK *Outcome*) sebesar 46,80 persen.

5.1.2.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pug kewenangan Kabupaten/Kota, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota, serta penguatan, pengembangan, dan peningkatan sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender sebesar 5,55 Persen.

2. Program Perlindungan Perempuan

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK *Outcome*) sebesar 23,99 Persen.

3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Fokus program adalah advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Dekelra (desa/kelurahan layak anak) sebesar 33,33 Persen.

4. Program Perlindungan Khusus Anak

Fokus program adalah pencegahan kekerasan terhadap anak. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengaduan kasus anak yang terlayani sebesar 100 Persen.

5.1.2.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Fokus program adalah penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya dan penyediaan cadangan pangan daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase cadangan pangan daerah sebesar 4,40 Persen.

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Fokus program adalah penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan sebesar 100 persen.

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Fokus program adalah ketersediaan pangan segar dan pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan sebesar 83,20 persen.

5.1.2.4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani sebesar 100 Persen.

2. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

Fokus program adalah koordinasi dan tindak lanjut ganti kerugian program tanah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee sebesar 50 persen.

5.1.2.5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Fokus program adalah peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase jumlah limbah yang diolah sebesar 40,95 persen.

2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ruang Terbuka Hijau sebesar 2,919 persen.

3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Fokus program adalah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan sebesar 13,33 persen.

4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Fokus program adalah Fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pengawasan dan penerapan sanksi terkait izin lingkungan dan/atau izin PPLH. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH sebesar 16,67 persen.

5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Fokus program adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup sebesar 50 persen.

6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Fokus program adalah penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase perolehan penghargaan bidang LH sebesar 75 persen.

7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Fokus program adalah pengelolaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti sebesar 100 persen.

8. Program Pengelolaan Persampahan

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan dan penanganan sampah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengelolaan sampah sebesar 0,28 persen.

5.1.2.6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pendaftaran Penduduk

Fokus program adalah peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk (KTP elektronik dan Kartu Keluarga). Indikator yang akan dicapai yaitu Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk sebesar 83,53 persen.

2. Program Pencatatan Sipil

Fokus program adalah peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil (akta kelahiran anak, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian). Indikator yang akan dicapai yaitu Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil sebesar 93,55 persen.

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK *Outcome*) sebanyak 9 OPD.

5.1.2.7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Fokus program adalah peningkatan kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketercapaian Fasilitas Kerjasama TNI dan kelurahan sebesar 50,00 Persen.

2. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Fokus program adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kelurahan dengan kriteria (cepat berkembang) sebesar 59,26 Persen.

3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Fokus program adalah pemanfaatan teknologi tepat guna di kelurahan, peningkatan kapasitas fasilitator, fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat dan tim penggerak PKK. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat sebesar 96,35 Persen.

5.1.2.8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Penduduk

Fokus program adalah penyediaan data dan informasi keluarga, serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga sebesar 100 Persen.

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Fokus program adalah pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta promosi pengendalian penduduk dan kb sesuai kearifan budaya lokal dan juga penyediaan sarana penunjang pelayanan KB. Indikator yang akan dicapai yaitu Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun sebesar 7,80 Persen.

3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Fokus program adalah pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga dan penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya. Indikator yang akan dicapai yaitu *Unmet Need* KB sebesar 15 Persen.

5.1.2.9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Fokus program adalah penyediaan fasilitas LLAJ, pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin), pelaksanaan pelayanan uji berkala, pengelolaan terminal penumpang tipe c, dan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ sebesar 92 persen, Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK *Outcome*) dengan ratio sebesar 0,44, Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala sebesar 0,75 persen.

5.1.2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Fokus program adalah pengelolaan informasi dan komunikasi publik, layanan pengaduan, serta penyelenggaraan hubungan media dan masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase penyelesaian permohonan informasi publik sebesar 100 Persen.

2. Program Aplikasi Informatika

Fokus program adalah implementasi SPBE, penguatan sistem jaringan intra pemerintahan, pengelolaan aplikasi dan pusat data. Indikator yang akan dicapai yaitu Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan indeks sebesar 3,00.

5.1.2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Fokus program adalah pengawasan dan pemeriksaan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi juga keanggotaannya yang berada di wilayah Kota Pekalongan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase koperasi yang berkualitas (IKK *Outcome*) sebesar 30,94 persen.

2. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Fokus program adalah peningkatan pemahaman, pengetahuan serta keterampilan guna peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi anggota koperasi yang wilayah keanggotaannya di Kota Pekalongan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota sebesar 58,31 persen.

3. Program Pengembangan UMKM

Fokus program adalah pengembangan umkm yang naik kelas dengan cara kemudahan izin, fasilitasi penguatan modal, pengembangan rantai pasokan usaha mikro serta skema jaringan pemasaran. Indikator yang akan dicapai yaitu Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK *Outcome*) sebesar 12,06 persen.

5.1.2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Fokus program adalah penetapan kebijakan mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal serta penyusunan rencana umum penanaman modal. Indikator yang akan dicapai yaitu Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 1 Dokumen.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Fokus program adalah penyelenggaraan promosi penanaman modal. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100 persen.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Fokus program adalah pelayanan serta pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal secara terpadu satu pintu. Indikator yang akan dicapai yaitu Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal sebesar 2500 dokumen.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Fokus program adalah pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan penanaman modal. Indikator yang akan dicapai yaitu Nilai Investasi Baru pertahun sebesar Rp.6.680.000.000.

5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Fokus program adalah pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal secara terpadu satu pintu. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100 persen.

5.1.2.13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Fokus program adalah peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina sebesar 93,69 Persen.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Fokus program adalah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan kejuaraan, partisipasi dan keikutsertaan dalam pekan olahraga. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor sebesar 34,29 persen.

5.1.2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan SDTD (Satu Data Terpadu Daerah). Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral sebesar 100 Persen.

5.1.2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Fokus program adalah fasilitasi penilaian mandiri Indeks keamanan informasi dan lisensi sertifikat TLS. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan (*penetration testing*) sebesar 2,80 Persen.

5.1.2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kebudayaan

Fokus program adalah perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan tradisi budaya. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan sebesar 100 persen.

2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Fokus program adalah peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional dan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi sebesar 100 persen.

3. Program Pembinaan Sejarah

Fokus program adalah peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya sebesar 100 Persen.

4. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Fokus program adalah inventarisasi benda cagar budaya. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK *Outcome*) sebesar 92,20 Persen.

5. Program Pengelolaan Permuseuman

Fokus program adalah perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu, peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum dan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengunjung museum batik sebesar 4,66 Persen.

5.1.2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Perpustakaan

Fokus program adalah pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan, pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka, pembinaan perpustakaan dan sosialisasi budaya baca serta literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan

khusus serta masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun) dengan indeks sebesar 16,09.

5.1.2.18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Arsip

Fokus program adalah pemeliharaan, penyusutan dan pengawasan arsip dinamis, akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis serta pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik sebesar 46,67 Persen dan Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK *Outcome*) dengan indeks sebesar 45.

2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Fokus program adalah penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun, penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan kelurahan serta penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK *Outcome*) sebesar 100 Persen.

5.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

5.1.3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Fokus program adalah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta Pemberdayaan Nelayan Kecil. Indikator yang akan dicapai yaitu Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI sebesar 1 persen dan Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI sebesar 1 persen.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Fokus program adalah pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil, serta penyediaan sarana prasarana pembudidayaan ikan. Indikator yang akan dicapai yaitu Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya sebesar 1 persen.

3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Fokus program adalah pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil. Indikator yang akan dicapai yaitu Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan sebesar 12,2 persen dan Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant) sebanyak 2 pelaku usaha.

5.1.3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Fokus program adalah pengelolaan destinasi, serta pengembangan daya tarik wisata. Indikator yang akan dicapai yaitu Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK *Outcome*) sebesar 11 Persen.

2. Program Pemasaran Pariwisata

Fokus program adalah penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya, serta peningkatan kerjasama kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK *Outcome*) sebesar 31,98 Persen.

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Fokus program adalah pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi sebesar 30,30 persen.

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Fokus program adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar sebesar 40 persen.

5.1.3.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Fokus program adalah pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana dan sarana pendukung pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu Nilai produksi pertanian pertahun sebesar Rp. 55.671.720.000 dan Nilai produksi peternakan pertahun sebesar Rp. 191.907.000.000.

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Fokus program adalah pembangunan, rehabilitasi serta pemeliharaan prasarana pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian sebesar 100 persen.

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Fokus program adalah operasional RPH, pemantauan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular sebesar 5 persen.

4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Fokus program adalah pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota sebesar 100 persen.

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Fokus program adalah fasilitasi atau rekomendasi izin usaha pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki izin sebesar 50 persen.

6. Program Penyuluhan Pertanian

Fokus program adalah pelaksanaan penyuluhan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun sebesar 5 persen.

5.1.3.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Fokus program adalah fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK *Outcome*) sebesar 75,42 persen.

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Fokus program adalah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya sebesar 81,25 persen.

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Fokus program adalah pengendalian dan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauannya sebesar 88 persen.

4. Program Pengembangan Ekspor

Fokus program adalah pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase peningkatan volume ekspor sebesar 7,60 persen.

5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Fokus program adalah pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK *Outcome*) sebesar 77,99 persen.

6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Fokus program adalah pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK *Output*) sebesar 4,26 persen.

5.1.3.5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Fokus program adalah fasilitasi penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan pelaksanaan pemberdayaan Industri Kecil Menengah

(IKM). Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK *Outcome*) sebesar 20,43 persen.

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Fokus program adalah fasilitasi pengawasan perijinan bidang industri. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK *Outcome*) sebesar 24 persen.

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Indikator yang akan dicapai yaitu Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini (IKK *Outcome*) sebesar 100 persen.

5.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

5.1.4.1. Sekretariat Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Fokus program adalah penataan administrasi pemerintahan, fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual, fasilitasi penyusunan produk hukum, bantuan hukum, dan pengelolaan informasi hukum. Indikator yang akan dicapai yaitu Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu sebesar 100 persen, Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif sebesar 100 persen, dan Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat sebesar 100 persen.

2. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian serta perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil. Indikator yang akan dicapai yaitu Presentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan sebesar 100 Persen, Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK *Outcome*) sebesar 6 persen, dan Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa sebesar 100 persen.

5.1.4.2. Sekretariat DPRD

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Fokus program adalah fasilitasi penyusunan perda dan pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu, peningkatan kapasitas anggota legislative dan fasilitasi penjangkauan aspirasi (reses). Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Perda yang ditetapkan sebesar 100 persen dan Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu sebesar 100 persen.

5.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

5.1.5.1. Perencanaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Fokus program adalah penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu serta penyediaan data perencanaan pembangunan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu sebesar 100 Persen, Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu sebesar 100 Persen, dan Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu sebesar 100 Persen.

2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Fokus program adalah penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan, sosial dan budaya, penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah, serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud sebesar 100 Persen, Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian sebesar 100 persen, dan Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah sebesar 100 persen.

5.1.5.2. Keuangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Fokus program adalah koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, KUA dan PPAS, perubahan KUA dan perubahan PPAS, koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD, koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, kas daerah, koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya, pengelolaan kas daerah, koordinasi, pelaksanaan dan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd bulanan, triwulanan dan semesteran, konsolidasi laporan keuangan skpd, blud dan laporan keuangan pemerintah daerah, koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd provinsi, Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK *Outcome*) sebesar 8,08 Persen.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu Indeks pengelolaan aset baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK *Outcome*) sebesar 100 Persen.

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK *Outcome*) sebesar 5 Persen.

5.1.5.3. Kepegawaian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Kepegawaian Daerah

Fokus program adalah pengembangan kompetensi ASN, pengelolaan *Assesment Center*, pengelolaan Pendidikan lanjutan ASN, dan monitoring evaluasi kinerja ASN. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase PNS berkembang karier sebesar 50 persen, Tingkat Pelaporan Kinerja ASN sebesar 100 persen, Persentase Keterisian Jabatan sebesar 90 persen, dan Persentase Keterpenuhan Formasi ASN sebesar 80 Persen.

5.1.5.4. Pendidikan Dan Pelatihan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Fokus program adalah fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase PNS berkembang kompetensinya sebesar 100 persen.

5.1.5.5. Penelitian Dan Pengembangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Fokus program adalah pelaksanaan riset unggulan daerah serta pengelolaan jurnal dan website kelitbangan, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah, dan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta penelitian, pengembangan, dan perekayasa di bidang teknologi dan inovasi. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD sebesar 100 persen, Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA) sebesar 73 persen, dan Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan sebesar 100 persen.

5.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

5.1.6.1. Inspektorat Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Fokus program adalah penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah kinerja pemerintah daerah, keuangan pemerintah daerah dan monitoring evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan sebesar 85 persen.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Fokus program adalah perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, fasilitasi asistensi dan penilaian reformasi birokrasi, dan monitoring evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Indikator yang akan dicapai yaitu Level Kapabilitas APIP dengan nilai sebesar 3.

5.1.7. Unsur Kewilayahan

5.1.7.1. Kecamatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Fokus program adalah koordinasi pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Utara sebesar 100 Persen, Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Selatan sebesar 100 Persen, Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Barat sebesar 100 Persen, dan Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Timur sebesar 100 Persen.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Fokus program adalah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan di kecamatan. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara sebesar 100 Persen, Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Selatan sebesar 100 Persen, Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat sebesar 100 Persen, dan Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur sebesar 100 Persen, serta Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan sebesar 100 persen.

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Fokus program adalah fasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara sebesar 100 Persen, Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Selatan sebesar 100 Persen, Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Barat sebesar 100 Persen, dan Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Timur sebesar 100 Persen.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Fokus program adalah fasilitasi upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan Forkopimca (Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan). Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat kinerja Pemerintahan Umum Wilayah Utara sebesar 100 persen, Tingkat kinerja Pemerintahan Umum Wilayah Selatan sebesar 100 persen, Tingkat kinerja Pemerintahan Umum Wilayah Barat sebesar 100 persen, dan Tingkat kinerja Pemerintahan Umum Wilayah Timur sebesar 100 persen.

5.1.8. Unsur Pemerintahan Umum

5.1.8.1. Kesatuan Bangsa Dan Politik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Fokus program adalah pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, penguatan ideologi dan bela negara. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan sebesar 100 persen.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Fokus program adalah pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik. Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik sebesar 16 lembaga.

3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Fokus program adalah pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat, serta penanganan konflik ormas. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan sebesar 100 persen.

4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Fokus program adalah koordinasi, pembinaan bidang Ketahanan Ekonomi dan sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebesar 100 persen.

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Fokus program adalah optimalisasi penanganan kejadian terkait konflik sosial dan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial sebesar 100 persen.

5.1.9. Non Urusan

5.1.9.1. Non Urusan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Fokus program adalah Penyediaan laporan capaian kinerja, layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah serta penyediaan layanan BLUD. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja sebesar 100 Persen, Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100 Persen, Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah sebesar 100 Persen, dan Persentase ketersediaan layanan BLUD sebesar 100 Persen.

**Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						282.812.611.000							279.562.877.000		
1.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	166.665.962.000						100 persen	167.327.264.000		
1.1.1. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	152.973.000						100 persen	149.683.000		
1.1.1. 2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 dokume n	4.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	2 dokum en	3.000.000	Dinas Pendidikan	
1.1.1. 2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokume n	3.973.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	2 dokum en	2.683.000	Dinas Pendidikan	
1.1.1. 2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan monitoring dan evaluasi perangkat daerah				12 bulan	145.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	144.000.000	Dinas Pendidikan	
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokume n										4 dokum en
		Jumlah dokumen perhitungan capaian SPM Pendidikan yang tersusun				1 dokume n										1 dokum en
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokume n										2 dokum en

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok RTP, 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokume n						5 dokum en			
1.1.1. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	165.078.542.000						100 persen	165.773.986.000	
1.1.1. 2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	164.545.792.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Pendidik an	12 bulan	165.241.236.000	Dinas Pendidikan
								DAK Non Fisik - TPG PNSD							
								DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD							
1.1.1. 2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	529.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Pendidik an	12 bulan	529.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.1. 2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 bulan	3.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Pendidik an	1 bulan	3.750.000	Dinas Pendidikan
1.1.1. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah kertas kerja aset yang dihasilkan	100 persen		100 persen	100 persen	88.210.000						100 persen	86.312.000	
1.1.1. 2.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kertas kerja aset yang dihasilkan				93 laporan	88.210.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Pendidik an	93 lapora n	86.312.000	Dinas Pendidikan
1.1.1. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	8.820.000						100 persen	8.632.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.1.1. 2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota				2 kali	8.820.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Pendidik an	2 kali	8.632.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah pakaian dinas yang diadakan				2 buah							2 buah		
1.1.1. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	571.415.000						100 persen	559.124.000	
1.1.1. 2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor				12 bulan	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Pendidik an	12 bulan	10.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.1. 2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	110.415.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Pendidik an	12 bulan	110.124.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor				5 unit							5 unit		
1.1.1. 2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	11.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Pendidik an	12 bulan	11.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.1. 2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	72.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Pendidik an	11 bulan	72.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.1. 2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Pendidik an	12 bulan	13.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.1.1. 2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar /majalah dan peraturan perundang- undangan				12 bulan	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Pendidik an	12 bulan	3.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.1. 2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				175 org/kl	150.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Pendidik an	175 org/kl	150.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.1. 2.06.1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah fasilitasi dukungan SPBE yang dilaksanakan				12 bulan	200.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Pendidik an	12 bulan	190.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.1. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen		100 persen	100 persen	570.345.000						100 persen	558.078.000	
1.1.1. 2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	7.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	7.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.1. 2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	285.045.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	272.778.000	Dinas Pendidikan
1.1.1. 2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	278.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindik	12 bulan	278.300.000	Dinas Pendidikan
1.1.1. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen		100 persen	100 persen	195.657.000						100 persen	191.449.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.1.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				40 unit	50.657.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Pendidikan	40 unit	50.449.000	Dinas Pendidikan
1.1.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				4 unit	95.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Pendidikan	4 unit	91.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Pendidikan	12 bulan	50.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM pendidikan	100 persen		76,37 persen	83,97 persen	101.163.120.000						83,97 persen	96.484.096.000	
1.1.2.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (IKK Outcome / SPM)	100 persen		93,49 persen	97,5 persen	39.078.449.000						97,5 persen	38.861.916.000	
1.1.2.2.01.4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang UKS SD/MI yang dibangun				4 ruang	376.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pningktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pningktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	4 ruang	470.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.2.2.01.5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan SD/MI yang dibangun				8 ruang	2.000.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	3. Pemerataan & pningktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng	SD	8 ruang	2.000.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
									Alokasi Umum	Berdaya Saing	pnngktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.				
1.1.2. 2.01.6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah fasilitas parkir SD/MI yang dibangun				2 ruang	1.373.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	2 ruang	1.373.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah halaman SD/MI yang ditinggikan				3 ruang		DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	3 ruang						
		Jumlah kantin SD/MI yang dibangun				2 ruang			2 ruang						
		Jumlah KM/WC SD/MI yang dibangun				20 ruang			20 ruang						
		Jumlah lapangan olahraga SD/MI yang dibangun				2 ruang			2 ruang						
		Jumlah pagar SD/MI yang dibangun				2 ruang			2 ruang						
		Jumlah ruang ibadah SD/MI yang dibangun				2 ruang			2 ruang						
1.1.2. 2.01.8		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas SD/MI yang direhab				60 ruang	6.500.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
								DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
										lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.					
1.1.2. 2.01.9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru SD/MI yang direhab				6 ruang	880.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	6 ruang	1.660.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah ruang kepala SD/MI yang direhab				2 ruang			DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD				2 ruang		
1.1.2. 2.01.1 1	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan SD/MI yang direhab				8 ruang	2.000.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	8 ruang	1.500.000.000	Dinas Pendidikan
									DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD						
1.1.2. 2.01.1 2	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah fasilitas parkir SD/MI yang direhab				1 pekerjaa n	1.035.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan	SD	1 pekerj aan	555.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah KM/WC SD/MI yang direhab				20 ruang			DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD				20 ruang		
		Jumlah lapangan olahraga SD/MI yang direhab				1 pekerjaa							1 pekerj		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah mushola SD/MI yang direhab				n					3 gedun g				
		Jumlah pagar SD/MI yang direhab				3 pekerjaa n					3 pekerj aan				
1.1.2. 2.01.1 4	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebeleir SD/MI yang diadakan				20 paket	700.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	20 paket	1.050.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.2. 2.01.1 5	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah SD yang difasilitasi pengadaan alat rumah tangga sekolah				71 SD	177.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	71 SD	177.500.000	Dinas Pendidikan
1.1.2. 2.01.1 6	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah SD yang difasilitasi Pengadaan Perlengkapan Sekolah				71 SD	355.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan	SD	71 SD	355.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
										kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.					
1.1.2. 2.01.1 7	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah peserta didik jenjang SD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah (IKK Output)				1900 siswa	300.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	1900 siswa	300.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.2. 2.01.1 8	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah SD yang difasiliitasi pemeliharaan rutin bangunan gedung sekolah				71 SD	710.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	71 SD	710.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.2. 2.01.1 9	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SD yang difasilitasi pemeliharaan rutin sarana prasarana utilitas sekolah				71 SD	106.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan.	SD	71 SD	106.500.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
										pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.					
1.1.2. 2.01.2 1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan				6600 siswa	3.405.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	6600 siswa	3.695.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah peserta didik yang difasilitasi biaya personil jenjang pendidikan dasar				1900 siswa			1900 siswa						
1.1.2. 2.01.2 2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa SD yang diadakan				71 paket	2.156.305.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	71 paket	2.156.305.000	Dinas Pendidikan
								DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD							
1.1.2. 2.01.2 3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah SD/MI yang difasilitasi penyelenggaraan AKM				102 SD	306.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan.	SD	102 SD	306.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah SD yang difasiliitasi penyelenggaraan survey karakter				102 SD			102 SD						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
										pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.					
1.1.2. 2.01.2 4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah SD yang difasilitasi penyusunan EDS				71 SD	142.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srm prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	71 SD	142.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah SD yang difasilitasi penyusunan RAPBS				102 SD						102 SD			
1.1.2. 2.01.2 5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah ajang apresiasi minat, bakat dan kreatifitas siswa yang diselenggarakan				6 kegiatan	580.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srm prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	6 kegiat an	580.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Jenis Kompetisi Jenjang SD Tk Kota yang difasilitasi				5 kegiatan						5 kegiat an			
		Jumlah lomba yang dilaksanakan dalam pesta siaga tingkat kecamatan				7 lomba						7 lomba			
		Jumlah lomba yang dilaksanakan dalam pesta siaga tingkat kota				7 lomba						7 lomba			
		Jumlah PTK yang difasilitasi pelatihan khusus pembinaan minat , bakat dan kreatifitas siswa				15 orang						15 orang			
		Jumlah siswa berprestasi yang diberi apresiasi				50 siswa						50 siswa			
		Jumlah siswa yang difasilitasi pelatihan khusus minat, bakat dan kreatifitas				30 siswa						30 siswa			
1.1.2.		Penyediaan Pendidik dan	Jumlah guru pendamping				6 orang	2.684.800.000	Kota Pekalongan,			Dana	Meningkatkan	3. Pemerataan &	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.01.2 6	Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	khusus yang difasilitasi jasa pendidik						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pntahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		orang		Pendidikan
		Jumlah pendidik BTQ SD/MI yang difasilitasi bantuan transport	1000 orang						1000 orang						
1.1.2. 2.01.2 7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang difasilitasi pencermatan dokumen pola pengembangan kakir pendidik/PTKnya				71 sekolah	7.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pntahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	71 sekola h	7.100.000	Dinas Pendidikan
1.1.2. 2.01.2 8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah bimtek kelembagaan dan manajemen sekolah yang diselenggarakan				3 kegiatan	303.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pntahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	3 kegiat an	303.500.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Bimtek/sosialisasi Dapodik yang diselenggarakan	2 kegiatan			2 kegiat an									
		Jumlah Rakor/Raker Pengawas SD yang difasiitasi pelaksanaannya	2 sekolah			2 sekola h									
		Jumlah SD yang difasilitasi pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	71 sekolah			71 sekola h									
		Jumlah SD yang terfasilitasi	71			71									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
		Nasional								Daerah					
		Survai Lingkungan Belajar				sekolah						sekola h			
1.1.2. 2.01.2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah SD Negeri yang mendapatkan BOS				71 Sekolah	12.922.744.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	71 Sekola h	12.922.744.000	Dinas Pendidikan
									DAK Non Fisik - BOS Reguler						
1.1.2. 2.01.3 0	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah bimtek/sosialisasi BOS SD yang diselenggarakan				1 kali	58.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD	1 kali	58.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah SD yang difasilitasi penyusunan laporan BOS				102 sekolah						102 sekola h			
1.1.2. 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (IKK Outcome / SPM)	100.00 persen		82.04 persen	90 persen	36.444.505.000					90 persen	32.814.991.000		
1.1.2. 2.02.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah USB yang dibangun				1 gedung	4.000.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn &	SMP	1 gedun g	-	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
										pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.					
1.1.2. 2.02.2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru SMP/MTs yang dibangun				8 ruang	2.000.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	8 ruang	2.000.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.2. 2.02.1 2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah halaman SMP/MTs yang ditinggikan				1 pekerjaa n	1.155.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	1 pekerj aan	1.565.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah KM/WC SMP/MTs yang dibangun			20 ruang				20 ruang						
		Jumlah lapangan olahraga SMP/MTs yang dibangun			1 pekerjaa n				1 pekerj aan						
		Jumlah Pagar SMP/MTs Sekolah yang dibangun			1 pekerjaa n				1 pekerj aan						
		Jumlah ruang ibadah SMP/MTs yang dibangun			2 ruang				2 ruang						
		Jumlah ruang konselling SMP/MTs yang dibangun			1 ruang				1 ruang						
		Jumlah ruang organisasi kesiswaan SMP/MTs yang dibangun			1 ruang				1 ruang						
1.1.2.		Rehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas yang					42 ruang	5.200.000.000				Kota Pekalongan,		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.02.1 4	Ruang Kelas Sekolah	direhab						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	pningktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pningktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		ruang		Pendidikan
									DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP						
1.1.2. 2.02.1 5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru yang direhab				5 ruang	500.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pningktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pningktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	5 ruang	500.000.000	Dinas Pendidikan
												DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP			
1.1.2. 2.02.1 6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang direhab				3 ruang	105.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pningktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pningktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	3 ruang	105.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.2. 2.02.1 7	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan SMP/MTs yang direhab				5 ruang	1.250.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	3. Pemerataan & pningktn kompetensi penddk & tenaga	SMP	5 ruang	1.000.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.				
								DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP							
1.1.2. 2.02.1 8	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium SMP/MTs yang direhab				4 ruang	1.200.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	4 ruang	900.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.2. 2.02.2 2	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir SMP/MTs yang direhab				3 pekerjaa n	150.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	3 pekerj aan	150.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.2. 2.02.2 3	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang direhab				5 ruang	250.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts	SMP	5 ruang	250.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
									Umum		penddkn disrtai penguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.				
1.1.2.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah KM/WC SMP/MTs yang direhab				20 ruang	459.123.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	20 ruang	580.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah ruang ibadah SMP/MTs yang direhab			3 ruang			DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP	3 ruang						
		Jumlah ruang konseling SMP/MTs yang direhab			5 ruang				5 ruang						
		Jumlah ruang organisasi kesiswaan SMP/MTs yang direhab			3 ruang				3 ruang						
1.1.2.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebeleir sekolah yang diadakan				20 set	700.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	20 set	700.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.2.2.02.26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah SMP yang difasilitasi pengadaan alat rumah tangga sekolah				17 sekolah	170.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	3. Pemerataan & pngngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng	SMP	17 sekola h	170.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
									Alokasi Umum	Berdaya Saing	pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.				
1.1.2. 2.02.2 7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan				85 unit	425.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	85 unit	425.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.2. 2.02.2 8	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah SMP yang difasilitasi pengadaan Perlengkapan siswa				17 sekolah	8.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	17 sekola h	8.500.000	Dinas Pendidikan
1.1.2. 2.02.2 9	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah SMP yang difasilitasi pemeliharaan bangunan gedung dan ruangan				17 sekolah	850.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai	SMP	17 sekola h	850.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
											pnguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.				
1.1.2. 2.02.3 0	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SMP yang difasilitasi pemeliharaan rutin sarana prasarana utilitas sekolah				17 sekolah	170.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	17 sekola h	170.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.2. 2.02.3 2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta didik jenjang SMP yang difasilitasi biaya personil peserta didik				2400 siswa	3.195.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	2400 siswa	3.255.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan (IKK Output)	3300 siswa			3300 siswa									
1.1.2. 2.02.3 4	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah				2500 siswa	625.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah	SMP	2500 siswa	625.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											dengan dunia usaha.				
1.1.2. 2.02.3 5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan peraga Siswa SMP/MTs yang diadakan				17 paket	1.332.535.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pningktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pningktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	17 paket	1.332.144.000	Dinas Pendidikan
								DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP							
1.1.2. 2.02.3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah mapel SMP yang difasilitasi penyusunan instrumen evaluasinya				13 mapel	172.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pningktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pningktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	13 mapel	172.500.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah SMP yang difasilitasi penyelenggaraan AKM				28 sekolah			28 sekola h						
		Jumlah SMP yang difasilitasi penyelenggaraan survei karakter				28 sekolah			28 sekola h						
1.1.2. 2.02.3 7	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP yang difasilitasi penyusunan EDS				17 sekolah	51.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pningktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pningktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	17 sekola h	51.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah SMP yang difasilitasi penyusunan RAPBS				17 sekolah			17 sekola h						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.1.2. 2.02.3 8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah ajang apresiasi minat, bakat dan kreatifitas siswa yang diselenggarakan				6 kegiatan	580.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	6 kegiat an	580.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah PTK yang difasilitasi pelatihan khusus pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa				15 orang			15 orang						
		Jumlah siswa berprestasi yang diberi apresiasi				50 siswa			50 siswa						
		Jumlah siswa yang difasilitasi pelatihan khusus minat,bakat dan kreatifitas				30 siswa			30 siswa						
1.1.2. 2.02.3 9	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah guru pendamping inklusi yang difasilitasi honor jasa pendidik				6 orang	332.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	6 orang	332.200.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah pendidik BTQ SMP/MTS yang difasilitasi bantuan transport				93 orang			93 orang						
1.1.2. 2.02.4 0	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang difasilitasi pencermatan dokumen pola pengembangan karir Pendidik /PTK-nya				17 sekolah	7.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	17 sekola h	7.100.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.1.2. 2.02.4 1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jenjang sekolah peserta PPDB Online SMP				28 sekolah	496.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	28 sekola h	496.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah aplikasi penerapan sistem informasi manajemen pendidikan yang dikembangkan (Aplikasi PPDB Online)				1 aplikasi			1 aplika si						
		Jumlah bimtek kelembagaan dan manajemen sekolah yang diselenggarakan				4 kegiatan			4 kegiat an						
		Jumlah Bimtek/sosialisasi Dapodik yang diselenggarakan				3 kegiatan			3 kegiat an						
		Jumlah Rakor / Raker Pengawas SMP yang difasiitasi pelaksanaannya				2 kegiatan			2 kegiat an						
		Jumlah SMP yang difasilitasi pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah				28 sekolah			28 sekola h						
		Jumlah SMP yang difasilitasi Survai Lingkungan Belajar				28 sekolah			28 sekola h						
1.1.2. 2.02.4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP Negeri penerima dana BOS				17 sekolah	10.127.372.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	17 sekola h	10.127.372.000	Dinas Pendidikan
1.1.2.	Peningkatan Kapasitas	Jumlah bimtek/sosialisasi				1 kali	23.175.000	Kota Pekalongan,	Dana	Meningkatkan	3. Pemerataan &	SMP	1 kali	23.175.000	Dinas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.02.4 3	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	BOS yang diselenggarakan						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	pnnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		28 sekola h		Pendidikan
		Jumlah SMP yang difasilitasi penyusunan SPJ BOS				28 sekolah									
1.1.2. 2.02.4 4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah ruang TU SMP/MTs yang direhab				3 ruang	750.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	3 ruang	1.000.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.2. 2.02.4 5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah ruang kepala SMP/MTs yang direhab				4 ruang	160.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SMP	4 ruang	240.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.2. 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100 persen		96.23 persen	98.4 persen	18.179.486.000						98.4 persen	17.760.032.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		(IKK Outcome / SPM)													
1.1.2. 2.03.1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah ruang kelas PAUD yang dibangun				1 ruang	250.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	1 ruang	250.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.2. 2.03.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah ruang bermain anak yang dibangun				2 ruang	510.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	2 ruang	555.123.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah ruang UKS yang dibangun				3 ruang			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				3 ruang		
		Jumlah WC yang dibangun				4 ruang							4 ruang		
1.1.2. 2.03.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah ruang kelas PAUD yang direhab				5 ruang	750.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	5 ruang	900.000.000	Dinas Pendidikan
									Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.1.2. 2.03.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah ruang bermain anak yang direhab				2 ruang	340.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	2 ruang	340.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah ruang kepala PAUD /TK yang direhab				1 ruang		1 ruang							
		Jumlah ruang UKS yang direhab				2 ruang		2 ruang							
		Jumlah WC yang direhab				4 ruang		4 ruang							
1.1.2. 2.03.5	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah TK Negeri yang menerima bantuan pemeliharaan rutin gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD				4 TK	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	4 TK	40.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.2. 2.03.6	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah TK Negeri yang difasilitasi bantuan pemeliharaan rutin sarpras dan utilitas PAUD				4 TK	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	4 TK	20.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.2.	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebeluer yang				4 unit	80.000.000	Kota Pekalongan,	Dana	Meningkatkan	3. Pemerataan &	PAUD	4 unit	80.000.000	Dinas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.03.7		diadakan						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PNF			Pendidikan
1.1.2. 2.03.8	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah TK Negeri yang difasilitasi pengadaan alat rumah tangga PAUD				4 TK	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	4 TK	10.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.2. 2.03.9	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah TK Negeri yang difasilitasi pengadaan perlengkapan PAUD				4 TK	80.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	4 TK	80.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.2. 2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta				800 siswa	120.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	3. Pemerataan & pnngktn kompetensi penddk & tenaga	PAUD PNF	800 siswa	127.500.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		didik dari Pemerintah Daerah (IKK Output)						Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	kpnddkn utk mndkng pnnktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.				
1.1.2. 2.03.1 1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan (IKK Output)				800 siswa	640.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	800 siswa	680.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah peserta didik yang difasilitasi Biaya Personil peserta didik PAUD/TK				800 siswa							800 siswa		
1.1.2. 2.03.1 2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah APE PAUD/TK yang diadakan				4 paket	80.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	4 paket	80.000.000	Dinas Pendidikan
									Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
1.1.2. 2.03.1 3	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah lembaga yang difasilitasi penyaluran bantuannya				250 Lembaga	6.574.986.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	3. Pemerataan & pnnktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnktn kualts	PAUD PNF	250 Lembaga	5.912.909.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Umum	Berdaya Saing	penddkn disrtai pnguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.					
		Jumlah lembaga yang difasilitasi penyusunan lpi nya				250 Lembag a						250 Lemba ga			
		Jumlah lembaga yang difasilitasi workshop guru pendamping khusus				50 Lembag a						50 Lemba ga			
		Jumlah lomba gebyar kreasi anak yang dilaksanakan				2 Lomba						2 Lomba			
		Jumlah lomba PAUD berprestasi				2 Lembag a						2 Lemba ga			
		Jumlah lomba porseni yang dilaksanakan				2 Lomba						2 Lomba			
		Jumlah PAUD inklusi yang difasilitasi				4 TK						4 TK			
		Jumlah PAUD yang di fasilitasi penyelenggaraan survey karakter dan survey tumbuh-kembang anak				250 TK						250 TK			
		Jumlah pusat gugus paud yang difasilitasi lomba				4 Gugus						4 Gugus			
		Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi penerapan pendidikan karakter				100 Lembag a						100 Lemba ga			
1.1.2. 2.03.1 4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang difasilitasi penyusunan EDS				250 Sekolah	125.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	250 Sekola h	125.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah PAUD yang difasilitasi penyusunan RAPBS				250 Sekolah						250 Sekola h			
1.1.2. 2.03.1 5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah guru pendamping inklusi yang difasilitasi honor jasa pendidik dan				4 Orang	48.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	3. Pemerataan & pngngktn kompetensi penddk & tenaga	PAUD PNF	4 Orang	48.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		memenuhi kualifikasi						Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.				
1.1.2. 2.03.1 6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah TK Negeri yang difasilitasi pencermatan dokumen pola pengembangan karir pendiidk/PTK nya				4 TK	2.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	4 TK	2.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.2. 2.03.1 7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah bimtek kelembagaan dan manajemen PAUD yang diselenggarakan				4 Kegiatan	780.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	4 Kegiat an	780.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah Bimtek/sosialisasi Dapodik yang diselenggarakan				3 Kegiatan							3 Kegiat an		
		Jumlah lembaga / organisasi mitra PAUD yang difasilitasi kegiatannya				4 Lembag a							4 Lembag a		
		Jumlah PAUD yang difasilitasi pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah				2 Lembag a							2 Lembag a		
		Jumlah PAUD yang difasilitasi Survai				250 Lembag							250 Lembag		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Lingkungan Belajar				a						ga			
		Jumlah Rakor/Raker Pengawas/Penilik PAUD yang difasitiasi pelaksanaannya				2 Kegiatan						2 Kegiat an			
1.1.2. 2.03.1 8	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD penerima BOP PAUD				4 lembaga	7.600.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	4 lemba ga	7.600.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah PAUD yang menerima dana hibah BOP PAUD				261 lembaga						261 lemba ga			
1.1.2. 2.03.1 9	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah bimtek/sosialisai BOP PAUD yang diselenggarakan				1 kegiatan	129.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD PNF	1 kegiat an	129.500.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah PAUD yang difasilitasi penyusunan laporan BOP				265 lembaga						265 lemba ga			
1.1.2. 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (IKK Outcome / SPM)	100 persen		25.49 persen	50 persen	7.460.680.000					50 persen	7.047.157.000		
1.1.2. 2.04.1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru	Jumlah gedung pendidikan kesetaraan yang dibangun				1 unit	2.100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	3. Pemerataan & pnngktn kompetensi penddk & tenaga	PNF Kesetara	1 unit	400.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Nonformal/Kesetaraan							Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	an			
		Jumlah ruang guru yang dibangun	1 ruang			1 ruang									
		Jumlah ruang kelas yang dibangun	2 ruang			2 ruang									
1.1.2. 2.04.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pembangunan sarana prasaran dan utilitas sekolah non formal/kesetaraan yang dibangun				1 pekerjaa n	140.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PNF Kesetara an	1 pekerj aan	380.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.2. 2.04.5	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah gedung pendidikan kesetaraan yang dipelihara				1 unit	200.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PNF Kesetara an	1 unit	250.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah ruang kelas yang dipelihara				2 ruang							2 ruang		
1.1.2. 2.04.7	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah mebeleir yang diadakan				3 unit	105.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts	PNF Kesetara an	3 unit	105.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
									Umum		penddkn disrtai penguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.				
1.1.2. 2.04.8	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah SKB yang difasilitasi peralatan rumah tangga pendidikan nonformal/kesetaraan				1 SKB	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PNF Kesetaraan	1 SKB	20.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.2. 2.04.9	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah (IKK Output)				1500 unit	300.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PNF Kesetaraan	1500 unit	300.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.2. 2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan (IKK Output)				350 peserta didik	225.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn kualts penddkn disrtai	PNF Kesetaraan	350 peserta didik	285.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah peserta didik yang difasilitasi biaya personal peserta didik kesetaraan/nonformal				200 peserta didik					penguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		200 pesert a didik		
1.1.2.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah alat praktik dan peraga pendidikan kesetaraan/nonformal yang diadakan				50 unit	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PNF Kesetaraan	50 unit	40.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.2.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	jumlah fasilitasi pembelajaran dan bantuan operasional siswa paket A B C				310 orang	961.280.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pngngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PNF Kesetaraan	310 orang	1.957.757.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah lembaga kejar paket yang terfasilitasi pelaksanaan UNPK			17 lembaga				17 lembaga						
		Jumlah Mapel Kesetaraan yang terfasilitasi penyusunan instrumen evaluasinya			14 mapel				14 mapel						
		Jumlah PNF yang terfasilitasi penyelenggaraan Survai Karakter			13 lembaga				13 lembaga						
		Jumlah PNF yang terfasilitasi penyelenggaraan AKM			13 lembaga				13 lembaga						
1.1.2.	Penyiapan dan Tindak	Jumlah PNF yang difasilitasi				13	19.500.000	Kota Pekalongan.	Dana	Meningkatkan	3. Pemerataan &	PNF	13	19.500.000	Dinas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.04.1 3	Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	penyusunan EDS				lembaga		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	Kesetara an	lemba ga		Pendidikan
		Jumlah PNF yang difasilitasi penyusunan RAPBS				13 lembaga							13 lemba ga		
1.1.2. 2.04.1 4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah guru pendamping inklusi PNF yang difasilitasi honor jasa pendidik				2 orang	248.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PNF Kesetara an	2 orang	248.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah SKB yang difasilitasi penyediaan PTK nya				1 SKB									
1.1.2. 2.04.1 5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PNF-N/SKB yang difasilitasi pencermatan dokumen pola pengembangan karir pendidik/PTK nya				1 lembaga	1.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PNF Kesetara an	1 lemba ga	1.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.2.	Pembinaan Kelembagaan	Jumlah bimtek				4	420.500.000	Kota Pekalongan,	Dana	Meningkatkan	3. Pemerataan &	PNF	4	420.500.000	Dinas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.04.1 6	dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	kelembagaan dan manajemen PNF yang diselenggarakan				kegiatan		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	Kesetara an	kegiat an		Pendidikan
		Jumlah Bimtek/sosialisasi Dapodik yang diselenggarakan				3 kegiatan			3 kegiat an						
		Jumlah PNF yang difasilitasi pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah				5 lembaga			5 lemba ga						
		Jumlah PNF yang difasilitasi Survai Lingkungan Belajar				14 lembaga			14 lemba ga						
		Jumlah Rakor/Raker Penilik PNF yang difasilitasi pelaksanaannya				2 kegiatan			2 kegiat an						
1.1.2. 2.04.1 7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah satuan PNF yang menerima dana hibah BOP				14 lembaga	2.600.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PNF Kesetara an	14 lemba ga	2.600.000.000	Dinas Pendidikan
								DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan							
1.1.2. 2.04.1 8	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah bimtek/ sosialisasi BOP kesetaraan yang diselenggarakan				1 kegiatan	20.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn	PNF Kesetara an	1 kegiat an	20.400.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah satuan PNF yang difasilitasi penyusunan laporan BOP				14 lembaga							14 lemba ga		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
											krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.				
1.1.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	100 persen		100 persen	100 persen	305.892.000						100 persen	299.315.000	
1.1.3.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal PAUD/PNF	100 persen		100 persen	100 persen	148.044.000						100 persen	144.861.000	
1.1.3.2.01.1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen kurikulum kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Dasar yang disusun (perwa/sk kadin)				2 dokumen	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemerataan & pngngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD & SMP	2 dokumen	25.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.3.2.01.2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen silabus muatan lokal Pendidikan Dasar yang disusun				2 dokumen	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemerataan & pngngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD & SMP	2 dokumen	15.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.3.2.01.3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah buku teks kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Dasar yang disusun				2 buku	60.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pemerataan & pngngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pngngktn kualts penddkn disrtai	SD & SMP	2 buku	60.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah buku teks pelajaran muatan lokal yang diadakan				1000 buku					pnguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		1000 buku		
1.1.3. 2.01.4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang disusun				2 dokume n	48.044.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	SD & SMP	2 dokum en	44.861.000	Dinas Pendidikan
1.1.3. 2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal PAUD/PNF	persen		persen	100 persen	157.848.000						100 persen	154.454.000	
1.1.3. 2.02.1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah kompetensi dasar muatan lokal PAUD dan Pendidikan non formal yang disusun (perwal/sk kadin)				2 dokume n	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD dan PNF	2 dokum en	15.000.000	Dinas Pendidikan
1.1.3. 2.02.2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan	Jumlah dokumen silabus muatan lokal PAUD dan				2 dokume	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber Daya	3. Pemerataan & pnngktn komptensi	PAUD dan PNF	2 dokum	15.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Pendidikan non formal yang disusun (sk kadin)				n		Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum- Dana Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		en		
1.1.3. 2.02.3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah buku teks kompetensi dasar muatan lokal PAUD dan Pendidikan non formal yang disusun				2 buku	127.848.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	PAUD dan PNF	2 buku	124.454.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah buku teks pelajaran muatan lokal yang diadakan				1000 set							1000 set		
1.1.4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	14.677.637.000						100,00 persen	15.452.202.000	
1.1.4. 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikasi pendidik pada satuan pendidikan dasar dan PAUD/PNF	100 persen		54.75 persen	76.75 persen	14.677.637.000						76.75 persen	15.452.202.000	
1.1.4. 2.01.1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah calon/kepala sekolah yang difasilitasi diklat kepala sekolah				15 orang	941.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	15 orang	941.000.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah dokumen bezeeting				6							6		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		pengawas/penilik yang disusun				dokume n					penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.		dokum en		
		Jumlah dokumen bezeeting PTK SD yang disusun				71 dokume n							71 dokum en		
		Jumlah dokumen bezetting PTK PAUD yang disusun				4 dokume n							4 dokum en		
		Jumlah dokumen bezetting PTK SMP yang tersusu				17 dokume n							17 dokum en		
		Jumlah guru PAUD yang difasilitasi kegiatan diklat guru berjenjang (dasar dan lanjut)				250 orang							250 orang		
		Jumlah guru yang difasilitasi kegiatan pemilihan/seleksi guru berprestasi				400 orang							400 orang		
		Jumlah guru yang difasilitasi seleksi calon kepala sekolah				20 orang							20 orang		
		Jumlah PTK yang difasilitasi kegiatan guru induksi				50 orang							50 orang		
		Jumlah PTK yang difasilitasi kegiatan peningkatan kompetensi				100 orang							100 orang		
		Jumlah PTK yang difasilitasi kegiatan PPG				50 orang							50 orang		
1.1.4. 2.01.2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah guru terfasilitasi PAK nya				1200 orang	13.736.637.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn dsrtai penguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan	Pendidik dan Tenaga Kependid ikan	1200 orang	14.511.202.000	Dinas Pendidikan
		Jumlah kasus disiplin PTK yang difasilitasi penyelesaiannya				24 orang							24 orang		
		Jumlah pengawas/penilik yang difasilitasi PAK nya				30 orang							30 orang		
		Jumlah PTK difasilitasi bantuan pendidikan S1/S2				15 orang							15 orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah PTK difasilitasi harlindung				1200 orang					nilai2 religiusitas.	1200 orang			
		Jumlah PTK yang difasilitasi penerbitan dokumen kepegawaian nya (SK kenaikan gaji berkala, pangkat, mutasi, dokumen kontrak				1200 orang						1200 orang			
		Jumlah SD/MI swasta penerima bantuan jasa kinerja				78 SD/MI						78 SD/MI			
		Jumlah SMP/MTs swasta penerima bantuan jasa kinerja				21 SMP/MT s						21 SMP/ MTs			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					108.166.376.000						108.311.026.275			
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	58.372.926.000					100 persen	58.687.895.000		
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen						100 persen			
		Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen						100 persen			
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		100 persen	100 persen						100 persen			
1.2.1. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	24.850.000					100 persen	24.850.000		
1.2.1. 2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 Dokumen	2.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Kesehatan	2 Dokumen	2.750.000	Dinas Kesehatan
1.2.1. 2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 Dokumen	1.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Dinas Kesehatan	2 Dokumen	1.650.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.				
1.2.1. 2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan monitoring dan evaluasi perangkat daerah				12 Bulan	20.450.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Kesehata n	12 Bulan	20.450.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun			4 Dokume n			4 Doku men							
		Jumlah dokumen profil kesehatan yang disusun			1 Dokume n			1 Doku men							
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)			2 Dokume n			2 Doku men							
1.2.1. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	56.287.517.000						100 persen	56.635.683.000	
1.2.1. 2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 Bulan	56.205.467.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Kesehata n	12 Bulan	56.553.633.000	Dinas Kesehatan
1.2.1. 2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 Bulan	80.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Kesehata n	12 Bulan	80.400.000	Dinas Kesehatan
1.2.1. 2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan SKPD yang disusun				1 Dokume n	1.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Kesehata n	1 Doku men	1.650.000	Dinas Kesehatan
1.2.1. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	9.500.000						100 persen	9.500.000	
1.2.1.	Pengadaan Pakaian	Jumlah keikutsertaan dalam				2 Kali	9.500.000	Kota Pekalongan,	Dana	Memperkuat	12. Penerapan MRI	Dinas	2 Kali	9.500.000	Dinas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.05.2	Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	pameran, Hakteknas dan Karnaval Batik						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesehatan			Kesehatan
1.2.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	325.000.000						100 persen	325.000.000	
1.2.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Kesehatan	12 Bulan	5.000.000	Dinas Kesehatan
1.2.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 Bulan	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Kesehatan	12 Bulan	100.000.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah peralatan dan perlengkapan grdung kantor yang diadakan				12 Unit							12 Unit		
1.2.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 Bulan	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Kesehatan	12 Bulan	7.500.000	Dinas Kesehatan
1.2.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 Bulan	70.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Kesehatan	11 Bulan	70.000.000	Dinas Kesehatan
1.2.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Kesehatan	12 Bulan	20.000.000	Dinas Kesehatan
1.2.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-				12 Bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Dinas Kesehatan	12 Bulan	2.500.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		undangan						Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.				
1.2.1. 2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				100 Kali	120.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Kesehata n	100 Kali	120.000.000	Dinas Kesehatan
1.2.1. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	1.140.384.000						100 persen	1.108.661.000	
1.2.1. 2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 Bulan	600	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Kesehata n	12 Bulan	600	Dinas Kesehatan
1.2.1. 2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	800.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Kesehata n	12 Bulan	752.519.000	Dinas Kesehatan
1.2.1. 2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				13 bulan	339.784.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Kesehata n	13 bulan	355.542.000	Dinas Kesehatan
1.2.1. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	585.675.000						100 persen	584.201.000	
1.2.1. 2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasinal yang terpelihara secara rutin/berkala				102 Unit	413.325.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Kesehata n	102 Unit	411.851.000	Dinas Kesehatan
1.2.1. 2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				3 Unit	93.075.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Dinas Kesehata n	3 Unit	93.075.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.				
1.2.1. 2.09.1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 Bulan	79.275.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Kesehata n	12 Bulan	79.275.000	Dinas Kesehatan
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	90,00 persen		70,00 persen	80,00 persen	47.251.572.000						80,00 persen	46.939.999.275	
1.2.2. 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Fasyankes (Puskesmas dan RSUD)	100 persen		100 persen	100 persen	11.373.809.000						100 persen	10.070.841.275	
1.2.2. 2.01.6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah DE yang disusun				1 Dokume n	3.110.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Dinas Kesehata n	1 Doku men	1.439.119.725	Dinas Kesehatan
		Jumlah pertemuan fasilitasi rehabilitasi puskesmas				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah unit puskesmas yang direhabilitasi				1 Unit							1 Unit		
1.2.2. 2.01.9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah DE yang disusun				1 Dokume n	1.073.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Dinas Kesehata n	1 Doku men	1.478.000.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah IPAL puskesmas yang dilakukan pemeliharaan secara rutin				14 Lokasi							14 Lokasi		
		Jumlah pertemuan fasilitasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas				8 Kali							8 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Nasional		Daerah			
		Jumlah puskesmas/pustu yang direhabilitasi				4 Lokasi						4 Lokasi			
		Jumlah Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan secara rutin				14 Lokasi						14 Lokasi			
1.2.2. 2.01.1 3	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah instalasi pengolahan limbah yang diadakan (DAK)				1 Unit	79.730.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Dinas Kesehata n	1 Unit	100.000.000	Dinas Kesehatan
1.2.2. 2.01.1 4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan (DAK)				50 Paket	2.112.040.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Dinas Kesehata n	50 Paket	2.312.040.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan (DAU)				8 Unit			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				8 Unit		
1.2.2. 2.01.1 6	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah pengadaan obat (DAK)				2 Paket	2.869.504.275	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Dinas Kesehata n	2 Paket	2.152.000.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah pengadaan obat, reagen dan perbekalan kesehatan (DAU)				2 Paket			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				2 Paket		
1.2.2. 2.01.1 7	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah BTI DBD yang diadakan (DAK)				1500 Botol	1.669.534.725	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Khusus - Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi	Dinas Kesehata n	1500 Botol	2.121.681.550	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan	Alokasi Khusus Fisik	Berdaya Saing	multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.				
		4787 Unit							4787 Unit						
		1 Paket							1 Paket						
1.2.2.2.01.2.0	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan (Puskesmas, Labkesda, Dinkes) yang dikalibrasi				220 Unit	460.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Dinas Kesehata n	220 Unit	468.000.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah alat kesehatan (Puskesmas, Labkesda) yang diservice				42 Jenis							42 Jenis		
1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP	100 persen		100 persen	100 persen	35.672.856.000						100 persen	36.661.018.000	
1.2.2.2.02.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Dukungan Logistik Kesehatan yang Tersedia untuk Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (IKK Output)				18 Set	127.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Dinas Kesehata n	18 Set	127.000.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM / IKK Outcome)				6555 Orang							6555 Orang		
		Jumlah Ibu Hamil yang Memperoleh Pelayanan Antenatal K1/K4 Sesuai Standar di Satu Wilayah Kerja pada Kurun Waktu Tertentu				6555 Orang							6555 Orang		
		Jumlah Ibu Hamil yang Meninggal Karena Hamil, Bersalin dan Nifas				6 Orang							6 Orang		
		Jumlah Kasus Anemia pada Ibu Hamil				506 Orang							506 Orang		
		Jumlah Kelahiran pada				112							112		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Perempuan Umur 15-19 (Age Specific Fertility Rate/ASFR)				Orang						Orang			
		Jumlah Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				6262 Orang						6262 Orang			
		Jumlah SDM Kesehatan untuk Pelayanan Antenatal (IKK Output)				291 Orang						291 Orang			
1.2.2. 2.02.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcom)				5952 Bayi	688.558.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Dinas Kesehata n	5952 Bayi	688.558.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (IKK Output)				17 Set			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			17 Set			
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan persalinan sesuai standar (IKK Output)				17 Set						17 Set			
		Jumlah ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				6262 Orang						6262 Orang			
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar (IKK Output)				291 Orang						291 Orang			
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar (IKK Output)				291 Orang						291 Orang			
1.2.2. 2.02.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				5932 bayi	26.070.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS). guna	Dinas Kesehata n	5932 bayi	26.070.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
											pencegahan dan pengendalian penyakit.				
1.2.2. 2.02.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita mendapat pelayan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				31642 Anak	190.514.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Dinas Kesehata n	31642 Anak	196.413.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah balita usia sampai 59 bulan (bayi+anak balita) yang meninggal				72 Anak		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	72 Anak						
		Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal				49 Anak			49 Anak						
		Jumlah bayi usia sampai 28 hari yang meninggal				26 Anak			26 Anak						
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar (IKK Output)				133 Set			133 Set						
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar				309 Orang			309 Orang						
1.2.2. 2.02.5		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Pada Usia Pendidikan Dasar Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM / IKK Outcome)				28286 Anak	132.189.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk anak usia pendidikan dasar (IKK Output)					23 Set			23 Set						
	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar (IKK Output)					339 Orang			339 Orang						
1.2.2.	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah penduduk usia				207789	44.950.000	Kota Pekalongan,	Dana	Meningkatkan	1. Penguatan	Dinas	20778	44.950.000	Dinas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.02.6	Kesehatan pada Usia Produktif	produktif mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				orang		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Kesehata n	9 orang		Kesehatan
1.2.2. 2.02.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk skrining kesehatan sesuai standar bagi warga negara usia 60 tahun ke atas (IKK Output)				25 Unit	36.071.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Dinas Kesehata n	25 Unit	37.153.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah SDM Kesehatan untuk skrining kesehatan sesuai standar bagi warga negara usia 60 tahun ke atas (IKK Outcome)			161 Orang				161 Orang						
		Jumlah Usia Lanjut Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (SPM / IKK Outcome)			34492 Orang				34492 Orang						
1.2.2. 2.02.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				76872 orang	8.830.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Dinas Kesehata n	76872 orang	8.830.000	Dinas Kesehatan
1.2.2. 2.02.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita DM mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				6446 orang	8.550.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Dinas Kesehata n	6446 orang	8.550.000	Dinas Kesehatan
1.2.2.	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah penderita ODGJ				785	15.380.000	Kota Pekalongan,	Dana	Meningkatkan	1. Penguatan	Dinas	785	15.380.000	Dinas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.02.1 0	Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				orang		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Kesehata n	orang		Kesehatan
1.2.2. 2.02.1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				5391 orang	41.305.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Dinas Kesehata n	5391 orang	41.305.000	Dinas Kesehatan
1.2.2. 2.02.1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM / IKK Outcome)				12563 orang	33.105.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Dinas Kesehata n	12563 orang	33.105.000	Dinas Kesehatan
1.2.2. 2.02.1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah balita gizi buruk				29 Anak	563.218.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Dinas Kesehata n	29 Anak	580.717.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah bayi 0-6 bulan yang mendapat ASI eksklusif				2850 Anak							2850 Anak		
		Jumlah bumil KEK yang mendapat suplemen gizi				480 Orang							480 Orang		
		Jumlah penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal				171 Orang							171 Orang		
		Jumlah stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta				1343 Anak							1343 Anak		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.2.2. 2.02.1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan kesehatan kerja yang dilaksanakan				2 Kegiatan	76.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Dinas Kesehata n	2 Kegiat an	78.750.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah kegiatan kesehatan olahraga yang dilaksanakan				2 Kegiatan		2 Kegiat an							
		Jumlah pertemuan fasilitasi Pos UKK yang dilaksanakan				4 Kali		4 Kali							
		Jumlah pertemuan pelaksanaan GP2SP perusahaan yang dilaksanakan				2 Kali		2 Kali							
		Jumlah pertemuan sosialisasi kebugaran calon jamaah haji				5 Kali		5 Kali							
		Jumlah peserta tes kebugaran jasmani (rockport) Dinkes				65 Orang		65 Orang							
1.2.2. 2.02.1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)				24 Lokasi	221.860.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Dinas Kesehata n	24 Lokasi	228.212.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah fasilitasi Fasyankes Ramah Lingkungan				1 Kali		1 Kali							
		Jumlah kegiatan hygiene sanitasi TUPM				3 Kegiatan		3 Kegiat an							
		Jumlah kegiatan penanganan limbah medis vaksinasi covid-19				0 Kali		0 Kali							
		Jumlah kegiatan pengendalian alat di TPA yang dilaksanakan				12 Kali		12 Kali							
		Jumlah Lomba Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) yang dilaksanakan				1 Kali		1 Kali							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah pertemuan Pengawasan Kualitas Air Minum yang dilaksanakan				1 Kali						1 Kali			
		Jumlah pertemuan penggerakan implementasi STBM yang dilaksanakan				5 Kali						5 Kali			
1.2.2. 2.02.1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah kegiatan BOK kefarmasian yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1.347.034.750	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Dinas Kesehata n	1 Kegiat an	1.347.034.750	Dinas Kesehatan
		Jumlah kegiatan kesehatan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan				42 Kegiatan						42 Kegiat an			
		Jumlah kegiatan penguatan 5 tujuan gerakan masyarakat hidup sehat yang dilaksanakan				9 Kegiatan						9 Kegiat an			
		Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pemeriksaan Labkesda (Pemantapan Mutu Eksternal (PME) yang dilaksanakan				3 Kegiatan						3 Kegiat an			
		Jumlah kegiatan upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit yang dilaksanakan				29 Kegiatan						29 Kegiat an			
		Jumlah pengujian kalibrasi alat kesehatan puskesmas yang dilaksanakan				1 Pekerjaa n						1 Pekerj aan			
1.2.2. 2.02.1 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang di PSPJ				12 Bulan	900.225.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Dinas Kesehata n	12 Bulan	900.225.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.2.2. 2.02.2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Bahan Medis Habis Sekali Pakai (BMHP) HIV dan Sipilis yang diadakan (DAK)				1 Pekerjaa n	987.361.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Dinas Kesehata n	1 Pekerj aan	1.056.020.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah BTI DBD yang diadakan (DAK)				0 Botol				1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.		0 Botol			
		Jumlah Cartridge TCM yand diadakan (DAK)				0 Unit							0 Unit		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar bagi orang dengan resiko terinfeksi HIV (IKK Output)				179 Unit							179 Unit		
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar bagi ODGJ berat (IKK Output)				161 Set							161 Set		
		Jumlah dukungan logistik yang tersedia untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM (IKK Output)				161 Set							161 Set		
		Jumlah dukungan logistik yang tersedia untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi (IKK Output)				38 Set							38 Set		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah dukungan logistik yang tersedia untuk pelayanan TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC (IKK Output)				161 Set							161 Set		
		Jumlah dukungan logistik yang tersedia untuk skrining kesehatan sesuai standar bagi orang usia 15-29 tahun (IKK Output)				24 Set							24 Set		
		Jumlah kasus baru kusta tanpa cacat yang ditemukan				53 Kasus							53 Kasus		
		Jumlah kasus filaria yang ditangani				0 Kasus							0 Kasus		
		Jumlah kasus Hepatitis B				45 Kasus							45 Kasus		
		Jumlah kasus HIV/AIDS				100 Kasus							100 Kasus		
		Jumlah kasus obesitas pada penduduk usia 15 tahun ke atas di Fasyankes				59385 Jiwa							59385 Jiwa		
		Jumlah kasus TB Paru BTA (+)				890 Kasus							890 Kasus		
		Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Penyakit Menular yang dilaksanakan				14 Lokasi							14 Lokasi		
		Jumlah kegiatan penyemprotan Fogging Focus di wilayah Kota Pekalongan				100 Kali							100 Kali		
		Jumlah penduduk umur > atau = 18 tahun yang dilakukan pengukuran tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg				76872 Jiwa							76872 Jiwa		
		Jumlah pertemuan program penyakit tidak menular yang dilaksanakan				8 Kali							8 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah sasaran kelas 1 SD/MI sederajat yang dilaksanakan Bias MR				213 Kelas						213 Kelas			
		Jumlah sasaran kelas 1 SD/MI sederajat yang dilaksanakan Bias Td				255 Kelas						255 Kelas			
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar bagi orang dengan resiko terinfeksi HIV (IKK Output)				179 Orang						179 Orang			
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM (IKK Output)				161 Orang						161 Orang			
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi (IKK Output)				161 Orang						161 Orang			
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita ODGJ berat (IKK Output)				161 Orang						161 Orang			
		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC (IKK Output)				161 Orang						161 Orang			
		Jumlah SDM Kesehatan untuk skrining kesehatan sesuai standar bagi orang usia 15-29 tahun (IKK Output)				291 Orang						291 Orang			
1.2.2. 2.02.2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin penerima bantuan biaya rawat inap dan rawat jalan di Puskesmas dan Rumah Sakit				1730 Orang	27.936.440.250	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Dinas Kesehat an	1730 Orang	28.862.076.250	Dinas Kesehatan
		Jumlah masyarakat miskin penerima bantuan biaya transport rujukan dan living cost				300 Orang							300 Orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah masyarakat penerima bantuan premi asuransi BPJS PD dan PBPJ Kelas 3				61200 Orang						61200 Orang			
		Jumlah pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan ke Puskesmas dan Rumah Sakit				46 Kali						46 Kali			
		Jumlah pertemuan koordinasi pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat				3 Kali						3 Kali			
		Jumlah peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (BPJS)				264716 Jiwa						264716 Jiwa			
1.2.2.2.02.2.9	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah penyediaan biaya operasional untuk kegiatan FKS				12 Bulan	80.560.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Dinas Kesehatan	12 Bulan	82.840.000	Dinas Kesehatan
1.2.2.2.02.3.4	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah bulan penyediaan belanja operasional Puskesmas, IFK dan Labkesda				12 Bulan	1.330.039.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Dinas Kesehatan	12 Bulan	1.323.713.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK Walikota				4 Orang						4 Orang			
1.2.2.2.02.3.5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Workshop Penunjang Akreditasi Puskesmas				2 kali	802.626.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian	Dinas Kesehatan	2 kali	761.542.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Peningkatan & Penilaian Mutu Eksternal				5 Puskesmas						5 Puskesmas			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		(PPME)				mas					smas				
		Peningkatan & Jumlah penilaian Mutu Internal (PPMI) yang dilaksanakan				2 Kali						2 Kali			
1.2.2. 2.02.3 7	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah kunjungan surveilans epidemiologi ke rumah sakit				52 Kali	74.320.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Dinas Kesehata n	52 Kali	76.420.000	Dinas Kesehatan
		Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)				100 Persen						100 Perse n			
1.2.2. 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Terlaksananya pemeliharaan sarana komunikasi data dan informasi	100 persen		100 persen	100 persen	72.120.000						100 persen	74.200.000	
1.2.2. 2.03.2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah bulan pemeliharaan jaringan SIMKES				12 Bulan	72.120.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyara kat	12 Bulan	74.200.000	Dinas Kesehatan
1.2.2. 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes yang diberikan rekomendasi tepat waktu	100 persen		100 persen	100 persen	132.787.000						100 persen	133.940.000	
1.2.2. 2.04.3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah pelaksanaan visitasi perijinan fasyankes				10 Kali	132.787.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyara kat	10 Kali	133.940.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah pelaksana kegiatan P3K dan bencana				800 Orang							800 Orang		
		Jumlah pembinaan fasyankes baik milik pemerintah maupun swasta				69 Kali							69 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah pertemuan fasilitasi peningkatan mutu fasyankes				11 Kali						11 Kali			
1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	60,00 persen		35,00 persen	45,00 persen	91.932.000					45,00 persen	228.782.000		
		Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	95,50 persen		93,00 persen	94,00 persen					94,00 persen				
1.2.3. 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan rekomendasi Surat Ijin Praktek tenaga kesehatan tepat waktu	100 persen		100 persen	100 persen	91.932.000					100 persen	228.782.000		
1.2.3. 2.02.3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen SDM yang disusun (Profil SDM Kesehatan dan Renbut)				2 Dokume n	91.932.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	0 2 Doku men	228.782.000	Dinas Kesehatan	
		Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pengawasan perijinan tenaga kesehatan				66 Kali						66 Kali			
		Jumlah kegiatan Lomba Tenaga Kesehatan Teladan Tk. Kota yang dilaksanakan				1 Kegiatan						1 Kegiat an			
		Jumlah penerbitan rekomendasi ijin tenaga kesehatan tepat waktu (sesuai SOP)				540 orang						540 orang			
		Jumlah sosialisasi uji kompetensi tenaga kesehatan				1 Kali						1 Kali			
		Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan				12 orang						12 orang			
1.2.4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN	Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari	100,00 persen		92,00 persen	96,00 persen	671.378.000					96,00 persen	670.722.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
	MAKANAN MINUMAN	cemaran														
		Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	100,00 persen		100,00 persen										100,00 persen	100,00 persen
		Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	97,00 persen		95,00 persen										96,00 persen	96,00 persen
1.2.4. 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotek, toko obat dan toko alat kesehatan yang dilakukan pengawasan	100 persen		100 persen	100 persen	116.630.000					100 persen	115.562.000			
1.2.4. 2.01.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotek dan toko obat yang dilakukan pengawasan				77 Lokasi	116.630.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyara kat	77 Lokasi	115.562.000	Dinas Kesehatan	
		Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat daerah berdasarkan SK Walikota				2 Orang							2 Orang			
		Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang dilakukan pembinaan				38 lokasi							38 lokasi			
1.2.4. 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga yang dilakukan pengawasan	100 persen		100 persen	100 persen	481.023.000					100 persen	481.023.000			
1.2.4. 2.03.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh	Jumlah IRTP yang dilakukan pengawasan dalam rangka penerbitan SPP-IRT				170 Lokasi	481.023.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyara kat, PIRT	170 Lokasi	481.023.000	Dinas Kesehatan	
		Jumlah IRTP yang dilakukan pengawasan post market				110 Lokasi							110 Lokasi			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Industri Rumah Tangga	Jumlah IRTP yang telah mengikuti Bimtek Keamanan Pangan				170 Orang							170 Orang		
		Jumlah peserta KIE Keamanan Pangan				500 Orang							500 Orang		
		Jumlah petugas pengawas pangan yang mengikuti pelatihan DFI				10 Orang							10 Orang		
		Jumlah petugas pengawas pangan yang mengikuti pelatihan PKP				10 Orang							10 Orang		
		Jumlah petugas pengelola obat di fasilitas kefarmasian yang mengikuti Bimtek				92 Orang							92 Orang		
		Jumlah sampling dan pengujian PIRT				32 Sampel							32 Sampel		
1.2.4.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang dilakukan pengawasan	97 persen		95 persen	96 persen	73.725.000						96 persen	74.137.000	
1.2.4.2.04.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang dilakukan pengawasan penerbitan SLHS				45 Lokasi	73.725.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	45 Lokasi	74.137.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang dilakukan pengawasan makanan minuman				220 Lokasi						220 Lokasi			
1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Sehat	95,00 persen		90,00 persen	92,00 persen	1.778.568.000						92,00 persen	1.783.628.000	
1.2.5.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan. Peningkatan	Persentase Posyandu dengan Strata Mandiri	35 persen		30 persen	32 persen	1.661.368.000						32 persen	1.662.912.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
1.2.5. 2.01.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah belanja cetak pemberdayaan kesehatan yang dilaksanakan				9 Pekerja	1.661.368.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyarakat	9 Pekerja	1.662.912.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah kegiatan LCC Kader Posyandu dan pemilihan kader teladan Tk. Kota yang dilaksanakan			3 Kali				3 Kali						
		Jumlah Kegiatan pemberdayaan Saka Bhakti Husada (SBH) yang dilaksanakan			35 Kali				35 Kali						
		Jumlah kegiatan pembinaan program pemberdayan kesehatan yang dilaksanakan			17 Kali				17 Kali						
		Jumlah kegiatan penyebaran informasi ke masyarakat yang dilaksanakan			3 Kegiatan				3 Kegiatan						
		Jumlah kegiatan refreshing Pokjanal Posyandu yang dilaksanakan			4 Kali				4 Kali						
		Jumlah kegiatan sosialisasi vaksinasi covid-19 yang dilaksanakan			5 Kegiatan				5 Kegiatan						
		Jumlah pemeberdayaan pondok pesantren yang dilaksanakan			3 Kegiatan				3 Kegiatan						
1.2.5. 2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Promosi Kesehatan	100 persen		100 persen		100 persen	117.200.000						
1.2.5. 2.02.1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Kegiatan cetak promosi kesehatan				3 Pekerja	117.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi	Masyarakat	3 Pekerja	120.716.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Alokasi Umum	Berdaya Saing	multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.					
		7 Pekerjaa n										7 Pekerj aan			
		1 Kali										1 Kali			
		6 Kali										6 Kali			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						96.033.019.000						96.051.551.000		
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	85.891.104.000						100 persen	88.717.938.000	
1.2.1. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	11.000.000						100 persen	11.000.000	
1.2.1. 2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 dokume n	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Warga Kota Pekalong an dan Sekitarny a	2 dokum en	1.500.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah dokumen Renstra perangkat daerah yang disusun				0 dokume n									
1.2.1. 2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokume n	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Warga Kota Pekalong an dan Sekitarny a	2 dokum en	1.500.000	Dinas Kesehatan
1.2.1. 2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	8.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Warga Kota Pekalong an dan Sekitarny a	12 bulan	8.000.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun				4 dokume n						4 dokum en			
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokume n						2 dokum en			
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokume n						5 dokum en			
1.2.1. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	51.397.000					100 persen	50.055.000		
1.2.1. 2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	49.897.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Warga Kota Pekalong an dan Sekitarny a	12 bulan	48.555.000	Dinas Kesehatan
1.2.1. 2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokume n	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Warga Kota Pekalong an dan Sekitarny a	1 dokum en	1.500.000	Dinas Kesehatan
1.2.1. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	presentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	828.707.000					100 persen	810.883.000		
1.2.1. 2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				105 orang/ka li	828.707.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Warga Kota Pekalong an dan Sekitarny a	105 orang/ kali	810.883.000	Dinas Kesehatan
		Penyediaan makanan dan minuman				8 bulan							8 bulan		
1.2.1. 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	85.000.000.000					100 persen	87.846.000.000		
1.2.1. 2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 bulan	85.000.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Warga Kota Pekalong	12 bulan	87.846.000.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kergon	Dana Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.	an dan Sekitarny a			
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	72,50 persen		60,00 persen	65,00 persen	10.078.106.000						65,00 persen	7.271.177.000	
1.2.2. 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	9.742.206.000						100 persen	6.935.277.000	
1.2.2. 2.01.8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah gedung fasilitas pelayanan kesehatan yang direhabilitasi				1 unit	1.500.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarny a	1 unit	-	Dinas Kesehatan
1.2.2. 2.01.1 4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat-alat kesehatan yang diadakan				30 unit	8.242.206.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalongan dan Sekitarny a	30 unit	6.935.277.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah kegiatan DAK yang dikelola				1 kegiatan			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				1 kegiatan		
1.2.2. 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan RS tipe C	100 persen		100 persen	100 persen	225.900.000						100 persen	225.900.000	
1.2.2. 2.02.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah audit maternal/neonatal yang dilaksanakan				2 kali	45.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini,	Warga Kota Pekalong	2 kali	45.000.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kergon	Dana Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	an dan Sekitarny a			
1.2.2. 2.02.3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan akreditasi/persiapan akreditasi RSUD Bendan Kota Pekalongan yang dilaksanakan				1 kegiatan	180.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalong an dan Sekitarny a	1 kegiat an	180.900.000	Dinas Kesehatan
1.2.2. 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan pengukuran kepuasan pelanggan	100 persen		100 persen	100 persen	110.000.000						100 persen	110.000.000	
1.2.2. 2.04.3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat yang disusun				2 dokume n	110.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalong an dan Sekitarny a	2 dokum en	110.000.000	Dinas Kesehatan
1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	60,00 persen		35,00 persen	45,00 persen	63.809.000						45,00 persen	62.436.000	
1.2.3. 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase perawat yang terkredensial	100 persen		100 persen	100 persen	49.350.000						100 persen	48.663.500	
1.2.3. 2.02.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia	Jumlah jasa tenaga kontrak Walikota SKPD				13 orang/bu	34.891.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber Daya	1. Penguatan pencegahan faktor	Warga Kota	13 orang/	34.891.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kesehatan sesuai Standar	berdasarkan SK Walikota				lan		Barat, Bendan Kergon	Umum- Dana Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Pekalong an dan Sekitarny a	bulan		
1.2.3. 2.02.3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah perawat dan bidan yang mengikuti kredensial/rekredensial				20 orang	14.459.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalong an dan Sekitarny a	20 orang	13.772.500	Dinas Kesehatan
1.2.3. 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	presentase perawat/bidan yang bersertifikat pelatihan pengembangan kompetensi	20 persen		20 persen	20 persen	14.459.000						20 persen	13.772.500	
1.2.3. 2.03.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perawat dan bidan yang mengikuti diklat pengembangan kompetensi				40 orang	14.459.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Warga Kota Pekalong an dan Sekitarny a	40 orang	13.772.500	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.315.718.000							3.384.849.000	
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	2.765.245.000						100 persen	2.834.376.000	
1.2.1. 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	2.765.245.000						100 persen	2.834.376.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2.1. 2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	2.765.245.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat, Puskesmas Bendan	12 Bulan	2.834.376.000	Dinas Kesehatan
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	550.473.000						90,00 persen	550.473.000	
1.2.2. 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	550.473.000						100 persen	550.473.000	
1.2.2. 2.02.3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Kegiatan Kesehatan Masyarakat Tingkat Puskesmas yang dilaksanakan				59 Kegiatan	550.473.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyara kat, Puskesmas Bendan	59 Kegiat an	550.473.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayah kerja Puskesmas yang dilaksanakan				8 Kegiatan							8 Kegiat an		
		Jumlah Kegiatan Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit yang dilaksanakan				38 Kegiatan							38 Kegiat an		
		Tersedianya tenaga dengan perjanjian kerja yang dibiayai dari dana BOK				2 Orang							2 Orang		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.271.164.000						1.291.809.000		
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	825.791.000						100 persen	846.436.000	
1.2.1.	Peningkatan Pelayanan	Persentase ketercapaian	100 persen		100 persen	100	825.791.000						100	846.436.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.10	BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD				persen						persen			
1.2.1. 2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	825.791.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat, Puskesm as Kramatsa ri	12 Bulan	846.436.000	Dinas Kesehatan
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	445.373.000						90,00 persen	445.373.000	
1.2.2. 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	445.373.000						100 persen	445.373.000	
1.2.2. 2.02.3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Kegiatan Kesehatan Masyarakat Tingkat Puskesmas yang dilaksanakan				43 Kegiatan	445.373.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyara kat, Puskesm as Kramatsa ri	43 Kegiat an	445.373.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayah kerja Puskesmas yang dilaksanakan				9 Kegiatan							9 Kegiat an		
		Jumlah Kegiatan Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit yang dilaksanakan				66 Kegiatan							66 Kegiat an		
		Tersedianya tenaga dengan perjanjian kerja yang dibiayai dari dana BOK				3 Orang							3 Orang		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.633.806.000						1.633.806.000		
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	1.035.916.000						100 persen	1.035.916.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	DAERAH KABUPATEN/KOTA														
1.2.1. 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	1.035.916.000						100 persen	1.035.916.000	
1.2.1. 2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	1.035.916.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirta	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat, Puskesm as Tirta	12 Bulan	1.035.916.000	Dinas Kesehatan
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	597.890.000						90,00 persen	597.890.000	
1.2.2. 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	597.890.000						100 persen	597.890.000	
1.2.2. 2.02.3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Kegiatan Kesehatan Masyarakat Tingkat Puskesmas yang dilaksanakan				62 Kegiatan	597.890.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirta	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyara kat, Puskesm as Tirta	62 Kegiat an	597.890.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayah kerja Puskesmas yang dilaksanakan				10 Kegiatan							10 Kegiat an		
		Jumlah Kegiatan Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit yang dilaksanakan				41 Kegiatan							41 Kegiat an		
		Tersedianya tenaga dengan perjanjian kerja yang dibiayai dari dana BOK				2 Orang							2 Orang		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.183.234.000							1.198.626.000	
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG	Persentase ketersediaan	100 persen		100 persen	100	615.666.000						100	631.058.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	layanan BLUD				persen							persen		
1.2.1. 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	615.666.000						100 persen	631.058.000	
1.2.1. 2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	615.666.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Puskesm as Medono, Masyara kat	12 Bulan	631.058.000	Dinas Kesehatan
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	567.568.000						90,00 persen	567.568.000	
1.2.2. 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	567.568.000						100 persen	567.568.000	
1.2.2. 2.02.3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Kegiatan Kesehatan Masyarakat Tingkat Puskesmas yang dilaksanakan				60 Kegiatan	567.568.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyara kat, Puskesm as Medono	60 Kegiat an	567.568.000	Dinas Kesehatan
		10 Kegiatan							10 Kegiat an						
		42 Kegiatan							42 Kegiat an						
		2 Orang							2 Orang						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					1.374.689.000							1.397.960.000		
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	930.854.000						100 persen	954.125.000	
1.2.1. 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	930.854.000						100 persen	954.125.000	
1.2.1. 2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	930.854.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Noyontaansari	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat, Puskesm as Noyontaa n	12 Bulan	954.125.000	Dinas Kesehatan
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	443.835.000						90,00 persen	443.835.000	
1.2.2. 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	443.835.000						100 persen	443.835.000	
1.2.2. 2.02.3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Kegiatan Kesehatan Masyarakat Tingkat Puskesmas yang dilaksanakan				64 Kegiatan	443.835.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Noyontaansari	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyara kat, Puskesm as Noyontaa n	64 Kegiat an	443.835.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayah kerja Puskesmas yang dilaksanakan				7 Kegiatan							7 Kegiat an		
		Jumlah Kegiatan Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit yang dilaksanakan				40 Kegiatan							40 Kegiat an		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
		Nasional								Daerah					
		Tersedianya tenaga dengan perjanjian kerja yang dibiayai dari dana BOK				2 orang						2 orang			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.332.593.000						1.354.551.000		
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	878.323.000						100 persen	900.281.000	
1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	878.323.000						100 persen	900.281.000	
1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	878.323.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat, Puskesmas Tondano	12 Bulan	900.281.000	Dinas Kesehatan
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	454.270.000						90,00 persen	454.270.000	
1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	454.270.000						100 persen	454.270.000	
1.2.2.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Kegiatan Kesehatan Masyarakat Tingkat Puskesmas yang dilaksanakan				59 Kegiatan	454.270.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyara kat, Puskesmas Tondano	59 Kegiat an	454.270.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayah kerja Puskesmas yang dilaksanakan				10 Kegiatan							10 Kegiat an		
		Jumlah Kegiatan Upaya				38							38		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit yang dilaksanakan				Kegiatan						Kegiat an			
		Tersedianya tenaga dengan perjanjian kerja yang dibiayai dari dana BOK				2 Orang						2 Orang			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.437.596.000						1.459.554.000		
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	878.323.000					100 persen	900.281.000		
1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	878.323.000					100 persen	900.281.000		
1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	878.323.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat, Puskesm as Klego	12 Bulan	900.281.000	Dinas Kesehatan
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	559.273.000					90,00 persen	559.273.000		
1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	559.273.000					100 persen	559.273.000		
1.2.2.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Kegiatan Kesehatan Masyarakat Tingkat Puskesmas yang dilaksanakan				68 Kegiatan	559.273.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyara kat, Puskesm as Klego	68 Kegiat an	559.273.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayah kerja Puskesmas				12 Kegiatan						12 Kegiat an			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		yang dilaksanakan													
		Jumlah Kegiatan Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit yang dilaksanakan				40 Kegiatan						40 Kegiat an			
		Tersedianya tenaga dengan perjanjian kerja yang dibiayai dari dana BOK				2 Orang						2 Orang			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.721.001.000						1.752.152.000		
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentaseketersediaanlay ananBLUD	100persen		100persen	100pers en	1.246.041.000					100 persen	1.277.192.000		
1.2.1. 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	1.246.041.000					100 persen	1.277.192.000		
1.2.1. 2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	1.246.041.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat, Puskesm as Sokorejo	12 Bulan	1.277.192.000	Dinas Kesehatan
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	474.960.000					90,00 persen	474.960.000		
1.2.2. 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	474.960.000					100 persen	474.960.000		
1.2.2. 2.02.3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Kegiatan Kesehatan Masyarakat Tingkat Puskesmas yang dilaksanakan				50 Kegiatan	474.960.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian	Masyara kat, Puskesm as Sokorejo	50 Kegiat an	474.960.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Gerakan				7 Kegiatan						7 Kegiat			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Masyarakat Hidup Sehat di wilayah kerja Puskesmas yang dilaksanakan									penyakit.	an			
		Jumlah Kegiatan Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit yang dilaksanakan			34 Kegiatan							34 Kegiatan			
		Tersedianya tenaga dengan perjanjian kerja yang dibiayai dari dana BOK			2 Orang							2 Orang			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.477.830.000							1.502.415.000	
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	983.385.000						100 persen	1.007.970.000	
1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	983.385.000						100 persen	1.007.970.000	
1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	983.385.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat, Puskesmas Dukuh	12 Bulan	1.007.970.000	Dinas Kesehatan
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	494.445.000						90,00 persen	494.445.000	
1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	494.445.000						100 persen	494.445.000	
1.2.2.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Kegiatan Kesehatan Masyarakat Tingkat Puskesmas yang dilaksanakan				58 Kegiatan	494.445.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna	Masyarakat, Puskesmas Dukuh	58 Kegiatan	494.445.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah kegiatan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayah kerja Puskesmas yang dilaksanakan				6 Kegiatan						pencegahan dan pengendalian penyakit.	6 Kegiat an		
		Jumlah Kegiatan Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respons Penyakit yang dilaksanakan				37 Kegiatan							37 Kegiat an		
		Tersedianya tenaga dengan perjanjian kerja yang dibiayai dari dana BOK				4 Orang							4 Orang		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.682.698.000							1.711.222.000	
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	1.140.979.000						100 persen	1.169.503.000	
1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	1.140.979.000						100 persen	1.169.503.000	
1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	1.140.979.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Krapyak	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat, Puskesm as Krapyak Kidul	12 Bulan	1.169.503.000	Dinas Kesehatan
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	541.719.000						90,00 persen	541.719.000	
1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	541.719.000						100 persen	541.719.000	
1.2.2.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Kegiatan Kesehatan Masyarakat Tingkat Puskesmas yang dilaksanakan				61 Kegiatan	541.719.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Krapyak	Dana Transfer Khusus - Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi	Masyara kat, Puskesm as	61 Kegiat an	541.719.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
									Alokasi Khusus Non Fisik	Berdaya Saing	multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Krapyak Kidul				
		8 Kegiatan														8 Kegiatan
		34 Kegiatan														34 Kegiatan
		2 Orang														2 Orang
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.735.333.000						2.787.497.000			
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.086.541.000							2.138.705.000			
1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					2.086.541.000							2.138.705.000			
1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	2.086.541.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Pendapatan dari BLUD		12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.		12 Bulan	2.138.705.000	Dinas Kesehatan	
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	648.792.000						90,00 persen	648.792.000		
1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	648.792.000						100 persen	648.792.000		
1.2.2.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Kegiatan Kesehatan Masyarakat Tingkat Puskesmas yang				61 Kegiatan	648.792.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua	Dana Transfer Khusus -	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini,	Masyarakat, Puskesmas	61 Kegiatan	648.792.000	Dinas Kesehatan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		dilaksanakan						Kelurahan	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Berkualitas Dan Berdaya Saing	dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	as Kusuma Bangsa			
		11 Kegiatan							11 Kegiat an						
		43 Kegiatan							43 Kegiat an						
		2 Orang							2 Orang						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.829.063.000							1.865.467.000	
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.456.166.000							1.492.570.000	
1.2.1. 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.456.166.000							1.492.570.000	
1.2.1. 2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	1.456.166.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	Pendapatan dari BLUD		12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.		12 Bulan	1.492.570.000	Dinas Kesehatan
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	372.897.000						90,00 persen	372.897.000	
1.2.2. 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	372.897.000						100 persen	372.897.000	
1.2.2. 2.02.3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Kegiatan Kesehatan Masyarakat Tingkat				63 Kegiatan	372.897.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber Daya	1. Penguatan pencegahan faktor	Masyara kat,	63 Kegiat	372.897.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Nasional	Daerah				
3		Puskesmas yang dilaksanakan						Selatan, Jenggot	Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Puskesmas Jenggot	an		
		6 Kegiatan						6 Kegiatan							
		32 Kegiatan						32 Kegiatan							
		2 Orang						2 Orang							
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.505.546.000						2.552.457.000		
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	1.876.416.000						100 persen	1.923.327.000	
1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	1.876.416.000						100 persen	1.923.327.000	
1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	1.876.416.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat, Puskesmas Pekalongan Selatan	12 Bulan	1.923.327.000	Dinas Kesehatan
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	629.130.000						90,00 persen	629.130.000	
1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan	100 persen		100 persen	100 persen	629.130.000						100 persen	629.130.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
1.2.2. 2.02.3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Kegiatan Kesehatan Masyarakat Tingkat Puskesmas yang dilaksanakan				63 Kegiatan	629.130.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berkarya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyara kat, Puskesm as Pekalong an Selatan	63 Kegiat an	629.130.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayah kerja Puskesmas yang dilaksanakan				10 Kegiatan							10 Kegiat an		
		Jumlah Kegiatan Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit yang dilaksanakan				35 Kegiatan							35 Kegiat an		
		Tersedianya tenaga dengan perjanjian kerja yang dibiayai dari dana BOK				4 Orang							4 Orang		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.124.256.000						1.139.648.000		
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	615.666.000						100 persen	631.058.000	
1.2.1. 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	615.666.000						100 persen	631.058.000	
1.2.1. 2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	615.666.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	Pendapatan dari BLUD		12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat, Puskesm as Buaran	12 Bulan	631.058.000	Dinas Kesehatan
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92,00 persen		88,00 persen	90,00 persen	508.590.000						90,00 persen	508.590.000	
1.2.2.	Penyediaan Layanan	Ketercapaian SPM Bidang	100 persen		100 persen	100	508.590.000						100	508.590.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.02	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan				persen							persen		
1.2.2. 2.02.3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan Kesehatan Masyarakat tingkat puskesmas yang dilaksanakan				62 Kegiatan	508.590.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Masyara kat, Puskesm as Buara	62 Kegiat an	508.590.000	Dinas Kesehatan
		Jumlah kegiatan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayah kerja puskesmas yang dilaksanakan				6 Kegiatan							6 Kegiat an		
		Jumlah kegiatan Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respons Penyakit yang dilaksanakan				34 Kegiatan							34 Kegiat an		
		Tersedianya tenaga dengan perjanjian kerja yang dibiayai dari dana BOK				2 Orang							2 Orang		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						266.200.000						292.820.000		
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	266.200.000						100 persen	292.820.000	
1.2.1. 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen		100 persen	100 persen	266.200.000						100 persen	292.820.000	
1.2.1. 2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD				12 Bulan	266.200.000		Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat, Dinas Kesehata n	12 Bulan	292.820.000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						96.985.408.000						130.071.660.000		
1.3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	13.072.376.000						100 persen	11.749.789.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen						100 persen			
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		100 persen	100 persen						100 persen			
1.3.1. 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	17.669.000					100 Perse n	17.312.000	
1.3.1. 2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja yang disusun				2 Dokume n	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalong an	2 Doku men	1.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1. 2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun				2 Dokume n	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalong an	2 Doku men	1.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1. 2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 Bulan	14.669.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalong an	12 Bulan	14.312.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun				4 Dokume n						4 Doku men			
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (Penetapan dan Perubahan)				2 Dokume n						2 Doku men			
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 Dokume n						5 Doku men			
1.3.1. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	7.494.467.000					100 Perse	7.538.224.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		perangkat daerah										n			
1.3.1. 2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN				82 Bulan	7.393.967.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalong an	82 Bulan	7.437.724.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1. 2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 Bulan	95.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalong an	12 Bulan	95.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1. 2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Kertas Kerja Aset Yang di Hasilkan				2 Laporan	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalong an	2 Lapor an	1.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun													
1.3.1. 2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD				4 Laporan	4.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalong an	4 Lapor an	4.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	35.578.000						100 Perse n	34.862.000	
1.3.1. 2.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kertas aset yang dihasilkan				2 Laporan	35.578.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalong an	2 Lapor an	34.862.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	22.254.000						100 persen	22.300.000	
1.3.1. 2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, KIP dan Karnaval Batik				3 Kegiatan	9.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Kota Pekalong an	3 Kegiat an	9.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
							Panjang	Dana Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.				Penataan Ruang	
1.3.1. 2.05.1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan perundang- Undangan yang dilaksanakan				2 Kali	12.754.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalong an	2 Kali	12.800.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	486.761.000						100 persen	417.544.000	
1.3.1. 2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan	3.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalong an	12 Bulan	3.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1. 2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 Bulan	150.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalong an	12 Bulan	150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	60 Unit							60 Unit						
1.3.1. 2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 Bulan	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalong an	12 Bulan	5.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1. 2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman				11 Bulan	110.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalong an	11 Bulan	110.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1. 2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	30.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalong an	12 Bulan	30.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
									Umum						
1.3.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	12 Bulan	3.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				50 orang/kali	175.261.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	50 orang/kali	106.044.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Bulan	10.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	12 Bulan	10.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	1.295.864.000						100 persen	-	
1.3.1.2.07.3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar yang diadakan				1 Unit	1.295.864.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	1 Unit	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	2.933.884.000						100 persen	2.950.818.000	
1.3.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 Bulan	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	12 Bulan	3.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	2.535.346.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	12 Bulan	2.552.280.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
									Umum						
1.3.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan Kantor				5 Bulan	395.538.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	5 Bulan	395.538.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	785.899.000						100 persen	768.729.000	
1.3.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin berkala				40 Unit	499.078.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	40 Unit	497.758.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.09.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat -alat berat yang terpelihara secara rutin/berkala				10 Unit	86.821.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	10 Unit	70.971.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 Unit	150.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	1 Unit	150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor				12 Bulan	50.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalongan	12 Bulan	50.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	93,10 persen		82,76 persen	93,10 persen	23.945.556.000						93,10 persen	23.072.227.000	
1.3.2.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam kondisi baik	27 unit		18 unit	27 unit	21.624.247.000						27 unit	20.800.847.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kabupaten/Kota														
1.3.2. 2.01.1 0	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Bangunan Perkuatan Tebing yang Terbangun				5 Lokasi	4.624.247.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalong an	5 Lokasi	3.600.847.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.2. 2.01.1 3	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah lokasi stasiun pompa pengendali banjir yang dibangun				1 Lokasi	7.300.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalong an	1 Lokasi	7.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.2. 2.01.2 5	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	jumlah lokasi yang tertangani turap/talud/bronjong				2 Lokasi	2.000.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalong an	2 Lokasi	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.2. 2.01.2 8	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Pengendali Banjir yang terpelihara				4 Lokasi	2.000.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalong an	4 Lokasi	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.2. 2.01.2 9	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang dipelihara				1 Lokasi	500.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalong an	1 Lokasi	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.2. 2.01.4 6	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang ternormalisasi				200 Meter	200.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian	Kota Pekalong an	200 Meter	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
									Alokasi Umum	Dan Perubahan Iklim	pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.				Ruang
1.3.2. 2.01.5 5	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa yang di pelihara				29 Lokasi	5.000.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalong an	29 Lokasi	5.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.2. 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (IKK Output)	85.03 persen		78.74 persen	82.57 persen	2.321.309.000						82.57 persen	2.271.380.000	
1.3.2. 2.02.1 4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Saluran Irigasi yang Direhab				800 Meter	2.321.309.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalong an	800 Meter	2.271.380.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	92,11 persen		85,77 persen	88,39 persen	1.388.622.000						88,39 persen	1.379.855.000	
1.3.3. 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kab/kota dilaksanakan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	1.388.622.000						100 Perse n	1.379.855.000	
1.3.3. 2.01.7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah sarpras air bersih yang direvitalisasi				3 Lokasi	1.388.622.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi	Kota Pekalong an	3 Lokasi	1.379.855.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah SR yang terlayani jaringan perpipaan				120 SR					perkotaan.		120 SR		
1.3.4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	100,00 persen		0 persen	40,00 persen	11.694.755.000						40,00 persen	2.811.969.000	
1.3.4.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan di Wilayah Kota	100 Persen		0 Persen	40 Persen	11.694.755.000						40 Perse n	2.811.969.000	
1.3.4.2.01.3	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Lokasi Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				1 Lokasi	11.189.755.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalong an	1 Lokasi	2.306.969.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.4.2.01.6	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang dibangun				1 Lokasi	500.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalong an	1 Lokasi	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.4.2.01.8	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah keikutsertaan peserta Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				25 Orang	5.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalong an	25 Orang	5.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	12,87 persen		9,87 persen	11,07 persen	557.114.000						11,07 persen	545.131.000	
1.3.5.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	60051 unit		0 unit	59751 unit	557.114.000						59751 unit	545.131.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		dan SPALD T (IKK Output)													
1.3.5. 2.01.5	Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk pelayanan dasar menggunakan SPALD-T (IKK Output)				2 Unit	557.114.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Kota Pekalong an	2 Unit	545.131.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	71,49 persen		66,45 persen	68,47 persen	9.462.933.000						68,47 persen	9.313.169.000	
1.3.6. 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	177142.18 meter		0 meter	169642.18 meter	9.462.933.000						16964 2.18 meter	9.313.169.000	
1.3.6. 2.01.5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Drainase yang dibangun/ditingkatkan				750 Meter	2.104.933.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalong an	750 Meter	1.955.169.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.6. 2.01.7	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran drainase yang direhabilitasi				950 Meter	4.158.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalong an	950 Meter	4.158.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.6. 2.01.9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah subsistem drainase yang dipelihara				8 Sistem	700.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan	Kota Pekalong an	8 Sistem	700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											hidup.				
1.3.6. 2.01.1 2	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang dibangun/ditingkatkan				1000 Meter	1.000.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalong an	1000 Meter	1.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.6. 2.01.1 4	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang direhab/terpelihara				2000 Meter	1.500.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalong an	2000 Meter	1.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	18,74 persen		17,24 persen	17,84 persen	2.789.284.000						17,84 persen	1.858.898.000	
1.3.8. 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah PBG yang diberikan oleh pemerintah Kab/Kota dalam Tahun Eksisting (IKK Output)	1950 dokumen		300 dokumen	320 dokume n	2.789.284.000						320 dokum en	1.858.898.000	
1.3.8. 2.01.1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Aplikasi Bangunan Gedung yang Tersusun				1 Unit	250.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalong an	1 Unit	150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah Dokumen Data Bangunan Gedung ber-IMB yang tersusun				1 Dokume n			1 Doku men						
		Rasio Bangunan Gedung (Kecuali Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret Sederhana) Yang Layak Fungsi				0.003 Persen			0.003 Perse n						
1.3.8. 2.01.2	Perencanaan, Pembangunan,	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah				2 Banguna	2.409.284.000	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer	Membangun Lingkungan Hidup,	7. Pembangunan sistem penanganan	Kota Pekalong	2 Bangu	1.598.898.000	Dinas Pekerjaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab/Kota (IKK Output)				n		Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	an	nan		Umum dan Penataan Ruang
1.3.8. 2.01.3	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota Tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (IKK Output)				1 Regulasi	30.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	1 Regulasi	10.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penetapan Peraturan Daerah Tentang Bangunan/Gedung (IKK Output)				2 Regulasi						2 Regulasi			
1.3.8. 2.01.1 3	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kab/kota yang dipelihara/dirawat (IKK Output)				1 Bangunan	100.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	1 Bangunan	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	86,57 persen		81,12 persen	83,30 persen	33.851.923.000						83,30 persen	79.122.570.000	
1.3.10 .2.01.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik dan Sedang	132.809 KM		124.448 KM	127.792 KM	33.851.923.000						127.792 KM	79.122.570.000	
1.3.10 .2.01. 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen Perencanaan (DED) yang Tersusun				1 Dokumen	64.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalongan	1 Dokumen	64.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.10 .2.01. 4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen Laporan Survey Jalan dan Jembatan yang disusun				1 Dokumen	64.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalongan	1 Dokumen	64.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.3.10 .2.01. 5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun				2 Km	8.219.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalongan	2 Km	52.698.870.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.10 .2.01. 8	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur dan fungsi) (IKK Output)				2.5 Km	16.316.800.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalongan	2.5 Km	16.316.800.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang saluran yang dibangun			1 Km				1 Km						
1.3.10 .2.01. 9	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi				1 Km	2.885.900.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalongan	1 Km	2.885.900.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.10 .2.01. 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara (IKK Output)				153412 Km	4.471.523.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalongan	153412 Km	6.546.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang saluran dan trotoar yang dipelihara			306824 Km				306824 Km						
1.3.10 .2.01. 16	Penggantian Jembatan	Panjang jembatan yang diganti				11 M	1.283.700.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalongan	11 M	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.10 .2.01. 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang dipelihara (IKK Output)				1384.6 Meter	546.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Kota Pekalongan	1384.6 Meter	546.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.3.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	21,20 persen		7,87 persen	13,20 persen	162.491.000						13,20 persen	158.996.000	
1.3.11 .2.01.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelatihan tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	6 kali		1 kali	1 kali	112.491.000						1 kali	108.996.000	
1.3.11 .2.01. 4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota				40 Orang	60.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalong an	40 Orang	60.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.11 .2.01. 7	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah pembinaan untuk tenaga kontruksi wilayah Kabupaten/Kota				50 Orang	52.491.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalong an	50 Orang	48.996.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.11 .2.02.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi jasa konstruksi yang tersedia	100 Persen		100 Persen	100 Persen	50.000.000						100 Perse n	50.000.000	
1.3.11 .2.02. 9	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	jumlah dokumen penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang meliputi Analisa Standar Belanja Bangunan, data dan informasi jasa konstruksi, data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya				1 Dokume n	50.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalong an	1 Doku men	50.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	100,00 persen		0,00 persen	100,00 persen	60.354.000						100,00 persen	59.056.000	
1.3.12 .2.01.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang	Jumlah Penetapan RTR Kab/Kota	1 dokumen		0 dokumen	0 dokume n	25.000.000						0 dokum en	25.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	(RRTR) Kabupaten/Kota														
1.3.12 .2.01. 4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah sosialisasi Perwal RDTR Kota Pekalongan yang diselenggarakan				1 Kali	25.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	1 Kali	25.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3.12 .2.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang yang dilaksanakan	72 kali		12 kali	12 kali	35.354.000						12 kali	34.056.000	
1.3.12 .2.04. 4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				12 Kali'	35.354.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Kota Pekalongan	12 Kali'	34.056.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						30.189.087.000						28.701.288.000		
1.4.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	4.847.906.000						100 persen	4.839.842.000	
1.4.1. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	17.350.000						100 persen	17.350.000	
1.4.1. 2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja yang disusun				2 Dokumen	2.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	2 Dokumen	2.750.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.1. 2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 Dokumen	1.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Dinperkim	2 Dokumen	1.650.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
									Alokasi Umum	Pelayanan Publik	pelayanan publik.				Permukiman
1.4.1. 2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 Bulan	12.950.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperki m	12 Bulan	12.950.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
									2 Doku men						
		Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun				2 Dokume n			2 Doku men						
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				5 Dokume n			5 Doku men						
1.4.1. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	3.333.949.000						100 persen	3.352.671.000	
1.4.1. 2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	3.302.299.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperki m	12 Bulan	3.321.021.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.1. 2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 Bulan	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperki m	12 Bulan	30.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.1. 2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan SKPD disusun				1 Dokume n	1.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperki m	1 Doku men	1.650.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.1. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	9.500.000						100 persen	9.500.000	
1.4.1. 2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi dan Pekan Batik				3 kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara bertahap	Dinperki m	3 kali	9.500.000	Dinas Perumahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Kelengkapannya							Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum- Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.			Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.4.1. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	236.127.000					100 persen	209.686.000		
1.4.1. 2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperki m	12 Bulan	5.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.1. 2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 Bulan	52.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperki m	12 Bulan	48.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor diadakan				35 unit							35 unit		
1.4.1. 2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 Bulan	2.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperki m	12 Bulan	2.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.1. 2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor				11 Bulan	65.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperki m	11 Bulan	49.186.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.1. 2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperki m	12 Bulan	5.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.1. 2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				12 Bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Dinperki m	12 Bulan	2.500.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
									Alokasi Umum	Pelayanan Publik	pelayanan publik.				Permukiman
1.4.1. 2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah				12 Bulan	102.127.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	12 Bulan	98.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.1. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	958.328.000						100 persen	964.278.000	
1.4.1. 2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	1.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	12 Bulan	1.800.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.1. 2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	758.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	12 Bulan	758.200.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.1. 2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 Bulan	198.328.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	12 Bulan	204.278.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.1. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	292.652.000						100 persen	286.357.000	
1.4.1. 2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				18 unit	90.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	18 unit	90.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.1. 2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung kantor				12 Bulan	82.652.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Dinperkim	12 Bulan	76.357.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
									Alokasi Umum	Pelayanan Publik	pelayanan publik.				Permukiman
1.4.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 unit	120.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperkim	1 unit	120.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	92,35 persen		0 persen	91,35 persen	2.611.821.000						91,35 persen	1.654.461.000	
1.4.2.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah pada Kawasan Rawan Bencana yang disusun	6 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	75.000.000						1 dokumen	60.000.000	
1.4.2.2.01.1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan, Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani, data Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana, data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 dokumen	75.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Rumah Korban Bencana	1 dokumen	60.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.2.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	15 kegiatan		0 kegiatan	3 kegiatan	75.000.000						3 kegiatan	50.000.000	
1.4.2.2.02.1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat / sukarelawan tanggap bencana yang dilaksanakan				2 Kegiatan	10.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan	Rumah Korban Bencana	2 Kegiatan	10.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.				
1.4.2. 2.02.4	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator				2 kegiatan	50.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Rumah Korban Bencana	2 kegiat an	30.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.2. 2.02.5	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah kegiatan rembug warga yang dilaksanakan				3 Kegiatan	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Rumah Korban Bencana	3 Kegiat an	10.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
											6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.				
1.4.2. 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Presentase Rumah Layak Huni bagi Warga Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah (SPM/IKK Outcome)	100 persen		100 persen	100 persen	1.177.044.000						100 persen	264.461.000	
1.4.2. 2.03.1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah yang direhabilitasi				20 Unit	270.348.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder	Rumah Korban	20 Unit	164.461.000	Dinas Perumahan Rakyat dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	bencana			Kawasan Permukiman
									6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.						
1.4.2. 2.03.3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				1 lokasi	700.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Rumah Korban bencana	1 lokasi	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.2. 2.03.4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah unit rumah yang terbangun bagi korban bencana				5 Unit	206.696.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Rumah Korban bencana	5 Unit	100.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.2. 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100 persen		100 persen	100 persen	1.200.000.000						100 persen	1.200.000.000	
1.4.2. 2.05.1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan	Jumlah rusunawa yang dipelihara				3 Unit	1.200.000.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer	Memperkuat Infrastruktur Untuk	6. Pemantapan kerjasama dengan	Rumah Korban	3 Unit	1.200.000.000	Dinas Perumahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Pemilik/Penghuni Rumah Susun						Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum- Dana Alokasi Umum	Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Bencana			Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		Jumlah unit Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa				1 unit						1 unit			
1.4.2. 2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase pelaksanaan penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 persen		100 persen	100 persen	84.777.000					100 persen	80.000.000		
1.4.2. 2.06.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah bulan koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha				12 Bulan	84.777.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Rumah Korban bencana	12 Bulan	80.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas kawasan permukiman kumuh	0 hektar		498,47 hektar	291,47 hektar	17.412.286.000					291,47 hektar	17.004.276.000		
1.4.3. 2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase pelaksanaan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100 persen		100 persen	100 persen	236.400.000					100 persen	236.400.000		
1.4.3. 2.01.2	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen DE disusun				1 Dokume n	168.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	kawasan permuki man kumuh	1 Doku men	168.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.3. 2.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan	Jumlah koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan				12 Kali	68.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder	kawasan permuki man	12 Kali	68.400.000	Dinas Perumahan Rakvat dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	usaha yang dilaksanakan						Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	kumuh			Kawasan Permukiman
1.4.3.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase dokumen penataan kawasan permukiman kumuh yang disusun	100 persen		100 persen	100 persen	420.000.000						100 persen	320.000.000	
1.4.3.2.02.1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				4 Kecamatan	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	kawasan permukiman kumuh	4 Kecamatan	100.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.3.2.02.2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang disusun				1 Dokumen	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	kawasan permukiman kumuh	1 Dokumen	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.3.2.02.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan				12 Kali	70.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	kawasan permukiman kumuh	12 Kali	70.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.4.3. 2.02.8	Penyusunan/Review/Lega lisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah program pemerintah pusat atau provinsi yang difasilitasi				2 Paket	150.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	kawasan permuki man kumuh	2 Paket	150.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.3. 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luasan kawasan kumuh yang tertangani	508,47 hektar		10 hektar	128 hektar	16.755.886.000					128 hektar	16.447.876.000		
1.4.3. 2.03.1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh yang disusun				1 Dokume n	74.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	kawasan permuki man kumuh	1 Doku men	74.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.3. 2.03.2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH (IKK Output)				100 Unit	1.000.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	kawasan permuki man kumuh	100 Unit	1.000.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.3. 2.03.6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah jalan dan jembatan yang ditingkatkan				0 Lokasi	15.681.886.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh	kawasan permuki man kumuh	0 Lokasi	15.373.876.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah rumah yang dibangun di kawasan				45 Unit						kawasan permuki man kumuh	45 Unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		permukiman kumuh									dan permukiman kumuh.				
1.4.4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	2147,88 hektar		1649,41 hektar	1856,41 hektar	4.689.044.000						1856,41 hektar	4.588.188.000	
1.4.4.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Rumah Tidak Layak Huni	1.31 persen		0 persen	0.52 persen	4.689.044.000						0.52 persen	4.588.188.000	
1.4.4.2.01.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Rangka Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh				50 Unit	4.689.044.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	RLTH	50 Unit	4.588.188.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.4.5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	14,55 persen		14,44 persen	14,48 persen	628.030.000						14,48 persen	614.521.000	
1.4.5.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang Sudah Menyerahkan PSU	79.35 persen		25 persen	46.74 persen	628.030.000						46.74 persen	614.521.000	
1.4.5.2.01.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah aplikasi infrastruktur perumahan dan permukiman yang dibangun dan dikelola				1 Aplikasi	240.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	PSU Perumahan	1 Aplikasi	230.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Perencanaan Penyediaan PSU				1 Dokumen							1 Dokumen		
1.4.5.2.01.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah fasilitas jalan lingkungan yang ditangani				330 meter	280.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan.	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder	PSU Perumah	330 meter	280.000.000	Dinas Perumahan Rakvat dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	untuk Menunjang Fungsi Hunian							Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	potensi untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	an		2 Unit	
		Jumlah fasilitas RTNH yang ditangani				2 Unit									
1.4.5. 2.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi tentang PSU Perumahan (Unit Rumah yang Terfasilitasi Air Minum, Jalan Lingkungan, Akses Sanitasi, RTNH, dan PJU)				1 Dokumen	108.030.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	PSU Perumahan	1 Dokumen	104.521.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah perumahan yang telah menyerahkan aset PSU				10 Unit								10 Unit	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						1.123.513.000						1.099.348.000		
2.10.5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	100 persen		100 persen	100 persen	1.114.228.000						100 persen	1.090.262.000	
2.10.5 .2.01.	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luasan bidang tanah yang terselesaikan ganti ruginya	73.35 persen		73.35 persen	73.35 persen	1.114.228.000						73.35 persen	1.090.262.000	
2.10.5 .2.01. 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kab/Kota yang disusun				4 Dokumen	1.114.228.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Masyarakat	4 Dokumen	1.090.262.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Dokumen Proses Legalisasi Pengadaan Tanah				2 Dokumen							2 Dokumen		
		Jumlah Ganti Rugi atas Tanah /Bangunan atas proyek Pemerintah				2 lokasi							2 lokasi		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Lokasi Pengadaan Tanah				5 lokasi						5 lokasi			
2.10.6	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	50 persen		50 persen	50 persen	9.285.000						50 persen	9.086.000	
2.10.6 .2.01.	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0 persen		0 persen	0 persen	9.285.000						0 persen	9.086.000	
2.10.6 .2.01. 3	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	peresentase ketercapaian penetapan subjek dan objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee				25 persen	9.285.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.	Masyara kat	25 persen	9.086.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						12.873.146.000						12.737.740.000		
1.5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	5.432.944.000						100 persen	5.439.494.000	
1.5.1. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	62.450.000						100 persen	62.450.000	
1.5.1.	Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen renja yang				2	10.750.000	Kota Pekalongan.	Dana	Memperkuat	12. Penerapan MRI	Satpol	2	10.750.000	Satuan Polisi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.01.1	Perencanaan Perangkat Daerah	disusun				Dokume n		Pekalongan Barat, Podosugih	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	PP	Doku men		Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun			1 Dokume n						1 Doku men				
1.5.1. 2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan Perubahan RKA yang disusun				2 Dokume n	1.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol PP	2 Doku men	1.650.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.1. 2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	50.050.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol PP	12 bulan	50.050.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun			4 Dokume n				4 Doku men						
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)			2 Dokume n				2 Doku men						
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun			5 Dokume n				5 Doku men						
1.5.1. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	4.350.827.000						100 persen	4.376.416.000	
1.5.1. 2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	4.297.177.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol PP	12 bulan	4.322.766.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.1. 2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	52.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Satpol PP	12 bulan	52.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
									Alokasi Umum	Pelayanan Publik	pelayanan publik.				Penyelamatan
1.5.1. 2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 Dokume n	1.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol PP	1 Doku men	1.650.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.1. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	93.265.000						100 persen	93.265.000	
1.5.1. 2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota				2 kali	9.500.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol PP	2 kali	9.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.1. 2.05.1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi Peraturan Perundangan- undangan yang dilaksanakan				11 kali	83.765.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol PP	11 kali	83.765.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.1. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	224.439.000						100 persen	220.498.000	
1.5.1. 2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	7.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol PP	12 bulan	7.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.1. 2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	34.939.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol PP	12 bulan	30.998.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				0 unit							0 unit		
1.5.1. 2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	10.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Satpol PP	12 bulan	10.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
									Alokasi Umum	Pelayanan Publik	pelayanan publik.				Penyelamatan
1.5.1. 2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				12 bulan	97.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol PP	12 bulan	97.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.1. 2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	7.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol PP	12 bulan	7.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.1. 2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol PP	12 bulan	2.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.1. 2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				124 kali	65.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol PP	124 kali	65.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.1. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	130.458.000						100 persen	127.651.000	
1.5.1. 2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	2.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol PP	12 bulan	2.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.1. 2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	128.458.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol PP	12 bulan	125.651.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.1. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik	100 persen		100 persen	100 persen	571.505.000						100 persen	559.214.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
1.5.1. 2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	JUmlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				28 unit	380.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol PP	28 unit	400.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.1. 2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				2 unit	171.505.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol PP	2 unit	119.214.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.1. 2.09.1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	JUmlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	20.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Satpol PP	12 bulan	40.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	70,00 persen		60,00 persen	64,00 persen	6.255.724.000						64,00 persen	6.123.324.000	
1.5.2. 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum (IKK Outcome)	100 persen		80 persen	90 persen	1.822.410.000						90 persen	1.819.110.000	
1.5.2. 2.01.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah kegiatan pengumpulan data dan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran				48 kali	106.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Masyarakat	48 kali	106.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.2. 2.01.2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah pelanggaran dan pengaduan gangguan trantibum yang ditangani				365 kasus	450.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Masyarakat	365 kasus	446.700.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.5.2. 2.01.3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah hari PAM Obvit yang dilaksanakan				365 hari	1.020.410.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan konduktivitas wilayah.	Masyara kat	365 hari	1.020.410.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Jumlah hari Piket Posko Bencana Alam (PBA) yang dilaksanakan				120 hari			120 hari						
		Jumlah kegiatan Operasi Gabungan Tri Pilar yang dilaksanakan				220 kali			220 kali						
		Jumlah kegiatan Operasional Linmas yang dilaksanakan (Insidental, Latihan Defile, Lomba HUT Tk. Prov, Jambore)				25 kali			25 kali						
		Jumlah kegiatan PAM Car Free Day yang dilaksanakan				48 kali			48 kali						
		Jumlah kegiatan PAM Lebaran, Syawalan, Natal dan Tahun Bari yang dilaksanakan				4 kegiatan			4 kegiat an						
1.5.2. 2.01.4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan				35 orang	25.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan konduktivitas wilayah.	Masyara kat	35 orang	25.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.2. 2.01.5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah kegiatan peningkatan SDM Anggota Satpol PP yang dilaksanakan				5 kali	48.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan konduktivitas wilayah.	Masyara kat	5 kali	48.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.2. 2.01.7	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan upacara peringatan HUT Pol PP, Jambore dan Pelatihan SDM yang dilaksanakan				4 kali	148.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan konduktivitas wilayah.	Masyara kat	4 kali	148.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.5.2. 2.01.1 0	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	JUmlah orang yang mendapat pelayanan akibat dari pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada				1 orang	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Masyara kat	1 orang	25.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.2. 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK Output)	120 perda		20 perda	20 perda	4.413.351.000						20 perda	4.284.680.000	
1.5.2. 2.02.1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kelurahan pelaksanaan kegiatan sosialisasi penegakan perda dan perwal				27 keluraha n	270.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Masyara kat	27 kelura han	218.699.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.2. 2.02.2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan intelegen/deteksi dini yang dilaksanakan				12 kali	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Masyara kat	12 kali	20.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.2. 2.02.3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah operasi penegakan perda dan perkara yang dilaksanakan				24 kali	4.123.351.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Masyara kat	24 kali	4.045.981.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.2. 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	21 persen		8 persen	13 persen	19.963.000						13 persen	19.534.000	
1.5.2. 2.03.1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS				3 orang	19.963.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	PPNS Satpol PP	3 orang	19.534.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	1.184.478.000						100,00 persen	1.174.922.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.5.4. 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan aduan kebakaran dan ke darurat sipil non kebakaran	100 persen		100 persen	100 persen	980.203.000						100 persen	975.040.000	
1.5.4. 2.01.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Bahaya Kebkaran yang dilaksanakan				6 kali	53.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	6 kali	53.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.4. 2.01.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aduan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran yang tertangani				185 kali	842.203.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	185 kali	837.040.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.4. 2.01.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana pemadaman, penyelamatan dan ecakuasi				1 unit	15.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	1 unit	15.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.4. 2.01.7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran				2 kali	20.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	2 kali	20.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.4. 2.01.8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Persentase pengelolaan data SKIK yang dilaksanakan				100 persen	10.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	100 persen	10.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.4. 2.01.9	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan,	Jumlah rakokr dan pelatihan bersama, serta MoU yang disepakati				3 Dokume n	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	3 Doku men	40.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														
1.5.4.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang dianalisis kesiapannya	100 persen		100 persen	100 persen	46.426.000						100 persen	45.428.000	
1.5.4.2.02.1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah pendataan sarpras proteksi kebakaran di lokasi /instansi/badan				48 Dokumen	46.426.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Instansi/badan	48 Dokumen	45.428.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.4.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran	100 persen		100 persen	100 persen	83.567.000						100 persen	81.770.000	
1.5.4.2.04.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran				4 kali	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	4 kali	50.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.4.2.04.2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan seksi pemadam kebakaran				5 orang	33.567.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	5 orang	31.770.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.5.4.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase penanganan kondisi membahayakan	100 persen		100 persen	100 persen	74.282.000						100 persen	72.684.000	
1.5.4.2.05.1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah laporan kondisi membahayakan yang ditangani				48 kali	74.282.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat	48 kali	72.684.000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA						4.911.105.000							3.275.314.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
1.5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	1.854.312.000						100 persen	1.880.009.000	
1.5.1. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	18.097.000						100 Perse n	17.707.000	
1.5.1. 2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokume n	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD Kota Pekalong an	2 dokum en	2.500.000	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
1.5.1. 2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokume n	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD Kota Pekalong an	2 dokum en	1.500.000	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
1.5.1. 2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	14.097.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD Kota Pekalong an	12 bulan	13.707.000	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokume n							4 dokum en		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokume n							2 dokum en		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokume n							5 dokum en		
1.5.1. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	1.436.200.000						100 Perse n	1.444.315.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.5.1. 2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	1.403.150.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD Kota Pekalong an	12 bulan	1.411.265.000	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
1.5.1. 2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	31.550.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD Kota Pekalong an	12 bulan	31.550.000	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
1.5.1. 2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokume n	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD Kota Pekalong an	1 dokum en	1.500.000	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
1.5.1. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	20.520.000						100 Perse n	46.654.000	
1.5.1. 2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran, Hakteknas dan Karnaval batik				2 kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD Kota Pekalong an	2 kali	34.054.000	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
1.5.1. 2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan				40 orang	11.020.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD Kota Pekalong an	40 orang	12.600.000	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
1.5.1. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	138.396.000						100 Perse n	135.420.000	
1.5.1. 2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD Kota Pekalong an	12 bulan	2.500.000	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
1.5.1. 2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda				12 bulan	58.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara bertahap	BPBD Kota	12 bulan	58.400.000	Badan Penanggulang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		pos						Barat, Bendan Kergon	Umum- Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pekalong an			an Bencana Daerah
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				10 unit					10 unit				
1.5.1. 2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD Kota Pekalong an	12 bulan	5.000.000	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
1.5.1. 2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				12 bulan	29.700.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD Kota Pekalong an	12 bulan	29.700.000	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
1.5.1. 2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	9.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD Kota Pekalong an	12 bulan	9.000.000	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
1.5.1. 2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang- undangan				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD Kota Pekalong an	12 bulan	2.500.000	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
1.5.1. 2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				25 orang/ka li	31.296.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD Kota Pekalong an	25 orang/ kali	28.320.000	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
1.5.1. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	102.416.000						100 Perse n	100.213.000	
1.5.1. 2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	1.800.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	BPBD Kota Pekalong	12 bulan	1.800.000	Badan Penanggulang an Bencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
							Kergon	Dana Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.	an			Daerah	
1.5.1. 2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	60.516.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD Kota Pekalongan	12 bulan	58.313.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1. 2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	40.100.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD Kota Pekalongan	12 bulan	40.100.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	138.683.000						100 Perse n	135.700.000	
1.5.1. 2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				12 unit	79.859.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD Kota Pekalongan	12 unit	79.859.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1. 2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 unit	9.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD Kota Pekalongan	1 unit	9.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.1. 2.09.1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	49.324.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BPBD Kota Pekalongan	12 bulan	46.341.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	persentase korban bencana alam yang ditangani	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	3.056.793.000						100,00 persen	1.395.305.000	
1.5.3. 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM/IKK Outcome)	100 Persen		100 Persen	100 Persen	206.597.000						100 Perse n	156.725.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.5.3. 2.01.1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana yang disusun				1 dokume n	150.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	1 dokum en	100.000.000	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
1.5.3. 2.01.2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah jenis media informasi tentang bencana (leaflet, spanduk, dan pos)				3 jenis	56.597.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	3 jenis	56.725.000	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
		Jumlah kegiatan apel siaga yang difasilitasi				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
1.5.3. 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM/IKK Outcome)	100 Persen		100 Persen	100 Persen	1.775.708.000						100 Perse n	162.400.000	
1.5.3. 2.02.2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	jumlah personil/ relawan/ pokmas/ pelajar/masyarakat yang mendapatkan keterampilan pencegahan dan Penanggulangan bencana				200 orang	62.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	200 orang	62.400.000	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
1.5.3. 2.02.3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	jumlah gedung pusdalops yang dibangun				1 unit	1.613.308.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	1 unit	-	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
1.5.3. 2.02.4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	jumlah peralatan dan perlengkapan Kebencanaan yang diadakan				5 unit	50.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	5 unit	50.000.000	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
1.5.3. 2.02.7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Penanganan pasca bencana yang difasilitasi				12 bulan	50.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Masyara kat	12 bulan	50.000.000	Badan Penanggulang an Bencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kergon	Dana Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.				Daerah
1.5.3. 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM/IKK Outcome)	100 Persen		100 Persen	100 Persen	981.636.000						100 Perse n	985.325.000	
1.5.3. 2.03.2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	jumlah bulan penanggulangan bencana yang difasilitasi				12 bulan	831.636.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	12 bulan	835.325.000	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
1.5.3. 2.03.4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	jumlah kejadian bencana alam yang difasilitasi bantuan				4 kejadian	150.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	4 kejadi an	150.000.000	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
1.5.3. 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Peningkatan peran serta lembaga masyarakat/komunitas masyarakat tanggap bencana	100 Persen		100 Persen	100 Persen	92.852.000						100 Perse n	90.855.000	
1.5.3. 2.04.2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kebencanaan yang difasilitasi				1 lembaga	92.852.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	1 lemba ga	90.855.000	Badan Penanggulang an Bencana Daerah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						8.128.230.000							7.960.397.000	
1.6.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	4.014.053.000						100 persen	4.015.180.000	
1.6.1. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	24.610.000						100 persen	24.391.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1.6.1. 2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 dokume n	2.750.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINSOS P2KB	2 dokum en	2.750.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun				0 dokume n						DINSOS P2KB	0 dokum en		
1.6.1. 2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokume n	1.650.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINSOS P2KB	2 dokum en	1.650.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.6.1. 2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah bulan monitoring dan evaluasi perangkat daerah				12 bulan	20.210.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINSOS P2KB	12 bulan	19.991.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokume n						DINSOS P2KB	4 dokum en		
		jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokume n						DINSOS P2KB	2 dokum en		
		Jumlah Dokumen SPIP (1 dokumen RTP, 4 Laporan RTP)				5 dokume n						DINSOS P2KB	5 dokum en		
1.6.1. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	3.188.082.000						100 persen	3.206.662.000	
1.6.1. 2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				14 bulan	3.138.132.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINSOS P2KB	14 bulan	3.156.712.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.6.1. 2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	48.300.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINSOS P2KB	12 bulan	48.300.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
									Umum						
1.6.1. 2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporn keuangan SKPD yang disusun				1 dokume n	1.650.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINSOS P2KB	1 dokum en	1.650.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, umum dan jasa penunjang urusan pemda			100 persen			100 persen							
1.6.1. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	8.821.000						100 persen	8.631.000	
1.6.1. 2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota				2 kali	8.821.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINSOS P2KB	2 kali	8.631.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.6.1. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	319.458.000						100 persen	312.587.000	
1.6.1. 2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan pembangunan kantor				12 bulan	10.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINSOS P2KB	12 bulan	10.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.6.1. 2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	100.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINSOS P2KB	12 bulan	100.500.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan			11 unit			11 unit							
1.6.1. 2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	7.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINSOS P2KB	12 bulan	7.500.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
									Umum						
1.6.1. 2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	75.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINSOS P2KB	11 bulan	75.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.6.1. 2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	10.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINSOS P2KB	12 bulan	10.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.6.1. 2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan perpu				12 bulan	2.500.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINSOS P2KB	12 bulan	2.500.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.6.1. 2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				242 kali	113.958.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINSOS P2KB	242 kali	107.087.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.6.1. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	200.189.000						100 persen	195.885.000	
1.6.1. 2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	2.400.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINSOS P2KB	12 bulan	2.400.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.6.1. 2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	132.589.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINSOS P2KB	12 bulan	128.285.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.6.1. 2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan perlatan kebersihan kantor				12 bulan	65.200.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum -	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	DINSOS P2KB	12 bulan	65.200.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
							Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.				Keluarga Berencana	
1.6.1. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	272.893.000					100 persen	267.024.000		
1.6.1. 2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin / berkala				69 unit	228.993.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINSOS P2KB	69 unit	223.124.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.6.1. 2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala				1 unit	25.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINSOS P2KB	1 unit	25.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.6.1. 2.09.1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	18.900.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINSOS P2KB	12 bulan	18.900.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.6.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Diberdayakan	75 persen		58 persen	58 persen	400.360.000						58 persen	402.137.000	
1.6.2. 2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	10 persen		10 persen	10 persen	148.056.000						10 persen	149.216.000	
1.6.2. 2.01.2	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah bulan pendampingan program KUBE				12 bulan	148.056.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	Warga Miskin	12 bulan	149.216.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.6.2. 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan	Presentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang	75 persen		75 persen	75 persen	252.304.000						75 persen	252.921.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Sosial Daerah Kabupaten/Kota	aktif													
1.6.2. 2.03.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan Fasilitasi pembinaan PSKS				12 bulan	99.115.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	PSKS	12 bulan	101.788.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah rakor pembinaan psks yang dilaksanakan				6 kali							6 kali		
1.6.2. 2.03.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan Fasilitasi pembinaan PSKS				12 bulan	153.189.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	PSKS	12 bulan	151.133.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		jumlah tksk yang difasilitasi				6 orang							6 orang		
1.6.4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	1.665.354.000						100,00 persen	1.629.534.000	
1.6.4. 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial	100 Persen		100 Persen	100 Persen	1.600.357.000						100 Perse n	1.565.935.000	
1.6.4. 2.01.1	Penyediaan Permakanan	Jumlah anggota veteran dan ahli waris pejuang 3 oktober yang mendapat bantuan sembako				122 orang	249.004.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui	PMKS	122 orang	213.184.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		jumlah disabilitas yang mendapat bantuan sembako				225 orang					kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	225 orang			
		jumlah lansia yang mendapat bantuan sembako				600 orang						600 orang			
1.6.4. 2.01.3	Penyediaan Alat Bantu	jumlah pelayanan anak rentan kesejahteraan sosial				1 kegiatan	95.350.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	PMKS	1 kegiat an	95.350.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		jumlah pmks yang mendapat alat bantu				11 orang						11 orang			
		jumlah wanita rawan sosial yang mendapat pelatihan				10 orang						10 orang			
1.6.4. 2.01.4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	jumlah kelayan yang dilayani				83 orang	60.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	PMKS	83 orang	60.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.6.4. 2.01.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah bulan pelayanan PMKS di RPSBM				12 bulan	1.196.003.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	PMKS	12 bulan	1.197.401.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		jumlah fasilitasi kegiatan dalam peringatan harlun				1 kegiatan						1 kegiat an			
		jumlah keikutsertaan dalam kegiatan HDI (Hari Disabilitas Internasional)				1 kali						1 kali			
		jumlah tenaga pendukung di RPSBM				25 orang						25 orang			
		jumlah tenaga profesional di RPSBM				5 orang						5 orang			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1.6.4. 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial	3.98 persen		3.55 persen	3.55 persen	64.997.000						3.55 persen	63.599.000	
1.6.4. 2.02.9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	jumlah warga miskin yang difasilitasi nikah massal				10 pasang	64.997.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	PMKS	10 pasan g	63.599.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.6.5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial	52.49 persen		56.69 persen	56.69 persen	1.007.587.000						56.69 persen	985.914.000	
1.6.5. 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase graduasi KPM PKH	10 Persen		10 Persen	10 Persen	1.007.587.000						10 Perse n	985.914.000	
1.6.5. 2.02.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan fasilitasi bpnt				12 bulan	686.650.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	Warga Miskin	12 bulan	676.650.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah bulan pelayanan SLRT				12 bulan							12 bulan		
		jumlah dokumen database kemiskinan yang disusun				1 dokume n							1 dokum en		
1.6.5. 2.02.3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	jumlah bulan pendampingan PKH				12 bulan	320.937.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi	Warga Miskin	12 bulan	309.264.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		jumlah KPM PKH yang				200							200		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		mendapatkan sosialisasi				orang					pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.		orang		
1.6.6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	497.689.000						100,00 persen	486.984.000	
1.6.6. 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100 persen		100 persen	100 persen	497.689.000						100 persen	486.984.000	
1.6.6. 2.01.1	Penyediaan Makanan	jumlah fasilitasi kegiatan bantuan untuk korban bencana alam				1 kegiatan	470.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	Korban bencana alam dan sosial	1 kegiat an	460.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.6.6. 2.01.4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	jumlah bulan fasilitasi bantuan sosial bagi kelompok rentan				12 bulan	27.689.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	Korban bencana alam dan sosial	12 bulan	26.984.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.6.7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 persen		100 persen	100 persen	543.187.000						100 persen	440.648.000	
1.6.7. 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	100 persen		100 persen	100 persen	543.187.000						100 persen	440.648.000	
1.6.7. 2.01.1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam	Jumlah Sarpras Taman Makam Pahlawan yang				1 unit	488.187.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber Daya	2. Peningkatan ketersediaan dan	Taman Makam	1 unit	385.648.000	Dinas Sosial, Pengendalian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	direhab						Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum- Dana Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	Pahlawa n			Penduduk dan Keluarga Berencana
1.6.7. 2.01.2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pemeliharaan taman makam pahlawan				12 bulan	55.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.	Taman Makam Pahlawa n	12 bulan	55.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah taman makam pahlawan yang dilakukan pemeliharaan				1 unit							1 unit		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						3.151.074.000						2.795.253.000		
2.14.2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	71.497.000						100,00 persen	70.867.000	
2.14.2 .2.02.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 persen		100 persen	100 persen	71.497.000						100 persen	70.867.000	
2.14.2 .2.02. 11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	jumlah dokumen informasi kependudukan dan keluarga yang disusun				14 dokume n	71.497.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	DINSOS P2KB	14 dokum en	70.867.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		jumlah dokumen pendataan keluarga sejahtera yang disusun				1 dokume n							1 dokum en		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Nasional	Daerah				
2.14.3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Penurunan angka perkawinan di bawah 21 tahun	7,20 persen		8,20 persen	7,80 persen	2.916.668.000						7,80 persen	2.564.981.000	
2.14.3 .2.01.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Angka kelahiran remaja umur 15 - 19 tahun	7.74 perseribu		9.22 perseribu	9.22 perseribu	1.847.132.000						9.22 perseribu	1.844.935.000	
2.14.3 .2.01. 4	Promosi dan KIE Program KKBP Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	jumlah masyarakat yang diberikan informasi pembangunan keluarga kependudukan dan KB melalui penyuluhan langsung				51 kelompo k	110.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Akseptor KB	51 kelom pok	110.000.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.3 .2.01. 7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP	jumlah bulan penyediaan operasional Balai Penyuluhan KB				12 bulan	1.737.132.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Akseptor KB	12 bulan	1.734.935.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.3 .2.03.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	20.8 persen		20.2 persen	20.2 persen	1.069.536.000						20.2 persen	720.046.000	
2.14.3 .2.03. 6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan KB pada kelompok kegiatan				20 unit	783.061.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian	Akseptor KB	20 unit	433.571.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											penyakit.				
2.14.3 .2.03. 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	jumlah PUS dari keluarga miskin yang mendapat pelayanan KB				480 orang	286.475.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Akseptor KB	480 orang	286.475.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Unmeet need KB	12,00 persen		17,00 persen	15,00 persen	162.909.000						15,00 persen	159.405.000	
2.14.4 .2.02.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen		100 persen	100 persen	162.909.000						100 persen	159.405.000	
2.14.4 .2.02. 1	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	jumlah kegiatan / fasilitasi PPKBD, KKB, kelompok kegiatan, rumah data kependudukan dan PPKS				5 kegiatan	162.909.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	warga kota pekalongan	5 kegiatan	159.405.000	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						32.837.906.000							32.378.893.000	
2.11.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	12.859.239.000						100 persen	12.859.982.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	KABUPATEN/KOTA														
2.11.1 .2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	23.538.000						100 Perse n	23.032.000	
2.11.1 .2.01. 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 dokume n	2.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Aparatur DLH Kota Pekalongan	2 dokum en	2.750.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1 .2.01. 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokume n	1.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Aparatur DLH Kota Pekalongan	2 dokum en	1.650.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1 .2.01. 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	19.138.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Aparatur DLH Kota Pekalongan	12 bulan	18.632.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	4 dokume n			4 dokum en										
	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	2 dokume n			2 dokum en										
	Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	5 dokume n			5 dokum en										
2.11.1 .2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	9.772.122.000						100 Perse n	9.830.664.000	
2.11.1 .2.02. 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	9.664.472.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Aparatur DLH Kota Pekalongan	12 bulan	9.723.014.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.11.1 .2.02. 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	106.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Aparatur DLH Kota Pekalong an	12 bulan	106.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1 .2.02. 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokume n	1.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Aparatur DLH Kota Pekalong an	1 dokum en	1.650.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 persen			100 persen						
2.11.1 .2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	29.132.000						100 Perse n	28.506.000	
2.11.1 .2.05. 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota				2 kali	29.132.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Aparatur DLH Kota Pekalong an	2 kali	28.506.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah pakaian dinas yang diadakan				210 buah			210 buah						
2.11.1 .2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	256.272.000						100 Perse n	250.761.000	
2.11.1 .2.06. 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	5.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Aparatur DLH Kota Pekalong an	12 bulan	5.700.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1 .2.06. 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	57.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Aparatur DLH Kota Pekalong an	12 bulan	57.900.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah peralatan dan				6 unit			6 unit						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		perlengkapan gedung kantor yang diadakan													
2.11.1 .2.06. 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	8.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Aparatur DLH Kota Pekalong an	12 bulan	8.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1 .2.06. 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	82.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Aparatur DLH Kota Pekalong an	11 bulan	82.300.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1 .2.06. 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	24.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Aparatur DLH Kota Pekalong an	12 bulan	24.500.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1 .2.06. 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang- undangan				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Aparatur DLH Kota Pekalong an	12 bulan	2.500.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1 .2.06. 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				95 kali	75.372.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Aparatur DLH Kota Pekalong an	95 kali	69.861.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1 .2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	539.289.000					100 Perse n	536.288.000		
2.11.1 .2.08. 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	2.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Aparatur DLH Kota Pekalong an	12 bulan	2.400.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1 .2.08.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber				12 bulan	263.000.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara bertahap	Aparatur DLH	12 bulan	263.000.000	Dinas Lingkungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2	Daya Air dan Listrik	daya air dan listrik						Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum- Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kota Pekalong an			Hidup
2.11.1 .2.08. 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	273.889.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Aparatur DLH Kota Pekalong an	12 bulan	270.888.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah				100 persen			100 persen						
2.11.1 .2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	2.238.886.000						100 Perse n	2.190.731.000	
2.11.1 .2.09. 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				22 unit	162.982.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH Kota Pekalong an	22 unit	162.982.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1 .2.09. 3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang terpelihara secara rutin/berkala				38 unit	1.945.604.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH Kota Pekalong an	38 unit	1.897.449.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1 .2.09. 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 unit	105.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH Kota Pekalong an	1 unit	105.300.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1 .2.09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DLH Kota Pekalong an	12 bulan	25.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN	Persentase limbah yang diolah	49,01 persen		33,37 persen	40,95 persen	4.646.979.000						40,95 persen	4.442.547.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
	DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP															
2.11.3 .2.01.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang mengolah limbahnya	53.57 persen		42.51 persen	52.38 persen	969.099.000						52.38 persen	920.999.000		
2.11.3 .2.01. 1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah monitoring terhadap kegiatan / usaha pemanfaatan air tanah yang dilaksanakan				50 titik	635.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Masyara kat Kota Pekalong an	50 titik	552.299.000	Dinas Lingkungan Hidup	
		jumlah pelaku usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang disosialisasi				100 usaha/ke giatan										100 usaha/ kegiat an
		Jumlah pemantauan kualitas udara emisi/ambien yang dilaksanakan				2 kali										2 kali
		Jumlah pengambilan sampel air sungai yang dilakukan				90 kali										90 kali
		Jumlah sampah yang diambil dari sungai				5000 m3										5000 m3
2.11.3 .2.01. 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kampung iklim yang dibentuk				4 lokasi	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Masyara kat Kota Pekalong an	4 lokasi	25.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.3 .2.01. 3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sampel yang diuji				170 sampel	309.099.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Masyara kat Kota Pekalong an	170 sampe l	343.700.000	Dinas Lingkungan Hidup	
		Jumlah Uji Profesiensi/uji banding				1 hasil uji										1 hasil uji
		Persentase parameter yang diakreditasi				23 persen										23 persen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.11.3 .2.02.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase upaya penanggulangan pencemaran air	76.47 persen		70.59 persen	76.47 persen	3.677.880.000						76.47 persen	3.521.548.000	
2.11.3 .2.02. 1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah DIKPLHD yang disusun				1 dokume n	66.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Masyara kat Kota Pekalong an	1 dokum en	66.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang disusun				1 dokume n							1 dokum en		
2.11.3 .2.02. 3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah IPAL komunal yang dibangun				1 unit	3.611.880.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Masyara kat Kota Pekalong an	1 unit	3.455.548.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah limbah cair yang dikelola				240000 M3							24000 0 M3		
2.11.4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	2,949 persen		2,889 persen	2,919 persen	4.031.363.000						2,919 persen	3.933.751.000	
2.11.4 .2.01.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH Publik	110.355 Ha		108.484 Ha	109.233 Ha	4.031.363.000						109.23 3 Ha	3.933.751.000	
2.11.4 .2.01. 4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah lokasi pemeliharaan pohon di sempadan jalan				4 wilayah	3.656.363.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Masyara kat Kota Pekalong an	4 wilaya h	3.683.751.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah lokasi pemeliharaan rutin/ berkala makam				2 lokasi							2 lokasi		
		Jumlah lokasi pemeliharaan rutin/ berkala Taman Kota				4 lokasi							4 lokasi		
		Jumlah pengadaan konstruksi Taman Kota				8 lokasi							8 lokasi		
		Persentase peningkatan luasan RTH di PIM				0.001 persen							0.001 persen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.11.4 .2.01. 5	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah TAHURA yang dipelihara				7 lokasi	375.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Masyara kat Kota Pekalong an	7 lokasi	250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	100 persen		31,11 persen	13,33 persen	2.321.000						13,33 persen	2.271.000	
2.11.5 .2.01.	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3	44 persen		13 persen	6 persen	2.321.000						6 persen	2.271.000	
2.11.5 .2.01. 2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah verifikasi lapangan ke usaha/kegiatan yang mengajukan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 maupun perpanjangan Izinnya				10 perusah aan	2.321.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.	Usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3	10 perusa haan	2.271.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	100 persen		16,67 persen	16,67 persen	160.774.000						16,67 persen	66.461.000	
2.11.6 .2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi terhadap ketaatan hukum lingkungan	60 kegiatan		10 kegiatan	10 kegiatan	160.774.000						10 kegiat an	66.461.000	
	Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi terhadap ketaatan hukum lingkungan	60 kegiatan		10 kegiatan	10 kegiatan							10 kegiat an		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kabupaten/Kota														
2.11.6 .2.01. 1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah inventarisasi data perusahaan di Kota Pekalongan berbasis aplikasi				1 kegiatan	117.624.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Usaha dan/atau Kegiatan di Kota Pekalong an	1 kegiat an	23.311.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah monitoring/pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan kepada perusahaan yang belum memiliki Izin Lingkungan				30 perusah aan						30 perusa haan			
2.11.6 .2.01. 3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				38 perusah aan	38.150.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Usaha dan/atau Kegiatan di Kota Pekalong an	38 perusa haan	38.150.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.6 .2.01. 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah pengawasan terpadu dengan pihak terkait dalam rangka penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH				5 kali	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Usaha dan/atau Kegiatan di Kota Pekalong an	5 kali	5.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	50,00 persen		0 persen	50,00 persen	403.906.000						50,00 persen	404.307.000	
2.11.8 .2.01.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	5 komunitas		0 komunitas	5 komunitas	403.906.000						5 komun itas	404.307.000	
2.11.8 .2.01. 1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga	Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan komunitas peduli lingkungan hidup di Kota Pekalongan				10 kegiatan	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Masyara kat Kota Pekalong an	10 kegiat an	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kemasyarakatan							Umum	Pelayanan Publik	pelayanan publik.					
		Jumlah kelompok lembaga kemasyarakatan (PKK RT/ RW/Kelurahan/Kecamatan) yang mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan lingkungan hidup				2 kelompok						2 kelompok			
2.11.8 .2.01. 2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Saka Kalpataru (Pramuka) yang dibina				80 orang	60.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat Kota Pekalong an	80 orang	70.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.8 .2.01. 3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah fasilitasi persiapan Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat Provinsi dan/atau Nasional yang diselenggarakan				1 event	243.906.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat Kota Pekalong an	1 event	234.307.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar lingkungan hidup yang diselenggarakan			2 event				2 event						
		Jumlah Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat Kota Pekalongan yang diselenggarakan			1 event				1 event						
		Jumlah lomba-lomba dalam rangka peringatan hari-hari besar lingkungan hidup yang diselenggarakan			4 lomba				4 lomba						
2.11.9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	75 persen		75 persen	75 persen	88.209.000						75 persen	113.570.000	
2.11.9 .2.01.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat	18 penghargaan		3 penghargaan	3 penghargaan	88.209.000						3 penghargaan	113.570.000	
2.11.9 .2.01. 1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam	Jumlah penilaian Adiwiyata Tingkat Kota yang diselenggarakan				1 event	88.209.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Sekolah dan Perusaha an di Kota	1 event	113.570.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Nasional		Daerah			
	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							Umum	Pelayanan Publik	pelayanan publik.	Pekalong an				
		Jumlah Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) Daerah yang diselenggarakan			1 event							1 event			
		Jumlah penilaian Sekolah Adiwiyata yang diusulkan ke Tingkat Provinsi dan Nasional			2 event							2 event			
2.11.1 0	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen		100 persen	100 persen	18.570.000					100 persen	18.171.000		
2.11.1 0.2.01 .	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	36 kasus		6 kasus	6 kasus	18.570.000					6 kasus	18.171.000		
2.11.1 0.2.01 .1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi yang dilakukan				18 kali	18.570.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat Kota Pekalong an	18 kali	18.171.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	0,31 persen		2,19 persen	0,28 persen	10.626.545.000					0,28 persen	10.537.833.000		
2.11.1 1.2.01 .	Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah	18.19 persen		17.01 persen	17.46 persen	10.626.545.000					17.46 persen	10.537.833.000		
2.11.1 1.2.01 .3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota				128 orang/bu lan	6.381.983.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Masyara kat Kota Pekalong an	128 orang/ bulan	6.289.342.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah ruas jalan yang disapu			20 ruas jalan								20 ruas jalan		
		Jumlah TPS3R yang difasilitasi			21 TPS3R								21 TPS3		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah TPS3R yang operasional				21 unit						R	21 unit		
2.11.1 1.2.01 .4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Bank Sampah RW yang dibina				24 unit	414.562.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Masyara kat Kota Pekalong an	24 unit	418.491.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah lokasi pembuangan sampah liar yang diawasi				25 lokasi							25 lokasi		
		Jumlah perlengkapan bank sampah yg dibeli				6 jenis							6 jenis		
		Jumlah tenaga kerja Bank Sampah Induk yang difasilitasi				4 orang/bu lan							4 orang/ bulan		
		Jumlah tenaga kerja persampahan yang difasilitasi				6000 orang/ka li							6000 orang/ kali		
		Jumlah timbangan sampah yang dibeli				24 buah							24 buah		
2.11.1 1.2.01 .5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah bahan habis pakai yang dibeli				14 jenis	3.830.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Masyara kat Kota Pekalong an	14 jenis	3.830.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah container yang dibeli				5 unit							5 unit		
		Jumlah dumptruk yang dibeli				1 unit							1 unit		
		Jumlah incinerator yang dibeli				1 unit							1 unit		
		Jumlah kendaraan unit roda 3 yang dibeli				7 unit							7 unit		
		Jumlah perlengkapan pakaian kerja yang dibeli				4 jenis							4 jenis		
		Jumlah TPS3R yang direvitalisasi				3 unit							3 unit		
		Jumlah TPS yang dipelihara				2 unit							2 unit		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					5.956.167.000							5.851.121.000		
2.12.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	5.085.856.000						100 persen	5.070.953.000	
2.12.1 .2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	31.878.000						100 Perse n	31.194.000	
2.12.1 .2.01. 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 dokume n	2.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukca pil Kota Pekalong an	2 dokum en	2.750.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1 .2.01. 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA, Perubahan RKA, DPA dan Perubahan DPA yang disusun				4 dokume n	1.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukca pil Kota Pekalong an	4 dokum en	1.650.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1 .2.01. 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	27.478.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukca pil Kota Pekalong an	12 bulan	26.794.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	4 dokume n						4 dokum en							
	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	2 dokume n						2 dokum en							
	Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	5 dokume n						5 dokum en							
2.12.1 .2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	3.271.031.000						100 Perse n	3.289.824.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.12.1 .2.02. 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	3.206.381.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pendudu k Kota Pekalong an	12 bulan	3.225.174.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1 .2.02. 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	63.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pendudu k Kota Pekalong an	12 bulan	63.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1 .2.02. 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokume n	1.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pendudu k Kota Pekalong an	1 dokum en	1.650.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1 .2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	111.485.000						100 Perse n	109.088.000	
2.12.1 .2.05. 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi dan Pekan Batik				2 kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukca pil Kota Pekalong an	2 kali	9.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1 .2.05. 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah petugas pelayanan Administrasi Kependudukan yang ditingkatkan kompetensinya				50 orang	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukca pil Kota Pekalong an	50 orang	12.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1 .2.05. 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan pelaksanaan Sosialisasi melalui media massa dan elektronik				12 bulan	89.985.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukca pil Kota Pekalong an	12 bulan	87.588.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah Sosialisasi Adminduk yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
2.12.1 .2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum	100 Persen		100 Persen	100 Persen	1.271.179.000						100 Perse	1.247.083.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
		perangkat daerah										n				
2.12.1 .2.06. 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukca pil Kota Pekalong an	12 bulan	1.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.1 .2.06. 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-el yg diadakan				492 rim	1.086.179.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukca pil Kota Pekalong an	492 rim	1.062.083.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan										12 bulan
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor untuk Pelayanan Adminduk				12 bulan										12 bulan
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				12 unit										12 unit
2.12.1 .2.06. 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	4.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukca pil Kota Pekalong an	12 bulan	4.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.1 .2.06. 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	35.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukca pil Kota Pekalong an	11 bulan	35.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.1 .2.06. 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindukca pil Kota Pekalong an	12 bulan	40.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.1 .2.06. 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	4.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Dindukca pil Kota Pekalong an	12 bulan	4.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
									Alokasi Umum	Pelayanan Publik	pelayanan publik.				Sipil
2.12.1 .2.06. 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				35 kali	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindikcapil Kota Pekalongan	35 kali	100.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1 .2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	297.588.000						100 Persen	293.278.000	
2.12.1 .2.08. 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindikcapil Kota Pekalongan	12 bulan	3.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1 .2.08. 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	110.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindikcapil Kota Pekalongan	12 bulan	110.100.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1 .2.08. 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan adminduk				12 bulan	184.488.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindikcapil Kota Pekalongan	12 bulan	180.178.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kebersihan kantor				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK Walikota				1 orang/bulan							1 orang/bulan		
2.12.1 .2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	102.695.000						100 Persen	100.486.000	
2.12.1 .2.09. 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				16 unit	56.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Dindikcapil Kota Pekalongan	16 unit	56.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								Alokasi Umum	Pelayanan Publik	pelayanan publik.				Sipil
2.12.1 .2.09. 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				3 unit	23.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindikca pil Kota Pekalong an	3 unit	23.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1 .2.09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	23.695.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dindikca pil Kota Pekalong an	12 bulan	21.486.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	88,75 persen		80,00 persen	83,53 persen	328.428.000						83,53 persen	330.857.000	
2.12.2 .2.01.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	1453824 dokumen		235446 dokumen	240932 dokumen	328.428.000						24093 2 dokumen	330.857.000	
2.12.2 .2.01. 2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	jumlah penerbitan KK				28000 KK	260.928.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Penduduk Kota Pekalong an	28000 KK	263.357.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah perekaman KTP elektronik (IKK Outcome)				31000 KTP-el							31000 KTP-el		
2.12.2 .2.01. 4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen audit dan surveillance ISO				1 dokumen	31.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Penduduk Kota Pekalong an	1 dokumen	31.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.2 .2.01. 7	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Cakupan kepemilikan KIA (IKK Outcome)				60 persen	36.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Penduduk Kota Pekalong an	60 persen	36.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	94,00 persen		93,25 persen	93,55 persen	274.137.000						93,55 persen	275.826.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.12.3 .2.01.	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	574182 dokumen		92438 dokumen	95045 dokumen	274.137.000						95045 dokumen	275.826.000	
2.12.3 .2.01. 1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	jumlah penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Anak (IKK Outcome)				5475 akta kelahiran	262.137.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Penduduk Kota Pekalongan	5475 akta kelahiran	263.826.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		jumlah penerbitan Kutipan Akta Kematian (IKK Output)				3225 akta kematian							3225 akta kematian		
2.12.3 .2.01. 2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	jumlah penerbitan Kutipan Akta Perceraian dalam 1 tahun (IKK Output)				10 akta perceraian	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Penduduk Kota Pekalongan	10 akta perceraian	12.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		jumlah penerbitan Kutipan Akta Perkawinan dalam 1 tahun (IKK output)				50 akta perkawinan							50 akta perkawinan		
2.12.4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	14,00 OPD		5,00 OPD	9,00 OPD	267.746.000						9,00 OPD	173.485.000	
2.12.4 .2.03.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyajian data kependudukan (IKK Output)	2 kali		2 kali	2 kali	267.746.000						2 kali	173.485.000	
2.12.4 .2.03. 3	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah buku Data Agregat Kependudukan (Penyajian Data Kependudukan)				96 buku	176.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Penduduk Kota Pekalongan	96 buku	76.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		jumlah pemeliharaan perangkat keras SIAK				5 unit							5 unit		
		Jumlah pengadaan aplikasi pelayanan adminduk				1 aplikasi							1 aplikasi		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Rapat Koordinasi pelaporan Kependudukan yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
2.12.4 .2.03. 5	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sosialisasi Adminduk yang dilaksanakan				1 kali	69.746.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pendudu k Kota Pekalong an	1 kali	75.485.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.4 .2.03. 8	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah arsip Permohonan akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan)				5600 berkas	22.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pendudu k Kota Pekalong an	5600 berkas	22.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah arsip register akta catatan sipil yang diperbaiki penjilidannya (berupa penjilidan)				112 buku							112 buku		
		Jumlah Fumigasi Arsip				1 kali							1 kali		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2.8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						442.420.000						452.803.000		
2.8.2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	11,09 persen		1,85 persen	5,55 persen	60.354.000						5,55 persen	96.534.000	
2.8.2. 2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Sub Kegiatan yang responsif gender	16,67 persen		16,67 persen	16.67 persen	9.285.000						16.67 persen	46.564.000	
2.8.2. 2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen PPRG yang disusun				1 Dokume n	9.285.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaian, pmtakhran & pmnfaatan data pilah gender & anak serta prnngktn pngthuan & pmhmn indvdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia	OPD	1 Doku men	46.564.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
										usaha tntng Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).					
2.8.2. 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi/ advokasi Pemberdayaan Perempuan	40,00 persen		6,67 persen	20 persen	37.141.000					20 persen	36.342.000		
2.8.2. 2.02.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kegiatan advokasi PUG yang dilaksanakan				1 Kali	37.141.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmnfataan data pilah gender & anak serta pngngktn pngthuan & pmhmn indvdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).	Organisa si Kemasya rakatan/L embaga Kemasya rakatan	1 Kali	36.342.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.8.2. 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan dharma wanita	100,00 persen		50,00 persen	100 persen	13.928.000					100 persen	13.628.000		
2.8.2. 2.03.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah monev Dharma Wanita Persatuan Kota Pekalongan				20 Kali	13.928.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmnfataan data pilah gender & anak serta pngngktn pngthuan & pmhmn indvdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msvrakat, media	Dharma Wanita Persatua n Kota Pekalong an	20 Kali	13.628.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).				
2.8.3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	23,99 persen		23,99 persen	23,99 persen	65.837.000						23,99 persen	64.421.000	
2.8.3. 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani (IKK Output)	100,00 persen		100,00 persen	100 persen	65.837.000						100 persen	64.421.000	
2.8.3. 2.02.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian konsultasi pengasuhan anak dan permasalahan keluarga				9 Kali	65.837.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmnfataan data pilah gender & anak serta pngngktn pngthuan & pmhmn indvdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).	Perempu an. Masyara kat	9 Kali	64.421.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah pendampingan kasus kekerasan yang dilaksanakan				12 Kali									
2.8.6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	55,56 persen		25,93 persen	33,33 persen	266.001.000						33,33 persen	242.700.000	
2.8.6. 2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase SRA (Sekolah Ramah Anak)	10,96 persen		9,98 persen	10.37 persen	112.226.000						10.37 persen	111.630.000	
2.8.6. 2.01.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah advokasi kelurahan layak anak yang dilaksanakan				27 Keluraha n	112.226.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmnfataan data	Sekolah Ramah Anak	27 Kelura han	111.630.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	pilah gender & anak serta pngngktn pngthuan & pmhmn indvdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).	(SRA), Kelurahan, APSAI			Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Koordinasi Program Kerja dengan Lembaga APSAI yang dilaksanakan			3 Kali							3 Kali			
		Jumlah sekolah yang terpilih mendapat penghargaan SRA Tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, atau sederajat			12 Sekolah							12 Sekolah			
2.8.6.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase forum anak yang aktif	40,63 persen		3,13 persen	15.63 persen	153.775.000						15.63 persen	131.070.000	
2.8.6.2.02.1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelatihan KHA yang dilaksanakan				1 Kali	39.275.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmnfaatan data pilah gender & anak serta pngngktn pngthuan & pmhmn indvdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).	Guru, Posyandu, Forum Anak dan Anak, Ibu dan Balita, Masyarakat	1 Kali	38.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah kelompok Posyandu yang terpilih mendapat penghargaan lomba Posyandu				4 Kelompok						4 Kelompok			
2.8.6.2.02.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Festival Anak yang dilaksanakan				1 Kali	54.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmnfaatan data pilah gender & anak serta pngngktn pngthuan & pmhmn indvdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia	Guru, Posyandu, Forum Anak dan Anak, Ibu dan Balita, Masyarakat	1 Kali	52.900.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah kegiatan Pelatihan Forum Anak yang dilaksanakan				1 Kali						1 Kali			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
										usaha tntng Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).					
2.8.6. 2.02.4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelatihan kader Ketahanan Keluarga dan kader PATBM tingkat Kelurahan yang dilaksanakan				1 Kali	60.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmnfaatan data pilah gender & anak serta pnngktn pngthuan & pmhmn indvdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).	Guru, Posyand u, Forum Anak dan Anak, Ibu dan Balita, Masyara kat	1 Kali	40.170.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah kelompok GSIB yang mendapat penghargaan lomba GSIB				4 Kelompo k						4 Kelom pok			
2.8.7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	100,00 persen		0 persen	100,00 persen	50.228.000						100,00 persen	49.148.000	
2.8.7. 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (IKK Outcome)	100,00 Persen		100,00 Persen	100 Persen	50.228.000						100 Perse n	49.148.000	
2.8.7. 2.01.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian konsultasi pengasuhan anak dan permasalahan keluarga				6 Kali	50.228.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Pnguatn sistem pnydiaan, pmtakhran & pmnfaatan data pilah gender & anak serta pnngktn pngthuan & pmhmn indvdu baik perempuan, laki2, kmnitas, lmbg msyrakat, media massa & dunia usaha tntng Pengarusutamaan Gender (PUG) & Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).	Anak, Masyara kat	6 Kali	49.148.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah pendampingan kasus kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan				13 Kali							13 Kali		
		Jumlah pendampingan orang tua dan anak beresiko/rentan yang dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						7.707.017.000							5.501.353.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2.13.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	5.592.627.000						100 persen	3.279.021.000		
2.13.1 .2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100,00 Persen		100,00 Persen	100 Persen	19.035.000						100 Perse n	18.625.000		
2.13.1 .2.01. 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 Dokume n	4.035.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA Kota Pekalong an	2 Doku men	3.625.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.13.1 .2.01. 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 Dokume n	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA Kota Pekalong an	2 Doku men	1.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.13.1 .2.01. 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 Bulan	13.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA Kota Pekalong an	12 Bulan	13.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 Dokume n										4 Doku men
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 Dokume n										2 Doku men
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 Dokume n										5 Doku men
2.13.1 .2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100,00 Persen		100,00 Persen	100 Persen	2.685.247.000						100 Perse n	2.700.740.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.13.1 .2.02. 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 Bulan	2.637.097.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA Kota Pekalong an	12 Bulan	2.652.590.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.1 .2.02. 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 Bulan	46.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA Kota Pekalong an	12 Bulan	46.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.1 .2.02. 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 Dokume n	1.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA Kota Pekalong an	1 Doku men	1.650.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.1 .2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00 Persen		100,00 Persen	100 Persen	8.821.000						100 Perse n	8.631.000	
2.13.1 .2.05. 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota				2 Kali	8.821.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA Kota Pekalong an	2 Kali	8.631.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.1 .2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100,00 Persen		100,00 Persen	100 Persen	202.405.000						100 Perse n	198.052.000	
2.13.1 .2.06. 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan	1.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA Kota Pekalong an	12 Bulan	1.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.1 .2.06. 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 Bulan	27.345.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum- Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	DPMPPA Kota Pekalong	12 Bulan	25.052.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
							Semua Kelurahan	Alokasi Umum	Pelayanan Publik	pelayanan publik.	an			dan Perlindungan Anak	
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				10 Unit						10 Unit			
2.13.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 Bulan	1.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA Kota Pekalongan	12 Bulan	1.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 Bulan	24.060.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA Kota Pekalongan	11 Bulan	22.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	6.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA Kota Pekalongan	12 Bulan	6.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA Kota Pekalongan	12 Bulan	2.500.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				157 Orang/Kali	140.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA Kota Pekalongan	157 Orang/ Kali	140.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00 Persen		0 Persen	100 Persen	2.321.309.000						100 Perse n	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.13.1.2.07.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dibangun				1 Unit	2.321.309.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA Kota Pekalongan	1 Unit		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 Persen		100,00 Persen	100 Persen	174.005.000					100 Persen	175.079.000		
2.13.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 Bulan	2.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA Kota Pekalongan	12 Bulan	2.400.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	67.905.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA Kota Pekalongan	12 Bulan	68.979.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 Bulan	103.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA Kota Pekalongan	12 Bulan	103.700.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 Persen		100,00 Persen	100 Persen	181.805.000					100 Persen	177.894.000		
2.13.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				18 Unit	65.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA Kota Pekalongan	18 Unit	65.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.13.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				2 Unit	106.005.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		DPMPPA Kota Pekalong an	2 Unit	102.094.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 Bulan	10.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPA Kota Pekalong an	12 Bulan	10.800.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan	100,00 persen		16,67 persen	50,00 persen	1.250.618.000						50,00 persen	1.240.453.000	
2.13.3.2.01.	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase Fasilitasi Kerja sama TNI dan Kelurahan	66.67 persen		11,11 persen	11.11 persen	1.250.618.000						11.11 persen	1.240.453.000	
2.13.3.2.01.2	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang terfasilitasi kegiatan Karya Bakti TNI				1 Kelurahan	1.250.618.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	1 Kelura han	1.240.453.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah kelurahan yang terfasilitasi kegiatan TMMD				3 Kelurahan		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	3 Kelura han						
2.13.4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"	70,37 persen		51,85 persen	59,26 persen	51.997.000						59,26 persen	50.878.000	
2.13.4.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kinerja administrasi kelurahan	100,00 persen		100,00 persen	100 persen	51.997.000						100 persen	50.878.000	
2.13.4.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen evaluasi perkembangan kelurahan yang disusun				1 Dokumen	51.997.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Keluraha n	1 Dokumen	50.878.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Umum	Pelayanan Publik	pelayanan publik.				Perlindungan Anak	
		Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan lomba kelurahan				3 Keluraha n						3 Kelura han			
2.13.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	96,92 persen		95,97 persen	96,35 persen	811.775.000					96,35 persen	931.001.000		
2.13.5 .2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	100,00 persen		100,00 persen	100 persen	811.775.000					100 persen	931.001.000		
2.13.5 .2.01. 2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen evaluasi pemberdayaan LKK yang disusun				2 Dokume n	223.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Lembaga Kemasya rakatan Keluraha n (LKK), Masyara kat	2 Doku men	266.415.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah laporan pengolahan data aplikasi jogotonggo yang disusun				4 Dokume n						4 Doku men			
2.13.5 .2.01. 3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	Jumlah kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas fasilitator pemberdayaan yang dilaksanakan				1 Kali	172.875.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Lembaga Kemasya rakatan Keluraha n (LKK), Masyara kat	1 Kali	248.936.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas LKK				3 Kali						3 Kali			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Masyarakat Hukum Adat	yang dilaksanakan													
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat				1 Kali						1 Kali			
2.13.5 .2.01. 6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah inovator TTG				3 Inovator	102.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Lembaga Kemasya rakatan Kelurahan (LKK), Masyara kat	3 Inovat or	102.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan lomba stand gelar karya TTG				3 Kelurahan						3 Kelura han			
2.13.5 .2.01. 7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kelurahan yang terpilih menjadi pelaksana terbaik gotong royong masyarakat				3 Kelurahan	71.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Lembaga Kemasya rakatan Kelurahan (LKK), Masyara kat	3 Kelura han	71.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.5 .2.01. 9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan TP PKK Kota Pekalongan				12 Bulan	242.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Lembaga Kemasya rakatan Kelurahan (LKK), Masyara kat	12 Bulan	242.650.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah kegiatan Bintek pengelolaan UP2K-PKK yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah kegiatan pelatihan ketrampilan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah kegiatan pelatihan pembuatan kerajinan dari limbah plastik yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah Kelompok Bank Sampah yang mendapat penghargaan lomba Bank Sampah				4 Kelompo k							4 Kelom pok		
		Jumlah Kelompok UP2K PKK yang terpilih mendapat penghargaan Lomba UP2K				3 TP PKK Kelurahan							3 TP PKK Kelura		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		PKK				n						han			
		Jumlah Peserta Pelatihan TP3 PKK				2 Kali						2 Kali			
		Jumlah TP PKK Kelurahan binaan yang dibina				8 Keluraha n						8 Kelura han			
		Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan Lomba Administrasi PKK				3 TP PKK Keluraha n						3 TP PKK Kelura han			
		Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan Lomba Beberan dan Simulasi Pola Asuh				3 TP PKK Keluraha n						3 TP PKK Kelura han			
		Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan Lomba Hatinya PKK				3 TP PKK Keluraha n						3 TP PKK Kelura han			
		Jumlah TP PKK Kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan Lomba produk unggulan One Village One Product Innovation				3 TP PKK Keluraha n						3 TP PKK Kelura han			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						27.708.575.000						26.702.541.656		
2.15.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	19.416.202.000					100 persen	19.442.136.000		
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen									
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		100 persen	100 persen									
2.15.1 .2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	21.500.000					100 persen	21.500.000		
2.15.1	Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen renja dan				2	3.000.000		PENDAPAT	Memperkuat	12. Penerapan MRI	Pelayana	2	3.000.000	Dinas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
.2.01. 1	Perencanaan Perangkat Daerah	perubahan renja yang disusun				dokume n			AN ASLI DAERAH (PAD)	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	n Masyara kat	dokum en		Perhubungan
2.15.1 .2.01. 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokume n	2.500.000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pelayana n Masyara kat	2 dokum en	2.500.000	Dinas Perhubungan
2.15.1 .2.01. 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun (LPPD, LKPJ, LKJIP)				3 dokume n	16.000.000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pelayana n Masyara kat	3 dokum en	16.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun			4 dokume n			4 dokum en							
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)			2 dokume n			2 dokum en							
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun			5 dokume n			5 dokum en							
2.15.1 .2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen	5.243.269.000						100 persen	5.273.434.000	
2.15.1 .2.02. 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	5.155.269.000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pelayan Masyara kat	12 bulan	5.185.434.000	Dinas Perhubungan
2.15.1 .2.02. 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	86.000.000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pelayan Masyara kat	12 bulan	86.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.1 .2.02. 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokume n	2.000.000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pelayan Masyara kat	1 dokum en	2.000.000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.1 .2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen		0 persen	100 persen	37.643.000						100 persen	40.000.000	
2.15.1 .2.03. 4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah bulan movev aset Dinas Perhubungan				12 bulan	37.643.000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pelayana n Masyara kat	12 bulan	40.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.1 .2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	10.000.000						100 persen	150.000.000	
2.15.1 .2.05. 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota				2 kali	10.000.000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pelayana n Masyara kat	2 kali	150.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.1 .2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	657.500.000						100 persen	672.500.000	
2.15.1 .2.06. 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	5.000.000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pelayana n Masyara kat	12 bulan	5.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.1 .2.06. 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	75.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pelayana n Masyara kat	12 bulan	75.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				7 unit							7 unit		
2.15.1 .2.06. 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	7.500.000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pelayana n Masyara kat	12 bulan	7.500.000	Dinas Perhubungan
2.15.1 .2.06. 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				12 bulan	310.000.000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pelayana n Masyara kat	12 bulan	325.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.1 .2.06.	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan				12 bulan	170.000.000		PENDAPAT AN ASLI	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara bertahap	Pelayana n	12 bulan	170.000.000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5	Penggandaan	penggandaan						DAERAH (PAD)	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat				
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan				12 bulan					12 bulan				
2.15.1 .2.06. 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang- undangan				12 bulan	2.500.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pelayana n Masyara kat	12 bulan	2.500.000	Dinas Perhubungan
2.15.1 .2.06. 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				100 kali	87.500.000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pelayana n Masyara kat	100 kali	87.500.000	Dinas Perhubungan
2.15.1 .2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	12.736.290.000						100 persen	12.474.702.000	
2.15.1 .2.08. 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	2.000.000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pelayana n Masyara kat	12 bulan	2.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.1 .2.08. 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12.418.290.000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pelayana n Masyara kat	12 bulan	12.151.702.000	Dinas Perhubungan
2.15.1 .2.08. 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	316.000.000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pelayana n Masyara kat	12 bulan	321.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK Walikota				7 orang/bu lan							7 orang/ bulan		
2.15.1 .2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	710.000.000						100 persen	810.000.000	
2.15.1 .2.09.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang				32 unit	270.000.000		PENDAPAT AN ASLI	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara bertahap	Pelayana n	32 unit	270.000.000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpelihara secara rutin berkala							DAERAH (PAD)	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat			
2.15.1 .2.09. 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				3 unit	400.000.000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pelayana n Masyara kat	3 unit	500.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.1 .2.09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	40.000.000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pelayana n Masyara kat	12 bulan	40.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	0,44 ratio		0,35 ratio	0,44 ratio	8.292.373.000						0,44 ratio	7.260.405.656	
		Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	100,00 persen		87,00 persen	92,00 persen						92,00 persen			
		Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	0,74 persen		17,94 persen	0,75 persen						0,75 persen			
2.15.2 .2.01.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	100 persen		100 persen	100 persen	62.000.000						100 persen	62.000.000	
2.15.2 .2.01. 1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen survey lalu lintas yang disusun				2 dokume n	62.000.000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Penggun a Jalan	2 dokum en	62.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.2 .2.02.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan perlengkapan jalan	4 jenis		3 jenis	4 jenis	3.640.385.000						4 jenis	3.276.005.000	
2.15.2 .2.02. 1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lampu Penerangan Jalan Umum bermeterisasi				147 unit	669.685.000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Penggun a Jalan	147 unit	611.305.000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.15.2 .2.02. 2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	APILL ATCS yang terpasang				1 unit	1.456.700.000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Penggun a Jalan	1 unit	1.150.700.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah APILL yang terpasang				1 unit							1 unit		
		Jumlah Lampu flashing yang terpasang				4 unit							4 unit		
		Jumlah panjang pengecatan marka jalan				7600 meter							7600 meter		
		Jumlah rambu yang terpasang				22 unit							22 unit		
		Jumlah Vehicle Detector ATCS yang terpasang				1 unit							1 unit		
2.15.2 .2.02. 3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum				12 bulan	1.214.000.000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Penggun a Jalan	12 bulan	1.214.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah Lampu penerangan jalan umum di ganti LED				100 unit							100 unit		
		Tenaga Teknis PJU				96 orang/bu lan							96 orang/ bulan		
2.15.2 .2.02. 4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah bulan pemeliharaan rambu dan instalasi lalu lintas				12 bulan	300.000.000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Penggun a Jalan	12 bulan	300.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.2 .2.03.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1 kali		0 kali	1 kali	105.000.000						1 kali	155.000.000	
2.15.2 .2.03. 1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Penyusunan Dokumen Kelengkapan Pembangunan Terminal Tipe C				1 dokume n	75.000.000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Penggun a Jalan	1 dokum en	125.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.2 .2.03.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal	Jumlah halte yang dipelihara				2 unit	30.000.000		PENDAPAT AN ASLI	Memperkuat Infrastruktur Untuk	8. Perluasan dan peningkatan kualitas	Penggun a Jalan	2 unit	30.000.000	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4	(Fasilitas Utama dan Pendukung)								DAERAH (PAD)	Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.				
2.15.2 .2.04.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah pembinaan dan pengawasan Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dilaksanakan	1080 kali		180 kali	180 kali	431.087.000						180 kali	410.000.000	
2.15.2 .2.04. 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan penerbitan izin penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan juru parkir				12 bulan	431.087.000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Penggun a Jalan	12 bulan	410.000.000	Dinas Perhubungan
		Pengadaan Kantong Parkir				1 pekerjaa n							1 pekerj aan		
2.15.2 .2.05.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pelaksanaan pelayanan uji berkala (IKK Output)	25.06 persen		70.33 persen	65.26 persen	974.950.000						65.26 persen	289.444.656	
2.15.2 .2.05. 1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji yang diadakan				1 unit	685.950.000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Penggun a Jalan	1 unit	444.656	Dinas Perhubungan
2.15.2 .2.05. 4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah tanda bukti lulus uji yang diadakan				6500 buah	170.000.000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Penggun a Jalan	6500 buah	170.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.2 .2.05. 7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji yang dipelihara dan dikalibrasi				9 unit	104.000.000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Penggun a Jalan	9 unit	104.000.000	Dinas Perhubungan
		Perawatan Aplikasi				1 pekerjaa n							1 pekerj aan		
		Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor				12 orang/bu							12 orang/		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
						lan						bulan			
2.15.2 .2.05. 8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kunjungan pembinaan usaha perbengkelan				20 lokasi	15.000.000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Penggun a Jalan	20 lokasi	15.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.2 .2.06.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	92 persen		90 persen	92 persen	2.948.451.000						92 persen	2.965.956.000	
2.15.2 .2.06. 1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan fasilitasi operasional ATCS				12 bulan	440.000.000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Penggun a Jalan	12 bulan	440.000.000	Dinas Perhubungan
		Tenaga Operator ATCS				120 orang/bu lan							120 orang/ bulan		
2.15.2 .2.06. 3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	jumlah peserta Lomba PKS				10 sekolah	32.000.000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Penggun a Jalan	10 sekola h	32.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah peserta sosialisasi dan pemilihan pemuda pelopor lalu lintas				100 orang							100 orang		
2.15.2 .2.06. 4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah honor petugas lalu lintas				552 orang/bu lan	2.446.451.000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Penggun a Jalan	552 orang/ bulan	2.463.956.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah kegiatan operasi laik jalan kendaraan bermotor				40 kali							40 kali		
		Jumlah kegiatan pengamanan lebaran natal dan tahun baru				3 kegiatan							3 kegiat an		
		Jumlah kegiatan pengamanan lebaran natal dan tahun baru				4 unit							4 unit		
		Jumlah kegiatan pengamanan rutin dan insidentil				300 kali							300 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah kegiatan pengawalan				26 kegiatan						26 kegiat an			
		Jumlah tenaga operasional perlintasan sebidang				396 orang/bu lan						396 orang/ bulan			
2.15.2 .2.06. 5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan forum llaj				4 kali	30.000.000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Penggun a Jalan	4 kali	30.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.2 .2.07.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas (andalalin)	83 persen		75 persen	83 persen	15.500.000						83 persen	15.000.000	
2.15.2 .2.07. 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah kegiatan fasilitasi penilaian Andalalin				6 kegiatan	15.500.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Penggun a Jalan	6 kegiat an	15.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.2 .2.08.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang dilaksanakan	12 kegiatan		2 kegiatan	2 kegiatan	47.000.000						2 kegiat an	47.000.000	
2.15.2 .2.08. 1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah SDM tenaga LLAJ yang dibina				75 orang	17.000.000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Penggun a Jalan	75 orang	17.000.000	Dinas Perhubungan
2.15.2 .2.08. 4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah awak angkutan umum yang dibina dan diseleksi				30 orang	20.000.000		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Penggun a Jalan	30 orang	20.000.000	Dinas Perhubungan
											8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
											layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.				
2.15.2 .2.08. 5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Monitoring Pada Perusahaan Angkutan Umum				4 kunjungan	10.000.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Pengguna Jalan	4 kunjungan	10.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah pengusaha angkutan umum yang dibina				20 orang							20 orang		
2.15.2 .2.09.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang antar kota dalam satu daerah Kab/Kota yang difasilitasi	3 jenis		1 jenis	3 jenis	68.000.000						3 jenis	40.000.000	
2.15.2 .2.09. 2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Kota yang Difasilitasi				73 armada	68.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Pengguna Jalan	73 armada	40.000.000	Dinas Perhubungan
		Jumlah armada becak yang difasilitasi dan dibina				100 armada							100 armada		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						12.531.247.000						13.359.107.000		
2.16.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	4.728.429.000						100 persen	4.791.045.000	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
2.16.1 .2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	35.750.000						100 persen	35.750.000	
2.16.1	Penyusunan Dokumen	Jumlah dokumen renja dan				2	10.750.000	Kota Pekalongan,	Dana	Memperkuat	12. Penerapan MRI	ASN	2	10.750.000	Dinas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.01.1	Perencanaan Perangkat Daerah	perubahan renja yang disusun				dokume n		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.		dokum en		Komunikasi dan Informatika
2.16.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokume n	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	2 dokum en	1.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				2 dokume n	23.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	2 dokum en	23.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	3.278.012.000						100 persen	3.298.729.000	
2.16.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	3.216.512.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	12 bulan	3.237.229.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	60.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	12 bulan	60.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				2 dokume n	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	2 dokum en	1.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	10.075.000						100 persen	10.380.000	
2.16.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah keikutsertaan dalam pameran hakteknas dan karnaval batik				2 event	10.075.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	ASN	2 event	10.380.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.				
2.16.1 .2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	402.589.000						100 persen	430.763.000	
2.16.1 .2.06. 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	5.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	12 bulan	5.450.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.1 .2.06. 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	111.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	12 bulan	114.760.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				17 unit							17 unit		
2.16.1 .2.06. 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				12 bulan	123.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	12 bulan	126.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.1 .2.06. 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	43.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	12 bulan	43.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.1 .2.06. 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang- undangan				12 bulan	14.789.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	12 bulan	15.232.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.1 .2.06. 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				250 orangkali	105.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	250 orangk ali	125.821.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
									Umum						
2.16.1 .2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	548.790.000						100 persen	563.600.000	
2.16.1 .2.08. 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan penyedia	12 bulan	2.600.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.1 .2.08. 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	442.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan penyedia	12 bulan	455.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.1 .2.08. 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	103.790.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan penyedia	12 bulan	106.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.1 .2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	453.213.000						100 persen	451.823.000	
2.16.1 .2.09. 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				27 unit	208.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Non ASN	27 unit	210.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.1 .2.09. 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				3 gedung	110.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Non ASN	3 gedun g	110.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.1 .2.09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	134.613.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Non ASN	12 bulan	131.823.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
									Umum						
2.16.2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100 persen		100 persen	100 persen	4.961.257.000						100 persen	5.898.917.000	
2.16.2 .2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan Daerah	92,50 persen		80 persen	85 persen	4.961.257.000						85 persen	5.898.917.000	
2.16.2 .2.01. 1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Perda IKP (Informasi Komunikasi Publik)				1 dokume n	78.278.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyara kat	1 dokum en	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.2 .2.01. 2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah aduan masyarakat yang terlayani melalui SP4N				12 bulan	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyara kat	12 bulan	25.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.2 .2.01. 4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah bulan pengo.idelolaan konten website pekalongankota.go.id				12 bulan	116.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyara kat	12 bulan	121.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.2 .2.01. 5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah jam siaran RKB				18 jam	3.027.929.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyara kat	18 jam	4.023.447.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah jam tayangan Batik TV				11 jam							11 jam		
2.16.2 .2.01. 6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah layanan internet keliling yang diselenggarakan				40 kali	387.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyara kat	40 kali	387.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah penyelenggaraan pameran KIP (Pekan Informasi Daerah)				1 kali							1 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah siaran keliling Mobil M-Pustaka yang dilaksanakan				30 kali						30 kali			
2.16.2 .2.01. 7	Layanan Hubungan Media	Jumlah advertorial yang dimuat di media massa dalam setahun				3 kali	916.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	3 kali	924.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Liputan Press Conference yang diselenggarakan			4 kali				4 kali						
2.16.2 .2.01. 8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah kegiatan pendampingan FK Metra yang dilakukan				4 kali	33.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	4 kali	33.300.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah kegiatan pendampingan KIM yang dilaksanakan			4 kali				4 kali						
2.16.2 .2.01. 9	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah aplikasi call center yang disewa				3 aplikasi	354.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	3 aplikasi	360.170.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah bulan pengelolaan pengaduan masyarakat			12 bulan				12 bulan						
		Jumlah FGD yang diselenggarakan			3 kali				3 kali						
2.16.2 .2.01. 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Press Conference yang diadakan				12 kali	23.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyarakat	12 kali	25.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Press Release yang diadakan			12 kali				12 kali						
		Jumlah Press Room yang diadakan			12 kali				12 kali						
2.16.3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,30 indeks		2,80 indeks	3,00 indeks	2.841.561.000						3,00 indeks	2.669.145.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.3 .2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase unit kerja yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo (IKK Output)	66.06 persen		56.97 persen	60.61 persen	1.621.336.000						60.61 persen	1.689.920.000	
2.16.3 .2.01. 2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan dalam layanan Pengembangan dan Operasionalisasi Domain dan Subdomain Pemerintah Kota Pekalongan				12 bulan	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN Penyedia dan Masyara kat	12 bulan	10.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
									Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				
2.16.3 .2.01. 3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah						1.611.836.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN Penyedia dan Masyara kat		1.679.920.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.3 .2.02.	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (IKK Output)	51,40 persen		4.67 persen	9.35 persen	1.220.225.000						9.35 persen	979.225.000	
2.16.3 .2.02. 2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Domain SPBE yang disusun				2 dokume n	333.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyara kat	2 dokum en	150.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.3 .2.02. 3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan DC dan DRC				12 bulan	109.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyara kat	12 bulan	129.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah capacity building tehnik pelayanan jaringan				3 kali							3 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		isenggarakan													
2.16.3 .2.02. 7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Sosialisasi Pengembangan Aplikasi yang dilaksanakan				3 kali	425.725.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyara kat	3 kali	437.725.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.3 .2.02. 9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah aplikasi smartcity yang dibeli				1 aplikasi	280.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyara kat	1 aplika si	185.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah aplikasi smartcity yang disewa			1 aplikasi			1 aplika si							
		Jumlah Fasilitasi kegiatan yang mendukung Komunitas TIK			2 kali			2 kali							
2.16.3 .2.02. 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah pelatihan TIK bagi ASN dan Masyarakat yang dilaksanakan				8 kali	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyara kat	8 kali	42.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.3 .2.02. 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah monev Ekosistem SPBE yang dilaksanakan				3 kali	32.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyara kat	3 kali	35.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						111.423.000						109.027.000		
2.20.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	111.423.000						100,00 persen	109.027.000	
2.20.2 .2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data statistik sektoral yang disusun	2 dokumen		2 dokumen	2 dokume n	111.423.000						2 dokum en	109.027.000	
2.20.2 .2.01. 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,	Jumlah dokumen data statistik sektoral yang disusun				2 dokume n	111.423.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	ASN dan masyara kat	2 dokum en	109.027.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral							Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.				
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						150.142.000							102.819.000	
2.21.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	3,74 persen		0,93 persen	2,80 persen	150.142.000						2,80 persen	102.819.000	
2.21.2 .2.01.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Elektronik yang telah diamankan dengan sertifikat elektronik	56.07 persen		9.35 persen	9.35 persen	122.142.000						9.35 persen	74.819.000	
2.21.2 .2.01. 1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola dan manajemen kemanan informasi yang disusun				2 dokume n	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyara kat	2 dokum en	15.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.2 .2.01. 3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah leaflet promosi keamanan informasi				4 rim	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN dan Masyara kat	4 rim	30.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah lisensi Endpoint Security (Antivirus) yang dilaksanakan				1 lisensi							1 lisensi		
		Jumlah lisensi Sertifikat Elektronik TLS *.pekalongankota.go.id yang diadakan				1 lisensi							1 lisensi		
		Jumlah penilaian mandiri Indeks Keamanan Informasi yang dilaksanakan				1 kegiatan							1 kegiat an		
		Jumlah sosialisasi Keamanan Informasi yang dilaksanakan				1 kegiatan							1 kegiat an		
2.21.2 .2.01. 4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Audit TIK yang dilaksanakan				2 kegiatan	77.142.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	ASN dan Masyara kat	2 kegiat an	29.819.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
									Alokasi Umum	Pelayanan Publik	pelayanan publik.					
		Jumlah Pelatihan teknis keamanan informasi dan teknologi informasi yang dilaksanakan				1 kegiatan				1 kegiatan						
2.21.2 .2.02.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelancaran pengiriman dan penerimaan naskah dinas melalui jaring komunikasi sandi	100 persen		100 persen	100 persen	28.000.000						100 persen	28.000.000		
2.21.2 .2.02. 1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah dinas yang dikirim / diterima				76 artikel	28.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ASN	76 artikel	28.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Jumlah perangkat keamanan TIK khusus berupa peralatan sandi untuk Jairng Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Daerah yang diadakan				2 unit										2 unit
		Jumlah prosedur persandian				2 dokume n										2 dokum en
		Penyusunan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang persandian				1 dokume n										1 dokum en
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						7.229.032.000							6.291.689.000		
2.18.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	5.583.891.000						100 persen	4.621.905.000		
2.18.1 .2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	22.450.000						100 Perse n	22.450.000		
2.18.1 .2.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peranokat	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang				2 Dokume	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara bertahap	DPMPTS	2 Doku	2.500.000	Dinas Penanaman	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1	Daerah	disusun				n		Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum- Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	P	men		Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun				0 Dokume n							0 Doku men		
2.18.1 .2.01. 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 Dokume n	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTS P	2 Doku men	1.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1 .2.01. 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 Bulan	18.450.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTS P	12 Bulan	18.450.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 Dokume n							2 Doku men		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 Dokume n							5 Doku men		
		Jumlah laporan Evaluasi Renja yang disusun				1 Laporan							1 Lapor an		
2.18.1 .2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	3.654.935.000						100 Perse n	3.675.971.000	
2.18.1 .2.02. 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	3.604.835.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTS P	12 Bulan	3.625.871.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1 .2.02. 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 Bulan	48.600.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTS P	12 Bulan	48.600.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
									Umum						Pintu
2.18.1 .2.02. 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan SKPD disusun				1 Dokume n	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPTS P	1 Doku men	1.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1 .2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	36.742.000						100 Perse n	36.742.000	
2.18.1 .2.05. 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi dan Pekan Batik				2 Kali	36.742.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPTS P	2 Kali	36.742.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pengadaan Pakaian Dinas				60 Stel							60 Stel		
		Pengadaan Pakaian Satpam dan perlengkapannya				4 Bulan							4 Bulan		
2.18.1 .2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	341.231.000						100 Perse n	293.006.000	
2.18.1 .2.06. 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPTS P	12 Bulan	2.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1 .2.06. 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor diadakan				10 Buah	128.731.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPTS P	10 Buah	88.700.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1 .2.06. 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 Bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPPTS P	12 Bulan	2.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1	Penyediaan Bahan	Jumlah bulan penyediaan				12 Bulan	45.000.000	Kota Pekalongan,	Dana	Memperkuat	12. Penerapan MRI	DPMPPTS	12	45.000.000	Dinas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.06. 4	Logistik Kantor	bahan logistik kantor						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	P	Bulan		Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1 .2.06. 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	60.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTS P	12 Bulan	60.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1 .2.06. 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				12 Bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTS P	12 Bulan	2.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1 .2.06. 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi				60 Kali	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTS P	60 Kali	91.806.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1 .2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	509.296.000						100 Perse n	504.156.000	
2.18.1 .2.08. 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12.267.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTS P	12 Bulan	7.127.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1 .2.08. 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	300.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTS P	12 Bulan	300.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1 .2.08. 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	197.029.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTS P	12 Bulan	197.029.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.18.1 .2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	1.019.237.000					100 Perse n	89.580.000		
2.18.1 .2.09. 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				12 Bulan	130.164.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTS P	12 Bulan	50.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1 .2.09. 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan/gedung terpelihara				1 Buah	825.863.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTS P	1 Buah	19.580.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1 .2.09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 Bulan	63.210.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DPMPTS P	12 Bulan	20.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6 dokumen		1 dokumen	1 dokume n	92.852.000						1 dokum en	118.112.000	
2.18.2 .2.01.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peraturan penanaman modal yang disusun	6 dokumen		1 dokumen	1 dokume n	36.852.000						1 dokum en	48.112.000	
2.18.2 .2.01. 1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Audit ISO				1 dokume n	36.852.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	DPMPTS P	1 dokum en	48.112.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Jumlah peraturan penanaman modal disusun					1 peratur an									
2.18.2 .2.02.	Pembuatan Peta Potensi Investasi	Peta potensi Penanaman Modal yang disusun	5 dokumen		0 dokumen	1 dokume	56.000.000						1 dokum	70.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kabupaten/Kota					n						en			
2.18.2 .02. 1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal				1 dokume n	36.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	DPMPTS P	1 dokum en	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.2 .02. 2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen profil Peluang dan Potensi investasi yang disusun dan di update				1 Dokume n	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	DPMPTS P	1 Doku men	70.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100,00 persen		50,00 persen	100,00 persen	83.567.000						100,00 persen	81.770.000	
2.18.3 .2.01.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	11 Kegiatan		1 Kegiatan	2 Kegiatan	83.567.000						2 Kegiat an	81.770.000	
2.18.3 .2.01. 2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelikutsertaan dalam Pameran Investasi Penanaman Modal				2 Kali	83.567.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Investor	2 Kali	81.770.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	2500 dokumen		2500 dokumen	2500 dokume n	921.652.000						2500 dokum en	924.271.000	
2.18.4 .2.01.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang disusun	72 bulan		12 bulan	12 bulan	921.652.000						12 bulan	924.271.000	
2.18.4 .2.01.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan	Jumlah laporan izin				1 Laporan	555.820.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer	Memperkuat Ketahanan Ekonomi	9. Peningkatan kualitas SDM	Masyara kat di	1 Lapor	555.682.000	Dinas Penanaman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1	Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik							Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum- Dana Alokasi Umum	Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Kota Pekalong an	an		Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.4 .2.01. 2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pemenuhan Komitmen Perizinan				12 Laporan	237.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Masyara kat di Kota Pekalong an	12 Lapor an	237.200.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.4 .2.01. 3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat				2 Dokume n	108.632.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Masyara kat di Kota Pekalong an	2 Doku men	111.389.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah laporan pengaduan perizinan dan non perizinan				5 Laporan							5 Lapor an		
		Jumlah sosialisasi Pelayanan Perizinan				8 Kali							8 Kali		
2.18.4 .2.01. 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan				15 Kali	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Masyara kat di Kota Pekalong an	15 Kali	20.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Sosialisasi/ Public Hearing Standar Pelayanan				1 Kali							1 Kali		
2.18.5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Baru pertahun	40,53 Miliar Rupiah		6,42 Miliar Rupiah	6,68 Miliar Rupiah	435.601.000						6,68 Miliar Rupia h	434.243.000	
2.18.5 .2.01.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dikunjungi dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal	848 Perusahaa n		110 Perusahaa n	133 Perusah aan	435.601.000						133 Perus ahaan	434.243.000	
2.18.5 .2.01. 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pemantauan				100 Investor	65.990.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi	Perusaha an di Kota	100 Invest or	64.632.000	Dinas Penanaman Modal dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Modal						Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Yang Berkualitas dan Berkeadilan	kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pekalong an			Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Laporan realisasi penanaman modal (DAK)			4 Dokume n		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	4 Doku men								
2.18.5 .201. 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	BIMTEK dan Sosialisasi LKPM (DAK)				4 Kali	267.231.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Perusaha an di Kota Pekalong an	4 Kali	267.231.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN			1 Kali			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				1 Kali			
		Sosialisasi Kebijakan (DAK)			2 Kali							2 Kali			
		Sosialisasi Kemitraan (DAK)			2 Kali							2 Kali			
2.18.5 .201. 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal				150 Kali	102.380.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Perusaha an di Kota Pekalong an	150 Kali	102.380.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen		100 persen	100 persen	111.469.000					100 persen	111.388.000		
2.18.6 .201.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data dan informasi perizinan dan non perizinan kab/kota yang disajikan	34 aplikasi		4 aplikasi	6 aplikasi	111.469.000					6 aplika si	111.388.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.18.6 .2.01. 1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah bulan pengelolaan Website				12 Bulan	111.469.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	DPMPTSP	12 Bulan	111.388.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Pelaksanaan LKPM Online				12 Bulan							12 Bulan		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						533.550.000							528.024.000	
2.23.2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	16,58 indeks		15,77 indeks	16,09 indeks	533.550.000						16,09 indeks	528.024.000	
2.23.2 .2.01.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (IKK Output)	3.33 persen		0 persen	1.33 persen	339.057.300						1.33 persen	335.024.000	
2.23.2 .2.01. 1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Bertambahnya konten digital perpustakaan / ePustaka iPekalongankota				1000 konten	91.807.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	Pengelola perpustakaan kota pekalongan	1000 konten	92.335.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.2 .2.01. 4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dibina menuju standar nasional perpustakaan				8 perpustakaan	26.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnngktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrma penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn	Pengelola perpustakaan kota pekalongan	8 perpustakaan	26.500.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.				
2.23.2 .2.01. 6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya				300 orang	45.892.700	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	Pengelola perpustakaan kota pekalongan	300 orang	45.500.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.2 .2.01. 7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan perpustakaan Keliling dan Pemberian bantuan transport bagi pengelola perpustmas				2 kegiatan	118.464.900	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	Pengelola perpustakaan kota pekalongan	2 kegiatan	114.389.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.2 .2.01. 9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Penambahan koleksi buku perpustakaan umum daerah				300 buku	56.392.700	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	Pengelola perpustakaan kota pekalongan	300 buku	56.300.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.23.2 .2.02.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kenaikan Nilai Budaya Baca (Jumlah Koleksi Dipinjam dibagi Jumlah koleksi Perpustakaan x 100)	34,45 persen		32,78 persen	33,44 persen	194.492.700						33,44 persen	193.000.000	
2.23.2 .2.02. 1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah permasyarakatan gemar membaca di masyarakat (IKK Output)				1 Kali	29.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pningktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pningktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	Masyara kat Kota Pekalong an	1 Kali	28.400.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.2 .2.02. 2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi sarana membaca di ruang publik				2 lokasi	56.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pningktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pningktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	Masyara kat Kota Pekalong an	2 lokasi	55.300.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.2 .2.02. 3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Lomba Perpustakaan Tingkat Kota Pekalongan				1 kegiatan	31.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pningktn kompetensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pningktn kualts penddkn disrtai penguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pnotahuan, kearifan	Masyara kat Kota Pekalong an	1 kegiat an	31.500.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
										lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.					
2.23.2 .2.02. 4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Penyelenggaraan Kegiatan Literasi				3 kegiatan	77.892.700	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pemerataan & pnngktn komptensi penddk & tenaga kpnddkn utk mndkng pnngktn kualts penddkn disrtai pnguatan srn prsrna penddkn & pngmbngan kurikulum lokal berbsis ketrampilan, pngtahuan, kearifan lokal, & penddkn krkter berlandaskan nilai2 religiusitas.	Masyara kat Kota Pekalong an	3 kegiat an	77.800.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						3.617.734.000						3.611.305.125		
2.24.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	3.111.885.000						100 persen	3.105.269.000	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
2.24.1 .2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	13.350.000						100 persen	8.350.000	
2.24.1 .2.01. 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 Dokume n	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan	2 Doku men	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.1 .2.01. 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 Dokume n	1.350.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Dinas Kearsipa n dan Perpusta	2 Doku men	1.350.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
									Alokasi Umum	Pelayanan Publik	pelayanan publik.	kaan			
2.24.1 .2.01. 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 Dokume n	7.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan	4 Doku men	7.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 Dokume n							2 Doku men		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 Dokume n							5 Doku men		
2.24.1 .2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	2.293.292.000						100 persen	2.305.962.000	
2.24.1 .2.02. 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				12 Bulan	2.244.492.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas kearsipa n dan perpusta kaan kota pekalong an	12 Bulan	2.257.162.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.1 .2.02. 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 Bulan	47.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas kearsipa n dan perpusta kaan kota pekalong an	12 Bulan	47.500.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.1 .2.02. 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 Dokume n	1.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas kearsipa n dan perpusta kaan kota pekalong an	1 Doku men	1.300.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.1	Administrasi	Persentase ketercapaian	100 persen		100 persen	100	9.500.000						100	9.500.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
.2.05.	Kepegawaian Perangkat Daerah	administrasi kepegawaian perangkat daerah				persen							persen		
2.24.1 .2.05. 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Ketersediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				50 Potong	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas kearsipan dan perpustakaan kota pekalongan	50 Potong	9.500.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.1 .2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	225.847.501						100 persen	218.953.000	
2.24.1 .2.06. 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	4.755.145	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12 bulan	4.686.200	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.1 .2.06. 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	111.378.626	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12 bulan	109.655.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				2 unit			2 unit						
2.24.1 .2.06. 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	1.755.145	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12 bulan	1.686.200	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.1 .2.06. 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 Bulan	56.038.800	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	11 Bulan	53.281.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.1 .2.06. 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 Bulan	6.275.725	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Dinas Kearsipan dan	12 Bulan	5.931.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perpusta kaan			
2.24.1 .2.06. 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang- undangan				12 bulan	2.255.145	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan	12 bulan	2.186.200	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.1 .2.06. 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				35 kali	43.388.915		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan	35 kali	41.527.400	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.1 .2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	394.330.499						100 persen	390.109.000	
2.24.1 .2.08. 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	1.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas kearsipa n dan perpusta kaan kota pekalong an	12 bulan	1.800.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.1 .2.08. 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	308.981.525	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas kearsipa n dan perpusta kaan kota pekalong an	12 bulan	305.879.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.1 .2.08. 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	83.548.974	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas kearsipa n dan perpusta kaan kota pekalong an	12 bulan	82.430.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.1 .2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik	100 persen		100 persen	100 persen	175.565.000						100 persen	172.395.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
2.24.1 .2.09. 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				13 unit	78.099.100	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan	13 unit	77.073.800	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.1 .2.09. 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				2 unit	70.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan	2 unit	67.855.300	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.1 .2.09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	27.465.900	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Kearsipa n dan Perpusta kaan	12 bulan	27.465.900	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	66,67 persen		33,33 persen	46,67 persen	346.221.000						46,67 persen	347.462.000	
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)	52,50 indeks		40,00 indeks	45,00 indeks							45,00 indeks		
2.24.2 .2.01.	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang di Tata Arsip Dinamisnya	32.26 persen		32.26 persen	32.26 persen	47.506.800						32.26 persen	48.336.645	
2.24.2 .2.01. 2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	jumlah OPD yang telah dibuatkan daftar arsip aktif (IKK Output)				10 OPD	32.019.600	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pengelol a arsip kota pekalong an	10 OPD	33.500.478	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		jumlah OPD yang telah dibuatkan daftar arsip in-aktif (IKK output)				3 OPD							3 OPD		
2.24.2 .2.01. 3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dilaksanakan Audit Kearsipan / monitoring				30 OPD	15.487.200	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Pengelol a arsip kota pekalong	30 OPD	14.836.167	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
									Alokasi Umum	Pelayanan Publik	pelayanan publik.	an			
2.24.2.02.	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Arsip Statis OPD yang diserahkan ke Depo Arsip	20 persen		10 persen	14 persen	43.487.200						14 persen	45.745.355	
2.24.2.02.2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN (IKK Output)				16 Naskah	43.487.200	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pengelola arsip kota pekalongan	16 Naskah	45.745.355	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		jumlah OPD yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik arsip untuk statis (IKK output)				3 OPD							3 OPD		
		Jumlah pelaksanaan fumigasi arsip				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah pemeliharaan arsip dalam 1 tahun				12 Kali							12 Kali		
2.24.2.03.	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemahaman Pengelola Arsip tentang Kearsipan	90 persen		50 persen	70 persen	255.227.000						70 persen	253.380.000	
2.24.2.03.2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Inhouse training yang diselenggarakan Arsip tentang Kearsipan				1 Kali	255.227.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pengelola arsip kota pekalongan	1 Kali	253.380.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah Pameran kearsipan yang dilaksanakan				1 Pameran							1 Pameran		
		Jumlah regulasi kearsipan yang diterbitkan				1 Peraturan							1 Peraturan		
		Jumlah sosialisasi kearsipan yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		
2.24.3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan	100 persen		100 persen	100 persen	159.628.000						100 persen	158.574.125	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)													
2.24.3 .2.01.	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK (IKK Output)	100 persen		100 persen	100 persen	95.970.800						100 persen	94.916.925	
2.24.3 .2.01. 1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK (IKK Output)				100 Persen	75.657.200	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pengelola Arsip di Kota Pekalongan	100 Persen	75.706.575	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.3 .2.01. 2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah arsip yang dimusnahkan				4300 berkas	20.313.600	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pengelola Arsip di Kota Pekalongan	4300 berkas	19.210.350	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.3 .2.04.	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip hasil alih media kabupaten/kota	100 persen		100 persen	100 persen	63.657.200						100 persen	63.657.200	
2.24.3 .2.04. 2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan daerah yang sesuai NSPK (IKK Output) hasil alih media kabupaten/kota				1000 Berkas	63.657.200	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pengelola Arsip di Kota Pekalongan	1000 Berkas	63.657.200	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Jumlah perangkat daerah yang melakukan pemusnahan arsip				20 OPD									
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						9.491.659.000							9.415.055.000	
3.25.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	5.128.453.000						100 persen	5.134.864.000	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	KABUPATEN/KOTA	kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah													
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		100 persen	100 persen					100 persen				
3.25.1.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	22.500.000					100 Perse n	22.500.000	
3.25.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 dokumen	2.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	DKP	2 dokumen	2.750.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	DKP	2 dokumen	1.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	18.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	DKP	12 bulan	18.250.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		
3.25.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	4.039.742.000						100 Perse	4.062.954.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		perangkat daerah										n			
3.25.1 .2.02. 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	3.978.242.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	DKP	12 bulan	4.001.454.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.1 .2.02. 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	60.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	DKP	12 bulan	60.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.1 .2.02. 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokume n	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	DKP	1 dokum en	1.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.1 .2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	9.500.000						100 Perse n	9.500.000	
3.25.1 .2.05. 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran, Hakteknas dan Karnaval batik				2 kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	DKP	2 kali	9.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.1 .2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	235.250.000						100 Perse n	239.250.000	
3.25.1 .2.06. 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	DKP	12 bulan	7.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.1 .2.06.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda				12 bulan	41.500.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	9. Peningkatan kualitas SDM	DKP	12 bulan	41.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2		pos						Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum- Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.				
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan			7 unit							7 unit			
3.25.1 .2.06. 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	4.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	DKP	12 bulan	4.250.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.1 .2.06. 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	66.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	DKP	11 bulan	67.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.1 .2.06. 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	DKP	12 bulan	7.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.1 .2.06. 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang- undangan				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	DKP	12 bulan	2.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.1 .2.06. 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				100 kali	106.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	DKP	100 kali	109.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.1 .2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	262.954.000						100 Perse n	254.166.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pemerintahan Daerah													
3.25.1 .2.08. 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	1.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	DKP	12 bulan	1.800.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.1 .2.08. 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	159.854.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	DKP	12 bulan	148.316.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.1 .2.08. 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	101.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	DKP	12 bulan	104.050.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.1 .2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	558.507.000						100 Perse n	546.494.000	
3.25.1 .2.09. 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				25 unit	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	DKP	25 unit	110.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.1 .2.09. 3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang terpelihara secara rutin/berkala				1 Unit	26.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	DKP	1 Unit	16.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.1 .2.09. 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				3 unit	410.007.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan	DKP	3 unit	397.994.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
									Umum		jasa yang mampu berdaya saing.				
3.25.1 .2.09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	22.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	DKP	12 bulan	22.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	1,00 persen		1,00 persen	1,00 persen	2.705.207.000						1,00 persen	2.675.733.000	
		Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	1,00 persen		1,00 persen	1,00 persen						1,00 persen			
3.25.3 .2.01.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Sarpras Perikanan Tangkap yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5 persen		5 persen	5 persen	216.334.000						5 persen	242.115.000	
3.25.3 .2.01. 1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang tersedia				1 dokume n	76.334.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Nelayan, pedagan g ikan	1 dokum en	100.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.3 .2.01. 2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan yang tersedia				1 unit	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Nelayan, pedagan g ikan	1 unit	92.115.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.3 .2.01. 3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah penjaminan sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia				1 unit	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Nelayan, pedagan g ikan	1 unit	50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.3	Pemberdayaan Nelayan	Persentase Nelayan Kecil	10 persen		10 persen	10	125.000.000						10	92.350.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
.2.02.	Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	yang dibina				persen							persen		
3.25.3 .2.02. 1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah terbinanya KUB di Kota Pekalongan				33 KUB	45.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Nelayan	33 KUB	34.350.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.3 .2.02. 2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan yang dibina				4 kelompo k	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Nelayan	4 kelom pok	45.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.3 .2.02. 3	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah pendampingan nelayan yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha yang dilaksanakan				5 nelayan	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Nelayan	5 nelaya n	13.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.3 .2.03.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Bersumber dari TPI	6,07 persen		1 persen	1 persen	2.330.873.000						1 persen	2.308.268.000	
3.25.3 .2.03. 2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Bulan sewa gedung dan pelataran TPI				12 bulan	2.330.873.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Nelayan, pedagan g ikan	12 bulan	2.308.268.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.3 .2.04.	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah permohonan kapal yang didaftarkan	48.33 persen		40 persen	43.33 persen	23.000.000						43.33 persen	23.000.000	
3.25.3	Penetapan Persyaratan	Jumlah dokumen				20	12.000.000	Kota Pekalongan,	Dana	Memperkuat	9. Peningkatan	Nelayan	20	12.000.000	Dinas Kelautan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
.2.04. 1	dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	pencatatan kapal				dokume n		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.		dokum en		dan Perikanan
3.25.3 .2.04. 2	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah pendataan kapal				10 kapal	11.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Nelayan	10 kapal	11.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.3 .2.06.	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendaftaran Kapal yang Beroperasi	72.50 persen		57.50 persen	57.50 persen	10.000.000						57.50 persen	10.000.000	
3.25.3 .2.06. 2	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Pelayanan Pendaftaran yang dilayani				70 kapal	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Nelayan, pedagan g ikan, tenaga TPI	70 kapal	10.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI				1 persen							1 persen		
3.25.4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	6.15 persen		1,00 persen	1,00 persen	587.013.000						1,00 persen	536.502.000	
3.25.4 .2.01.	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usulan Permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Budidaya yang Diterbitkan	100 persen		100 persen	100 persen	43.000.000						100 persen	50.000.000	
3.25.4 .2.01. 1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya,	Jumlah Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak				100 pembudi daya	13.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan	Pembudi daya	100 pembu didaya	20.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Int yang diterbitkan							Umum		jasa yang mampu berdaya saing.				
3.25.4 .2.01. 2	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, sert yang diterbitkan				100 pembudi daya	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pembudi daya	100 pembu didaya	30.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.4 .2.02.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Pembudidaya yang dibina	79.36 persen		38.66 persen	61.92 persen	200.147.000						61.92 persen	167.000.000	
3.25.4 .2.02. 1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah benih ikan yang diadakan				750 ekor	120.147.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pembudi daya	750 ekor	90.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.4 .2.02. 2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kategori lomba kinerja Pokdakan dan Poklamsar yang dilaksanakan				4 kategori	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pembudi daya	4 katego ri	47.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.4 .2.02. 3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah pembudidaya yang dilatih				40 Pembudi daya	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu	Pembudi daya	40 Pemb udidaya	10.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
											berdaya saing.				
3.25.4 .2.02. 4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pembudidaya yang dilatih				80 pembudi daya	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pembudi daya	80 pembu didaya	20.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.4 .2.03.	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen TDPIK yang diterbitkan	840 dokumen		140 dokumen	140 dokume n	25.000.000						140 dokum en	25.000.000	
3.25.4 .2.03. 1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah syarat dan prosedur TDPIK yang ditetapkan				140 dokume n	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pembudi daya	140 dokum en	15.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.4 .2.03. 2	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dilayani				140 dokume n	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pembudi daya	140 dokum en	10.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.4 .2.04.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase ketercapaian aspek-aspek pengelolaan pembudidayaan ikan	100 persen		100 persen	100 persen	318.866.000						100 persen	294.502.000	
3.25.4 .2.04. 1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data bidang budidaya				1 dokume n	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pembudi daya	1 dokum en	15.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.4 .2.04. 2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Tambak Dinas/BBI yang dibangun				2 unit	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pembudi daya	2 unit	80.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.25.4 .2.04. 3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Usaha Pembudidayaan yang diadakan				1 unit	68.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pembudi daya	1 unit	50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.4 .2.04. 4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bintek Cara Budidaya Ikan Baik (CBIB)/ Cara Pembenihan Ikan Baik(CPIB) yang diselenggarakan				3 kali	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pembudi daya	3 kali	23.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.4 .2.04. 5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Terkelolanya Balai Benih Ikan (BBI)				1 BBI	105.866.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pembudi daya	1 BBI	126.502.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	2,00 pelaku usaha		2 pelaku usaha	2,00 pelaku usaha	1.070.986.000						2,00 pelaku usaha	1.067.956.000	
		Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	12,20 persen		12,2 persen								12,20 persen		
3.25.6 .2.01.	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Bagi Usaha Skala Mikro dan kecil	100 persen		50 persen	83.33 persen	20.000.000						83.33 persen	20.000.000	
3.25.6 .2.01. 1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Usaha Pemasar & Pengolah Perikanan				1 dokume n	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pengolah , pemasar perikana n	1 dokum en	20.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.6 .2.02.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Fasilitas Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	16.67 persen		0 persen	16.67 persen	44.996.000						16.67 persen	43.599.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.25.6 .2.02. 1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah terbinanya pengusaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil				60 orang	44.996.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pengolah , pemasar perikanan	60 orang	43.599.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.6 .2.03.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	70 persen		0 persen	70 persen	1.005.990.000						70 persen	1.004.357.000	
3.25.6 .2.03. 2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event lomba kreasi olahan ikan (SIDA)				1 kali	1.005.990.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pengolah ,Pemasar perikanan	1 kali	1.004.357.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Fasilitasi pelaku usaha perikanan yang diberikan				1 Kawasa n			DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Reguler				1 Kawasa n		
		Jumlah pelaksanaan gemar makan ikan				1 kali							1 kali		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						3.421.779.000						3.404.251.000		
2.19.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	95,24 persen		91,95 persen	93,69 persen	1.069.472.000						93,69 persen	1.046.470.000	
2.19.2 .2.01.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (IKK Outcome)	0.99 Persen		0.39 Persen	0.64 Persen	950.700.000						0.64 Perse n	950.700.000	
2.19.2 .2.01.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan	Jumlah anggota Paskibra Kota Pekalongan yang				80 orang	500.000.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara bertahap	Dinparbu dpora	80 orang	500.000.000	Dinas Pariwisata,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3	Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	dibina						Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum- Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.			Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
2.19.2 .2.01. 8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah generasi muda yang dibina				300 Orang	450.700.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbu dpora	300 Orang	450.700.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah kegiatan kepemudaan yang difasilitasi			2 Kegiatan				2 Kegiat an						
		Jumlah Kejuaraan Lomba Kepemudaan			2 Kegiatan				2 Kegiat an						
		Jumlah pemuda yang ikut kemah bakti pemuda			300 Orang				300 Orang						
		Jumlah pemuda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan			300 Orang				300 Orang						
		Jumlah peserta yang dikirim mengikuti upacara tingkat provinsi			30 Orang				30 Orang						
2.19.2 .2.02.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (IKK Outcome)	0.621 Persen		0.259 Persen	0.445 Persen	118.772.000						0.445 Perse n	95.770.000	
2.19.2 .2.02. 2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota organisasi pemuda yang dibina				200 Orang	118.772.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbu dpora	200 Orang	95.770.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	42,86 persen		11,43 persen	34,29 persen	2.352.307.000						34,29 persen	2.357.781.000	
2.19.3	Pembinaan dan	Persentase ketersediaan	80.95		47.62	71.43	654.510.000						71.43	659.984.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
.2.01.	Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	sarpras olahraga pada jenjang pendidikan	Persen		Persen	Persen							Perse n		
2.19.3 .2.01. 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga				4 Lokasi	654.510.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbu dpora	4 Lokasi	659.984.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah sarana prasarana olahraga yang direhabilitasi sedang/berat				1 Lokasi							1 Lokasi		
		Jumlah sarpras olahraga yang terpelihara secara rutin/berkala				3 Lokasi							3 Lokasi		
2.19.3 .2.02.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan prestasi olahraga tingkat kota	47.62 Persen		23.81 Persen	33.33 Persen	935.000.000						33.33 Perse n	935.000.000	
2.19.3 .2.02. 2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah cabang olahraga masyarakat yang dipertandingkan				10 Cabor	735.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbu dpora	10 Cabor	735.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah cabang olahraga pelajar yang dibina				21 Cabor							21 Cabor		
		Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan				16 Cabor							16 Cabor		
2.19.3 .2.02. 3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mengikuti Kejuaraan				71 Sekolah	200.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbu dpora	71 Sekola h	200.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.3 .2.03.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan prestasi olahraga tingkat provinsi	205 orang		10 orang	37 orang	519.890.000						37 orang	519.890.000	
2.19.3	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlit yang dibina				250	215.800.000	Kota Pekalongan,	Dana	Memperkuat	12. Penerapan MRI	Dinparbu	250	215.800.000	Dinas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.03. 1		dalam rangka persiapan POPDA tk. provinsi				orang		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	dpora	orang		Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.3 .2.03. 2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah atlit yang dibina di PPLOPD				72 Orang	120.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbu dpora	72 Orang	120.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.3 .2.03. 3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Cabang Olahraga Prestasi yang dibina				6 Cabor	184.090.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbu dpora	6 Cabor	184.090.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Cabang Olahraga yang difasilitasi Pengembangannya				5 Cabor							5 Cabor		
2.19.3 .2.04.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga (IKK Outcome)	24 medali		3 medali	4 medali	40.000.000						4 medali	40.000.000	
2.19.3 .2.04. 2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang dikembangkan				2 Cabor	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbu dpora	2 Cabor	40.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.3 .2.05.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Peningkatan event olahraga tk Provinsi dan Nasional	24 Event		4 Event	4 Event	202.907.000						4 Event	202.907.000	
2.19.3 .2.05. 1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah cabang olahraga yang dikembangkan				5 Cabor	102.907.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbu dpora	5 Cabor	102.907.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.19.3 .2.05. 4	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan yang akan dikembangkan				2 Jenis	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbu dpora	2 Jenis	100.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					3.643.303.000							3.611.028.000		
2.22.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	100 persen		100 persen	100 persen	1.813.406.000						100 persen	1.777.130.000	
2.22.2. .2.01.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Event kesenian dan kebudayaan yang dikembangkan	32 Event		2 Event	6 Event	983.406.000						6 Event	1.000.000.000	
2.22.2. .2.01. 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah kegiatan dukungan festival/parade seni budaya daerah (festival Pekalongan Tempo Dulu) yang diselenggarakan				10 Kegiatan	983.406.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.	Dinparbudpora	10 Kegiatan	1.000.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah komunitas seni dan budaya yang difasilitasi kegiatannya				20 Komunitas			20 Komunitas						
		Jumlah penyelenggaraan kegiatan kerjasama pusaka budaya yang difasilitasi				1 Kegiatan			1 Kegiatan						
2.22.2. .2.02.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Event kesenian dan kebudayaan yang dilestarikan	52 Event		2 Event	10 Event	830.000.000						10 Event	777.130.000	
2.22.2. .2.02. 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah cabang seni yang dilombakan dalam Pekan Seni Daerah				1 Cabang	800.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.	Dinparbudpora	1 Cabang	747.130.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah event/ kegiatan yang diselenggarakan dalam pelindungan, pengembangan , pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya				2 Event			2 Event						
		Jumlah penyelenggaraan pelestarian budaya kepada komunitas yang terfasilitasi				1 Kegiatan			1 Kegiatan						
		Jumlah sarana prasarana pelestarian budaya yang				1 Paket			1 Paket						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		terfasilitasi													
2.22.2.2.02.3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah lomba yang diselenggarakan dalam rangka pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan				2 Lomba	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.	Dinparbudpora	2 Lomba	30.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.22.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	544.254.000						100,00 persen	538.138.000	
2.22.3.2.01.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	165 komunitas		5 komunitas	26 komunitas	544.254.000						26 komunitas	538.138.000	
2.22.3.2.01.1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah cabang seni yang dibintekkan				1 Cabang Seni	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.	Komunitas/Sanggar Kesenian	1 Cabang Seni	40.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah sanggar seni rakyat yang difasilitasi kegiatannya				1 Sanggar Seni							1 Sanggar Seni		
2.22.3.2.01.3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah komunitas seni dan budaya yang difasilitasi				50 Komunitas	504.254.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.	Komunitas/Sanggar Kesenian	50 Komunitas	498.138.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.22.4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	46.426.000						100,00 persen	68.141.000	
2.22.4.2.01.	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Akses Masyarakat dalam Perolehan Data Sejarah dan Tradisi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	46.426.000						100 Persen	68.141.000	
2.22.4	Peningkatan Akses	Jumlah data dan informasi				1	46.426.000	Kota Pekalongan,	Dana	Revolusi Mental dan	10. Peningkatan	Masyara	1	68.141.000	Dinas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
.2.01. 3	Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	sejarah yang terpublikasi				Dokume n		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pembangunan Kebudayaan	peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.	kat	Doku men		Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.22.5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	97,52 persen		88,65 persen	92,20 persen	19.963.000						92,20 persen	19.534.000	
2.22.5 .2.01.	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	3.19 Persen		1.42 Persen	2.13 Persen	19.963.000						2.13 Perse n	19.534.000	
2.22.5 .2.01. 1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah dokumen dalam kegiatan Inventarisasi Benda Cagar Budaya yang disusun				1 Dokume n	19.963.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.	Dinparbu dpora	1 Doku men	19.534.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah pengadaan prasasti objek yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya				2 Unit							2 Unit		
2.22.6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengunjung museum batik	4,80 persen		4,55 persen	4,66 persen	1.219.254.000						4,66 persen	1.208.085.000	
2.22.6 .2.01.	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung museum batik	139000 Orang		25000 Orang	27000 Orang	1.219.254.000						27000 Orang	1.208.085.000	
2.22.6 .2.01. 1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Bulan Pengelolaan dan Pemeliharaan Museum Batik				12 Bulan	210.684.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.	Pengunju ng Museum Batik	12 Bulan	210.684.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.22.6 .2.01. 3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Kegiatan yang Diselenggarakan dalam Pengelolaan Batik				7 Kegiatan	887.359.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.	Pengunju ng Museum Batik	7 Kegiat an	876.190.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.22.6 .2.01. 4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah bulan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum				12 Bulan	121.211.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	10. Peningkatan peran serta dan kerja sama	Pengunju ng Museum	12 Bulan	121.211.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
							Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum		komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.	Batik			Kepemudaan dan Olahraga		
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						11.580.592.000						11.344.959.000			
3.26.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	5.888.175.000						100 persen	5.892.402.000		
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen			100 persen							100 persen			100 persen
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen			100 persen							100 persen			100 persen
3.26.1 .2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	22.850.000						100 Perse n	22.850.000		
3.26.1 .2.01. 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja yang disusun				2 Dokume n	2.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbu dpora	2 Doku men	2.750.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
3.26.1 .2.01. 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD LAKIP yang disusun				1 Dokume n	1.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbu dpora	1 Doku men	1.650.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
3.26.1 .2.01. 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 Bulan	18.450.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbu dpora	12 Bulan	18.450.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun						4 Dokume n								4 Doku men
		Jumlah dokumen SPIP (1						5								5

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				Dokume n						Doku men			
3.26.1 .2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	4.689.130.000						100 Perse n	4.715.791.000	
3.26.1 .2.02. 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	4.607.030.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbu dpora	12 Bulan	4.633.691.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.1 .2.02. 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 Bulan	80.450.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbu dpora	12 Bulan	80.450.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.1 .2.02. 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun`				1 Dokume n	1.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbu dpora	1 Doku men	1.650.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.1 .2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	259.500.000						100 Perse n	259.500.000	
3.26.1 .2.05. 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi, Pameran Hakteknas dan Pekan Batik				3 Kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbu dpora	3 Kali	9.500.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.1 .2.05. 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	250.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbu dpora	100 Perse n	250.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.1 .2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	308.809.000						100 Perse n	289.827.000	
3.26.1	Penyediaan Komponen	Jumlah bulan penyediaan				12 Bulan	7.500.000	Kota Pekalongan,	Dana	Memperkuat	12. Penerapan MRI	Dinparbu	12	7.500.000	Dinas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
.2.06. 1	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	dpora	Bulan		Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.1 .2.06. 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 Bulan	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbu dpora	12 Bulan	40.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	6 Unit				6 Unit								
3.26.1 .2.06. 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 Bulan	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbu dpora	12 Bulan	10.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.1 .2.06. 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 Bulan	58.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbu dpora	11 Bulan	58.500.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.1 .2.06. 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan				12 Bulan	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbu dpora	12 Bulan	20.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan	12 Bulan												
3.26.1 .2.06. 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbu dpora	12 Bulan	2.500.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.1 .2.06.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi				155 Orang	170.309.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara bertahap	Dinparbu dpora	155 Orang	151.327.000	Dinas Pariwisata,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
9	SKPD	Luar Daerah						Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum- Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.1 .2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	447.400.000						100 Perse n	447.400.000	
3.26.1 .2.08. 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 Bulan	2.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbu dpora	12 Bulan	2.400.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.1 .2.08. 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	268.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbu dpora	12 Bulan	268.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.1 .2.08. 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan Kantor				12 Bulan	177.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbu dpora	12 Bulan	177.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.1 .2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	160.486.000						100 Perse n	157.034.000	
3.26.1 .2.09. 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				19 unit	74.840.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbu dpora	19 unit	74.840.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.1 .2.09. 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 Unit	65.646.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinparbu dpora	1 Unit	62.194.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.1 .2.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala				12 Bulan	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara bertahap	Dinparbu dpora	12 Bulan	20.000.000	Dinas Pariwisata,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
10	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	peralatan dan perlengkapan gedung kantor						Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum- Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	12,50 persen		10,00 persen	11,00 persen	3.889.573.000						11,00 persen	3.859.537.000	
3.26.2 .2.01.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase usaha pariwisata yang difasilitasi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	2.907.572.000						100 Perse n	2.914.126.000	
3.26.2 .2.01. 3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah pekerjaan yang dilaksanakan untuk Pengembangan Obyek Wisata				5 Pekerjaa n	2.887.572.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Persenta se Usaha Pariwisat a yang difasilitas i	5 Pekerj aan	2.894.126.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.2 .2.01. 4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi usaha pariwisata yang dimonitoring /dibina				60 Lokasi	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Persenta se Usaha Pariwisat a yang difasilitas i	60 Lokasi	20.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.2 .2.03.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi wisata yang berkembang	100 Persen		100 Persen	100 Persen	962.001.000						100 Perse n	925.411.000	
3.26.2 .2.03. 2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dtw				1 Dokume n	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Persenta se Destinasi Wisata yang Berkemb ang	1 Doku men	50.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.2 .2.03. 3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pekerjaan yang dilaksanakan untuk Pengembangan Obyek Wisata				2 Lokasi	400.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Persenta se Destinasi Wisata yang Berkemb ang	2 Lokasi	400.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.2 .2.03.	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah				2 Orang / Tahun	447.001.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer	Memperkuat Ketahanan Ekonomi	9. Peningkatan kualitas SDM	Persenta se	2 Orang	460.411.000	Dinas Pariwisata,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4	Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Berdasarkan SK Walikota						Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum- Dana Alokasi Umum	Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Destinasi Wisata yang Berkemb ang	/ Tahun		Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
	Jumlah lokasi Obyek Wisata yang dipelihara secara rutin/berkala	2 Lokasi						2 Lokasi							
3.26.2 .2.03. 5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi usaha pariwisata yang dimonitoring /dibina				25 Lokasi	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Persenta se Destinasi Wisata yang Berkemb ang	25 Lokasi	15.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.2 .2.04.	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha Pariwisata yang mendapat rekomendasi	100 Persen		0 Persen	100 Persen	20.000.000						100 Perse n	20.000.000	
3.26.2 .2.04. 1	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah usaha Pariwisata yang direkomendasi				10 Lokasi	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Persenta se Usaha Pariwisat a yang menda daa t rekom endasi	10 Lokasi	20.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	46,98 persen		21,98 persen	31,98 persen	1.060.026.000						31,98 persen	1.047.887.000	
3.26.3 .2.01.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota	25 Persen		25 Persen	25 Persen	1.060.026.000						25 Perse n	1.047.887.000	
3.26.3 .2.01. 1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah bulan promosi pariwisata kota pekalongan Jumlah media promosi pariwisata kota Pekalongan				3 Media	53.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Persenta se peningka tan perjalana n wisatawa n nusantar a yang	3 Media	53.500.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
											datang ke kab/kota					
3.26.3 .2.01. 2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pemasaran pariwisata yang dilaksanakan (Kegiatan BISA)				1 Kegiatan	224.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Persenta se peningka tan perjalana n wisataw a yang nusantar a yang datang ke kab/kota	1 Kegiat an	224.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah kegiatan pemilihan Duta wsata Tk. Kota dan Provinsi yang diselenggarakan				2 Kegiatan										2 Kegiat an
		Jumlah kegiatan yang mendapat Fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata				1 Kegiatan										1 Kegiat an
3.26.3 .2.01. 3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen/database statistik pariwisata				2 Dokume n	287.526.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Persenta se peningka tan perjalana n wisataw a yang nusantar a yang datang ke kab/kota	2 Doku men	275.387.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Jumlah kegiatan workshop promosi pariwisata yang diselenggarakan				2 Kegiatan										2 Kegiat an
3.26.3 .2.01. 4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah pameran nasional dan regional yang dilaksanakan				3 Pameran	495.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Persenta se peningka tan perjalana n wisataw a yang nusantar a yang datang ke kab/kota	3 Pamer an	495.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
3.26.4	PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk	59,52 persen		0 persen	30,30 persen	464.262.000						30,30 persen	272.566.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	berekspresi, berpromosi dan berinteraksi													
3.26.4 .2.01.	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan EKRAF EXPO	6 event		1 event	1 event	464.262.000						1 event	272.566.000	
3.26.4 .2.01. 1	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Event EKRAF EXPO yang diselenggarakan				1 Event	464.262.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Jumlah Penyelen ggaraan EKRAF EXPO	1 Event	272.566.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang difasilitasi pengembangannya				1 Paket							1 Paket		
3.26.5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	100 persen		0 persen	40,00 persen	278.556.000						40,00 persen	272.567.000	
3.26.5 .2.01.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan kapasitas SDM EKRAF tingkat dasar	14.29 Persen		0 Persen	18.18 Persen	278.556.000						18.18 Perse n	272.567.000	
3.26.5 .2.01. 1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelatihan pengembangan SDM Ekonomi Kreatif tingkat dasar yang diselenggarakan				40 Pelaku Ekraf	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	SDM EKRAF	40 Pelaku Ekraf	30.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.5 .2.01. 2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan	Jumlah updating data EKRAF				1 Paket	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi	SDM EKRAF	1 Paket	20.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kemitraan Pariwisata							Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Yang Berkualitas dan Berkeadilan	kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.				Kepemudaan dan Olahraga
3.26.5 .2.01. 3	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah pelatihan SDM EKRAF bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa) yang diselenggarakan				40 Kali	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	SDM EKRAF	40 Kali	30.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.5 .2.01. 4	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang EKRAF				5 Pelaku	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	SDM EKRAF	5 Pelaku	50.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.5 .2.01. 5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Focus Group Discussion (FGD) komunitas yang diselenggarakan				2 Kali	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	SDM EKRAF	2 Kali	100.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.5 .2.01. 6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah fasilitasi kepada komunitas dan/atau pelaku EKRAF untuk pengembangan kompetensi ke luar daerah				2 Kali	38.556.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	SDM EKRAF	2 Kali	32.567.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.5 .2.01. 7	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku EKRAF yang dimonitoring tahun N				30 Pelaku	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	SDM EKRAF	30 Pelaku	10.000.000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2.9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						791.510.000							787.087.000	
2.9.3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN	Persentase cadangan pangan daerah	4,80 persen		3,80 persen	4,40 persen	729.300.000						4,40 persen	726.214.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT														
2.9.3. 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya yang dilaksanakan	100 persen		100 persen	100 persen	69.400.000						100 persen	69.400.000	
2.9.3. 2.01.1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan yang disusun				1 dokume n	20.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	stakehold er pangan	1 dokum en	20.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2.9.3. 2.01.2	Penyediaan Pangan Berkas Sumber Daya Lokal	Jumlah produk olahan pangan berbahan baku lokal yang diujicoba dalam pelatihan				2 produk	32.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	stakehold er pangan	2 produk	32.600.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2.9.3. 2.01.4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan pemantauan harga pangan pokok strategis				12 dokume n	16.800.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	stakehold er pangan	12 dokum en	16.800.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2.9.3. 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan daerah	5625 Kg		4500 Kg	5150 Kg	129.900.000						5150 Kg	126.814.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.9.3. 2.02.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyaluran cadangan pangan daerah				1 kegiatan	104.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Dinperpa	1 kegiatan	101.814.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2.9.3. 2.02.2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah dokumen penyusunan PPH Konsumsi				1 dokumen	25.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Dinperpa	1 dokumen	25.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2.9.3. 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah pelaksanaan pendampingan kelompok pemberdayaan pekarangan	20 kegiatan		7 kegiatan	2 kegiatan	530.000.000						2 kegiatan	530.000.000	
2.9.3. 2.04.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan kelompok masyarakat				2 kali	530.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	stakeholder pangan	2 kali	530.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2.9.4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	18.570.000						100,00 persen	18.171.000	
2.9.4. 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	4 kecamatan		4 kecamatan	4 kecamatan	18.570.000						4 kecamatan	18.171.000	
2.9.4. 2.01.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan	Jumlah dokumen peta ketahanan dan kerentanan				1 dokumen	18.570.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber Daya	1. Penguatan pencegahan faktor	Dinperpa	1 dokum	18.171.000	Dinas Pertanian dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	pangan				n		Selatan, Kuripan Kertoharjo	Umum-Dana Alokasi Umum	Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.		en		Pangan
2.9.5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	88,00 persen		80,00 persen	83,20 persen	43.640.000						83,20 persen	42.702.000	
2.9.5.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	174 sample		24 sample	25 sample	43.640.000						25 sampl e	42.702.000	
2.9.5.2.01.5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan keamanan pangan segar yang dilaksanakan				1 kegiatan	43.640.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.	Stakehol der pangan	1 kegiat an	42.702.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah kegiatan sosialisasi keamanan pangan bagi anak sekolah dan pengelola kantin yang dilaksanakan				1 kegiatan							1 kegiat an		
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						8.977.911.000						8.453.561.000		
3.27.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	7.181.039.000						100 persen	7.194.188.000	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
3.27.1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat	100 persen		100 persen	100 persen	22.350.000						100 persen	22.850.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		daerah													
3.27.1 .2.01. 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokume n	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	2 dokum en	3.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.1 .2.01. 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokume n	1.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	2 dokum en	1.650.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.1 .2.01. 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokume n	17.700.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	4 dokum en	17.700.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokume n							2 dokum en		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokume n							5 dokum en		
3.27.1 .2.02. 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	5.979.471.000						100 persen	6.013.676.000	
3.27.1 .2.02. 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	5.896.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	5.930.855.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.1 .2.02. 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	81.171.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	81.171.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.1 .2.02. 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokume n	1.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Dinperpa	1 dokum en	1.650.000	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	SKPD							Kertoharjo	Dana Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.				
3.27.1 .2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	9.500.000						100 persen	9.500.000	
3.27.1 .2.05. 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran, Hakteknas dan Karnaval batik				2 kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	2 kali	9.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.1 .2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	159.010.000						100 persen	149.374.000	
3.27.1 .2.06. 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	1.250.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	1.250.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.1 .2.06. 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	36.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	36.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				9 unit							9 unit		
3.27.1 .2.06. 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	2.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.1 .2.06. 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						40.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa		40.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.1 .2.06.	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan				12 bulan	10.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara bertahap	Dinperpa	12 bulan	10.000.000	Dinas Pertanian dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5	Penggandaan	penggandaan						Selatan, Kuripan Kertoharjo	Umum-Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				Pangan
3.27.1 .2.06. 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	2.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.1 .2.06. 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				12 bulan	66.260.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	56.624.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.1 .2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen	692.340.000						100 persen	676.230.000	
3.27.1 .2.07. 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/ pekerjaan konstruksi yang terbangun				4 unit	692.340.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	0	4 unit	676.230.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.1 .2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen	261.668.000						100 persen	265.858.000	
3.27.1 .2.08. 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	2.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	2.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.1 .2.08. 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	120.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	120.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.1 .2.08. 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	139.668.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Dinperpa	12 bulan	143.858.000	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kertoharjo	Dana Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.				
3.27.1 .2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen	56.700.000						100 persen	56.700.000	
3.27.1 .2.09. 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				31 unit	38.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	31 unit	38.200.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.1 .2.09. 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				4 unit	8.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	4 unit	8.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.1 .2.09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	10.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinperpa	12 bulan	10.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Nilai produksi pertanian pertahun	55.84 Miliar Rupiah		55.56 Miliar Rupiah	55.67 Miliar Rupiah	239.795.000						55.67 Miliar Rupia h	237.083.000	
		Nilai produksi peternakan pertahun	203.65 Miliar Rupiah		184.46 Miliar Rupiah	191.91 Miliar Rupiah							191.91 Miliar Rupia h		
3.27.2 .2.01.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	100 persen		100 persen	100 persen	109.037.000						100 persen	106.565.000	
3.27.2 .2.01. 2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah bulan pengelolaan lahan tanaman pangan dan hortikultura				12 bulan	109.037.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Dinperpa	12 bulan	106.565.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah dokumen rekap				1									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		RDKK tk kota				kegiatan						kegiatan			
3.27.2 .2.02.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDG hewan, tumbuhan dan mikroorganisme wewenang kabupaten/kota	100 persen		100 persen	100 persen	76.097.000					100 persen	76.670.000		
3.27.2 .2.02. 1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bulan pengelolaan lab kultur jaringan				12 bulan	51.097.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Dinperpa	12 bulan	51.670.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.2 .2.02. 2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan				1 kegiatan	25.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Dinperpa	1 kegiatan	25.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.2 .2.03.	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	29 kali		4 kali	5 kali	37.661.000					5 kali	36.848.000		
3.27.2 .2.03. 1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah bulan perawatan bibit ternak				12 bulan	17.161.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Dinperpa	12 bulan	16.348.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.2 .2.03. 2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah pelatihan pengolahan pakan ternak yang dilaksanakan				1 kegiatan	20.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Dinperpa	1 kegiatan	20.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.2 .2.05.	Pengendalian dan Pengawasan	Persentase kenaikan pelayanan ULIB	34,01 persen		5 persen	5 persen	17.000.000					5 persen	17.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota														
3.27.2 .2.05. 1	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah ternak yang dilayani kawin suntik				200 ekor	17.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Dinperpa	200 ekor	17.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.2 .2.06.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase kenaikan nilai produk peternakan	5 persen		5 persen	0 persen	-						0 persen	-	
3.27.2 .2.06. 1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bulan perawatan demplot ternak				0 bulan	-	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Dinperpa	0 bulan	-	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah ternak yang dilayani kawin suntik				0 ekor							0 ekor		
3.27.3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	1.163.847.000						100,00 persen	637.518.000	
3.27.3 .2.02.	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana yang digunakan (IKK Output)	100 persen		100 persen	100 persen	1.163.847.000						100 persen	637.518.000	
3.27.3 .2.02. 1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi yang di rehab				1 unit	285.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Dinperpa	1 unit	249.518.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.3 .2.02. 3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah pembangunan jalan usaha tani				1 unit	315.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif,	Dinperpa	1 unit	315.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
									Alokasi Umum	dan Berkeadilan	perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.				
3.27.3 .2.02. 7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah pagar RPH yang dibangun				0 meter	512.347.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Dinperpa	0 meter	20.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah pembangunan rumah potong hewan			1 unit			1 unit							
		Jumlah rumah potong hewan yang dipelihara			2 unit			2 unit							
3.27.3 .2.02. 9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah pembangunan prasarana pertanian lainnya				1 unit	51.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Dinperpa	1 unit	53.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5,00 persen		5,00 persen	5,00 persen	235.382.000						5,00 persen	230.318.000	
3.27.4 .2.01.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kejadian penyakit hewan menular (PHM) yang tertangani	800 kasus		800 kasus	800 kasus	56.000.000						800 kasus	56.000.000	
3.27.4 .2.01. 1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah hewan yang divaksinasi dan diobati di lapangan (luar kandang)				2500 ekor	56.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Peternak	2500 ekor	56.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.4 .2.02.	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan peredaran penjualan ternak	100 persen		100 persen	100 persen	15.000.000						100 persen	15.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
3.27.4 .2.02. 2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran penjualan ternak yang dilaksanakan				6 kali	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	0	6 kali	15.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan	
3.27.4 .2.03.	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang tertangani di PUSKESWAN	3.000 ekor		500 ekor	500 ekor	35.000.000						500 ekor	35.000.000		
3.27.4 .2.03. 2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah hewan yang diobati di PUSKESWAN				1000 ekor	35.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Peternak	1000 ekor	35.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan	
3.27.4 .2.04.	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada pelaku usaha	100 persen		100 persen	100 persen	129.382.000						100 persen	124.318.000		
3.27.4 .2.04. 1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah bulan operasional RPH				12 bulan	91.882.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Peternak	12 bulan	86.818.000	Dinas Pertanian dan Pangan	
3.27.4 .2.04. 2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah bulan pemantauan keamanan bahan pangan asal hewan segar				12 bulan	37.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Peternak	12 bulan	37.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan	
		Jumlah panitia qurban yang dilatih tentang tata cara penanganan hewan qurban yang ASUH				50 orang										50 orang
		Jumlah sosialisasi Kesmavet				1 kegiatan										1 kegiat an

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah wilayah yang dilakukan pemantauan kesehatan hewan qurban				27 keluraha n						27 kelura han			
3.27.5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	55.711.000					100,00 persen	54.513.000		
3.27.5 .2.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian/peternakan	20 kali		0 kali	4 kali	55.711.000					4 kali	54.513.000		
3.27.5 .2.01. 1	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah pelatihan pembuatan pestisida hayati				1 kegiatan	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Petani	1 kegiat an	25.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Pelaksanaan pengendalian OPT di lapangan per musim tanam				2 musim tanam						2 musim tanam			
3.27.5 .2.01. 5	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Persentase Jumlah fasilitasi penanggulangan bencana				2 kali	30.711.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Petani	2 kali	29.513.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3.27.6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	100,00 persen		0,00 persen	50,00 persen	32.498.000					50,00 persen	31.799.000		
3.27.6 .2.02.	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase penurunan jumlah usaha pemotongan hewan yang tidak berijin	26,49 persen		5 persen	5 persen	32.498.000					5 persen	31.799.000		
3.27.6 .2.02. 5	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan dan penegakan hukum yang dilaksanakan				6 kegiatan	32.498.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Dinperpa	6 kegiat an	31.799.000	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.27.7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	5,00 persen		5,00 persen	5,00 persen	69.639.000						5,00 persen	68.142.000	
3.27.7 .2.01.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan kelembagaan petani	100 persen		100 persen	100 persen	69.639.000						100 persen	68.142.000	
3.27.7 .2.01. 1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah bulan pendampingan penyuluhan pertanian				12 bulan	25.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Dinperpa	12 bulan	25.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah dokumen program penyuluhan tingkat kota				1 dokumen							1 dokumen		
3.27.7 .2.01. 2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Fasilitasi Munas KTNA				0 kegiatan	44.639.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Dinperpa	0 kegiatan	43.142.000	Dinas Pertanian dan Pangan
		Jumlah kelompok tani yang mengalami kenaikan kelas				4 poktan/tahun							4 poktan/tahun		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						10.670.309.000							10.986.625.000	
2.17.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	8.816.651.000						100 persen	8.834.957.000	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
2.17.1 .2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	22.850.000						100 Persen	22.850.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.17.1 .2.01. 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang tersusun				2 dokume n	2.750.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perdaga ngan Koperasi dan UKM Kota Pekalong an	2 dokum en	2.750.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.1 .2.01. 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan yang tersusun				2 dokume n	1.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perdaga ngan Koperasi dan UKM Kota Pekalong an	2 dokum en	1.650.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.1 .2.01. 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan monitoring dan evaluasi perangkat daerah				12 bulan	18.450.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perdaga ngan Koperasi dan UKM Kota Pekalong an	12 bulan	18.450.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokume n							4 dokum en		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokume n							2 dokum en		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dokumen RTP, 4 Pemantauan RTP) yang disusun				5 dokume n							5 dokum en		
2.17.1 .2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	7.563.622.000						100 Perse n	7.608.387.000	
2.17.1 .2.02. 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	7.488.772.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perdaga ngan Koperasi dan UKM Kota Pekalong an	12 bulan	7.533.537.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.1	Pelaksanaan	Jumlah bulan penyediaan				12 bulan	73.200.000	Kota Pekalongan,	Dana	Memperkuat	12. Penerapan MRI	Dinas	12	73.200.000	Dinas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
.2.02. 3	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jasa administrasi keuangan						Pekalongan Barat, Podosugih	Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perdaga ngan Koperasi dan UKM Kota Pekalong an	bulan		Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.1 .2.02. 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokume n	1.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perdaga ngan Koperasi dan UKM Kota Pekalong an	1 dokum en	1.650.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.1 .2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	14.500.000						100 Perse n	14.500.000	
2.17.1 .2.05. 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota				2 kali	14.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perdaga ngan Koperasi dan UKM Kota Pekalong an	2 kali	14.500.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah pakaian dinas yang diadakan				30 buah							30 buah		
2.17.1 .2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	317.450.000						100 Perse n	317.450.000	
2.17.1 .2.06. 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perdaga ngan Koperasi dan UKM Kota Pekalong an	12 bulan	2.500.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.1 .2.06. 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				5 unit	47.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perdaga ngan Koperasi dan UKM Kota Pekalong an	5 unit	47.500.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.17.1 .2.06. 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perdaga ngan Koperasi dan UKM Kota Pekalong an	12 bulan	2.500.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.1 .2.06. 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				12 bulan	64.950.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perdaga ngan Koperasi dan UKM Kota Pekalong an	12 bulan	64.950.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.1 .2.06. 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan				12 bulan	60.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perdaga ngan Koperasi dan UKM Kota Pekalong an	12 bulan	60.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.1 .2.06. 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang- undangan				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perdaga ngan Koperasi dan UKM Kota Pekalong an	12 bulan	2.500.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.1 .2.06. 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				55 kali	137.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perdaga ngan Koperasi dan UKM Kota Pekalong an	55 kali	137.500.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.1 .2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	535.998.000						100 Perse n	517.330.000	
2.17.1	Penyediaan Jasa Surat	Jumlah bulan penyediaan				12 bulan	2.400.000	Kota Pekalongan,	Dana	Memperkuat	12. Penerapan MRI	Dinas	12	2.400.000	Dinas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
.2.08. 1	Menyurat	jasa surat menyurat						Pekalongan Barat, Podosugih	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan	bulan		Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.1 .2.08. 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik				12 bulan	433.185.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan	12 bulan	414.517.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.1 .2.08. 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	100.413.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan	12 bulan	100.413.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.1 .2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	362.231.000						100 Perse n	354.440.000	
2.17.1 .2.09. 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				36 unit	312.231.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan	36 unit	304.440.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.1 .2.09. 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala				2 unit	30.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan	2 unit	30.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.1 .2.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana						20.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara bertahap	Dinas Perdag		20.000.000	Dinas Perdagangan,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
10	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							Barat, Podosugih	Umum- Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	ngan Koperasi dan UKM Kota Pekalong an			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	33,23 persen		24,59 persen	30,94 persen	112.351.000						30,94 persen	171.400.000	
2.17.3 .2.01.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota	65.29 persen		0 persen	62.81 persen	112.351.000						62.81 persen	171.400.000	
2.17.3 .2.01. 1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				100 koperasi	112.351.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Koperasi	100 kopera si	171.400.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah Koperasi Yang Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				100 Koperasi							100 Koper asi		
2.17.5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	59,68 persen		38,36 persen	58,31 persen	617.792.000						58,31 persen	631.070.000	
2.17.5 .2.01.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	1.39 persen		0.36 persen	0.77 persen	617.792.000						0.77 persen	631.070.000	
2.17.5 .2.01. 1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah koperasi dan UMKM yang mendapatkan pendampinganpeningkatan kapasitas				116 Koperasi / UMKM	617.792.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu	Koperasi	116 Koper asi/ UMKM	631.070.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah koperasi yang mendapatkan dukungan pengembangan koperasi				2 koperasi			DAK Non Fisik - PK2UKM		berdaya saing.		2 kopera si		
		Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan Akuntansi berbasis teknologi informasi				10 koperasi							10 kopera si		
		Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian				25 koperasi							25 kopera si		
2.17.8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,37 persen		11,85 persen	12,06 persen	1.123.515.000						12,06 persen	1.349.198.000	
2.17.8 .2.01.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha	7.26 UMKM		1.25 UMKM	3.65 UMKM	1.123.515.000						3.65 UMKM	1.349.198.000	
2.17.8 .2.01. 1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMKM yang diberi dukungan fasilitasi pemasaran				90 UMKM	1.123.515.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	UMKM	90 UMKM	1.349.198.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah UMKM yang diberi sosialisasi akses permodalan				20 UMKM							20 UMKM		
		Jumlah UMKM yang mendapat fasilitasi penguatan kelembagaan sentra				20 UMKM							20 UMKM		
		Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha				60 UMKM							60 UMKM		
		Jumlah UMKM yang mendapatkan pembinaan pengembangan wirausaha inovatif				20 UMKM							20 UMKM		
		Jumlah Usaha mikro yang diberi dukungan fasilitas sertifikasi produk usaha				40 UMKM							40 UMKM		
		Jumlah usaha mikro yang didata				9000 UMKM							9000 UMKM		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						10.010.977.000							11.399.800.000	
3.30.2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	77,70 persen		73,93 persen	75,42 persen	2.786.000						75,42 persen	2.726.000	
3.30.2.2.01.	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	100 persen		100 persen	100 persen	1.786.000						100 persen	1.726.000	
3.30.2.2.01.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin				3 perizinan	1.786.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pasar Rakyat, Stakeholder	3 perizinan	1.726.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.2.2.02.	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan	100 persen		100 persen	100 persen	1.000.000						100 persen	1.000.000	
3.30.2.2.02.1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG)				1 perijinan	1.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Stakeholder, pengusaha	1 perijinan	1.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100,00 persen		75,00 persen	81,25 persen	8.547.532.000						81,25 persen	9.954.203.000	
3.30.3.2.01.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Pelayanan Pasar Rakyat secara Profesional	18.75 persen		6.25 persen	6.25 persen	7.425.532.000						6.25 persen	9.832.203.000	
3.30.3.2.01.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dibangun				1 pasar	2.000.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan	stakeholder, pasar tradisional	1 pasar	3.000.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
									Umum		jasa yang mampu berdaya saing.				
3.30.3 .2.01. 2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah aplikasi sistem Informasi Database dan Pengelolaan pedagang pasar yang dibangun dan dipelihara				1 sistem aplikasi	5.425.532.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	stakehold er, pasar tradision al	1 sistem aplika si	6.832.203.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		jumlah jasa tenaga kontrak di pasar berdasarkan SK Walikota			64 orang				64 orang						
		Jumlah petugas jasa kebersihan dan keamanan pasar			84 orang				84 orang						
		Jumlah petugas kebersihan, keamanan dan pengelolaan pasar yang ditingkatkan kapasitas SDM nya			157 orang				157 orang						
		Jumlah sarana dan prasarana pasar yang ditingkatkan dan dipelihara			11 pasar				11 pasar						
3.30.3 .2.02.	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Presentase ketercapaian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya PK5	68.97 Persen		11.49 Persen	34.48 Persen	1.122.000.000						34.48 Perse n	122.000.000	
3.30.3 .2.02. 1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah lokasi kawasan Foodstreet				1 lokasi	1.122.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Pedagan g Kaki Lima	1 lokasi	122.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah pedagang yang mendapatkan sosialisasi pembinaan dan penataan kawasan PK5			120 orang				120 orang						
		Jumlah petugas retribusi pasar dan PK5 yang ditingkatkan kapasitasnya			120 orang				120 orang						
3.30.4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana	100,00 persen		80,00 persen	88,00 persen	492.582.000						88,00 persen	481.987.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		pemantauanya													
3.30.4 .2.02.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	persentase objek sasaran pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok	100 persen		27.27 persen	54.55 persen	487.582.000						54.55 persen	476.987.000	
3.30.4 .2.02. 1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dilakukan pengawasan barang beredar dan pemantauan harga				94 komodita s	130.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Masyara kat	94 komod itas	130.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.4 .2.02. 3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan operasi pasar murah				28 lokasi	357.582.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Masyara kat	28 lokasi	346.987.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.4 .2.03.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)	100 persen		100 persen	100 persen	5.000.000						100 persen	5.000.000	
3.30.4 .2.03. 3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan				586 Ton	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Tani, Stakehol der	586 Ton	5.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan volume ekspor	8,19 persen		7,24 persen	7,60 persen	120.337.000						7,60 persen	117.748.000	
3.30.5 .2.01.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi ekportir	27 pelaku usaha		22 pelaku usaha	24 pelaku usaha	120.337.000						24 pelaku usaha	117.748.000	
3.30.5	Pembinaan dan	Jumlah UMKM yang				30	120.337.000	Kota Pekalongan,	Dana	Memperkuat	9. Peningkatan	Stakehol	30	117.748.000	Dinas

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
.2.01. 1	Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	mengikuti pelatihan dan pendampingan produk ekspor				UMKM		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	der, pengusa ha ekspor produk unggulan daerah	UMKM		Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, timbangan, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	83,99 persen		73,99 persen	77,99 persen	366.766.000						77,99 persen	372.506.000	
3.30.6 .2.01.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (IKK Output)	83.99 persen		73.99 persen	77.99 persen	366.766.000						77.99 persen	372.506.000	
3.30.6 .2.01. 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang dutera ulang				4660 UTTP	331.766.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Maasyar akat Kota Pekalong an	4660 UTTP	332.506.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.6 .2.01. 2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah UTTP yang dilakukan pengawasan dan penyuluhan				4786 UTTP	35.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Maasyar akat Kota Pekalong an	4786 UTTP	40.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran (IKK Output)	7,50 persen		2,09 persen	4,26 persen	480.974.000						4,26 persen	470.630.000	
3.30.7 .2.01.	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya	100 persen		7.14 persen	4 persen	480.974.000						4 persen	470.630.000	
3.30.7 .2.01. 1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi produk melalui Dekranasda				18 UMKM	370.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif,	Stakehol der, pengusa ha	18 UMKM	370.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Alokasi Umum	dan Berkeadilan	perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	produk dalam negeri			dan Menengah	
		Jumlah UMKM yang mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah	12 UMKM			12 UMKM									
3.30.7 .2.01. 2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah				12 UMKM	60.974.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Stakehol der, pengusa ha produk dalam negeri	12 UMKM	50.630.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.30.7 .2.01. 3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi promosi produk melalui E- Marketplace				60 UMKM	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	Stakehol der, pengusa ha produk dalam negeri	60 UMKM	50.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2.7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						3.522.173.000							3.166.528.000	
2.7.3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	0,55 persen		0,33 persen	0,42 persen	2.311.440.000						0,42 persen	1.890.843.000	
2.7.3. 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kejuruan	100 persen		100 persen	100 persen	1.986.090.000						100 persen	1.573.561.000	
2.7.3. 2.01.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pelatihan untuk buruh rokok (DBHCHT) yang diselenggarakan				1 kali	1.284.188.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Masyara kat Kota Pekalong an yang memperl ukan pelatihan kerja	1 kali	1.262.459.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah pengangguran yang dilatih				250 orang			DBH CHT				250 orang		
		Jumlah perusahaan yang mengadakan kemitraan MOU dengan BLK melalui kios 3in1				16 perusah aan							16 perusa haan		
		Lulusan bersertifikat kompetensi				48 orang							48 orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.7.3. 2.01.2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah bulan pemeliharaan bangunan BLK				12 bulan	111.102.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Masyara kat Kota Pekalong an yang memperl ukan pelatihan kerja	12 bulan	111.102.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah Instruktur yang dinilai				15 instruktu r			15 instruk tur						
		Jumlah Kejuruan yang alat- alat pelatihannya dirawat				11 kejuruan			11 kejuru an						
2.7.3. 2.01.3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah kejuruan dan perlengkapan pelatihan yang difasilitasi sarana dan prasarana yang diadakan				2 kejuruan	590.800.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Masyara kat Kota Pekalong an yang memperl ukan pelatihan kerja	2 kejuru an	200.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan				1 pekerjaa n			1 pekerj aan						
2.7.3. 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100 persen		0 persen	70 persen	143.453.000						70 persen	134.243.000	
2.7.3. 2.02.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Instruktur yang mengikuti pelatihan kompetensi				20 orang	143.453.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	LPKS Kota Pekalong an	20 orang	134.243.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah LPKS yang mengikuti Bimtek Akreditasi				15 LPKS			15 LPKS						
		Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM LPKS				30 orang			30 orang						
		Jumlah orang yang mengikuti workshop tata kelola LPKS				30 orang			30 orang						
		Jumlah volume kunjungan monitoring ke LPKS selama 1 (satu) tahun				24 kali			24 kali						
2.7.3.	Konsultansi	Jumlah kegiatan	36 tenant		6 tenant	6 tenant	95.638.000						6	96.388.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.04	Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil dilaksanakan										tenant			
2.7.3. 2.04.1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah tenant yang memperoleh pembinaan				6 tenant	95.638.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Tenant baru	6 tenant	96.388.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.7.3. 2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	53.33 persen		0 persen	33.33 persen	86.259.000					33.33 persen	86.651.000		
2.7.3. 2.05.1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah alumni siswa pelatihan yang termonitor Kerja				600 alumni siswa	86.259.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Alumni siswa pelatihan	600 alumni siswa	86.651.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah peminat magang Jepang yang mengikuti pembekalan				15 orang							15 orang		
2.7.4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	29,93 persen		19,93 persen	23,93 persen	924.949.000					23,93 persen	996.046.000		
2.7.4. 2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	14.08 persen		8.52 persen	10.75 persen	419.275.000					10.75 persen	436.105.000		
2.7.4. 2.01.1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah job fair online yang diselenggarakan				30 kali	80.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	1. Pencari kerja aktif 2. Terbitnya Perjanjian Penempatan	30 kali	85.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah sosialisasi ketenagakerjaan yang				6 kali							6 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
		Nasional								Daerah					
		dilaksanakan									Tenaga Kerja 3. Masyara kat yang mengikuti transmigr asi				
2.7.4. 2.01.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah siswa kelas III SMK yang mengikuti kegiatan Bimbingan Jabatan persiapan masuk kerja				500 orang	35.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	1. Pencari kerja aktif 2. Terbitnya Perjanjia n Penempa tan Tenaga Kerja 3. Masyara kat yang mengikuti transmigr asi	500 orang	40.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.7.4. 2.01.4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah peserta disabilitas yang mengikuti layanan ketenagakerjaan				20 orang	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	1. Pencari kerja aktif 2. Terbitnya Perjanjia n Penempa tan Tenaga Kerja 3. Masyara kat yang mengikuti transmigr asi	20 orang	15.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.7.4. 2.01.5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah lokasi pelaksanaan padat karya				3 lokasi	289.275.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama	1. Pencari kerja aktif 2. Terbitnya Perjanjia n	3 lokasi	296.105.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah Perjanjian Kerja				1 buah							1 buah		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Yang Disahkan Oleh Dinas Bidang Ketenagakerjaan Kab/Kota (Transmigrasi)(IKK Output)									antara pemerintah dengan dunia usaha.	Penempan Tenaga Kerja 3. Masyara kat yang mengikuti transmigr asi			
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus Terdaftar Dalam Satu Kab/Kota (Transmigrasi) (IKK Output)			3 KK								3 KK		
		Jumlah Tenaga Kerja Non Formal Terdaftar dalam Satu Kab/Kota (WUB)			10 WUB								10 WUB		
2.7.4. 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang disusun	72 buku		12 buku	12 buku	151.907.000						12 buku	158.814.000	
2.7.4. 2.03.1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah operator yang menangani aplikasi informasi pasar kerja online				1 orang	30.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Operator online sistem, perusaha an penggun a tenagga kerja dan pencari kerja	1 orang	31.500.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar Di Kab/Kota (IKK Output)			12 laporan							12 lapora n			
2.7.4. 2.03.2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah layanan yang dilaksanakan				700 layanan	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Operator online sistem, perusaha an penggun a tenagga kerja dan pencari kerja	700 layana n	16.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah leaflet antar kerja yang dicetak			4 rim							4 rim			
2.7.4. 2.03.3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pelaksanaan job fair				50 perusah aan	106.407.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Operator online sistem, perusaha an penggun a tenagga kerja dan	50 perusa haan	111.314.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											pencari kerja				
2.7.4. 2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI yang terlayani secara legal	249 orang		29 orang	39 orang	344.482.000						39 orang	392.041.000	
2.7.4. 2.04.1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja (IKK Output)				60 orang	279.482.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Masyara kat calon PMI dan pegawai Keluraha n	60 orang	307.041.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata (IKK Output)				40 orang						40 orang			
2.7.4. 2.04.2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) Yang Mendapatkan Sosialisasi (IKK Output)				50 orang	65.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Masyara kat calon PMI dan pegawai Keluraha n	50 orang	85.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah pencari kerja yang mengikuti sosialisasi penempatan TKI				50 orang						50 orang			
2.7.4. 2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan terlayani perpanjangan IMTA di Kab/Kota	12 perusahaan		2 perusahaan	2 perusah aan	9.285.000						2 perusa haan	9.086.000	
2.7.4. 2.05.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan (IKK Output)				1 layanan	9.285.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Perusaha an penggun a tenaga kerja asing	1 layana n	9.086.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Monitoring Tenaga Kerja Asing di Perusahaan				5 perusah aan							5 perusa haan		
2.7.5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	49,02 persen		45,33 persen	46,80 persen	285.784.000						46,80 persen	279.639.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		(PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)													
2.7.5. 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	42.28 persen		37.00 persen	39.11 persen	118.850.000						39.11 persen	116.295.000	
2.7.5. 2.01.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang didata mengikuti pembinaan Peraturan Perusahaan (PP)				35 perusah aan	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	perusaha an	35 perusa haan	25.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.7.5. 2.01.2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang didata mengikuti pembinaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)				15 perusah aan	18.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	perusaha an	15 perusa haan	18.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.7.5. 2.01.3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah perusahaan yang didata ketenagakerjaannya				484 perusah aan	75.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	perusaha an	484 perusa haan	73.295.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah peserta pembinaan pengupahan				50 perusah aan							50 perusa haan		
		Jumlah sidang/ rapat Dewan Pengupahan				8 kali							8 kali		
		Rekomendasi UMK				1 Rekome							1 Reko		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
						ndasi UMK						menda si UMK			
2.7.5. 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	80.06 persen		48.57 persen	68.07 persen	166.934.000					68.07 persen	163.344.000		
2.7.5. 2.02.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perusahaan yang mengikuti dialog pencegahan perselisihan Hubungan Industrial/Hi				50 perusah aan	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Pekerja dan perusaha an	50 perusa haan	15.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.7.5. 2.02.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang difasilitasi mediasi				28 perusah aan	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Pekerja dan perusaha an	28 perusa haan	12.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.7.5. 2.02.3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh/ Pengusaha/ Manajemen Perusahaan,dan Organisasi Pengusaha yg mengikuti pembinaan				50 penguru s	22.434.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Pekerja dan perusaha an	50 pengu rus	22.344.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2.7.5. 2.02.4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti porseni tripartit				100 orang	102.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah	Pekerja dan perusaha an	100 orang	99.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah sidang/rapat LKS				8 kali						8 kali			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Tripartit									dengan dunia usaha.				
2.7.5. 2.02.5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah peserta pembinaan fasiiitas kesejahteraan pekerja				50 perusah aan	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.	Pekerja dan perusaha an	50 perusa haan	15.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						7.321.347.000							7.205.288.000	
3.31.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	6.590.286.000						100 persen	6.619.447.000	
3.31.1 .2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	22.534.000						100 persen	22.049.000	
3.31.1 .2.01. 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun				2 dokume n	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINPERI NAKER	2 dokum en	2.500.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.1 .2.01. 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA, Perubahan RKA, DPA dan Perubahan DPA yang disusun				4 dokume n	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINPERI NAKER	4 dokum en	1.500.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.1 .2.01. 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	18.534.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINPERI NAKER	12 bulan	18.049.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah dokumen data sektoral yang dihasilkan				1 dokume n							1 dokum en		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun				4 dokume n						4 dokum en			
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (Penetapan dan Perubahan)				2 dokume n						2 dokum en			
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokume n						5 dokum en			
3.31.1 .2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	5.719.541.000					100 persen	5.753.573.000		
3.31.1 .2.02. 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	5.655.541.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINPERI NAKER	12 bulan	5.689.573.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.1 .2.02. 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	62.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINPERI NAKER	12 bulan	62.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.1 .2.02. 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokume n	2.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINPERI NAKER	1 dokum en	2.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.1 .2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	8.821.000					100 persen	8.631.000		
3.31.1 .2.05. 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi dan Pekan Batik				2 kali	8.821.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINPERI NAKER	2 kali	8.631.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.1 .2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	238.074.000					100 persen	232.954.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3.31.1 .2.06. 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINPERI NAKER	12 bulan	3.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.1 .2.06. 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	56.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINPERI NAKER	12 bulan	56.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				20 unit							20 unit		
3.31.1 .2.06. 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINPERI NAKER	12 bulan	5.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.1 .2.06. 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	44.074.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINPERI NAKER	11 bulan	44.954.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.1 .2.06. 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	7.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINPERI NAKER	12 bulan	7.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.1 .2.06. 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINPERI NAKER	12 bulan	3.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.1 .2.06. 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				90 kali	120.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINPERI NAKER	90 kali	114.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
									Umum						
3.31.1 .2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	29.712.000						100 persen	29.074.000	
3.31.1 .2.07. 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan bangunan yang diadakan				1 dokume n	29.712.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINPERI NAKER	1 dokum en	29.074.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.1 .2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	471.086.000						100 persen	474.810.000	
3.31.1 .2.08. 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	2.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINPERI NAKER	12 bulan	2.400.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.1 .2.08. 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	232.236.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINPERI NAKER	12 bulan	228.710.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.1 .2.08. 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	236.450.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINPERI NAKER	12 bulan	243.700.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota				13 orang/bu lan							13 orang/ bulan		
3.31.1 .2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	100.518.000						100 persen	98.356.000	
3.31.1 .2.09. 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				37 unit	35.556.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	DINPERI NAKER	37 unit	35.556.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							Alokasi Umum	Pelayanan Publik	pelayanan publik.					
3.31.1 .2.09. 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				2 unit	44.962.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINPERI NAKER	2 unit	42.800.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.1 .2.09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DINPERI NAKER	12 bulan	20.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	21,04 persen		20,59 persen	20,43 persen	681.599.000						20,43 persen	446.373.000	
3.31.2 .2.01.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dilaksanakan	4.5 persen		2.0 persen	3 persen	681.599.000						3 persen	446.373.000	
3.31.2 .2.01. 2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen evaluasi RIPIK yang dilaksanakan				1 dokume n	50.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	IKM di Kota Pekalong an	1 dokum en	20.800.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah IKM konveksi Batik yang mengikuti pelatihan pengembangan produk				25 IKM							25 IKM		
3.31.2 .2.01. 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jml IKM ekonomi kreatif hijab di Kota Pekl yg mengikuti pelatihan desain pengembangan produk				30 IKM	360.799.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	IKM di Kota Pekalong an	30 IKM	195.573.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kegiatan industri				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Nasional		Daerah			
		Jumlah IKM batik di Kota Pekalongan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan produksi bersih				10 IKM						10 IKM			
		Jumlah IKM Batik/ Kuliner/ Kraft/Jamu/Bordir/Canting/K emas yang mengikuti pelatihan pengembangan produk				30 IKM						30 IKM			
		Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi HKI dan fasilitasi HKI				25 IKM						25 IKM			
3.31.2 .2.01. 4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang menerapkan standar industri hijau				30 IKM	150.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	IKM di Kota Pekalong an	30 IKM	130.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.2 .2.01. 5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah SDM IKM yang terlatih				40 orang	60.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	IKM di Kota Pekalong an	40 orang	50.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.2 .2.01. 6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah IKM yang memperoleh sertifikat halal, PIRT, SKKNI Batik, dan pelatihan konveksi				25 IKM	60.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	IKM di Kota Pekalong an	25 IKM	50.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	26,00 persen		23,00 persen	24,00 persen	13.928.000						24,00 persen	13.628.000	
3.31.3 .2.01.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha	Persentase pelaksanaan kegiatan rekomendasi Penerbitan IUI, IPUI, IUKI	33 persen		23 persen	25 persen	13.928.000						25 persen	13.628.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	dan IPKI Kewenangan Kab/Kota													
3.31.3 .2.01. 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah koordinasi dengan OPD dan IKM dalam rangka pengawasan perijinan di bidang industri				4 kali	13.928.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	IKM di Kota Pekalongan	4 kali	13.628.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.31.4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	35.534.000						100,00 persen	125.840.000	
3.31.4 .2.01.	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan	35 persen		23 persen	28 persen	35.534.000						28 persen	125.840.000	
3.31.4 .2.01. 1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah industri/produksi barang kena cukai yang didata mesin/peralatan produksi				1 industri	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	IKM di Kota Pekalongan	1 industri	120.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Jumlah industri yang diupdate guna meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengembangan usaha				7500 IKM							7500 IKM		
		Jumlah sentra yang difasilitasi pembinaan dan pengembangan kelembagaan				37 sentra							37 sentra		
3.31.4 .2.01. 2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah publikasi data informasi dan analisis industri melalui SIINas/SIIDA yang dilaksanakan				4 kali	5.534.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu	IKM di Kota Pekalongan	4 kali	5.840.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											berdaya saing.				
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4.1	SEKRETARIAT DAERAH						890.395.000							921.872.000	
4.1.2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	890.395.000						100,00 persen	921.872.000	
4.1.2. 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase capaian kinerja penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan dan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	100 persen		0 persen	100 persen	808.395.000						100 persen	842.872.000	
4.1.2. 2.01.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah pembinaan administrasi kelurahan				27 keluraha n	344.022.700	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Pemerint ahan - Sekretari at Daerah	27 kelura han	388.782.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah dokumen monografi kelurahan yang disusun				2 dokume n							2 dokum en		
		Jumlah Rakor dan Sosialisasi Bidang Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan				12 kegiatan							12 kegiat an		
		Jumlah kegiatan pembinaan pelaksanaan dana kelurahan yang dilaksanakan				2 kegiatan							2 kegiat an		
4.1.2. 2.01.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	jumlah bulan perawatan/pemeliharaan patok tapal batas wilayah				12 bulan	255.302.300	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Pemerint ahan - Sekretari at Daerah	12 bulan	254.390.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah Kegiatan Lomba K 3 yang diselenggarakan				3 kali							3 kali		
		Jumlah Kegiatan Sarasehan K 3 yang dilaksanakan				22 kegiatan							22 kegiat an		
		jumlah Unsur Rupabumi yang diperbaharui di Kota				4 unsur							4		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pekalongan											unsur		
4.1.2. 2.01.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Buku LPPD Kota Pekalongan yang disusun				1 dokume n	209.070.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Pemerint ahan - Sekretari at Daerah	1 dokum en	199.700.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah Dokumen Buku LKPJ Walikota Pekalongan yang disusun				1 dokume n							1 dokum en		
		Laporan Evaluasi Capaian SPM yang disusun				1 dokume n							1 dokum en		
4.1.2. 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase efektivitas kerja sama daerah	100 persen		0 persen	100 persen	82.000.000						100 persen	79.000.000	
4.1.2. 2.04.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah kerjasama antara pemerintah kota dengan pihak lain skala lokal/regional/nasional/ internasional (SIDA)				70 kerjasam a	82.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Pemerint ahan - Sekretari at Daerah	70 kerjas ama	79.000.000	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4.1	SEKRETARIAT DAERAH						1.026.215.000							1.007.308.000	
4.1.2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	1.026.215.000						100,00 persen	1.007.308.000	
4.1.2. 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Capaian Kinerja Penyusunan Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100 persen		100 persen	100 persen	1.026.215.000						100 persen	1.007.308.000	
4.1.2. 2.03.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	jumlah kajian peraturan perundang undangan daerah yang disusun				4 produk hukum	119.215.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Hukum - Sekretari at Daerah	4 produk hukum	108.000.000	Sekretariat Daerah
	jumlah produk hukum daerah yang disusun (SIDA)	9 Raperda /perda						9 Raper da/per							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Nasional		Daerah			
4.1.2. 2.03.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah laporan RANHAM/Kota peduli HAM di Kota Pekalongan yang disusun				2 laporan	827.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Hukum - Sekretari at Daerah	2 lapora n	818.308.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah masyarakat yang mengikuti fasilitasi pelayanan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat				1350 orang							1350 orang		
		Jumlah pelayanan advokasi dan bantuan hukum dilingkungan Pemerintah Pekalongan yang dilaksanakan				3 perkara							3 perkar a		
		jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani				12 kali							12 kali		
		jumlah perkara hukum masyarakat miskin yang terselesaikan				7 kali							7 kali		
4.1.2. 2.03.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum yang dilaksanakan				12 kegiatan	79.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Hukum - Sekretari at Daerah	12 kegiat an	81.000.000	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4.1	SEKRETARIAT DAERAH						415.329.000							406.396.000	
4.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	100 persen		100 persen	100 persen	415.329.000						100 persen	406.396.000	
4.1.1. 2.13	Penataan Organisasi	Indeks Kelembagaan Kota	81 indeks		76 indeks	78 indeks	415.329.000						78 indeks	406.396.000	
4.1.1. 2.13.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	jumlah dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja				2 dokume n	113.729.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD	2 dokum en	112.396.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		jumlah dokumen evaluasi kelembagaan yang disusun				1 dokume n							1 dokum en		
4.1.1. 2.13.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah OPD yang mengusulkan Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik				2 OPD	160.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD	2 OPD	156.000.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah OPD yang menyusun Peta Proses Bisnis			10 OPD			10 OPD							
		Jumlah OPD yang menyusun SOP			3 OPD			3 OPD							
		Jumlah OPD yang terfasilitasi Penyusunan SP			1 OPD			1 OPD							
		Jumlah unit kerja yang disurvey IKM			65 unit kerja			65 unit kerja							
4.1.1. 2.13.3		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				1 dokume n	141.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan				Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		
	Jumlah dokumen LKJIP Kota Pekalongan yang disusun				1 dokume n			1 dokum en							
	Jumlah kegiatan pembinaan internalisasi nilai-nilai budaya kerja yang dilaksanakan				1 kali			1 kali							
	Jumlah laporan capaian kinerja OPD yang disusun				31 dokume n			31 dokum en							
	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan pembangunan Zona Integritas				2 OPD			2 OPD							
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4.1	SEKRETARIAT DAERAH						897.377.000							893.373.000	
4.1.3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN	Persentase Kegiatan strategis bidang	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	897.377.000						100,00 persen	893.373.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	PEMBANGUNAN	perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan													
4.1.3. 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Presentase Capaian Kinerja Pengelolaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	100 persen		100 persen	100 persen	237.665.000						100 persen	237.665.000	
4.1.3. 2.01.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD yang difasilitasi				4 BUMD	76.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pemerintah Kota Pekalongan dan Masyarakat Kota Pekalongan	4 BUMD	76.000.000	Sekretariat Daerah
4.1.3. 2.01.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Penyedia Barang Bersubsidi yang dimonitoring				10 Penyedia	63.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pemerintah Kota Pekalongan dan Masyarakat Kota Pekalongan	10 Penyedia	63.000.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah Rakor Pengendalian Inflasi yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		
4.1.3. 2.01.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah barang cetak kegiatan aktivasi dan publikasi branding				2437 buah	98.665.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pemerintah Kota Pekalongan dan Masyarakat Kota Pekalongan	2437 buah	98.665.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah Rakor Komite Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan				3 kali							3 kali		
		Jumlah RAKOR Pemantauan Pengelolaan KUR yang dilaksanakan				3 kali							3 kali		
4.1.3. 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Bulan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bersumber dari DBHCHT	12 bulan		12 bulan	12 bulan	659.712.000						12 bulan	655.708.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.1.3. 2.04.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah OPD Pengelola DBHCHT yang dimonitoring				4 OPD	659.712.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyakat Pekalong an dan Pemerint ah Kota Pkl	4 OPD	655.708.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah Penerima BLT Buruh rokok				225 orang							225 orang		
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4.1	SEKRETARIAT DAERAH						628.672.000							617.475.000	
4.1.3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	6,00 persen		7,00 persen	6,00 persen	628.672.000						6,00 persen	617.475.000	
4.1.3. 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase OPD tertib pelaporan pelaksanaan APBD	100 persen		100 persen	100 persen	112.351.000						100 persen	109.935.000	
4.1.3. 2.02.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah pekerjaan tender fisik yang dilaksanakan 100%				50 pekerjaa n	45.351.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Pengada an Barang/J asa dan Administ rasi Pembang unan - Sekretari at Daerah	50 pekerj aan	42.935.000	Sekretariat Daerah
4.1.3. 2.02.3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	jumlah rakor pengendalian pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan				4 kali	67.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Pengada an Barang/J asa dan Administ rasi Pembang unan - Sekretari at Daerah	4 kali	67.000.000	Sekretariat Daerah
4.1.3. 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan	100 persen		100 persen	100 persen	516.321.000						100 persen	507.540.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.1.3. 2.03.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (IKK Outcome)				60 pekerjaa n	221.321.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Pengada an Barang/J asa dan Administ rasi Pembang unan - Sekretari at Daerah	60 pekerj aan	219.686.000	Sekretariat Daerah
4.1.3. 2.03.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (IKK Outcome)				100 persen	295.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Pengada an Barang/J asa dan Administ rasi Pembang unan - Sekretari at Daerah	100 persen	287.854.000	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4.1	SEKRETARIAT DAERAH						16.377.702.000							16.025.435.000	
4.1.2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	16.377.702.000						100,00 persen	16.025.435.000	
4.1.2. 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian kinerja bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	100 persen		100 persen	100 persen	16.377.702.000						100 persen	16.025.435.000	
4.1.2. 2.02.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah guru TPQ/MADIN Kota Pekalongan yang dapat difasilitasi bantuan transport, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan				2550 orang	14.775.132.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Kesra - Sekretari at Daerah	2550 orang	14.422.865.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah kegiatan fasilitasi haji				2 kegiatan							2 kegiat an		
		Jumlah kegiatan Festival				1							1		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Anak Sholeh Indonesia (FASI) tingkat Kota Pekalongan				kegiatan						kegiat an			
		Jumlah kegiatan Hari Santri Nasional				1 kegiatan						1 kegiat an			
		Jumlah kegiatan pelatihan pemulasaran jenasah				2 kegiatan						2 kegiat an			
		Jumlah kegiatan PHBI				5 kegiatan						5 kegiat an			
		Jumlah kegiatan STQ MTQ tingkat Kota Pekalongan, untuk pelajar dan umum				2 kegiatan						2 kegiat an			
		Jumlah lembaga yang mendapat fasilitasi bantuan hibah				50 lembaga						50 lemba ga			
		Jumlah petugas TKHD dan TPHD kegiatan fasilitasi BPIH Kota Pekalongan				3 orang						3 orang			
		Jumlah takmir masjid, takmir musholla dan lebe jenasah (non-PNS) yang mendapat fasilitiasi bantuan transport				2845 orang						2845 orang			
4.1.2. 2.02.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah lembaga yang mendapat fasilitasi pemberian bantuan sosial berupa beras kepada panti asuhan, yayasan dan pondok pesantren				26 lembaga	660.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	26 lemba ga	660.000.000	Sekretariat Daerah	
		Jumlah takmir masjid, takmir musholla dan lebe non pns yang mendapat santunan kematian				3665 orang						3665 orang			
4.1.2. 2.02.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah fasilitasi beasiswa pendidikan menengah dan pendidikan tinggi				500 siswa	942.570.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	500 siswa	942.570.000	Sekretariat Daerah	
		Jumlah kegiatan fasilitasi				1									1

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		BP4				kegiatan						kegiat an			
		Jumlah kegiatan Houli Habib				2 kegiatan						2 kegiat an			
		Jumlah kegiatan Pengajian Akbar Peringatan Hari Jadi				1 kegiatan						1 kegiat an			
		Jumlah kegiatan senam aerobik Jumat pagi di lapangan Setda dan Minggu pagi dilapangan Tirto bersama masyarakat				45 kegiatan						45 kegiat an			
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4.1	SEKRETARIAT DAERAH						29.600.777.000						29.358.330.000		
4.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	29.600.777.000					100 persen	29.358.330.000		
4.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	75.250.000					100 persen	75.250.000		
4.1.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan perubahan Renja yang disusun				2 dokumen	3.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah	2 dokumen	3.500.000	Sekretariat Daerah
4.1.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan Bagian Hukum yang disusun				2 dokumen	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat Daerah	2 dokumen	12.000.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan Bagian Kesejahteraan Rakyat yang disusun				2 dokumen						2 dokumen			
		Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan Bagian Organisasi yang disusun				2 dokumen						2 dokumen			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan Bagian PBJ dan Minbang yang disusun				2 dokume n						2 dokum en			
		Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan Bagian Pemerintahan yang disusun				2 dokume n						2 dokum en			
		Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan Bagian Perekonomian dan SDA yang disusun				2 dokume n						2 dokum en			
		Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang disusun				2 dokume n						2 dokum en			
		Jumlah dokumen RKA dan RKA perubahan Bagian Umum yang disusun				2 dokume n						2 dokum en			
4.1.1. 2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumalh dokumen SAKIP Bagian Umum yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokume n	59.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at Daerah	2 dokum en	59.750.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah bulan monitoring dan evaluasi perangkat daerah				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah dokumen evaluasi Renja Setda yang disusun				4 dokume n							4 dokum en		
		Jumlah dokumen SAKIP Bagian Hukum yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokume n							2 dokum en		
		Jumlah dokumen SAKIP Bagian Kesejahteraan Rakyatyang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokume n							2 dokum en		
		Jumlah dokumen SAKIP Bagian Organisasi yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokume n							2 dokum en		
		Jumlah dokumen SAKIP				2							2		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Bagian PBJ dan Minbang yang disusun (penetapan dan perubahan)				dokume n						dokum en			
		Jumlah dokumen SAKIP Bagian Pemerintahan yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokume n						2 dokum en			
		Jumlah dokumen SAKIP BagianPerekonomian dan SDA yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokume n						2 dokum en			
		Jumlah dokumen SAKIP Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokume n						2 dokum en			
		Jumlah dokumen SPIP (1 laporan dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokume n						5 dokum en			
4.1.1. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	14.198.859.000					100 persen	14.279.734.000		
4.1.1. 2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	13.967.759.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at Daerah	12 bulan	14.048.634.000	Sekretariat Daerah
4.1.1. 2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Hukum				12 bulan	211.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at Daerah	12 bulan	211.600.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Kesejahteraan Rakyat				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Organisasi				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian PBJ dan Minbang				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Pemerintahan				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Perekonomian dan SDA				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Umum				12 bulan						12 bulan			
4.1.1. 2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD Bagian Hukum yang disusun				1 dokume n	19.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at Daerah	1 dokum en	19.500.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah laporan keuangan SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat yang disusun				1 dokume n							1 dokum en		
		Jumlah laporan keuangan SKPD Bagian Organisasi yang disusun				1 dokume n							1 dokum en		
		Jumlah laporan keuangan SKPD Bagian PBJ dan Minbang yang disusun				1 dokume n							1 dokum en		
		Jumlah laporan keuangan SKPD Bagian Pemerintahan yang disusun				1 dokume n							1 dokum en		
		Jumlah laporan keuangan SKPD Bagian Perekonomian dan SDA yang disusun				1 dokume n							1 dokum en		
		Jumlah laporan keuangan SKPD Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang				1 dokume n							1 dokum en		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		disusun													
		Jumlah laporan keuangan SKPD Bagian Umum yang disusun				1 dokume n						1 dokum en			
4.1.1. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	87.250.000						100 persen	87.250.000	
4.1.1. 2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota				2 kali	87.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at Daerah	2 kali	87.250.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah pakaian dinas yang diadakan				30 stel							30 stel		
4.1.1. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	6.456.580.000						100 persen	6.222.556.000	
4.1.1. 2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	80.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at Daerah	12 bulan	8.000.000	Sekretariat Daerah
4.1.1. 2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Hukum				12 bulan	1.040.725.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at Daerah	12 bulan	1.040.725.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Kesejahteraan Rakyat				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Organisasi				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Pemerintahan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Perekonomian				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		dan SDA													
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian Umum				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disewa Bagian Umum				5 jenis							5 jenis		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				120 kali							120 kali		
		umlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Bagian PBJ dan Minbang				12 bulan							12 bulan		
4.1.1. 2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	170.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at Daerah	12 bulan	170.000.000	Sekretariat Daerah
4.1.1. 2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Bagian Hukum				11 bulan	1.591.721.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at Daerah	11 bulan	1.591.721.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Bagian Organisasi				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Bagian PBJ dan Minbang				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Bagian Pemerintahan				11 bulan							11 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Bagian Perekonomian dan				11 bulan							11 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		SDA													
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan			11 bulan							11 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Bagian Umum			11 bulan							11 bulan			
		umlah bulan penyediaan makanan dan minuman Bagian Kesejahteraan Rakyat			11 bulan							11 bulan			
4.1.1. 2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Hukum			12 bulan	257.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at Daerah	12 bulan	257.500.000	Sekretariat Daerah	
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Kesejahteraan Rakyat			12 bulan							12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Organisasi			12 bulan							12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian PBJ dan Minbang			12 bulan							12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Pemerintahan			12 bulan							12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Perekonomian dan SDA			12 bulan							12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan			12 bulan							12 bulan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Umum				12 bulan						12 bulan			
4.1.1. 2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Bagian Hukum				12 bulan	77.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at Daerah	12 bulan	77.500.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Bagian Kesejahteraan Rakyat				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Bagian Organisasi				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Bagian PBJ dan Minbang				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Bagian Pemerintahan				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Bagian Perekonomian dan SDA				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Bagian Umum				12 bulan						12 bulan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4.1.1. 2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan fasilitasi kunjungan tamu				12 bulan	1.085.258.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at Daerah	12 bulan	1.085.258.000	Sekretariat Daerah
4.1.1. 2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi kegiatan Staf Ahli				2 kegiatan	2.153.876.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at Daerah	2 kegiat an	1.991.852.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah fasilitasi perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD Bagian Hukum			120 orang/ka li								120 orang/ kali		
		Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah Bagian Pemerintahan			60 orang/ka li								60 orang/ kali		
		Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat			325 orang/ka li								325 orang/ kali		
		Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah Bagian Organisasi			50 orang/ka li								50 orang/ kali		
		Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah Bagian PBJ dan Minbang			25 orang/ka li								25 orang/ kali		
		Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah Bagian Perekonomian dan SDA			115 orang/ka li								115 orang/ kali		
		Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan			87 orang/ka li								87 orang/ kali		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bagian Umum			900 orang/ka li								900 orang/ kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.1.1. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	2.396.180.000						100 persen	2.396.180.000	
4.1.1. 2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Bagian Hukum				12 bulan	26.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at Daerah	12 bulan	26.600.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Bagian Kesejahteraan Rakyat				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Bagian Organisasi				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Bagian PBJ dan Minbang				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Bagian Pemerintahan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Bagian Perekonomian dan SDA				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat bagian protokol dan komunikasi Pimpinan				12 bulan							12 bulan		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bagian Umum				12 bulan							12 bulan		
4.1.1. 2.08.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									
4.1.1. 2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	1.400.580.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at Daerah	12 bulan	1.400.580.000	Sekretariat Daerah
4.1.1.	Pemeliharaan Barang	Persentase ketercapaian	100 persen		100 persen	100	4.880.811.000						100	4.803.766.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.09	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				persen						persen			
4.1.1. 2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				78 unit	1.456.080.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at Daerah	78 unit	1.456.080.000	Sekretariat Daerah
4.1.1. 2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				7 unit	3.024.231.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at Daerah	7 unit	2.947.186.000	Sekretariat Daerah
4.1.1. 2.09.1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Bagian Hukum				12 bulan	400.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at Daerah	12 bulan	400.500.000	Sekretariat Daerah
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat				12 bulan		12 bulan							
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Bagian Organisasi				12 bulan		12 bulan							
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Bagian PBJ dan Minbang				12 bulan		12 bulan							
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Bagian Pemerintahan				12 bulan		12 bulan							
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan				12 bulan		12 bulan							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		gedung kantor Bagian Perekonomian dan SDA													
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Bagian Umum				12 bulan						12 bulan			
4.1.1. 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan dan operasional kepala daerah	100 persen		100 persen	100 persen	695.847.000						100 persen	683.594.000	
4.1.1. 2.11.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 bulan	665.847.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at Daerah	12 bulan	653.594.000	Sekretariat Daerah
4.1.1. 2.11.3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 kali	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at Daerah	4 kali	30.000.000	Sekretariat Daerah
4.1.1. 2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase ketercapaian fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	810.000.000						100 persen	810.000.000	
4.1.1. 2.12.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				12 bulan	480.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at Daerah	12 bulan	480.000.000	Sekretariat Daerah
4.1.1. 2.12.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				12 bulan	330.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at Daerah	12 bulan	330.000.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4.1	SEKRETARIAT DAERAH					1.244.444.000							1.227.756.000			
4.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	100 persen		100 persen	100 persen	1.244.444.000						100 persen	1.227.756.000		
		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen			100 persen
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen			100 persen
		Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen			100 persen
		Persentase pelayanan keprotokoleran	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen			100 persen
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen			100 persen
4.1.1. 2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase ketercapaian kinerja fasilitasi keprotokolan, komunikasi tugas pimpinan dan pendokumentasian tugas pimpinan		100 persen	100 persen							100 persen			1.244.444.000
4.1.1. 2.14.1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah bulan penyelenggaraan keprotokoleran dalam kegiatan kedinasan			12 bulan	283.862.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Protokol dan Kommunik asi Pimpinan - Sekretari at Daerah	12 bulan	274.540.000	Sekretariat Daerah		
4.1.1. 2.14.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah dokumentasi kinerja KDH dan Wa. KDH yang terbit pada media masa regional dan lokal			180 kali terbit	610.582.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Bagian Protokol dan Kommunik	180 kali terbit	603.216.000	Sekretariat Daerah		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
									Alokasi Umum	Pelayanan Publik	pelayanan publik.	asi Pimpinan - Sekretari at Daerah			
		Jumlah dokumentasi tugas pimpinan yang terbit pada media massa				7 kali							7 kali		
		Jumlah publikasi ILPPD dalam satu tahun				1 kali							1 kali		
4.1.1. 2.14.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah bulan fasilitasi dokumentasi tugas pimpinan				12 bulan	350.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Bagian Protokol dan Komunik asi Pimpinan - Sekretari at Daerah	12 bulan	350.000.000	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4.2	SEKRETARIAT DPRD						48.006.390.000							47.539.100.000	
4.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	28.119.477.000						100 persen	28.115.194.000	
4.2.1. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	16.500.000						100 Perse n	16.500.000	
4.2.1. 2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokume n	7.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at Daerah	2 dokum en	7.000.000	Sekretariat DPRD
		Jumlah dokumen Renstra Perangkat daerah yang disusun				1 dokume n							1 dokum en		
4.2.1. 2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan Perubahan RKA yang disusun				2 dokume n	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at Daerah	2 dokum en	1.500.000	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4.2.1. 2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja				100 persen	8.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at Daerah	100 persen	8.000.000	Sekretariat DPRD
4.2.1. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	3.166.431.000						100 Perse n	3.183.992.000	
4.2.1. 2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	3.094.531.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at DPRD	12 bulan	3.112.092.000	Sekretariat DPRD
4.2.1. 2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	70.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at DPRD	12 bulan	70.400.000	Sekretariat DPRD
4.2.1. 2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokume n	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at DPRD	1 dokum en	1.500.000	Sekretariat DPRD
4.2.1. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	9.500.000						100 Perse n	9.500.000	
4.2.1. 2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota				2 kali	9.500.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at DPRD	2 kali	9.500.000	Sekretariat DPRD
4.2.1. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	2.752.266.000						100 Perse n	2.709.662.000	
4.2.1. 2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponeninstalasi/peneran gan bangunan kantor				12 bulan	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at DPRD	12 bulan	25.000.000	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
									Umum						
4.2.1. 2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	255.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at DPRD	12 bulan	255.000.000	Sekretariat DPRD
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				12 bulan									
4.2.1. 2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at DPRD	12 bulan	25.000.000	Sekretariat DPRD
4.2.1. 2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				12 bulan	644.766.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at DPRD	12 bulan	627.162.000	Sekretariat DPRD
4.2.1. 2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	142.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at DPRD	12 bulan	142.500.000	Sekretariat DPRD
4.2.1. 2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang undangan				12 bulan	35.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at DPRD	12 bulan	35.000.000	Sekretariat DPRD
4.2.1. 2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan fasilitasi kunjungan tamu				12 bulan	300.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at DPRD	12 bulan	300.000.000	Sekretariat DPRD
4.2.1. 2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				12 bulan	1.325.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Sekretari at DPRD	12 bulan	1.300.000.000	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
									Alokasi Umum	Pelayanan Publik	pelayanan publik.				
4.2.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	910.493.000						100 Persen	894.965.000	
4.2.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	1.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat DAerah	12 bulan	1.800.000	Sekretariat DPRD
4.2.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik				12 Bulan	200.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat DAerah	12 Bulan	200.000.000	Sekretariat DPRD
4.2.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 Bulan	708.693.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat DAerah	12 Bulan	693.165.000	Sekretariat DPRD
4.2.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	1.459.343.000						100 Persen	1.428.752.000	
4.2.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpeliharaan secara rutin/berkala				12 bulan	939.343.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat DPRD	12 bulan	908.752.000	Sekretariat DPRD
4.2.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpeliharaan secara rutin/berkala				12 Bulan	400.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretariat DPRD	12 Bulan	400.000.000	Sekretariat DPRD
4.2.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara berkala perlatan dan perlengkapan gedung kantor				12 Bulan	120.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Sekretariat DPRD	12 Bulan	120.000.000	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
									Alokasi Umum	Pelayanan Publik	pelayanan publik.				
4.2.1. 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase ketercapaian layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 Persen		100 Persen	100 Persen	18.804.944.000						100 Perse n	18.871.823.000	
4.2.1. 2.15.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD				12 Bulan	17.774.944.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at DPRD	12 Bulan	17.841.823.000	Sekretariat DPRD
4.2.1. 2.15.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan				140 Stel	500.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at DPRD	140 Stel	500.000.000	Sekretariat DPRD
4.2.1. 2.15.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah pelaksanaan perawatan kesehatan Pimpinan dan anggota DPRD				35 Orang	530.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at DPRD	35 Orang	530.000.000	Sekretariat DPRD
4.2.1. 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase ketercapaian layanan administrasi DPRD	100 Persen		100 Persen	100 Persen	1.000.000.000						100 Perse n	1.000.000.000	
4.2.1. 2.16.3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Fasilitasi/pelaksanaan rapat alat kelengkapan DPRD				12 Bulan	400.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretari at DPRD	12 Bulan	400.000.000	Sekretariat DPRD
4.2.1. 2.16.4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD				12 Bulan	600.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at DPRD	12 Bulan	600.000.000	Sekretariat DPRD
4.2.2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	19.886.913.000						100,00 persen	19.423.906.000	
4.2.2. 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase ketercapaian pembentukan peraturan daerah dan Peraturan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	8.300.000.000						100 Perse n	8.300.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		DPRD													
4.2.2. 2.01.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Perda yang ditetapkan				12 Perda	3.000.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at DPRD	12 Perda	3.000.000.000	Sekretariat DPRD
		Persentase perda yang ditetapkan			100 Persen				100 Perse n						
4.2.2. 2.01.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Pendampingan/pengkajian Raperda yang dilaksanakan				10 Kali	5.300.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at DPRD	10 Kali	5.300.000.000	Sekretariat DPRD
		Persentase Perda Yang ditetapkan			100 Persen			100 Perse n							
4.2.2. 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah pembahasan dokumen anggaran dan evaluasi	30 dokumen		5 dokumen	5 dokume n	417.837.000						5 dokum en	408.849.000	
4.2.2. 2.02.1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Fasilitas Pembahasan KUA PPAS				100 Persen	150.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at DPRD	100 Perse n	150.000.000	Sekretariat DPRD
4.2.2. 2.02.3	Pembahasan APBD	Jumlah Pembahasan APBD yang dilaksanakan				4 kali	150.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretari at DPRD	4 kali	150.000.000	Sekretariat DPRD
4.2.2. 2.02.6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah fasilitas pembahasan pertanggungjawaban APBD				2 dokume n	117.837.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at DPRD	2 dokum en	108.849.000	Sekretariat DPRD
4.2.2. 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase ketercapaian Peningkatan kapasitas DPRD	100 Persen		100 Persen	100 Persen	3.150.000.000						100 Perse n	3.150.000.000	
4.2.2.	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Pelaksanaan				100	2.000.000.000	Kota Pekalongan,	Dana	Memperkuat	12. Penerapan MRI	Sekretari	100	2.000.000.000	Sekretariat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.04.2		Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD				Persen		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	at DPRD	Perse n		DPRD
4.2.2. 2.04.3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Produk hukum yang disosialisasikan				100 persen	800.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at DPRD	100 persen	800.000.000	Sekretariat DPRD
4.2.2. 2.04.6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah rapatdengar pendapat/dialog dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat serta tokoh agama yang dilaksanakan				20 kali	300.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at DPRD	20 kali	300.000.000	Sekretariat DPRD
4.2.2. 2.04.7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Program Kerja /Agenda kerja DPRD yang disusun				100 Persen	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sekretari at DPRD	100 Perse n	50.000.000	Sekretariat DPRD
4.2.2. 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase ketercapaian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 Persen		100 Persen	100 Persen	1.700.000.000						100 Perse n	1.700.000.000	
4.2.2. 2.05.1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Fasilitas koordinasi dan konsultasi dalam daerah Pimpinan dan Anggota DPRD				96 kali	300.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat Kota Pekalong an	96 kali	300.000.000	Sekretariat DPRD
4.2.2. 2.05.3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Fasilitas kegiatan reses daerah wilayah pemilihan				3 kali	1.400.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat Kota Pekalong an	3 kali	1.400.000.000	Sekretariat DPRD
4.2.2. 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase ketercapaian Fasilitasi Tugas DPRD	100 Persen		100 Persen	100 Persen	6.319.076.000						100 Perse n	5.865.057.000	
4.2.2. 2.08.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Fasilitas Kunjungan kerja Alat Kelengkapan				50 kali	6.319.076.000	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara bertahap	Sekretari at DPRD	50 kali	5.865.057.000	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	DPRD	dewan						Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum- Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				
		Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Adeksi				8 kali							8 kali		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5.1	PERENCANAAN						8.088.267.000						8.054.099.000		
5.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	6.439.955.000						100 persen	6.463.227.000	
5.1.1. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	319.139.000						100 persen	318.906.000	
5.1.1. 2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokume n	2.725.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pegawai ASN dan Non ASN di lingkung an Bappeda Kota Pekalong an	2 dokum en	2.717.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembang an Daerah
5.1.1. 2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokume n	1.634.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pegawai ASN dan Non ASN di lingkung an Bappeda Kota Pekalong an	2 dokum en	1.630.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembang an Daerah
5.1.1. 2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	314.780.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pegawai ASN dan Non ASN di lingkung an	12 bulan	314.559.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembang an Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Nasional	Daerah				
		Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun				4 dokume n					Bappeda Kota Pekalong an	4 dokum en			
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokume n				2 dokum en					
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokume n				5 dokum en					
5.1.1. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	5.538.785.000					100 persen	5.572.053.000		
5.1.1. 2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Bappeda				12 bulan	5.491.769.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pegawai ASN dan Non ASN di lingkung an Bappeda Kota Pekalong an	12 bulan	5.526.989.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah
5.1.1. 2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	45.415.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pegawai ASN dan Non ASN di lingkung an Bappeda Kota Pekalong an	12 bulan	43.530.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah
5.1.1. 2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokume n	1.601.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pegawai ASN dan Non ASN di lingkung an Bappeda Kota Pekalong an	1 dokum en	1.534.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.1.1. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	8.821.000						100 persen	8.631.000	
5.1.1. 2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi				3 kali	8.821.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pegawai ASN dan Non ASN di lingkung an Bappeda Kota Pekalong an	3 kali	8.631.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembang an Daerah
5.1.1. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	339.266.000						100 persen	331.969.000	
5.1.1. 2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	1.387.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pegawai ASN dan Non ASN di lingkung an Bappeda Kota Pekalong an	12 bulan	1.357.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembang an Daerah
5.1.1. 2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda- benda pos				12 bulan	60.504.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pegawai ASN dan Non ASN di lingkung an Bappeda Kota Pekalong an	12 bulan	59.203.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembang an Daerah
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				3 unit							3 unit		
5.1.1. 2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	2.776.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pegawai ASN dan Non ASN di lingkung an Bappeda Kota Pekalong	12 bulan	2.716.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembang an Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
												an			
5.1.1. 2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	49.952.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pegawai ASN dan Non ASN di lingkunga n Bappeda Kota Pekalong an	11 bulan	48.878.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah
5.1.1. 2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	13.876.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pegawai ASN dan Non ASN di lingkunga n Bappeda Kota Pekalong an	12 bulan	13.577.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah
5.1.1. 2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang- undangan				12 bulan	2.637.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pegawai ASN dan Non ASN di lingkunga n Bappeda Kota Pekalong an	12 bulan	2.580.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah
5.1.1. 2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				115 orang/ka li	208.134.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pegawai ASN dan Non ASN di lingkunga n Bappeda Kota Pekalong an	115 orang/ kali	203.658.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah
5.1.1. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	154.483.000						100 persen	153.308.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.1.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	1.393.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	1.362.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	68.414.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	66.942.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kanto				12 bulan	84.676.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	BAPPEDA	12 bulan	85.004.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	79.461.000						100 persen	78.360.000	
5.1.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				17 unit	58.569.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan Bappeda Kota Pekalongan	17 unit	57.918.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.1.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	20.892.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan Bappeda Kota Pekalongan	12 bulan	20.442.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.1.2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	670.984.000						100,00 persen	727.715.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH														
5.1.2. 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	100 persen		100 persen	100 persen	551.974.000						100 persen	609.354.000	
5.1.2. 2.01.7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen background study RPJMD yang disusun				1 dokume n	551.974.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD se- Kota Pekalong an	1 dokum en	609.354.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembang an Daerah
		Jumlah dokumen RKPD yang disusun				3 dokume n							3 dokum en		
5.1.2. 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data	100 persen		100 persen	100 persen	11.607.000						100 persen	11.811.000	
5.1.2. 2.02.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah doumen laporan data prioritas satu data terpadu daerah yang disusun				1 dokume n	11.607.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD se- Kota Pekalong an	1 dokum en	11.811.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembang an Daerah
5.1.2. 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100 persen		100 persen	100 persen	107.403.000						100 persen	106.550.000	
5.1.2. 2.03.3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan evaluasi RKPD yang disusun				4 dokume n	107.403.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD se- Kota Pekalong an	4 dokum en	106.550.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembang an Daerah
		Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK) yang disusun				4 dokume n							4 dokum en		
5.1.3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	977.328.000						100,00 persen	863.157.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	PEMBANGUNAN DAERAH														
5.1.3. 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	100 persen		100 persen	100 persen	298.831.000						100 persen	198.645.000	
5.1.3. 2.01.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan				2 kali	9.006.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perangka t Daerah	2 kali	8.688.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembang an Daerah
5.1.3. 2.01.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan yang disusun				1 dokume n	72.043.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perangka t Daerah	1 dokum en	69.506.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembang an Daerah
		Jumlah dokumen LP2KD yang disusun			1 dokume n			1 dokum en							
		Jumlah dokumen rekomendasi KBP Kota Pekalongan yang disusun			1 dokume n			1 dokum en							
		Jumlah dokume RAT Penanggulangan Kemiskinan yang disusun			1 dokume n			1 dokum en							
5.1.3. 2.01.7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen capaian SDGs Kota Pekalongan yang disusun				1 dokume n	27.015.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perangka t Daerah	1 dokum en	26.064.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembang an Daerah
		Jumlah dokumen pelaksanaan penanggulangan masalah gizi yang disusun			1 dokume n			1 dokum en							
		Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pembangunan Manusia			1 kali			1 kali							
5.1.3.	Koordinasi Pelaksanaan	Jumlah dokumen Anggaran				1	190.767.000	Kota Pekalongan,	Dana	Memperkuat	12. Penerapan MRI	Perangka	1	94.387.000	Badan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.01.8	Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Responsif Anak (ARA) Kota Pekalongan				dokume n		Pekalongan Barat, Podosugih	Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	t Daerah	dokum en		Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah
		Jumlah dokumen Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Pekalongan				1 dokume n							1 dokum en		
		Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia yang disusun				1 dokume n							1 dokum en		
		Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) yang disusun				1 dokume n							1 dokum en		
5.1.3. 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan	100 persen		100 persen	100 persen	260.662.000						100 persen	255.664.000	
5.1.3. 2.02.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen pendukung pengembangan Teknopark				1 dokume n	260.662.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat dan Stakehol der terkait Kota Pekalong an	1 dokum en	255.664.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang disusun				1 dokume n							1 dokum en		
		Jumlah rakor, sosialisasi dan workshop pengembangan teknopark				5 kali							5 kali		
5.1.3. 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 persen		100 persen	100 persen	417.835.000						100 persen	408.848.000	
5.1.3. 2.03.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen koordinasi infrastruktur yang disusun				1 dokume n	204.275.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat dan Stakehol der terkait Kota	1 dokum en	199.881.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembanga n Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											Pekalongan				
5.1.3.2.03.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen evaluasi smart city				1 dokumen	213.560.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyarakat dan Stakeholder terkait Kota Pekalongan	1 dokumen	208.967.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah dokumen koordinasi pengembangan wilayah			1 dokumen				1 dokumen						
		Jumlah dokumen/laporan koordinasi penataan ruang yang disusun			1 dokumen				1 dokumen						
5.5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1.273.466.000							1.248.015.000	
5.5.2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	1.273.466.000						100,00 persen	1.248.015.000	
5.5.2.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan	100 persen		100 persen	100 persen	260.304.000						100 persen	255.433.000	
5.5.2.2.01.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah penelitian dan pengembangan oleh peneliti dan/atau lembaga penelitian yang difasilitasi				6 riset	181.991.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Peneliti/ lembaga penelitian	6 riset	178.076.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.5.2.2.01.1.2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah jurnal litbang yang diterbitkan				1 dokumen	78.313.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Peneliti/ lembaga penelitian	1 dokumen	77.357.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah website kelitbangan yang dikelola				1 website			1 website						
5.5.2.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	100 persen		100 persen	100 persen	304.157.000						100 persen	298.826.000	
5.5.2.	Penelitian dan	Jumlah				3 kali	304.157.000	Kota Pekalongan,	Dana	Memperkuat	12. Penerapan MRI	Peneliti/I	3 kali	298.826.000	Badan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.02.1	Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	FGD/workshop/Rakor kelitbangan yang dilaksanakan						Pekalongan Barat, Podosugih	Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	embaga penelitian , dan masyara kat			Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembang an Daerah
		Jumlah kajian riset bersama yang dilaksanakan				1 riset							1 riset		
		Jumlah workshop/FGD pengabdian masyarakat yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
5.5.2. 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SIDA)	100 persen		100 persen	100 persen	709.005.000						100 persen	693.756.000	
5.5.2. 2.04.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah keikutsertaan dalam pameran inovasi tingkat regional				1 event	709.005.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Peneliti, inventor, dan masyara kat	1 event	693.756.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembang an Daerah
		Jumlah Koordinasi dan evaluasi Sida				4 kali							4 kali		
		Jumlah pelaksanaan Pameran Inovasi				1 kali							1 kali		
		Jumlah Pemenang Krenova				5 peme ng							5 peme ng		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5.2	KEUANGAN						25.089.143.000							23.182.915.000	
5.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	15.933.966.000						100 persen	14.344.890.000	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
5.2.1. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat	100 Persen		100 Persen	100 Persen	18.150.000						100 Perse n	18.150.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Nasional	Daerah				
		daerah													
5.2.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokumen	4.700.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Pengelol aan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalong an	2 dokumen	4.700.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah dokumen renstra yang disusun				0 dokumen							0 dokumen		
5.2.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	2.250.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Pengelol aan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalong an	2 dokumen	2.250.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	11.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Pengelol aan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalong an	12 bulan	11.200.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 dokumen							4 dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		
5.2.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	12.517.843.000						100 Persen	12.591.960.000	
5.2.1.	Penyediaan Gaji dan	Jumlah bulan penyediaan				12 bulan	12.380.593.000	Kota Pekalongan,	Dana	Memperkuat	12. Penerapan MRI	Badan	12	12.454.710.000	Badan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.02.1	Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan ASN						Pekalongan Barat, Podosugih	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan	bulan		Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.1. 2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	135.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan	12 bulan	135.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.1. 2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokumen	2.250.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan	1 dokumen	2.250.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.1. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	9.500.000						100 Persen	9.500.000	
5.2.1. 2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota				2 kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan	2 kali	9.500.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.2.1. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	786.868.000						100 Perse n	754.082.000	
5.2.1. 2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	7.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Pengelol aan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalong an	12 bulan	7.500.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.1. 2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	273.868.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Pengelol aan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalong an	12 bulan	241.082.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				15 unit							15 unit		
5.2.1. 2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	18.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Pengelol aan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalong an	12 bulan	18.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.1. 2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	110.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Pengelol aan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalong an	11 bulan	110.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
												an			
5.2.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	50.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan	12 bulan	50.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan	12 bulan	2.500.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				200 orang/kali	325.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan	200 orang/kali	325.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	1.608.060.000						100 Perse n	-	
5.2.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Jabatan Roda 4 yang diadakan				3 unit	1.000.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	3 unit	-	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
											Kota Pekalong an				
5.2.1. 2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Kendaraan Roda 2 yang diadakan				15 unit	608.060.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Pengelol aan Keuanga n dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalong an	15 unit	-	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah Kendaraan Kendaraan Roda 4 yang diadakan				1 unit							1 unit		
5.2.1. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	718.736.000						100 Perse n	720.913.000	
5.2.1. 2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Pengelol aan Keuanga n dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalong an	12 bulan	3.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.1. 2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	506.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Pengelol aan Keuanga n dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalong an	12 bulan	506.400.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.1. 2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	209.336.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Pengelol aan Keuanga n dan Aset	12 bulan	211.513.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
											Daerah (BPKAD) Kota Pekalong an				
5.2.1. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	274.809.000					100 Perse n	250.285.000		
5.2.1. 2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				47 unit	134.809.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Pengelol aan Keuanga n dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalong an	47 unit	135.285.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.1. 2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 unit	100.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Pengelol aan Keuanga n dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalong an	1 unit	75.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.1. 2.09.1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	40.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Badan Pengelol aan Keuanga n dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalong an	12 bulan	40.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	7,26 persen		11,91 persen	8,08 persen	6.213.280.000						8,08 persen	6.083.042.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.2.2. 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	100 persen		100 persen	100 persen	1.029.995.000						100 persen	924.853.600	
5.2.2. 2.01.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS APBD yang disusun				1 dok	35.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Raperda dan Raperwal APBD	1 dok	35.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.2. 2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen KUPA PPAS Perubahan APBD yang disusun				1 dokume n	35.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Raperda dan Raperwal APBD	1 dokum en	35.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.2. 2.01.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen pedoman penyusunan RKA yang disusun				2 dokume n	62.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Raperda dan Raperwal APBD	2 dokum en	62.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah kegiatan asistensi RKA PD/unit kerja yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
5.2.2. 2.01.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan yang disusun				4 dokume n	728.297.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Raperda dan Raperwal APBD	4 dokum en	628.699.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah dokumen perda dan perwal APBD Kota Pekalongan				2 dokume n							2 dokum en		
		Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
5.2.2. 2.01.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Bahan sidang perda dan perwal perubahan APBD Kota Pekalongan				4 dokume n	143.698.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Raperda dan Raperwal APBD	4 dokum en	138.154.600	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Dokumen perda dan perwal				2							2		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		perubahan APBD Kota Pekalongan				dokume n						dokum en			
		Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan				1 kali						1 kali			
5.2.2. 2.01.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal / perwal di Kota Pekalongan				12 bulan	26.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Raperda dan Raperwal APBD	12 bulan	26.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan				16 kali						16 kali			
5.2.2. 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D	100 persen		100 persen	100 persen	267.740.600						100 persen	262.900.000	
5.2.2. 2.02.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen SP2D yang diterbitkan dan dicairkan				67 OPD	89.149.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Penataus ahaan Keuanga n	67 OPD	87.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah dokumen SPD yang diterbitkan				3 dokume n						3 dokum en			
		Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah				12 kali						12 kali			
5.2.2. 2.02.5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan Dana Transfer per bidang yang disusun				30 laporan	23.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Penataus ahaan Keuanga n	30 lapora n	23.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.2. 2.02.6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank	Jumlah pelaksanaan pelatihan/monitoring pelaksanaan transaksi non tunai				2 kali	25.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Penataus ahaan Keuanga n	2 kali	25.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	dan Lembaga Keuangan Bukan Bank								Umum						
5.2.2. 2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan				3120 data SPT tahunan	73.591.600	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Penatausahaan Keuangan	3120 data SPT tahunan	70.900.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah pelaksanaan penerbitan daftar gaji PNS Kota Pekalongan				14 kali							14 kali		
5.2.2. 2.02.1 0	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah dokumen/pedoman penatausahaan keuangan daerah yang disusun				1 dokumen	25.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Penatausahaan Keuangan	1 dokumen	25.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.2. 2.02.1 1	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah				3 kali	32.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Penatausahaan Keuangan	3 kali	32.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.2. 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu	100 persen		100 persen	100 persen	415.544.400						100 persen	395.288.400	
5.2.2. 2.03.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah laporan rekap SKRD/SKPD pengelola pendapatan				7 laporan	59.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perda dan Perwal APBD	7 laporan	59.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah laporan rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD/SKPKD				68 laporan							68 laporan		
5.2.2. 2.03.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah laporan realisasi anggaran dan prognosis yang disusun				13 laporan	8.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perda dan Perwal APBD	13 laporan	8.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah laporan rekap SKRD/SKPD pengelola pendapatan				0 laporan						0 lapora n			
		Jumlah laporan rekap SKRD/SKPD pengelola pendapatan				0 PD/ unit kerja						0 PD/ unit kerja			
5.2.2. 2.03.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan Keuangan Konsolidasi) yang disusun				7 laporan	95.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perda dan Perwal APBD	7 lapora n	95.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD dan SKPD yang dilaksanakan				5 kali						5 kali			
5.2.2. 2.03.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perda dan Perwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun				2 dokume n	90.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perda dan Perwal APBD	2 dokum en	90.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah publikasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 kali						1 kali			
5.2.2. 2.03.7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah laporan MP TP- TGR yang disusun				12 laporan	10.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perda dan Perwal APBD	12 lapora n	10.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.2. 2.03.9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan teknis pengelolaan keuangan yang disusun				1 dokume n	20.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perda dan Perwal APBD	1 dokum en	20.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.2. 2.03.1 1	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaporan dana bergulir yang disusun				4 laporan	133.544.400	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Perda dan Perwal APBD	4 lapora n	113.288.400	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah pembinaan/ desk/ rekonsiliasi Laporan Keuangan BLUD yang dilaksanakan				4 kali						4 kali			
		Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan OPD yang dilaksanakan				12 kali						12 kali			
5.2.2. 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	100 persen		100 persen	100 persen	4.500.000.000						100 persen	4.500.000.000	
5.2.2. 2.04.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah bulan penyediaan dana BTT				12 bulan	4.500.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Penerima Hibah dan Bansos	12 bulan	4.500.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	100 persen		100 persen	100 persen	1.355.497.000						100 persen	1.194.067.000	
5.2.3. 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap dan Persediaan	100 persen		100 persen	100 persen	1.355.497.000						100 persen	1.194.067.000	
5.2.3. 2.01.1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah buku standar harga yang disusun				2 buku	55.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Barang Milik Daerah	2 buku	55.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.3. 2.01.3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah				2 buku	30.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Barang Milik Daerah	2 buku	30.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.3. 2.01.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah papan nama aset				25 buah	305.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Barang Milik Daerah	25 buah	155.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Umum	Pelayanan Publik	pelayanan publik.					
		Jumlah patok batas tanah				300 patok						300 patok			
		Jumlah pengajuan sertifikat				78 bidang						78 bidang			
5.2.3. 2.01.8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah jenis BMD yang akan dinilai untuk pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD				3 jenis	65.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Barang Milik Daerah	3 jenis	65.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.3. 2.01.1 0	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang ter rehabilitasi sedang/berat				1 unit	325.480.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Barang Milik Daerah	1 unit	325.480.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah gedung /aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala				2 unit							2 unit		
		Jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi sedang/berat				3 unit							3 unit		
		Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok				5 kali							5 kali		
5.2.3. 2.01.1 1	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan/data BMD dan Barang Persediaan				80 laporan	575.017.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Barang Milik Daerah	80 lapora n	563.587.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah OPD yang didampingi dalam penyusunan laporan barang daerah dan persediaan				0 OPD							0 OPD		
		Jumlah Unit Kerja yang didampingi dalam penyusunan laporan barang daerah dan persediaan				0 unit kerja							0 unit kerja		
5.2.4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	0.05 persen		0.05 persen	0.05 persen	1.586.400.000						0.05 persen	1.560.916.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.2.4. 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase peningkatan potensi pendapatan pajak	5.0 persen		4.5 persen	4.7 persen	1.586.400.000						4.7 persen	1.560.916.000	
		Persentase realisasi pendapatan pajak dan retribusi yang dikelola BKD	100 persen		100 persen	100 persen						100 persen			
5.2.4. 2.01.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah yang disusun				2 dokume n	184.992.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pendapat an Asli Daerah Kota Pekalong an	2 dokum en	154.344.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah kegiatan senam sehat PBB yang dilaksanakan				0 kali							0 kali		
		Jumlah kegiatan Walikota Pekalongan Regional Tax Award yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun				12 laporan							12 lapora n		
		Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan				6 kali							6 kali		
		Jumlah sosialisasi pajak atau retribusi daerah yang dilaksanakan				3 kali							3 kali		
5.2.4. 2.01.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah objek pajak dan retribusi yang didata				1500 objek	30.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pendapat an Asli Daerah Kota Pekalong an	1500 objek	30.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring				1140 objek							1140 objek		
5.2.4. 2.01.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah sistem informasi baru yang diadakan				0 aplikasi	55.941.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pendapat an Asli Daerah Kota Pekalong an	0 aplika si	57.202.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah sistem informasi yang dilakukan pemeliharaan				8 aplikasi							8 aplika si		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.2.4. 2.01.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Berkas Permohonan Pelayanan PBB yg diproses dan diselesaikan				2000 berkas	176.550.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pendapat an Asli Daerah Kota Pekalong an	2000 berkas	176.550.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah Buku DHKP PBB 2021 yang disusun				94 buku			94 buku						
		Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2021				4 buku			4 buku						
		Jumlah Objek Pajak PBB yang terupdate				8000 objek			8000 objek						
5.2.4. 2.01.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dan Ketetapan SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan				93000 lembar	300.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pendapat an Asli Daerah Kota Pekalong an	93000 lembar	300.000.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah SPT , SKPD/SKRD yang dibuat				19000 lembar			19000 lembar						
5.2.4. 2.01.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota				1 orang/ bulan	386.348.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pendapat an Asli Daerah Kota Pekalong an	1 orang/ bulan	389.525.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah wajib pajak dan wajib reklame yang terlayani				14400 WP/ WR			14400 WP/ WR						
5.2.4. 2.01.1 0	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah berkas BPHTB yang diverifikasi				1500 berkas	65.388.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pendapat an Asli Daerah Kota Pekalong an	1500 berkas	66.114.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.4. 2.01.1 1	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah surat tagihan yang diterbitkan				3060 surat	227.681.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pendapat an Asli Daerah Kota Pekalong an	3060 surat	227.681.000	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
5.2.4. 2.01.1	Pengendalian, Pemeriksaan dan	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi				50 kali	159.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara bertahap	Pendapat an Asli	50 kali	159.500.000	Badan Pendapatan,

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3	Pengawasan Pajak Daerah	pajak dan retribusi daerah						Barat, Podosugih	Umum- Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Daerah Kota Pekalong an		Keuangan dan Aset Daerah	
		Terperiksanya wajib pajak dan retribusi daerah				8 wajib pajak			8 wajib pajak						
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5.3	KEPEGAWAIAN					8.438.601.000						6.715.565.000			
5.3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	6.725.123.000					100 persen	5.127.115.000		
5.3.1. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian perencanaan,penganggaran , dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	12.850.000					100 persen	12.850.000		
5.3.1. 2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 Dokume n	2.750.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	BKPSDM	2 Doku men	2.750.000	Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia
5.3.1. 2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan Perubahan RKA Yang disusun				2 Dokume n	1.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	BKPSDM	2 Doku men	1.650.000	Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia
5.3.1. 2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 Bulan	8.450.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	BKPSDM	12 Bulan	8.450.000	Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun				4 Dokume n							4 Doku men		
		Jumlah Dokumen SAKIP Yang Disusun (Penetapan				2 Dokume							2 Doku		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		dan Perubahan)				n						men			
		Jumlah Dokumen SPIP (1 Dokumen Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 Laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 Dokume n						5 Doku men			
5.3.1. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	4.212.217.000						100 persen	4.236.888.000	
5.3.1. 2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	4.158.567.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	BKPSDM	12 Bulan	4.185.238.000	Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia
5.3.1. 2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				12 Bulan	52.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	BKPSDM	12 Bulan	50.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia
5.3.1. 2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD Yang Disusun				1 Dokume n	1.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	BKPSDM	1 Doku men	1.650.000	Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia
5.3.1. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	9.500.000						100 persen	9.500.000	
5.3.1. 2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Keikutsertaan Dalam Even Tingkat Kota				2 Kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	BKPSDM	2 Kali	9.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia
5.3.1. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	195.500.000						100 persen	402.500.000	
5.3.1.	Penyediaan Komponen	Jumlah Bulan Penyediaan				12 Bulan	3.000.000	Kota Pekalongan,	Dana	Memperkuat	9. Peningkatan	BKPSDM	12	2.000.000	Badan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.06.1	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Pekalongan Barat, Podosugih	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.		Bulan		Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.3.1. 2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				12 Bulan	22.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	BKPSDM	12 Bulan	22.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.3.1. 2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12 Bulan	1.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	BKPSDM	12 Bulan	1.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.3.1. 2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman				11 Bulan	52.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	BKPSDM	11 Bulan	55.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.3.1. 2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12 Bulan	15.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	BKPSDM	12 Bulan	20.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.3.1. 2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-Undangan				12 Bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	BKPSDM	12 Bulan	2.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.3.1. 2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				76 org/kl	100.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif,	BKPSDM	76 org/kl	300.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
									Alokasi Umum	Pelayanan Publik	perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.				n Sumber Daya Manusia
5.3.1. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	263.329.000						100 persen	369.500.000	
5.3.1. 2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12 Bulan	2.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	BKPSDM	12 Bulan	2.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembang n Sumber Daya Manusia
5.3.1. 2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	136.929.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	BKPSDM	12 Bulan	200.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembang n Sumber Daya Manusia
5.3.1. 2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	JumlaJ Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan Kantor				12 Bulan	124.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	BKPSDM	12 Bulan	167.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembang n Sumber Daya Manusia
5.3.1. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	2.031.727.000						100 persen	95.877.000	
5.3.1. 2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara Secara Rutin/Berkala				13 Unit	35.877.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	BKPSDM	13 Unit	35.877.000	Badan Kepegawaian dan Pengembang n Sumber Daya Manusia
5.3.1. 2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Gedung	1.983.850.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu	BKPSDM	1 Gedun g	48.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembang n Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara Secara Rutin/Berkala				2 Gedung					berdaya saing.	2 Gedun g			
5.3.1. 2.09.1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 Bulan	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	BKPSDM	12 Bulan	12.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia
5.3.2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	80,00 persen		80,00 persen	80,00 persen	1.713.478.000						80,00 persen	1.588.450.000	
5.3.2. 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ketersediaan data PNS	100 persen		100 persen	100 persen	779.403.000						100 persen	765.319.000	
5.3.2. 2.01.3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN				207 Orang	667.243.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	CPNS dan Data PNS dilingkun gan Pemerint ah Kota Pekalong an	207 Orang	655.969.000	Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia
5.3.2. 2.01.1 0	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Kebutuhan Data Yang Dapat Terintegrasi Melalui Aplikasi SAPK				3200 Data	112.160.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	CPNS dan Data PNS dilingkun gan Pemerint ah Kota Pekalong an	3200 Data	109.350.000	Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia
5.3.2. 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Ketersediaan Data Mutasi dan Promosi ASN	110 persen		110 persen	110 persen	104.924.000						110 persen	102.667.000	
5.3.2. 2.02.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah PNS Yang Mengikuti Ujian Dinas				50 Orang	22.468.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu	PNS dilingkun gan Pemerint ah Kota Pekalong	50 Orang	19.600.000	Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah PNS Yang Mengikuti Ujian Penyesuaian Ijasah				5 Orang					an	5 Orang			
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				700 Orang						700 Orang			
5.3.2. 2.02.3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Yang Dilantik				100 Orang	82.456.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	PNS dilingkun gan Pemerint ah Kota Pekalong an	100 Orang	83.067.000	Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia
		Jumlah Pejabat Tinggi Pratama Yang Lulus				3						3			
5.3.2. 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase PNS berkembang kompetensinya (Diklat teknis dan Latpim)	42 persen		42 persen	42 persen	592.100.000						42 persen	579.366.000	
5.3.2. 2.03.2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah PNS Yang Ikut Tes Kompetensi				300 orang	441.220.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	PNS dilingkun gan Pemerint ah Kota Pekalong an	300 orang	350.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia
5.3.2. 2.03.4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS Yang Menerima Bantuan Beasiswa Tugas Belajar dan Ikatan Dinas				2 Orang	86.680.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	PNS dilingkun gan Pemerint ah Kota Pekalong an	2 Orang	165.166.000	Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia
5.3.2. 2.03.6	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Kepala Sekolah Yang Ditingkatkan Kompetensi Manajerialnya				3 Orang	9.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	PNS dilingkun gan Pemerint ah Kota Pekalong an	3 Orang	9.200.000	Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia
5.3.2. 2.03.9	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Diklat Penjenjangan Fungsional				10 Kegiatan	36.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	PNS dilingkun gan Pemerint ah Kota Pekalong an	10 Kegiat an	36.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.3.2. 2.03.1 2	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				1 Kegiatan	19.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	PNS dilingkun gan Pemerint ah Kota Pekalong an	1 Kegiat an	19.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia
5.3.2. 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tingkat Disiplin ASN	100 persen		100 persen	100 persen	237.051.000						100 persen	141.098.000	
5.3.2. 2.04.4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS Yang Mendapat Penghargaan Satya Lancana Karya Satya				150 Orang	48.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	BKPSDM	150 Orang	33.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia
5.3.2. 2.04.7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah PNS Yang Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan				207 Orang	176.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	BKPSDM	207 Orang	102.098.000	Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia
5.3.2. 2.04.8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Pegawai Yang Mendapat Pembinaan Dalam Kasus-Kasus Kepegawaian				2 Orang	12.651.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	BKPSDM	2 Orang	6.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembang an Sumber Daya Manusia
5.4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						3.709.740.000							3.570.800.000	
5.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS berkembang kompetensinya	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	3.709.740.000						100,00 persen	3.570.800.000	
5.4.2. 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Penyelenggaraan, Pembinaan, pengoordinasian., fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan	100 persen		100 persen	100 persen	1.607.440.000						100 persen	856.500.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum													
5.4.2. 2.01.3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional				184 Orang	1.518.940.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	PNS dilingkun gan Pemerint ah Kota Pekalong an	184 Orang	768.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.4.2. 2.01.4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Pejabat eselon II dan III dan IV yang mengikuti pelatihan kepemimpinan PKN, PKA dan PKP				3 Orang	88.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	PNS dilingkun gan Pemerint ah Kota Pekalong an	3 Orang	88.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.4.2. 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Cakupan penyelenggaraan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	250 orang		207 orang	200 orang	2.102.300.000						200 orang	2.714.300.000	
5.4.2. 2.02.3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah PNS yang mengikuti Uji Kompetensi				30 Orang	50.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	PNS dilingkun gan Pemerint ah Kota Pekalong an	30 Orang	50.000.000	Badan Kegewawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.4.2. 2.02.7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan	Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Mengikuti Pendidikan Pelatihan Dasar				200 Orang	2.043.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	PNS dilingkun gan Pemerint ah Kota Pekalong an	200 Orang	2.655.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Prajabatan														
5.4.2. 2.02.8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Pasca Diklat Non Struktural				2 Laporan	9.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.	PNS dilingkun gan Pemerint ah Kota Pekalong an	2 Lapor an	9.300.000	Badan Kepegawaian dan Pengembanga n Sumber Daya Manusia
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
6.1	INSPEKTORAT DAERAH						5.643.805.000							5.686.509.000	
6.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	5.235.902.000						100 persen	5.270.664.000	
6.1.1. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	12.999.000						100 Perse n	12.719.000	
6.1.1. 2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 Dokume n	1.999.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	inspektor at	2 Doku men	2.000.000	Inspektorat
6.1.1. 2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumah Dokumen RKA dan Perubahan RKA yang disusun				2 Dokume n	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	inspektor at	2 Doku men	1.219.000	Inspektorat
6.1.1. 2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 Bulan	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	inspektor at	12 Bulan	9.500.000	Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
							Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.					
								4 dokume n							
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun						2 dokume n							
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)						5 Dokume n							
	Jumlah dokumen SPIP (1 Dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP) , 4 Laporan pemantauan (RTP)) yang disusun														
6.1.1. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	4.822.770.000						100 Perse n	4.852.101.000	
6.1.1. 2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	4.788.270.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	INSPEKT ORAT	12 Bulan	4.817.601.000	Inspektorat
6.1.1. 2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				12 Bulan	33.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	INSPEKT ORAT	12 Bulan	33.000.000	Inspektorat
6.1.1. 2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokume n	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	INSPEKT ORAT	1 dokum en	1.500.000	Inspektorat
6.1.1. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	8.821.000						100 Perse n	8.631.000	
6.1.1. 2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Keikutsertaan dalam Hari Jadi dan Pekan Batik				2 Kali	1.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	INSPEKT ORAT	2 Kali	1.000.000	Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
6.1.1. 2.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan PAK Tenaga Fungsional				2 Laporan	1.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	INSPEKT ORAT	2 Lapor an	1.000.000	Inspektorat
6.1.1. 2.05.1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan kantor sendiri yang disusun				5 Laporan	6.821.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	INSPEKT ORAT	5 Lapor an	6.631.000	Inspektorat
6.1.1. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	197.497.000						100 Perse n	203.340.000	
6.1.1. 2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 Bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	INSPEKT ORAT	12 Bulan	2.500.000	Inspektorat
6.1.1. 2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	39.297.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	INSPEKT ORAT	12 bulan	40.000.000	Inspektorat
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor yang diadakan				25 Unit									
6.1.1. 2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 Bulan	7.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	INSPEKT ORAT	12 Bulan	7.000.000	Inspektorat
6.1.1. 2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan penyediaan makanan dan minuman				12 Bulan	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	INSPEKT ORAT	12 Bulan	40.000.000	Inspektorat
6.1.1. 2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Bulan Penyediaan barang cetakan dan				12 bulan	6.000.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara bertahap	INSPEKT ORAT	12 bulan	8.000.000	Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Penggandaan	penggandaan						Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum- Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				
6.1.1. 2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang- undangan				12 bulan	2.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	INSPEKT ORAT	12 bulan	2.700.000	Inspektorat
6.1.1. 2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				150 Kali	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	INSPEKT ORAT	150 Kali	103.140.000	Inspektorat
6.1.1. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	59.425.000						100 Perse n	60.867.000	
6.1.1. 2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 Bulan	4.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	INSPEKT ORAT	12 Bulan	5.000.000	Inspektorat
6.1.1. 2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	33.925.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	INSPEKT ORAT	12 Bulan	34.000.000	Inspektorat
6.1.1. 2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 Bulan	21.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	INSPEKT ORAT	12 Bulan	21.867.000	Inspektorat
6.1.1. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	134.390.000						100 Perse n	133.006.000	
6.1.1. 2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang				16 unit	70.000.000	Kota Pekalongan, Semua	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara bertahap	INSPEKT ORAT	16 unit	70.000.000	Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpelihara secara rutin/berkala						Kecamatan, Semua Kelurahan	Umum- Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.				
6.1.1. 2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				1 unit	34.390.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	INSPEKT ORAT	1 unit	33.006.000	Inspektorat
6.1.1. 2.09.1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	INSPEKT ORAT	12 bulan	30.000.000	Inspektorat
6.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	85,00 persen		85,00 persen	85,00 persen	112.816.000						85,00 persen	114.932.000	
6.1.2. 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Terbit Tepat Waktu	100 persen		100 persen	100 persen	98.888.000						100 persen	100.395.000	
6.1.2. 2.01.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja yang terbit tepat waktu				64 Laporan	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD	64 Lapor an	10.000.000	Inspektorat
6.1.2. 2.01.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan yang terbit tepat waktu				35 laporan	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD	35 lapora n	10.000.000	Inspektorat
6.1.2. 2.01.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja yang Terbit Tepat Waktu				99 laporan	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD	99 lapora n	10.000.000	Inspektorat
6.1.2. 2.01.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan yang terbit tepat waktu				40 Laporan	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	OPD	40 Lapor an	10.000.000	Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
									Alokasi Umum	Pelayanan Publik	pelayanan publik.				
6.1.2.2.01.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan Internal				2 laporan	8.888.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD	2 laporan	9.500.000	Inspektorat
6.1.2.2.01.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				7 laporan	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD	7 laporan	50.895.000	Inspektorat
6.1.2.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase ketercapaian Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu yang Terbit Tepat Waktu	100 persen		100 persen	100 persen	13.928.000						100 persen	14.537.000	
6.1.2.2.02.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Presentase Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang diselesaikan tepat waktu				100 persen	6.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	0	100 persen	7.000.000	Inspektorat
6.1.2.2.02.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Presentase Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang terbit tepat waktu				100 persen	7.928.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	0	100 persen	7.537.000	Inspektorat
6.1.3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP	3,00 nilai		3,00 nilai	3,00 nilai	295.087.000						3,00 nilai	300.913.000	
6.1.3.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	100 persen		100 persen	100 persen	31.850.000						100 persen	32.435.000	
6.1.3.2.01.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen kebijakan/regulasi tentang Pengawasan (PKPT/Jakwas) yang disusun				3 Dokumen	28.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD DAN INSPEKTORAT	3 Dokumen	29.435.000	Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Umum							
		Jumlah Dokumen Peraturan/Pedoman/SOP tentang peningkatan Kapabilitas APIP yang disusun				1 laporan						1 laporan			
		Jumlah Laporan Dokumen RAD PPK yang disusun				1 laporan						1 laporan			
		Jumlah Laporan pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun				2 laporan						2 laporan			
6.1.3. 2.01.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan				7 laporan	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD DAN INSPEKTORAT	7 laporan	3.000.000	Inspektorat
6.1.3. 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan	98 persen		93 persen	95 persen	263.237.000					95 persen	268.478.000		
6.1.3. 2.02.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				17 Laporan	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD DAN INSPEKTORAT	17 Laporan	15.000.000	Inspektorat
6.1.3. 2.02.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Dokumen LHKASN				2500 Dokumen	128.237.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD DAN INSPEKTORAT	2500 Dokumen	128.478.000	Inspektorat
		Jumlah Dokumen LHKPN ASN				500 Dokumen							500 Dokumen		
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				8 Laporan							8 Laporan		
6.1.3.	Pendampingan, Asistensi	Jumlah Laporan				5	125.000.000	Kota Pekalongan,	Dana	Memperkuat	12. Penerapan MRI	OPD	5	125.000.000	Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.02.4	dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi penegakan integritas yang disusun				Laporan		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	DAN INSPEKTORAT	Laporan		
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.1	KECAMATAN						9.429.020.000							9.429.110.000	
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	8.992.818.000						100 persen	9.002.290.000	
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		100 persen	100 persen									
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		100 persen	100 persen									
7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	124.000.000						100 persen	124.000.000	
7.1.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 dokumen	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Aparatur ASN	2 dokumen	5.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan Perubahan RKA yang disusun				2 Dokumen	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Aparatur ASN	2 Dokumen	3.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kecamatan				12 Bulan	116.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Aparatur ASN	12 Bulan	116.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan				12 Bulan		12 Bulan							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Bandengan													
		Jumlah Bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Degayu				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kandang Panjang				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Krapyak				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kraton				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Panjang Baru				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Panjang Wetan				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah dokumen Evaluasi Renja yang disusun				4 dokume n							4 dokum en		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (Penetapan dan Perubahan)				2 Dokume n							2 Doku men		
		Jumlah Dokumen SPIP (1dokumen RTP, 4 Laporan Pemantauan RTP) yang disusun				5 Dokume n							5 Doku men		
7.1.1. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	7.433.074.000						100 persen	7.472.273.000	
7.1.1. 2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	7.232.074.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Aparatur ASN	12 Bulan	7.271.273.000	Kecamatan Pekalongan Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.1. 2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Kecamatan				12 Bulan	198.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Aparatur ASN	12 Bulan	198.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Kelurahan Bandengan				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Kelurahan Degayu				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Kelurahan Kandang Panjang				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Kelurahan Krapyak				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Kelurahan Padukuhan Kraton				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Kelurahan Panjang Baru				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Kelurahan Panjang Wetan				12 Bulan							12 Bulan		
7.1.1. 2.02.5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
7.1.1. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	16.500.000						100 persen	16.500.000	
7.1.1. 2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Kelikutsertaan dalam Event tingkat Kota				2 kali	16.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	2 kali	16.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
									Umum						
7.1.1. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	440.890.000						100 persen	440.890.000	
7.1.1. 2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan				12 Bulan	8.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Aparatur ASN	12 Bulan	8.600.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Bandengan			12 Bulan								12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Degayu			12 Bulan								12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Kandang Panjang			12 Bulan								12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Krapyak			12 Bulan								12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Padukuhan Kraton			12 Bulan								12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Panjang Baru			12 Bulan								12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi			12 Bulan								12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelurahan Panjang Wetan													
7.1.1. 2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Bendan Pos Kecamatan				12 Bulan	152.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Aparatur ASN	12 Bulan	152.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Bendan Pos Kelurahan Bandengan				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Bendan Pos Kelurahan Degayu				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Bendan Pos Kelurahan Kandang Panjang				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Bendan Pos Kelurahan Krapyak				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Bendan Pos Kelurahan Padukuhan Kraton				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Bendan Pos Kelurahan Panjang Baru				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Bendan Pos Kelurahan Panjang Wetan				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan Kecamatan				5 Unit							5 Unit		
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung				1 Unit							1 Unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Kantor yang Diadakan Kelurahan Bandengan													
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan Kelurahan Degayu			1 Unit							1 Unit			
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan Kelurahan Kandang Panjang			2 Unit							2 Unit			
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan Kelurahan Krapyak			2 Unit							2 Unit			
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan Kelurahan Padukuhan Kraton			2 Unit							2 Unit			
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan Kelurahan Panjang Baru			2 Unit							2 Unit			
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan Kelurahan Panjang Wetan			1 Unit							1 Unit			
7.1.1. 2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kecamatan			12 Bulan	12.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Aparatur ASN	12 Bulan	12.750.000	Kecamatan Pekalongan Utara	
		Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Bandengan			12 Bulan							12 Bulan			
		Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Degayu			12 Bulan							12 Bulan			
		Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Kandang			12 Bulan							12 Bulan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Panjang													
		Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Krapyak				12 Bulan						12 Bulan			
		Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Padukuhan Kraton				12 Bulan						12 Bulan			
		Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Panjang Baru				12 Bulan						12 Bulan			
		Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelurahan Panjang Wetan				12 Bulan						12 Bulan			
7.1.1. 2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan				11 Bulan	195.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Aparatur ASN	11 Bulan	195.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Bandengan				11 Bulan						11 Bulan			
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Degayu				11 Bulan						11 Bulan			
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Kandang Panjang				11 Bulan						11 Bulan			
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Krapyak				11 Bulan						11 Bulan			
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Padukuhan Kraton				11 Bulan						11 Bulan			
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Kelurahan Panjang Baru				11 Bulan						11 Bulan			
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman				11 Bulan						11 Bulan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Kelurahan Panjang Wetan													
7.1.1. 2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan				12 Bulan	40.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Aparatur ASN	12 Bulan	40.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Bandengan				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Degayu				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Kandang Panjang				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Krapyak				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Padukuhan Kraton				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Panjang Baru				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelurahan Panjang Wetan				12 Bulan							12 Bulan		
7.1.1. 2.06.6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang- undangan Kecamatan					12 Bulan	20.000.000				Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
	Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan					12 Bulan				12 Bulan					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Bandengan													
		Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Degayu				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Kandang Panjang				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Krapyak				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Padukuhan Kraton				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Padukuhan Kraton				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Panjang Baru				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kelurahan Panjang Wetan				12 Bulan							12 Bulan		
7.1.1. 2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah				12 Kali	12.540.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Aparatur ASN	12 Kali	12.540.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.1. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	733.821.000						100 persen	709.352.000	
7.1.1.	Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Bulan Penyediaan				12 Bulan	10.500.000	Kota Pekalongan,	Dana	Memperkuat	12. Penerapan MRI	Gedung	12	10.500.000	Kecamatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.08.1	Menyurat	Jasa Surat Menyurat Kecamatan					Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kantor	Bulan		Pekalongan Utara	
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Bandengan			12 Bulan			12 Bulan							
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Degayu			12 Bulan			12 Bulan							
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Kandang Panjang			12 Bulan			12 Bulan							
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Krapyak			12 Bulan			12 Bulan							
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Padukuhan Kraton			12 Bulan			12 Bulan							
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Panjang Baru			12 Bulan			12 Bulan							
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Panjang Wetan			12 Bulan			12 Bulan							
7.1.1. 2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan				12 Bulan	125.884.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Gedung Kantor	12 Bulan	125.884.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Bandengan			12 Bulan			12 Bulan							
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Degayu			12 Bulan			12 Bulan							
		Jumlah Bulan Penyediaan			12 Bulan			12							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Kandang Panjang										Bulan			
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Krapyak				12 Bulan						12 Bulan			
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Padukuhan Kraton				12 Bulan						12 Bulan			
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Panjang Baru				12 Bulan						12 Bulan			
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelurahan Panjang Wetan				12 Bulan						12 Bulan			
7.1.1. 2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan Kantor				12 Bulan	597.437.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Gedung Kantor	12 Bulan	572.968.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.1. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	244.533.000					100 persen	239.275.000		
7.1.1. 2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kecamatan				8 Unit	121.033.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Gedung Kantor, Kendara an Dinas, Peralatan Kantor	8 Unit	115.775.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Bandengan				4 Unit							4 Unit		
		Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang				3 Unit							3 Unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Degayu													
		Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Kandang Panjang				3 Unit						3 Unit			
		Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Krapyak				3 Unit						3 Unit			
		Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Padukuhan Kraton				3 Unit						3 Unit			
		Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Panjang Baru				3 Unit						3 Unit			
		Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Panjang Wetan				3 Unit						3 Unit			
7.1.1. 2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kecamatan				2 unit	78.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Gedung Kantor, Kendara an Dinas, Peralatan Kantor	2 unit	78.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Bandengan				1 unit							1 unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Degayu				1 unit							1 unit		
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara				1 unit							1 unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		rutin/berkala Kelurahan Kandang Panjang													
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Krapyak			2 unit							2 unit			
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Padukuhan Kraton			3 unit							3 unit			
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Panjang Baru			1 Unit							1 Unit			
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Panjang Wetan			2 unit							2 unit			
7.1.1. 2.09.1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kecamatan			12 Bulan	45.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Gedung Kantor, Kendara an Dinas, Peralatan Kantor	12 Bulan	45.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara	
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Bandengan			12 Bulan							12 Bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Degayu			12 Bulan							12 Bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kandang Panjang			12 Bulan							12 Bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Krapyak			12 Bulan							12 Bulan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Padukuhan Kraton				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Panjang Baru				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Panjang Wetan				12 Bulan							12 Bulan		
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	52.462.000						100,00 persen	51.333.000	
7.1.2. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 persen		100 persen	100 persen	52.462.000						100 persen	51.333.000	
7.1.2. 2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi Tertib Administrasi				7 Kelurahan	52.462.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kelurahan	7 Kelurahan	51.333.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	112.908.000						100 persen	110.481.000	
		Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
7.1.3. 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	100 persen		0 persen	100 persen	112.908.000						100 persen	110.481.000	
7.1.3. 2.03.1	Penyelenggaraan Lembaga	Jumlah dokumen musrenbang kecamatan				1 dokume	112.908.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara bertahap	Masyarakat	1 dokum	110.481.000	Kecamatan Pekalongan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kemasyarakatan	yang disusun				n		Utara, Semua Kelurahan	Umum- Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.		en		Utara
		Jumlah fasilitasi kegiatan bunda PAUD tingkat kecamatan yang dilaksanakan				6 kali							6 kali		
		Jumlah Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				40 Kegiatan							40 Kegiat an		
		Jumlah Fasilitasi TP PKK				1 unit							1 unit		
		Jumlah Kegiatan Catur Pilar Yang Dilaksanakan				3 kegiatan							3 kegiat an		
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	264.444.000						100,00 persen	258.755.000	
7.1.4. 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen		100 persen	100 persen	264.444.000						100 persen	258.755.000	
7.1.4. 2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan piket PBA yang dilaksanakan				20 kali	264.444.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	20 kali	258.755.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah kegiatan PPKM Mikro				3 kegiatan							3 kegiat an		
		Jumlah Patroli Trantib yang dilaksanakan				48 kali							48 kali		
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	6.388.000						100,00 persen	6.251.000	
7.1.5. 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penuqasan Kepala	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penuqasan	100 persen		100 persen	100 persen	6.388.000						100 persen	6.251.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
	Daerah	Kepala Daerah														
7.1.5. 2.01.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat Forkompinca				1 kali	6.388.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	1 kali	6.251.000	Kecamatan Pekalongan Utara	
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7.1	KECAMATAN						406.540.000								406.290.000	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	406.540.000						100 persen	406.290.000		
		Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen			
7.1.3. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	406.540.000						100 persen	406.290.000		
7.1.3. 2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang di susun				1 Dokume n	12.500.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	1 Doku men	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara	
7.1.3. 2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lokasi sarana dan prasarana transportasi yang diperbaiki				1 Lokasi	70.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	1 Lokasi	70.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara	
7.1.3. 2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	324.040.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	12 Bulan	323.790.000	Kecamatan Pekalongan Utara	
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan							12 Bulan			
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan							12 Bulan			
		Jumlah Dokumen Re				1 Dokume							1 Doku			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
						n						men			
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 Kali						1 Kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				1 Kali						1 Kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				2 Kali						2 Kali			
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				1 Kali						1 Kali			
		Jumlah Fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan yang dilaksanakan				12 Kali						12 Kali			
		Jumlah Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 Kali						8 Kali			
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				1 Kali						1 Kali			
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				4 Kali						4 Kali			
		Jumlah Kegiatan Pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah				1 Kali						1 Kali			
		Jumlah kegiatan pengembangan UMKM yang dilaksanakan				1 Kali						1 Kali			
		Jumlah kegiatan PLPBK yang dilaksanakan				1 Kali						1 Kali			
		Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan				777 Buah						777 Buah			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				79 RT/RW						79 RT/R W			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				34 Paket						34 Paket			
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 Lokasi						1 Lokasi			
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.1	KECAMATAN						428.267.000							428.017.000	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	428.267.000						100 persen	428.017.000	
		Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
7.1.3.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	428.267.000						100 persen	428.017.000	
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 Dokumen	12.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	1 Doku men	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lokasi sarana dan prasarana transportasi yang diadakan/dibangun/dikembangkan/dipelihara				1 Lokasi	70.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	1 Lokasi	70.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumalh Bulan Fasilitas BOP LPM				12 Bulan	345.767.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	12 Bulan	345.517.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumalh Bulan Fasilitas Sekretariat BKM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan fasilitas BOP BKM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Dokumen Rencana Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan yang disusun				1 Dokumen							1 Dokumen		
		Jumlah Fasilitas Kegiatan				1 Kali							1 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		BBGRM yang dilaksanakan													
		Jumlah fasilitasi Kegiatan FKSS yang dilaksanakan			6 Kali							6 Kali			
		Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan yang dilaksanakan			20 Kali							20 Kali			
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan			12 Kali							12 Kali			
		Jumlah Fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan yang dilaksanakan			1 Kali							1 Kali			
		Jumlah Fasilitasi Program Kualitas Kawasan Permukiman (KOTAKU) yang Dilaksanakan			1 Kali							1 Kali			
		Jumlah Kegiatan Penanganan Stunting yang dilaksanakan			1 Kali							1 Kali			
		Jumlah Kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan			6 Kali							6 Kali			
		Jumlah Kegiatan Pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah			1 Kali							1 Kali			
		Jumlah kegiatan pengembangan UMKM yang dilaksanakan			1 Kali							1 Kali			
		Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan			870 Buah							870 Buah			
		Jumlah Rakok TKPK Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan			4 Kali							4 Kali			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi			92 RT/RW							92 RT/R W			
		Jumlah Strip Gula Darah yang diadakan			34 Paket							34 Paket			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
		Nasional								Daerah					
		Jumlah Taman Baca yang difasilitasi				1 Lokasi						1 Lokasi			
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.1	KECAMATAN						339.707.000						339.457.000		
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	339.707.000					100 persen	339.457.000		
		Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	100 persen		100 persen	100 persen						100 persen			
7.1.3. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	339.707.000					100 persen	339.457.000		
7.1.3. 2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 Dokume n	12.500.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	1 Doku men	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.3. 2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan permukiman/ transportasi/ kesehatan/ pendidikan yang diadakan/dibangun/dikemba ngkan/dipelihara				1 Lokasi	69.107.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	1 Lokasi	68.857.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.3. 2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	258.100.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	12 Bulan	258.100.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bu							12 bu		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Dokumen Rencana Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan yang disusun				1 Dokume n							1 Doku men		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan				6 Kali							6 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		FKSS yang dilaksanakan													
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 Kali							3 Kali		
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali							12 Kali		
		Jumlah Fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah kegiatan Pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah kegiatan pengembangan UMKM yang dilaksanakan				1 Kegiatan							1 Kegiat an		
		Jumlah kegiatan pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan				696 Buah							696 Buah		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				48 RT/RW							48 RT/R		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah strip gula yang diadakan			34 Kali						W	34 Kali			
		Jumlah taman baca yang difasilitasi			1 Lokasi						1 Lokasi				
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.1	KECAMATAN						318.207.000						317.957.000		
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	318.207.000						100 persen	317.957.000	
		Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
7.1.3. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	318.207.000						100 persen	317.957.000	
7.1.3. 2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 Dokume n	12.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	1 Doku men	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.3. 2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang diadakan/dibangun/dikemba ngkan/dipelihara				1 Lokasi	70.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	1 Lokasi	70.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.3. 2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	235.707.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	12 Bulan	235.457.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Dokumen Rencana Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan yang disusun				1 Dokume n							1 Doku men		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				6 Kali							6 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				8 Kali							8 Kali		
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali							12 Kali		
		Jumlah Fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan yang dilaksanakan				12 Kali							12 Kali		
		Jumlah Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanaka				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah Kegiatan Pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah kegiatan pengembangan UMKM yang dilaksanakan				2 Kali							2 Kali		
		Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan				460 Buah							460 Buah		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 Kali							4 Kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				33 RT/RW							33 RT/RW		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				34 Paket							34 Paket		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 Lokasi							1 Lokasi		
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.1	KECAMATAN						545.733.000							545.483.000	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	545.733.000						100 persen	545.483.000	
		Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
7.1.3. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	545.733.000						100 persen	545.483.000	
7.1.3. 2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 Dokume n	12.500.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	1 Doku men	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.3. 2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan permukiman/ transportasi/ kesehatan/ pendidikan yang diadakan/dibangun/dikemba ngkan/dipelihara				1 Lokasi	70.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	1 Lokasi	70.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.3. 2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	463.233.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	12 Bulan	462.983.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Dokumen Rencana Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan yang disusun				1 Dokume n							1 Doku men		
		Jumlah fasilitasi kegiatan				1 Kali							1 Kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		BBGRM yang dilaksanakan													
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan (syawalan) yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				2 Kegiatan							2 Kegiat an		
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 Kali							12 Kali		
		Jumlah Fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan yang dilaksanakan				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah Kegiatan Pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah kegiatan pengembangan UMKM yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah kegiatan pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan				1373 Buah							1373 Buah		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				1 Kali							1 Kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				125 RT/RW							125 RT/R W		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				34 Paket							34 Paket		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 Lokasi							1 Lokasi		
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.1	KECAMATAN						447.627.000							447.377.000	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	447.627.000						100 persen	447.377.000	
		Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
7.1.3. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	447.627.000						100 persen	447.377.000	
7.1.3. 2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 Dokume n	12.500.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	1 Doku men	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.3. 2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lokasi sarana dan prasarana transportasi yang diadakan/dibangun/dikemba ngkan/dipelihara				1 Lokasi	69.107.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	1 Lokasi	68.857.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.3. 2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	366.020.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	12 Bulan	366.020.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi				12 Bulan							12		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Sekretariat BKM										Bulan			
		Jumlah Dokumen R			1 Dokume n							1 Doku men			
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan			1 Kali							1 Kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan			6 Kali							6 Kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan			3 Kali							3 Kali			
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan			12 Kali							12 Kali			
		Jumlah Fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan yang dilaksanakan			12 Kali							12 Kali			
		Jumlah Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan			1 Kali							1 Kali			
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan			1 Kali							1 Kali			
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan			1 Kali							1 Kali			
		Jumlah Kegiatan Pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah			1 Kali							1 Kali			
		Jumlah kegiatan pengembangan UMKM yang dilaksanakan			1 Kali							1 Kali			
		Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan			820 Buah							820 Buah			
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang			4 Kali							4 Kali			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		dilaksanakan													
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi			93 RT/RW							93 RT/R W			
		Jumlah strip gula darah yang diadakan			2 Paket							2 Paket			
		Jumlah taman baca yang difasilitasi			1 Lokasi							1 Lokasi			
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.1	KECAMATAN					386.732.000						386.482.000			
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	386.732.000					100 persen	386.482.000		
		Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	100 persen		100 persen	100 persen						100 persen			
7.1.3. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	386.732.000					100 persen	386.482.000		
7.1.3. 2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 Dokume n	12.500.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	1 Doku men	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.3. 2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lokasi sarana dan prasarana transportasi yang diadakan/dibangun/dikemba ngkan/dipelihara				1 Lokasi	70.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	1 Lokasi	70.000.000	Kecamatan Pekalongan Utara
7.1.3. 2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 Bulan	304.232.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Masyara kat	12 Bulan	303.982.000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 Bulan							12 Bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 Bulan							12 Bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah bulan pelaksanaan Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU)				1 Kali						1 Kali			
		Jumlah Dokumen Rencana Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan yang disusun				1 Dokume n						1 Doku men			
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 Kali						1 Kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				6 Kali						6 Kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				3 Kali						3 Kali			
		Jumlah fasilitasi Peningkatan Keterampilan dan Kinerja PKK yang Dilaksanakan				12 Kali						12 Kali			
		Jumlah Fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan yang dilaksanakan				1 Kali						1 Kali			
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				1 Kali						1 Kali			
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				1 Kali						1 Kali			
		Jumlah Kegiatan Pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah				1 Kali						1 Kali			
		Jumlah kegiatan pengembangan UMKM yang dilaksanakan				1 Kali						1 Kali			
		Jumlah PMT dan vitamin yang diadakan				769 Buah						769 Buah			
		Jumlah Rakor TKPK Tingkat Kelurahan yang				4 Kali						4 Kali			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Dilaksanakan													
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				71 RT/RW							71 RT/RW		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				34 Paket							34 Paket		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 Lokasi							1 Lokasi		
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.1	KECAMATAN						8.423.406.000							8.433.940.000	
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	8.063.870.000						100 persen	8.078.258.000	
7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	104.926.000						100 Perse n	102.667.000	
7.1.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 dokume n	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Pekalong an Selatan	2 dokum en	5.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.1.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokume n	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Pekalong an Selatan	2 dokum en	3.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.1.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah kecamatan				12 bulan	96.926.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Pekalong an Selatan	12 bulan	94.667.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Banyurip				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan monitoring dan evaluasi Perangkat				12 bulan							12		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Daerah Kelurahan Buaran Kradenan										bulan			
		Jumlah bulan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Jenggot				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Sokoduwet				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun				4 dokume n						4 dokum en			
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)				2 dokume n						2 dokum en			
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun				5 dokume n						5 dokum en			
7.1.1. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	6.687.792.000					100 Perse n	6.725.473.000		
7.1.1. 2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	6.510.192.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Pekalong an Selatan	12 bulan	6.547.873.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.1.1. 2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan kecamatan				12 bulan	174.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Pekalong an Selatan	12 bulan	174.600.000	Kecamatan Pekalongan Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Banyurip				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Jenggot				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Sokoduwet				12 bulan						12 bulan			
7.1.1. 2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokume n	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Pekalong an Selatan	1 dokum en	3.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.1.1. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	18.896.000						100 Perse n	18.489.000	
7.1.1. 2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Pameran, Harteknas dan Karnaval batik				2 kali	18.896.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Pekalong an Selatan	2 kali	18.489.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.1.1. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	353.429.000						100 Perse n	345.830.000	
7.1.1. 2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor kecamatan				12 bulan	7.800.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Pekalong an Selatan	12 bulan	7.800.000	Kecamatan Pekalongan Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Umum							
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Banyurip				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Jenggot				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kelurahan Sokoduwet				12 bulan						12 bulan			
7.1.1. 2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos kecamatan				12 bulan	136.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Pekalong an Selatan	12 bulan	136.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Banyurip				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Jenggot				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kelurahan Sokoduwet				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor kecamatan yang diadakan				4 unit							4 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Banyurip yang diadakan				2 unit							2 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Buaran Kradenan yang diadakan				2 unit							2 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Jenggot yang diadakan				1 unit							1 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo yang diadakan				2 unit							2 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo yang diadakan				2 unit							2 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Sokoduwet yang diadakan				2 unit							2 unit		
7.1.1.	Penyediaan Peralatan	Jumlah bulan penyediaan				12 bulan	9.500.000	Kota Pekalongan,	Dana	Memperkuat	12. Penerapan MRI	Kecamat	12	9.500.000	Kecamatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.06.3	Rumah Tangga	peralatan rumah tangga kecamatan						Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	an Pekalongan Selatan	bulan		Pekalongan Selatan
		12 bulan							12 bulan						
		12 bulan							12 bulan						
		12 bulan							12 bulan						
		12 bulan							12 bulan						
		12 bulan							12 bulan						
		12 bulan							12 bulan						
7.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman kecamatan				12 bulan	135.129.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Selatan	12 bulan	127.530.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		12 bulan							12 bulan						
		12 bulan							12 bulan						
		12 bulan							12 bulan						
		12 bulan							12 bulan						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Kelurahan Kuripan Kertoharjo													
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kuripan Yosorejo			12 bulan							12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Sokoduwet			12 bulan							12 bulan			
7.1.1. 2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan kecamatan				12 bulan	35.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Pekalong an Selatan	12 bulan	35.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Banyurip			12 bulan				12 bulan						
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Buaran Kradenan			12 bulan				12 bulan						
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Jenggot			12 bulan				12 bulan						
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kuripan Kertoharjo			12 bulan				12 bulan						
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kuripan Yosorejo			12 bulan				12 bulan						
		Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Sokoduwet			12 bulan				12 bulan						
7.1.1. 2.06.6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang- undangan kecamatan				12 bulan	17.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan				Dana Transfer Umum- Dana Alokasi		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
									Umum	Pelayanan Publik	pelayanan publik.	Selatan			
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Banyurip				12 bulan					12 bulan				
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Buaran kradenan				12 bulan					12 bulan				
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Jenggot				12 bulan					12 bulan				
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan					12 bulan				
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan					12 bulan				
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kelurahan Sokoduwet				12 bulan					12 bulan				
7.1.1. 2.06.9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah					5 orang/ka li		12.500.000		
7.1.1. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	1.000.000						100 Perse n	-	
7.1.1. 2.07.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dibangun				1 unit	1.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Kecamat an Pekalong	1 unit	-	Kecamatan Pekalongan Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.	an Selatan			
7.1.1. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	706.956.000						100 Perse n	698.055.000	
7.1.1. 2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat kecamatan				12 bulan	9.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Pekalong an Selatan	12 bulan	9.300.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Banyurip				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Jenggot				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Sokoduwet				12 bulan							12 bulan		
7.1.1. 2.08.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kecamatan									
	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Banyurip		12 bulan			12 bulan									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Nasional		Daerah			
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Jenggot				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Kuripan Kertoharjo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Sokoduwet				12 bulan							12 bulan		
7.1.1. 2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor kecamatan				12 bulan	611.656.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Pekalong an Selatan	12 bulan	602.755.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Kelurahan Banyurip				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Kelurahan Buaran Kradenan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Kelurahan Jenggot				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Kelurahan Kuripan Kertoharjo													
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Kelurahan Sokoduwet				12 bulan						12 bulan			
7.1.1. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	190.871.000					100 Perse n	187.744.000		
7.1.1. 2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala kecamatan				11 unit	88.871.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Pekalong an Selatan	11 unit	85.744.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Banyurip				5 unit							5 unit		
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Buaran Kradenan				4 unit							4 unit		
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Jenggot				5 unit							5 unit		
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Kuripan Kertoharjo				3 unit							3 unit		
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan				4 unit							4 unit		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Kuripan Yosorejo													
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Sokoduwet				5 unit						5 unit			
7.1.1. 2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala kecamatan				2 unit	62.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Pekalong an Selatan	2 unit	62.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Banyurip				2 unit						2 unit			
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Buaran Kradenan				2 unit						2 unit			
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Jenggot				1 unit						1 unit			
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Kuripan Yosorejo				3 unit						3 unit			
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Sokoduwet				2 unit						2 unit			
		umlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kelurahan Kuripan Kertoharjo				2 unit						2 unit			
7.1.1. 2.09.1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor kecamatan				12 bulan	40.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Pekalong an Selatan	12 bulan	40.000.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan pemeliharaan				12 bulan						12			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Banyurip											bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Buaran Kradenan			12 bulan								12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Jenggot			12 bulan								12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo			12 bulan								12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo			12 bulan								12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Sokoduwet			12 bulan								12 bulan		
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	10.028.000						100,00 persen	9.812.000	
7.1.2. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Selatan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	10.028.000						100 Perse n	9.812.000	
7.1.2. 2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi tertib administrasi				6 keluraha n	10.028.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Keluraha n wilayah Kecamatan Pekalong an Selatan	6 kelura han	9.812.000	Kecamatan Pekalongan Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Selatan	100 persen		100 persen	100 persen	113.373.000						100 persen	110.934.000	
7.1.3. 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	100 Persen		0 Persen	100 Persen	113.373.000						100 Perse n	110.934.000	
7.1.3. 2.03.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen Musrenbang kecamatan yang disusun				1 dokume n	113.373.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Lembaga kemasya rakatan	1 dokum en	110.934.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah fasilitasi kegiatan bunda PAUD tingkat kecamatan yang dilaksanakan				6 kali							6 kali		
		Jumlah fasilitasi TP PKK				1 unit							1 unit		
		Jumlah kegiatan catur pilar yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan yang dilaksanakan				4 kegiatan							4 kegiat an		
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	224.621.000						100,00 persen	223.670.000	
7.1.4. 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Selatan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	224.621.000						100 Perse n	223.670.000	
7.1.4. 2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah patroli trantib yang dilaksanakan				48 kali	224.621.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Wilayah Kecamat an Pekalong an Selatan	48 kali	223.670.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	11.514.000						100,00 persen	11.266.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	PEMERINTAHAN UMUM	Wilayah Selatan													
7.1.5. 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Selatan	100 Persen		0 Persen	100 Persen	11.514.000						100 Perse n	11.266.000	
7.1.5. 2.01.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat Forkopimca				1 kali	11.514.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Forkopim ca	1 kali	11.266.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.1	KECAMATAN						387.552.000							387.302.000	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	387.552.000						100 persen	387.302.000	
7.1.3. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	387.552.000						100 persen	387.302.000	
7.1.3. 2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokume n	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sarpras lingkung an/warga Keluraha n Jenggot	1 dokum en	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.1.3. 2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lokasi sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang dibangun/dipelihara				2 lokasi	89.107.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sarpras lingkung an/warga Keluraha n Jenggot	2 lokasi	88.857.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah lokasi sarana dan prasarana transportasi yang dibangun/dipelihara				2 lokasi							2 lokasi		
7.1.3. 2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	285.945.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sarpras lingkung an/warga Keluraha n Jenggot	12 bulan	285.945.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah Dokumen Rencana Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan yang disusun				1 dokume n							1 dokum en		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				6 kali							6 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah Fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan yang dilaksanakan				12 kali							12 kali		
		Jumlah Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah Kegiatan Pendataan Anak Usia Sekolah yang tidak sekolah yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan				1146 buah							1146 buah		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Nasional		Daerah			
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 kali						4 kali			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				65 RT/RW						65 RT/RW			
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				34 paket						34 paket			
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi						1 lokasi			
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.1	KECAMATAN						386.011.000						385.761.000		
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	386.011.000					100 persen	385.761.000		
7.1.3.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	386.011.000					100 persen	385.761.000		
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sarpras lingkungan/warga Kelurahan Buaran Kradenan	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lokasi sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang dibangun/dipelihara				2 lokasi	89.107.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sarpras lingkungan/warga Kelurahan Buaran Kradenan	2 lokasi	88.857.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah lokasi sarana dan prasarana transportasi yang dibangun/dipelihara				2 lokasi							2 lokasi		
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	284.404.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sarpras lingkungan/warga Kelurahan Buaran Kradenan	12 bulan	284.404.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah Dokumen Rencana Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan yang disusun				1 dokume n							1 dokum en		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				6 kali							6 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali							12 kali		
		Jumlah Fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan yang dilaksanakan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan Pendataan Anak Usia Sekolah yang tidak Sekolah				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan				1 kali							1 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		penyuluhan/pelatihan yang dilaksanakan													
		Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan			924 buah							924 buah			
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan			4 kali							4 kali			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi			62 RT/RW							62 RT/RW			
		Jumlah strip gula darah yang diadakan			67 paket							67 paket			
		Jumlah taman baca yang difasilitasi			1 lokasi							1 lokasi			
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.1	KECAMATAN						321.277.000							321.027.000	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	321.277.000						100 persen	321.027.000	
7.1.3.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	321.277.000						100 persen	321.027.000	
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sarpras lingkungan/warga Kelurahan Kuripan Kertoharjo	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lokasi sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang dibangun/dipelihara				2 lokasi	89.107.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sarpras lingkungan/warga Kelurahan Kuripan Kertoharjo	2 lokasi	88.857.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah lokasi sarana dan prasarana transportasi yang dibangun/dipelihara				2 lokasi									
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	219.670.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	Dana Transfer Umum-Dana		12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Sarpras lingkungan/warga Kelurahan	12 bulan	219.670.000	Kecamatan Pekalongan Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Alokasi Umum			pelayanan publik.	n Kuripan Kertoharj o			
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				6 kali							6 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				10 kali							10 kali		
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali							12 kali		
		Jumlah Fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan yang dilaksanakan				12 kali							12 kali		
		Jumlah Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah Kegiatan Pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida yang				1 kali							1 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		dilaksanakan													
		Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan			1365 buah							1365 buah			
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan			4 kali							4 kali			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi			37 RT/RW							37 RT/RW			
		Jumlah strip gula darah yang diadakan			34 paket							34 paket			
		Jumlah taman baca yang difasilitasi			1 lokasi							1 lokasi			
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.1	KECAMATAN					385.056.000							384.806.000		
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	385.056.000					100 persen	384.806.000		
7.1.3.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	385.056.000					100 persen	384.806.000		
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sarpras lingkungan/warga Kelurahan Kuripan Yosorejo	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan PLPBK yang dilaksanakan				1 kali	96.745.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sarpras lingkungan/warga Kelurahan Kuripan Yosorejo	1 kali	96.495.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah lokasi sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang dibangun/dipelihara				2 lokasi							2 lokasi		
		Jumlah lokasi sarana dan prasarana transportasi yang dibangun/dipelihara				2 lokasi							2 lokasi		
7.1.3.	Pemberdayaan	Jumlah bulan fasilitasi BOP				12 bulan	275.811.000	Kota Pekalongan, Pekalongan	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	12. Penerapan MRI secara bertahap	Sarpras lingkungan	12	275.811.000	Kecamatan Pekalongan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.02.3	Masyarakat di Kelurahan	BKM						Selatan, Kuripan Yosorejo	Umum- Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	n/warga Keluraha n Kuripan Yosorejo	bulan		Selatan
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				6 kali							6 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				10 kali							10 kali		
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali							12 kali		
		Jumlah Fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan Pendataan Anak Usia Sekolah yang tidak Sekolah				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida yang				1 kali							1 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		dilaksanakan													
		Jumlah kegiatan penyuluhan/pelatihan yang dilaksanakan			1 kali							1 kali			
		Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan			981 buah							981 buah			
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan			4 kali							4 kali			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi			62 RT/RW							62 RT/RW			
		Jumlah strip gula darah yang diadakan			34 paket							34 paket			
		Jumlah taman baca yang difasilitasi			1 lokasi							1 lokasi			
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.1	KECAMATAN					350.794.000							350.544.000		
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	350.794.000					100 persen	350.544.000		
7.1.3.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	350.794.000					100 persen	350.544.000		
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sarpras lingkungan/warga Kelurahan Sokoduwet	1 dokumen	12.500.000 Kecamatan Pekalongan Selatan	
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan PLPBK yang dilaksanakan				1 kali	96.745.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sarpras lingkungan/warga Kelurahan Sokoduwet	1 kali	96.495.000 Kecamatan Pekalongan Selatan	
		Jumlah lokasi sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang dibangun/dipelihara				1 lokasi						1 lokasi			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah lokasi sarana dan prasarana transportasi yang dibangun/dipelihara				2 lokasi						2 lokasi			
7.1.3. 2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	241.549.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sarpras lingkungan/warga Kelurahan Sokoduwet	12 bulan	241.549.000	Kecamatan Pekalongan Selatan
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				6 kali							6 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali							12 kali		
		Jumlah fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan wilayah kelurahan yang dilaksanakan				12 kali							12 kali		
		Jumlah Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular				3 kali							3 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		yang dilaksanakan													
		Jumlah kegiatan Pendataan Anak Usia Sekolah yang tidak Sekolah			1 kali							1 kali			
		Jumlah kegiatan pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida yang dilaksanakan			1 kali							1 kali			
		Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan			754 buah							754 buah			
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan			4 kali							4 kali			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi			50 RT/RW							50 RT/RW			
		Jumlah strip gula darah yang diadakan			34 paket							34 paket			
		Jumlah taman baca yang difasilitasi			1 lokasi							1 lokasi			
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.1	KECAMATAN					394.218.000						393.968.000			
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	394.218.000					100 persen	393.968.000		
7.1.3.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	394.218.000					100 persen	393.968.000		
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sarpras lingkungan/warga Kelurahan Banyurip	1 dokumen	12.500.000 Kecamatan Pekalongan Selatan	
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan PLPBK yang dilaksanakan				1 kali	99.245.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sarpras lingkungan/warga Kelurahan Banyurip	1 kali	98.995.000 Kecamatan Pekalongan Selatan	
		Jumlah lokasi sarana dan prasarana lingkungan				2 lokasi						2			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		permukiman yang dibangun/dipelihara										lokasi			
		Jumlah lokasi sarana dan prasarana transportasi yang dibangun/dipelihara			2 lokasi							2 lokasi			
7.1.3. 2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM			12 bulan	282.473.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Sarpras lingkungan/warga Kelurahan Banyurip	12 bulan	282.473.000	Kecamatan Pekalongan Selatan	
		Jumlah bulan Fasilitasi BOP LPM			12 bulan							12 bulan			
		Jumlah Bulan Fasilitasi Sekretrariat BKM			12 bulan							12 bulan			
		Jumlah Dokumen Rencana Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan yang disusun			1 dokume n							1 dokum en			
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan			7 kali							7 kali			
		Jumlah Fasilitasi kegiatan FKSS yang di laksanakan			6 kali							6 kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan			1 kali							1 kali			
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan			12 kali							12 kali			
		Jumlah fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan wilayah kelurahan yang dilaksanakan			12 kali							12 kali			
		jumlah fasilitasi program peningkatan kwalitas kawasan pemukiman KOTAKU) yang dilaksanakan			1 kali							1 kali			
		Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan			1 kegiatan							1 kegiat an			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan Pendataan Anak Usia Sekolah yang tidak Sekolah				1 kali							1 kali		
		Jumlah Kegiatan Pengendalian Pemakaian Pupuk dan Pestisida yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan				783 buah							783 buah		
		Jumlah Rakor TKPK Tingkat Kelurahan Yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				66 RT/RW							66 RT/RW		
		jumlah strip gula darah yang diadakan				34 paket							34 paket		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi							1 lokasi		
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.1	KECAMATAN						9.311.286.000							-	
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	9.002.325.000						100 persen	-	
7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	122.500.000						100 Perse n	-	
7.1.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun				2 dokume n	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Kecamat an Pekalong	2 dokum en	-	Kecamatan Pekalongan Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
								Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.	an Barat				
7.1.1. 2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan Perubahan RKA yang disusun				2 dokume n	3.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Pekalong an Barat	2 dokum en	-	Kecamatan Pekalongan Barat	
7.1.1. 2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kecamatan				12 bulan	114.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Pekalong an Barat	12 bulan	-	Kecamatan Pekalongan Barat	
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kel. Bendan Kergon				12 bulan										12 bulan
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kel. Medono				12 bulan										12 bulan
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan										12 bulan
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kel. Podosugih				12 bulan										12 bulan
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kel. Pringrejo				12 bulan										12 bulan
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kel. Sapuro Kebulen				12 bulan										12 bulan
		Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah Kel. Tirta				12 bulan										12 bulan
		Jumlah dokumen evaluasi				4										4

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		renja yang disusun				dokumen							dokumen		
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan Perubahan)				2 dokumen							2 dokumen		
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 Laporan Pemantauan RTP) yang disusun				5 dokumen							5 dokumen		
7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	7.401.700.000						100 Persen		-
7.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	7.203.700.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Barat	12 bulan		- Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan kecamatan				12 bulan	195.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Barat	12 bulan		- Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kel. Bendan Kergon				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kel Medono				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kel. Podosugih				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kel. Pringrejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kel. Sapuro Kebulen				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Kel. Tirta				12 bulan						12 bulan			
7.1.1. 2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan SKPD yang disusun				1 dokume n	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Pekalong an Barat	1 dokum en	-	Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.1. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	18.896.000						100 Perse n	-	
7.1.1. 2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam Hari Jadi dan Karnaval Batik				2 kali	18.896.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kec. Pekalong an Barat	2 kali	-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah pakaian dinas yang diadakan				7 steel							7 steel		
7.1.1. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	432.426.000						100 Perse n	-	
7.1.1. 2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kecamatan				12 bulan	8.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Pekalong an Barat	12 bulan	-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kel. Bendan Kergon				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kel. Medono				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kel. Podosugih				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kel. Pringrejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kel. Sapuro Kebulen				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kel. Tirta				12 bulan							12 bulan		
7.1.1. 2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kecamatan				12 bulan	149.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Barat	12 bulan	-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kel. Bendan Kergon				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kel. Medono				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kel. Podosugih				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kel. Pringrejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kel. Sapuro Kebulen				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Kel. Tirto				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan Kecamatan				5 unit							5 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kel. Bendan Kergon				2 unit							2 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kel. Medono				2 unit							2 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kel. Pasirkatonkramat				2 unit							2 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kel. Podosugih				2 unit							2 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kel. Pringrejo				2 unit							2 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kel. Sapuro Kebulen				2 unit							2 unit		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada Kel. Tirto				2 unit							2 unit		
7.1.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kecamatan,				12 bulan	10.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Pekalong an Barat	12 bulan	-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Kel. Bendan Kergon													
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kel. Medono			12 bulan							12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kel. Pasirkratonkramat			12 bulan							12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kel. Podosugih			12 bulan							12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kel. Pringrejo			12 bulan							12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kel. Sapuro Kebulen			12 bulan							12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga Kel. Tirto			12 bulan							12 bulan			
7.1.1. 2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kecamatan			11 bulan	191.326.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Barat	11 bulan	-	Kecamatan Pekalongan Barat	
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kel. Bendan Kergon			11 bulan							11 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kel. Medono			11 bulan							11 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kel. Pasirkratonkramat			11 bulan							11 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kel. Podosugih			11 bulan							11 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kel. Pringrejo			11 bulan							11 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kel.			11 bulan							11 bulan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Sapuro Kebulen													
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Kel. Tirto				11 bulan						11 bulan			
7.1.1. 2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumla bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan kel. Sapuro Kebulen				12 bulan	40.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Pekalong an Barat	12 bulan	- <	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		undangan Kel. Bendan Kergon													
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kel. Medono				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kel. Podosugih				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan Peraturan Perundang-undangan Kel. Sapuro Kebulen				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kel. Tirto				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan peyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan Kel. Pringrejo				12 bulan						12 bulan			
7.1.1. 2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				7 org/kl	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Barat	7 org/kl	-	Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.1. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	50.000.000						100 Perse n	-	
7.1.1. 2.07.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terealisasi pembangunannnya pada Kecamatan				1 unit	50.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Barat	1 unit	-	Kecamatan Pekalongan Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.1. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	806.152.000						100 Perse n	-	
7.1.1. 2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan				12 bulan	10.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Pekalong an Barat	12 bulan	-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kel. Bendan Kergon				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kel. Medono				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kel. Podosugih				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kel. Pringrejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat Kel. Sapuro Kebulen				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan surat menyurat Kel. Tirto				12 bulan							12 bulan		
7.1.1. 2.08.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan									
	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kel. Bendan Kergon		12 bulan			12 bulan									
	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kel.		12 bulan			12 bulan									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Medono													
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kel. Podosugih				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kel. Pringrejo				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kel. Sapuro Kebulen				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kel. Tirta				12 bulan							12 bulan		
7.1.1. 2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Kel. Bendan Kergon				12 bulan	690.402.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamatan Pekalongan Barat	12 bulan	-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Kel. Pasirkratonkramat				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor kel. podosugih				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Kel. Tirta				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor pada Kecamatan,				12 bulan							12 bulan		
7.1.1.	Pemeliharaan Barang	Persentase ketercapaian	100 Persen		100 Persen	100	170.651.000						100	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2.09	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persen						Perse n				
7.1.1. 2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala kecamatan				14 unit	109.151.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Pekalong an Barat	14 unit	-	Kecamatan Pekalongan Barat	
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kel. Bendan Kergon				3 unit										3 unit
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kel. Medono				3 unit										3 unit
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kel. Pasirkratonkramat				5 unit										5 unit
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kel. Podosugih				3 unit										3 unit
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kel. Pringrejo				4 unit										4 unit
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kel. Sapuro Kebulen				3 unit										3 unit
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala Kel. Tirto				3 unit										3 unit
7.1.1. 2.09.9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kecamatan										

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
									Alokasi Umum	Pelayanan Publik	pelayanan publik.				
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kel. Bendan Kergon				1 unit					1 unit				
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kel. Medono				2 unit					2 unit				
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kel. Pasirkratonkramat				2 unit					2 unit				
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kel. Podosugih				2 unit					2 unit				
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kel. Pringrejo				2 unit					2 unit				
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kel. Sapuro Kebulen				2 unit					2 unit				
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala Kel. Tirta				2 unit					2 unit				
7.1.1. 2.09.1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kecamatan				12 bulan	20.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Pekalong an Barat	12 bulan	-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kel. Bendan Kergon				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kel. Medono				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung				12 bulan							12 bulan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		kantor Kel. Pasirkratonkramat													
		Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kel. Pringrejo				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kel. Sapuro Kebulen				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kel. Tirta				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kel. Podosugih				12 bulan						12 bulan			
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	41.895.000					100,00 persen		-	
7.1.2. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase ketercapaian koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	41.895.000					100 Perse n		-	
7.1.2. 2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi tertib administrasi				7 keluraha n	41.895.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Kecamat an Pekalong an Barat	7 kelura han		-	Kecamatan Pekalongan Barat
												Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	0 persen		100 persen	100 persen	68.339.000					100 persen		-	
		Tingkat Kinerja	100 persen		100 persen	100						100			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat				persen							persen		
7.1.3. 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Presentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan yang dilaksanakan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	68.339.000						100 Perse n	-	
7.1.3. 2.03.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen Musrenbangkec yang disusun				1 dokume n	68.339.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	masyara kat, LKK, PKK, dsb	1 dokum en	-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah Fasilitasi kegiatan masyarakat yang dilaksanakan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah kegiatan Bunda Paud yang difasilitasi				6 kali							6 kali		
		Jumlah kegiatan catur pilar yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah TP PKK yang difasilitasi				1 unit							1 unit		
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Tingkat Kinerja Trantibum di wilayah Barat	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	188.513.000						100,00 persen	-	
7.1.4. 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	presentase tercapainya koordinasi upaya penyelenggaraan Trantibum	100 Persen		100 Persen	100 Persen	188.513.000						100 Perse n	-	
7.1.4. 2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah bulan jasa tenaga kebersihan kantor kecamatan				12 bulan	188.513.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Pekalong an Barat	12 bulan	-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah pellaksanaan patroli keamanan dan k3				48 kali							48 kali		
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	10.214.000						100,00 persen	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.5. 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	10.214.000						100 Perse n	-	
7.1.5. 2.01.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	jumlah pelaksanaan forum koordinasi kecamatan yang terlaksana				1 kali	10.214.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Pekalong an Barat	1 kali	-	Kecamatan Pekalongan Barat
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.1	KECAMATAN						421.900.000							-	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	0 persen		100 persen	100 persen	421.900.000						100 persen	-	
		Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
7.1.3. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	421.900.000						100 Perse n	-	
7.1.3. 2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kelurahan yang disusun				1 dokume n	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kel. Medono, masyara kat, PKK, LKK, dsb	1 dokum en	-	Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.3. 2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah PLPBK yang dilaksanakan				1 unit	106.745.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kel. Medono, masyara kat, PKK, LKK, dsb	1 unit	-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah sarana prasarana lingkungan permukiman / transportasi / pendidikan yang diadakan / dibangun / dikembangkan / dipelihara						1 lokasi							
7.1.3. 2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	302.655.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Medono	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Kel. Medono, masyara	12 bulan	-	Kecamatan Pekalongan Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Dana Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.	kat, PKK, LKK, dsb				
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan fasilitasi sekretariat BKM				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah fasilitasi gelar TTG yang dilaksanakan				1 kali						1 kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 kali						1 kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan emasyarakatan yang dilaksanakan				1 kali						1 kali			
		Jumlah Fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				6 kali						6 kali			
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 bulan						12 bulan			
		jumlah fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan yang dilaksanakan				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				1 kali						1 kali			
		Jumlah kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan				1 kali						1 kali			
		Jumlah kegiatan pelayanan senam kesehatan masyarakat yang dilaksanakan				11 bulan						11 bulan			
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				1 kali						1 kali			
		Jumlah kegiatan				1 kali						1 kali			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
		pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular dan Tidak menular yang dilaksanakan														
		Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah			1 kali							1 kali				
		Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan			1071 buah							1071 buah				
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan			1 kali							1 kali				
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi			92 org							92 org				
		Jumlah stirp gula darah yang diadakan			34 paket							34 paket				
		Jumlah taman baca yang difasilitasi			1 lokasi							1 lokasi				
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7.1	KECAMATAN					339.730.000									-	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	0 persen		100 persen	100 persen	339.730.000						100 persen		-	
		Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen			
7.1.3.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	339.730.000						100 Perse n		-	
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kelurahan yang disusun				1 dokume n	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	masyara kat, LKK, PKK, dsb	1 dokum en		-	Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan PLPBK yang dilaksanakan				1 kali	99.545.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	masyara kat, LKK, PKK, dsb	1 kali		-	Kecamatan Pekalongan Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah lembaga / Ormas yang difasilitasi Hibah				1 lembaga							1 lemba ga		
		Jumlah lokasi sarana dan prasarana transportasi yang diadakan/dibangun/dikemba ngkan/dipelihara				1 lokasi							1 lokasi		
		Jumlah rapat-rapat yang diadakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang diadakan/dibangun/dikemba ngkan/dipelihara				1 unit							1 unit		
		Jumlah sarana prasarana lingkungan permukiman yang diadakan/dibangun/dikemba ngkani /dipelihara				1 unit							1 unit		
7.1.3. 2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	227.685.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Podosugih	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	masyara kat, LKK, PKK, dsb	12 bulan	- <	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan													
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				4 kali						4 kali			
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				1 kali						1 kali			
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				1 kali						1 kali			
		Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah				1 kali						1 kali			
		Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan				378 buah						378 buah			
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 kali						4 kali			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				50 RT/RW						50 RT/RW			
		Jumlah Strip Gula Darah yang diadakan				67 paket						67 paket			
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi						1 lokasi			
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.1	KECAMATAN						365.530.000							-	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	0 persen		100 persen	100 persen	365.530.000					100 persen	-		
		Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	100 persen		100 persen	100 persen						100 persen			
7.1.3.	Kegiatan Pemberdayaan	Persentase ketercapaian pemberdayaan masvarakat	100 Persen		100 Persen	100	365.530.000					100 Perse	-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.02	Kelurahan	kelurahan				Persen							n		
7.1.3. 2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kelurahan yang disusun				1 dokume n	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirt o	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	masyara kat, LKK, PKK, dsb	1 dokum en		- Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.3. 2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan PLPBK yang dilaksanakan				1 kali	106.745.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirt o	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	masyara kat, LKK, PKK, dsb	1 kali		- Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah lokasi sarana prasarana lingkungan permukiman/transportasi/ke sehatan/pendidikan yang diadakan/dibangun/dikemba ngkan/dipelihara			1 lokasi										
7.1.3. 2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	246.285.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Tirt o	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	masyara kat, LKK, PKK, dsb	12 bulan		- Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah Bulan Fasilitasi BOP LPM			12 bulan				12 bulan						
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM			12 bulan				12 bulan						
		Jumlah dokumen rencana penanganan bencana tingkat Kelurahan yang disusun			1 dokume n				1 dokum en						
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan			1 kali				1 kali						
		Jumlah Fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan			6 kali				6 kali						
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan			2 kali				2 kali						
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang			1 unit				1 unit						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		dilaksanakan													
		jumlah fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan yang dilaksanakan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah				1 kali							1 kali		
		Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan				1113 buah							1113 buah		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksananakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				53 RT/RW							53 RT/R W		
		Jumlah Strip Gula Darah yang diadakan				34 paket							34 paket		
		Jumlah Taman Baca yang difasilitasi				1 lokasi							1 lokasi		
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.1	KECAMATAN						416.427.000							-	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	0 persen		100 persen	100 persen	416.427.000						100 persen	-	
		Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
		Wilayah Barat														
7.1.3. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	416.427.000						100 Perse n		-	
7.1.3. 2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kelurahan yang disusun				1 dokume n	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	masyara kat, LKK, PKK, dsb	1 dokum en		-	Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.3. 2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana prasarana lingkungan permukiman / transportasi / pendidikan yang diadakan / dibangun / dikembangkan / dipelihara				1 lokasi	99.107.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	masyara kat, LKK, PKK, dsb	1 lokasi		-	Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.3. 2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Bulan Failitasi BOP LPM				12 bulan	304.820.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Sapuro Kebulen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	masyara kat, LKK, PKK, dsb	12 bulan		-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah Bulan Fasilitasi BOP BKM				12 bulan							12 bulan			
		Jumlah Bulan Fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan							12 bulan			
		Jumlah dokumen rencana penanganan bencana tingkat Kelurahan yang disusun				1 dokume n							1 dokum en			
		Jumlah fasilitasi kegiaan FKSS yang dilaksanakan				6 kali							6 kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 kali							1 kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				2 kali							2 kali			
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				1 unit							1 unit			
		Jumlah Fasilitasi program akselerasi pembangunan				12 bulan							12			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		tingkat kelurahan yang dilaksanakan										bulan			
		Jumlah Fasilitasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				1 kali						1 kali			
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				1 kali						1 kali			
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang dilaksanakan				1 kali						1 kali			
		Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah				1 kali						1 kali			
		Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan				1617 buah						1617 buah			
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 kali						4 kali			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				76 RT/RW						76 RT/RW			
		Jumlah Strip Gula Darah yang diadakan				67 paket						67 paket			
		Jumlah Taman Baca yang difasilitasi				1 lokasi						1 lokasi			
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.1	KECAMATAN						491.087.000							-	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	0 persen		100 persen	100 persen	491.087.000						100 persen	-	
		Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
7.1.3. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat	100 Persen		100 Persen	100 Persen	491.087.000						100 Perse	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		kelurahan										n			
7.1.3. 2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kelurahan yang disusun				1 dokume n	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	masyara kat, LKK, PKK, dsb	1 dokum en	-	Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.3. 2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lokasi sarana prasarana transportasi yang diadakan / dibangun / dikembangkan / dipelihara				1 lokasi	99.107.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	masyara kat, LKK, PKK, dsb	1 lokasi	-	Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.3. 2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Bulan Failitasi BOP LPM				12 bulan	379.480.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Bendan Kergon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	masyara kat, LKK, PKK, dsb	12 bulan	-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah bulan fasilitas BOP BKM			12 bulan				12 bulan						
		Jumlah bulan fasilitas Sekretariat BKM			12 bulan				12 bulan						
		Jumlah dokumen rencana penanganan bencana tingkat Kelurahan yang disusun			1 dokume n				1 dokum en						
		Jumlah Fasiliatsi Kegiatan FKSS yang dilaksanakan			6 kali				6 kali						
		Jumlah fasilitas kegiatan BBGRM yang dilaksanakan			1 kali				1 kali						
		Jumlah fasilitas kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan			2 kali				2 kali						
		Jumlah fasilitas peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan			1 unit				1 unit						
		jumlah fasilitas program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan yang dilaksanakan			12 bulan				12 bulan						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah kegiatan penanganan Stunting yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah				1 kali							1 kali		
		Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan				1806 buah							1806 buah		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				118 RT/RW							118 RT/RW		
		Jumlah Strip Gula Darah yang diadakan				34 paket							34 paket		
		Jumlah Taman Baca yang difasilitasi				1 lokasi							1 lokasi		
		Jumlah Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.1	KECAMATAN						515.085.000							-	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	0 persen		100 persen	100 persen	515.085.000						100 persen	-	
		Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen		
7.1.3. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	515.085.000						100 Perse n	-	
7.1.3.	Peningkatan Partisipasi	Jumlah dokumen				1	12.500.000	Kota Pekalongan,	Dana	Memperkuat	12. Penerapan MRI	masyara	1	-	Kecamatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.02.1	Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	perencanaan pembangunan Kelurahan yang disusun				dokume n		Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	kat, LKK, PKK, dsb	dokum en		Pekalongan Barat
7.1.3. 2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lokasi sarana prasarana Transportasi yang diadakan / dibangun / dikembangkan / dipelihara				1 lokasi	106.745.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	masyara kat, LKK, PKK, dsb	1 lokasi	-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah Rakor PLPBK yang dilaksanakan			1 kali				1 kali						
		Jumlah sarana prasarana lingkungan permukiman yang diadakan / dibangun / dikembangkan / dipelihara			1 lokasi				1 lokasi						
7.1.3. 2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	395.840.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pasirkratonkramat	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	masyara kat, LKK, PKK, dsb	12 bulan	-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah Bulan Fasilitasi BOP LPM			12 bulan				12 bulan						
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM			12 bulan				12 bulan						
		Jumlah dokumen rencana penanganan bencana tingkat Kelurahan yang disusun			1 dokume n				1 dokum en						
		Jumlah Fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan			7 kali				7 kali						
		Jumlah Fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan			6 kali				6 kali						
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan			2 kali				2 kali						
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan			1 unit				1 unit						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
		jumlah fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan yang dilaksanakan				12 bulan							12 bulan			
		Jumlah fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali							8 kali			
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				1 kali							1 kali			
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				1 kali							1 kali			
		Jumlah kegiatan pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah				1 kali							1 kali			
		Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan				2884 buah							2884 buah			
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 kali							4 kali			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				111 RT/RW							111 RT/RW			
		Jumlah Strip Gula Darah yang diadakan				42 paket							42 paket			
		Jumlah Taman Baca yang difasilitasi				1 lokasi							1 lokasi			
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7.1	KECAMATAN						487.154.000								-	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	0 persen		100 persen	100 persen	487.154.000						100 persen	-		
		Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	100 persen		100 persen	100 persen							100 persen			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7.1.3. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	487.154.000						100 Perse n	-	
7.1.3. 2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokume n	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pringrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	masyara kat, LKK, PKK, dsb	1 dokum en	-	Kecamatan Pekalongan Barat
7.1.3. 2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Lembaga / Ormas yang difasilitasi Hibah				5 lembaga	109.951.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pringrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	masyara kat, LKK, PKK, dsb	5 lemba ga	-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah lokasi sarana prasarana Transportasi yang diadakan / dibangun / dikembangkan / dipelihara				1 lokasi							1 lokasi		
		Jumlah sarana prasarana lingkungan permukiman yang diadakan / dibangun / dikembangkan / dipelihara				1 lokasi							1 lokasi		
7.1.3. 2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	364.703.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Pringrejo	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	masyara kat, LKK, PKK, dsb	12 bulan	-	Kecamatan Pekalongan Barat
		Jumlah Bulan Fasilitasi BOP LPM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah Fasilitasi Kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah Fasilitasi Gelar TTG yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				10 kali							10 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				1 unit							1 unit		
		jumlah fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan yang dilaksanakan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan yang dilaksanakan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah Honor PPTK				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan				1590 buah							1590 buah		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				138 RT/RW							138 RT/RW		
		Jumlah stirp gula darah yang diadakan				42 paket							42 paket		
		Jumlah Taman Baca yang				1 lokasi							1		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
		Nasional								Daerah					lokasi
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.1	KECAMATAN						9.757.242.000						9.762.204.000		
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	9.410.815.000					100 persen	9.422.330.000		
7.1.1. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	115.046.000					100 persen	112.570.000		
7.1.1. 2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 dokume n	10.000.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Timur	2 dokum en	10.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah dokumen renstra perangkat daerah yang disusun			0 dokume n			0 dokum en							
7.1.1. 2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokume n	7.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Timur	2 dokum en	7.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.1. 2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	98.046.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Timur	12 bulan	95.570.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun			4 dokume n				4 dokum en						
		Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)			2 dokume n				2 dokum en						
		Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4			5 dokume n				5 dokum en						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		laporan pemantauan RTP) yang disusun													
7.1.1. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	7.737.320.000						100 persen	7.780.984.000	
7.1.1. 2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	7.700.320.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Timur	12 bulan	7.743.984.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.1. 2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	34.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Timur	12 bulan	34.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.1. 2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun				1 dokume n	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Timur	1 dokum en	3.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.1. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	18.896.000						100 persen	18.489.000	
7.1.1. 2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota				2 kali	18.896.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Timur	2 kali	18.489.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah pakaian dinas yang diadakan				14 buah							14 buah		
7.1.1. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	406.882.000						100 persen	398.134.000	
7.1.1. 2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	10.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Timur	12 bulan	10.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
7.1.1. 2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	139.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Timur	12 bulan	131.134.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				5 unit			5 unit						
7.1.1. 2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	10.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Timur	12 bulan	10.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.1. 2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				11 bulan	185.635.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Timur	11 bulan	185.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.1. 2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	32.747.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Timur	12 bulan	32.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.1. 2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang- undangan				12 bulan	16.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Timur	12 bulan	16.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.1. 2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah				7 kali	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Timur	7 kali	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.1. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	911.925.000						100 persen	896.152.000	
7.1.1.	Penyediaan Jasa Surat	Jumlah bulan penyediaan				12 bulan	10.500.000	Kota Pekalongan,	Dana	Memperkuat	12. Penerapan MRI	Kecamat	12	10.500.000	Kecamatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.08.1	Menyurat	jasa surat menyurat						Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	an Timur	bulan		Pekalongan Timur
7.1.1. 2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	101.378.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Timur	12 bulan	85.605.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.1. 2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	800.047.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Timur	12 bulan	800.047.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.1. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	220.746.000						100 persen	216.001.000	
7.1.1. 2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				14 unit	140.746.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	kecamatan Timur	14 unit	141.001.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.1. 2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala				2 unit	50.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	kecamatan Timur	2 unit	45.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.1. 2.09.1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor				12 bulan	30.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	kecamatan Timur	12 bulan	30.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	31.756.000						100,00 persen	31.072.000	
7.1.2.	Koordinasi	Persentase ketercapaian	100 persen		100 persen	100	31.756.000						100	31.072.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.01	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan				persen							persen		
7.1.2. 2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	jumlah kelurahan yang dibina tertib administrasinya				7 keluraha n	31.756.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Timur	7 kelura han	31.072.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	100 persen		100 persen	100 persen	102.138.000						100 persen	99.942.000	
7.1.3. 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase ketercapaian pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 persen		0 persen	100 persen	102.138.000						100 persen	99.942.000	
7.1.3. 2.03.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen Musrenbang Kecamatan yang disusun				1 dokume n	102.138.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kecamat an Timur	1 dokum en	99.942.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				24 kegiatan							24 kegiat an		
		Jumlah fasilitasi TP.PKK				1 unit							1 unit		
		Jumlah kegiatan Catur Pilar yang dilaksanakan				2 kegiatan							2 kegiat an		
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	206.033.000						100,00 persen	202.500.000	
7.1.4. 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase ketercapaian koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen		100 persen	100 persen	206.033.000						100 persen	202.500.000	
7.1.4. 2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah patroli trantib				48 kali	206.033.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Kecamat an Timur	48 kali	202.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								Alokasi Umum	Pelayanan Publik	pelayanan publik.				
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	6.500.000						100,00 persen	6.360.000	
7.1.5. 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 persen		0 persen	100 persen	6.500.000						100 persen	6.360.000	
7.1.5. 2.01.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat Forkopimca yang dilaksanakan				2 kali	6.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamat an Timur	2 kali	6.360.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.1	KECAMATAN						505.762.000							505.512.000	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	505.762.000						100 persen	505.512.000	
7.1.3. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	505.762.000						100 persen	505.512.000	
7.1.3. 2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokume n	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Keluraha n Kauman	1 dokum en	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.3. 2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang diadakan/dibangun/dikemba ngkan/dipelihara				7 lokasi	92.555.500	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Keluraha n Kauman	7 lokasi	92.217.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.3. 2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Fasilitasi Ketrampilan Masyarakat Pelatihan Daur Ulang Sampah				0 kali	400.706.500	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kauman	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Keluraha n Kauman	0 kali	400.795.000	Kecamatan Pekalongan Timur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Umum	Pelayanan Publik	pelayanan publik.					
		Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah bulan Fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan yang dilaksanakan				13 bulan						13 bulan			
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan						12 bulan			
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				9 kali						9 kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				4 kali						4 kali			
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				1 bulan						1 bulan			
		Jumlah Fasilitasi Keg. Kemasy				1 kali						1 kali			
		Jumlah Fasilitasi Penanganan Stunting				1 kali						1 kali			
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				12 kali						12 kali			
		Jumlah FASILITASI PMT DAN VITAMIN				1 kali						1 kali			
		Jumlah Fasilitasi pngktn Ktrmpln & Knrj PKK (Eks- DPMPPA)				1 kali						1 kali			
		Jumlah Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali						8 kali			
		Jumlah Fasilitas Kelurahan Tanggap Bencana				1 kali						1 kali			
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang				1 kali						1 kali			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		dilaksanakan/difasilitasi													
		Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan				1 bulan							1 bulan		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah				1 kali							1 kali		
		Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan				3 kali							3 kali		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				100 tube							100 tube		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi							1 lokasi		
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.1	KECAMATAN						439.180.000						438.930.000		
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	439.180.000						100 persen	438.930.000	
7.1.3.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	439.180.000						100 persen	438.930.000	
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokume n	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Keluraha n Poncol	1 dokum en	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.3.	Pembangunan Sarana	Jumlah sarana dan				3 unit	50.638.000	Kota Pekalongan,	Dana	Memperkuat	12. Penerapan MRI	Keluraha	3 unit	50.638.000	Kecamatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2.02.2	dan Prasarana Kelurahan	prasarana lingkungan pemukiman yang diadakan						Pekalongan Timur, Poncol	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	n Poncol			Pekalongan Timur
7.1.3. 2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	376.042.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kelurahan Poncol	12 bulan	375.792.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM			12 bulan				12 bulan						
		Jumlah bulan fasilitasi Penjaga Perpustakaan Kelurahan			12 bulan				12 bulan						
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM			12 bulan				12 bulan						
		Jumlah bulan fasilitasi Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan			13 bulan				13 bulan						
		Jumlah Fasilitasi Gelar TTG yang dilaksanakan			1 kegiatan				1 kegiatan						
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan			4 kali				4 kali						
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan			3 kegiatan				3 kegiatan						
		Jumlah Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna			2 kegiatan				2 kegiatan						
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan			1 kali				1 kali						
		Jumlah Fasilitasi Kelurahan Tangguh Bencana			0 kegiatan				0 kegiatan						
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan			1 kali				1 kali						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				1 kegiatan							1 kegiat an		
		Jumlah Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (TTG) yang dilaksanakan				1 kegiatan							1 kegiat an		
		Jumlah kegatan Penguatan Kapasitas LKK				2 kegiatan							2 kegiat an		
		Jumlah Kegiatan Pelatihan Pengembangan UMKM yang difasilitasi				1 kegiatan							1 kegiat an		
		Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi				1 kegiatan							1 kegiat an		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				1 kegiatan							1 kegiat an		
		Jumlah kegiatan Pendataan Anak Usia Sekolah Yang Tdk Sekolah				1 kegiatan							1 kegiat an		
		Jumlah kegiatan Sosialisasi Radikalisme				0 kegiatan							0 kegiat an		
		Jumlah PMT Balita Kurang Gizi / Kurus yang diadakan				2583 dos							2583 dos		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah RT / RW yang difasilitasi				81 orang							81 orang		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				34 pak							34 pak		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi							1 lokasi		
		Kegiatan Penanganan Stunting yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.1	KECAMATAN						374.164.000							373.914.000	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	374.164.000						100 persen	373.914.000	
7.1.3. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	374.164.000						100 persen	373.914.000	
7.1.3. 2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun				1 dokume n	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Keluraha n Klego	1 dokum en	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.3. 2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lokasi sarana dan prasarana transportasi yang diadakan/dibangun/dikemba ngkan/dipelihara				2 lokasi	82.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Keluraha n Klego	2 lokasi	82.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.3. 2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Honor PPTK				2 orang/bu lan	279.664.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Keluraha n Klego	2 orang/ bulan	279.414.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah BGRM yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah Buku Perpustakaan yang diadakan				20 buah							20 buah		
		Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja Karang Taruna yang dilaksanakan				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah Fasilitas peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah Fasilitas program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan yang dilaksanakan				13 kali							13 kali		
		Jumlah Fasilitas program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah Fasilitas Senam Sehat				25 orang							25 orang		
		Jumlah Iuran Jaminan/ Asuransi Bagi Non PNS				12 rupiah/bulan							12 rupiah/bulan		
		Jumlah kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan				0 kali							0 kali		
		Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan/difasilitasi				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya yang				1 kali							1 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
		dilaksanakan														
		Jumlah kegiatanSosialisasi Bahaya Pergaulan Bebas bagi Remaja/ Anak yang dilaksanakan				0 kali							0 kali			
		Jumlah kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Pendidikan Karakter Pemuda yang dilaksanakan				0 kali							0 kali			
		Jumlah Pendataan Anak Usia Sekolah yg tidak sekolah yang dilaksanakan				2 RT							2 RT			
		Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan				1 bulan							1 bulan			
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 kali							4 kali			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				64 rt/rw							64 rt/rw			
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				1 paket							1 paket			
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi							1 lokasi			
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7.1	KECAMATAN						332.782.000							100 persen	332.532.000	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	332.782.000						100 persen	332.532.000		
7.1.3. 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	332.782.000						100 persen	332.532.000		
7.1.3. 2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun				1 doku	15.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Gamer	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Keluraha n Gamer	1 doku	15.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur	
7.1.3. 2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lokasi sarpras transportasi, yang dibangun/dipelihara				1 lokasi	68.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Gamer	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas	Keluraha n Gamer	1 lokasi	51.250.000	Kecamatan Pekalongan Timur	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Umum	Pelayanan Publik	pelayanan publik.					
		Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang diadakan/dibangun/dikemba ngkan/dipelihara				1 unit						1 unit			
7.1.3. 2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Fasilitasi Pendataan Anak Usia Sekolah yang tidak sekolah				33 RT	249.782.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Keluraha n Gamer	33 RT	266.282.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan Fasilitasi Fasilitator Kelurahan				13 bulan							13 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah Fasilitasi Gelar TTG yang dilaksanakan				1 kegiatan							1 kegiat an		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				8 kali							8 kali		
		Jumlah Fasilitasi Kegiatan GERMAS bagi warga masyarakat Gamer				45 kegiatan							45 kegiat an		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah Fasilitasi Kegiatan Sosialisasi Tanggap Bencana bagi warga masyarakat Gamer				1 kegiatan							1 kegiat an		
		Jumlah Fasilitasi Pelatihan Tata Rias Pengantin bagi warga Gamer				1 kegiatan							1 kegiat an		
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan				8 kali							8 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		dan kinerja PKK yang dilaksanakan													
		Jumlah Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				8 kali							8 kali		
		Jumlah Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (TTG) yang dilaksanakan				1 kegiatan							1 kegiat an		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				2 kali							2 kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah personil RT dan RW yang dibina				42 orang							42 orang		
		Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan				1701 bulan							1701 bulan		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				4 kali							4 kali		
		Jumlah strip gula darah yang diadakan				34 paket							34 paket		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi							1 lokasi		
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.1	KECAMATAN						404.552.000							404.302.000	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	404.552.000						100 persen	404.302.000	
7.1.3.	Kegiatan Pemberdayaan	Persentase ketercapaian	100 persen		100 persen	100	404.552.000						100	404.302.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.02	Kelurahan	pemberdayaan kelurahan				persen							persen		
7.1.3. 2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokume n	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Noyontaansari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Keluraha n Noyontaa nsari	1 dokum en	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.3. 2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lokasi sarana dan prasarana transportasi yang diadakan/dibangun/dikemba ngkan/dipelihara				2 lokasi	97.765.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Keluraha n Noyontaa nsari	2 lokasi	97.515.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang diadakan/dibangun/dikemba ngkan/dipelihara				2 unit							2 unit		
7.1.3. 2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Fasilitasi PMT dan Vitamin (Eks.Dinkes)				0 dos	294.287.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Noyontaansari	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Keluraha n Noyontaa nsari	0 dos	294.287.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Iuran Jaminan Kecelakaan untuk Non PNS				0 orang/bu lan							0 orang/ bulan		
		Iuran Jaminan Kematian untuk Non PNS				0 orang/bu lan							0 orang/ bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah Fasilitasi Gelar TTG yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah Fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (TTG) yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi				74 RT/RW							74 RT/RW		
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi							1 lokasi		
		Pendataan Anak Usia sekolah yang tidak sekolah (Jml RT*50rb)				0 orang							0 orang		
		Pengadaan Strip Gula Darah				0 tube							0 tube		
7	UNSUR KEWILAYAHAN														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
7.1	KECAMATAN					445.637.000							445.387.000			
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	445.637.000						100 persen	445.387.000		
7.1.3.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	445.637.000						100 persen	445.387.000		
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokumen	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Setono	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kelurahan Setono	1 dokumen	12.500.000	Kecamatan Pekalongan Timur	
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang diadakan/dibangun/dikembangkan/dipelihara				3 unit	77.638.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Setono	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kelurahan Setono	3 unit	77.638.000	Kecamatan Pekalongan Timur	
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Fasilitasi keg. Kemasyarakatan (jalan sehat)				0 kali	355.499.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Setono	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kelurahan Setono	0 kali	355.249.000	Kecamatan Pekalongan Timur	
		Fasilitasi Kelurahan Tanggung Bencana				1 kali										1 kali
		iuran jaminan kecelakaan untuk Non PNS				0 orang/bulan										0 orang/bulan
		iuran jaminan kematian untuk non PNS				0 orang/bulan										0 orang/bulan
		Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan										12 bulan
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan										12 bulan
		Jumlah bulan fasilitasi Sekretariat BKM				12 bulan										12 bulan
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				7 lokasi										7 lokasi
		Jumlah fasilitasi kegiatan				7 kali										7 kali

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		FKSS yang dilaksanakan													
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan			12 bulan							12 bulan			
		Jumlah Fasilitasi program akselerasi pembangunan wilayah kelurahan yang dilaksanakan			13 bulan							13 bulan			
		Jumlah Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan			10 kali							10 kali			
		Jumlah kegiatan penanganan stunting yang dilaksanakan			2 kali							2 kali			
		Jumlah kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang dilaksanakan			1 kali							1 kali			
		Jumlah kegiatan pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida yang dilaksanakan			1 kali							1 kali			
		Jumlah PMT dan Vitamin yang diadakan			3 bulan							3 bulan			
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan			4 kali							4 kali			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi			92 RT/RW							92 RT/RW			
		Jumlah strip gula darah yang diadakan			1 paket							1 paket			
		Jumlah taman baca yang difasilitasi			8 lokasi							8 lokasi			
		Pendataan Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah			1 kali							1 kali			
		Peningkatan kapasitas			1 kali							1 kali			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
		Nasional								Daerah					
		kelembagaan LKK													
		PPTK Kegiatan				0 kali						0 kali			
		senam sehat kelurahan setono				1 kali						1 kali			
7	UNSUR KEWILAYAHAN														
7.1	KECAMATAN						359.331.000						359.081.000		
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	359.331.000						100 persen	359.081.000	
7.1.3.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	100 persen		100 persen	100 persen	359.331.000						100 persen	359.081.000	
7.1.3.2.02.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan yang disusun				1 dokum en	15.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kali Baros	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Keluraha n Kali Baros	1 dokum en	15.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang diadakan/dibangun/dikemba ngkan/dipelihara				2 unit	70.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kali Baros	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Keluraha n Kali Baros	2 unit	70.000.000	Kecamatan Pekalongan Timur
7.1.3.2.02.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah bulan fasilitasi BOP BKM				12 bulan	274.331.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Kali Baros	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Keluraha n Kali Baros	12 bulan	274.081.000	Kecamatan Pekalongan Timur
		Jumlah bulan fasilitasi BOP LPM				12 bulan							12 bulan		
		Jumlah bulan fasilitasi Fasilitator Kelurahan				13 bulan							13 bulan		
		Jumlah fasilitasi kegiatan BBGRM yang dilaksanakan				7 kali							7 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan FKSS yang dilaksanakan				1 kali							1 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan kelurahan tangguh bencana				1 kali							1 kali		
		Jumlah fasilitasi kegiatan				1 kali							1 kali		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		kemasyarakatan yang dilaksanakan													
		Jumlah fasilitasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular			1 kali							1 kali			
		Jumlah fasilitasi penanganan stunting			1 kali							1 kali			
		Jumlah Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK yang dilaksanakan			1 kali							1 kali			
		Jumlah fasilitasi PMT dan Vitamin bagi balita			3 bulan							3 bulan			
		Jumlah Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (KOTAKU) yang dilaksanakan			1 kali							1 kali			
		Jumlah Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman (TTG) yang dilaksanakan			0 kali							0 kali			
		Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan			30 kali							30 kali			
		Jumlah kegiatan pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida yang dilaksanakan			1 kali							1 kali			
		Jumlah kegiatan Senam yang difasilitasi			45 kali							45 kali			
		Jumlah pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah			38 RT							38 RT			
		Jumlah rakor TKPK tingkat kelurahan yang dilaksanakan			1 kali							1 kali			
		Jumlah RT/RW yang difasilitasi			47 RT/RW							47 RT/RW			
		Jumlah strip gula darah			1 paket							1			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
		Nasional								Daerah					
											yang diadakan				
		Jumlah taman baca yang difasilitasi				1 lokasi						1 lokasi			
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														
8.1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						3.487.335.000						3.461.837.000		
8.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen		100 persen	100 persen	1.881.090.000						100 persen	1.886.872.000	
8.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	11.142.000						100 persen	10.902.000	
8.1.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun				2 dokumen	2.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbang pol	2 dokumen	2.500.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun				2 dokumen	1.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbang pol	2 dokumen	1.500.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah				12 bulan	7.142.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbang pol	12 bulan	6.902.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
		4 dokumen						4 dokumen							
		2 dokumen						2 dokumen							
		5 dokumen						5 dokumen							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
		Nasional								Daerah					
		laporan pemanatauan RTP) yang disusun													
8.1.1. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	1.663.026.000					100 persen	1.672.501.000		
8.1.1. 2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	1.628.526.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbang pol	12 bulan	1.638.001.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1. 2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan				12 bulan	33.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbang pol	12 bulan	33.000.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1. 2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan Akhir SKPD yang disusun				1 dokume n	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbang pol	1 dokum en	1.500.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	9.500.000					100 persen	9.500.000		
8.1.1. 2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah keikutsertaan dalam event tingkat kota				2 kali	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbang pol	2 kali	9.500.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen		100 persen	100 persen	95.215.000					100 persen	93.416.000		
8.1.1. 2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12 bulan	3.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbang pol	12 bulan	3.500.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1. 2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos				12 bulan	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya	Kesbang pol	12 bulan	30.000.000	Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	peningkatan kualitas pelayanan publik.				
		jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan				12 bulan						12 bulan			
8.1.1. 2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga				12 bulan	4.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbang pol	12 bulan	4.000.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1. 2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman				12 bulan	17.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbang pol	12 bulan	18.000.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1. 2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan				12 bulan	8.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbang pol	12 bulan	8.300.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1. 2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan surat kabar /majalah dan peraturan perundang- undangan				12 bulan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbang pol	12 bulan	2.500.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1. 2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	fasilitasi kunjungan tamu				0 bulan	-	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbang pol	0 bulan	-	Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1. 2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luara daerah				30 kali	29.415.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbang pol	30 kali	27.116.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa	100 persen		100 persen	100 persen	61.191.000						100 persen	60.419.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
8.1.1. 2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat				12 bulan	1.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbang pol	12 bulan	1.000.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1. 2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	29.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbang pol	12 bulan	29.600.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1. 2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor				12 bulan	30.591.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	Kesbang pol	12 bulan	29.819.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen		100 persen	100 persen	41.016.000						100 persen	40.134.000	
8.1.1. 2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara secara rutin/berkala				8 unit	25.016.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	0	8 unit	24.134.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1. 2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin berkala				1 unit	8.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	0	1 unit	8.000.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.1. 2.09.1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berala peralatan dan perlengkapan grdung kantor				12 bulan	8.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	0	12 bulan	8.000.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI	Persentase etnis/suku/agama/ormas	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	285.892.000						100,00 persen	280.833.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan													
8.1.2. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, pelaksanaan upacara bendera dan korp musik	100 persen		100 persen	100 persen	285.892.000						100 persen	280.833.000	
8.1.2. 2.01.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah event terkait penguatan ideologi wawasan kebangsaan dan bela negara				4 kali	20.800.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan konduktivitas wilayah.	Kesbang pol	4 kali	20.000.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.2. 2.01.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah sosialisasi penguatan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan				10 kali	104.792.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan konduktivitas wilayah.	Kesbang pol	10 kali	100.533.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.2. 2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan pembinaan korp musik				13 kali	140.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan konduktivitas wilayah.	Kesbang pol	13 kali	140.300.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
		jumlah upacara tingkat kota yang dilaksanakan				13 kali							13 kali		
8.1.2. 2.01.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah pembinaan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan bagi pelajar dan mahasiswa				2 kali	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan konduktivitas wilayah.	Kesbang pol	2 kali	20.000.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	16,00 lembaga		0,00 lembaga	16,00 lembaga	874.298.000						16,00 lemba ga	856.583.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK														
8.1.3. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik	100 persen		100 persen	100 persen	874.298.000						100 persen	856.583.000	
8.1.3. 2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	jumlah peserta sosialisasi yang diikuti 9 parpol				18 orang	774.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Kesbang pol	18 orang	774.700.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.3. 2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pendidikan politik				400 orang	99.598.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Kesbang pol	400 orang	81.883.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	139.279.000						100,00 persen	136.283.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	ORGANISASI KEMASYARAKATAN														
8.1.4. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	jumlah pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat	7 kali		7 kali	7 kali	139.279.000					7 kali	136.283.000		
8.1.4. 2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah kelembagaan ormas yang dibina				7 lembaga /ormas	139.279.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Kesbang pol	7 lemba ga/or mas	136.283.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami terntang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	213.190.000						100,00 persen	209.693.000	
8.1.5. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	jumlah pembinaan bidang Ketahanan Ekonomi dan sosial budaya	6 kali		1 kali	1 kali	213.190.000						1 kali	209.693.000	
8.1.5. 2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah sosialisasi FORKOMKON dan pembinaan ormas				2 kali	213.190.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.	Kesbang pol	2 kali	209.693.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
		1 kali						1 kali							
		20 kali						20 kali							
8.1.6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100,00 persen		100,00 persen	100,00 persen	93.586.000						100,00 persen	91.573.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompo k Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL														
8.1.6. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan rencana penanganan konflik sosial yang disusun	6 laporan		1 laporan	1 laporan	93.586.000						1 lapora n	91.573.000	
8.1.6. 2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	jumlah dokumen pelaporan pengawasan orang asing yang disusun				4 dokume n	93.586.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan konduktivitas wilayah.	Kesbang pol	4 dokum en	91.573.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
	Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	jumlah peserta sosialisasi yang diberikan pemahaman kewaspadaan dini				100 orang			100 orang						
	Penanganan Konflik di Daerah	jumlah peserta sosialisasi yang diberikan pemahaman penanganan konflik sosial				100 orang			100 orang						
TOTAL							1.040.255.723.000							1.046.050.320.056	

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

5.2 KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023

Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab sebelumnya, maka kerangka pendanaan dan pagu indikatif Belanja Daerah untuk tahun 2023 disajikan dalam Tabel 5.2 berikut.

**Tabel 5.2 Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif
Kota Pekalongan Tahun 2023**

URAIAN	PROYEKSI 2023
PENDAPATAN	958.646.537.000
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	230.163.583.000
Pendapatan Pajak Daerah	92.400.000.000
Hasil Retribusi Daerah	18.132.193.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.473.378.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	113.158.012.000
PENDAPATAN TRANSFER	706.104.314.000
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	616.144.097.000
Bagi Hasil Pajak	23.583.183.000
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.504.841.000
Dana Alokasi Umum	426.399.738.000
Dana Alokasi Khusus	134.656.335.000
Dana Insentif Daerah	30.000.000.000
Transfer Pemerintah Provinsi	89.960.217.000
Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi	78.202.217.000
Bantuan Keuangan Provinsi	11.758.000.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	22.378.640.000
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	22.378.640.000
Pendapatan Hibah	0
BELANJA	1.040.255.723.000
PEMBIAYAAN	81.609.186.000
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	93.209.186.000
Penggunaan SiLPA	93.209.186.000
Pencairan Dana Cadangan	0
Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.600.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	6.000.000.000
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.600.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0

Sumber : BPKAD Kota Pekalongan, 2022

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH TAHUN 2023

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2023, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023

NO	INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	SATUAN	TARGET 2023
1	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,30
2	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	116,21
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	7,91
4	Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	9,92
5	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	2,00
6	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,43
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	59,14
8	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00
9	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	70,54
11	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	93,72
12	Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	1.027,00
13	Indeks Kualitas Air	indeks	35,36
14	Indeks Kualitas Lahan	indeks	23,60
15	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	7,00
16	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00
17	Persentase pelayanan sampah	persen	70,12
18	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	kategori	B
19	Persentase keterhubungan jalan	persen	97,20
20	Pertumbuhan ekonomi	persen	2,48 - 2,83
21	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	91,11
22	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00
23	Indeks SPBE	indeks	2,95
24	IKM Kota	persen	83,64

NO	INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	SATUAN	TARGET 2023
25	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	96,00
26	Indeks Merit System	indeks	240,00
27	Nilai SAKIP Kota	skor	74,57
28	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK <i>Outcome</i>)	kategori	WTP
29	Maturitas SPIP	nilai	3,4
30	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	5

Sumber : RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, 2021

6.2 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Untuk indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disajikan dalam Tabel 6.2 merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh OPD Kota Pekalongan.

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
- Usia Harapan Hidup	Tahun	74,52	Tujuan Kota	Kota
- Angka Kemiskinan	persen	6,50	Tujuan Kota	Kota
- Indeks Pembangunan Manusia	indeks	75,52	Tujuan Kota	Kota
- Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	6,48	Tujuan Kota	Kota
- Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen	persen	74,07	Tujuan Kota	Kota
- Persentase Luas genangan Banjir dan Rob	persen	22,12	Tujuan Kota	Kota
- Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	persen	89,11	Tujuan Kota	Kota
- PDRB Perkapita	Rp. Juta/jiwa/ tahun	35,56 - 36,92	Tujuan Kota	Kota
- Jumlah konflik sosial	kasus	0,00	Tujuan Kota	Kota
- Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,30	IKU Kota	Kota
- Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	116,21	IKU Kota	Kota
Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	7,91	IKU Kota	Kota
Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	9,92	IKU Kota	Kota
- Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	2,00	IKU Kota	Kota
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	59,14	IKU Kota	Kota
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	70,54	IKU Kota	Kota

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
- Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	93,72	IKU Kota	Kota
- Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	1027,00	IKU Kota	Kota
- Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00	IKU Kota	Kota
- Persentase pelayanan sampah	persen	70,12	IKU Kota	Kota
- Pertumbuhan ekonomi	persen	2,48 - 2,83	IKU Kota	Kota
- Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00	IKU Kota	Kota
B. ASPEK PELAYANAN UMUM				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
<i>URUSAN PENDIDIKAN</i>				
- Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	persen	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
- Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	persen	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
<i>URUSAN KESEHATAN</i>				
- Persentase capaian SPM Kesehatan	persen	90,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
<i>URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</i>				
- Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome)	persen	98,80	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
- Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	persen	77,88	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
- persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	persen	88,389	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
- Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan	persen	1,09	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
- Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	regulasi	96,211	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
- Pengembangan Sarana Persampahan	persen	40,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
<i>URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</i>				

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
- Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	persen	93,74	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS				
- Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	persen	70,00	IKU Renstra	Satpol PP
- Persentase korban bencana yang ditangani	persen	100,00	IKU Renstra	BPBD
- Persentase penanganan bencana kebakaran	persen	100,00	IKU Renstra	Satpol PP
URUSAN SOSIAL				
- Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	persen	3.43	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN TENAGA KERJA				
- Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	persen	52,26	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
- Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	Indeks	28,51	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Skor Kota Layak Anak	Skor	630,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PANGAN				
- Persentase penanganan daerah rawan pangan	persen	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pangan
URUSAN PERTANAHAN				
- Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	persen	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pertanahan
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				
- Persentase tingkat pencemaran air	Persen	62,86	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
				Lingkungan Hidup
- Persentase Kenaikan Luasan RTH	Persen	0,34	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
- Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Persen	71,07	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
- Tertib Hukum Lingkungan	Persen	34,42	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
- Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	persen	88,54	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Adminduk dan Capil
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
- Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	8,55	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
- Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	persen	67,50	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PERHUBUNGAN				
- Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	persen	28,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perhubungan
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
- Indeks domain tata kelola SPBE	Indeks	2,95	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kominfo
- Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Mutu pelayanan	Baik (Nilai 76.61 – 88.30)	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kominfo
URUSAN KOPERASI DAN UKM				
- Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Rp. Trilyun	8,12	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
				Koperasi UKM
<i>URUSAN PENANAMAN MODAL</i>				
- Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Milyar Rupiah	204,28	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
<i>URUSAN KEBUDAYAAN</i>				
- Persentase peningkatan kelompok budaya	Persen	1,53	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
<i>URUSAN PERPUSTAKAAN</i>				
- Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (IKK Outcome)	indeks	20,12	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan
<i>URUSAN KEARSIPAN</i>				
- Indeks Pengawasan Kearsipan Tingkat Kota (ANRI)	indeks	73,20	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
<i>URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</i>				
- Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persen	1,21	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
- Prestasi olahraga tingkat provinsi	Cabor	14,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
<i>URUSAN STATISTIK</i>				
- Persentase ketersediaan data statistik sektoral	persen	70,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Statistik
<i>URUSAN PERSANDIAN</i>				
- Indeks tata kelola KAMI	Tingkat	I	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Persandian
<i>URUSAN PILIHAN</i>				
<i>URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN</i>				
- Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	ton	15141,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
<i>URUSAN PARIWISATA</i>				
- Tingkat Kunjungan Wisata	Orang	580.000	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
				Pariwisata
<i>URUSAN PERTANIAN</i>				
- Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Rp. Miliar	247,58	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pertanian
<i>URUSAN PERINDUSTRIAN</i>				
- Pertumbuhan Industri	persen	0,09	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
<i>URUSAN PERDAGANGAN</i>				
- Nilai ekspor perdagangan	Juta USD	26,71	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
UNSUR PENDUKUNG URUSN PEMERINTAHAN				
<i>SEKRETARIAT DAERAH</i>				
- Persentase capaian kinerja pembangunan	persen	94,00	IKU Renstra	Setda
<i>SEKRETARIAT DPRD</i>				
- Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	persen	100,00	IKU Renstra	Set DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
<i>PERENCANAAN</i>				
- Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	persen	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Perencanaan
<i>KEUANGAN</i>				
- Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	persen	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Keuangan
- Rasio PAD	persen	1,98	IKU Renstra	OPD Pengampu Keuangan
<i>KEPEGAWAIAN</i>				
- Persentase laporan SKP ASN tepat waktu	Persen	87,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Kepegawaian
<i>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</i>				
- Persentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	persen	40,00	IKU Renstra	OPD Pendidikan dan Pelatihan
<i>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</i>				
- Persentase laporan hasil litbang	persen	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Litbang
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
<i>INSPEKTORAT DAERAH</i>				

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
	- Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	persen	67,74	IKU Renstra	Inspektorat Daerah
	- Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM	OPD	13,00	IKU Renstra	Inspektorat Daerah
UNSUR KEWILAYAHAN					
KECAMATAN					
	- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum dan Pemerintahan Umum	Persen	100,00	IKU Renstra	Kec.Pekalongan Utara
	- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	100,00	IKU Renstra	Kec. Pekalongan Selatan
	- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	100,00	IKU Renstra	Kec. Pekalongan Barat
	- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	100,00	IKU Renstra	Kec.Pekalongan Timur
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	- Persentase etnis/suku /agama/ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa	persen	100,00	IKU Renstra	Badan Kesbangpol
	- Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Memahami Tata Kehidupan Politik	persen	100,00	IKU Renstra	Badan Kesbangpol
C. ASPEK DAYA SAING					
	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	50,87	Tujuan Kota	Kota
	- Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	persen	100,00	Tujuan Kota	Kota
	- Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	72,69	Tujuan Kota	Kota
	- Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,43	IKU Kota	Kota
	- Persentase satuan pendidikan	persen	100,00	IKU Kota	Kota

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
	yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan				
	- Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	IKU Kota	Kota
	- Indeks Kualitas Air	indeks	35,36	IKU Kota	Kota
	- Indeks Kualitas Lahan	indeks	23,60	IKU Kota	Kota
	- Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	7,00	IKU Kota	Kota
	- Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	kategori	B	IKU Kota	Kota
	- Persentase keterhubungan jalan	persen	97,20	IKU Kota	Kota
	- Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	91,11	IKU Kota	Kota
	- Indeks SPBE	indeks	2,95	IKU Kota	Kota
	- IKM Kota	persen	83,64	IKU Kota	Kota
	- Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	96,00	IKU Kota	Kota
	- Indeks Merit System	indeks	240,00	IKU Kota	Kota
	- Nilai SAKIP Kota	skor	74,57	IKU Kota	Kota
	- Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	kategori	WTP	IKU Kota	Kota
	- Maturitas SPIP	nilai	3,40	IKU Kota	Kota
	- Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	5,00	IKU Kota	Kota

Sumber : RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, 2021

BAB VII PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahun kedua atas RPJMD tahun 2021-2026, disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang relevan.

Berdasarkan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka prioritas pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2023 yaitu :

1. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.
2. Peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.
3. Pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan dan pengembangan kurikulum lokal berbasis ketrampilan, pengetahuan, kearifan lokal, dan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas.
4. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan jejaring dan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha.
5. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan, laki-laki, komunitas, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).
6. Pemantapan kerjasama dengan stake holder potensial untuk pembiayaan penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
7. Pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.
8. Perluasan dan peningkatan kualitas pembangunan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.
9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.
10. Peningkatan peran serta dan kerja sama komunitas dalam penyelenggaraan event seni dan budaya.
11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.
12. Penerapan MRI secara bertahap disertai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 selanjutnya akan dijadikan bahan Konsultasi Publik serta pedoman dalam menyusun penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, dan diharapkan dapat menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, dan tentu saja sejalan dengan arah kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan

dokumen rencana pembangunan secara nasional. Dengan demikian maka pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan pembangunan secara nasional.

Pekalongan, Januari 2022

WALI KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. (2021). Kota Pekalongan Dalam Angka.

www.bps.go.id Tahun 2021